

ISU-ISU KONTEMPORER

**BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN
SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

**EDITOR:
SANTOSO TRI RAHARJO**

ISU-ISU KONTEMPORER

**BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

**EDITOR
SANTOSO TRI RAHARJO**



ISBN: 978-602-0810-45-4

Judul Buku:

**ISU-ISU KONTEMPORER BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN SOSIAL, PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

Editor/Penulis:

Santoso Tri Raharjo

Penerbit:



Jl. Raya Bandung – Sumedang km 21 Sumedang

Tlp. (022) 843 88812

Website: lppm.unpad.ac.id

Email: lppm.unpad.ac.id

Bandung 45363

1 Jilid, 578: halaman, Ukuran: B5 18 X 20 cm

ISBN: 978-602-0810-45-4

Cetakan: Pertama 2015

ISBN: 978-602-0810-45-4



DAFTAR ISI

KONDISI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR BERBAHAYA Oleh: Eka Maulia Agustine, Ishartono, & Risna Resnawaty	1
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis	9
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, Oleh : Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan	17
UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN, Oleh: Tundzirawati, Binahayati Rusyidi, & Nurliana Cipta Apsari	23
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK OLEH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) Oleh: Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, & Nurliana Cipta Apsari	31
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA, Oleh: Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo	39
PERLINDUNGAN ANAK DARI BAHAYA KEKERASAN, Oleh: Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani, & Risna Resnawaty	47
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK, Oleh Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah	56
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TUA ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh Intifadah Ummuhanifah, Moch. Zainuddin, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	64
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK(PKSA) DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN, Oleh Yasmin Anwar Putri, Nandang Mulyana, & Risna Resnawaty	72
UPAYA PENANGANAN PEKERJA SEKSUAL ANAK, Oleh Puspa Sagara Asih, Hadiyanto A Rachim, & Nandang Mulyana	79
PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN ANAK ASUH DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK, Oleh, Sella Khoirunnisa, Ishartono & Risna Resnawaty	88
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN, Oleh: Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat	95
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING, Oleh: Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, & Maulana Irfan	100

PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Oleh: Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo	107
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI, Oleh; Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono	113
PENGASUHAN (<i>GOOD PARENTING</i>) BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS, Oleh: Gabriela Chrisnita Vani, Santoso Tri Raharjo, & Eva Nuriyah Hidayat	121
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ISSUE PEKERJA ANAK, Oleh: Hedi Ramdani. Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar	130
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH PERLINDUNGAN ANAK, Oleh: Nanda Aidiel Senja, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis	141
PENGARUH PEMENUHAN KESEHATAN ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK, Oleh: Dienna Karimah, Dra. Nunung Nurwati, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	149
PENERAPAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEKERJA SOSIAL OLEH RELAWAN DALAM PENDAMPINGAN KEPADA ANAK PENDERITA KANKER, Oleh: Pradini Nur'amalia Arliani, Sri Sulastri, dan Budi M. Taftazani,	159
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh: Melisa Amalia Amin, Hetty Krisnani, dan Maulana Irfan	168
HUKUM DALAM PERMASALAHAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA, Oleh: Andi Rezky Aprilianty Punagi, Ishartono, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	179
KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, Oleh: Winda Marienda, Moch. Zainuddin, & Eva Nuriyah H.	186
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH , Oleh: Mamah Halimah, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah	197
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN, Oleh: Yesi Fitriani, & Hery Wibowo	204
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT, Oleh : Endah Puspa Pratiwi, & Budhi Wibhawa	212
APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR, Oleh: Muhammad Fahmi Amrullah, Moch Zainuddin & Muhammad Fedryansyah	220

PENTINGNYA PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN, Oleh: Dwi Putri Apriyan, Ishartono, & Maulana Irfan	224
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. ANEKA TAMBANG UBPE SEBAGAI SOLUSI MASALAH PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR, Oleh: Danis Dea Rizky, Santoso Tri Raharjo, & Risna Resnawaty	231
PEKERJA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA, Oleh: Usep Rochmat, Nandang Mulyana, & Maulana Irfan	240
MENELAAH TEORI <i>DISTRIBUTIVE JUSTICE</i> PADA ISU SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, Oleh : Santo Arimartin	249
PENGARUH GADGET PADA INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA, Oleh: Inda Lestari, Agus Wahyudi Riana, & Budi M.Taftarzani	257
EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA, MALAYSIA DAN AMERIKA SERIKAT, Oleh: Adetya Nuzuliani Rahma, R.Nunung Nurwati, & Budi Muhammad taftazani	265
PELAYANAN SOSIAL BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH, Oleh: Elita Metica Tamba, Hetty Krisnani, & Arie Surya Gutama	275
PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA, Oleh: Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi	282
PEKERJA SOSIAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI, Oleh: Nurul Fadhilah Rezeki, & Binahayati Rusyidi	289
<i>THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI,</i> Oleh : Rizki Bunga Lestari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan	296
KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA, Oleh: Benediktus Vito, Hetty Krisnani, & Risna Resnawaty	313
KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT INDONESIA (PENGETAHUAN, DAN KETERBUKAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN MENTAL), Oleh: Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama	320
PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG KESETARAAN GENDER, Oleh : Resti Fauziah, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo	328
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA, Oleh: Derin Darachita Pradini, Dessy Hasanah Siti A., & Maulana Irfan	341

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA, Oleh: Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar	354
KEBERFUNGSIAN SOSIAL BURUH PEREMPUAN PADA SEKTOR INDUSTRI DALAM KELUARGA, Oleh: Dessy Fitri Pratiwi, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis	360
TUJUAN BESAR PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN, Oleh : Burhan Yusuf Abdul Aziizu	374
APLIKASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TATA RUANG DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG, Oleh: Edi Setiawan, Rudi Saprudin Darwis, & M. Fedryansyah	382
PERAN PENDAMPING BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA), Oleh: Darastri Latifah, Moch. Zainuddin, & Nandang Mulyana	388
EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA, Oleh : Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansyah	395
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh: Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo	406
<i>COMMUNITY BASED DISASTER MANAGEMENT</i> , Oleh : Ridwan Herianto, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hadiyanto A. Rachim	414
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYADANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI PERKASA PALEMBANG, Oleh : Metra Naibaho, Hetty Krisnani, & Eva Nuriyah H	420
PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> , Oleh: Fildzah A'inun N, Hetty Krisnani, & Rudi Saprudin Darwis	432
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI, Oleh: Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi	440
EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI RANAH INDUSTRI INDONESIA, Oleh: Danny Dwi Septianto, Sri Sulastri, Gigin Ginanjar Kamil Basar	449
PERKEMBANGAN PERILAKU KEPRIBADIAN REMAJA DENGAN LATAR BELAKANG KEDUA ORANG TUA BERCERAI, Oleh: Aziza Trizilvania Amadea, Santoso Tri Raharjo, & Budi M. Taftazani	457
PROMOSI KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK, Oleh: Gina Indah P. Nastia, Hadiyanto A. Rachim, & Maulana Irfan	463

PENANGANAN GIZI BURUK DENGAN PERSPEKTIF PERSON IN ENVIRONMENT OLEH PEKERJA SOSIAL, Oleh: Zulkarnain Bastari, Moch. Zainuddin, Nurliana Cipta Apsari	476
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENTAL, Oleh: Berry Choresyo, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hery Wibowo	483
PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL, Oleh: Nadira Lubis, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah	492
PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH DAN COPING BEHAVIOR SISWA SMA DALAM MENGHADAPI LINGKUNGAN SOSIAL DI SEKOLAH, Oleh: Rizkia Annisa Frabandani, Agus Wahyudi R., & Santoso Tri Raharjo	501
PEKERJA SOSIAL MEDIS DALAM MENANGANI ORANG DENGAN SKIZOPHRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT, Oleh: Ajruni Wulandestie Arifin, & Soni A. Nulhakim	513
PERAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA, Oleh: Shinta Puji Triwanti, Ishartono, & Arie Surya Gutama	522
DESA DAN KOTA DALAM POTRET PENDIDIKAN, Oleh: Azwar Yusran Anas, Agus Wahyudi Riana, & Nurliana Cipta Apsari	531
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGUATAN KELOMPOK TANI, Oleh: Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, & Muhammad Fedryansah	537
PERAN PEKERJA SOSIAL DI PERINDUSTRIAN INDONESIA, Oleh : Aries Y. Ahmadi, Hadiyanto A. Rachim, & Moch Zaenuddin	546
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMEDANG, Oleh: Muhammad Indra Andityaputra, Budhi Wibhawa, & Muhammad Fedryansyah	555

PENGANTAR

Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai berbagai isu kekinian tentang persoalan-persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Beragam tulisan tersebut dapat saja beranjak dari keperhatian penulis terhadap isu yang diamatinya. Atau juga tulisan-tulisan tersebut merupakan minat untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang persoalan sosial tertentu. Apapun tema atau topik tulisan yang tersedia dalam buku ini patut diapresiasi, sebagai bentuk kepedulian para penulis untuk dalam menuangkan gagasan dan kemudian merespon upaya-upaya perubahan positif.

Sebagian besar tulisan yang terdapat buku ini juga merupakan produk pembelajaran yang ada di Program Studi Kesejahteraan Sosial, dimana para mahasiswa dan dosen bermitra dalam membuat tulisan bersama. Gagasan tertulis dapat saja berasal dari dosen, dari mahasiswa, atau hasil diskusi antara dosen dan mahasiswa. Para staf pengajar dan mahasiswa didorong untuk membuat tulisan bersama mengenai isu kekinian kontemporer yang masih tetap menjadi perhatian dan tema hangat di masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari tulisan-tulisan hasil kerjasama ini diharapkan akan muncul gagasan-gagasan solutif terhadap berbagai isu tersebut. Sebab, salah satu persoalan atau hambatan dari pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini adalah minimnya bahan-bahan bacaan dari bidang-bidang tertentu, termasuk bidang praktek pekerjaan sosial. Sesuatu hal yang sangat musykil terjadi, apabila pengembangan profesi pekerjaan sosial dan studi kesejahteraan sosial akan berkembang dengan maju tanpa didukung dan tertopang dengan bahan-bahan bacaan (buku teks) yang cukup hasil dari kajian-kajian akademik. Padahal di satu sisi, menurut saya, bahwa pengembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sudah saatnya menjadi

perhatian yang sangat serius. Tentunya perjuangan pengembangan bidang praktek pekerjaan sosial tersebut disesuaikan dengan posisi peran dari masing-masing penggiat profesi pekerjaan sosial. Mudah-mudahan kumpulan tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi bagian kuat dari perjuangan tersebut.

Para staf pengajar program-program studi kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia, yang akan melahirkan para pekerja sosial profesional; baik yang *expert* dalam ranah mikro, meso, atau pun makro. Maka, para staf pengajar (dosen) ini memiliki tanggung jawab profesional untuk terus mengembangkan diri dalam keilmuan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, yang untuk selanjutnya ditularkan kepada para mahasiswanya. Sebab, hal ini selain sebagai tanggung jawab profesional sebagai pekerja sosial yang melekat pada diri, juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pendidik profesional.

Selain itu juga, sebagai bagian dari perjuangan untuk pengembangan profesi pekerjaan sosial, mengingat jumlah lulusan dari program-program studi pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial di Indonesia masih minim. Maka perlu kiranya memperbanyak sekolah-sekolah atau prodi-prodi kesejahteraan sosial di Indonesia. Sementara itu juga persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, muncul dengan kecepatan yang hampir tidak terkendali. Di tengah masih terdapatnya pandangan tradisional, baik di kalangan pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan upaya-upaya penanganan masalah sosial menjadi tidak efektif. Seolah-olah penanganan masalah sosial dapat ditangani oleh siapapun yang hanya bermental perduli untuk terjun-terlibat dalam pengentasan masalah sosial tersebut. Rasa perduli saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan (isu) sosial yang ada, diperlukan cara-cara yang sistematis dan profesional.

Namun, sebagai otokritik, ironisnya pula banyak lulusan-lulusan dari Perguruan Tinggi dengan Jurusan /Program Studi Kesejahteraan sosial yang telah terjebak pada *status quo*, sudah nyaman dengan kondisi dan posisinya masing-masing saat ini. Sehingga tidak jarang, sebagai kecil dari mereka, para lulusan ini mempraktekkan cara-cara pendekatan yang tidak memandirikan masyarakat, terjebak pada ruang ‘birokratis’-‘administratif’. Mereka cenderung terjebak dengan cara-cara berfikir tradisional, tidak berupaya mengembangkan diri, hanya menjalankan hal-hal rutin keseharian, dan akibatnya banyak program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan telah menimbulkan ekses negatif atau masalah sosial baru.

Negara ini sesungguhnya sangat mengapresiasi kehadiran pekerja sosial profesional, hal ini ditunjukkan dengan berbagai undang-undang, misalkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan untuk di-Undang-kan, seperti Rancangan Undang-Undang Disabilitas, dan Rancangan Undang-Undang Praktek Pekerjaan Sosial. Namun demikian suatu perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang baik, apabila penerapannya dilaksanakan secara konsisten. Sehingga kebutuhan dan penghargaan terhadap perlunya dan hadirnya para pekerja sosial di berbagai isu kesejahteraan sosial, yang bukan sekedar bersifat *curative* dan *rehabilitative* semata. Tetapi para pekerja sosial semestinya hadir di berbagai sektor sosial, yang kalau di pemerintahan bukan hanya di Kementrian Sosial saja, tetapi di berbagai kementrian lainnya sepanjang hal tersebut berkait dengan upaya-upaya fungsionalitas sosial atau pemberdayaan masyarakat. Saya fikir, kalau berbicara sektor pemerintahan, di hampir semua sektor pemerintahan para pekerja sosial dapat berkiprah, sesuai dengan ranah

praktek minatnya; apakah akan aktif di ranah mikro, meso atau makro; apakah ranah tersebut melakukan *treatment* atau pelayanan langsung (*direct service*) atau *treatment* tidak langsung (*indirect service*). Pemerintah (legislatif, yudikatif dan khususnya eksekutif) Indonesia perlu selalu didorong, diingatkan dan disadarkan; bahwa negara-negara maju umumnya ditopang dan dilandasi dengan upaya-upaya penanganan isu-isu sosial (khususnya pada sisi preventif) yang dilakukan secara serius. Negara-negara maju umumnya menyadari, bahwa kemajuan-kemajuan ekonomi dan politik yang mereka peroleh sangat ditopang oleh kondisi sosial masyarakatnya yang mapan dan mandiri. Sehingga pembiayaan dan penghargaan terhadap segala upaya untuk memantapkan kondisi sosial masyarakat memang membutuhkan sumber yang besar. Artinya, dukungan pemerintah untuk melindungi profesi pekerjaan sosial di negeri ini sangat diperlukan dan mutlak adanya.

Di sektor swasta peluang praktek pekerjaan sosial jauh lebih luas dan terbuka. Bahkan penghargaan dan pengakuan lebih terasa diberikan oleh sektor swasta. Namun demikian, masyarakat awam pada umumnya masih memahami pekerja sosial sebagai kegiatan yang hanya bersifat karitas saja. Pengakuan penuh lebih dirasakan manakala terdapat beberapa NGO (Non Government Organization) Internasional yang terlibat kegiatan sosial di Indonesia. Mereka umumnya sudah memahami siapa itu pekerja sosial. Ketika bekerja dengan mereka, maka sangat terasa sekali begitu langkanya para pekerja sosial Indonesia yang profesional. Sebab, seringkali pengelola organisasi non pemerintah (ornop) Internasional tersebut seringkali kesulitan mencari kualifikasi pekerja sosial yang dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas sosialnya di Indonesia. Demikian pula, pada lembaga-lembaga swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang aktifitas kegiatannya berelasi dengan masyarakat lokalnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga-

tenaga profesional yang mampu membangun relasi yang harmonis melalui pendekatan-pendekatan sosial.

Tulisan-tulisan yang terkumpul dalam buku ini merupakan bagian dari upaya tanpa henti (perjuangan) untuk terus belajar, dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tema-tema tulisan dalam buku ini mewakili rentang isu yang sedang berkembang saat ini. Baik tulisan yang bersifat makro seperti ketenagakerjaan, perindustrian, pertanian, pendidikan, *corporate social responsibility*; atau juga tulisan-tulisan yang bersifat mikro.

Tema-tema tulisan tentang kesejahteraan anak sangat mendominasi tulisan dalam buku ini, khususnya berkaitan dengan kondisi ‘rawan’ baik secara usia dan posisi-peran anak. Sehingga seringkali anak menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan dari lingkungan sosial terdekatnya. Selanjutnya, tulisan mengenai peran pekerja sosial atau profesi pekerjaan sosial, sebagai respon terhadap setiap tema tulisan yang dibuat oleh penulis menjadi tulisan yang paling banyak ditemui dalam buku ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua penulis yang telah menuangkan gagasan dan sarannya dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan menegakkan ‘profesi pekerjaan sosial’ di negeri sendiri.

Cipageran, Minggu 6 September 2015

Santoso Tri Raharjo
Editor

KONDISI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR BERBAHAYA

Oleh:

Eka Maulia Agustine, Ishartono, & Risna Resnawaty

Email:

ekamaulia93@gmail.com; kesosish@gmail.com; happytruz@yahoo.com

Abstrak

Anak selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik dalam aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang. Pada kenyataannya, negara dan keluarga belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Permasalahan yang menjadi sorotan adalah banyaknya pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya. Keluarga yang mengandalkan mereka untuk bekerja agar dapat memberikan kontribusi berupa materi kepada keluarga atau bahkan untuk biaya mereka bersekolah. Dan hal tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak namun juga memberikan dampak yang buruk atau negatif bagi anak sebagai calon generasi penerus bangsa. Jaminan masa depan anak akan menjadi taruhannya jika kondisi tersebut terus berlangsung di masa yang akan datang, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkannya, seolah diputus untuk kepentingan ekonomi keluarga. Pekerja anak memang tidak sepenuhnya salah, namun ada batasan-batasannya, tidak seharusnya anak mendapatkan pekerjaan yang berat seperti memikul batu karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan fisiknya, sehingga menghambat tumbuh kembang pekerja anak tersebut.

Kata kunci: anak, pekerja anak, hak anak

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah dapat terselesaikan di Indonesia. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dari kemiskinan inilah salah satu faktor pendorong yang menyebabkan adanya pekerja anak. Tuntutan ekonomi membuat sebagian anak yang hidup dengan ekonomi lemah menjadikan anak dikeluarga tersebut ikut andil dalam mencari penghasilan keluarga. Jika berbicara mengenai fenomena pekerja anak, maka Hak Asasi Manusi (HAM) yang paling banyak disorot terutama untuk hak anak. Hal ini telah menjadi perdebatan di masyarakat luas baik di Indonesia dan di seluruh Negara-negara dunia.

Sebagaimana dilansir diatas dapat dipahami bahwa anak juga memiliki hak sebagaimana haknya orang dewasa, fakta ini yang kurang diperhatikan oleh

masyarakat bahkan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Yang lebih menyedihkan bagi masa depan anak adalah kurangnya kesadaran para orang tua akan masa depan anak mereka.

Di Negara kita, dapat dilihat dengan mudah menjumpai pekerja anak baik itu sebagai pengemis, tukang semir sepatu, dan lain-lainnya di tempat umum seperti jalan raya. Masih banyak yang tidak terlihat jelas, upaya-upaya pengeksploitasian anak-anak Indonesia. Mereka dieksploitasi sebagai pekerja kasar konstruksi dan tambang tradisional, penyelam mutiara, dan bahkan menjadi pekerja seks komersial anak. Anak adalah karunia Tuhan yang seharusnya dijaga dan dipenuhi hak-haknya sebagai manusia.

Dalam konvensi Hak Anak, salah satunya anak harus mendapatkan haknya sebagai anak. Hak anak merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah, keluarga dan masyarakat.¹

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) no. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan adanya konvensi tersebut, berarti secara hukum Negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak anak-anak, baik sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Di Indonesiapun telah ada aturan tentang hak anak. Pada kenyataannya, negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Keberadaan pekerja anak merupakan salah satu contoh wajah belum terpenuhinya hak-hak anak. Dengan bekerja anak akan mempunyai tanggung jawab yang lebih jika dibandingkan dengan anak yang tidak bekerja.

Ketika anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah, maka pilihan hidupnya hanya dua, yaitu: masuk angkatan kerja atau tidak. Akan tetapi perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran bekerja. Bahkan, di lingkungan yang kondusif untuk bekerja, konsekuensi yang muncul adalah gejala putus sekolah yang sering diawali dengan menggabungkan sekolah sambil bekerja. Tjandraningsih (1995). Orang tua yang mempunyai anak yang masih dalam usia sekolah namun tidak memiliki biaya yang mencukupi anaknya untuk bersekolah yang dikarenakan ekonomi yang lemah. Sebaiknya memahami terlebih dahulu dampak dari memperkerjakan anak-anak mereka. Patut digaris bawahi bahwa anak sudah sepatutnya dipenuhi hak-hak agar tidak mempengaruhi mereka di masa yang akan datang.

Orangtua hendaknya merawat dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Langkah yang paling utama adalah orangtua menyekolahkan anak tersebut. Dimana anak-anak dapat belajar dengan semestinya dan bermain atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Tak jarang orangtua yang memaksa anaknya untuk bekerja, hal tersebut terindikasi sebagai tindakan pengeksploitasian

Mengeksploitasi anak dengan cara memperkerjakan anak Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskrimatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk

¹ Konvensi Hak Anak pasal 6

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya (Suharto, 2005). Melibatkan anak-anak dalam dunia kerja mungkin bukan menjadi suatu masalah apabila mengikuti aturan hukum yang berlaku, serta keterjaminan terpenuhinya hak anak. Memang ini menjadi pekerjaan yang besar bagi seluruh *stakeholder* untuk merancang kebijakan pengentasan hak anak.

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh tempo dikemukakan bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat, dari 6,5 juta pekerja anak berusia 6-18 tahun, sebanyak 26 persen di antaranya bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi anak. Karena itu, 1,7 juta anak tersebut harus diprioritaskan untuk ditarik dari tempat mereka bekerja di lingkungan mereka bekerja, lalu disekolahkan kembali. Mereka bekerja di jalanan, di pabrik yang berurusan dengan bahan kimia, prostitusi, bahkan bekerja di sector domestic sebagai pembantu rumah tangga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat sekitar 60 persen dari pekerja anak-anak menjadi pembantu. Tapi mereka tidak tercatat karena mereka diperkerjakan secara informasi.
(<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/173408068/17-Juta-Anak-Bekerja-di-Lingkungan-Berbahaya>, diakses tanggal 10 Desember 2014, pukul 22:31)

Dari data tersebut menjadi sebuah hal yang mencengangkan bagaimana tidak pekerja anak di Indonesia jumlahnya cukup fantastis, bahkan lebih dari satu perempatnya bekerja di sektor berbahaya dengan resiko yang lebih besar. Jumlah ini akan bertambah mengingat masih banyaknya anak yang bekerja disektor informal. Orang tua memang tidak seharusnya membebaskan anak untuk bekerja. Anak seharusnya dibiarkan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya dan menikmati masa kecilnya.

Anak adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara. Dan anak juga merupakan generasi penerus di masa yang kan datang. Yang harus dijamin pemenuhan kebutuhannya. Mereka berhak untuk mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Kondisi Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Berbahaya

Batasan mengenai siapa yang disebut anak berbeda disetiap Negara. Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan dalam *Convention In The Right Of The Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah melalui keputusan presiden (Keppres) nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sama ampai dengan 18 tahun.

Dari beberapa pengertian anak maka dapat disimpulkan bahwa, anak adalah mereka yang berusia 0-15 tahun kebawah. Adapun pada masa ini anak akan berada pada masa belajar dan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bersosialisasi

dengan teman sebayanya. Hal ini akan menjadikan anak dapat menjalani masa perkembangannya sesuai dengan yang seharusnya. Namun ada pula anak yang memutuskan untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarganya.

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (Tjandraningsih, 1995). Menurut Manurung (1998), Pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan sedang bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu. Merujuk pada pengertian pekerja anak yang telah dituliskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pekerja anak adalah tenaga kerja yang belum memasuki angkatan kerja, dan dipekerjakan dalam waktu yang panjang.

Pekerja anak seringkali tidak menyadari bahwa dirinya telah dieksploitasi. eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain yang memanfaatkan jasanya. Menurut Karundeng (2005) terdapat beberapa jenis eksploitasi anak diantaranya adalah :

- a. Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children Of The Street*)

Eksplorasi pada anak terjadi karena kurangnya perlindungan terhadap mereka, padahal secara fisik pekerja anak tidak berdaya jika dibandingkan dengan pekerja dewasa, maka anak tidak dapat melawan. Diperparah lagi dengan kondisi keluarga pekerja anak yang memiliki kondisi ekonomi lemah, dan menjadikan anak tersebut akan tunduk kepada perusahaan yang menampung pekerja anak. Hal ini dikarenakan pekerja anak membutuhkan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan keluarganya.

Jika kita berbicara tentang eksploitasi maka secara tidak langsung juga melanggar hak anak. Hak anak merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu hak anak wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Negara maupun masyarakat. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) menegaskan bahwa secara garis besar ada empat hak anak, yaitu: 1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*); 2, hak terhadap perlindungan (*protection rights*) 3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*); 4, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Untuk lebih jelasnya hak-hak dasar anak adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup yaitu memperoleh akses dan pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak seperti makanan yang cukup, air bersih dan tempat tinggal yang aman. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan.
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang yaitu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensial semaksimal mungkin. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang memadai, diberi kesempatan bermain, berekreasi dan beristirahat.

- c. Hak berpartisipasi yaitu hak untuk kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama persoalan yang berkaitan dengan anak.
- d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan yaitu hak anak yang harus dipenuhi untuk melindungi dirinya dari:
 - 1. Eksploitasi ekonomi dan seksual
 - 2. Kekerasan baik fisik maupun psikologi
 - 3. Segala bentuk diskriminasi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa anak juga memiliki hak sebagaimana halnya orang dewasa, fakta ini yang kurang diperhatikan oleh masyarakat bahkan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Yang lebih menyedihkan bagi masa depan anak adalah kurangnya kesadaran para orang tua akan masa depan anak mereka.

Pemenuhan hak anak pada pekerja anak seperti yang banyak diperbincangkan dalam realisasinya memang lemah. Contohnya seperti, pekerja anak yang mengabdikan separuh waktunya untuk bekerja secara otomatis pendidikannya akan sedikit terabaikan, waktu sepulang sekolah dihabiskan untuk bekerja, lebih parahnya lagi ada kasus pekerja anak putus sekolah karena lebih nyaman untuk bekerja. Belum lagi dalam urusan bersosialisasi dengan teman sebayanya, menghabiskan masa kecilnya dengan bermain bersama teman-teman dilingkungannya. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan pekerja anak tersebut.

Indonesia, melalui UU No.1 Tahun 2000, telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999 ini memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut Negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam konvensi dan undang-undang tersebut di atas, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan.²

Pekerjaan yang terburuk bagi anak merujuk pada pekerjaan yang berbahaya bagi anak dan memiliki resiko tinggi jika dibandingkan pekerjaan selain yang dicantumkan sebelumnya. Hal ini menjadi kekhawatiran bahwa resiko yang tinggi akan memperburuk kondisi anak yang bekerja di sector berbahaya.

Selanjutnya Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut di atas, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana.

Disadari atau tidak di Indonesia ini terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, namun ketersediaan antara pemenuhan dan peraturan dianggap masih kurang. Hal ini tidak serta merta dapat meniadakan pekerja anak. Di Negara kita ini masih ada yang beranggapan bahwa bekerja membantu orangtua adalah cerminan dari bakti terhadap orangtua. Dengan anggapan tersebut “oknum” memanfaatkannya untuk dapat mengeksploitasi anak.

Pekerja anak tidak akan menyadari bahwa dirinya telah di eksploitasi. Pekerja anak memang rentan terjadinya eksploitasi. Perusahaan tempatnya bekerja akan dengan mudah mengeksploitasi pekerja anak, terutama apabila anak bekerja di sector berbahaya. Berikut adalah 19 jenis pekerjaan terburuk atau berbahaya bagi anak menurut JARAK (jaringan kerja LSM untuk penanggulangan pekerja anak) mengidentifikasi (memorandum-penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di Indonesia, JARAK, 14 Juli 2001), yakni:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak yang diperdagangkan;
3. Anak yang bekerja di jermal;
4. Anak yang bekerja di pertambangan (intan, batu bara, marmer, pasir);
3. Anak yang menjadi pembantu rumah tangga;
4. Anak yang menjadi tukang pikul dan kuli pelabuhan;
5. Anak yang bekerja di sarana perhubungan (sebagaitukang becak, sais andong, kernet, dan lain-lain);
6. Anak yang bekerja pada pukat
7. Anak yang bekerja di perkayuan;
8. Anak yang bekerja menjadi pedagang asongan;
9. Anak bekerja menjadi penyelam mutiara;
10. Anak yang bekerja sebagai pemecah batu;
11. Anak yang bekara di daerah konflik;
12. Anak yang bekerja sebagai pemulung;
13. Anak yang bekerja sebagai nelayan;
14. Anak yang bekerja sebagai pembuat alas kaki;
15. Anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba;

² Hastadewi, Yuli. Dkk. 2004. Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada Beberapa Sektor di Tulungagung dan Probolinggo, Jawa Timur. UNICEF

16. Anak yang bekerja di sektor formal;

Acuan yang digunakan untuk menetapkan sector-sector terburuk kerja terburuk bagi anak meliputi jam kerja yang panjang (4-20 jam sehari), gaji yang dibawah standar, dan adanya risiko serta bahaya pekerjaan yang mengancam proses tumbuh kembang anak (misalnya: kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik, kematian, keracunan, dan dampak terhadap tubuh yang baru diketahui setelah jangka waktu tertentu).

Resiko dan panjangnya jam kerja kadang tidak sebanding dengan upah yang diterima anak. Motivasi menambah penghasilan keluarga menjadi salah satu alasan bahwa pekerja anak masih mempertahankan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan peran pekerja sosial. Adapun perannya adalah sebagai berikut:

1. Educator: memberikan pemahaman terhadap orangtua dan perusahaan yang mempekerjakan anak tentang dampak yang akan dirasakan oleh anak apabila perkerja anak baik itu di sektor berbahaya atau tidak.
2. Advocator: memberikan pendampingan terhadap pekerja anak
3. Konselor: membimbing klien untuk mengatasi masalahnya.

Penutup

Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengatur setiap perlindungan terhadap anak, begitu halnya dengan hak anak. Jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama, jaminan hak asasi tersebut juga diatur dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ini menjadi sebuah keprihatinan manakala Negara belum bisa sepenuhnya menjamin keberlangsungannya, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pekerja anak. Pada dasarnya semua pekerjaan dalam memperoleh upah memiliki resiko masing-masing.

Merujuk kepada beberapa penelitian bahwa anak yang bekerja cenderung mengalami perubahan pada psikis dan fisiknya. Pekerja anak menjadi lebih dewasa sebelum pada waktunya. Menjadi sebuah keprihatinan bagaimana anak tersebut menghadapi masa depannya. Terbelenggunya anak dengan pekerjaan yang dijalannya membuat anak melupakan pendidikannya.

Waktu yang mereka habiskan untuk bekerja adalah waktu mereka untuk mengenyam pendidikan dan bermain . Karena bekerja akan menghambat mereka untuk memperoleh pendidikan yang di butuhkan oleh seusianya sehingga memperoleh pekerjaan yang layak ketika mereka sudah siap bekerja. Ketertinggalan membuat mereka terkurung dalam kondisi seperti ini. Hadirnya pekerja anak memang tidak seharusnya disalahkan.

Dengan kondisi yang seperti ini tidak bisa dibiarkan situasinya terus berlarut perlu adanya pengentasan. Perlu ditangani secara serius, sehingga di masa yang akan datang kita tidak lagi mendengar adanya pekerja anak. Masalah pekerja anak masih menjadi dilematis namun tetap dilakukan upaya pencegahan dan harus mendapat perhatian serius bagi semua pihak, baik oleh pemerintah ataupun masyarakatnya sendiri. Agar situasi tersebut berlanjut atau bahkan menjadi lebih

parah dibutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah beserta seluruh stakeholder terkait. Memang tidak mudah untuk mengurangi atau bahkan meniadakan pekerja anak terutama di sektor yang berbahaya, karena hal tersebut menyangkut masalah kemiskinan terutama di Indonesia yang masih sangat tinggi. Seiring berkurangnya angka kemiskinan bisa dipastikan pekerja anak juga akan berkurang jumlahnya. Terlepas dari hal tersebut pekerja anak harus dijamin hak-haknya, dengan cara bekerja sama dengan perusahaan atau kelompok yang menaungi pekerja anak tersebut untuk lebih menjaga keselamatan dan tumbuh kembang anak tersebut agar tidak berpengaruh terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang

Referensi:

- Hastadewi, Yuli. Dkk. 2004. *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada Beberapa Sektor di Tulungagung dan Probolinggo*, Jawa Timur. UNICEF
- Huraerah, Abumsi. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa
- Hurlock, Elisabeth, B. 2006. *Psikologi perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Mallon, p, Gerald. Dkk. 2012. *Modul Latihan Pekerja Sosial yang Berpusat pada Anak dan Keluarga: Perlindungan Anak dan Rencana Permanensi*, Jakarta: Save the Children
- Rahman, Astriani. *Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*. Jakarta. Universitas Guna Darma
- Slamet, juli soemirat. 2007. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: gadjah mada university press
- Sulastri, dkk. 2007. *Pekerja anak, Pendidikan anak pekerja\Buruh, Skema Bantuan, dan Komite Sekolah (Pandangan Serikat Pekerja/Buruh)*, Jakarta. KBSI (konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)
- Suyanto, Bagong. 2003. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Referensi Lain:

<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/173408068/17-Juta-Anak-Bekerja-di-Lingkungan-Berbahaya> diakses tanggal 10 Desember 2014, pukul 22:31

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis

E-mail:

rendyhp02@gmail.com; ati.sukaati@gmail.com; rsdarwis@gmail.com

ABSTRAK

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal ini dikarenakan pada usia dini, sang anak masih dalam keadaan labil dan mudah terbawa arus kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku anak itu sendiri. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan tingkah laku anak yang diduga melakukan suatu tindakan pidana, harus bisa dibedakan dengan kasus yang dialami oleh orang dewasa. Tidak sewajarnya anak dibawah umur mendapat penyidikan yang terlalu lama, yang dapat menjadikan trauma pada perkembangan mental anak. Menurut UU no 11 tahun 2012 pasal 91 ayat 3, setelah melakukan persidangan anak harus menjalani rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak yang tersandung kasus agar bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya.

Kata kunci: Penyimpangan tingkah laku; sistem peradilan anak; perkembangan mental

Pendahuluan

Anak pada dasarnya adalah manusia yang terlahir ke dunia dan masih suci. Namun sering kali, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, ia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada yang mengasuh, tidak mendapat perawatan dan hak-hak lainnya.

Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran; belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik; masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal; masih belum semua anak-anak

kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.

Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas, dalam hal ini hak dalam perlindungan hukum. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Maka dari itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut, diperlukan adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah selayaknya bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM.

Di samping faktor-faktor yang dapat diukur kemajuannya melalui HDI, banyak hal lain yang menyangkut kualitas anak, tetapi masih sulit diatasi dan diukur karena kesulitan data dan informasi, serta kompleksitas permasalahannya. Hal tersebut termasuk tindak kekerasan terhadap anak, diskriminasi, dan minimnya anak dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan pada saat mereka tengah berhadapan dengan hukum Masalah lainnya adalah perdagangan anak termasuk pornografi dan pornoaksi. Demikian pula permasalahan yang menimpa perempuan dan anak di daerah konflik dan bencana, penyandang cacat, dan remaja, yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak azasi mereka.

Persoalan lainnya ialah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang hanya sekedar ada tapi tidak ditegakan, diskriminatif dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap anak yang sedang terjerat dan berhadapan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan, apalagi dengan mereka yang tersangkut masalah hukum. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proses hukum. Di samping itu, partisipasi anak dalam proses perkembangan hukum juga masih rendah.

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan dalam perlindungan anak dalam hukum masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Program peningkatan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan anak masih lemah. Di era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah anak berhadapan dengan hukum. Karena program-program pemberdayaan anak dan program perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children*. Komitmen tersebut pada dasarnya mendorong semua negara agar mengintegrasikan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi pada semua peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan pembangunan, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggarannya.

Tidak Terlindunginya Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah *delinkuensi* anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :

Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

- Faktor intelegentia;
- Faktor usia;
- Faktor kelamin;

- Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

- Faktor rumah tangga;
- Faktor pendidikan dan sekolah;
- Faktor pergaulan anak;
- Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan UU No. 11 tahun 2012

Harus diakui dari penelitian dan pengkajian yang mendalam setelah berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hingga berlaku ± 15 tahun bahwa Penjara bukan tempat yang baik bagi anak apalagi dengan usia pertanggung jawaban pidana yang terlalu rendah sehingga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baik melalui Advokasi Kebijakan dan pembelaan terhadap anak yang berkonflik yang dilakukan beberapa NGO / LSM dan KPAI melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi sampai perjuangan ke Parlemen sehingga

membuahkan hasil lahirnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang yang baru akan efektif berlaku pada bulan Juli 2014 ini wajib mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) dan Diversi.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 tahun 2012).

Sedangkan **diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke porses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012). Tujuan yang diharapkan dari Diversi ini adalah :

- Tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan korban;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam system peradilan pidana anak yang baru ini pada setiap tingkatan diberikan waktu masing-masing 7 (tujuh) hari diwajibkan untuk mengupayakan diversi yang diberikan terhadap Penyidik, Jaksa dan Hakim. Sedangkan waktu pembahasan dalam proses Diversi tersebut diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari pada setiap tingkatnya.

Apabila gagal atau dengan perkataan lain Diversi pada setiap tingkatan tidak berhasil dengan tenggat waktu tersebut berakhir maka proses akan tetap berjalan mulai penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan. Untuk batas usia tanggung jawab pidana anak pada usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012). Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan pada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat 1).

Macam-macam Perlindungan Kesejahteraan Anak

Siapapun yang hidup di dunia ini, mempunyai hak yang sama untuk merasakan namanya suatu keadaan yang sejahtera. Semua manusia berhak merasakan apa itu kebahagiaan, kesehatan, maupun kualitas hidup yang bisa membuat kita menjadi lebih menikmati hidup. (Migley, James.1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd).

Dalam menjalankan kehidupannya, anak harus mendapat perlindungan, antara lain:

a. Hak Anak:

- Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- Dan masih hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 1997 disertai UU Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Situasi dan Kondisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Ruang sidang dengan petugas berseragam dan rumah tahanan mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi setiap anak disepanjang hidupnya. Anak sekecil dan sedini itu harus memikul beban yang semestinya tidak ditanggung anak seusianya. Banyak pihak yang menilai bahwa proses hokum tersebut tidak mempertimbangkan aspek edukatif, konstruktif dan cenderung destruktif karena justru menimbulkan efek negatif bagi anak.

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hokum ada 7 (tujuh) Pilar Peradilan Anak yaitu : Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, Petugas Bapas, Petugas Lapas dan Warga Masyarakat. Kita mengetahui Kepolisian (Penyidik) sebagai pintu gerbang penanganan perkara anak (korban, pelaku atau saksi) sering kali justru melakukan “kekerasan dan penganiayaan” pada saat menangkap dan memeriksa dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), juga ketika anak dalam tahanan kantor polisi.

Begitu juga ketika di Kejaksaan (JPU) belum mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sering kali JPU cenderung mendukung BAP kepolisian untuk diajukan pada peradilan. Yang sebenarnya jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan / melanjutkan suatu perkara anak ketahap selanjutnya atau memberikan keputusan dengan bentuk pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut. Hal ini dengan tujuan agar untuk meminimalkan anak-anak dari kerugian lebih lanjut akibat keberadaannya dalam system peradilan pidana. Hal yang hamper sama juga terjadi dalam proses peradilan, dimana anak-anak yang berhadapan dengan hokum pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara / *advokat*, didampingi petugas dari Bapas atau didampingi orang tua atau walinya. Tetapi dalam banyak kasus anak, pengacara/*advokat*, petugas Bapas, orang tua atau walinya sering kali tidak hadir. Bahkan kadang-kadang dalam persidangan anak tidak boleh didampingi pengacara/*advokat* atau petugas Bapas. Ketukan palu hakim lah paling

menentukan atas nasib anak sehingga menjadi anak negara, dipenjara atau dikembalikan kepada orang tuanya. Secara umum penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum masih memprihatinkan apakah disebabkan oleh ketidakpahaman aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan hak-hak anak terabaikan begitu saja.

Penutup

Keberadaan Undang-undang tentang perlindungan terhadap anak di Indonesia sudah ada, terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan seiring dengan berkembangnya masalah yang terus ada. Akan tetapi, keberadaan Undang-undang tersebut tidak diikuti dengan sistem yang ada dipemerintahan kita. Pelayanan yang diberikan untuk kasus anak terkesan masih minim. Penegakan hukum, disertai dengan tindakan tegas terhadap kasus yang menimpa anak seharusnya bisa dilakukan agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban, atau tersangka dalam kasus tindakan pidana.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap seseorang, terutama anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan perlindungan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu dan komperhensif diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Layanan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum.

Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan adalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi.

Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. *Pertama*, adalah lemahnya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. *Kedua*, minimnya sarana dan prasarana didalam berlangsungnya proses anak yang berhadapan dengan hukum. *Ketiga* fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penegakan dan perlindungan hukum, terutama perlindungan kepada anak masih sangat lemah dan perlunya peningkatan di sektor tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh faktor lingkungan akan berpengaruh kepada kepribadian anak itu sendiri. (Abraham Maslow, 1954). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, kognitif, spiritual maupun sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal. Peran orang tua pun sangat dibutuhkan, apalagi jika lingkungan tempat tinggal serta tempat beraktifitas kurang mendukung untuk memberikan kenyamanan dan keamanan yang tidak memadai untuk mendukung kinerja sang anak.

PUSTAKA

Anna Volz, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice, Defence for Children International*, 2009. Dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Internet, hal 1. Diakses pada 18 Desember 2014.

Badan Pusat Statistik, 2000, *Indikator Kesejahteraan Anak*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002, *Indikator dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta.

Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, Undang-undang R.I. No.39 tahun 1999 tentang HAM, Jakarta.

Maslow, Abraham. 1954. *Motivasi dan Kepribadian*.

Migley, James. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.

Soetodjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 17.

Lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh :

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan

Email:

ratnaasariiii@yahoo.com; soninulhaqim@yahoo.com; m sangirfan@gmail.com

Abstrak: Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Kata kunci: *anak, hak anak, kebutuhan dasar anak.*

Pendahuluan

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya. Selain itu, sudah ada pula undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama.

Sejalan dengan meningkatnya urgensi perlindungan anak di Indonesia maka, pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi *A World Fit for Children* (WFC) dalam *27 th United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001. Diharapkan pemerintah dapat melakukan penanganan atas kasus terkait anak dengan lebih baik.

Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagianak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi dan kekerasan

(*protecting against abuse, exploitation and violence*) dan penanggulangan HIV/AIDS (Ira Paramnastri dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children, 2010).

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Jakarta International School (JIS). Jika melihat kasus tersebut, kita berpikir dimana saat itu pihak yang seharusnya melindungi anak. Hal tersebut sangat memprihatinkan, terlebih korbannya adalah anak-anak. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa anak belum mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal. Dan jika dilihat latar belakang sekolahnya, JIS adalah salah satu sekolah yang bertaraf internasional dan banyak masyarakat atau orangtua yang mempercayai anak-anaknya untuk dititipkan atau bersekolah di sekolah tersebut dengan berbagai alasan, salah satunya mungkin karena keamanan yang terjamin. Namun pada kenyataannya anak mereka menjadi korban tindakan pelecehan seksual, dan yang lebih membuat mirisnya lagi, hal tersebut dilakukan oleh pihak yang berada di dalam sekolah tersebut.

Pembahasan

Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi, hal ini sesuai dengan penuturan *Orange dan Brodwin* dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulandan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara. Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya.

Kekerasan seksual pada anak mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat karena kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan pada anak di Indonesia sampai dengan September 2006 telah terjadi 861 kasus, 60% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Indonesia disorot sebagai negara yang memiliki perlindungan yang sangat lemah terhadap anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hal ini diperkuat oleh data yang terdapat pada Jurnal Gail Hornor 2010 bahwa anak perempuan dan laki-laki memungkinkan menjadi korban kekerasan seksual. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam (Dube et al., 2005 dalam Gail Hornor, *Child Sexual Abuse: Consequences and Implication*, 2010).

Kita sering sekali mendengar kasus yang melibatkan anak-anak, diantaranya adalah pelecehan seksual pada anak. Banyak sekali berita-berita di tv dihebohkan oleh kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di salah satu sekolah bertaraf Internasional di Jakarta, yaitu Jakarta International School (JIS). Dengan adanya kejadian ini membuat para orangtua khawatir dengan keberadaan anak-anaknya yang bersekolah di Jakarta International School (JIS). Dengan adanya kejadian ini para orangtua harus lebih memperhatikan anak-anaknya. Selain itu, dari pihak sekolah pun lebih meningkatkan keamanan untuk kepentingan anak didiknya.

Kasus pelecehan seksual dengan korban murid JIS ini menggemparkan Indonesia. Warga secara dekat mengikuti perkembangan kasus ini melalui media. Kasusnya sendiri sangat pelik yang terus mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Semuanya berawal pada bulan maret ketika kasus pelecehan seksual terhadap murid muncul di JIS. Seorang murid di TK diyakini diperkosa beramai-ramai oleh beberapa petugas kebersihan.

Kemudian pada juni muncul kasus kedua ketika orangtua murid mengklaim bahwa anak mereka menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kedua inilah yang menjerat Neil dan Ferdi (pelaku pelecehan seksual), dua guru JIS. Kasus ini untuk pertama kalinya menyeret guru atau staf pengajar di sekolah tersebut. Tidak lama kemudian ibu korban dari kasus pertama juga menyatakan bahwa Neil dan Ferdi melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Dari situ kasus ini pun berkembang

Tanda terjadi pelecehan seksual

Patricia A Moran dalam buku *Slayer of the Soul*, 1991, mengatakan, menurut riset, korban pelecehan seksual adalah anak laki-laki dan perempuan berusia bayi sampai usia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Gejala seorang anak yang mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti mutlak, tetapi jika tanda-tanda di bawah ini tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, kiranya perlu segera mempertimbangkan kemungkinan anak telah mengalami pelecehan seksual. Tanda dan indikasi ini diambil Jeanne Wess dari buku yang sama: balita tanda-tanda fisik, antara lain

memar pada alat kelamin atau mulut, iritasi kencing, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas bisa merupakan indikasi seks oral.

Tanda perilaku emosional dan sosial, antara lain sangat takut kepada siapa saja atau pada tempat tertentu atau orang tertentu, perubahan tingkah laku yang tiba-tiba, gangguan tidur (susah tidur, mimpi buruk, dsb), menarik diri atau depresi, serta perkembangan terhambat. Anak usia prasekolah gejalanya sama ditambah tanda-tanda berikut:

- Tanda fisik: antara lain perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik seperti sakit kepala yang terus-menerus, sakit perut, sembelit.
- Tanda pada perilaku emosional dan sosial: kelakuan yang tiba-tiba berubah, anak mengeluh sakit karena perlakuan seksual.

Dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual pada anak diantaranya,

- Dampak fisik: Memar dan luka atau infeksi pada bagian tertentu
- Dampak emosi: Merasa terancam, tertekan, gelisah dan cemas.

Orangtua diharapkan:

- Konsultasi pada psikologi untuk latihan mengelola emosi, dan mempelajari perkembangan anak.
- Ajak anak ke dokter untuk memeriksakan kondisi fisik.
- Pahami perkembangan anak. Di usia 5 hingga 8 tahun, anak sedang berada pada tahap ingin menunjukkan kemampuan, mereka ingin berekreasi. Tidak semua tindakan anak merupakan kenakalan, mereka tidak tahu bahwa tingkah lakunya salah atau kurang tepat.

Bantuan untuk anak:

- Pemeriksaan psikologis oleh psikolog untuk mengetahui gangguan emosi yang dialaminya dan mendapat terapi yang sesuai.
- Tumbuhkan kembali rasa percaya diri anak. Terimalah apa yang mereka lakukan dengan tidak lupa memberitahu tindakan apa yang seharusnya dilakukan.
- Bila orang tua bukan pelaku kekerasan, yakinkan anak bahwa ia sangat dicintai.

Menurut Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan .Jakarta : Erlangga. anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami gangguan secara psikologisnya, anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. jika hal tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak. pada buku Elisabeth Hurlock membagi tugas perkembangan menjadi 2 bagian, yaitu tugas perkembangan periode anak awal dan tugas perkembangan periode anak akhir.

- tugas perkembangan periode anak awal

1. penyempurnaan pemahaman tentang konsep-konsep sosial, benar dan salah.
 2. belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial baik. dirumah maupun diluar.
- tugas perkembangan periode anak akhir
 1. makin mengembangkan keterampilan motorik seperti otot halus dan otot kasar.
 2. mengembangkan konsep tentang lingkungan sekitar.
 3. tingkah laku moral dan menerima nilai lingkungan.
 4. bekerjasama dengan teman sebayanya.
 5. memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya.
 6. mengendalikan reaksi-reaksi emosionalnya sesuai dengan harapan lingkungan sosial.
 7. belajar menjadi individu yang berdiri sendiri. jika anak mengalami gangguan secara psikologisnya dan mengakibatkan tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal, maka anak pun tidak akan mampu menjalankan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Hurlock.

Seharusnya anak mendapatkan penjagaan dan perlindungan, karena anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati keberadaannya. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat ditolerir keberadaannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena bagaimana pun anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati keberadaannya dan harus dilindungi. adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ditinjau dari sudut kriminologi yaitu, karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut lah yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan yang ia inginkan.

Penutup

Masih banyaknya kasus yang melibatkan anak di Indonesia dan salah satunya adalah kasus pelecehan seksual. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor lingkungan, teknologi, dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak. Anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami gangguan secara psikologis maupun fisik. Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual pada anak masih kurang diperhatikan oleh komnas perlindungan anak, padahal jika dilihat banyak sekali kasus pelecehan pada anak di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dan harus segera ditindak lanjuti.

Peran orangtua sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan untuk menjaga anak agar terhindar dari kejahatan tersebut. Selain itu, jika anak sudah menjadi korban, orangtua dan keluarga harus selalu mendampingi dan memberikan support kepada anak agar anak merasa dicinta, berharga dan dapat mengembalikan kepercayaan dirinya kembali. Jika anak sudah mulai masuk ke lingkungan baru yaitu sekolah, pihak sekolah harus memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan yang baik agar tidak terjadi kejahatan seksual seperti yang terjadi di sekolah Jakarta international school (JIS).

Karena pada masa ini anak sedang mencari jati dirinya dan mengeksplor dirinya, maka orangtua dan pihak-pihak yang terkait seperti sekolah dsb, harus saling berperan penting untuk membantu anak dalam proses mencari jati dirinya. Selain itu, kinerja komnas perlindungan anak harus ditingkatkan agar kasus pelecehan seksual pada anak dapat ditindak lanjuti guna tumbuh kembang anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hurlock, Elisabeth. 1980, *Psikologi Perkembangan* .Jakarta : Erlangga.
Winarno Budi, 2002, *Isu-Isu Global Kontemporer*, PT. Buku Seru, Yogyakarta
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Undang-undang No. 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak

Jurnal/Artikel

Paramnastri, Ira. 2010, Jurnal Psikologi *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*.

Honor, Gail. 2010, *Child Sexual Abuse: Consequences and Implication*.

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1821>

Sumber Lain

Undang-undang No. 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak

<http://posyandu.org/perlindungan-dalam-keluarga/perlindungan-anak/300-ketika-anak-mengalami-pelecehan-seksual.html>

www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_Indonesia/2014/08/140807_kasus_jis

UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN

Oleh:

Tundzirawati, Binahayati Rusyidi, & Nurliana Cipta Apsari

Email:

tundzirawati04@gmail.com; titi.rusyidi06@gmail.com;

nurliana.apsari@gmail.com

ABSTRAK

Masalah anak jalanan merupakan hal yang sangat kompleks penyebabnya. Setiap tahunnya jumlah anak jalanan selalu meningkat. Anak jalanan adalah anak yang berada di jalanan baik secara terpaksa maupun suka rela berada di jalan baik bekerja maupun tidak bekerja. Penyebab adanya anak jalanan dapat karena kondisi ekonomi, kondisi internal keluarga, lingkungan sosial, bencana, dan lain sebagainya. Semua anak berhak mendapatkan kesejahteraan demi tercapainya masa depan yang gemilang, begitu pula dengan anak jalanan memiliki hak yang sama dengan anak yang lain. kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Indonesia adalah dengan adanya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak meliputi subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, seperti rumah singgah atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi serta mengurangi jumlah anak jalan yang ada di Indonesia. Dari PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) yang didirikan oleh pemerintah adalah upaya pemenuhan/subsidi kebutuhan dasar (akte lahir), pemberian makanan tambahan, memberikan pendidikan, serta memberikan jalan untuk kembali kepada orangtua.

KATA KUNCI: Kesejahteraan Sosial, Anak Jalanan, PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak)

PENDAHULUAN

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa kanak-kanak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial

juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena dimasa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Anak jalanan merupakan akibat langsung dari krisis diberbagai bidang, yang saat ini masih menjadi fenomena sosial di kota-kota besar. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5).

Menurut hasil survei dan pemetaan sosial anak jalanan pada tahun 1999 jumlah anak jalanan mencapai 39.861 anak. Pada tahun 2002 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan angka tahun 1999. Menurut hasil Susenas yang diselenggarakan dengan kerjasama BPS dan Pusdatin Kesos pada tahun 2002 jumlah anak jalanan sebanyak 94.674 Anak. Pada tahun 2009 anak jalanan meningkat menjadi 230.000 anak (BPS 2009). Pada tahun 2014 mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2009 menjadi 420.000 anak jalanan (Kemensos RI).

Hal yang dirasakan oleh anak jalanan tidaklah seindah dan semudah yang dijalani anak-anak pada umumnya. Mereka harus hidup ditengah kekerasan kota-kota besar yang tidak aman dan tidak bersahabat bagi anak jalanan. Keberadaan mereka berada di jalanan sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi. Mereka terpaksa turun ke jalan karena harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Bahkan tak jarang banyak anak jalanan yang turun ke jalan disebabkan adanya paksaan dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan orangtuanya. Lebih miris lagi anak jalanan yang turun ke jalan karena paksaan dari preman atau orang dewasa yang bukan keluarganya. Dalam kasus seperti ini, jika mereka tidak membawa uang sebesar yang disuruh oleh orangtua atau orang dewasa yang bukan keluarganya (preman) mereka akan mendapatkan hukuman berupa tindak kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Selain sebab ekonomi, anak yang turun ke jalan disebabkan karena dibuang oleh orangtuanya sendiri. Ada pula yang turun ke jalan disebabkan mengikuti teman atau kabur dari rumah.

Citra negatif yang selalu diterima oleh anak jalanan menjadikan anak jalanan dipandang sebelah mata. Mendapatkan penghinaan dari masyarakat dapat membuat kondisi psikologis anak tertanggung. Mungkin anak dapat merasa malu, tidak percaya diri dan lain sebagainya.

Banyak anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka tidur di tempat umum seperti terminal, pasar, stasiun kereta api, pertokoan, di bawah jembatan layang, di jembatan penyebrangan dan lain-lain. Sudah bukan pemandangan asing bila di tempat-tempat tersebut tergeletak banyak anak jalanan yang hanya menumpang tidur dengan beralaskan koran atau kardus bahkan ada yang tidak memakai alas tidur sama sekali. Atap rumah mereka adalah langit, tidak ada tempat bernaung dari terpaan hujan dan teriknya matahari.

Bukan itu saja penderitaan mereka. Kebutuhan akan makanan belum tentu dapat terpenuhi setiap hari dengan gizi dan kebersihan yang baik. Sudah dapat makan satu kali dalam satu hari pun sudah beruntung. Selain itu mereka bergelut dengan kotor dan debu-debu jalanan. Mereka pun harus selalu siaga akan adanya Satpol PP yang kapan saja bisa menangkap mereka. Penangkapan paksa dan perlakuan kekerasan membuat anak jalanan lebih memilih lari dari tangkapan Satpol PP.

Banyak resiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka. Anak jalanan sangat beresiko menjadi korban eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi pada anak jalanan berasal dari orang dewasa yang bukan merupakan keluarganya (preman dll) dan juga dapat berasal dari keluarganya sendiri (orangtua). Mereka di eksploitasi untuk bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara seperti mengamen, mengemis, menjual asongan, dan mungkin juga di eksploitasi untuk menjual dirinya.

Tindak kekerasan juga adalah resiko yang mungkin terjadi kepada anak jalanan. Tidak memiliki perlindungan dari orang dewasa, anak jalanan sangat rentan mendapatkan tindak kekerasan baik fisik, mental, maupun seksual. Tindak kekerasan ini pula dapat dilakukan oleh keluarganya sendiri. Selain itu anak jalanan juga rentan menjadi korban pelecehan seksual bahkan oleh keluarga atau orangtuanya sendiri.

Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan psikologis dan membuatnya berperilaku negatif. Anak jalanan senantiasa berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental dan sosial bahkan nyawa mereka. Di dalam situasi kekerasan yang dihadapi secara terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, maka pelajaran itulah yang melekat dalam diri anak jalanan dan membentuk kepribadian mereka. Ketika mereka dewasa, besar kemungkinan mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan.

Selain memiliki resiko yang tinggi, kebanyakan anak jalanan juga tidak melanjutkan pendidikannya karena harus mencari nafkah demi menyambung hidup. Anak jalanan pun biasanya memiliki perilaku yang kurang baik seperti “ngelem”, melakukan seks bebas, minum minuman beralkohol, penggunaan obat terlarang dan lain-lain. Seperti yang dilakukan F (15) anak jalanan di Kota Semarang yang tertangkap razia polisi kedatangan sedang ngelem di Lapangan Simpang lima. Kepada polisi F mengaku sudah dua bulan yang lalu ia melakukan kegiatan itu yang dia pelajari sejak ia mulai bergaul bersama temannya sesama pengamen yang sering nongkrong di Lapangan Simpanglima. Dalam sehari, bocah yang berhenti sekolah di kelas 1 SMP ini bisa menghabiskan uang Rp. 13.000; (tiga belas ribu rupiah) hanya untuk membeli lem di toko bangunan. Baginya, lem bisa membuatnya berfantasi dan melupakan segala beban hidup. (TRIBUNNEWS.COM diakses pada 18 Desember 2014 pukul 02:55 WIB)

Angka anak jalanan yang sangat tinggi saat ini dengan berbagai resiko yang mereka hadapi sangat perlu berbagai pihak untuk terlibat dalam membantu

membela hak-hak mereka, sebab tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini ada di tangan mereka.

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN

Kesejahteraan sosial menurut definisi Undang Undang no 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negaranya. Dalam pedoman pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial (2010), kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan hak-haknya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar anak terlindung dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Hak dasar seorang anak adalah mendapatkan kesempatan untuk hidup, mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Hak-hak dasar itu semua tidak didapatkan oleh para anak jalanan.

Guna meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, kita harus memperhatikan agar semua hak-hak mereka terpenuhi. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk bermain

Anak jalanan tidak mendapatkan haknya untuk bermain sebab mereka menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari nafkah. Tempat bermain anak jalanan adalah di jalanan. Jalan adalah tempat untuk bermain, mencari nafkah, dan menghabiskan waktu untuk istirahat. Pemerintah telah menyediakan program bagi anak jalanan berupa rumah singgah atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Rumah singgah atau LKSA ini dapat menjadi tempat bermain yang dapat mendidik anak-anak jalanan dari segi pendidikan maupun moral serta agama.

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Anak jalanan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Banyak anak jalanan yang putus sekolah karena harus bekerja mencari uang. Pendidikan merupakan hal yang penting demi keberlangsungan masa depan anak termasuk masa depan anak jalanan. Meskipun sudah adanya bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah) banyak anak jalanan yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya dan lebih memilih mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Pemerintah melalui PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar yang meliputi: pengembangan jaringan kerja, pemberian *life skill*, pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal, rujukan ke

pendidikan (formal, non formal, maupun in formal), penyediaan peralatan dan perlengkapan sekolah, monitoring dan evaluasi peserta didik, dan layanan remedial (pendidikan formal yang sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan nasional). Dengan adanya program ini diharapkan pemerintah dapat membantu anak jalanan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas pendidikan lebih baik lagi. Sehingga membuat masa depan anak jalanan menjadi lebih baik.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Anak jalanan sangat memerlukan hak mendapatkan perlindungan. Banyak resiko yang berbahaya yang akan mengancam anak jalanan. Anak jalanan beresiko mendapatkan tindak kekerasan yang dapat berdampak negatif bagi dirinya. Meskipun perlindungan anak telah diatur oleh undang-undang tetapi tindak kekerasan masih saja sering terjadi kepada anak jalanan. Pemerintah dalam PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) melalui LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau rumah singgah akan melakukan perlindungan serta advokasi bagi anak jalanan yang menjadi korban tindak kekerasan.

Selain rumah singgah pemerintah pun membuat Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di setiap RT/RW/komunitas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Setiap Satgas dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam perlindungan anak. Satgas ini diharapkan bisa mencegah anak yang rentan menjadi korban, mendukung anak yang bermasalah, dan melindungi anak yang menjadi korban dengan membuka konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan pembinaan.

4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)

Anak jalanan berhak memiliki identitas (seperti nama dan akte kelahiran), berhak mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya. Sebab anak jalanan turun ke jalan salah satunya adalah karena dibuang oleh orangtuanya, berarti banyak anak jalanan yang sudah dirampas haknya oleh orangtuanya sendiri. Pemerintah dalam PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) memberikan bantuan sosial atau subsidi hak dasar dengan membantu pembuatan akte kelahiran serta peningkatan tanggung jawab orang tua atau keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Apabila pengembalian anak kepada orang tua tidak memungkinkan maka anak jalanan dapat singgah di LKSA atau rumah singgah tersebut.

5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan

Anak jalanan juga memiliki hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Semua anak jalanan yang ada di Indonesia memiliki status kewarganegaraan warga negara Indonesia.

6. Hak untuk mendapatkan makanan

Banyak anak jalanan yang tidak dapat mendapatkan makanan. Setiap hari mereka harus bekerja keluar keringat terlebih dulu untuk mendapatkan makanan. Maka pemerintah melalui PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) memberikan pelayanan peningkatan nutrisi atau gizi keluarga melalui

pemahaman pola makan sehat, pengenalan keanekaragaman makanan sehat, perencanaan menu makan sehat keluarga, dan pemberian makanan tambahan.

7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan

Anak jalanan sulit untuk mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan karena mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi yang sangat bawah. Maka pemerintah melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan akses pelayanan kesehatan dasar melalui pemahaman pola hidup sehat dan pemberian SKTM atau Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Gakin.

8. Hak untuk mendapatkan rekreasi

Hak untuk mendapatkan rekreasi anak jalanan tidak terpenuhi. Waktu mereka habis digunakan untuk mencari nafkah di jalan. Pemerintah pun tidak memfasilitasi anak jalanan untuk memenuhi hak mendapatkan rekreasi.

9. Hak untuk mendapatkan kesamaan (non diskriminasi)

Anak jalanan sama dengan anak yang lainnya memiliki hak yang sama pula. Maka pemerintah membuat PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) dan menyediakan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) untuk dapat memenuhi kebutuhan anak jalanan.

10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Anak jalanan pun memiliki hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Dengan adanya PKSA dan LKSA, anak jalanan dapat di latih secara *soft skills* maupun secara pengatahuannya sehingga mereka juga dapat mempengaruhi proses pembangunan kini dan nanti.

Rumah singgah sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka serta wadah bagi para anak jalanan membela hak-haknya. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat.

PENUTUP

Anak jalanan dapat diakibatkan dari kurangnya kondisi ekonomi sehingga memaksa mereka untuk mencari nafkah di jalan. Selain itu juga disebabkan adanya paksaan dari orang dewasa untuk mencari uang, dibuang oleh orangtuanya sehingga ia tidak memiliki siapa-siapa dan harus tinggal di jalan serta terbawa atau mengikuti temannya yang sudah berada di jalanan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial pada anak jalanan, pemerintah membuat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). PKSA Kementerian Sosial RI adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak meliputi subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, seperti rumah singgah atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Melalui PKSA hampir seluruh hak anak dapat dipenuhi. Selain itu pemerintah mendirikan Satuan Tugas Perlindungan Anak

(Satgas PA) untuk melindungi, mencegah dan menangani anak yang rentan mengalami tindak kekerasan.

REFERENSI

Isbandi Rukminto Adi. *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Intervensi Komunitas*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003, hlm. 4.

Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2005, hlm. 1-3.

Pedoman PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial. Jakarta

Undang-Undang

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2003. Jakarta.

Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979. Jakarta.

Republik Indonesia. 1974. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Jakarta.

Artikel Online

Affifah, Ifah. 27 Februari 2013. Darurat kekerasan, satgas perlindungan anak hadir ditingkat RT /RW (Online), (<http://www.radioaustralia.net.au/Indonesian/2013-02-27/darurat-kekerasan-satgas-perlindungan-anak-hadir-ditingkat-rt-rw/1094086> di akses 18 Desember 2014)

Hamid, Almisar. 17 Juni 2014. Perlindungan Sosial Anak Dan Masalahnya (Online), (<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16> diakses pada 16 Desember 2014)

Hariyono, Tri. Membangun Kebijakan Yang Humanis Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan (Online), (http://www.academia.edu/4810679/Kebijakan_Anak_Jalanan diakses pada 16 Desember 2014).

Imob Educare. 4 Juli 2014. 2014: Indonesia Bebas dari Anak Jalanan? (Online), (<http://www.imobeducare.com/story/2014-Indonesia-bebas-dari-anak-jalanan> diakses pada 16 Desember 2014).

Kemensos. Sekilas Tentang Masalah Anak (Online), (<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5> diakses pada 16 Desember 2014).

Radlis, Muh. 16 Desember 2013. Ngelem Bisa Bikin Saya Ketemu Artis Agnes Monica (Online), (<http://www.tribunnews.com/regional/2013/12/16/ngelem->

- bisa-bikin-saya-ketemu-artis-agnes-monica, diakses pada 18 Desember 2014)
Republika. 02 Agustus 2013. 10 Hak Anak Indonesia, Sudahkah Anda Memberikan Ini? (Online),
(<http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-Indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini> di akses 16 Desember 2014).
- Reyta. Sakti Peksos (PKSA) (Online),
(<http://kapanjadibeda.wordpress.com/program-kesejahteraan-sosial-anak-pksa/> diakses 16 Desember 2014).
- Suahepi, Epi. 14 April 2014. Upaya Penanganan Anak Jalanan (Online),
(<http://pecintapena.wordpress.com/2011/06/04/upaya-penanganan-anak-jalanan/> di akses pada 16 Desember 2014).
- Tommy. 27 Agustus 2010. Kekerasan Terhadap Anak Jalanan (Online),
(<http://sdc.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=20>, diakses 18 Desember 2014).

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK OLEH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA)

Oleh:

Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, & Nurliana Cipta Apsari

Email :

(haerunisadian@gmail.com; budimtunpad@gmail.com;
nurliana.apsari@gmail.com)

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebutuhan anak yang diberikan oleh lembaga panti sosial asuhan anak (PSAA). Sumber data penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam lembaga PSAA. Aspek kebutuhan anak yang dipelajari adalah kebutuhan fisik, psikososial, dan sosial emosional.

Artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait di dalam lembaga pendidikan anak usia dini.

Dari hasil Artikel dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan anak oleh PSAA sudah dapat terpenuhi secara baik, sehingga anak-anak yang berada di lembaga PSAA tersebut merasa senang dan nyaman karena kebutuhan yang mereka perlukan sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut sehingga anak-anak yang ada di PSAA mampu mengembangkan kemampuan dirinya dan potensi yang dimilikinya.

Kata Kunci: Anak, kebutuhan dasar anak, lembaga pelayanan sosial

PENDAHULUAN

Setiap individu mempunyai kebutuhan dasar, tidak terkecuali anak-anak. Dan setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu orang tua seharusnya mengerti apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang anak. Hal ini penting sebab anak adalah individu, anak mengalami proses perkembangan. John Comenius mengatakan: “*We must understand the child, so that our teaching may be designed to match his capacity*” (www.edukasi.kompasnia.com diunduh pada tanggal 16 desember 2014 pukul 18.00 wib)

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah, dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pengasuhan dan perlindungan anak, orang tua keluarga mempunyai peran sentral, karena dalam hal ini anak sangat tergantung pada orang dewasa. Bagi anak yang memiliki orang tua, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tuannya, tetapi bagi anak yang tidak memiliki orang tua, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Anak merupakan harapan bangsa dan orang tua akan selalu berusaha agar anak mereka bisa menjadi apa yang diinginkan dengan berusaha memberikan seluruh yang ada pada orang tua, yang akan diberikan kepada anaknya. Dalam sebuah keluarga seorang anak diwariskan norma-norma atau aturan-aturan serta nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Anak dilatih tidak hanya mengenal tetapi juga menghargai dan mengikuti norma hidup masyarakat melalui kehidupan dalam keluarga. Disini keutuhan keluarga sangat diperlukan dan penting dalam proses sosialisasi seorang anak. Kehadiran orang tua memungkinkan adanya rasa kebersamaan sehingga memudahkan orang tua untuk mewariskan nilai-nilai moral yang dipatuhi dan ditaati dalam berperilaku. Dalam hal ini orang tua mempunyai peran yang paling dominan dalam tumbuh kembang, proses sosialisasi, dan pertumbuhan seorang anak secara optimal. Kebutuhan merupakan hal yang paling yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik dalam segi fisik, emosional, dan pendidikan. Ada beberapa macam kebutuhan yang harus di penuhi oleh manusia, namun lebih idealnya jika kebutuhan dasar terlebih dahulu yang harus di penuhi, dengan hal ini manusia tersebut hidup nya akan sejahtera dan mampu berfungsi sosial.

Keadaan tersebut di atas, akan berbeda bagi anak yang tidak mempunyai keluarga secara utuh. Disorganisasi keluarga seperti perceraian orang tua, krisis ekonomi keluarga dan meninggalnya salah satu atau kedua orang tua menyebabkan terputusnya interaksi sosial antara orang tua dengan anak dan anak tidak mendapatkan pola pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, anak menjadi kurang mendapat perhatian dan pendidikannya terabaikan. Selain kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan anak tersebut bisa bermasalah dalam tumbuh kembangnya dan tidak mendapatkan pengarahan yang baik dari orang sekitarnya hal ini memungkinkan anak akan berperilaku menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Maka salah satu cara yang dilakukan agar anak tetap dalam pengasuhan dan mendapatkan perhatian adalah dengan menampung anak-anak tersebut kedalam suatu wadah yaitu panti asuhan, guna membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara mendidik, merawat, membimbing, mengarahkan dan memberikan keterampilan-keterampilan seperti yang diberikan oleh orang tua dalam keluarga.

Dengan demikian dibutuhkan suatu lembaga yang kosen terhadap pemenuhan kebutuhan anak, salah satu lembaga yang fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak agar anak dapat tumbuh bkembang secara optimal yaitu panti asuhan. Panti asuhan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Dengan demikian seorang anak akan lebih nyaman dan secara tidak langsung mereka merasakan kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga seperti hal nya anak yang dalam bimbingan orangtuanya langsung. Namun ketidakberdayaan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan pola asuh yang baik terhadap anak. Hal ini menyebabkan anak menjadi terlantar dan tunbuh kembangnya tidak optimal. Banyak anak yang tidak bisa dipenuhi kebuthannya oleh orang tua maupun saudaranya sehingga anak menjadi terlantar.

Anak terlantar merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi isu bangsa Indonesia. Permasalahan anak terlantar di Indonesia sejak lama menjadi pelik karena menyangkut masalah yang sangat luas keberadaan mereka tersebar di semua wilayah. Masalah tersebut semakin besar sejak tahun 1997. Pada masa reformasi terjadi krisis sosial, ekonomi dan politik yang berkepanjangan yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut membawa dampak negatif terhadap pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Dampak yang terjadi antara lain

1. Meningkatnya angka putus sekolah (*droop out*), sehingga ada akhirnya mengakibatkan menurunnya angka partisipasi pendidikan
2. Menurunnya angka melanjutkan (*continuation rate*) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah anak terlantar yang disebabkan ketidakberfungsian keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak di Indonesia masih cukup tinggi dari tahun ketahunnya. Permasalahan ini sangat miris bila kita melihat potensi besar yang dimiliki bangsa ini, keadaan yang sangat kontras mengenai potensi dan permasalahan di negara ini, dengan adanya anak terlantar, anak putus sekolah, anak dengan masalah ekonomi keluarga hal ini menandakan bahwa bangsa ini belum sejahtera.

Maka dari itu, diperlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat agar masalah tersebut dapat diatasi sehingga anak dapat hidup sesuai dengan perkembangannya secara wajar.

Ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal, yaitu

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain.
2. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak (Hurlock, 1978 : 257).

Sesuai dengan posisi anak sebagai potensis dan penerus cita-cita perjuangan bangsa maka permasalahan anak terlantar mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius, profesional dan rofesional yang sekaligus merupakan perwujudan amanat konstitusi uud 1945 asal 34 yaitu “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam uud no.4 tahun 1979 tentang keajahteraan anak disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Masalah kesejahteraan anak merupakan salah satu masalah dalam bidang kesejahteraan sosial, yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang dimana baik atau buruknya kondisi suatu bangsa dimasa yang akan datang ditentukan dari kondisi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak adalah dengan mendirikan panti sosial asuhan anak (PSAA). Panti sosial asuhan anak merupakan lembaga sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya anak-anak terlantar dan anak yatim piatu. Panti sosial asuhan ini merupakan tempat bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga utuh atau salah satu orang tua mereka tidak ada, PSAA ini sebagai wadah tempat berkembang dan bertumbuh nya anak yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak. Dalam hal ini PSAA sangat membantu dalam tumbuh kembang anak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang sama seperti halnya anak-anak yang memiliki orang tua yang utuh. Lembaga ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar anak maka anak tersebut akan merasa senang dan sejahtera.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan selalu bertambah dari waktu ke waktu dan manusia selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia diartikan sebagai segala sesuatu yang ingin dimilikinya, dicapai, dan dinikmati. Untuk memenuhi segala kebutuhannya tersebut maka manusia terdorong untuk melakukan aktivitas sesuatu agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Gibson (1996:186) mengemukakan bahwa kebutuhan adalah kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Kekurangan tersebut dapat bersifat fisik misalnya kebutuhan akan makanan, psikologis misalnya kebutuhan untuk beraktualisasi diri, atau sosiologis misalnya kebutuhan untuk interaksi sosial. Kebutuhan-kebutuhan merupakan pemicu dari respon perilaku.

Abraham Maslow (1989) dalam teori hierarki atau jenjang kebutuhan mengajukan bahwa semua orang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus terpuaskan terlebih dahulu sebelum mereka menyadari kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Maslow mengutarakan ada lima macam kebutuhan dasar manusia, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis (physiological need). Kebutuhan-kebutuhan dasar ini termasuk makanan, rumah tinggal, pakaian dan kesehatan. Di sekolah, guru atau tenaga pengajar lainnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara memberi stimulus agar anak usia dini mampu mengeksplor kemampuan sejak dini.
2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (safety and security needs). Kebutuhan-kebutuhan ini mengacu pada hasrat terhadap perlindungan fisik dan ekonomis.
3. Kebutuhan sosial (affiliation or acceptance needs). Orang-orang ingin diterima oleh keluarga dan individu-individu lain dan kelompok.

4. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs). Orang-orang senang menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Karyawan merasa senang ketika mereka dihargai atas kinerja yang baik dan dihormati atas kontribusi mereka.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization). Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong orang-orang untuk mencari pemenuhan kebutuhan menyadari tentang potensi diri mereka, dan secara penuh menggunakan bakat dan kapabilitas mereka.

Menurut hierarki kebutuhan manusia, kebutuhan tingkat lebih rendah meliputi hal-hal fisiologis, keselamatan, dan sosial. Sedangkan kebutuhan tingkat lebih tinggi meliputi harga diri dan aktualisasi diri. Sementara kebutuhan lebih rendah merupakan hasrat akan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan fisik, kebutuhan tingkat lebih tinggi mewakili keinginan seseorang akan pertumbuhan dan perkembangan psikologis.

Maslow menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan dan keberadaannya dibutuhkan, serta merupakan bagian integral dari seluruh tatanan kehidupan keanekaragaman hayati. Secara fisiologis perilaku manusia sama dengan perilaku hewan yaitu lapar, seks, kepanasan, kedinginan, haus, dan kapasitas mempetahankan diri (Maslow dalam Sudarwan Damin, 1985). Perbedaan pada dimensi sosial dan keanekaragaman serta jenjang kebutuhan sebagai insan berbudaya yang mengandung unsur cipta, rasa, dan karsa (polak, 1980).

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak (Yuliani Nurani Sujiono, 2009: 7). Usia dini merupakan usia dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini sering disebut sebagai usia emas (golden age). Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Dalam tahap golden age, anak harus di bimbing dan diarahkan karena dalam masa ini perkembangan kognitif anak harus mendapatkan stimulus agar dapat berkembang secara optimal.

Pemenuhan kebutuhan anak harus diperhatikan agar anak merasa senang dan bahagia jika kebutuhannya dipenuhi dengan baik. Konsep pemenuhan kebutuhan anak merupakan konsep yang mengedepankan tentang kebutuhan anak yang harus dipenuhi agar tumbuh kembang anak secara optimal.

Ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal, yaitu

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain.
2. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.

3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak (hurlock, 1978:257).

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, namun tidak semua orang tua mampu memenuhinya. Ketidakberfungsian keluarga menjadi factor utama orang tua tidak dapat memnuhi kebutuhan dasar anaknya. Dalam hal ini dibutuhkan suatu lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak. Mengingat bahwasanya anak merupakan generasi dan penerus cita-cita bangsa maka dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak .Jika sebuah keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar anak maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasa ranak tersebut. Seperti yang telah dijelaskan Dalam UUDNo.4 tahun 1979 tentang keajahteraan anak disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Dengan adanya anak terlantar membuktikan bahwa ketidakberfungsian keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.Masalah kesejahteraan anak merupakan salah satu masalah dalam bidang kesejahteraan sosial, yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang dimana baik atau buruknya kondisi suatu bangsa dimasa yang akan datang ditentukan dari kondisi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak adalah dengan mendirikan panti sosial asuhan anak (PSAA). Panti sosial asuhan anak merupakan lembaga sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya anak-anak terlantar dan anak yatim piatu. Panti sosial asuhan ini merupakan tempat bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga utuh atau salah satu orang tua mereka tidak ada, PSAA ini sebagai wadah tempat berkembang dan bertumbuh nya anak yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak. Dalam hal ini PSAA sangat membantu dalam tumbuh kembang anak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang sama seperti halnya anak-anak yang memiliki orang tua yang utuh. PSAA adalah suatu lembaga yang di ciptakan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak terlantar, anak yatim dan piatu, anak karena perceraian orang tua, dan anak yang tidak memiliki orang tua utuh (salah satu meninggal)

Lembaga ini memiliki banyak peran untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar anak dan sebagai wadah untuk mengemabngkan segala potensi yang di miliki oleh anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Lembaga ini bergerak dalam memberikan bantuan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar, yatim piatu, dan kaum dhuapa. Yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap anak-anak yang kurang beruntung, yang sebenarnya memiliki potensi guna menjadi generasi penerus bangsa.

PENUTUP

Anak merupakan generasi dan penerus cita-cita bangsa dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dasar anaknya dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, dan kebutuhan stimulasinya. Keadaan tersebut diatas, akan berbeda bagi anak yang tidak mempunyai keluarga secara utuh. Disorganisasi keluarga seperti perceraian orang tua, krisis ekonomi keluarga dan meninggalnya salah satu atau kedua orang tua menyebabkan terputusnya interaksi sosial antara orang tua dan anak. Akibatnya, anak menjadi kurang mendapatkan perhatian dan pendidikannya terabaikan. Selain kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan anak tersebut bisa bermasalah dalam tumbuh kembangnya dan tidak mendapatkan pengarahan yang baik dari orang sekitarnya hal ini memungkinkan anak akan berperilaku menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku negatif, seperti autisme, nakal, sukar diatur, yang kelak menolong mereka menjadi manusia “tidak normal” dan pelaku kriminal (Suharto, 1997 ; 363-364)

Masalah kesejahteraan anak merupakan salah satu masalah dalam bidang kesejahteraan sosial, yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang dimana baik atau buruknya kondisi suatu bangsa dimasa yang akan datang ditentukan dari kondisi anak sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu, diperlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat agar masalah tersebut dapat diatasi sehingga anak dapat hidup sesuai dengan perkembangannya secara wajar. Beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak agar anak tumbuh kembang secara optimal yaitu dari aspek fisik, emosional, dan stimulasinya. Ketiga kebutuhan dasar ini sangat menentukan tumbuh kembang anak selanjutnya. Jika ketiga kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka perkembangan anak terganggu dan tidak akan optimal.

Maka salah satu cara yang dilakukan agar anak tetap dalam pengasuhan dan mendapatkan perhatian adalah dengan menampung anak-anak tersebut kedalam suatu wadah yaitu panti asuhan, guna membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara mendidik, merawat, membimbing, mengarahkan dan memberikan keterampilan-keterampilan seperti yang diberikan oleh orang tua dalam keluarga.

Dalam upaya optimalisasi program pemenuhan kebutuhan dasar anak, panti sosial asuhan anak (PSAA) telah menjadi salah satu wadah yang tepat dalam upaya membantu anak yang dimana orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Pelayanan yang diberikan bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Optimalisasi pelayanan dapat mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar anak. Upaya pemberian pemenuhan kebutuhan dasar

anak melalui pelayanan sosial yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan anak asuh.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh panti sosial harus dapat memenuhi kebutuhan anak asuhnya. Disamping itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pemenuhan kebutuhan bisa lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah memperhatikan asupan makanan bergizi untuk anak, kurangnya sarana bagi anak untuk menyalurkan hobinya

Dengan demikian panti asuhan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya seorang anak membutuhkan pengasuhan yang mempunyai jiwa sosial tinggi dan mengerti tentang bagaimana pengasuhan yang seharusnya diterapkan terhadap anak asuhnya. Pengasuhan yang memiliki jiwa sosial memungkinkan seorang anak akan lebih nyaman dan secara tidak langsung mereka merasakan kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga seperti halnya anak yang dalam bimbingan orangtuanya langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Elizabeth B. Hurlock, 1980, Psikologi Perkembangan. Ciracas, Jakarta 13740.

Jalaluddin Rakhmat. (1985). *Psikologi Komunikasi*, Bandung: CV. Remadja Karya

<http://eprints.uny.ac.id/9700/2/BAB%202%20-%2008102241026.pdf>

http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=891:lembaga-kesejahteraan-sosial-anak&catid=98:lingkungan-keluarga-dan-pengasuhan-alternatif&Itemid=127

www.edukasi.kompasnia.com

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo

Email:

(Arini92@ymail.com; santosotriraharjo@gmail.com; hery_fortune@yahoo.com)

ABSTRAK

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan, yang mana harus kita jaga dan diberikan bimbingan karena merupakan titipan Tuhan. Anak berhak mendapatkan hak-hak nya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat tempat tinggal, hak mendapatkan kasih sayang yang mana orang tua wajib memberikannya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan. Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, banyak anak yang terlantar hingga ke jalanan dan mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan pada anak sudah sangat sering terjadi, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, anak akan cenderung pendiam, ketakutan ketika harus keluar rumah, murung, dan tidak banyak bicara. Kekerasan pada anak harus segera dihentikan, agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban harus kita tolong, diperjuangkan hak nya dan dilindungi kerahasiaannya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberi terapi psikologi agar anak tetap semangat dalam menajalni hari harinya kedepan.

Kata kunci: anak, pelecehan seksual, hak anak, dan peran pekerja sosial

Pendahuluan

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: – Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir – Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. – Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. – Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun. – Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. – Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. – Masa tua : 60 tahun-meninggal. (<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:23)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak;

- Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
- Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
- Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
- Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
- Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
- Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

(<http://www.parenting.co.id/article/balita/kenali.kekerasan.seksual.pada.anak/001/003/687> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:29)

Orang tua perlu melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak di zaman sekarang ini. Banyak kesempatan dilakukannya kekerasan terhadap anak. Orang tua wajib memberikan hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, tempat tinggal, kasih sayang sebagaimana seharusnya diberikan oleh orang tua dan keluarganya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan.

Seperti yang dipaparkan dalam ”Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk BERMAIN
2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
4. Hak untuk mendapatkan NAMA (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN”

(<http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-Indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:41)

Hak-hak anak tersebut harus terpenuhi, terutama hak mendapatkan perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan seksual. Kurangnya pengawasan, belum terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan, dapat menjadi pemicu anak menjadi korban kekerasan seksual. Baiknya sejak dini anak diberikan pengetahuan tentang seks, tujuannya agar anak mengetahui bahaya dan batasan-batasan seputar seks.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banya terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karna mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.

Pembahasan

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di

antara masalah lainnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak , diunduh 17 Desember 2011 pukul 23:58)

Usia anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual, dimana anak belum memahami keadaan lingkungan sekitarnya, anak hanya bisa menyerap mempelajari apa yang mereka lihat dan kemudian mencontohnya. Anak mudah sekali untuk dipengaruhi, maka pengawasan dan perlindungan dari berbagai pihak wajib diberikan dan diperhatikan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Menimbang :

- a) bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d) bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e) bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f) bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak; (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:11)

Dalam UU diatas telah dijelaskan mengenai kesejahteraan anak, maka sebagai orang tua wajib memberikan perhatian kepada anak dan melindungi anak serta memperhatikan anak.

Ada dua penyebab keluarga korban kekerasan anak enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual, masih cenderung dianggap aib yang harus ditutupi daripada merasa jadi korban dan perlu bantuan. Kedua, malas berurusan dengan pihak berwenang. Khawatir alih-alih dibantu malah dapat tekanan dan perlakuan tak simpatik. Pandangan ini wajib jadi tantangan bagi semua untuk diluruskan. Disini peksos dapat berperan sebagai advokator dari pihak keluarga korban. Anak yang jadi korban biasanya mengalami ancaman dari pelaku. Maka, orangtua yang harus peka bila tiba-tiba perilaku anak berubah pendiam, penyendiri, sulit makan dan tidur.

Keluarga korban enggan melaporkan terkadang berfikir bahwa kasus yang dialaminya tidak akan diprioritaskan untuk diselesaikan dengan keadaan ekonomi yang dialami keluarga korban. (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/memahami-anak-korban-kekerasan-seksual> , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:17)

Padahal, Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa : Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Keluarga seharusnya memberikan perhatian yang sangat intim terhadap anak agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Keluarga harus mampu membuat anak merasa terlindungi dan terkasih baik oleh keluarga inti maupun yang lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan anaknya, seperti yang dikemukakan Elisabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Dalam buku Hurlock ini dijelaskan tahap perkembangan anak seperti :

1. Prenatal (sebelum lahir) atau pralahir Dimulai dari masa konsepsi sampai usia 9 bulan dalam kandungan ibu.
2. Masa Natal, Tahap ini meliputi:
 - a. Infancy atau neonates (dari lahir sampai 14 hari). Merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungan. Pada masa ini bayi mengalami masatenang dan tidak banyak terjadi perubahan.
 - b. Masa bayi (antara 2 minggu – 2 tahun)Pada fase ini bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan. Lama kelamaan bayimulai berusaha melepaskan diri dan mulai belajar berdiri sendiri. Hal ini dimungkinkan karenatubuhnya semakin kuat dan dapat menguasai gerakan-gerakan ototnya, misalnya : jalansendiri, bicara, makan dan bermain.
 - c. Masa anak (2-10/11 tahun)Anak masih immature. Tanda-tanda : usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehinggalanak merasa bahwa dirinya merupaka bagian dari lingkungan. Penyesuaian social melaluipergaulan dan berbagai pertanyaan. Strum und Drang, yaitu pada usia 3 tahun anak mengalami haus nama, segala hal ditanyakandan diragukan.
3. Masa remaja (11/12 – 20-21 tahun)Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa. Tahap ini meliputi :
 - a. Praremaja (11/12 – 13/14)Merupakan fase yang pendek yaitu hanya 1 tahun. Perempuan mulai pada usia 11/12 –12/13 tahun, sedangkan laki-laki 12/13 – 13/14 tahun. Fase ini sering juga disebut fasenegative, yaitu fase yang sukar untuk anak dan orangtua. Perkembangan fungsi-fungsitubuh dan seks juga terganggu.
 - b. Remaja awal (13/14 – 17 tahun)Terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan mencapai puncaknya. erjadi juga ketidakseimbangan

emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal. Mencari identitas diri dan hubungan social yang berubah.

- c. Remaja lanjut (17 – 20/21)Ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energy yang besar, ingin memantapkan identitas diridan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.

4. Dewasa Tahap ini meliputi :

- a. Dewasa awal (21 – 40 tahun)Penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, harapan mengembangkan nilai-nilai, sifat-sifat yang serba baru. Diharapkan menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, karier dan mencapai prestasi.
- b. Dewasa menengah (40 – 60 tahun)Merupakan masa transisi, masa menyesuaikan kembali, masa equilibrium-disequilibrium.Masa yang ditakuti karena mendekati masa tua, wanita kehilangan kemampuan reproduksi.

Anak yang menjadi orban kekerasan seksual, atau anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perlindungan. Pekerja sosial profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan-keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Pekerja sosial melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban/anak dimana anak yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan seksual akan menjadi pendiam, murung, menyendiri, malu untuk bersosialisasi kembali, dan mengalami depresi/trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

a. Sebagai fasilitator

- Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
- Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk peer group (kelompok sebaya).
- Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.

b. Sebagai Trainer/pelatih

- Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
- Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
- Membantu peer educator dalam melatih teman-teman lainnya
- Membantu dalam pengembangan peer educator dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

c. Sebagai advocat

Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjarakan. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum di semua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

- Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
- Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan *leason learn* untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
- Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

d. Sebagai peneliti

- -Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- Terlibat dalam penelitian partisipatory di mana peer educator belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
- Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut.
- Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak yang berkonflik dengan hukum.

e. Sebagai perencana

- Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan.
- Membantu peer educator dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
- -Membantu menyusun kegiatan peer educator untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

(<http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/06/22/pekerja-sosial-pendamping/> , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:45)

Penutup

Anak sebagai titipan Tuhan baiknya kita jaga dan diberikan perlindungan. Pada usia anak yang sangat rentan ini pengawasan perlu dilakukan secara ketat. Orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak agar anak tetap dalam pengawasan. Anak mudah terpengaruh karena masih dalam tahap belajar, anak melihat kemudian mencontohnya.

Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut.

Pekerja sosial sebagai profesi professional dalam masalah social yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang social, dapat merealisasikannya pada kasus kekerasan seksual pada anak ini. Dengan melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi motivator, mediator, fasilitator, dan advocator. Anak diberikan motivasi dan therapy psikologis agar anak mampu kembali bersemangat dan bersosialisasi dengan yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga
Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
<https://id-id.facebook.com/notes/a-kassandra-putranto/faktor-penyebab-maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-Indonesia/10152431526538501>

PERLINDUNGAN ANAK DARI BAHAYA KEKERASAN

Oleh:

Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani, & Risna Resnawaty

Email:

anitalistyani@gmail.com; budimtunpad@gmail.com; happytruz@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi oleh semakin merebaknya kasus pelanggaran hak anak. Padahal anak merupakan aset negara yang akan menentukan keberhasilan suatu negara di masa yang akan datang. Dimana untuk menghindari terjadinya pelanggaran akan hak anak, setiap individu diharuskan untuk memiliki kesadaran awal akan pentingnya menjaga dan melindungi hak anak. Hak anak dapat terpenuhi dengan didukung oleh keberhasilan seorang anak dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai umurnya dan juga kebutuhannya sebagai seorang anak. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu mulai dari yang paling dekat dengan anak, ialah orang tua dan keluarga, kemudian masyarakat pada umumnya, kemudian barulah negara dan pemerintah. Apabila anak-anak tidak berada dalam pengawasan yang tepat, mereka dapat beresiko dilanggar hak-haknya oleh pihak-pihak tidak bertanggung-jawab seperti pada kasus di panti asuhan The Samuels yang melanggar hak 6 orang anak penghuni panti tersebut. Dimana anak-anak panti disana tidak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak untuk memperoleh identitas diri, hak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai. Pemenuhan kebutuhan dan tugas perkembangan anak ini dapat dimulai dari setiap individu yang dimulai dengan kesadaran diri sendiri, dimana ketika melihat adanya kondisi yang berpotensi memunculkan suatu pelanggaran hak anak, melaporkan kondisi tersebut kepada KPAI yang menyediakan pelayanan untuk melindungi anak.

Kata kunci : anak, hak anak, kebutuhan anak, tugas perkembangan

PENDAHULUAN

Kasus pelanggaran hak anak kerap terjadi di berbagai wilayah, pelakunya pun tidak hanya para orang dewasa, melainkan bahkan anak-anak seumuran mereka juga dapat melanggar hak dari teman sepermainannya. Seperti pada artikel di tempo.com, dimana terdapat tragedi yang menimpa seorang anak berinisial MH (8 tahun) di Depok, Jawa Barat pada 26 Agustus 2013 silam. Dimana MH menjadi korban kekerasan dari kedua orang tuanya sendiri. Ataupun kasus di SD Bukittinggi yang terjadi pada bulan Oktober silam, dimana seorang siswi SD menerima pukulan dan tendangan dari teman-teman seumurannya.

Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh republika.co.id pada tanggal 28 Mei 2014, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelanggaran hak anak di Indonesia mencapai 21 juta kasus yang tersebar di 179 kabupaten di 34 provinsi, dimana kasus itu mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan perebutan anak, eksploitasi ekonomi, hingga perdagangan (*trafficking*).

Sedangkan definisi anak menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga definisi yang paling relevan dengan artikel ini merupakan definisi anak menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak. Selain sumber daya alam, anak merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh suatu negara, karena merekalah yang akan menentukan keadaan suatu negara di masa yang akan datang. Karenanya, anak harus dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Hal ini akan didukung oleh terpenuhinya hak mereka. Jeanne Noveline Tedja, seorang anggota DPRD Kota Depok bahkan mengatakan:

“Anak adalah sumber utama angkatan kerja. Kemampuan untuk mengoptimalkan potensi anak-anak akan memengaruhi kualitas hidup bangsa di masa depan. Ketiga, anak adalah aset peradaban bangsa. Di kemudian hari, berbagai inovasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan terus berkembang secara dinamis dan sangat bergantung dari kualitas anak-anak masa kini,”

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Maka dari pengertian ini sudah jelas bahwa kekerasan yang dilakukan kepada anak akan melanggar hak mereka, sehingga mencegah mereka dari memenuhi tugas perkembangan dan kebutuhan dasarnya. Dimana hal ini akan berakibat pada pertumbuhan yang tidak sempurna, dan berpotensi mengurangi tingkat keberhasilan suatu negara.

PEMBAHASAN

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak ada untuk membantu agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sosial dengan terlindungi dari kekerasan dan tindak kejahatan lainnya.

Masa anak-anak merupakan masa perkembangan yang akan mempengaruhi sifat, tindakan, potensi sosial, keterampilan, juga spiritual, dan kemampuannya mengambil keputusan di masa depan. Sehingga hak-hak mereka seperti, hak untuk tumbuh dan berkembang, memiliki identitas, dilindungi dari kekerasan fisik, seksual, dan emosional, bermain, dan lain sebagainya harus dipenuhi demi perkembangan fisik dan mentalnya. Karenanya, dalam UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak pasal 10 dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Kemudian Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan kekerasan pada anak sebagai tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan pada anak dipicu oleh beberapa faktor seperti pewarisan antar generasi yaitu ketika seorang anak dulunya menjadi korban kekerasan, stress yang berlebihan pada orang tua, orang tua yang tidak banyak bersosialisasi dengan lingkungannya, dan struktur keluarga yang berpotensi menimbulkan kekerasan, seperti keluarga dengan orang tua *single parent*.

Berdasarkan banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi, para pelanggar hak-hak anak juga cenderung tidak mempedulikan UU tentang Perlindungan anak, apalagi mengetahui mengenai pentingnya membantu anak untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Padahal setiap orang, terlebih lagi para orang tua, sudah sepatutnya memahami mengenai tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh anak-anaknya, juga tugas-tugas perkembangan yang akan diemban pada tiap tahapannya.

Erikson (dalam buku Dasar & Teori Perkembangan Anak (Gunarsa: 2014) memiliki beberapa tahapan perkembangan yang menurutnya akan dilalui oleh setiap manusia, dimulai dari tahap *infancy* (0-1 tahun), *early childhood* (1-3 tahun), *preschool age* (4-5 tahun), *school age* (6-12 tahun), *adolescence* (13-20 tahun), dan seterusnya. Dimana pada masa bayi, individu masih membangun kepercayaan dengan orang-rang disekitarnya. Lalu masa kanak-kanak awal, dimana individu memiliki banyak keraguan dalam bertindak, dan masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Masa pra-sekolah dimana anak mulai memiliki kemampuan yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal baru. Kemudian masa sekolah dimana anak menjadi lebih aktif dalam mempelajari berbagai hal, namun mudah juga untuk merasa rendah diri apabila gagal. Setelah itu terdapat tahap remaja, yang ditandai dengan adanya kecenderungan *identity confusion*, karena melalui tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego, dalam pengertiannya identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Sedangkan Hurlock (1980:206) membagi tahapan-tahapan perkembangan, dimana masa anak-anak dimulai dari usia 6-12 tahun dan masa remaja dimulai dari 13-21 tahun. Mengungkapkan bahwa masa remaja mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Dalam berbagai tahapan usia ini, orang tua juga sebaiknya memahami kebutuhan-kebutuhan anak. Karena apa yang menurut orang tua diperlukan oleh anak, belum tentu sesuai oleh apa yang sebenarnya dibutuhkan anak. Garrison (didalam Andi Mapiarre, 1982) menjelaskan setidaknya ada tujuh kebutuhan khas anak, yaitu :

1. Kebutuhan akan kasih sayang,

2. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok,
3. Kebutuhan untuk berdiri sendiri,
4. Kebutuhan untuk berprestasi,
5. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain,
6. Kebutuhan untuk dihargai,
7. Kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan dari perkembangan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Havighurst (1953) menyebutkan bahwa:

“Tugas-tugas dalam perkembangan adalah tugas-tugas yang timbul pada atau kira-kira pada masa perkembangan tertentu dalam kehidupan seseorang yang bilaman berhasil akan menimbulkan kebahagiaan dan akan diharapkan berhasil pada tugas perkembangan berikutnya.”

Pada dasarnya, tugas-tugas perkembangan yang diemban oleh seorang anak didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Kematangan fisik.
2. Rangsangan atau tuntutan dari masyarakat.
3. Norma pribadi mengenai aspirasi-aspirasinya.

Apabila seorang anak tidak berhasil, atau cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, maka akan menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian diri secara sosial, emosional, dan kepribadiannya terhadap lingkungan hidupnya. Keberhasilan seorang anak dalam memenuhi tugas perkembangannya akan membantunya mencapai kematangan, sehingga dia dapat mengatasi krisis emosi, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Hal ini tidak dapat dicapai sendirian oleh seorang anak, melainkan ia juga membutuhkan dukungan dari orang-orang disekitarnya, terutama kedua orang tuanya.

Tugas perkembangan pada anak-anak yang harus dipenuhi dengan bantuan orang-orang disekitarnya juga dibagi dalam dua kelompok, yaitu umur 0-6 tahun dan 6-12 tahun. Untuk kelompok umur 0-6 tahun, berikut ini adalah tugas-tugas perkembangannya:

1. Berjalan
2. Belajar memakan makanan yang keras
3. Berbicara
4. Mengatur dan mengurangi gerak tubuh yang tidak diperlukan
5. Mengenal perbedaan jenis kelamin dan cirinya
6. Mencapai stabilitas fisiologis
7. Membentuk konsep-konsep sederhana mengenai realitas sosial dan fisik
8. Melibatkan diri secara emosional dengan orang-orang disekitar

Kemudian berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan anak pada kelompok usia 6-12 tahun:

1. Melatih kemampuan fisik untuk permainan atau olah raga
2. Bergaul dengan teman-teman sebaya
3. Mengembangkan kemampuan dasar, seperti membaca, menulis, dan menghitung
4. Mengembangkan nurani, moralitas, dan skala nilai
5. Memperoleh kebebasan pribadi
6. Membentuk sikap terhadap kelompok sosial dan institusi

Faktor yang mendorong terpenuhinya tugas-tugas perkembangan ini salah satunya yaitu dengan pemenuhan hak-hak anak. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan Soerjono Soekanto, membagi hak menjadi dua, yaitu:

1. Hak searah atau relatif, dimana hak ini ada dalam hukum perikatan atau perjanjian.
2. Hak jamak arah atau absolut, dimana terbagi lagi menjadi:
 - a. Hak dalam Hukum Tata Negara,
 - b. Hak kepribadian,
 - c. Hak kekeluargaan,
 - d. Hak atas objek tidak berwujud.

Berdasarkan pembagian hak menurut Soerjono Soekanto, pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam artikel ini lebih cenderung pada hak absolut. Karena hak anak yang dimaksud disini merupakan hak yang terdapat dalam Undang-Undang, hak yang menyangkut kepribadian anak, hak anak, juga hak yang berbentuk pelayanan.

Menurut undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak mereka adalah:

1. Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan
2. Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
3. Mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya, (terkecuali apabila orang tuanya menelantarkan anaknya)
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Memperoleh pendidikan yang sesuai
6. Menyatakan pendapat, didengarkan pendapatnya
7. Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi
8. Anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dan rehabilitasi
9. Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikannya
10. Apabila kebebasannya dirampas dapat memperoleh bantuan dan membela diri, juga dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban kekerasan

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, terdapat 10 hak anak yang harus dipenuhi oleh pengasuhnya, yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan identitas
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Dengan terpenuhinya hak-hak anak, maka kesejahteraan anak tersebut dapat lebih terjamin, sehingga akan terhindar dari potensi-potensi kekerasan. Dalam sebuah artikel pada edukasi.kompasiana.com, Bronfenbrenner (2006) mengatakan bahwa kesejahteraan psikis dan fisik serta pendidikan anak sangat bergantung pada sejahtera atau tidaknya keluarga. Namun hak anak tidak hanya harus dilindungi oleh keluarga saja, namun juga oleh lingkungan sosialnya, seperti tetangga dan guru, masyarakat pada umumnya, juga pemerintah.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 Pasal 22 menyebutkan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggung jawab ini terlihat mulai diwujudkan oleh salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kota Depok, dimana mereka menyusun Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tahun 2013 silam. Kota Layak Anak yang dimaksud ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat menjadi penerus bangsa.

Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak yang dicatat pada Januari-Oktober 2013 dalam beritasatu.com, terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak didalamnya merupakan kekerasan seksual. Data dari Komnas Perlindungan Anak juga mencatat jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui program *hotline service*, dimana pada Januari-Oktober 2013, jumlah kekerasan seksual mencapai 730 kasus, kekerasan fisik 452 kasus, dan kekerasan psikis 242 kasus. Sedangkan pada Januari-April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan anak, dimana didalamnya merupakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Dengan masih banyaknya jumlah pelanggaran hak anak yang terjadi, membuktikan bahwa UU Perlindungan Anak yang berlaku saat ini masih belum dapat diterapkan oleh masyarakat. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait bahkan menyatakan, "Selama ini sudah ada UU Perlindungan Anak, namun implementasi di daerah masih lemah. Lemahnya ketika sudah dalam proses hukum, seperti dalam sidang harus menghadirkan saksi-saksi. Padahal itu cukup memberatkan bagi korban,"

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak anak yang cukup *massive* adalah kasus kekerasan di Panti Asuhan The Samuels, Tanggerang. Dimana berdasarkan artikel berita pada liputan6.com, anak-anak di panti asuhan tersebut diperlakukan tidak layak oleh pengurusnya dan melanggar banyak hak anak. Dimana mereka

tinggal di tempat yang kotor dan tidak terawat, tidak mendapat pendidikan keterampilan maupun formal, mendapat tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, juga diberi makanan yang tidak memenuhi gizi, yang sakit hanya diberikan obat saja tanpa diberikan pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki akta kelahiran dan tidak mengetahui kapan lahirnya dan orang tua asli mereka.

Berdasarkan contoh kasus diatas, hak-hak anak yang telah dilanggar berdasarkan UU No.23 Tahun 2002, yaitu dari pasal 4 sampai 9. Yaitu pelanggaran hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak untuk memperoleh identitas diri, hak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai.

Untuk menghindari semakin banyaknya kasus pelanggaran hak anak, maka perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak. Kemudian menurut UU No.3 Tahun 2002, pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Orang tua, sebagai lingkungan sosial pertama seorang anak memiliki peran besar dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan pada anak. Selain itu orang tua juga memiliki kewajiban untuk membantu anak dalam mengembangkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Dimana hal ini juga berlaku pada pengasuh dari anak yang tidak memiliki orang tua, yaitu pengasuh atau orang tua pengganti.

Sedangkan masyarakat umumnya, memiliki kewajiban dalam turut serta dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak. Seperti dengan diadakannya pengawasan pada setiap RT oleh suatu lembaga, yang akan mencatat dan melaporkan apabila melihat adanya potensi kerawanan akan pelanggaran hak anak. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi membantu secara individu dengan berbentuk pertolongan langsung, ataupun pengaduan kepada KPAI apabila melihat anak yang hak-haknya dirampas.

Kemudian bentuk dari kewajiban negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak anak yaitu menjamin hak asasi mereka tanpa adanya diskriminasi ataupun pembeda-bedaan, menyediakan sarana dan prasarana untuk perlindungan hak anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan mereka, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Apabila semua kewajiban ini dijalani oleh masing-masing pihak, maka pelanggaran hak anak dapat semakin diminimalisir. Hal ini harus dimulai dari kesadaran oleh masing-masing pihak. Salah satu hal yang dapat membantu meningkatkan kepedulian terhadap hak anak yaitu dengan adanya Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juni. Terlebihnya, bahkan lembaga sosial dapat membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat. Kegiatan ini lebih efektif apabila konsepnya lebih spesifik, misalnya hak anak yang berhadapan dengan hukum, hak anak dengan kebutuhan khusus, dan lain sebagainya.

PENUTUP

Anak harus dilindungi karena merekalah yang akan menentukan keberlangsungan dan keberhasilan suatu negara di masa yang akan datang, maka dari itu mereka harus terhindar dari berbagai perilaku kekerasan, sehingga dapat berkembang secara sempurna dengan dipenuhinya juga hak-hak mereka. Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Untuk itu, masing-masing pihak harus memiliki kesadaran dalam membantu meminimalisir kasus-kasus pelanggaran hak anak.

Untuk meminimalisir jumlah pelanggaran hak anak, maka harus dimulai dari kesadaran masing-masing individu terlebih dahulu. Untuk memunculkan kesadaran, dapat dibantu dengan adanya program peduli anak, maupun dengan cara yang sederhana seperti penyebaran informasi melalui media cetak, televisi, radio, juga media sosial. Selain itu tiap-tiap daerah dapat melakukan pengawasan dengan mengadakan semacam patroli untuk melihat potensi-potensi munculnya tindak kejahatan pada anak, dan kemudian dapat ditindak lanjuti dengan diselidiki lebih jauh. Sedangkan sebagai individu juga dapat berperan dalam pelaporan apabila melihat anak yang berpotensi atau menjadi korban kekerasan kepada pihak berwajib.

Apabila semua pihak bekerjasama dalam pemenuhan hak anak, maka diharapkan jumlah pelanggaran terhadap hak anak akan semakin berkurang. Kemudian anak-anak dapat tumbuh dengan maksimal, sehingga di masa yang akan datang, negara akan dipegang oleh mereka yang memiliki kemampuan optimal dan mempengaruhi keberhasilan Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gunarsa, Singgih D. Dasar & Teori Perkembangan Anak. 2014. Jakarta: Libri.
Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. 2012. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Hambali, Adang dan Jaenudin, Ujam. Psikologi Kepribadian: Studi atas Teori dan Tokoh Psikologi Kepribadian. 2013. Bandung: Pustaka Setia.
Mappiare, Andi. 1982. Psikologi Remaja. Surabaya: Usaha Nasional

Rujukan Elektronik:

- “Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Potensi Anak”. Melalui <http://edukasi.kompasiana.com/2013/07/11/peran-orang-tua-dalam-mengembangkan-potensi-anak-575842.html>, diunduh pada 14 September 2014
- “Penyiksaan Panti Asuhan” <http://www.liputan6.com/tag/penyiksaan-panti-asuhan>, diunduh pada 14 September 2014
- “Hak-Hak Anak, Sudahkah Terpenuhi ?” <http://pppakh.grobogan.go.id/berita/44-hak-hak-anak-sudahkah-terpenuhi.html>, diunduh pada 14 September 2014

- “Partisipasi anak: apa yang hendak dicapai?”
<http://www.sahabatanak.org/index.php/in/aksi-sahabat/pemenuhan-hak-anak/166-childrens-participation-what-do-we-want-to-accomplish-.html>, diunduh pada 14 September 2014
- “Lima Hak Anak yang Wajib Dipenuhi”
<http://lifestyle.okezone.com/read/2013/12/28/196/918598/lima-hak-anak-yang-wajib-dipenuhi>, diunduh pada 14 September 2014
- “10 Hak Anak Indonesia, Sudahkah Anda Memberikan Ini?”
<http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-Indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini>, diunduh pada 14 September 2014
- “Pelanggaran Hak Anak Indonesia Capai 21 Juta Kasus”
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/28/n6a77h-pelanggaran-hak-anak-Indonesia-capai-21-juta-kasus>, diunduh pada 14 September 2014
- “Komnas Anak Catat 2.792 Kasus Pelanggaran Hak Anak”
<http://www.suarapembaruan.com/home/komnas-anak-catat-2792-kasus-pelanggaran-hak-anak/45197>, diunduh pada 14 September 2014
- “10 Hak-Hak Anak: Pahami dan Lindungi” <http://guetau.com/informasi/10-hak-hak-anak-pahami-dan-lindungi.html>, diunduh pada 14 September 2014
- “Memahami Hak Anak dalam Keluarga”
<http://www.hidayatjayagiri.net/2013/11/memahami-hak-anak-dalam-keluarga.html>, diunduh pada 14 September 2014
- “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”
http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=891:lembaga-kesejahteraan-sosial-anak&catid=98:lingkungan-keluarga-dan-pengasuhan-alternatif&Itemid=127, diunduh pada 14 September 2014

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK

Oleh

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah

Oleh:

(nurfitrianissa@gmail.com; wahyudiriana@yahoo.com; fedry_cons@yahoo.com)

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang bagaimana kondisi anak di Indonesia. Khususnya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak. Kesejahteraan adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai kepuasan. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara. Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak – hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi permasalahan anak tersebut, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak yang menyebabkan anak tidak sejahtera, namun masih belum cukup efektif untuk menyelesaikannya. Tentu saja hal yang seperti ini harus diperbaiki. Karena anak merupakan generasi masa depan yang harus diperhatikan kesejahteraannya agar perkembangannya pun baik. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya.

Kata kunci : perlindungan anak, kesejahteraan anak, hak anak.

ABSTRACT

This article discusses how condition of children in Indonesia. Especially about how to meet the needs of the child. Welfare is a condition in which all one's needs can be met and can achieve satisfaction. Child is one that must be considered well-being, be it welfare of birth, mental well-being, and social welfare because the child is an individual who will carry on the ideals of the nation and become the next generation a country. Currently, the condition of children in Indonesia, which still need to be addressed by governments and other parties because of welfare problems. Many things that cause non-fulfillment of the needs and rights of

children, the fulfillment of rights - the rights of children deprived of because they have to work as well as the influence of psychosocial condition of children when they are working will affect the growth and development of the child. To reduce the problems of the child, the government has made little effort to notice child labor issues that caused the child does not prosper, but still not effective enough to solve it. Of course, things like this should be corrected. Because children are the future generation to be aware that development was good welfare. One of them, about the effectiveness of the Child Protection Act, because the law has been discussed how we should treat children so that children can live in peace and the protection and fulfillment of life and rights.

Keywords : child protection , child welfare, child rights.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira
Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan
Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi
Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan
Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan
Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup
Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
2. Hak Tumbuh Kembang
Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
3. Hak Partisipasi
Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Perlindungan
Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum

tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.

PERMASALAHAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK

Sebelum tahun 1992, persoalan yang menyangkut masalah anak hanyalah pada risiko kehidupan dan perkembangannya menjadi manusia. Akan tetapi setelah konferensi mengenai *children at risk* dibuka di Bergen pada bulan Mei, tahun 1992 persoalan anak tidaklah seputar itu saja. Sebagai dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, padahal sudah ada Undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 1994 terdapat 9.442 perkara, menurun pada tahun 1995 (4.724 perkara). Dari seluruh anak yang ditangkap hanya sekitar separuh yang diajukan ke pengadilan dan 83 % dari mereka kemudian penjarakan.

Selain itu, semakin meningkatnya jumlah anak terlantar. Diperkirakan bahwa pada tahun 2000-an, jumlah anak jalanan yang semula diperkirakan hanya sekitar 50.000, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 125.000. Masih berkaitan dengan masalah diatas, banyak juga anak-anak yang menjadi obyek eksploitasi seksual komersial. Diperkirakan pada tahun 2000 ada sekitar 30 persen dari seluruh pekerja seks komersial pada saat itu adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Data resmi mengenai berapa jumlah yang sebenarnya sangat sulit didapatkan karena mobilitas mereka yang sangat tinggi. Apalagi setelah krisis ekonomi terjadi, tercatat jumlah pekerja seks di Batam jumlahnya naik empat kali lipat menjadi 10.000. Jumlah uang yang berputar dalam industri seks di negeri Indonesia berkisar antara 1,8 milyar sampai 3,3 milyar setahun (data tahun 2000).

Menurut data BPS pada bulan Agustus 2000 jumlah pekerja anak sebanyak 2,3 juta. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. IPEC/ILO memperkirakan sekitar 8 juta pekerja anak di bawah usia 15 tahun. Sebagai perbandingan selama tahun 1995-1999 terdapat 11,7 juta anak yang putus sekolah. Sedangkan untuk kasus pelacuran anak, terdapat eksploitasi secara seksual yaitu 40 – 70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira – kira 30% penghuni tempat-tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun. (Laporan Situasi Anak dan Perempuan, 2000).

Selain itu, permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab-sebab tertentu tidak terurus, tidak terpelihara, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya, yang mengakibatkan terganggu atau terhambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan kepribadian anak tersebut. Adapun indikator dari anak terlantar adalah sebagai berikut:

- a. Anak umur 0-21 tahun dan belum kawin (UU No. 4/1979)
- b. Terlantar karena tidak mempunyai orang tua atau orang tua miskin sehingga tidak mampu mengurusnya.
- c. Terlantar karena keluarganya mempunyai masalah sosial psikologis/keluarga retak.
- d. Tidak sekolah atau putus sekolah.
- e. Tidak atau belum bekerja bagi yang sudah berumur 18 tahun dan belum kawin.
- f. Yang termasuk dalam kategori anak terlantar: a) anak yatim terlantar; b) anak piatu terlantar; c) anak yatim-piatu terlantar; d) anak putus sekolah, tidak sekolah atau di luar jangkauan sistem sekolah; dan e) anak yang terancam kemerosotan fungsi sosialnya.

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Seperti dikatakan oleh Zastrow, 2000 tentang kesejahteraan sosial:

“Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.”

Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator menurut Nasikun (1993) yaitu:

- (1) Rasa aman (security),
- (2) Kesejahteraan (welfare),
- (3) Kebebasan (freedom),
- (4) Jati diri (Identity).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti upaya untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang pemerintah terus melakukan inovasi-inovasi program-program yang bisa menjadi tolak ukur dalam pengentasan pekerja anak dengan cara peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu:

1. Pemerintah membuat program, misalnya:
 - Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak;
 - Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru;
 - Layanan kesehatan untuk anak;
 - Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
2. DPR/DPRD membuat UU/Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

PERAN PEKERJA SOSIAL

Pekerja sosial adalah profesi yang bekerja untuk membantu masyarakat memberfungsikan keberfungsian sosialnya. Banyak masyarakat yang bermasalah untuk bisa mengatasi permasalahan hidupnya. Jack Claridge mengatakan bahwa:

“Pekerja sosial adalah sorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja sosial dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya.”

Sedangkan untuk definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala internasional telah dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI 2003, menyatakan bahwa:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their

environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work” (DuBois & Miley, 2005: 4).

Dalam pengertian diatas disebutkan bahwa profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial. Pekerja sosial berusaha membantu anak, tidak bekerja dengan kekosongan.

KESIMPULAN

Perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya, dewasa ini masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak, seperti kasus pekerja anak, anak terlantar, pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak-anak, dan masih tingginya jumlah anak jalanan. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. Selain itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Perlu adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan restorative justice. Sehingga diversifikasi dan restorative justice dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Jika peningkatan upaya perlindungan anak dapat diatasi dengan baik, maka kesejahteraan anak pun akan lebih mudah dicapai. Karena selama ini nyartanya banyak pelanggaran hak anak yang terjadi disebabkan oleh minimnya atau masih tidak jelasnya perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Suharto, Edi dan Edi Suhandi. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Society.

Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak. 2013. Jakarta: P3KS Press

Sumber lain:

Jumlah anak telantar di seluruh Indonesia yang masih sangat tinggi, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/23/m2xabh-duh-jumlah-anak-terlantar-Indonesia-masih-4-juta-lebih>

Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Situs yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak: <http://disnakertrans.kaltimprov.go.id/berita-203-sosialisasi-kebijakan-hukum-tentang-perlindungan-perempuan-dan-anak.html>

Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989

PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TUA ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL

Oleh

Intifadah Ummuhanifah, Moch. Zainuddin, & Gigin Ginanjar Kamil Basar

Email:

(intifadah0430@gmail.com; moch.zainuddin57@gmail.com;
giginkb@mail.unpad.ac.id)

Abstrak

Anak jalanan merupakan istilah yang dipakai untuk anak-anak yang hidup di jalan yang umumnya sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah Program penanganan anak jalanan yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif mengurangi jumlah anak jalanan. Banyak program penanganan anak jalanan yang hanya berfokus pada penanganan anak jalanan saja tidak kepada orang tua anak jalanan. Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Pelayanan sosial itu sendiri adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Dalam artikel ini akan membahas mengenai pelayanan sosial kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan ditinjau dari proses pekerjaan sosial, yang dilakukan oleh Lembaga Sosial. Adapun tahap-tahap pelayanan yang diberikan sosial meliputi *assessment*, *planning*, *intervention*, *evaluation*, *termination*, dan *follow up*. Upaya peningkatan pelayanan sangat diperlukan oleh pengurus Lembaga Sosial dan Pekerja Sosial, agar tercipta pelayanan sosial yang lebih baik bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Pelayanan, Pekerjaan Sosial

Pendahuluan

Anak jalanan merupakan istilah yang dipakai untuk anak-anak yang hidup di jalan yang umumnya sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. UNICEF lalu memakai istilah “*Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah

di jalan raya. Menurut Suyanto (2010), “anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat”. Anak disini adalah setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun (*Convention on The Right of The Child*) atau dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak jalanan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi Indonesia saat ini. Tercatat Pada Tahun 2004, menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, jumlah anak jalanan sebesar 98.113 orang yang tersebar di 30 provinsi. Khusus wilayah Bandung kurang lebih berjumlah 5.500 anak jalanan (Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2006) lalu pada tahun 2012 anak jalanan di Kota Bandung berjumlah 20.825 anak. Dari data tersebut terlihat dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan semakin bertambah. Semakin bertambahnya anak jalanan di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya anak jalanan. Menurut Odi Solahudin, ada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan yaitu keluarga miskin, perceraian dan kehilangan orang tua, kekerasan keluarga, keterbatasan ruang dalam rumah, eksploitasi ekonomi, dan keluarga *homeless*. Pada umumnya yang terjadi di Indonesia faktor utama munculnya anak jalanan adalah kemiskinan.

Salah satu faktor kemiskinan adalah kurangnya penghasilan. Penghasilan orang tua anak jalanan yang sedikit, memaksa anak untuk ikut membantu orang tuanya mencari uang di jalanan. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, pasal 2 menyebutkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non dikriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dari prinsip-prinsip perlindungan anak, anak jalanan tidak mendapatkan kelangsungan hidup dan perkembangan yang baik dalam tumbuh kembang selayaknya anak-anak. Fungsi orang tua yang hilang dalam kehidupan anak jalanan merupakan akar masalah yang kerap dilupakan dalam upaya penanganan anak jalanan selama ini.

Dalam ilmu kesejahteraan sosial, terdapat istilah pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksudkan sebagai pelayanan yang difokuskan pada bantuan untuk perorangan dan keluarga-keluarga yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial, atau keterlantaran yang patut disembuhkan. Alfred J. Kahn membedakan pelayanan sosial dalam dua golongan, yaitu:

1. Pelayanan-pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya, seperti pendidikan dan bantuan dalam bentuk uang yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Pelayanan yang jelas ruang lingkup dan batas-batas kewenangannya walaupun selalu mengalami perubahan, seperti kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya.

Program-program pelayanan sosial ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yaitu organisasi-organisasi pelayanan sosial. Pemerintah juga mempunyai program dalam pengentasan anak jalanan, tetapi yang terjadi di lapangan adalah masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan mulai dari akses kepada pelayanan tersebut ataupun cakupan program hanya difokuskan untuk anak jalanan saja. Sehingga dalam upaya mengisi kekurangan program pemerintah, diperlukan peran pihak swasta atau lembaga sosial juga dalam menangani masalah anak jalanan.

Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan

Dalam meninjau pelayanan sosial bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai definisi pelayanan sosial menurut para ahli. Di negara-negara berkembang, pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai pelayanan yang difokuskan pada bantuan untuk perorangan dan keluarga-keluarga yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial, atau keterlantaran yang patut disembuhkan. (Soetarso, 1997:24). Alfred J. Kahn juga menjelaskan mengenai pelayanan sosial, yaitu:

“pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada, dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran.”

Definisi lain dikemukakan oleh Sainsbury (dalam Fahrudin, 2012: 48) menyatakan bahwa dalam arti luas, pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pelayanan sosial, diantara lain adalah:

1. Perbaikan secara terus-menerus kondisi-kondisi kehidupan orang.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Peningkatan orientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
4. Pemanfaatan dan penciptaan sumber-sumber kemasyarakatan untuk tujuan-tujuan pembangunan.
5. Penyediaan struktur-struktur kelembagaan bagi berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisasi lainnya.

Sedangkan Richard M. Titmuss menyatakan fungsi-fungsi pelayanan sosial ditinjau dari segi pandangan masyarakat, yaitu:

1. Pelayanan atau bantuan dalam bentuk uang atau barang yang dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan perorangan, keluarga, atau kelompok, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (program penitipan anak/bayi secara harian).
2. Pelayanan atau bantuan dalam bentuk uang atau barang yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (hukuman bersyarat dengan bimbingan).
3. Pelayanan atau bantuan dalam bentuk uang atau barang yang dimaksudkan sebagai suatu investasi di dalam diri orang yang penting artinya guna perwujudan tujuan-tujuan sosial (program ketenagakerjaan).
4. Pelayanan atau bantuan dalam bentuk uang atau barang yang dimaksudkan sebagai kompensasi terjadinya gangguan sosial yang diakibatkan oleh kesalahan pelayanan sedangkan tanggung jawab bagi terjadinya kesalahan ini tidak dapat ditentukan (kompensasi kecelakaan industri, kompensasi bagi korban diskriminasi rasial). (Soetarso, 1997:23)

Dalam penanganan anak jalanan dan orang tua anak jalanan yang dilakukan oleh lembaga sosial. Sebagai contoh, di Bandung terdapat bentuk pelayanan sosial kepada anak dan orang tua anak jalanan yang dilakukan oleh BP2M Salman. Program pelayanan sosial tersebut adalah RIKSA (Rumah Inkubasi Keluarga Sayang Anak). RIKSA adalah program pemberdayaan masyarakat perkotaan, khususnya masalah keluarga dan anak miskin yang termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Pada saat ini, alternatif penanganan anak jalanan mengarah ke pemberian pelayanan sosial kepada anak jalanan yang dilakukan oleh lembaga sosial, contohnya seperti yang dilakukan oleh BP2M Salman. Sebagai sebuah bentuk pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak, maka pelayanan ini berhubungan dengan Pekerjaan Sosial. Adapun definisi mengenai pekerjaan sosial menurut Apte (1980) dalam Wibhawa, dkk(2010:45) menjelaskan mengenai pekerjaan sosial yaitu :

“Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relation. Which help individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfaction and interdependence.”

Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. (Friedlander, Walter A. Dan Apte 1980:4)

Pekerjaan sosial sangat berperan penting didalam pelayanan kepada anak. Proses pekerjaan sosial menurut para ahli berbeda-beda. Dalam buku “Understanding Generalist Practice” menjelaskan 6 tahap dalam proses pekerjaan sosial pendekatan pemecahan masalah (*problem-solving approach*), yaitu:

1. Assessment

According to Siporin (1975, p.224), assessment is the “differential, individualized, and accurate identification and evaluation of problems,

people, and situations and of their interrelations, to serve as a sound basis for differential helping intervention.”

“Menurut Siporin (1975, p.224), assessment adalah diferensial, individual, dan identifikasi yang akurat dan evaluasi masalah, orang, dan situasi dan keterkaitan diantara mereka, sebagai dasar yang kuat untuk melakukan intervensi.

Sedangkan Sheafor et al. (1988, p.222) mendefinisikan assessment sebagai *“the process of interpreting or giving meaning and conceptual order to data; it is an attempt to make sense out of the data that have been collected.”* They continue that assessment *“is an activity directed toward understanding the client’s problem or situation and developing a plan of action (p.224).* In the other word, assessment refers to defining issues and gathering relevant information about a problem so that decisions can be made what to do to solve it.

“proses penafsiran atau memberikan makna dan konseptual data; ini adalah usaha untuk membuat arti dari data yang telah dikumpulkan.” Mereka melanjutkan bahwa assessment “adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami masalah atau situasi klien dan mengembangkan rencana tindakan (p.224). Dengan kata lain, assessment mengacu pada penentuan masalah dan mengumpulkan informasi yang relevan tentang masalah sehingga dapat dibuat apa yang harus dilakukan untuk memecahkannya.

2. Planning

Assessment mengatur tingkatan untuk intervensi. Perencanaan menentukan apa yang harus dilakukan. Perencanaan didasarkan pada assessment Anda tentang klien situasi, masalah, kebutuhan, dan kekuatan. Selanjutnya, perencanaan berfungsi untuk memandu bagaimana melanjutkan untuk membantu klien.

3. The Intervention

Meliputi perbuatan yang sebenarnya dari rencana. Klien dan pekerja sosial mengikuti rencana mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kemajuan selama intervensi harus terus dipantau dan dinilai. Terkadang masalah baru, situasi, dan kondisi mengharuskan rencana diubah.

4. Evaluation

Merupakan evaluasi dari intervensi. Para pekerja sosial harus bertanggung jawab. Artinya, mereka harus membuktikan bahwa intervensi mereka sudah efektif. Setiap tujuan dievaluasi sejauh mana telah tercapai.

5. Termination

Dalam tahapan ini, hubungan pekerja sosial dan klien akhirnya harus berakhir. Penentuan waktu yang tepat dalam terminasi itu penting. Hellenbrand mengutip setidaknya tiga jenis dasar terminasi (1987, hal 1765.):

- *“First, some terminations are “natural”. That is goals have been achieved, and it is time for the clients to take what they have learned and go out on their own.”*
- “Pertama, beberapa terminasi adalah “alami”. Itu adalah tujuan yang pernah dicapai, dan sudah saatnya untuk klien untuk mengambil apa yang mereka telah pelajari dan pergi keluar sendiri.”
- *“Second, other termination is “forced” as, for example, when a worker leaves the agency. Another example involves the client leaving an institution for some reason or losing eligibility for services.”*
- “Kedua, terminasi lain "dipaksa", contohnya, ketika pekerja sosial meninggalkan agensi. Contoh lain adalah ketika klien meninggalkan sebuah lembaga untuk beberapa alasan atau kehilangan *eligibility* untuk menerima layanan.”
- *“Third, there are “unplanned” terminations. The client just does not come back. The family moves. The client is no longer motivated to return.”*
- “Ketiga adalah “tidak direncanakan”. Klien hanya tidak datang kembali. Keluarganya pindah. Klien tidak lagi termotivasi untuk kembali.”

Terminasi paling efektif mengikuti proses ketidaksepakatan dan stabilisasi. Mereka harus mendorong klien untuk berbagi perasaan tentang terminasi. Selain itu, praktisi harus jelas mengidentifikasi kemajuan apa saja yang telah dibuat.

6. Follow-Up

Pekerja dapat bingung oleh isu-isu dan tuntutan lainnya. Informasi follow up mungkin sulit untuk didapatkan. Follow up merupakan langkah penting dalam proses intervensi. Dalam meliputi memeriksa untuk mengetahui apakah klien telah mempertahankan kemajuan dan masih berfungsi dengan baik pada mereka sendiri. Apakah klien perlu ditinjau kembali untuk intervensi lain?

Penutup (Simpulan dan Saran)

Dari penjelasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang didapat. Agar menghasilkan program yang lebih efektif dibutuhkan pelayanan sosial yang baik dengan mengikuti semua tahapan dalam proses pekerjaan sosial.

Sebagai seorang pekerja sosial yang bekerja dalam suatu program pelayanan sosial. Maka saran yang bisa diberikan berupa peningkatan pelayanan dengan memperhatikan sistem lingkungan yang disebut dengan sistem dasar. Dalam perpektif pekerjaan sosial, sistem lingkungan memiliki kontribusi signifikan dalam proses dan praktek pekerjaan sosial, Sistem dasar ini merupakan *significant factors*

yang harus diidentifikasi dan diklasifikasikan oleh pekerja sosial dalam menjalankan peran-peran profesionalnya. Pincus dan Minahan (1973) dalam Suharto (1997:319) sistem dasar ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Sistem Pelaksana perubahan (change agent system).
Sistem pelaksana perubahan adalah sekelompok orang yang tugasnya memberi bantuan atas dasar keahlian yang berbeda-beda dan bekerja dengan sistem yang berbeda-beda pula ukurannya. Seorang pekerja sosial dapat disebut sebagai pelaksana perubahan, sementara itu lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mempekerjakannya disebut sebagai sistem pelaksana perubahan
2. Sistem klien
Sistem klien dapat merupakan individu, kelompok, keluarga, organisasi atau masyarakat yang meminta bantuan atau pelayanan kepada sistem pelaksana perubahan
3. Sistem Sasaran
Sistem sasaran adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan sasaran perubahan, atau dijadikan media yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pertolongan.
4. Sistem Kegiatan
Sistem kegiatan menunjuk pada orang-orang yang bekerja sama dengan pekerja sosial untuk melakukan usaha-usaha perubahan melalui pelaksanaan tugas-tugas atau program kegiatan.(Pincus,1973:53-68)

Adanya 4 sistem ini, diharapkan dapat digunakan oleh pengurus yayasan beserta pekerja sosial agar tercipta pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kirst-Ashman, Karen K & Grafton H. Hull, Jr. 1993. *Understanding Generalist Practice*. Chicago: Nelson-Hall Publishers.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2003. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soetarso. 1997. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.

Sumber lain:

<http://apeksi.or.id/index.php/berita/449-2014-bandung-bebas-anak-jalanan> (diakses pada tanggal 15 Oktober, Pukul 10.00).

<http://www.tempo.co/read/news/2010/01/15/058219384/Pemerintah-Siapkan-Rp-184-Miliar-untuk-Urus-Anak-Jalanan> (diakses pada tanggal 15 Oktober, Pukul 09.00).

PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK(PKSA) DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

Oleh

Yasmin Anwar Putri, Nandang Mulyana, & Risna Resnawaty

Email:

(mulyananandang@gmail.com; happytruz@yahoo.com)

ABSTRAK

Keberadaan anak jalanan merupakan akibat langsung dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Anak tidak mencukupi kebutuhan makan, pendidikan, rasa nyaman hingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial sebagai anak secara wajar. Belum adanya Undang-undang khusus mengenai anak jalanan seperti peraturan daerah, peraturan pusat, atau yang lainnya juga menyebabkan aparat penegak hukum sulit mengadakan tindakan hukum dan pencegahan anak-anak untuk tidak berada di jalan. Sehingga perlu adanya dukungan dari keluarga maupun pemerintah untuk memulihkan keberfungsian sosial anak itu sendiri. Salah satu program untuk menangani anak jalanan yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini dibentuk atas dasar semakin bertambahnya anak-anak jalanan di Indonesia. Secara konseptual PKSA lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah berdasarkan pendekatan anak, orang tua dan keluarga (*family based care*), dan kepada masyarakat yaitu Lembaga kesejahteraan sosial yang khusus menangani anak (LKSA). PKSA dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat yang meliputi bantuan sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, keterampilan dan lain-lain), penguatan dan tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

Kata Kunci : Program Kesejahteraan Sosial Anak, kesejahteraan anak

PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, dimana anaak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,

asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa “orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak”.

Pada konteks kesejahteraan sosial anak, permasalahannya adalah belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil dan kebebasan fundamental, kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan, dan pendidikan. Dalam konteks pengasuhan anak, permasalahan dilihat dari pelaksanaan kewajiban orang tua atau orang tua penggantian lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dalam pengasuhan anak. Sedangkan dalam isu perlindungan anak yaitu belum terpenuhinya hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pihak-pihak yang berkewajiban melindungi anak seperti keluarga, masyarakat, atau lembaga perlindungan anak.

Permasalahan anak menjadi perhatian besar sejak lama. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2006), jumlah anak Indonesia di bawah 18 tahun mencapai 79.898.000 jiwa, dan mengalami peningkatan menjadi 85.146.000 jiwa pada tahun 2008. Sementara itu, Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata baru bisa menangani 3,7% atau sekitar 170.000 anak/tahun.

Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-Masyarakat-dan Orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.

Di lingkup Kementerian Sosial (selanjutnya disebut Kemensos) untuk mempercepat penanganan masalah sosial; anak, pada tahun 2009 Direktorat Kesejahteraan Sosial

Anak mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui kegiatan uji coba penanganan anak jalanan di lima wilayah yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. PKSA dikuatkan melalui kebijakan pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dimana diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya PKSA dikuatkan lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional salah satunya PKS-Anak Jalanan. Selanjutnya, sebagai tindak

lanjut dari Instruksi Presiden, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

Pada tahun 2013, penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial Anak sebesar 175.611 anak. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak dapat terwujud. PKSA juga mendorong perubahan paradigma dalam pengasuhan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan masyarakat, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat merespon keberagaman kebutuhan melalui tabungan.

Program Kesejahteraan Sosial Anak merupakan bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial secara luas. Kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Dalam konsep kesejahteraan sosial, harus terdapat aspek pencegahan (primer), penanganan resiko (sekunder), maupun penanganan korban (tersier).

Program Kesejahteraan Sosial Anak juga mencakup aspek perlindungan anak. disini, titik berat ada pada penanganan masalah yang dialami anak. Konsep ini masuk dalam pelayanan tersier. Dalam PKSA, terdapat 5 cluster pelayanan anak, salah satunya adalah cluster Anak Jalanan.

PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang sangat kompleks bahkan hal tersebut membentuk sebuah lingkaran yang berujung yang sulit dilihat ujung pangkalnya. Kalangan aparat hukum, polisi misalnya, memandang bahwa payung kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani anak jalanan belum ada. Mereka sulit untuk melakukan tindakan hukum berhubung tidak adanya undang-undang khusus mengenai anak jalanan seperti misalnya peraturan daerah, peraturan pusat atau yang lainnya sehingga dirasa sulit mengadakan pencegahan agar anak-anak tidak berada di jalan.

Namun, disisi lain dapat dikatakan bahwa anak jalanan mengalami kondisi yang tidak menyenangkan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spirirual. Dengan kata lain anak jalanan umumnya belum berada dalam kesejahteraan sosial dimana kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Kebijakan dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral, jangkauan pelayanan terbatas, mengedepankan pendekatan institusi/panti sosial, dan dilaksanakan tanpa rencana strategis nasional. Sedangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sekarang dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat yang meliputi :

1. Bantuan sosial/subsidi pemenuhan hak dasar seperti akta kelahiran, tempat tinggal, nutrisi, air bersih, dan lain-lain.
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seperti akses pendidikan dasar, akses pelayanan kesehatan, akses pelayanan rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
3. Pengembangan potensi diri dan kreativitas anak
4. Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
5. Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak
6. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak

PKSA yang dilaksanakan dengan efektif seharusnya membawa beberapa dampak positif bagi banyak pihak, antara lain bagi penerima manfaat (klien), keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Hal-hal yang seharusnya didapatkan anak jalanan terkait dengan PKS-Anjal yaitu anak kembali ke sekolah, anak mendapat akses ke Puskesmas bila sakit melalui Kartu sehat, presentase anak turun ke jalan menurun baik dari segi jumlah dan lama di jalan, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan akses fasilitas dan pengobatan kesehatan, memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang bahaya-bahaya termasuk bahaya di jalanan, memperoleh kemudahan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan termasuk pelecehan seksual, memperoleh kemudahan mendapat perlindungan termasuk penelantaran dari ibunya.

Masalah anak jalanan ini tidak bisa terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk mengeluarkan anak dari jalan diperlukan dukungan keluarga dan lingkungan, namun dalam kenyataannya masih ada keluarga yang kurang mendukung dalam arti masih menyuruh anaknya turun ke jalan untuk membantu ekonomi keluarga dan juga masih ada lingkungan yang kurang mendukung yaitu masih memberikan stigma kepada anak jalanan dan belum melibatkan anak di kegiatan lingkungan. Padahal salah satu upaya PKSA adalah penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak misalnya meningkatnya peran orang tua dalam pemenuhan makanan bergizi, orang tua mengakseskan anaknya ke pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Anak jalanan merupakan bagian dari anak yaitu siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secaramaksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkaran keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal sampai pusat, hingga masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka anak akan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tumbuh-kembang secara optimal

sesuai potensinya. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih banyak anak Indonesia masih hidup dalam beragam situasi sulit yang membuat kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya terancam termasuk anak jalanan.

Sebelumnya masalah anak dan masalah-masalah perlindungan anak hanya difokuskan pada anak, keluarga dan masyarakat belum banyak disentuh. Misalnya pada penanganan anak jalanan ini banyak diserahkan ke lembaga atau panti sosial dimana di dalam penanganannya orang tua atau keluarga pengganti kurang dilibatkan. Anak lebih banyak dicabut dari lingkungan keluarga. Pelayanan dalam panti hanya berfokus pada klien bukan sistem klien, maksudnya panti sosial belum melaksanakan intervensi kepada keluarga dan masyarakat dari proses pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Padahal keluarga menjadi salah satu faktor penting pendukung tumbuh kembangnya anak. Peran keluarga dan masyarakat menjadi penting, mengingat pemenuhan hak-hak dan akses kebutuhan seseorang tidak bisa dipenuhi dan harus dipenuhi oleh panti sosial.

PENUTUP

Rekomendasi yang akan saya berikan dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan : harmonisasi kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, edukasi yang tepat dan sama bagi pelaksana program kesejahteraan dan perlindungan anak, pemantauan daerah yang belum menindaklanjuti Undang-Undang atau peraturan di tingkat nasional dan bagi yang telah menindaklanjuti diperkuat dalam substansinya, adanya sinergi dalam implementasi kebijakan antar kementerian terkait juga ditindaklanjuti oleh aparaturnya tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Manajemen keuangan :
Sumber keuangan yang ada baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dana masyarakat dan bantuan luar negeri di sinergikan untuk program terutama untuk anak bermasalah juga diatur dan disesuaikan sedemikian rupa jumlahnya dengan kebutuhan.
3. Manajemen SDM :
Ditingkatkan kuantitas dan kualitas SDM misalnya pengetahuan dalam menangani kluster tertentu, terutama pendamping yang berasal dari masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas TKSA, pendamping/pekerja sosial dari LKSA di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak khususnya lagi dalam penanganan masing-masing kluster diberikan pendidikan dan pelatihan yang bisa dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Kesejahteraan Sosial di Jakarta dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang keberadaannya ada di enam wilayah kerja yaitu Padang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makasar, dan Papua.
4. Manajemen data :

pendataan lebih mendalam untuk perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi, tidak hanya berasal dari yang melapor saja. Tapi dilakukan cara lain agar hal-hal tersebut bisa diketahui.

5. Perlu adanya pengawasan dengan sistem yang memiliki indikator baku misalnya untuk indikator kualitas suatu program.
6. Program yang diberikan disesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di tempat sasaran program itu diberikan.
7. LKSA dalam pelaksanaan harus melakukan strategi lain agar tidak selalu bergantung pada dana operasional yang jumlahnya terbatas, misalnya bekerjasama dengan berbagai CSR perusahaan.
8. Adanya peningkatan kapasitas keluarga/keluarga pengganti yang dilakukan oleh pekerja sosial anak yang bernaung di bawah LKSA melalui kunjungan rumah.
9. Anak-anak untuk umur tertentu, remaja dan keluarga, dan masyarakat dilibatkan dalam proses asesmen, penyelesaian masalah, pelaksanaan, dan evaluasi.
10. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama (KUBE)
11. Kegiatan PKSA disinergikan dengan kegiatan karang taruna dalam hal pencegahan masalah anak jalanan, keterlantaran, kenakalan pada anak, dengan kegiatan pengisian waktu luang dan kegiatan-kegiatan peningkatan kreativitas anak.
12. Pihak-pihak terkait punya keinginan bersama untuk merencanakan, melaksanakan, melakukan pemantauan secara bersama. Masing-masing direktorat terkait punya target atau indikator masing-masing sesuai peranannya. Agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, terkait anggaran tidak akan menumpuk pada satu bagian juga banyak masalah yang sekaligus bisa terselesaikan sekaligus.
13. Sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa kesejahteraan sosial mengkaji keilmuan baik dari bangku kelas maupun praktik langsung lewat kegiatan maupun organisasi dalam atau luar kampus untuk memperkaya pengalaman dan persiapan kontribusi untuk penanganan masalah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, Mulia. Dkk. Penelitian Evaluasi Program-program kesejahteraan sosial di Indonesia, Executif Summary Hasil Penelitian Tahun 2012 Puslitbang Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jakarta: P3KS Press
- Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. 2013. Jakarta: P3KS Press
- DirektoratKesejahteraanSosialAnak. 2011. PedomanOperasional PKSA. Jakarta :KementerianSosial RI

Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Executif Summary Hasil Penelitian Tahun 2013 Puslitbang Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jakarta: P3KS Press

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkanlah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010. Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989

Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama

Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: cv. Haji mas agung.

<http://www.pksa-kemensos.com/> diakses tanggal 25 September 2014 pukul 15.26 Pedoman PKSA 2011

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

UPAYA PENANGANAN PEKERJA SEKSUAL ANAK

Oleh

Puspa Sagara Asih, Hadiyanto A Rachim, & Nandang Mulyana

ABSTRAK

Perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran, merupakan praktek yang tidak berpihak pada anak-anak. Berbagai Stigma sosial, resiko penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), bahkan HIV/AIDS dan beberapa kenakalan remaja sangat rentan atas anak-anak yang dilacurkan. Selain bahaya akan penyakit IMS, anak yang masih belum stabil kondisi psikososialnya akan mengalami beberapa gangguan pada perkembangan psikis dan sosialnya. Pemerintah tidak hanya diam menanggapi isu ini, beberapa peraturan perlindungan dan program untuk mensejahterakan anak telah dibuat dan dijalani, namun belum mampu menekan maraknya perdagangan anak perempuan yang dilacurkan serta masih banyaknya praktek pelacuran anak terjadi. Bukan hanya pemerintah yang memiliki andil dalam menekan angka ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak), namun masyarakat juga memiliki andil dalam menekan angka jumlah ESKA. Berdasarkan beberapa jurnal ilmiah dan artikel yang telah penulis baca, menunjukkan bahwa aktor atau pelaku perdagangan anak ternyata seringkali juga dilakukan oleh orang dekat bahkan oleh kerabatnya sendiri termasuk oleh perempuan itu sendiri. Praktek perdagangan yang dilakukan oleh sesama perempuan, seringkali tersembunyi dengan berbagai dalih tanpa terlihat ada paksaan, yang justru menjadikan mereka korban. Sebagai profesi yang mendalami mengenai psikososial individu, pekerja sosial diharapkan mampu untuk membantu mengatasi ESKA melalui pendekatan, *assessment* serta metode-metode *casework*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh praktisi pekerja sosial dalam kasus ini adalah sebagai *educator*, *fasilitator*, *enabler*, *broker* dan *advocator*.

Kata Kunci: Pelacuran Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pekerjaan Sosial, *Casework*.

PENDAHULUAN

Fenomena *human trafficking* atau perdagangan manusia pada konteks anak belakangan ini marak dilakukan, anak-anak yang diperjual-belikan ini bukan hanya merambah pada sektor industri, pertanian, dan perkebunan saja tetapi juga sampai pada perdagangan anak dalam dunia pelacuran. Semakin hari fenomena anak yang dilacurkan semakin marak dilakukan dan memprihatinkan. Kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan dan Kota besar lainnya menjadi beberapa dari banyak kota-kota besar yang masih terdapat banyak sekali pelacur anak.

Pada kenyataan yang terjadi sekarang adalah jumlah anak yang menjadi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) semakin banyak dan jumlah

penyebaran pun diperkirakan hanya bisa dihitung dipermukaan. Di Indonesia pada tahun 2010 tercatat 40.000 – 70.000 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Mayoritas dari mereka dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik-praktik tersebut terutama berlangsung di pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di Semarang, Yogya dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat (ILO-IPEC, 2010). Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2010 sebanyak 9000 anak atau sekitar 30 persen dari total PSK 22.380 orang (Dinas Sosial, 2010). Mengacu kepada data Koalisi Nasional Penghapusan ESKA, ada 150.000 anak Indonesia dilacurkan dan diperdagangkan untuk tujuan seksual Data tersebut menunjukkan bahwa semakin maraknya tindak pidana seksual komersial anak.

Dapat dilihat bahwa angka anak yang terlibat dalam Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) amat mencengangkan dan mengejutkan. Lebih dari 100.000 anak Indonesia diperjual-belikan dengan tujuan seksual. Kondisi ekonomi keluarga, kurangnya pengetahuan dan informasi, rendahnya tingkat pendidikan serta masih rendahnya upaya perlindungan anak merupakan beberapa faktor yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pelacuran anak tersebut.

PEMBAHASAN

Data mengenai anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia pada tahun 2010 tercatat 40.000 – 70.000. Mayoritas dari mereka dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik-praktik tersebut terutama berlangsung di pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di Semarang, Yogya dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat (ILO-IPEC, 2010). Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2010 sebanyak 9000 anak atau sekitar 30 persen dari total PSK 22.380 orang (Dinas Sosial, 2010).

KAP Indonesia mengungkapkan bahwa hal yang paling mengejutkan adalah banyaknya anak-anak sekolah yang telah terjerumus dengan ESKA dan terlibat transaksi seks. Faktor penyebab bukan hanya faktor kemiskinan dan ekonomi saja, tetapi sekarang beralih kepada faktor kedekatan, kenyamanan, keamanan dan gaya hidup hedonisme. Hubungan kuat lain antara perilaku seksual remaja sekolah dengan dunia pendidikan adalah alasan yang digunakan para pelajar siswi masuk ke dalam seks komersial, walaupun imbalan yang mereka dapat tidak begitu besar. Teman yang diajak atau dilibatkan ke dunia seksual juga masih mempunyai kedekatan hubungan emosional yang diikat oleh kenyataan bersekolah di sekolah yang sama atau teman satu *geng* atau kelompok. Modus operasi yang digunakan dalam menjebak anak-anak masuk ke dalam dunia pelacuran, umumnya diajak oleh teman yang lebih dahulu masuk ke dunia ini, lalu diperkenalkan dengan tamu. Dapat diprediksi selanjutnya anak-anak mencari tamu sendiri dengan cara ke diskotik, atau langsung menghubungi tamu tersebut. Situasi-situasi di atas seringkali menjadi situasi yang membahayakan bagi anak untuk hadir dalam situasi

seks eksploitasi seks komersial. Sehingga beberapa kasus ditemukan anak berada dalam situasi krisis yang mengharuskan anak keluar dari situasi tersebut.

Pada sebuah blog dengan domain <http://saveIndonesianchildren.wordpress.com> memuat kasus yang dialami Mawar usia 16 tahun. Mawar, akan genap 16 tahun pada bulan September nanti. Rela menjual diri untuk melayani nafsu om-om karena desakkan ekonomi. “Biaya pendidikan mahal, biaya hidup mahal, mau bekerja yang benar saya masih sekolah, sedangkan kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Mana pemerintah menaikkan harga BBM” demikian kilahnya. Dari data yang ada diperkirakan, 30 % pelacur atau pekerja seks komersial di Indonesia dijalani oleh anak-anak dibawah umur dan dibawah 18 tahun.

Kekhawatiran dan keprihatinan mengenai permasalahan ESKA yang telah dikemukakan di atas menggugah untuk melakukan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan eksploitasi seks komersial anak dikalangan remaja dengan memperhatikan kecenderungan pergaulan remaja yang mengarah kepada perilaku seks komersial dikalangan anak disekolah. Apalagi peralihan masa kanak-kanak menuju remaja adalah masa-masa yang sangat riskan terhadap perubahan. Hurlock (1980 : 206-207) juga mengungkapkan bahwa

“Masa remaja adalah periode penting, peralihan dan perubahan. Dimana masa remaja akan dimulai dari perubahan fisik yang cepat dengan disertai perubahan mental yang cepat pula. Perubahan tersebut mempengaruhi tingkah laku individu dan mengakibatkan penyesuaian nilai-nilai yang bergeser. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya terjadi secara fisik saja, tetapi berakibat pada perubahan emosi, minat, peran, pola perilaku dan nilai-nilai”.

Beberapa anak yang terjerumus kedalam pelacuran ini tidak hanya karena desakan ekonomi saja, namun ada beberapa diantara mereka yang terjebak dalam pelacuran karena pengaruh lingkungan. Penulis menganalisa bahwa seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dan kurang akan rasa kasih sayang serta kelekatan dengan orangtuanya dapat berpotensi untuk mencari apa yang dia butuhkan di tempat lain yang mungkin akan berdampak buruk kedepannya. Lisa (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu contoh remaja yang terjerumus ke dalam dunia pelacuran bukan karena kondisi ekonomi yang lemah serta rendahnya tingkat pendidikan.

Lisa (16 tahun) menjadi pelacur di samping statusnya sebagai seorang pelajar di kelas dua sebuah SMA favorit di Medan, karena pergaulan modern yang salah kaprah. Menurutnya ia menjadi pelacur karena pergaulannya dengan seorang pria ganteng bermobil kijang yang juga mahasiswa perguruan tinggi swasta di Medan. Pergaulan Lisa dengan sang pacar akhirnya menjadi sebuah hubungan yang lebih dalam. Lisa menyerahkan kegadisannya pada sang pacar, saat itu ia lagi “on” (istilah mengalami halusinasi akibat obat terlarang).

Namun belakangan, sang pacar yang akhirnya pindah ke luar Sumatera dan harus berpisah dengan Lisa. Kondisi ini ternyata memperburuk kehidupannya. Selain ia kehilangan tempat untuk mencurahkan rasa rindu, ia juga telah mencapai kondisi rawan dalam penggunaan obat terlarang. Tadinya, hal ini masih dapat ditanggulangnya dengan menghabiskan uang buku, uang sekolah, dan uang-uang lain yang ia minta dari orang tuanya. Tapi semua itu tidaklah berlangsung lama. Setelah mendapat beberapa surat teguran dari pihak sekolah akhirnya ia harus mengalami peraturan uang ketat, dimana orang tua tidak lagi memberikan uang secara berlebihan tetapi lebih teratur sedemikian rupa hingga hanya cukup untuk kebutuhan seorang remaja kota biasa.

Kondisi Lisa yang demikian mengharuskannya untuk mencari uang lebih untuk memberi beberapa butir pil setan demi khayalannya. Dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang gadis yang duduk di bangku sekolah. Jalan akhir yang dia tempuh setelah berkonsultasi dengan temannya adalah dengan mencoba mendekati para Om-om senang atau para eksekutif muda yang biasa mereka jumpai di pusat-pusat hiburan. Dan demi beberapa butir pil akhirnya Lisa telah menjerumuskan diri ke dalam dunia pelacuran.

(Sumber: <http://sosbud.kompasiana.com/2010/03/23/bisnis-pelacuran-anak-ahmad-sofian-pkpa-100740.html> diakses pada tanggal 11 Desember 2014 Pukul 23.53)

Kasus yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pelacuran anak tidak hanya menjadi bisnis para mucikari seperti yang selama ini nampak ke permukaan, tetapi juga karena kondisi psikologi, sosial, kultural, dan ekonomi keluarga.

Tahap perkembangan Lisa (16 Tahun) menurut Erickson masuk kedalam tahapan *Adolesence* (remaja), yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Masa Remaja (*adolescence*) ditandai adanya kecenderungan *Identity – Identity Confusion*. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini, pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Dorongan pembentukan identitas diri yang kuat di satu pihak, sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya.

Dalam kasus Lisa, *trend* yang sedang populer di kalangan anak remaja seusianya adalah memiliki pacar atau teman lelaki yang tampan, kaya, memiliki kendaraan, serta seorang mahasiswa. Sehingga pada saat lelaki dengan tipe tersebut mendekatinya, dia menyambut dengan baik karena Lisa butuh pengakuan dari teman-teman sebayanya.

Setiap perubahan dan peralihan pada remaja seringkali menjadi faktor pemicu mereka terjebak dalam situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan mereka sendiri seperti terjebak dalam situasi eksploitasi seks komersial anak (ESKA). Sehingga semua pengambilan keputusan seringkali terkesan terburu-buru tanpa difikirkan lebih dahulu, akibatnya mereka seringkali menyesal diakhirnya

Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah sebuah aktivitas profesional yang membantu proses pelayanan pemecahan masalah terhadap permasalahan baik individu, kelompok ataupun masyarakat. Pekerja sosial membantu memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi serta memberikan pilihan-pilihan guna membantu menyelesaikan masalah. Kaitanya dengan masalah ESKA pekerja sosial juga menghubungkan aspek yang telah didapat dalam asesmen dengan sistem ekologis, guna melihat hubungan atau keterkaitan masalah sehingga memberikan intervensi yang tepat terhadap penyelesaian masalah.

Pekerja sosial dalam pekerjaannya memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan profesional pekerja sosial. Fokusnya adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*sosial function*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ini merupakan pembeda antar pekerjaan sosial dan profesi lainnya.

Fungsi pekerja sosial yang dijelaskan oleh Heru Sokoco (1995:22-27) yang berdasarkan dengan kasus pelacuran yang telah penulis uraikan yaitu pekerja sosial membantu meningkatkan dan menggunakan potensi yang ada pada anak yang menjadi korban pelacuran untuk melaksanakan tugas kehidupan sosial dan memecahkan masalah sosialnya. Pekerja sosial juga memiliki fungsi untuk menghubungkan dan memfasilitasi anak korban pelacuran dengan sistem-sistem sumber yang dapat membantu anak korban pelacuran menemukan system sumber yang dapat membantu mereka keluar dari masalahnya seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan serta departemen sosial. Selain itu pula, pekerja sosial memiliki fungsi sebagai agen perubahan (*agent of social change*) dimana pekerja sosial mengusulkan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial dalam kasus pelacuran.

Berdasarkan peranan pekerja sosial yang disebutkan oleh Heru Sukoco, dalam kasus pelacuran anak ini pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi anak-anak korban pelacuran. Dalam konteks anak yang dilacurkan ini, Pekerja sosial memiliki peranan sebagai *enabler* dimana pekerja sosial membantu anak yang dilacurkan dalam mengakses sistem sumber perlindungan anak yang ada seperti lembaga-lembaga yang *concern* dengan masalah prostitusi anak, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah sehingga dapat menemukan solusi dalam penanganan masalah tersebut, selain itu juga pekerja sosial sebagai *broker* yaitu dimana pekerja sosial menghubungkan anak yang dilacurkan dengan lembaga

pemberi pelayanan masyarakat seperti perlindungan anak dan lembaga-lembaga non-profit yang memperjuangkan kesejahteraan anak. Dan yang terakhir adalah pekerja sosial dalam kasus anak yang dilacurkan ini berperan sebagai Fasilitator dimana pekerja sosial menstimulasi dan mendukung perubahan anak kearah yang lebih baik.

Upaya Pemerintah dalam Menangani Masalah Pekerja Sosial Anak

Saat ini penanganan mengenai isu anak oleh pemerintah sudah dapat dibilang cukup baik. Dengan dibuatnya PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) dan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002 dimana dalam UU tersebut membahas mengenai hak-hak anak yang mengacu pada Konvensi Perlindungan Anak.

Dalam UU No 23 Tahun 2002 ditulis dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 15 mengenai perlindungan khusus, dimana perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dapat dilihat dari penjelasan UU diatas bahwa anak yang dilacurkan atau dieksploitasi secara seksual mendapatkan perlindungan khusus yang diatur oleh pemerintah dan lembaga Negara. Yang dilakukan melalui: penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kurangnya informasi akan mengenai pengaduan atau pelayanan guna mengurangi perdagangan anak khususnya dalam perdagangan seksual anak ini juga membuat masyarakat kurang paham mengenai ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak). Seharusnya pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh hingga sampai ke pedesaan melalui penyuluhan atau sosialisasi. Sehingga masyarakat pedesaan bisa memahami masalah ini dan ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka perdagangan seksual anak.

Upaya Penanganan Lembaga Non-Profit dalam Menangani Pekerja Seksual Anak

Bukan hanya lembaga pemerintahan saja yang ikut berpartisipasi dalam membantu mengurangi angka ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), tapi juga beberapa lembaga-lembaga non-profit serta masyarakat yang peduli akan

anak. Salah satu contoh lembaga non-profit yang ikut membantu dalam mengurangi perdagangan seksual ini adalah ECPAT.

ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes*) Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak.

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadiran kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menangani kejahatan ini.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu sebuah jaringan global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di tingkat propinsi atas nama jaringan nasional.

Tujuan berdirinya lembaga non-profit ECPAT Indonesia ini adalah agar setiap anak Indonesia bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial dan terpenuhinya hak mendasar anak yang dijamin oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Sehingga Kesejahteraan Sosial Anak dapat terwujud. Hal-hal yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia agar tercapainya tujuan dibentuknya lembaga ini adalah:

- Advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak kunci di tingkat nasional dan propinsi terkait kebijakan, peraturan dan perbaikan hukum untuk memperkuat rencana aksi nasional untuk penghapusan ESKA
- Penguatan kapasitas anggota dan kelompok strategis terkait tentang ESKA melalui dukungan teknis, pelatihan dan lokakarya
- Pengumpulan data tentang situasi ESKA melalui serangkaian survey, peninjauan cepat dan penelitian
- Penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ESKA melalui pengembangan material kampanye dan media komunikasi
- Promosi program partisipasi anak dan orang muda menentang ESKA melalui pembentukan kelompok pemuda dan pengembangan program berbasis komunitas untuk pencegahan
- Pelayanan dan dukungan untuk anak korban dan penyintas ESKA melalui program layanan langsung meliputi penyelamatan, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penulis melihat bahwa isu anak yang dilacurkan adalah sebuah isu yang sangat penting untuk dibahas, karena Anak sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan pendidikan, perkembangan dan pola asuh yang baik. Karena generasi merekalah yang selanjutnya akan meneruskan perjuangan kita. Namun, ironisnya keadaan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi membuat mereka terjebak dalam dunia pelacuran.

Dengan adanya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Program Kesejahteraan Sosial Anak penulis harap mampu untuk mengatasi masalah sosial ini. Namun, pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya juga harus memperhatikan masyarakat di wilayah pedesaan agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama.

Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mencegah dan mengurangi angka ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak) seharusnya bukan hanya kepada para masyarakat wilayah terpencil serta anak korban ESKA, namun juga para orangtua yang memiliki anak remaja. Karena penulis menganalisa bahwa seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dan kurang akan rasa kasih sayang serta kelekatan dengan orangtuanya dapat berpotensi untuk mencari apa yang dia butuhkan di tempat lain yang mungkin akan berdampak buruk kedepannya. Seperti hal yang terjadi pada Lisa (bukan nama sebenarnya) dalam contoh kasus pada pembahasan yang telah ditulis diatas.

Kasus yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pelacuran anak tidak hanya menjadi bisnis para mucikari seperti yang selama ini nampak ke permukaan, tetapi juga karena kondisi psikologi, sosial, kultural, dan ekonomi keluarga.

Merosotnya kehidupan keluarga, bukan hanya karena faktor ekonomi tetapi juga karena faktor sosial dan kultural. Mereka ini hanya terlibat dalam kehidupan kerja, sehingga tidak sempat melakukan fungsi sebagai orang tua. Dengan demikian hubungan orang tua dan anak tidak lagi harmonis. Akibatnya anak mengalami keterasingan (eliminated), sehingga ia akan mencari jalan sendiri untuk memenuhi keinginan-keinginannya.

Sebagai calon pekerja sosial penulis melihat bahwa pekerja sosial memiliki andil dalam membantu mengurangi angka ESKA. Pekerja sosial dalam kasus ini berperan sebagai *enabler*, *educator*, *fasilitator* dan *broker* yang menghubungkan antara sistem sumber dengan para klien yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyawati, Hening. dkk. 2007. *Analisis Situasi Eksplotasi Seksual Komersial terhadap Anak di Semarang dan Sekitarnya*. Yayasan Setara Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Clifford T. Morgan, et. al. 1986. *Introduction to Psychology*. New York: McGraw-Hill Inc. P. 473.

- George Boeree. 2008. *Personality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*. Yogyakarta: PrismaSophie. Hal. 74-78.
- Garis Besar Konvensi ILO No. 182 mengenai PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA UNTUK PENGHAPUSAN PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.
- Lansdown, Gerison. 2005. *Innocent Insight The Evolving Capacities of the Child*. Italy: Giuntina Florence.
- Soetarso. 1996. *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Undang – Undang (UU) RI No.9 Tahun 2002 Konvensi Hak Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Wibhawa, Budhi., Raharjo T., Budiarti, Meilany. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widhya Padjadjaran.
- Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare, Tenth Edition*. USA: PrePress PMG.
- <http://www.scribd.com/doc/90328027/PELACURAN-ANAK-REMAJA-DAN-AKIBATNYA-BAGI-MEREKA>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/pelajar-smp-di-bandung-jadi-pelacur-cukup-dibayar-pakai-pulsa.html>
- <http://kapanjadibeda.wordpress.com/2014/03/17/eska-eksploitasi-seks-komersial-anak/>

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN ANAK ASUH DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK

Oleh,
Sella Khoirunnisa, Ishartono & Risna Resnawaty

ABSTRAK

Pendidikan pada dasarnya merupakan hak dari setiap anak tanpa terkecuali. Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan tidak semua anak beruntung dilahirkan ditengah keluarga yang mampu secara fisik maupun finansial dalam memenuhi segala kebutuhan anak, beberapa anak justru terlahir di tengah keluarga dengan kehidupan yang serba berkekurangan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya segala kebutuhan anak dan kesejahteraan anak. Keterbatasan tersebut mendorong anak untuk mengalami pengasuhan di luar keluarga, salah satu lembaga pelayanan sosial yang memang didesain khusus sebagai alternatif pengasuhan anak ialah panti sosial asuhan anak. Namun demikian keberadaan panti asuhan kerap dilanda berbagai issue terkait keterbatasan pelayanan panti asuhan seperti tidak adanya sumber dana tetap, keterbatasan fasilitas, dan kekurangan tenaga profesional seringkali menyertai keberadaan lembaga pelayanan sosial anak ini. Merujuk pada beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kebutuhan pendidikan anak di panti asuhan belum maksimal dikarenakan seringkali terbentur dengan masalah pendanaan dari donatur yang tidak tetap, disisi lain anak panti juga seringkali mengalami kekurangan perhatian dan kasih sayang dikarenakan jumlah pengasuh di panti yang hanya sedikit sehingga pendidikan anak panti seringkali tertinggal dibanding anak seusia mereka yang mengalami pengasuhan di dalam keluarga.

Kata Kunci: Pendidikan, Anak Asuh, Panti Sosial Asuhan Anak

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terpadat ke-empat di dunia. Hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2011 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 243,8 juta jiwa. Sekitar 33,9% dari penduduk Indonesia adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak-anak Indonesia sama dengan berinvestasi dengan sepertiga lebih penduduk Indonesia.

Gambaran kondisi anak menjadi dasar penentuan kebijakan yang baik dan tepat bagi anak. Mengingat periode anak merupakan periode yang tepat untuk lebih menggali dan mengasah potensi anak agar dapat dikembangkan. Anak merupakan kelompok yang perlu disiapkan secara matang untuk kemajuan di masa depan.

Indikator yang utama untuk menilai kualitas anak ialah dari bidang pendidikan. Hasil Susenas 2011 menunjukkan bahwa anak berusia sekolah yakni usia 5-17 tahun yang berstatus sekolah ialah sebesar 80,29%. Pada kelompok usia yang sama terdapat sebesar 7,36% yang berstatus tidak sekolah lagi, serta 12,35% lainnya belum pernah sekolah. Kenyataan ini memprihatinkan mengingat meskipun persentase anak yang memiliki status bersekolah lebih besar, namun masih ditemukan sejumlah anak yang belum pernah sekolah pada kategori usia yang sama.

Pada hakikatnya semua anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak dalam menerima pendidikan formal. Adanya sejumlah anak yang ditemukan belum pernah sekolah umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti penelantaran, kemiskinan, dan tidak memiliki orang tua atau keluarga lagi. Hal ini berdampak pada kehilangan tanggungjawab pengasuhan bagi anak, sehingga anak tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Dalam menanggapi fenomena ini, perlu adanya perhatian khusus bagi anak yang mengalami masalah sosial agar anak tidak terjebak pada kasus-kasus kekerasan, pelanggaran hukum, dan eksploitasi. Maka dari itu dibentuklah suatu wadah atau lembaga yang siap mewadahi anak-anak kurang beruntung agar tetap dapat terpenuhi hak nya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Lembaga yang dimaksud salah satunya ialah Panti Sosial Asuhan Anak.

Keberadaan panti sosial asuhan anak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah anak terlantar beberapa tahun terakhir (Teja: 2014). Disisi lain, pengawasan dari pemerintah masih sangat kurang. Berdampak pada seringkali ditemukan kualitas pelayanan di panti sosial asuhan anak yang masih sangat terbatas.

Anak asuh seringkali dianggap memiliki status sosial yang rendah di masyarakat luas, karena panti asuhan dianggap sebagai tempat meminta belas kasihan orang (Mazaya dan Supradewi: 2011). Anak asuh yang berada di panti sosial asuhan anak memiliki berbagai macam latarbelakang, pengalaman yang dibawa mereka dari berbagai lingkungan yang pernah dialami akan berdampak pada pembentukan psikologi dan sosialnya. Fenomena diatas memberikan gambaran kondisi anak asuh. Diperlukan adanya penanganan dan pengasuhan yang tepat untuk mengatasi kondisi ini.

Panti sosial asuhan anak sebagai lembaga yang mewadahi anak asuh memberikan pelayanan sosial guna memperbaiki keberfungsian anak dan kualitas kesejahteraannya. Pelayan diberikan dalam konteks memenuhi kebutuhan anak agar anak dapat mandiri di masa depan. Pelayanan ini ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga tidak mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak.

Panti Sosial Asuhan Anak

Permasalahan anak yang semakin kompleks menuntut dibentuknya suatu wadah yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak akan pengasuhan, pelayanan, dan pembinaan, yang diwujudkan dalam bentuk panti. Syarif Muhidin

(1992: 3) menyatakan bahwa, panti merupakan suatu tempat dalam memberikan pembinaan dan pelayanan sosial modern. Pernyataan tersebut mendukung keberadaan panti sebagai wadah terselenggaranya pelayanan sosial secara lebih sistematis di masyarakat.

Secara umum dalam Kepmensos No.50/HUK/2004 menjelaskan bahwa Panti Sosial Asuhan Anak adalah :

“Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, anak yang kurang mampu, dan terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.”

Panti Sosial Asuhan Anak juga memegang fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraannya, fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam program dan pelayanan yang diberikan oleh panti. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan bagi anak dan melaksanakan pengasuhan alternatif pengganti orang tua.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif yang diselenggarakan lembaga/panti asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

2. Sebagai Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak

Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan.

Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam, fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan. Fungsi pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedangkan fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

3. Sebagai Pusat Data dan Informasi Serta Konsultasi Kesejahteraan Sosial Anak.

Dalam jangka panjang, Panti Asuhan diharapkan melakukan kegiatan:

- a. Menentukan, menemukan, menghimpun, mengklasifikasi, dan menyimpan data secara sistematis yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah, kemampuan, dan peranan anak dan remaja yang mengalami keterlantaran.
 - b. Membantu pemecahan masalah kerawanan sosial dalam lingkungan melalui pertemuan kasus di dalam maupun di luar panti, seperti seminar loka karya.
 - c. Menyebarkan informasi yang bertujuan untuk penyempurnaan kebijaksanaan dan program pelayanan kesejahteraan sosial anak, pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi Perguruan Tinggi, dan peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dukungan, dan kesempatan bersama warga masyarakat.
4. Sebagai Pusat Pengembangan Keterampilan.
Panti Asuhan diharapkan melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan di dalam dan di luar panti yang bertujuan menumbuhkan usaha ekonomis produktif.

Dari pemaparan sebelumnya mengenai fungsi panti dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Sosial Anak memiliki fungsi pengasuhan, pelayanan, pusat data dan informasi kesejahteraan sosial anak. Fungsi ini merupakan landasan dalam operasional panti agar lebih terarah, serta menunjang tercapainya tujuan dari penyelenggaraan Panti Sosial Asuhan Anak.

Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh

Anak asuh dipahami sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif diluar keluarga melalui lembaga atau panti asuhan. Hal ini dilakukan agar anak dapat tetap terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak tidak terjerat dalam permasalahan sosial seperti penelantaran, pembuangan, dan eksploitasi anak.

Anak yang layak menjadi anak asuh ialah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Kriteria yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai landasan dalam menilai sesuai atau tidaknya seorang anak berada dibawah pengasuhan lembaga atau panti

asuhan. Anak yang lebih diprioritaskan dalam menerima alternatif pengasuhan di panti ialah anak yang memiliki permasalahan di bidang sosial dan ekonomi sehingga anak tersebut memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan yang dapat mengancam perkembangan anak.

Upaya untuk mencerdaskan bangsa berarti meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang pada dasarnya dapat direalisasikan melalui kegiatan pendidikan termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu keberhasilan anak asuh dalam pendidikan ditunjukkan dengan prestasi akademiknya. Pada kenyataannya ditemukan tuntutan prestasi akademik pada siswa semakin tinggi sementara daya belajarnya biasa-biasa saja. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keberhasilan siswa dalam prestasi akademik kurang sebagaimana diharapkan oleh sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri.

Fungsi pendidikan salah satunya adalah membentuk sikap dan orientasi siswa terhadap belajar, menanamkan sikap positif dan haus akan pengetahuan serta untuk mengembangkan keterampilan belajar secara efektif. Keberhasilan siswa dalam pendidikannya juga dipengaruhi oleh motivasi berprestasi yang dimiliki. Motivasi berprestasi sebagai daya dorong yang memungkinkan seseorang berhasil mencapai apa yang diidamkan. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung untuk selalu berusaha mencapai apa yang diinginkan walaupun mengalami hambatan dan kesulitan dalam meraihnya. Pada kenyataannya motivasi berprestasi yang dimiliki oleh seseorang cenderung sering mengalami penurunan dan di waktu lain mengalami peningkatan. Motivasi berprestasi yang dimiliki seseorang idealnya selalu mengalami progresif atau kemajuan sehingga akan mempercepat apa yang diidamkan. Hal inilah yang belum dimiliki oleh generasi muda untuk selalu meningkat motivasi berprestasi.

Pengurus panti asuhan dalam melaksanakan perannya dalam menunjang keberlanjutan pendidikan anak yang mana peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di panti asuhan. Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sofiyatun (2012: 16) bahwa: Begitu pentingnya peran keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Peranan Pengurus Panti Asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Peran yang didapat anak asuh dari pengurus panti asuhan adalah peran sebagai orang tua asuh sebagai pengganti peran orang tua mereka yang mana pengurus panti asuhan berperan sebagai pendorong (motivasi) yaitu sebagai penyemangat anak untuk terus belajar dan memaknai pentingnya ilmu yang

didapat; fasilitator adalah melengkapi/memenuhi keperluan anak asuh seperti fasilitas belajar, alat-alat belajar, sarana transportasi, serta anak-anak diberi kebebasan dalam menentukan sekolah yang mereka inginkan dan tentunya disesuaikan lagi dengan nilai yang mereka miliki; dan pembimbing yaitu berperan sebagai panutan bagi anak dalam melakukan segala hal. Dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus berusaha memberikan sesuatu yang baik bagi mereka yaitu dengan memberikan mereka fasilitas pendidikan, mengajarkan akan kemandirian, mengajarkan untuk saling menghormati baik sesama anak-anak di panti maupun dengan orang yang lebih tua seperti pengurus panti asuhan, serta melatih dan memberikan pelatihan keterampilan bagi anak asuh.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pertama yaitu permasalahan yang berasal dari diri pribadi anak, dari sekian banyak anak yang ada dalam panti asuhan semuanya berasal dari keluarga yang berbeda dengan latar belakang asing-masing. Hal ini lah yang menimbulkan perbedaan pada anak baik dalam tingkah laku, sifat maupun kecerdasan dari masing-masing anak. Terkadang tidak ada kecocokan antara anak yang satu dengan anak yang lain, kemudian menimbulkan keminderan pada anak yang merasa tertinggal dalam hal pendidikan dari teman-temannya, selain itu perbedaan tingkah laku anak sering menimbulkan ketidakcocokan sehingga terkadang menimbulkan perselisihan antara anak yang satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, tidak semua anak mengerti dengan tugas sudah masing-masing dari mereka dapat misalnya masalah kebersihan yang paling terutama.

Kemudian untuk masalah kedua yaitu permasalahan yang timbul dari faktor dana. Dalam menjalankan segala kegiatan di panti asuhan, utamanya dalam hal makan, pakaian, pendidikan untuk anak-anak asuh dibutuhkan biaya yang besar dan terus menerus. Sumber dana pada panti asuhan berasal dari berbagai pihak diantaranya sumbangan rutin dari pemerintah dan adanya donatur-donatur yang peduli pada mereka. Sumbangan yang ada dari pemerintah dirasa terlalu minim atau belum mencukupi jika disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

Penutup

Panti sosial asuhan anak dalam penyelenggaraannya menjalankan fungsi pengasuhan pengganti orang tua, yang mana didalamnya terdapat fungsi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Dalam penyelenggaraannya sebagian besar anak asuh yang berada di panti asuhan merupakan anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga keinginan untuk melanjutkan pendidikan lah yang melatarbelakangi anak mengalami pengasuhan di panti asuhan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan anak, panti sosial asuhan anak memberikan pendidikan formal di sekolah, kursus keterampilan, serta memberikan bimbingan belajar dalam lingkungan panti. Disisi lain panti sosial asuhan anak juga bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok anak yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian diharapkan dapat menunjang tumbuh dan kembang anak secara layak.

Secara umum pengurus panti melakukan upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan hak yang didapatkan anak dalam keluarganya

sendiri baik secara formal dan informal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian anak di masyarakat dan memperbaiki kualitas kesejahteraan anak di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Mazaya; Supradewi. 2011. Hubungan Konsep Diri dan Kebermaknaan Hidup Remaja Panti Asuhan. Vol.6 (2) hal 104.
- Mustika Sari, dkk. 2009. Peranan Panti Asuhan dalam Menunjang Pendidikan Anak. Sumatera Barat.
- Nuriqrima; Sulistyarini; Izhar. 2012. Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak di Panti Asuhan Nurul Hamid. UNTAN
- Slavin, E Robert. 2008. Psikologi Pendidikan
- Sugiyanto. Pentingnya Motivasi Berprestasi Dalam Mencapai Keberhasilan Akademik Siswa. UNY. Yogyakarta
- Teja, Mohammad. 2014. Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan. Vol. VI No. 05/I/P3DI/Maret/2014. Hal 09.

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN

Oleh:

Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat

Email:

fdlh11@gmail.com; soninulhakim@gmail.com; enuriyah@yahoo.com

ABSTRAK

Anak jalanan adalah sebuah potret kehidupan yang berasal dari jalanan yang sangat rentan mengalami berbagai masalah yang ada pada masyarakat. Dari berbagai kemungkinan yang dapat menimpa anak jalanan seperti kekerasan, korban eksploitasi, seks bebas dan sebagainya, pemerintah melakukan upaya dalam menanggulangi anak jalanan dengan dibentuknya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini menjadi prioritas nasional Kementerian Sosial RI untuk mewujudkan pemenuhan hsk dasar anak dan perlindungan. Melalui PKSA, diharapkan dapat meminimalisasi menjamurnya anak jalanan. Pelaksanaan Selain bantuan dana, PKSA juga memberikan pendamping yang dilakukan oleh tenaga professional yang disebut Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial). Sakti Peksos ditempatkan di Rumah Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak.

Kata kunci: Peran Pekerja Sosial, Sakti Peksos, PKSA, Anak Jalanan

PENDAHULUAN

Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan adalahh meningkatnya jumlah penduduk miskin, baik diperkotaan maupun di perdesaan. Banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial dasar akibat meningkatnya berbagai harga kebutuhan pokok. Keadaan yang seperti inilah yang memaksa seluruh anggota keluarga untuk dapat membantu memperbaiki ekonomi keluarga dengan melibatkan seluruh anggota keluarga mencari nafkah, termasuk anak. Pelibatan anak-anak untuk membantu ekonomi keluarga inilah yang menyebabkan jalanan dikota-kota besar dipenuhi anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Anak jalanan adalah sebuah potret kehidupan yang berasal dari jalanan yang sangat rentan mengalami berbagai masalah yang ada pada masyarakat. Tidak sedikit dari anak jalanan ini terlibat masalah seperti kriminalitas, eksploitasi seks, perdagangan obat-obat terlarang, tertular virus HIV AIDS dan bahkan menjadi korban pembunuhan. Data BPS tahun 2012, jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai angka 135.983 jiwa, dengan persebaran di DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Anak Jalanan di DKI Jakarta

Daerah	Jumlah
Kepulauan Seribu	-
Jakarta Selatan	142
Jakarta Timur	890
Jakarta Pusat	70
Jakarta Barat	70
Jakarta Utara	395
Total	1567

Sumber : Data BPS Tahun 2012

Dari berbagai kerentanan yang dihadapi oleh anak jalanan menyebabkan mereka tidak dapat bebas mengakses sumber-sumber yang berpotensi untuk perkembangan hidupnya. Berdasarkan perjanjian internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam konvensi hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu :

1. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan ketelantaran.
3. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
(http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemosbud&id=87:konveksi-hak-hak-anak-kha)

Berdasarkan empat kategori yang dirumuskan PBB dalam konvensi hak-hak anak diatas sudah selayaknya anak jalanan mendapatkan hak yang sama dengan anak lainnya untuk mendapatkan hak kelangsungan hidup yang layak, perlindungan, tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Hal ini juga di sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai upaya penanggulangan masalah anak jalanan pun dilakukan, baik berupa program yang dicanangkan pemerintah maupun program dilakukan lembaga-lembaga sosial bersama masyarakat. Keberhasilan sebuah program tidak

akan lepas dari kerjasama yang dilakukan seluruh *stakeholder*. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Itu berarti pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat mempunyai tanggung jawab menanggulangi anak terlantar, yang didalamnya termasuk anak jalanan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan adalah dibentuknya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dimana program ini menjadi prioritas nasional Kementerian Sosial RI untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan anak dari pelantaran, eksploitasi dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Sasaran dari PKSA adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Dengan PKSA in pemerintah Dinas Sosial DKI Jakarta juga mencanangkan bahwa Jakarta akan bebas anak jalanan tahun 2014.

Melalui PKSA, Dinas Sosial DKI Jakarta meminimalisir menjamurnya anak jalanan dengan memperbanyak rumah singgah. Menurut Kepada Dinas Sosial Jakarta dalam berita elektronik di Merdeka.com, DKI Jakarta sudah mempunyai rumah singgah untuk anak jalanan. Rumah singgah berfungsi memberikan bekal keterampilan kepada anak jalanan sehingga nantinya anak jalanan dapat hidup tanpa bergantung dengan orang lain. (<http://www.merdeka.com/jakarta/tekan-jumlah-anak-jalanan-dki-bakal-perbanyak-rumah-singgah.html>) . Dengan adanya berbagai macam program yang ada di setiap rumah singgah, diharapkan cara tersebut mampu meminimalisir anak jalanan di DKI Jakarta.

Pelaksanaan Program yang ada di berbagai rumah singgah khususnya di DKI Jakarta dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sebagaimana yang tertulis dalam pedoman PKSA tahun 2011, bahwa Sakti Peksos adalah :

Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) merupakan petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas/ Instansi Sosial yang memiliki status kerja kontrak karya dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA Pusat) atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi (PKSA Dekon).

Melalui PKSA, Sakti Peksos ditempatkan diseluruh RPA sebagai pendamping dalam memberikan pelayanan terhadap anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerja sosial dituntut untuk melakukan peran sesuai dengan kasus apa yang sedang ditanganinya, karena permasalahan yang dihadapi adalah anak jalanan maka setidaknya pekerja sosial melakukan empat peran yang mengacu pada Suharto (2011) terdiri dari peran sebagai perantara (*broker roles*), peran sebagai pemungkin (*enabler roles*), peran sebagai mediator (*mediator roles*) dan peran sebagai educator (*educator roles*).

Peran Sebagai Perantara (*broker roles*)

Peran sebagai perantara, pekerja sosial bertindak di antara klien atau penerima pelayanan dengan sistem sumber (bantuan materi dan non materi tentang pelayanan) yang ada di bandan/lembaga/pabti sosial. selain sebagai perantara, pekerja sosial juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut. Peran sebagai broker muncul akibat banyaknya orang yang tidak mampu menjangkau sistem pelayanan sosial yang biasanya memiliki aturan penggunaannya yang kompleks dan kurang responsive terhadap klien atau penerima pelayanan

Peran Sebagai Pemungkin (*enabler role*)

Peran sebagai pemungkin adalah peran yang paling sering digunakan dalam profesi pekerjaan sosial, karena peran ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Peran sebagai pemungkin adalah tanggung jawab untuk menolong klien agar mampu menghadapi tekanan situasi (proses perubahan). Oleh sebab itu, klien atau penerima pelayanan melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimilikinya dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi pada diri dan lingkungannya. Sedangkan pekerja sosial hanya berperan membantu untuk menentukan kekuatan dan unsure yang ada di dalam diri klien sendiri termasuk untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan atau mencapai tujuan yang dikehendaki klien.

Peran Sebagai Mediator (*mediator role*)

Peran sebagai penghubung akan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik, termasuk didalamnya membicarakan segera persolan dengan cara kompromi dan persuasif.

Peran Sebagai Pendidik (*educator role*)

Peran pekerja sosial sebagai pendidik dapat memberikan informasi kepada anak jalanan dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga pada pelaksanaannya pendidik dituntut untuk berpengetahuan luas. Senlain itu, pekerja sosial juga harus menjadi komunikator yang baik sehingga informasi yang disampaikan dapat mudah diterima dengan baik pula.

Penutup

Permasalahan sosial yang dihadapi anak jalanan antara lain, anak tidak terpenuhi hak untuk tumbuh kembang secara wajar, Anak jalanan juga sering mendapatkan perilaku salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya sebagai anak. Dalam proses pertolongan, peran pekerja sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Tugas utama

pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial.

Daftar Rujukan

Irwanto, “Anak-Anak Jalanan Anak-Anak Kita Sendiri”. Jurnal Sosiologi Indonesia, No.3/1998. Ikatan Sosiologi Indonesia

Jhonson, Louise C. 1992. *Social Work Practice: a general approach*, 4th edition. Canada: Boston: Allyn and Bacon.

Tuti, Kartika. Anak Jalanan dan Model Penanganannya: Studi kualitatif tentang Anak Jalanan yang dibina oleh Yayasan Dian Mitra, YKAI dan Yayasan Amalia di Jakarta.

Sumber lain:

Pedoman Program Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2011

<http://news.detik.com/read/2013/01/04/175000/2133555/10/jokowi-ngaku-belum-punya-terobosan-untuk-anak-jalanan> (diakses pada 31/03/2014 10.58).

<http://www.merdeka.com/jakarta/tekan-jumlah-anak-jalanan-dki-bakal-perbanyak-rumah-singgah.html> (diakses pada 20/04/2014 pukul 19.25).

<http://health.liputan6.com/read/2028831/terbiasa-di-jalan-anak-jalanan-tak-betah-di-rumah-singgah> (diakses pada 20/04/2014 pukul 19.25)

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING

Oleh:

Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, & Maulana Irfan

Email:

anissoraya25@gmail.com; titirusyidi@gmail.com; mirfan@gmail.com

Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas). Anak sebagai manusia berusia 0-18 tahun merupakan individu yang masih dalam masa perkembangan fisik, mental, maupun intelektual. Anak memang rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan anak diantaranya; faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan anak dan keluarga, serta kurangnya kepedulian orangtua terhadap pengurusan administrasi anak seperti pembuatan akta kelahiran sehingga menyebabkan mudahnya terjadi perdagangan manusia karena korban tidak memiliki identitas. Perdagangan orang (Trafficking) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia. Di dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun (pasal 35). Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia dengan beberapa cara seperti dibentuknya undang-undang no 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pengadaan RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara Anak. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.

Kata kunci : anak, hak, perlindungan, kekerasan, trafficking

Pendahuluan

Anak sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kondisi anak-anak tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa. Salah satu penyalahgunaan terhadap anak adalah dengan memperdagangkan mereka. Hal ini juga dijelaskan oleh Irwanto dalam bukunya "Perdagangan Anak di Indonesia" pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa anak, individu yang masih tergantung pada orang dewasa cenderung tidak dapat

bertindak membela diri dan mengambil keputusan sendiri sehingga cenderung rentan menjadi korban penyalahgunaan anak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi. Perdagangan anak dewasa ini semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Trafficking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban trafficking. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan. Korban perdagangan manusia harus mengalami kekerasan, pemalsuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau perburuhan paksa. Korbannya adalah anak-anak kecil, remaja, pria dan wanita. Anak-anak korban perdagangan manusia sering kali dieksploitasi untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Mereka juga dieksploitasi untuk perburuhan paksa, termasuk dijadikan pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah rendah dan kondisi buruk, dan pertanian migran. Efek psikologis eksploitasi meliputi perasaan tidak berdaya, perasaan malu, rendah diri, syok, hilangnya kepercayaan terhadap orang sekitar dan lingkungannya, kehilangan arah hidup, kebingungan, dan gangguan kecemasan termasuk gangguan stres pasca trauma, fobia, serangan panik, dan depresi (Anwar Fu'ady, 2007).

Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Pengetahuan masyarakat tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas pada kalangan tertentu. Namun demikian adanya indikasi kuat bahwa hal tersebut semakin meluas dan tidak hanya menyangkut perdagangan didalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar Negara membuat fenomena ini mendapat perhatian dari khalayak ramai.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang telah diatur di dalam hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.

Indonesia telah mengambil kebijakan untuk meniadakan perdagangan anak, namun implementasi kebijakan tersebut masih dirasa kurang dan memang belum secara maksimal dalam mencegah masalah perdagangan anak ini. Perdagangan anak, (*Child Trafficking*) di Indonesia telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, antara lain para peneliti, sebagaimana kita temukan dari beberapa literatur hasil penelitian mereka. *Irwanto, Ph.D*, Psikolog Universitas Atmajaya,

Fentiny Nugroho dan Johanna Debora Imelda, melakukan penelitian pada tahun 2001 di empat lokasi – Pulau Bali, Jakarta, Medan, dan Pulau Batam tentang perdagangan anak yang bertujuan antara lain: menggambarkan kebijakan-kebijakan nasional yang relevan dengan masalah perdagangan anak, dan menjelaskan gejala-gejala yang dijumpai dalam perdagangan anak di Indonesia terutama Jakarta, Medan, Bali, dan Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan informan meliputi pejabat pemerintah, penegak hukum, aktivis LSM, pendidik, dan akademisi, serta wartawan.

Kesimpulan penelitian yang dituangkan dalam buku "Perdagangan Anak di Indonesia" 2001 (*Irwanto*, 2001:126-134) adalah: Karena kompleksnya masalah perdagangan anak, maka perlu upaya menggalang kerja sama melalui kemitraan yang menjadi satu-satunya cara yang harus dikembangkan di masa datang supaya penanganan masalah ini menjadi lebih efektif.

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak.

Perdagangan Anak

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap orang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

- eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
- eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
- eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obatterlarang),
- perdagangan adopsi,
- perjodohan dengan pemaksaan.

Pelaku dalam perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsure. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (*trafficking*):

Pihak yang berperan pada awal perdagangan;

1. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;

2. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

Perdagangan anak yang dipahami dalam artikel ini perdagangan manusia:

Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Trafiking, menurut ICMC/ACIL tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma dan bahkan kematian. Pelaku trafiking menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi.

Pelaku trafiking menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Menurut ICMC/ACIL, beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban antara lain (ICMC/ACIL-Mimpi Yang Terkoyak, 2005):

1. Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri
2. Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi;
3. Memberitahu korban bahwa status mereka ilegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur
4. Mengancam akan menyakiti korban dan/atau keluarganya
5. Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong
6. Membuat korban tergantung pada pelaku trafiking dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya, dan dalam “perlindungan” dari yang berwajib
7. Memutus hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman.

Anak dan Hak Anak

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak-anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*),

“seorang anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa”

Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan

dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Faktor Terjadinya Perdagangan Anak Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi)

Semenjak terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, semuanya berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk membiayai keluarganya khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kehidupan sehari-hari sehingga, “kelompok keluarga miskin biasanya mengerahkan seluruh tenaga kerja keluarga termasuk anak-anak untuk memperoleh penghasilan” (Haryadi dan Tjandraningsih, 1995). Kebanyakan anak-anak yang harus bekerja tidak punya pilihan lain untuk membantu keluarganya karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki ekonomi keluarga mereka masing-masing. Himpitan perekonomian itu membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbuju rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Ketidajelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.

Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Seperti yang tertera di buku Penanggulang Perdagangan Perempuan dan Anak, 2004, “Korban yang biasanya adalah perempuan atau gadis desa dengan pendidikan rendah sering kali tidak menyadari tanda-tanda bahaya dari perdagangan, atau tidak dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya untuk bermigrasi dengan aman.” Menurut Statistik Indonesia di tahun 2004, anak-anak yang berumur 10 – 14 tahun, tertera bahwa 93,34 persen masih sekolah. Tetapi golongan anak yang berumur 15-19 tahun tertera bahwa hanya 52,77 persen saja yang melanjutkan sekolah dan sekitar 47 persen lainnya tidak melanjutkan sekolah. Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan anak. Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan anak membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan anak khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan anak tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dinegara tersebut.

Kurangnya Kepedulian Orang Tua

Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak-anak korban trafficking misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

Usaha Perlindungan Anak Korban Trafficking

Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada:

1. Undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafiking, UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang diperjualbelikan diluar negeri .
2. Undang no 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
3. Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun melarang perdagangan anak. Dimana Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th 2002 :
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”
4. UNICEF, Convencion On Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)
5. Undang-undang No. 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak
6. Adanya RPSA (Rumah Perlindungan Sementara Anak), dimana fungsi dari RPSA ini adalah:
 - Pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan salah (*emergency service*).
 - Perlindungan (*Protection*).
 - Pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar (*rehabilitiasoan*).
 - Pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma (*revcovery*).
 - Advokasi.
 - Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, lembaga lainnya (*reunifikasi*).

Penutup

Child trafficking terjadi karena beberapa faktor, yakni kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi, serta upaya penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam menangani masalah child trafficking ini, antara lain dengan adanya undang-undang no.21 tahun 2007, undang-undang no.23 tahun 2002, serta dengan adanya Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sementara anak).

Upaya untuk menangani masalah child trafficking seharusnya dilakukan dalam tiga tingkatan, yakni:

1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat keterampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
3. Ditingkat negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Irwanto, *Perdagangan Anak di Indonesia, Suatu diskripsi Awal*, Jakarta 2001
Hurlock, 1980. *Elizabeth, Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta ,
Ollenburge, Jane. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta
Sumardi, Mulyanto. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali: Jakarta
Winarno Budi, 2002, *Isu-Isu Global Kontemporer*, PT. Buku Seru, Yogyakarta

Jurnal:

Fu'ady, Anwar. *Child Abuse Pada Anak Korban Trafficking* (Studi Kasus pada Anak Korban Trafficking di Kota Malang)

Profil Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA), Bambu Apus Jakarta Timur, 2006

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia ; Kajian Trafficking terhadap perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta : LAPPERA PUATAKA UTAMA, 2003

<http://intelektualhukum.wordpress.com/2010/01/14/perdagangan-trafficking-anak-dan-perempuan/> (4/11/2014)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Lainnya:

UNICEF, *Convention On Right Of The Child*. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No. 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak

PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh:

Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo

ABSTRAK

Setiap tahun, terjadi 4.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Menurut Romli, Atmasasmita dalam Wagiaty Soetodjo, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dan terpaksa berhadapan dengan hukum, faktor intelegentia, usia, kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga menjadi faktor instrinsik kenakalan anak dan faktor rumah tangga, pendidikan & sekolah, pergaulan anak, dan mass media menjadi faktor ekstrinsik kenakalan anak. Undang-undang perlindungan anak tidak menjamin anak berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Pekerja sosial sebagai pendamping anak berhadapan dengan hukum harus memiliki pribadi matang, kepekaan, kreatif, pengamatan diri, keinginan menolong, keberanian, dan kepekaan. Rekomendasi yang diajukan : (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja sosial melalui Diklat pekerja sosial koreksional, (2) menguji coba model pendampingan pada anak berkonflik hukum, (3) advokasi pemerintah tentang batas usia minimal anak berkonflik hukum dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Kata Kunci: Anak berhadapan dengan hukum, Pekerja sosial, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Maraknya kasus anak yang melakukan tindakan kejahatan semakin sering terjadi. Sering terdengar berita tentang anak dibawah umur melakukan tindak kriminal. Data BPS (2003) menyebutkan bahwa setiap tahun, terjadi 4.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Sebanyak 3.722 anak tersebar di 14 Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak). Terbatasnya jumlah LP Anak, memberikan peluang anak berkonflik hukum berada di LP Dewasa dan Pemuda. Sementara, tindak kekerasan pada anak selama proses penyidikan maupun di LP masih banyak terjadi. Anak diinterogasi seperti lazimnya pada orang dewasa. Anak berkonflik dengan hukum sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum.

Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung (2004) menemukan berbagai pelanggaran hak anak, seperti anak tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan dan proses penuntutan. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak berkonflik hukum seperti yang sudah diatur dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mengkatagorikan anak berkonflik hukum sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang terkandung didalamnya yaitu prinsip

partisipatif, tumbuh-kembang, nondiskriminatif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pengertian Anak

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun; termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan Anak

Setiap anak juga memiliki perlindungan yang tertuang pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak tertuang pada pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Pasal 3: Perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia, dan sejahtera.

Pasal 2 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.:

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita

dalam Wagiyati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor Intelektual;
 - b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Kartini Kartono (1998:7), pengaruh sosial kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak. Perilaku anak yang terlibat tindak kriminal atau melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Kenakalan kejahatan yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum diusia anak. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi pada setiap fase pemeriksaan, mulai dari proses pendidikan yang lazimnya orang dewasa, proses integrasi yang tak jarang diwarnai kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan yang tanpa didampingi oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial dan tidak mendapatkan advokasi.

Pekerja Sosial

Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang pekerja sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam artian memiliki pengetahuan dengan latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, nilai dalam praktek pekerjaan sosial harus dilandasi oleh kode etik praktek pekerjaan sosial, dan keterampilan seorang pekerja sosial yang dapat menyesuaikan dengan setting pekerjaan sosial.

Profesi pekerjaan sosial mendorong upaya pemecahan masalah dalam hubungan antar manusia, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, dan memperbaiki masyarakat. Menggunakan teori-teori tentang perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada pokok interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia

dan keadilan sosial merupakan hal dasar/fundamental bagi pekerjaan sosial. (*International Federation of Social Workers* (IFSW), 2000).

Pekerja sosial dapat bekerja dengan individu/kelompok kecil untuk membantu bagi perubahan tingkah laku. Berupaya menyesuaikan dengan kehidupan penjara melalui cara pemecahan (coping) masalah seperti kekerasan, serangan seksual, homosexual dan ketergantungan NAPZA. Pekerja sosial juga memberikan pelayanan juga memberikan pelayanan dalam bidang advokasi, pialang, dan mengkaitkan antara individu dengan masyarakat. (Ivanorff Syth & Finnegan, 1993)

Prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial dapat diartikan membela atau memperjuangkan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak berupa advokasi yang merupakan salah satu fungsi *representatif* pekerja sosial. Dalam pekerjaan sosial, advokasi dilakukan untuk membantu individu, kelompok dan orang yang tidak mampu agar dapat membantu diri mereka sendiri.

Pekerja Sosial sebagai Pendamping

Pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain (Setiawan,2006) :

a. **Kematangan Pribadi**

Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadi. Pengalaman baru sebagai acuan perubahan secara tidak langsung akan membentuk pribadi seseorang. Pendamping yang memiliki pribadi yang matang akan mesikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.

b. **Kreatifitas**

Praktek pertolongan yang efektif mencakup pencarian alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan untuk menghadapi keterbatasan dalam menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalaman baru dan rasa keingin tahuan yang tiada henti. Cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu

- menjaga keterbukaannya, memelihara perbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.
- c. **Pengamatan Diri**
Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap kondisi internal didalam dirinya. Kemampuan pengamatan diri bagi seorang pendamping anak berhadapan dengan hukum mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Dengan demikian kepercayaan, penerimaan, dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.
 - d. **Keinginan Untuk Menolong**
Seorang pendamping anak yang berhadapan dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri pekerja sosial sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri pekerja sosial sebagai akibat pertolongan.
 - e. **Keberanian**
Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang didasari untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat dari berbagai kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegagalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidakpastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.
 - f. **Kepekaan**
Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di masyarakat dan mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendampingan harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (*stereo type*).

PENUTUP

Pekerja sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu melibatkan

pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Pekerja sosial harus memandang anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang pekerja sosial.

Dalam melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, pekerja sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi dalam proses pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

- Alit Kurniasari, Studi Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, Pusat Penelitian Kementerian Sosial. Diakses pada 5 Desember 2014.
<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/48df6bda92fc77fb5c4407e88859dc5a.pdf>
- Anna Volz, Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice, Defence for Children International, 2009. Diakses pada 5 Desember 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34-35.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti. Hal. 16-17.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 17.
- Yayasan Pemantau Hak Anak, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, hal 1. Diakses pada 5 Desember 2014.
- Sumber UU:
- Konvensi dan Undang- Undang :
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI

Oleh;

Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono

Email :

dikefarizan@gmail.com, santosotriraharjo@gmail.com,
ishartonopeksos@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini anak sejatinya investasi bagi sebuah keluarga. Ia diciptakan sebagai generasi penerus yang hendaknya diarahkan untuk menjadi pribadi yang siap menyongsong masa depan. Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Prostitusi dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi prostitusi, selain itu keberadaan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak. Hal yang menjadi masalah adalah ketika Anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokasi prostitusi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya karena kekhawatiran yang berlebih pada orangtua yang takut anaknya terpengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokasi prostitusi itu sendiri. juga pada masa anak-anak kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi.

Kata kunci : Hak anak, Keluarga, lingkungan prostitusi, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kedua orang tuanya bukan milik orang tua. Orang tua wajib memelihara, menyayangi dan berbuat yang terbaik hingga anak siap menerima estafet menjadi penerus dan harapan bangsa. Apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan adanya UU perlindungan anak tidak hanya menjadi wilayah domestik keluarga tetapi juga menjadi wilayah publik. Masyarakat disekitar keluarga turut bertanggung jawab

terhadap apa yang terjadi pada anak selama dalam pengasuhan dan didikan keluarga.

Anak-anak memiliki dunianya sendiri. Hal itu ditandai dengan banyaknya gerak, penuh semangat, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, tidak mudah letih, dan cepat bosan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Anak-anak hidup dan berpikir untuk saat ini, sehingga ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula masa depan yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu, seharusnya orang tua dapat menjadikan realitas masa sekarang sebagai titik tolak dan metode pembelajaran bagi anak. (Zurayk, 1997)

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak. Juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan, seperti :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Prostitusi dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi prostitusi, selain itu keberadaan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak. Hal yang menjadi masalah adalah ketika Anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokasi prostitusi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya karena kekhawatiran yang berlebih pada orangtua yang takut anaknya terpengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokasi prostitusi itu sendiri dan dimana kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. Anak sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi yang ada di dalam masyarakat termasuk terhadap pengaruh pornografi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 15 menyebutkan : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”

Hak Anak

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dilindungi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak merupakan aset yang akan menentukan keberhasilan suatu negara.

Anak memiliki hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan
2. Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
3. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya, (terkecuali apabila orang tuanya menelantarkan anaknya)
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Memperoleh pendidikan yang sesuai
6. Menyatakan pendapat, didengarkan pendapatnya
7. Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi
8. Anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dan rehabilitasi
9. Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikannya
10. Apabila kebebasannya dirampas dapat memperoleh bantuan dan membela diri, juga dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban kekerasan

Sedangkan kewajiban anak adalah:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya, tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mampu menjadi individu yang mandiri. Namun tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dalam turut memenuhi hak anak, tanpa membedakan, dengan kata lain tidak mendiskriminasi. Selain itu juga wajib untuk memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terpenuhinya hak anak, dan juga mengawasi segala bentuk perlindungan anak yang ada.

Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam membantu terpenuhinya hak anak dengan perannya menyelenggarakan perlindungan anak. Sedangkan keluarga

kewajibannya dalam memenuhi hak anak yaitu lebih kepada pengasuhan, pendidikan, perlindungan, juga pengembangan minat dan bakat.

Anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, seperti diasuh oleh wali anak, ataupun orang tua asuh, kewajiban pengasuhnya tetap sama dengan kewajiban orang tuanya.

Pemenuhan hak anak dan Fungsi keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Anak-anak merupakan penerus dari suatu generasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, dan meneruskan perjuangan orangtua dan masyarakat. Pada masa anak-anak inilah, orangtua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anaknya, karena pada dasarnya orangtua adalah lingkungan sosial anak yang paling awal. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pada masyarakat. Terdapat empat prinsip yang berada dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi.
 2. *Best interest of the child*
 3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
 4. Penghargaan terhadap pendapat anak
- (Prinsip-prinsip dasar KHA dalam UU No.23/2002)

Anak-anak harus diasuh dalam perlindungan orang tua karena fungsi keluarga adalah melindungi. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga dengan mencukupi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga. Ibu melindungi keluarga dengan membuat rumah bersih dan sehat serta seluruh anggota keluarga memperoleh asupan gizi yang seimbang sehingga tumbuh dan berkembang secara sehat. Perlindungan terhadap identitas dan hak kewarganegaraan diberikan oleh orang tua dengan melaporkan kelahiran anak dan memperoleh akta kelahiran. Akte kelahiran membawa dampak hukum karena anak memperoleh status kewarganegaraan, status diri dan segala hak yang terkait karena memiliki hubungan yang sah dengan kedua orangtuanya termasuk hak atas harta peninggalan keduaorang tuanya.

Selain itu Fungsi keluarga sebagai pintu gerbang pembangunan masa depan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Fungsi keluarga juga sebagai fungsi pembinaan lingkungan, artinya menempatkan anggota keluarga dalam hubungan antar keluarga sebagai masyarakat. Pada kapasitas sebagai tetangga harus saling melindungi, saling menghormati, saling berbagi, dan saling mengingatkan. Bentuk-bentuk perlakuan salah pada anak tidak akan terjadi jika anggota keluarga dalam satu lingkungan masyarakat peka terhadap kondisi tetangga dan melakukan pendidikan terhadap warganya. Pengembangan lingkungan yang protektif dan ramah anak akan berkembang jika semua keluarga melakukan fungsi pembinaan lingkungan. Pengembangan monitoring berbasis masyarakat untuk setiap pelanggaran hak anak akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan perlindungan terhadap anak

Keluarga merupakan payung kehidupan bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat nyaman bagi seorang anak. Beberapa fungsi keluarga selain sebagai tempat berlindung, (Mudjijono, et al., 1995) diantaranya :

1. Mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada (sosialisasi).
2. Mengusahakan tersekenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga (ekonomi), sehingga keluarga sering disebut unit produksi.
3. Melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi (jompo).
4. Meneruskan keturunan (reproduksi).

Dampak anak tinggal di lingkungan prostitusi

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu dapat mengubah sikap yang telah ada, untuk kemudian meniru lingkungan.

Tinggal di sekitar lokasi prostitusi anak rentan terkena pengaruh darilokasi prostitusi yang sarat akan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi. Segala hal yang berkaitan dengan prostitusi salah satunya diawali dengan hal yang berbau pornografi. Muatan–muatan pornografi lah yang memancing adanya praktek prostitusi. Dengan menyaksikan atau melihat hal yang berbau pornografi, maka akan memancing gairah seksual seseorang. Bagi orang–orang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah akan dengan mudah menyalurkan hasratnya terhadap pasangannya, namun bagi orang yang belum memiliki pasangan akan mencari cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini lah yang pada akhirnya menciptakan praktek prostitusi.

Kebanyakan anak di sekitar lokasi prostitusi sudah memahami dan mengerti penggunaan alat–alat kontrasepsi. Kondisi dan keadaan seperti itu sungguh tidak baik khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Adanya

pengaruh dari dalam maupun dari luar lokasi prostitusi, melihat teman-teman sebayanya menjadi pengunjung maupun pelanggan praktek prostitusi akan mempengaruhi perilaku anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir. Memprihatinkan melihat anak setiap harinya harus melihat kondisi di sekitar tempat tinggalnya, apalagi anak bisa bersinggungan langsung dengan obyek yang bermuatan pornografi.

Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan :

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bab III Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan ketentuan yang termasuk hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Prostitusi tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik dan biologis semata, tetapi dampak psikis dari penyimpangan itu jauh lebih panjang dan rumit. Anak pada usia remaja perlu dibantu untuk mendapatkan identitas diri yang sehat dan meningkatkan keterampilan pengelolaan/pengendalian diri dan penyesuaian diri. Pribadi yang matang secara emosional juga akan membuatnya mampu memegang nilai dan mendasarkan perilakunya pada rasionalitas dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, meskipun berada di lingkungan sosial yang kurang kondusif. Dengan demikian, peran serta pribadi, keluarga dan masyarakat akan menumbuhkan individu yang sehat yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sehat pula.

PENUTUP

Perlindungan anak yang termasuk kedalam hak anak merupakan tanggung jawab yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Keberadaan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi harus mendapatkan perhatian khusus karena lingkungan prostitusi berakibat menimbulkan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak di lingkungan prostitusi termasuk perilaku seksual anak. Akan tetapi keluarga sebagai sebagai lingkungan awal dari anak tersebut memiliki

andil yang cukup besar untuk menjaga dan memenuhi hak anak sebagai mestinya.

Pemenuhan hak anak dalam hal perlindungan anak yang bertempat tinggal di lingkungan prostitusi mesti dilakukan dengan bijak dan adil jangan sampai untuk menjaga anak dari lingkungan yang berdampak negatif anak justru kehilangan hak – hak yang lainnya seperti bermain, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Dengan adanya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi Prostitusi oleh keluarga, diharapkan masyarakat menjadi sadar, peka akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu anak tetap bisa berhasil walaupun tinggal di lingkungan yang kurang baik.

DAFTAR RUJUKAN

Referensi Buku:

- Mudjijono, Hermawan, Hisbaron, Noor Sulisty, dan Sudarmo Ali. 1996 . Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zurayk, Ma'ruf. 1997. Aku dan Anakku. Bandung: Al-Bayan (Kelompok Penerbit Mizan)

Referensi lain:

Anne Ahira, Pembagian Lingkungan Hidup Berdasarkan sifatnya, www.anneahira.com/lingkungan.htm, diakses pada tanggal 2 November 2014, pukul 20.35 WIB.

Artikel Fungsi Keluarga dan Perlindungan Anak, Yusi Riksa Yustiana, diakses pada tanggal 2 November 2014, pukul 22.19 WIB

Artikel ilmiah “Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak” oleh Alfiolita Hana Debry Carolina, diakses pada tanggal 3 November 2014, pukul 23.11 WIB

Artikel Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial pertama kali diterbitkan dunia psikologi pada 20 November 2008, diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 17.15 WIB

<http://www.hidayatjayagiri.net/2013/11/memahami-hak-anak-dalam-keluarga.html>, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 21.37 WIB

http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_Indonesia_version.pdf , diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 19.22 WIB

Konvensi Hak anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

PENGASUHAN (*GOOD PARENTING*) BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS

Oleh:

Gabriela Chrisnita Vani, Santoso Tri Raharjo, & Eva Nuriyah Hidayat

Email:

Gabrielacv_68@yahoo.com; santosotriraharjo@gmail.com; enuriyah@yahoo.com; sahadihumaedi@yahoo.com

ABSTRAK

Setiap anak tidak terkecuali anak dengan disabilitas mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya. Akan tetapi jumlah anak disabilitas di Indonesia yang ternyata tidak sedikit harus diperhatikan bersama terutama oleh lingkungan terdekat atau orangtua. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah anak penyandang disabilitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menurut Pendataan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Kementerian Sosial (2009) , terdapat 65.727 anak, yang terdiri dari 78.412 anak dengan kedisabilitas ringan, 74.603 anak dengan kedisabilitas sedang dan 46.148 anak dengan kedisabilitas berat. Lalu berdasarkan Susenas Triwulan 1 Maret 2011, jumlah anak Indonesia sebanyak 82.980.000. Dari populasi tersebut, 9.957.600 anak adalah anak berkebutuhan khusus dalam kategori penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas memerlukan penanganan khusus, tetapi tidak semua orangtua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang secara penuh hal ini dapat terlihat dari penerimaan orangtua yang sedih, malu, dan terkejut. Dengan penerimaan tersebut, akan mengakibatkan orangtua tidak memperdulikan anak dengan disabilitas dan kurangnya perhatian atau kasih sayang orangtua kepada anak dengan disabilitas. Belum banyak orangtua yang menerima anak dengan disabilitas dengan hati yang tulus, yang mengakibatkan kurang terpenuhinya hak dan kebutuhan anak dengan disabilitas. Dalam hal ini, perlu adanya pengasuhan baik dari keluarga terutama kedua orangtua anak. Pengasuhan yang baik akan menghasilkan anak dengan disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dan mendapatkan hak mereka sehingga dapat berfungsi secara sosial. Perlunya edukasi akan fungsi keluarga yang memang harus dipenuhi yaitu afeksi, keamanan, identitas, afiliasi, sosialisasi, kontrol harus diberikan orangtua kepada anak penyandang disabilitas. Pelayanan sosial bagi keluarga juga dapat diterapkan diadakan misalnya dengan pelayanan konseling keluarga, family life education (pendidikan kehidupan keluarga), dan parent support group dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam memberdayakan orangtua serta anak dengan disabilitas. Kata kunci: orangtua anak disabilitas, pengasuhan, pelayanan sosial keluarga.

PENDAHULUAN

Anak-anak penyandang disabilitas adalah mereka yang sering kali tidak mendapatkan perawatan kesehatan atau bersekolah. Mereka yang paling rentan mengalami kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran, terutama jika mereka tersembunyi atau ditempatkan dalam lembaga - seperti banyak dari mereka karena stigma sosial atau biaya ekonomi untuk membesarkannya. Menurut data Sussenas tahun 2003, di Indonesia terdapat 679.048 anak usia sekolah berkebutuhan khusus atau 21,42 % dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan menurut sussenas pada tahun 2009, persentase jumlah anak penyandang disabilitas semakin meningkat yaitu Tuna Netra 10,71 %, Tuna Rungu 5,15 %. Tuna Wicara 6,09 %, Tuna Rungu Wicara 13,73 %, Tuna Daksa 31,71 %, Tuna Grahita 22,07 %, Tuna Ganda 8,25 %, dan Gangguan Jiwa 2,29 %. Anak dengan disabilitas mempunyai berbagai macam jenis hambatan. Setiap hambatan pada anak disabilitas mempunyai penanganan yang berbeda. Dalam data di atas jenis hambatan yang paling tinggi yaitu tuna daksa atau anak yang memiliki hambatan pada bagian tubuh.

Jumlah anak dengan disabilitas menurut RISKESDAS 2007, sekitar 4 persen dari anak usia 15 sampai 19 tahun mengalami kesulitan yang signifikan pada setidaknya satu domain fungsional (penglihatan, pendengaran, berjalan, berkonsentrasi dan memahami orang lain serta perawatan diri) dan oleh karena itu dianggap sebagai hidup dengan disabilitas. Sensus 2010 menemukan bahwa sekitar 2 persen dari anak usia 0 sampai 14 tahun memiliki disabilitas. Dua persen dari semua anak usia 0 sampai 18 di Indonesia berjumlah sekitar 1,5 juta anak, empat persen dari jumlah semua anak akan meningkatkan jumlah total sekitar 3 juta anak-anak dan remaja yang hidup dengan disabilitas.

Jumlah anak penyandang disabilitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Sosial Dinas Sosial jumlah penyandang cacat pada tahun 2011 adalah 29.110, yang terdiri dari 15.667 pria dan 13.443 wanita, sedangkan untuk tahun 2010 jumlah penyandang cacat adalah 36.607, yang terdiri dari 19.867 pria dan 16.990 wanita.

Di 24 propinsi menurut Pendataan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Kementerian Sosial (2009) , terdapat 65.727 anak, yang terdiri dari 78.412 anak dengan kedisabilitas ringan, 74.603 anak dengan kedisabilitas sedang dan 46.148 anak dengan kedisabilitas berat. Lalu berdasarkan Susenas Triwulan 1 Maret 2011, jumlah anak Indonesia sebanyak 82.980.000. Dari populasi tersebut, 9.957.600 anak adalah anak berkebutuhan khusus dalam kategori penyandang disabilitas. Sedangkan jumlah anak dengan kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa adalah sebesar 2,2% dari populasi anak usia sekolah (4-18 tahun) atau sekitar 1.185.560 anak.

Akan tetapi jumlah anak disabilitas di Indonesia yang ternyata tidak sedikit, harus diperhatikan bersama terutama oleh lingkungan terdekat atau orangtua. Karena anak dengan disabilitas memerlukan penanganan khusus, tetapi tidak semua orangtua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang. Orangtua terkadang tidak memperdulikan atau kurangnya perhatian atau

kasih sayang orangtua kepada anak dengan disabilitas. Belum banyak orangtua yang menerima anak dengan disabilitas dengan hati yang tulus. Anak dengan disabilitas tidak merasakan diterima secara penuh di lingkungan keluarga terutama orangtua. Orangtua menganggap anak dengan disabilitas merupakan “aib” bagi keluarga. Begitu juga dengan stigma negatif bahwa anak dengan disabilitas hanya dapat menunggu bantuan saja dan tidak bisa melakukan aktivitas sendiri. Reaksi orangtua mempunyai anak dengan disabilitas juga bermacam-macam.

Berbagai emosi dan reaksi orang tua dengan kehadiran anak yang cacat, menurut model Cunningham (*Cunningham's model of psychic crisis*) menurut Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Tahun 2014, mengalami beberapa tahapan, yaitu:

1. Fase terkejut (*shock phase*)

Pada tahap ini timbul perasaan *tragedy*, orang tua panik, sedih karena melahirkan anak cacat. Reaksi anggota keluarga lain makin menambah perasaan ini, pada umumnya orang tua merasa mereka “lain” dari orang tua lainnya, merasa terkucil. Pada tahap ini timbul perasaan bingung, mengingkari, irasional, bahkan perasaan jadi tumpul. Pada tahap ini sikap ketakutan pada orangtua sangata muncul karena mereka merasa tidak sanggup mengurus anak dengan disabilitas. Orangtua tidak percaya mengasuh anak dengan hambatan yang dimiliki, namun hal tersebut sebenarnya salah, setiap anak adalah anugerah Tuhan yang memang harus kita jaga dan kita berikan kasih sayang.

2. Fase bereaksi (*reaction phase*)

Pada tahap ini orang tua mudah mengekspresikan perasaan duka yang dalam, kecewa, cemas, agresi dan perasaan gagal. Perasaan-perasaan ini menyebabkan orang tua takut berbuat kesalahan “lagi”, mereka biasanya mencari bantuan dan pakar medis atau “ahli lain” sebagai satu-satunya dewa penolong dan menjadi sangat tergantung pada mereka. Pada tahap ini orangtua merasakan kecemasan dan gagal dalam mengasuh anak, maka itu orangtua lebih banyak melibatkan atau secara tidak langsung memberikan pengasuhan anak mereka kepada orang lain. Perasaan ini salah, karena seharusnya orangtua harus lebih banyak meluangkan waktu mengasuh anak mereka.

Dalam kenyataannya orangtua-lah yang selalu ada bersama anak sehingga merekalah yang paling kenal dengan perkembangan anaknya. Timbul kecenderungan bersikap terlalu melindungi anak dari kesulitan atau bahaya lain, terkesan bersikap memanjakan anak. Orang Tua spesial untuk “Anak Spesial”. Reaksi lain adalah kontrol yang berlebihan (anak dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan), sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman sosial yang bervariasi. Dalam hal ini, orangtua mempunyai pengasuhan tidak melihat kebutuhan anak terlebih dahulu. Ada 2 jenis pengasuhan yang tidak baik, yang pertama orangtua yang selalu memanjakan anaknya dan yang kedua pengasuhan yang terlalu possessive yaitu anak tidak boleh melakukan hal-hal yang anak sukai karena semua yang dilakukan oleh anak dibatasi oleh orangtua.

3. Fase penyesuaian (*adaptation phase*)

Pada tahap ini orang tua secara realistis mulai menerima kondisi anak. Dalam tahap ini para ahli perlu memberikan banyak informasi mengenai keadaan anak, khususnya mengenali kemampuan kekuatan yang ada pada anak cacat dan upaya pengembangannya. Tahap ini, orangtua mulai berani menerima anak, mencari dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, mencari informasi terkait dengan pengasuhan anak dengan disabilitas.

4. Fase orientasi (*orientation phase*)

Orang tua mulai mengorganisasi pikiran dan perasaannya sendiri, berupaya mencari bantuan yang terarah & sistematis dan melaksanakan program yang disarankan serta membuat rencana masa depan bagi anak cacatnya. Tahap ini, orangtua mulai berusaha mencari dan memfasilitasi perkembangan anak misalnya dalam pendidikan anak mulai dimasukkan ke SLB (sekolah luar biasa). Orangtua juga mulai mendengar saran misalnya dari lingkungan terdekat orangtua terkait dengan pengasuhan yang baik kepada anak dengan disabilitas.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Duncan dan Moses (dalam Gargiulo, 1985) bahwa orangtua yang mempunyai anak dengan disabilitas akan mengalami 3 fase, yaitu:

1. Fase primary (*Shock, denial, grief, depression*)
2. Fase secondary (*ambivalensi, guilt, anger, shame, embarrassment*)
3. Fase tertiary (*bargaining, adaption dan reorganization, acceptance, adjustment*)

PEMBAHASAN

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak, keluarga terutama orangtua bertugas untuk memberikan perlindungan serta kasih sayang kepada anak. Keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam pengasuhan kepada anak dengan disabilitas dengan tujuan anak dengan disabilitas dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. orangtua wajib mendampingi anak, mengasuh anak, dan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Banyak keluarga khususnya para orangtua yang memandang “rendah” dan hanya bisa bergantung pada orang lain. ABK juga sama seperti kita mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan. Menurut Menurut Heward (2003) menyatakan bahwa efektivitas berbagai program penanganan dan peningkatan kemampuan hidup anak berkebutuhan khusus akan sangat ditentukan oleh peran serta dan dukungan penuh dari keluarga, sebab keluarga adalah pihak yang mengenal dan memahami berbagai aspek dalam diri seseorang dengan jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain. Di samping itu, dukungan dan penerimaan dari orangtua dan anggota keluarga yang lain akan memberikan ‘energi’ dan kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha mempelajari dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan ketrampilan hidupnya dan pada akhirnya dapat berprestasi. Orangtua pasti lebih mengenal anaknya dibandingkan orang lain, maka dari itu pengasuhan dari orangtua lah yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak dengan disabilitas. Orangtua yang mempunyai anak dengan hambatan, merasa bahwa anak tersebut

tidak berguna dan menimbulkan malu bagi keluarga. Padahal, seperti kita ketahui bahwa orangtua mempunyai peran penting dalam memberikan asuhan kepada anak. Jika pola pikir orangtua tertanam bahwa anak dengan disabilitas tidak dapat berdaya, hal ini akan mempengaruhi pengasuhan yang diberikan orangtua kepada anak. pengasuhan dapat diimplementasikan dengan fungsi pokok keluarga. Adapun fungsi pokok keluarga menurut Allender (1998):

1. *Affection* (Afeksi)

Fungsi *affection* yang dilakukan keluarga diantaranya adalah dengan menciptakan suasana persaudaraan/menjaga perasaan, mengembangkan kehidupan seksual dan kebutuhan seksual, serta menambah anggota keluarga baru. Orangtua dapat memberikan cinta kasih yang tulus dan rasa kasih sayang kepada anak.

2. *Security and Acceptance* (Keamanan dan Penerimaan)

Di dalam keluarga, fungsi keamanan dan penerimaan juga dibutuhkan. secara umum usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan mempertahankan kebutuhan fisik, dan menerima individu sebagai anggota keluarga. Orangtua dapat menerima anak secara utuh dengan tidak mengatakan bahwa anak sebuah “aib” bagi keluarga serta memberikan rasa aman kepada anak.

3. *Identity and satisfaction* (Identitas dan memuaskan)

Keluarga merupakan suatu media yang dipergunakan untuk mengembangkan diri, yaitu mengembangkan peran dan self image, mempertahankan motivasi, dan mengidentifikasi tingkat sosial dan kepuasan aktivitas. Orangtua dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya, misalnya mencari dan memfasilitasi minat dan bakat anak.

4. *Affiliation and companionship* (Afiliasi dan pertemanan)

Fungsi ini dilakukan dengan mengembangkan pola komunikasi dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Orangtua berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak dan menjaga hubungan yang baik antar anggota keluarga.

5. *Socialization* (Sosialisasi)

Sosialisasi juga salah satu fungsi yang dilakukan dalam keluarga yang tujuannya untuk mengenal kultur (nilai dan perilaku) serta sebagai peraturan/pedoman hubungan internal dan eksternal. Pada akhirnya, sosialisasi juga bertujuan untuk melepas anggota keluarga. Misalnya saat anak sudah dewasa dan menikah. Orangtua dapat memberikan bimbingan sosial kepada anak misalnya mengenalkan anak kepada tetangga, teman, masyarakat.

6. *Controls* (Kontrol)

Keluarga juga berfungsi sebagai kontrol, yaitu mempertahankan kontrol sosial yang ada di keluarga. Selain itu fungsi kontrol dapat diterapkan untuk melakukan penempatan dan pembagian kerja anggota keluarga sesuai dengan peran mereka

masing-masing yang pelaksanaannya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Orangtua dapat memberikan kontrol kepada anak berupa monitoring secara intensif kepada anak.

Penerimaan orangtua kepada anak dengan disabilitas menjadi nilai tersendiri, pasalnya belum banyak orangtua yang dapat menerima anak dengan disabilitas secara penuh. Hal ini juga dapat menyebabkan kegelisahan tersendiri pada orangtua dan akibatnya menyebabkan *parenting stress*. *parenting stress* yaitu ketegangan yang berlebihan secara khusus terkait dengan peran orangtua dan interaksi orangtua dengan anak. biasanya *parenting stress* akan lebih tinggi pada pengasuhan anak. Seharusnya orangtua dapat menjadi *role model* bagi anak dan mencoba mengajarkan anak untuk mencoba melakukan pekerjaan rumah (kerumahtanggan), memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak, tidak menganggap bahwa mengurus ABK sangat sulit karena hambatan yang dimilikinya, membawa anak ke lingkungan luar, mengawasi anak. akan tetapi para orangtua sudah terlebih dulu khawatir dengan anak mereka. Akan tetapi dampak *parenting stress* ini, harus diatasi secara bersama-sama. Orangtua anak dengan disabilitas juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga besar dan lingkungan di sekitar orangtua anak misalnya tetangga terdekat ataupun teman-teman dari orangtua. *Support* dari keluarga besar ataupun lingkungan luar kepada orangtua menjadi kekuatan tersendiri agar orangtua dapat benar-benar yakin dan percaya diri untuk memberikan pengasuhan kepada anak dengan disabilitas, begitu juga dengan dukungan sosial yang diberikan kepada anak dengan disabilitas. Dukungan sosial yang diberikan kepada anak dengan disabilitas antara lain: Dukungan emosional, informasi, atau materi alat bantu yang diberikan. Dukungan sosial berpengaruh terhadap anak berkebutuhan khusus dalam membuat anak tersebut tidak merasa berbeda dari anak normal. *Support*, motivasi, semangat serta penghargaan bagi mereka sangat mempengaruhi psikis anak. dampaknya anak semakin yakin akan potensi yang ada dalam dirinya. Tak jarang orangtua tidak dapat melakukan *coping strategy*, dampaknya biaya perawatan untuk ABK pun tergolong mahal. Namun setidaknya terdapat tiga strategi yang biasa diadopsi oleh masyarakat di negara-negara maju dan berkembang seperti Australia (Ros & Cuskelly, 2006), China (Chen & Silbereisen, 2010), dan Iran (Assadi, 2011). Dalam hal pengasuhan, orangtua harus mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Pengasuhan yang baik kepada anak dengan disabilitas yaitu cara berkomunikasi. Jerome Bruner (1975) menyatakan dengan kemampuan berkomunikasi dapat lebih mengetahui kebutuhan psikososial anak, antara lain: Anak harus dipersepsi sebagai seseorang dengan kualitas-kualitas individu yang memiliki kebutuhan, keinginan, temperamen, kepribadian dan keterampilan. Komunikasi yang diberikan kepada anak disabilitas memang sedikit berbeda tergantung dengan jenis disabilitas anak.

Saat ini juga banyak orangtua yang bekerja, maka dari itu waktu bersama anakpun dirasa kurang. Anak lebih sering bersama dengan orang lain misalnya pembantu rumah tangga dibandingkan dengan kedua orangtuanya. Orangtua juga tidak secara maksimal mendampingi anak dengan disabilitas. Hal ini dinyatakan

oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Sudibyo Alimoeso (2013) melalui sindonews.com, bahwa

“asuhnya kepada para pembantu atau pengasuh. Hal ini banyak dilakukan orangtua yang harus bekerja.”

Hal ini memang sudah banyak terjadi di wilayah perkotaan, karena biaya hidup yang cukup tinggi. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat di pedesaan kurang mengetahui bagaimana pengasuhan kepada anak dengan disabilitas, oleh karena itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat khususnya orangtua yang mempunyai anak dengan disabilitas. Dengan adanya pengasuhan yang baik dari orangtua maupun keluarga besar, akan terlihat pengembangan dari dalam diri anak, karena pada dasarnya anak mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Memang, orangtua harus secara ekstra menjaga anak dengan disabilitas tetapi dengan ketulusan hati, orangtua tidak akan merasakan kelelahan ataupun emosi.

Setiap anak tidak terkecuali anak dengan disabilitas mempunyai hak yang sama. Menurut Komnas Perlindungan Anak (2009), empat dasar hak yang harus didapatkan oleh anak antara lain:

1. Hak hidup lebih layak

Misalnya seperti berhak atas kasih sayang orang tua, ASI eksklusif, akte kelahiran dan lain sebagainya. Setiap anak, tidak terkecuali anak dengan disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

2. Hak tumbuh dan berkembang

Contoh seperti hal atas pendidikan yang layak, istirahat, makan-makanan yang bergizi, belajar, bermain, dan lain-lain. Setiap anak, tidak terkecuali anak dengan disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang, antara lain mendapatkan kebutuhan dasar yaitu makanan yang bergizi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan rekreasi, dan lain-lain.

3. Hak perlindungan

Contohnya yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, tindak kriminal, pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya. Setiap anak, tidak terkecuali anak dengan disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya kekerasan dan kriminalitas

4. Hak berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain. Setiap anak, tidak terkecuali anak dengan disabilitas, mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya, mempunyai tujuan dalam hidupnya.

Anak dengan disabilitas harus mempunyai pengasuhan yang baik terutama dari orangtua anak. Dengan adanya pengasuhan yang baik antara lain pemberian kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan kepada anak, anak dapat berfungsi secara optimal.

Dalam hal ini, pekerja sosial mempunyai beberapa peran yaitu sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi orangtua dalam hal pengasuhan terhadap anak dengan disabilitas hal ini dapat dilakukan dengan konseling dan *parent support group*. Pekerja sosial dapat menjadi edukator dalam hal pemberian informasi terkait dengan anak dengan disabilitas dan bagaimana pengasuhan terhadap anak dengan disabilitas.

Pelayanan berbasis keluarga yang diberikan oleh pekerja sosial antara lain:

- a. Pelayanan konseling keluarga
Pelayanan ini bertujuan membantu penyesuaian dan peran dalam menghadapi permasalahan
- b. Pendidikan kehidupan keluarga
Keluarga yang mempunyai masalah dan tekanan diberi kemampuan untuk mengantisipasi berbagai masalah dan untuk mencegah kehancuran dalam keluarga.

PENUTUP

Pengasuhan yang baik harus diberikan kepada setiap anak tidak terkecuali anak dengan disabilitas. Pengasuhan dari orangtua bertujuan agar anak dapat memenuhi haknya. Setidaknya terdapat empat hak yang harus dimiliki oleh anak antara lain: Hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpendapat, dan hak berpartisipasi. Akan tetapi masih banyak orangtua yang tidak menerima anak dengan disabilitas, orangtua menganggap anak mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tidak sanggup, dan hanya bisa mengandalkan bantuan orang lain. Rasa malu dan kecewa pun dirasakan orangtua, karena mereka malu mempunyai anak yang tidak sempurna, mereka malu orang lain mencemooh mereka. Selain itu orangtua biasanya kecewa dengan keadaan anak yang tidak bisa sesempurna anak lainnya. Akibatnya, hak-hak anak tidak secara menyeluruh terpenuhi karena tidak adanya pengasuhan yang baik. Dalam hal ini, perlu adanya informasi yang diberikan kepada orangtua, motivasi atau support dari lingkungan sekitar, dan pemberian pengertian mengenai anak dengan disabilitas. Dalam memberikan pengasuhan kepada anak dengan disabilitas, keluarga khususnya orangtua dapat mengimplementasikan fungsi keluarga berupa fungsi afeksi, keamanan dan penerimaan, identitas, kontrol, dan sosialisasi. Selain itu, *parent support group* dapat dipraktikkan misalnya di sekolah khusus anak dengan disabilitas (SLB), perkumpulan penyandang disabilitas. Pekerja sosial dapat memfasilitasi konseling kepada orangtua dan memberikan edukasi mengenai pengasuhan kepada anak dengan disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dyah Wieka,dkk. 2005. Retardasi mental, Tingkat penerimaan. Jakarta: Fakultas Unika Atma Jaya

Wibhawa Budi, dkk. 2010. Dasar-dasar pekerjaan sosial. Bandung: Widya Padjadjaran

Jurnal:

http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/2-13_1.pdf\ diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33631/4/Chapter%20I.pdf>\ diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014

lib.ui.ac.id/file?file=digital/125956-649..pdf\ diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014

Rujukan Elektronik:

[www.idp-europe.org/docs/uio_upi_inclusion_book/8-](http://www.idp-europe.org/docs/uio_upi_inclusion_book/8-Membantu_anak_dan_Keluarga.php)

Membantu_anak_dan_Keluarga.php diunduh pada tanggal 15 Oktober 2014

<http://nasional.sindonews.com/read/763576/15/peran-orangtua-dibutuhkan-rawat-anak-berkebutuhan-khusus> diunduh pada tanggal 29 Oktober 2014

http://www.unicef.org/Indonesia/id/media_20985.html diunduh pada tanggal 2 November 2014

www.organisasi.org/1970/01/empat-4-hak-dasar-anak-Indonesia-menurut-seto-mulyadi-komnas-perlindungan-anak.html 3 November 2014

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ISSUE PEKERJA ANAK

Oleh:

Hedi Ramdani, Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar

ABSTRAK

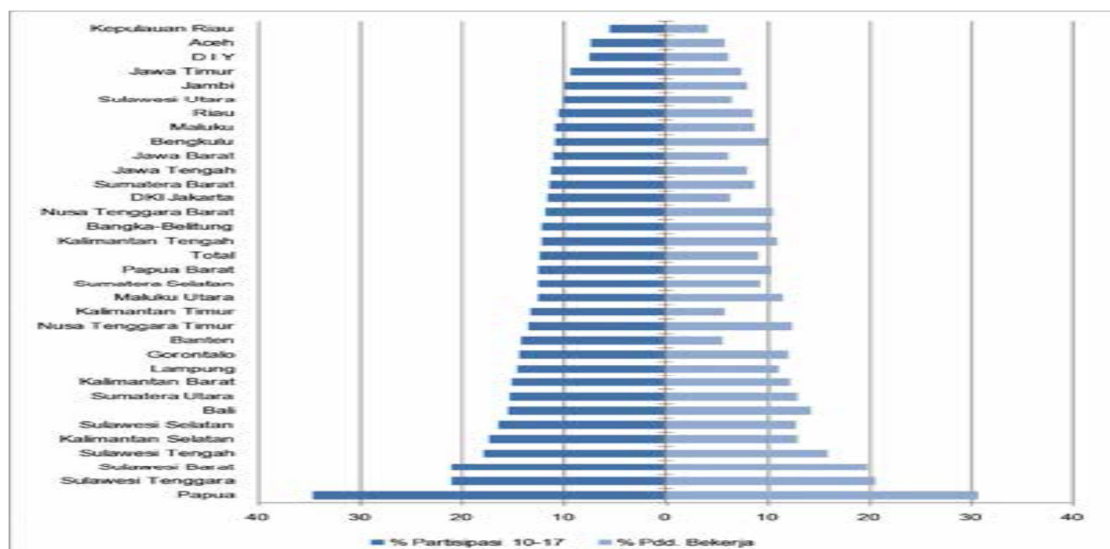
Issue Pekerja anak di Indonesia pada saat ini sungguh memprihatinkan, jumlah pekerja anak di berbagai daerah di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam artikel ini, penulis membahas mengenai kondisi secara umum mengenai pekerja anak di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pekerja anak. Selain itu, mengetahui definisi pekerja anak serta dampak dari pekerja anak dilihat dari aspek psikososialnya. Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak terutama mengenai aspek psikososialnya. Salah satu profesi tersebut adalah pekerja sosial, dimana peran dari pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Selain pekerja sosial, peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan menghapus pekerja anak terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah Indonesia dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan ILO. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak di dunia khususnya di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Pekerja Sosial, Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Issue Pekerja Anak

Pendahuluan

Pada 2011 ILO mencatat ada sekitar 215 juta pekerja anak di seluruh dunia dimana sekitar 115 juta diantaranya bekerja pada pekerjaan yang berbahaya. Hak-hak mereka sebagai anak juga terlanggar karena sebagian dari mereka bekerja penuh, mereka tidak sekolah, tidak memiliki kesempatan untuk bermain bahkan mendapat perawatan dan nutrisi yang tidak memadai. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan. Hasil Sakernas Agustus 2011 menunjukkan sekitar 3,4 juta anak usia 10-17 tahun masuk dalam kelompok pekerja. Jumlah ini mencapai sekitar 8,99 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun (37,7 juta jiwa). Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak berjenis kelamin lakilaki, lebih besar dibandingkan dengan pekerja anak yang berjenis kelamin perempuan. Persentase pekerja anak laki-laki adalah 10,70 persen, sedangkan persentase pekerja anak perempuan adalah 7,15 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pekerja anak di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan

dengan persentase pekerja anak di perkotaan. Di perdesaan, dari 19,4 juta penduduk usia 10-17 tahun terdapat 11,83 persen yang bekerja sedangkan di perkotaan dari 18,3 juta penduduk usia 10-17 tahun hanya 5,96 persen yang bekerja. Apabila dilihat dari setiap provinsinya maka dapat diperoleh data sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011

“Berdasarkan data dari SAKERNAS, dari total 3,4 juta penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja, 3 provinsi utama penyumbang terbesar adalah Jawa Barat (13,03 persen), Jawa Tengah (11,41 persen) dan Jawa Timur (11,38 persen). Tetapi, dibandingkan dengan total penduduk usia 10-17 tahun, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan proporsi tenaga kerja yang paling besar (30,72 persen), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (20,46 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (19,82 persen). Jawa Barat sendiri menyumbang sekitar 6,16 persen dari total populasi penduduk 10-17 tahun, sementara Jawa Timur menyumbang sebesar 7,37 persen, sedangkan Jawa Tengah menyumbang sebesar 7,90 persen”. (Yusuf, Huda dkk. 2012. *Profil Anak Indonesia 2012*. Jakarta: CV. Miftahur Rizky. Hal: 78)

Masalah pekerja anak di Indonesia mulai dibicarakan sejak awal tahun 1990-an ketika media mulai mengungkap kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja anak. Pekerja anak adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum mencapai usia legal untuk bekerja sehingga hak-hak dasar mereka terampas. Beberapa bentuk hak dasar tersebut antara lain adalah hak kebebasan untuk memilih dan jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, termasuk hak untuk bersekolah. Indonesia sendiri mematok batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di semua sektor adalah 15 tahun. Batas usia

yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar ini, ditetapkan oleh Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999 yang mengacu pada Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja. Selain mengembalikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan pekerja anak ini tentunya membawa dampak kepada aspek psikososialnya dimana si anak ini bekerja bukan pada waktu yang tepat yang tentunya akan menghambat proses tumbuh kembangnya dan tidak sesuai dengan tugas perkembangan di usianya. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dimana seharusnya anak-anak tersebut sedang mengenyam bangku pendidikan dan dalam kondisi keceriaan namun pada kenyataannya sebagian anak di Indonesia malah bekerja untuk kehidupannya. Selain itu, lingkungan tempat anak bekerja juga dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut serta dari faktor keluarga yang ikut mempengaruhi anak. Untuk itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja atau kebijakan yang tegas agar tidak ada lagi pekerja anak.

Kondisi Umum Pekerja Anak

Pekerja anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, namun apakah kita mengetahui apa itu pekerja anak? beberapa definisi mengenai pekerja anak tadi sudah disampaikan pada pendahuluan, namun untuk memperkuat definisi dari pekerja anak itu sendiri adalah sebagai berikut:

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain :

1. Anak bekerja setiap hari.
2. Anak tereksplorasi.
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
4. Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak yang bekerja adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berdasarkan dua definisi diatas maka pekerja anak merupakan orang yang berusia dibawah dari batas minimal usia kerja yang melakukan pekerjaan setiap hari, tereksplorasi, serta memiliki waktu bekerja yang lama sehingga mengganggu aktivitas yang seharusnya orang tersebut lakukan di usianya. (Sumber: Modul Penanganan Pekerja Anak, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, November 2005)

Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada

masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hak-Hak Dasar Perlindungan Anak yang didalamnya menyangkut hal:

1. Hak untuk hidup layak
2. Hak untuk berkembang
3. Hak untuk mendapat perlindungan
4. Hak untuk berperan serta
5. Hak untuk memperoleh pendidikan

Pernyataan undang-undang tersebut didukung pula dalam asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dengan berlandaskan undang-undang tersebut maka, anak haruslah kita lindungi dan dapat memenuhi segala kebutuhan dan haknya selama hidup. Jangan pernah memperlakukan anak dengan cara yang tidak benar seperti mempekerjakan anak secara berlebihan tanpa melihat kesejahteraan anak itu sendiri yang nantinya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Salah satu contoh kasus pekerja anak yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Pada kasus tersebut diceritakan seorang anak dibawah umur yang bernama Dewi yang merupakan seorang pekerja di CV Langgeng Computer Embroidery, pabrik konveksi milik Budi Halim dan istrinya, Herawati. Inti dari kasus tersebut adalah berawal dari pelaporan Dewi kepada pihak kepolisian atas perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak konveksi tersebut sehingga muncul rasa ingin keluar dari tempat tersebut. Para pekerja anak tersebut harus bekerja selama 12 jam dari pukul 07:00 hingga pukul 19:00 dengan gaji sebesar Rp. 20.000. Sungguh, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para anak-anak yang bekerja ditempat tersebut. (Sumber: <http://news.liputan6.com/read/38644/derita-pekerja-anak-dari-kota-kembang>, diakses pada hari Sabtu, 13 Desember 2014, pukul 14:50)

Faktor Penyebab terjadinya Pekerja Anak

Seorang anak tentu tidak ingin menjadi seorang pekerja yang harus bekerja pada usia yang tidak seharusnya. Issue pekerja anak dipicu oleh beberapa faktor penyebab anak-anak di Indonesia menjadi seorang pekerja anak. Dalam buku *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak* Halaman 9-10, secara umum, faktor penyebab terjadinya pekerja anak adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan
Keluarga miskin mengirim anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak anak yang bekerja di lahan pertanian atau toko keluarga yang kelangsungannya tergantung pada anggota keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar.
2. Gagalnya Sistem Pendidikan
Beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, tidak mempunyai sekolah. Kadang-kadang, sekolah yang ada meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup membayarnya. Kalau pun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang.
3. Perekonomian Informal
Pekerja anak lebih umum dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar di sektor informal daripada di tempat kerja yang lebih besar. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan di sana tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Di mana ada perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula.
4. Rendahnya Biaya yang Dikeluarkan untuk Mempekerjakan Anak
Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang menarik karena anak dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggang lebih mudah dikendalikan dan diatur.
5. Tidak Adanya Organisasi Pekerja
Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.
6. Adat dan Sikap Sosial
Di banyak negara, elit yang berkuasa atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak, dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga murah. Pada kasus-kasus lain, bila orang tua mempunyai sedikit uang untuk

membiyai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak.

Dampak Psikososial Pada Pekerja Anak

a. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Fisik Anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS).

b. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Emosi Anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

c. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Sosial Anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi kesekolah dan bersosialisasi dengan teman sebanyanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi atau menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Sebagaimana dijelaskan disub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita –cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan

berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

Hal tersebut juga didukung oleh teori Erik Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psiko-sosial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Ada 8 (delapan) tingkatan perkembangan yang akan dilalui oleh manusia. Menariknya bahwa tingkatan ini bukanlah sebuah gradualitas. Manusia dapat naik ketingkat berikutnya walau ia tidak tuntas pada tingkat sebelumnya. Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tingkatannya tertangani dengan baik, orang itu akan merasa pandai. Jika tingkatan itu tidak tertangani dengan baik, orang itu akan tampil dengan perasaan tidak selaras.

Dalam setiap tingkat, Erikson percaya setiap orang akan mengalami konflik/krisis yang merupakan titik balik dalam perkembangan. Erikson berpendapat, konflik-konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologi atau kegagalan untuk mengembangkan kualitas itu. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat. Begitu juga dengan potensi kegagalan.

Peran Pekerja Sosial

Definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala internasional yang dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI 2003, menyatakan:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (DuBois & Miley, 2005: 4).”

Artinya, profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Penggunaan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik dimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial. Selain itu, peran pekerja sosial juga sangat dibutuhkan pada tahap rehabilitasi pada anak karena dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi:

1. Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang terekspos situasi-situasi yang traumatis;

2. Bantuan hukum dan perlindungan;
3. Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftarkan diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa, termasuk menyediakan peralatan sekolah, dan mungkin subsidi, atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka;
4. Pelatihan kerja bagi anak-anak;
5. Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, dimana kehilangan penghasilan berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka.

Peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendekatan manajemen kasus dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan tidak tunggal tetapi jamak, karena antara peranan yang satu dan peranan yang lainnya saling menunjang dan saling melengkapi. Peranan pekerja sosial muncul karena adanya fungsi yang diembannya. Beberapa peran utama yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pekerja Sosial sebagai Konselor

Melaksanakan Konseling (Counseling) yaitu prosedur yang digunakan oleh pekerja sosial guna membimbing, dan membantu klien/CNSP mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kegiatannya seperti memberikan nasihat. Konseling dilaksanakan melalui wawancara mendalam, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1). Kesadaran akan adanya masalah; 2) menciptakan relasi dengan klien; 3). Menumbuhkan motivasi klien; 4). mengkonseptualkan masalah; 5). Mengeksplorasi strategi pemecahan masalah; 6). Memilih strategi pemecahan masalah; 7). Melaksanakan kegiatan pemecahan masalah; dan 8). Mengevaluasi. Salah satu contoh keterampilan yang mendukung peran ini yaitu Pekerja Sosial harus mampu menjadi pendengar yang empatis, pendengar yang baik ketika klien menyampaikan keluhannya / permasalahannya / unek-uneknya dan kebutuhan (katartis) agar beban yang dialami klien terasa lebih ringan.

b. Pekerja Sosial sebagai Advokator

Sangat penting dalam menentukan apa yang menjadi hak klien misalnya apa yang dihadapi klien sehingga ia tidak memperoleh haknya, pekerja sosial melakukan tindakan mewakili klien (Advocacy) secara persuasive memperjuangkan hak-hak dan martabat klien. Dimana klien tidak mampu bertindak sendiri secara efektif dan terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit klien untuk menerima pelayanan, menggunakan sumber-sumber dan memperoleh hak-haknya.

c. Pekerja Sosial Berperan sebagai Pendamping

Dengan memberikan dukungan sosial emosional kepada klien karena masalahnya belum terpecahkan.

d. Pekerja Sosial sebagai Konsultan,

Pekerja sosial harus mampu bekerja sama dengan profesi lainnya guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman klien terhadap kondisi yang ada dengan memberikan informasi tentang layanan yang diterima dan dipilihnya atau gagasan kepada klien.

(Sumber: <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/pekerja-sosial-anak.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2014, pukul 14:45)

Upaya Penanggulangan Issue Pekerja Anak

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang pemerintah terus melakukan inovasi-inovasi program-program yang bisa menjadi tolak ukur dalam pengentasan pekerja anak dengan cara peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia juga melanjutkan Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan *International Labour Organization* (ILO) untuk menekan angka pekerja anak di Indonesia, berbagai upaya pun dilakukan secara bersama-sama, seperti pada tahun 1999, pemerintah Indonesia berhasil meratifikasi Konvensi ILO No. 139 tentang Usia Minimum Anak-anak boleh bekerja, dilanjutkan pada tahun 2001 mulai membentuk Komite Aksi Nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, kemudian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai berjalan pada 2005. Skema ini memindahkan biaya sekolah melalui pemberian bantuan ke sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa. Target tersebut tercermin pada kebijakan pekerja anak dan pengembangan program selama periode lima tahun, dengan penekanan pada perluasan akses ke pendidikan sebagai instrumen yang efektif untuk menghapus pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 adalah inisiatif pengentasan kemiskinan yang mengharuskan penerima dana bantuan tunai tetap menyekolahkan anak mereka sampai menyelesaikan pendidikan dasar. Jika ada penerima dana bantuan yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka ia akan dikeluarkan dari program. Program PKH secara eksplisit mengakui keterkaitan antara kemiskinan dan pekerja anak. Seringkali anak-anak dari keluarga miskin ini dipaksa bekerja sejak usia dini, sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran di sekolah dan putus sekolah. Anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah dasar memiliki kesempatan sangat terbatas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal saat mereka beranjak dewasa. Akibatnya, mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Penyertaan pekerja anak sebagai salah satu indikator pencapaian program adalah tanda yang jelas bahwa masalah pekerja anak telah berhasil diarusutamakan ke dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini juga menandai terpenuhinya tujuan awal yang ditargetkan pada saat berdirinya program penghapusan pekerja anak oleh Indonesia dan ILO. Untuk memperkuat inisiatif PKH ini, Indonesia dan ILO meluncurkan Penarikan Pekerja Anak untuk mendukung PKH (PPA-PKH) dan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2008. Dengan didukung pendanaan dari pemerintah sebesar USD 10 juta, program ini telah berhasil menarik lebih dari

10.000 anak dari pekerjaan berbahaya; dan lebih dari 11.000 pekerja anak dari keluarga PKH mendapatkan manfaat dari program pendidikan transisi untuk membantu mereka masuk ke sistem pendidikan; sementara hampir 5.000 anak jalanan mendapatkan beasiswa serta program pelatihan kecakapan hidup. Pemerintah telah memutuskan untuk mengentaskan penghapusan Pekerja Anak tahun 2022 di Indonesia.

Penutup

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi dan menjaganya. Dewasa ini, kondisi anak-anak di Indonesia berbeda disetiap daerahnya. Banyak permasalahan yang terkait dengan anak, dan salah satunya adalah pekerja anak. Setiap tahunnya pekerja anak di Indonesia terus meningkat. Pemerintah pun tidak diam saja, berbagai upaya dilakukan untuk menghapus seluruh pekerja anak di Indonesia.

Selain pemerintah, salah satu peran dari profesi pekerja sosial adalah sebagai konselor, dalam hal ini pekerja sosial bisa membimbing anak tersebut dengan metoda konseling, dengan cara demikian anak dapat menyampaikan permasalahannya kepada pekerja sosial dan pekerja sosial nantinya akan bersamasama dengan si anak mencari penyelesaian permasalahannya. Peran selanjutnya yang bisa pekerja sosial lakukan adalah sebagai advokator, dimana pekerja sosial dapat mengetahui dan berusaha untuk menegakkan hak-hak anak, sehingga pekerja sosial bisa sebagai advokator bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Selanjutnya, pekerja sosial sebagai pendamping, dalam hal ini pekerja sosial memberikan suatu dukungan sosial dan emosional kepada anak tersebut sebagai upaya pemberian dukungan atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Serta peran terakhir adalah sebagai mediator dimana pekerja sosial menjadi jembatan untuk menjalin hubungan dengan sumber-sumber atau menjalin kerja sama dengan profesi lainnya dalam memecahkan permasalahan si anak itu sendiri.

Pekerja sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dikhususkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien dari sisi sosialnya dengan menggunakan peran-perannya dalam memecahkan masalah klien.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Buku Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: *Dukungan 20 Tahun*. Jakarta: International Labour Organization.
- Buku *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*. Jakarta. Organisasi Perburuhan Internasional.
- Demanik, Juda. 2008. *Pekerja Sosial Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Singgih D. Gunarsa. 1990. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Suharto, Edi dan Edi Suhandi. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Society.
- Sulistri dkk. 2007. *Pekerja Anak, Pendidikan Anak Pekerja/Buruh, Skema Bantuan, dan Komite Sekolah: Pandangan Serikat Pekerja/Buruh*. Jakarta: KSBSI, KSPSI, KSPI.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Warsini dkk. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Yusuf, Huda dkk. 2012. *Profil Anak Indonesia 2012*. Jakarta: CV. Miftahur Rizky

Sumber Internet:

<http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/pekerja-sosial-anak.html>

<http://news.liputan6.com/read/38644/derita-pekerja-anak-dari-kota-kembang>

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Nanda Aidiel Senja, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis

Email:

nanda.aidiel@live.com, hrachim@yahoo.com;rsdarwis@gmail.com

ABSTRAK

Anak jalanan anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum. Diantara mereka juga ada yang sudah tidak punya orangtua dan rumah untuk mereka pulang, sehingga mereka harus hidup dijalan. Kerentanan yang bisa menimpa anak jalanan, antara lain: (1) korban operasi tertib sosial; (2) korban tindak kekerasan orang dewasa; (3) kehilangan pengasuhan; (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular; (5) kehilangan kesempatan pendidikan; (6) konflik dengan hukum; dll. Sejatinya anak-anak jalanan hanyalah seorang anak yang kehidupannya masih bisa diperbaiki dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Melalui metode pemberdayaan, anak jalanan dapat diberikan pelatihan keterampilan dan juga pemenuhan kebutuhan mereka yang akan berguna bagi mereka kelak. Salah satu cara pemberdayaan anak jalanan adalah melalui lembaga rumah perlindungan anak. Secara ringkas fungsi rumah perlindungan anak antara lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah perlindungan anak berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain. Didalam rumah perlindungan anak, anak jalanan juga diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak tersebut dan pelibatan dalam berbagai kegiatan yang membangun karakteristik anak jalanan. Sehingga di dalam rumah perlindungan anak, anak-anak jalanan dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mengembangkan potensi dirinya agar bisa lebih berdaya dan bermanfaat.

Kata kunci : anak jalanan, pemberdayaan, rumah perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah sejak lama. Anak jalanan di Indonesia merupakan salah satu contoh masalah sosial yang ada di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang sangat rentan, berbagai pengaruh dari luar masih dapat masuk secara bebas untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka karena usia mereka yang masih anak-anak. Kehidupan di jalan merupakan kehidupan yang seharusnya tidak dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut, pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi perilaku mereka bisa membuat mereka melakukan tindak kriminalitas, seperti mencuri, merampok, mencopet, dll.

Menurut SDC (Social Development Centre) Departemen Sosial, anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti stasiun kereta api, mall, terminal bus, dan sebagainya. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak dan merealisasikan potensinya secara penuh. Banyak perdebatan dikalangan pemerintahan, masyarakat, dan organisasi sosial tentang istilah “anak jalanan” ini. Ada beberapa dari mereka menyebutkan istilah tersebut terlalu diskriminatif, sehingga diubah menjadi “anak terlantar”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Pada realitas sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.

Menurut Subhansyah, dkk dalam “*Anak Jalanan Di Indonesia*” (hal.14) kehadiran anak jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : faktor keluarga (persoalan ekonomi keluarga dan kekerasan dalam keluarga) dan; faktor lingkungan (lingkungan spasial dan lingkungan sosial). Aktivitas yang dilakukan anak jalanan beraneka ragam, diantaranya pengamen, pedagang koran, pedagang asongan, pembersih kaca mobil, pengemis, sampai kepada pengedar “kotak amal”.

Seorang anak yang seharusnya di umur yang masih belia, berkewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, justru malah bekerja mencari uang dijalan. Anak-anak adalah aset berharga keluarga dan bangsa dimasa depan, dengan anak yang malah bekerja dijalan, apakah yang akan terjadi pada bangsa ini di masa mendatang. Menurut data penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dari Kementerian Sosial pada tahun 2012, jumlah anak jalan di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan yaitu mencapai 135.983 jiwa dan Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua jumlah tertinggi anak jalanan sebesar 11.452 jiwa (sumber: <http://kemensos.go.id>). Sementara itu, di Kota Bandung menurut data Dinas Sosial Kota Bandung jumlah anak jalanan pada tahun 2012 mencapai 4.821 orang. (sumber: <http://news.detik.com>).

Hidup dan berada di jalanan bukanlah tempat yang layak untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal karena resiko eksploitasi dan ancaman

kekerasan yang bisa kapan saja dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut. Menurut Subhansyah, dkk dalam “*Anak Jalanan Di Indonesia*” (hal. 24):

Resiko menjadi anak jalanan antara lain: (1) korban operasi tertib sosial; (2) korban tindak kekerasan orang dewasa; (3) kehilangan pengasuhan; (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular; (5) kehilangan kesempatan pendidikan; (6) konflik dengan hukum; dll. Resiko-resiko tersebut akan terus melekat pada diri anak, meskipun mereka tidak meneruskan keberadaannya di jalanan.

Pada periode pasca jalanan, anak menjadi tidak memiliki keterampilan di sektor lain (non-jalanan), tidak memiliki identitas diri yang sempurna, internalisasi perilaku/subkultur jalanan, *traumatized* dan *stigmatized*, serta reproduksi kekerasan. (Handayani dalam Abu Huraerah, 2012:89).

Permasalahan yang dihadapi anak jalanan diantaranya adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perlindungan, kasih sayang, kesehatan, makanan, minuman dan pakaian. Bahkan akhir-akhir ini telah dijumpai masalah yang lebih serius, yang dialami oleh anak jalanan, seperti menjadi korban trafficking, eksploitasi seks komersial dan menjadi korban tindak kekerasan. Jika ditelusuri secara mendalam, fenomena anak jalanan secara garis besar sebagai akibat dari dua hal mendasar, yang pertama adalah problema psikososial, dimana hubungan antara orang tua dan anak, tidak harmonis. Orang tua kurang peduli dan kurang perhatian kepada anak-anaknya sehingga para anak mencari perhatian diluar rumah, yakni jalanan sebagai bentuk pelarian. Kedua, problema sosial ekonomi yang didominasi oleh masalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga banyak orang tua atau keluarga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan secara layak, kurang/tidak tersedianya fasilitas bermain bagi anak-anak di tempat tinggal mereka yang kumuh.

Roux & Smith (1998) menyebutkan bahwa factor-faktor dalam keluarga (seperti hubungan orang tua dan anak) merupakan alasan utama anak meninggalkan rumah pergi ke jalan. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak pergi ke jalan. Faktor-faktor lainnya seringkali merupakan turunan akibat kondisi kemiskinan atau ada relasi kuat yang saling mempengaruhi antar faktor-faktor tersebut, yaitu : kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri, dan pengaruh teman. Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak memang dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat. Namun, pada lapisan masyarakat bawah/ miskin, kemungkinan terjadinya kekerasan lebih besar dengan tipe kekerasan yang lebih beragam.

Mungkin memang tidak semua anak jalanan ini beruntung memiliki orang tua dan masih kembali kerumah setiap harinya. Dalam menangani masalah anak jalanan ini, semua pihak harus turun tangan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi juga harus terlibat jika memang ingin masalah anak

jalanannya ini terselesaikan. Organisasi yang terlibat, bisa berupa rumah perlindungan anak atau yayasan yang bisa membantu anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rumah perlindungan anak/Rumah Terbuka adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, Rumah perlindungan anak merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rumah perlindungan anak adalah merupakan tahap awal seorang anak untuk memperoleh pelayanan terhadap kebutuhan dasarnya, oleh karenanya penting menciptakan Rumah perlindungan anak sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik dan menyenangkan bagi anak-anak, khususnya anak-anak jalanan.

Didalam rumah perlindungan anak, anak jalanan diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, diantaranya melalui pemberdayaan anak jalanan. Pemberdayaan pada anak jalanan, dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan yang diadakan oleh rumah perlindungan anak. Menurut Depsos RI, rumah perlindungan anak hanya sebagai perantara dengan pihak yang akan membantu mereka sebagai proses informal yang memberikan mereka suasana pusat realisasi dan sosialisasi anak jalanan terhadap sistem dan norma masyarakat. Secara umum tujuan dibentuknya rumah perlindungan anak adalah membantu anak jalanan menghadapi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Peran dan fungsi rumah perlindungan anak bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah perlindungan anak antara lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah perlindungan anak berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain.

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial. Anak jalanan seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan

eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara anak jalanan dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi permasalahan.

Fokus utama (core business) pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial (social protection). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.

Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan right-based initiatives; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka. Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan.

Menurut SDC (Social Development Centre) Departemen Sosial RI, secara garis besar, alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 jenis model, yaitu:

1. Street-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di "jalan" dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. Family-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. Institutional-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara yang menyediakan fasilitas "panti dan asrama adaptasi" bagi anak jalanan.
4. Community-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan).

Adapun Rumah perlindungan anak didirikan mempunyai beberapa fungsi:

1. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, mengkaji kebutuhan, dan melakukan kegiatan
2. Tempat untuk mengkaji kebutuhan dan masalah anak serta menyediakan rujukan untuk pelayanan lanjutan.
3. Perantara antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
4. Perlindungan bagi anak dari kekerasan/penyalahgunaan seks, ekonomi, dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan.
5. Pusat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus ketrampilan, dll
6. Mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak dimana para pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan anak jalanan dan menumbuhkan keberfungsisosialan anak. Cara-cara penanganan profesional dilakukan antara lain menggunakan konselor yang sesuai dengan masalahnya.
7. Jalur masuk kepada berbagai pelayanan sosial dimana pekerja sosial membantu anak mencapai pelayanan tersebut.
8. Pengenalan nilai dan norma sosial pada anak. Lokasi Rumah Perlindungan Anak berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat sebagai upaya mengenalkan kembali norma, situasi, dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab, dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan ini.

Memberdayakan anak jalanan bukan merupakan persoalan yang mudah, karena kenyataannya sangat sulit mengentaskan anak jalanan dari jalan dan tidak kembali ke jalan lagi. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang lebih komprehensif dari apa yang telah dilakukan selama ini. Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam rumah perlindungan anak juga harus berorientasi untuk mengubah mindset/pola pikir anak jalanan. Tidak ada artinya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan bantuan permodalan ekonomi diberikan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan mengubah pandangan dan pola pikir anak jalanan. Realitas selama ini menunjukkan bahwa setelah diberikan pendidikan, pelatihan ketrampilan di rumah perlindungan anak ternyata banyak anak jalanan yang kemudian terjun lagi di jalanan. Bantuan modal usaha untuk keluarga tidak mampu acapkali tidak dapat mengubah sikap mental dan ketergantungan mereka pada bantuan. Hal ini disebabkan karena persoalan mentalitas tadi yang selama ini belum digarap secara optimal. Keberhasilan pembinaan terhadap anak jalanan juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah mindset anak jalanan dari yang negatif menjadi positif yaitu dari anak jalanan yang merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tak pantas bercita-cita dan merasa bebas tak punya tanggungan menjadi anak yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya mempunyai masa depan dan merasa dirinya mempunyai tanggungan yang harus ditunaikan. Jika persoalan mentalitas ini juga bisa digarap, maka model-model represif penanganan anak

jalanannya seperti penggarukan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat di minimalisir.

PENUTUP

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh keluarga dan bangsa untuk memajukan negeri ini di masa depan. Hak-hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap anak di Indonesia, nyatanya tidak semua anak beruntung untuk menikmatinya. Anak jalanan merupakan salah satu yang tidak merasakan keberuntungan seperti anak-anak yang lain. Mereka harus menghabiskan hari-hari mereka di jalan untuk mencari uang membantu ekonomi keluarga, atau mereka bahkan sudah tidak memiliki orang tua dan rumah untuk pulang. Kebutuhan dasar mereka pun tidak bisa terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Dalam rangka untuk menciptakan Indonesia yang bebas anak jalanan, dibutuhkan peran penting seluruh elemen atau pihak terkait dalam menangani masalah ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi terkait pun harus bahu-membahu untuk menangani masalah ini. Salah satu organisasi atau lembaga pelayanan yang memberikan kebutuhan dasar anak adalah rumah perlindungan anak. Rumah perlindungan anak adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, Rumah perlindungan anak merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rumah perlindungan anak adalah merupakan tahap awal seorang anak untuk memperoleh pelayanan.

Di rumah perlindungan anak ini, anak-anak jalanan bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan untuk mereka yang tidak memiliki rumah untuk pulang. Program-program yang dikembangkan dalam rumah perlindungan anak juga tidak hanya pada pendidikan formal, namun ada pendidikan lain yang diajarkan seperti keterampilan-keterampilan pendukung untuk bekal anak-anak jalanan ini ketika mencari pekerjaan. Kemudian di rumah perlindungan anak pula mereka disosialisasikan dan diajarkan mengenai nilai dan norma yang ada pada masyarakat dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan tidak dipandang sebagai suatu masalah sosial. Mereka diajarkan nilai dan norma masyarakat agar mereka bisa beradaptasi dan menaati nilai dan norma yang ada pada masyarakat.

Peran dan fungsi rumah perlindungan anak bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Di dalam rumah perlindungan anak anak-anak jalanan mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan serta nilai-nilai yang ditanamkan pada diri mereka, agar ketika mereka sudah keluar dari rumah perlindungan anak tersebut mereka menjadi orang yang lebih berguna dan berkemampuan. Kemampuan dan keterampilan mereka yang didapatkan di rumah perlindungan anak ini dapat menjadi “nilai jual” mereka ketika mereka nanti mencari pekerjaan. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar pemberdayaan anak jalanan melalui rumah perlindungan anak ini menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi anak-anak jalanan.

Daftar Pustaka

- Apri Nugroho, Fedri. Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta). Jurnal Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Januari 2014.
- Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hasanah, Anisatun. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Terminal Klaten. Jurnal Skripsi. Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Febuari 2007
- Kushartati, Sri. Pemberdayaan Anak Jalanan. Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Jurnal Vol.1 No. 2 Agustus 2004: 45-54.
- Puji Purwati, Era. Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Rumah perlindungan anak. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Vol 10 Tahun 2012.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Suyatna, Hempri. Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah perlindungan anak. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (41-54) ISSN 1410-4946.
- Saripudin, Didin. The Street Children Development in Open House. Faculty of Social Studies Education, Indonesia University of Education. Journal of Social Sciences 8 (2): 267-273, 2012.

PENGARUH PEMENUHAN KESEHATAN ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK

Oleh:

Dienna Karimah, Dra. Nunung Nurwati, & Gigin Ginanjar Kamil Basar

Email:

diennaka@gmail.com; nngnurwati@yahoo.com; gigingk@yahoo.com

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Awal kokoh atau rapuhnya suatu negara dapat dilihat dari kualitas para generasi penerusnya. Jika terlahir anak-anak dengan tingkat kesehatan yang rendah, kondisi bangsa bisa menjadi lemah dan tidak mampu membangun negaranya secara optimal. Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu 237,6 juta jiwa. Penduduk dengan jumlah banyak dan berkualitas akan menjadi modal pembangunan. Namun, ternyata dari sekian banyaknya jumlah penduduk Indonesia, terdapat hal yang menjadi masalah, yaitu kematian anak. Angka kematian anak menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Mengurangi angka kematian harus diimbangi dengan akses kesehatan yang baik. Fenomena kesehatan anak di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena anak yang masih dalam masa perkembangan dan butuh perhatian lebih dari orangtua maupun pengasuhnya. Jika kesehatan anak terganggu maka perkembangannya juga bisa menjadi terhambat. Oleh karena itu, kebutuhan dasar anak harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya agar kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi dengan baik sehingga kesehatannya menjadi terjaga dan juga perkembangannya menjadi tidak terganggu. Dengan adanya fenomena ini, pekerja sosial yang kompeten di bidangnya, yang dalam hal ini adalah pekerja sosial medis, bisa berperan sebagai motivator, edukator, dan juga mediator. Dalam menjalankan perannya tersebut, pekerja sosial medis tidak bekerja sendiri namun, bekerja sama dengan anak yang mengalami gangguan kesehatan itu sendiri, keluarga, orang terdekat anak tersebut, serta bersama dengan tim medis lainnya.

Kata Kunci: Anak, Kesehatan Anak, Kebutuhan Dasar, Perkembangan Anak.

Pendahuluan

Anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. ³ Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum.

³ WJS.Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.31 WIB

Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.⁴

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵ Sedangkan menurut UU tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Sedangkan menurut WHO, batasan usia anak antara 0-19 tahun.

Kebutuhan Dasar Anak

Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam konvensi hak-hak anak:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut prinsip dasar hak anak yang ke-3, anak mempunyai hak untuk bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh berarti bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel serta jaringan di antara sel-sel. Indikator untuk mengetahui adanya pertumbuhan adalah: adanya penambahan tinggi badan, berat badan dan lingkar kepala. Berkembang adalah bertambahnya struktur, fungsi dan kemampuan anak yang lebih kompleks, meliputi kemampuan:⁷

1. Sensorik (kemampuan melihat, mendengar, meraba, mencium, merasa)
2. Motorik (terdiri dari gerak kasar, halus, dan kompleks)
3. Berkomunikasi dan berinteraksi (tersenyum, menangis, bicara dll)
4. Kognitif (kemampuan mengenali, membandingkan, mengingat, memecahkan masalah, dan kecerdasan)
5. Bersosialisasi, kemandirian
6. Kreativitas
7. Moral dan Spiritual (nilai-nilai adat budaya serta agama)

Menurut pakar tumbuh kembang, ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak bisa tumbuh optimal pada masa-masa paling menentukan ini.

⁴ Pasal 47, UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.31 WIB

⁵ Pasal 1 (2), UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.31 WIB

⁶ UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ <http://www.gizikia.depkes.go.id/kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal/?print=pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 11.45 WIB

1. Kebutuhan kesehatan dan gizi yang baik, antara lain dengan pemberian nutrisi seimbang. Dimulai dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan, lalu dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan periode tumbuh kembang hingga pemberian zat penting bagi tubuh (protein, karbohidrat, sayur-sayuran dll).
2. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kasih sayang. Sejak dalam kandungan hingga usia 2-3 tahun, kasih sayang orangtua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak.
Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta rasa aman dan nyaman. Kasih sayang tidak hanya berupa materi saja, tetapi belaian, suara lembut dan perhatian yang diberikan orang tua kepada anak. Jika anak melakukan kesalahan, hendaklah jangan dimarahi namun ditegur dan beritahu apa yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya, berikan pujian setiap kali anak berhasil melakukan kegiatan rangsangan.
3. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah stimulasi. Kreativitas dan kecerdasan yang bagus hanya bisa diperoleh anak-anak dengan adanya stimulasi dari orang-orang di lingkungan sekitar, sehingga orangtua berkewajiban membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Melakukan stimulasi yang memadai artinya merangsang otak anak sehingga perkembangan kemampuan gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi aktif, komunikasi pasif, kecerdasan, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial (7 aspek perkembangan) pada anak berlangsung secara optimal sesuai tahapan usia anak.⁸

Kesehatan Anak

Menurut UU tentang kesehatan no. 39 tahun 2009, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Selama lebih dari tiga dasa warsa, Indonesia berhasil mengurangi angka kematian balita secara signifikan. Pada 1960, angka kematian balita mencapai 210 kematian per 1.000 kelahiran. Pada 1991 angka itu turun menjadi 97 kematian dari 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi juga turun dari 128 tiap 1.000 kelahiran pada 1960 menjadi 35 dari 1.000 kelahiran pada 2002. Namun, angka kematian anak tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Mengurangi angka kematian jelas memerlukan akses kesehatan yang baik, kualitas perawatan kelahiran dan manajemen penyakit masa kanak-kanak yang baik. Disamping itu perlu didukung kesehatan lingkungan yang baik. Misalnya dengan penyediaan air dan sanitasi yang bersih, pengawasan penyakit menular, nutrisi ibu yang baik. ⁹

⁸ <http://jambi.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=760&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.58 WIB

⁹ <http://www.unicef.org/indonesia/id/children.html>

Kemudian menurut pendiri lembaga riset perempuan *Women Research Institute* (WRI), Edriana Noerdin, berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2012, jumlah angka kematian ibu dan anak tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab kematian anak, diantaranya adalah persebaran tenaga kesehatan yang kurang merata, masalah biaya, dan juga infrastruktur yang masih harus diperbaiki. Seperti contohnya di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, jika seseorang ingin pergi ke puskesmas mereka harus menumpang satu truk yang lewat satu kali sehari. Truk itu setiap hari harus mengangkut sayur dan babi. Entah apa jadinya jika truk tersebut tidak ada, masyarakat harus berjalan jauh dan mungkin akan batal ke puskesmas. Begitu juga di Lombok, ada satu kampung yang hanya memiliki satu bidan. Dan bidan tersebut juga harus juga menjadi bidan di kampung tetangga yang jaraknya cukup jauh. Walaupun dia naik motor tapi daerahnya bisa dibilang terjal (off road) sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk ia bisa mencapai ke kampung tetangga tersebut.¹⁰

Kemudian pengertian sehat menurut *World Health Organization* diartikan suatu keadaan sejahtera (sempurna) fisik, mental, dan sosial, tidak terbatas pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja (WHO, 1946). Jadi tidak hanya sehat secara fisik atau kemampuan fungsional (tidak adanya penyakit), tetapi juga secara mental dan sosial. Konsep biopsikososial memungkinkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang munculnya suatu kondisi sakit yang dihubungkan dengan faktor lingkungan dan stres yang terkait di dalamnya. Kondisi lingkungan dalam hal ini dukungan sosial menurut konsep biopsikososial dapat memberikan perubahan pada kondisi sakit. Salah satu contoh yang mungkin bisa dilihat sebagai hubungan yang sangat pas pada penerapan konsep ini adalah dalam ilmu kedokteran jiwa. Kondisi kesehatan jiwa seseorang dapat dilihat sebagai suatu keadaan yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial individu itu. Secara biologis, gangguan pada kondisi kesehatan jiwa seseorang disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem saraf di otak yang melibatkan hormon dan neurotransmitter di otak. Secara psikologis, gangguan kondisi kesehatan jiwa diakibatkan karena proses mekanisme adaptasi yang terkait dengan kepribadian dan karakter individu tidak bekerja dengan baik. Secara sosial, kondisi gangguan kesehatan jiwa dapat dipicu oleh lingkungan yang tidak nyaman, penuh dengan tekanan dan ketakutan.¹¹

Menurut model biopsikososial, kesehatan dan penyakit disebabkan oleh berbagai macam faktor serta dapat menimbulkan efek yang berbagai macam pula.

¹⁰ <http://health.liputan6.com/read/781358/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tinggi-apa-sebabnya>

¹¹ <http://sitossi.wordpress.com/2012/01/15/stay-healthy/> diakses pada tanggal 1 Oktober pukul

Selain itu, pikiran (non fisik) dan tubuh (fisik) tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi terutama dalam aspek kesehatan dan penyakit. Berdasarkan sudut pandang ini, kesehatan dapat dicapai dengan memberikan perhatian pada kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial. Kesehatan tidak semata-mata pemberian belaka (WHO, 1948). 12.

Pembentukan kebiasaan yang sehat di masa kanak-kanak, seperti memakan makanan yang rendah lemak dan kolesterol dan melakukan olahraga secara teratur, tidak hanya memiliki keuntungan langsung tetapi juga memberi kontribusi terhadap penundaan atau pencegahan sebab-sebab utama cacat prematur dan kematian di masa dewasa.13

Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Anak

Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu 237,6 juta jiwa. Penduduk dengan jumlah banyak dan berkualitas akan menjadi modal pembangunan. Namun, jika penduduk banyak tetapi tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan. Dengan kesadaran dan keresahan sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, maka keluarga merupakan rujukan keberhasilan dan kebahagiaan.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi tumbuhnya generasi muda yang cerdas dan berkualitas. BKKBN berusaha mengingatkan bahwa keluarga perlu meningkatkan ketahanannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang baik dari dalam ataupun luar.

Karena keluarga merupakan wahana/media utama dan pertama dalam pendidikan dan penyemaian nilai-nilai luhur bangsa kepada anak-anak. Keluarga mempunyai delapan fungsi, yaitu fungsi agama, kasih sayang, reproduksi, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan. Harapannya jika fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, akan terbentuk keluarga yang berketahanan yang pada akhirnya terbentuk ketahanan nasional. Namun, dengan berbagai elaborasi konsep fungsi keluarga BKKBN, tampaknya luput fungsi keluarga dalam konteks kependudukan bagi pencapaian kesehatan fisik dan jiwa.

Level keluarga mempengaruhi kesehatan melalui tiga sumber, yaitu genetik, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Kedua faktor terakhir menjadi penting ketika anggota-anggota keluarga hidup dalam satu rumah. Lingkungan sosial mencakup hubungan fungsional seperti *caregiving*, lingkungan sosioekonomik, termasuk pendapatan dan kekayaan (yang berkaitan dengan hambatan dan kesempatan untuk hidup sehat), juga bentuk hubungan yang positif dan negatif.

¹²<http://riccabelajarpsikologi.blogspot.com/2010/08/definisi-psikologi-kesehatan.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 12.41 WIB

¹³ Santrock, John W. Perkembangan Anak edisi kesebelas Jilid 1, 2007:181

Salah satu determinan paling kuat dari keluarga adalah posisi sosioekonomik yang akan memberikan dampak terhadap beberapa situasi kehidupan. Di antaranya kualitas rumah atau tempat tinggal, kondisi lingkungan tempat tinggal, transportasi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang akan mempunyai implikasi terhadap kesehatan.

Kesehatan (termasuk jiwa) sebagai salah satu dari berbagai indikator kesuksesan program kependudukan lintas-sektoral BKKBN terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak bisa tereksklusi dari fungsi utama keluarga. Juga kontinum biopsikososial penting dijadikan landasan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan dan intervensi terkait kualitas kesehatan penduduk level individu dengan memaksimalkan peran keluarga.¹⁴

Jika keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka generasi yang tercipta pun akan baik. Keluarga atau yang dalam hal ini adalah orang tua, terutama ibu, perlu memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Kesehatan harus diperhatikan sejak anak masih dalam kandungan ibunya, seperti memonitor cakupan gizi yang baik dalam makanan si ibu agar janinnya juga sehat. Setelah proses kelahiran terjadi, juga perlu diperhatikan bagaimana cara merawat anak dengan baik agar perkembangan anak tidak terganggu. Setelah anak tersebut lahir maka ibu akan menyusui anaknya atau dengan istilah pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI tersebut adalah memberi makan kepada anak, itulah mengapa asupan nutrisi dan gizi sang ibu harus diperhatikan dengan baik. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana orang tua merawat buah hatinya. Semakin rendah tingkat pendidikan orang tuanya akan semakin rendah pula perhatiannya terhadap kesehatan anaknya. Hal tersebut dapat kita saksikan dengan keluarga yang tinggal di bantaran sungai. Biasanya mereka yang tinggal disana merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah. Lingkungan tempat tinggal mereka kumuh dan jauh dari kata layak huni. Biasanya jika hujan datang maka air sungai akan meluap dan membanjiri tempat tinggal mereka dan hal tersebut bisa menjadi pemicu timbulnya masalah kesehatan, seperti penyakit kulit dan gangguan pencernaan.

Teori Perkembangan Anak

Terdapat 6 teori perkembangan anak, yaitu:

1. Teori Psikoanalisis (Freud)

Teori ini menggambarkan perkembangan sebagai keadaan yang biasanya tidak disadari dan sangat diwarnai oleh emosi. Ahi teori psikoanalisis percaya bahwa perilaku hanyalah karakteristik permukaan dan bahwa pengalaman dini dengan orang tua membentuk perkembangan. Kontribusi dari teori psikoanalisis meliputi penekanan pada pendekatan perkembangan kepribadian.

2. Teori kognitif (Piaget)

¹⁴ <http://nasional.sindonews.com/read/656804/18/keluarga-dan-kesehatan> diakses pada tanggal 10 September 2014 pukul 08.35 WIB

Teori ini menekankan pada pikiran sadar. Piaget menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui empat tahap perkembangan kognitif. Tiap tahap berhubungan dengan usia dan terdiri dari cara berpikir yang berbeda-beda. Empat tahap tersebut adalah tahap sensorimotor, yang berlangsung mulai dari lahir hingga 2 tahun, dalam tahap ini anak membangun pemahaman mengenai dunia ini dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris (seperti melihat dan mendengar) dengan tindakan fisik dan motorik; praoperasional, yang berlangsung sekitar usia 2 hingga 7 tahun, pada tahap ini anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata, gambar, dan lukisan; tahap operasional konkret, berlangsung mulai dari sekitar 7-11 tahun, dalam tahap ini anak melakukan operasi, dan penalaran logis menggantikan pikiran intuitif selama penalaran dapat diterapkan pada contoh khusus dan konkret; tahap operasional formal, antara umur 11 – 15 tahun, pada tahap ini individu lebih melampaui pengalaman konkret dan berpikir dalam istilah yang abstrak dan lebih logis.

3. Teori Perilaku dan Sosial Kognitif

Tiga versi dari pendekatan perilaku adalah yang pertama *classical conditioning* dari Pavlov, sebuah stimulus netral memperoleh kemampuan untuk menghasilkan sebuah respon yang tadinya dihasilkan oleh stimulus lain; yang kedua operant conditioning dari Skinner, dalam pendekatan ini konsekuensi dari suatu perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas kejadian perilaku tersebut; yang ketiga adalah teori sosial kognitif dari Bandura, dalam teori ini pembelajaran melalui pengamatan merupakan aspek kunci dari perkembangan sepanjang hidup. Bandura menekankan interaksi timbal-balik antara manusia (kognisi), perilaku, dan lingkungan.

4. Teori Etologi (Lorenz)

Teori ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, dihubungkan dengan evolusi. Dan bercirikan periode kritis atau sensitif.

5. Teori Ekologi (Bronfenbrenner)

Teori ini merupakan pandangan sistem lingkungan tentang perkembangan. Teori ini menyatakan ada 5 sistem lingkungan, pertama mikrosistem, ini adalah lingkungan dimana individu tinggal meliputi keluarga, sekolah, tetangga, dan teman sebaya; kedua mesosistem, ini mencakup hubungan antar mikrosistem atau hubungan antar konteks misalnya, hubungan pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah; ketiga eksosistem, ini terlibat saat pengalaman dalam lingkungan sosial lain-dimana individu tidak punya peran aktif-mempengaruhi apa yang dialami individu dalam konteks langsung misalnya, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang wanita dengan suami dan anaknya; keempat makrosistem, mencakup budaya dimana seseorang tinggal. Budaya merupakan pola perilaku, keyakinan, dan produk lain dari sekelompok orang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya; kelima kronosistem, mencakup pembuatan pola kejadian lingkungan dan transisi

sepanjang kehidupan. Contohnya, pengaruh negatif perceraian pada anak sering kali memuncak pada tahun pertama setelah perceraian. Dua tahun setelah perceraian, interaksi keluarga tidak terlalu berantakan dan lebih stabil. 15

Peran Pekerja Sosial di Bidang Medis

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999).¹⁶

Terdapat beberapa setting pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya, salah satunya adalah di rumah sakit. Pekerja sosial yang bekerja dengan setting rumah sakit disebut sebagai pekerja sosial medis. Fokus pekerjaan sosial medis adalah faktor-faktor sosial yang dapat membantu penyembuhan klien (pasien) atau masalah-masalah sosial yang menyebabkan orang-orang menjadi sakit atau yang menghambat seseorang menggunakan perawatan yang diberikan kepadanya.

Pelayanan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial medis bertujuan membantu mengatasi tekanan-tekanan yang datang dari dalam dan luar diri pasien, baik yang berasal dari kenyataan-kenyataan yang datang dari lingkungan tempat tinggal pasien maupun yang disebabkan oleh sakit / penyakit dan perasaan pasien itu sendiri. Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk membantu orang-orang yang sakit dalam mengembangkan kemampuannya sendiri dalam menggunakan perawatan medis, tidak hanya dalam proses penyembuhannya saja, tetapi juga dalam proses pencegahan terhadap penyakit dan dalam mempertahankan serta meningkatkan cara-cara hidup yang sehat.

Peranan pekerja sosial medis di rumah sakit adalah membantu dokter dalam mendiagnosa dan proses penyembuhan / pengobatan dengan cara meneliti pasien dan kondisi sosialnya serta menganalisis tingkah laku pasien dan kondisi dalam lingkungannya. Selain itu, pekerja sosial medis pun membantu dokter dengan mengorganisir sumber-sumber yang dapat dipergunakan di dalam rumah sakit, lingkungan keluarga, dan masyarakatnya dalam proses penyembuhan, agar proses pengobatan medis dapat dilaksanakan secara efektif.¹⁷

Pekerja sosial yang konsentrasi dalam bidang kesehatan atau yang sering disebut sebagai pekerja sosial medis memiliki peranan dalam praktiknya. Pekerja sosial medis bisa menjadi mediator atau penghubung antara pasien ataupun keluarga pasien dengan sumber-sumber kesehatan yang nantinya bisa diakses olehnya. Pekerja sosial juga bisa berperan sebagai edukator, maksudnya disini adalah pekerja sosial membantu tim medis seperti dokter dalam memberikan informasi mengenai penyakit yang dialami pasien, bagaimana cara penyembuhan

¹⁵ Santrock, John W. Perkembangan Anak edisi kesebelas Jilid 1, 2007:43-56

¹⁶ Drs. Abu Huraerah, M.Si., Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Februari 2008, Humaniora

¹⁷ Wibhawa, Budhi,dkk. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial. 2010. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial. Widya Padjadjaran.

dan perawatannya agar pasien dan keluarga mengerti bagaimana kondisi kesehatan pasien agar keberfungsian sosial pasien bisa kembali baik. Pekerja sosial juga berperan sebagai motivator bagi pasien maupun keluarganya. Pekerja sosial memberikan motivasi bagaimana penyakitnya itu bisa sembuh dan walaupun penyakitnya sudah sangat akut maka pekerja sosial membantu pasien dalam menerima kondisi dirinya dan juga membantu keluarga serta orang-orang terdekat dari pasien agar bisa memberikan motivasi kepada pasien bukan malah meninggalkan pasien.¹⁸

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan fakta yang terjadi terkait kesehatan anak di Indonesia dibutuhkan solusi agar permasalahan tersebut dapat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Permasalahan tersebut diantaranya adalah angka kematian anak yang masih tinggi, persebaran tenaga kesehatan yang kurang merata dan juga infrastruktur yang masih kurang baik. Pemerintah harus memiliki perhatian terhadap masalah yang terjadi seputar kesehatan anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi tiang kokoh dalam pembangunan bangsa kedepannya.

Dari permasalahan masih tingginya angka kematian anak maka diperlukan akses kesehatan yang baik. Akses kesehatan yang baik harus didukung dengan infrastruktur yang baik pula. Diperlukan perbaikan terhadap fasilitas kesehatan dan juga akses untuk mencapai sarana kesehatan tersebut. Kualitas perawatan terhadap anak juga perlu ditingkatkan. Disamping itu perlu didukung kesehatan lingkungan yang baik, misalnya dengan penyediaan air dan sanitasi yang bersih, pengawasan terhadap penyakit menular, serta menjaga agar nutrisi yang dikonsumsi ibu adalah makanan yang bergizi. Persebaran tenaga kesehatan atau medis di pedesaan juga perlu diperhatikan agar masyarakat yang tinggal di pedalaman pedesaan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika mereka membutuhkan. Terkadang karena masalah akses yang sulit dijangkau menjadikan masyarakat mengurungkan niat untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Beeder, Joan. 2006. *Hospital Social Work: The Interface of Medicine and Caring*. United States of America: Routledge
- Santrock, John W. 2007. *Perkembangan Anak* edisi kesebelas Jilid 1, Edisi Kesebelas. Penerbit Erlangga.
- Wibhawa, Budhi,dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran.

Sumber Artikel, Jurnal dan Penelitian :

¹⁸ Beeder, Joan. *Hospital Social Work: The Interface of Medicine and Caring*. 2006

<http://health.liputan6.com/read/781358/angka-kematian-bayi-di-Indonesia-masih-tinggi-apa-sebabnya> diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 19.21 WIB

<http://jambi.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=760&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.58 WIB

<http://nasional.sindonews.com/read/656804/18/keluarga-dan-kesehatan> diakses pada tanggal 10 September 2014 pukul 08.35 WIB

<http://riccabelajarpsikologi.blogspot.com/2010/08/definisi-psikologi-kesehatan.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 12.41 WIB

<http://sitossi.wordpress.com/2012/01/15/stay-healthy/> diakses pada tanggal 1 Oktober pukul 12.14 WIB

<http://www.gizikia.depkes.go.id/kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal/?print=pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 11.45 WIB

<http://www.unicef.org/Indonesia/id/children.html> diakses pada tanggal 3 Oktober pukul 09.22 WIB

WJS.Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.31 WIB

Sumber lainnya :

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 Tentang Perkawinan

UU No. 4 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 Tentang Kesejahteraan Anak

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PENERAPAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEKERJA SOSIAL OLEH RELAWAN DALAM PENDAMPINGAN KEPADA ANAK PENDERITA KANKER

Oleh:

Pradini Nur'amalia Arliani, Sri Sulastri, dan Budi M. Taftazani,

Email:

pradini.dindun@gmail.com; ati.sulastri@yahoo.com; buditaftazani@yahoo.com

ABSTRAK

Kanker dapat menyerang bagian manapun dari anggota tubuh manusia dan tidak memandang usia manusia. Kanker bisa juga terjadi pada anak-anak. Bagi penderita kanker, menanggulangi penyakit kanker dan prosedur pengobatannya bukanlah hal yang mudah. Hal ini tentu juga sangat dirasakan oleh anak penderita kanker. Selain itu, jika salah satu anggota keluarga terkena kanker, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Penanganan anak penderita kanker tidak hanya tergantung pada tim medis tetapi juga dilihat dari penyelesaian masalah yang mencakup psikologis dan sosialnya. Salah satu unsur dapat membantu memberikan pengobatan non-medis kepada pasien adalah relawan. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami peranan relawan yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pendampingan kepada anak penderita kanker dan keluarga.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin melihat peran relawan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan kepada anak penderita kanker. Kemudian metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan nyata subyek yang akan diteliti yaitu pelayanan yang diberikan oleh Pekerja Sosial Medis dan relawan di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Kanker Dharmais. Dari hasil temuan yang ada di lapangan dapat dilihat bahwa bentuk peran yang dijalankan relawan dalam memberikan pendampingan bagi anak penderita kanker dan keluarganya tampak seperti bentuk peran Pekerja Sosial Medis (PSM). Maka penting melibatkan PSM agar pelayanan pengobatan yang terpadu dapat diberikan kepada pasien dan keluarganya, dari yang memiliki penyakit kronis apapun dan dalam seluruh kelompok usia, karena seorang PSM mempunyai bekal pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai (*value*) sebagai bentuk kesatuan dari *the helping profession*.

Kata kunci: relawan, pekerja sosial, anak penderita kanker, pengetahuan, keterampilan.

PENDAHULUAN

Kanker dapat menyerang bagian manapun dari anggota tubuh manusia. Selain itu, kemampuan untuk terkena penyakit kanker tidak memandang usia. Kanker bisa juga terjadi pada anak-anak. Antara 2-3% dari jumlah kasus kanker di Indonesia terjadi pada anak-anak, yakni sekitar 150 dari 1 juta orang anak. Diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 4.100 kasus baru kanker anak di Indonesia.¹⁹

Seorang anak penderita kanker harus menghadapi suatu kenyataan yang sulit, yaitu bahwa anak tersebut harus melawan penyakitnya seorang diri dan harus menghadapi prosedur pengobatan, di mana orang dewasa saja belum tentu dapat menghadapinya. Penyakit kanker dan pengobatannya juga dapat mempengaruhi perkembangan anak penderita kanker. Lamanya pengobatan kanker yang menyebabkan seorang anak harus melewati banyak waktu di rumah sakit dan efek samping dari obat-obatan kanker itu sendiri, dapat memberikan tekanan pada anak tersebut. Oleh karena itu, untuk tetap dapat menjalankan pengobatan maka anak penderita kanker tidak hanya dapat tergantung pada tim medis saja, sebab penanganannya bagi penderita kanker tidak hanya dilihat dari segi medis tetapi juga dari segi permasalahan pasien, seperti psikologis dan sosialnya.

Anggota keluarga merupakan bagian yang sangat besar pengaruhnya bagi kesembuhan penderita kanker, baik dari segi fisik maupun pengaruhnya bagi segi psikis. Akan tetapi, jika salah satu anggota keluarganya terkena penyakit kronis seperti kanker, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh keluarga. Hal tersebut tentu juga terjadi pada orangtua yang anaknya divonis menderita kanker.²⁰

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, diperlukan pihak lain di luar keluarga, seperti teman, warga di sekitar rumah, dan yang lainnya. Selain itu, bentuk dukungan dari masyarakat terhadap penderita kanker ditunjukkan dengan menjadi tenaga sukarelawan (atau yang biasa disebut sebagai relawan) untuk memberikan pendampingan. Di berbagai negara maju, relawan dalam bidang kesehatan sudah menjadi satu kesatuan dari upaya penanganan primer di tingkat masyarakat. Peran relawan dalam bidang kesehatan menjadi salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Relawan sebenarnya merupakan cikal bakal dari disiplin pekerjaan sosial. Karena dari perkumpulan para relawan inilah mereka merasakan perlunya ada pelatihan atau pendidikan yang lebih profesional dan berkembang menjadi disiplin pekerjaan sosial. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peran relawan sangatlah besar dalam perkembangan disiplin pekerjaan sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

¹⁹ www.yoai.org

²⁰ Eviata, Dimas, dan Rurit. 21 Januari 2002. Awak Kanker Anak
<http://www.korantempo.com/news/2002/1/gaya%20Hidup/20.html>.

Kegiatan kerelawanan memainkan peranan penting dalam suatu masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Karena ini berarti bahwa masyarakat mengambil peran aktif dalam peningkatan kualitas hidup mereka sendiri dan bagi orang lain melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh organisasi sosial.

Di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Kanker Dharmais terdapat kegiatan kerelawanan yang sudah berjalan tiga tahun. Para relawan tersebut tergabung dalam dalam suatu wadah bernama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia (YPKAI), atau lebih dikenal masyarakat dengan *Community for Children with Cancer* (C3). Yayasan ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah kanker pada anak di Indonesia. Para relawan yang bergabung tidak hanya berasal dari mereka yang berlatar belakang pendidikan medis saja, namun juga yang berlatar belakang bervariasi seperti pelajar SMP dan SMA.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Penelitian harus memiliki karakteristik antara lain: objektif, akurat, dapat menjelaskan, dan dibuktikan sesuai dengan kenyataan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena saya sebagai peneliti ingin melihat peran relawan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial dalam pendampingan kepada anak penderita kanker. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan nyata subyek yang akan diteliti yaitu pelayanan yang diberikan oleh Pekerja Sosial Medis dan relawan di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nawawi, 1998:63 yang menyatakan metode deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Digunakannya metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana Pekerja Sosial Medis memberikan pelayanan dibantu dengan relawan kepada pasien anak penderita kanker pada tahap intervensi atau pelaksanaan dengan melihat bimbingan yang diberikan antara lain: pelayanan edukasi, pelayanan advokasi, pelayanan dukungan keluarga, pelayanan rujukan, pemenuhan kebutuhan mental, dan pemenuhan kebutuhan sosial.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Informan

Dari penelitian yang telah saya lakukan, relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dan yang lainnya) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan

pamrih baik berupa imbalan upah, kedudukan, kekuasaan, ataupun kepentingan apapun. Sedangkan dalam bidang sosial, relawan didefinisikan sebagai mereka yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan lulusan atau tidak mendapat pendidikan khusus dari sekolah pekerjaan sosial ataupun Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Terdapat 4 jenis relawan yang terkait dengan peran relawan, yaitu:

1. *policy making volunteers*: relawan yang membuat kebijakan bekerja pada gugus tugas, panel peninjau, komisi, dan dewan.
2. *administrative volunteers*: relawan administrasi yang memberi dukungan perkantoran melalui aktivitas seperti pengolahan kata dan data, mengkoordinasi jadwal, dan mengurus surat menyurat.
3. *advocacy volunteers*: relawan advokasi yang memberikan dukungan melalui upaya pencarian dana, menulis surat dan menghubungi anggota perwakilan rakyat, memberi kesaksian pada saat sidang publik, mengorganisir dukungan komunitas.
4. *direct service volunteers*: relawan pelayanan langsung yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti konseling, rekreasi, dan pengajaran. Kecenderungannya sekarang adalah mengaitkan klien, terutama yang melatih relawan sebagai bagian dari rencana intervensi keseluruhan.

Program Pendampingan

Relawan dan Pekerja Sosial Medis bersama-sama mendampingi anak penderita kanker dalam menjalankan beberapa program di Rumah Sakit Kanker Dharmais:

1. Terapi bermain yaitu dalam keadaan bermain di mana anak dalam keadaan bebas tetapi dapat menggali informasi memberi saran dan mengobservasi emosi problem sosial dan kognitif.
2. Seni terapi yaitu terapi psikoterapi yang menggunakan setting seni di mana terapis melakukan pemeriksaan psikologi.
3. Komputer Terapi yaitu terapi berdasarkan teori psikologi kognitif dimana menggunakan komputer dalam merangsang kognitif pada anak dengan memadukan teori Piaget.
4. Ruang bermain yaitu memfasilitasi ruangan untuk bermain yang disesuaikan dengan keadaan anak juga keamanan ruangan.
5. *School in Hospital* yaitu pendampingan belajar untuk usia anak sekolah di Rumah Sakit didasarkan pada teori perkembangan anak.
6. *Bed site art therapy* yaitu memberi kegiatan atau kesenian di tempat tidur yang diperuntukkan pasien yang tidak dapat turun atau keluar kamar.

Jika dilihat lebih lanjut, peran relawan yang dijabarkan di atas tampak seperti peran yang dijalankan oleh pekerja sosial. Fungsi dasar pekerjaan sosial yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial adalah melaksanakan peranan sosial serta proses-prosesnya yang bertujuan memperbaiki dan mengembangkan

kepribadian dan sistem sosial dengan kebutuhan-kebutuhan sistemnya yang terdiri dari habilitasi, rehabilitasi, penyediaan sumber, dan pencegahan terhadap disfungsi sosial.

PEMBAHASAN

Pekerja sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan tugas dan fungsi sosialnya. Ciri dari adanya bidang keahlian ini adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Body of knowledge, kerangka pengetahuan pekerjaan sosial yaitu suatu kerangka pengetahuan yang berisi, berasal dari, atau diramu dari konsep ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial. Materi-materi pengetahuan yang diramu tersebut dibentuk atau dikonsentrasikan secara eklektik dan dikembangkan melalui penelitian dan praktek sehingga benar-benar memiliki keunikan. Oleh sebab itu pengetahuan ilmiah pekerjaan sosial memiliki ciri-ciri, *pluralistik-eclectic* dan *applied*.

Penanganan pasien anak penderita kanker memerlukan pendekatan yang berbeda pada penanganan terhadap orang dewasa. Unsur tumbuh kembang harus menjadi perhatian utama dalam menangani pasien anak. Jika dilihat secara menyeluruh, maka masalah yang dihadapi oleh anak penderita kanker dan keluarganya meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual.

Sehubungan dengan ke-4 jenis relawan yang terkait dengan peran relawan yang dikemukakan oleh Mitchell maka relawan yang berada di Bangsal Kanker Anak - Rumah Sakit Kanker Dharmais termasuk pada jenis:

- a. *advocacy volunteers* (relawan advokasi)
advokasi yang diberikan relawan di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Kanker Dharmais dalam bentuk :
 - Upaya pencarian dana
Relawan membantu mencari donatur untuk membantu biaya pengobatan pasien, terutama bagi pasien yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Relawan juga membantu memberikan informasi mengenai prosedur pengurusan asuransi atau jaminan kesehatan. Selain itu, relawan juga membantu mencari donatur yang ingin menyumbangkan barang-barang untuk keperluan belajar, bermain, dan berkreasi pasien selama menjalani pengobatan di rumah sakit. Relawan juga membantu mencari pendonor darah bagi pasien yang membutuhkan darah. Relawan melakukan kampanye ke sekolah-sekolah mengenai penyakit kanker, agar masyarakat mengetahui dan dapat berupaya dalam pencegahan penyakit kanker.
 - Mengorganisir dukungan komunitas
Relawan mengorganisir dukungan komunitas melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain yang ingin membuat kegiatan di rumah sakit. Kegiatan-

kegiatan tersebut selain dapat memberikan hiburan kepada pasien, dapat pula memberikan hiburan kepada keluarga pasien.

- Bekerja di bidang hubungan masyarakat
Relawan membantu tim medis untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker, terutama kanker pada anak. Kegiatan penyebaran informasi ini biasanya dilakukan dengan cara penyuluhan yang dilakukan di puskesmas, posyandu, sekolah-sekolah, atau lingkungan sekitar pasien.

b. *Direct Service Volunteers* (Relawan Pelayanan Langsung)

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh relawan antara lain:

- **Konseling**
konseling biasanya dilakukan oleh relawan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Konseling dilakukan ketika pasien dan keluarganya sedang mengalami permasalahan terkait dengan prosedur pengobatan atau ketika pasien sudah memasuki tahap terminal.
- **Rekreasi**
rekreasi dilakukan melalui kegiatan bermain dan berekreasi, serta acara hiburan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Tujuan utama dari diadakannya rekreasi ini adalah untuk mengusir rasa jenuh pasien dan keluarga saat menjalani pengobatan di rumah sakit.
- **Pengajaran**
relawan membantu pasien dengan menjadi pengajar dalam kegiatan belajar mengajar ketika pasien sedang menjalani rawat inpa di rumah sakit. Tujuannya agar pasien dapat tetap mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, walaupun pasien pada kenyataannya berada di rumah sakit.
- **Pendampingan medis**
yang dilakukan relawan dalam pendampingan medis adalah membantu persiapan ketika akan melakukan tindakan-tindakan prosedur pengobatan dengan memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari tiap tindakan yang akan dijalani oleh pasien.

Kemudian, berikut ini akan dijabarkan beberapa peran-peran yang dijalankan oleh relawan dengan mempergunakan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial:

1. **Konsultan**
seperti yang sudah diungkapkan pada konseling di relawan pelayanan langsung, peran relawan sebagai konsultan lebih banyak dijalankan oleh relawan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang psikologi.
2. **Peneliti**
peran sebagai peneliti dijalankan oleh relawan dengan melakukan penelitian terkait dengan keadaan psikologis serta sosial antara pasien dan keluarganya.
3. **Pembimbing**
pemberian informasi untuk pasien dan keluarganya oleh relawan merupakan salah satu bentuk peran pembimbing yang dijalankan. Pemberian informasi

tersebut meliputi informasi mengenai keberadaan relawan di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Kanker Dharmais atau mengenai kanker itu sendiri.

4. Penghubung

peran penghubung dijalankan oleh relawan dengan menjadi penghubung antara pasien dan keluarga serta tim medis di rumah sakit. Tujuannya adalah agar relawan dapat membantu hal-hal yang sulit disampaikan oleh pihak keluarga kepada pihak rumah sakit, seperti misalnya terkait pembiayaan di rumah sakit.

Akan tetapi, selain menjalankan peran PSM secara menyeluruh, relawan juga menjalankan beberapa peran pekerja sosial seperti yang diungkapkan oleh Zastrow, yaitu:

1. *Empowerer* (pemberdayaan)

relawan menjalankan peran sebagai empowerer dengan membuat kegiatan untuk orangtua pasien selama mendampingi anak mereka di rumah sakit. Hasil dari kerajinan tangan yang dibuat nantinya akan dijual. Setelah itu, sebagian dari hasil penjualan akan diberikan kepada orangtua pasien.

2. *Group Facilitator* (fasilitator kelompok)

Peran fasilitator yang dijalankan relawan di sini bukan menjadi fasilitator dalam kelompok, tetapi lebih mengarahkan kepada memfasilitasi kebutuhan pasien dan keluarga selama menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti salah satunya, fasilitas Rumah Singgah Anak (RSA) untuk pasien dan keluarga yang berasal dari luar kota Jakarta. Tujuannya adalah pasien dan keluarga dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan lebih bisa menjaga kondisi kesehatan pasien dibandingkan dengan harus pulang pergi ke daerah asal.

Menurut Zastrow,²¹ dalam bekerja dengan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas, seorang pekerja sosial diharapkan mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam memenuhi perannya yang bermacam-macam, di mana sekurang-kurangnya ada 13 peran yang dapat dikembangkan oleh pekerja sosial, yaitu enabler (pemercepat perubahan), broker (perantara), advocate (advokat), empowerer (pemberdaya), activist (aktifis), mediator (penengah), negotiator (perunding), educator (pendidik), initiator (pemrakarsa), coordinator (koordinator), researcher (peneliti), group fasilitator (fasilitator kelompok), dan public speaker (pembicara).

Fink dalam Adi mengajukan beberapa bidang pekerjaan sosial yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial, di mana salah satunya adalah bidang yang terkait dengan pelayanan di bidang perawatan kesehatan. Pekerja sosial dalam setting ini biasa disebut sebagai Pekerja Sosial Medis (PSM). Meskipun keterlibatan utama PSM adalah dalam pelayanan langsung kepada pasien dan

²¹ repository.uinjkt.ac.id

keluarganya, namun ada beberapa kegiatan pelayanan yang tidak langsung dilakukan oleh PSM, antara lain melakukan perencanaan kegiatan, mengatur jalannya program penelitian. Namun PSM bertanggung jawab penuh pada relawan yang akan mengikuti program.

Pendampingan yang dilakukan baik oleh pekerja sosial maupun relawan hampir sama. Yang menjadi perbedaan adalah peran untuk melakukan konseling dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Zastrow di mana diungkapkan bahwa kemampuan untuk melakukan konseling terhadap klien secara efektif mungkin adalah keahlian dasar yang paling dibutuhkan oleh pekerja sosial. Hal penting kedua yang dibutuhkan oleh pekerja sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan kelompok-kelompok dan profesi-profesi lain. Jadi peran pekerja sosial dan relawan dibedakan dari latar belakang pendidikan dan pelatihan mereka dalam mendapatkan bekal ketika mereka akan ataupun sedang menggeluti bidang pekerjaan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jika dikaitkan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial, relawan sebenarnya merupakan cikal bakal disiplin pekerjaan sosial. Perkumpulan relawan merasakan perlunya ada pelatihan ataupun pendidikan yang lebih profesional, untuk akhirnya memungkinkan untuk berkembang menjadi disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Terkait dengan perannya, maka relawan yang berada di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Dharmais termasuk pada jenis *advocacy volunteers* dan *direct service volunteers*. Sedangkan jika dikaitkan dengan peran pekerja sosial medis (PSM), maka relawan di Bangsal Kanker Anak – Rumah Sakit Dharmais menjalankan peran yang terdiri dari konsultan, peneliti, pembimbing, dan penghubung.

Dalam program-program pendampingan yang dilakukan oleh relawan dan Pekerja Sosial Medis, mayoritas berorientasi kepada kegiatan diskusi dan bermain bagi anak penderita kanker. Dalam kaitannya dengan teori, Pekerja Sosial Medis memberi bantuan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah emosional dan sosial pasien., yang timbul sebagai akibat penyakit yang dideritanya dan membantu proses penyesuaian diri pasien dengan masyarakat dan sebaliknya.

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan bagi anak penderita kanker yang melibatkan relawan dan pekerja sosial medis yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai tatacara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses pelaksanaan program bagi relawan, khususnya bagi program berkelanjutan. Sehingga tatacara tersebut tidak hanya berupa sesuatu yang diketahui secara verbal.
2. Perlu adanya tambahan waktu pembekalan bagi relawan dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial. Hal ini dikarenakan anak-anak penderita kanker membutuhkan perhatian yang intensif dari para relawan, sehingga diharapkan relawan

benar-benar memahami pengetahuan dan menerapkan keterampilan pekerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wibhawa, Budhi. Santoso T. Raharjo. Meilany Budiarti. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Beder, Joan. 2006. *Hospital Social Work: The Interface of Medicine and Caring*. New York: Taylor and Francis Group.
- Gehlert, Sarah. Teri Arthur Browne. 2006. *Handbook of Health Social Work*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Hardcastle, David. Patricia R Powers. 2004. *Community Practice Theories and Skills for Social Work*. New York: Oxford University Press, Inc.

Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel

- Utomo, Hendro Spto. 2012. Skripsi Sarjana, Pelaksanaan Program Cancer Camp bagi Anak Penderita Kanker oleh Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD. Jatinangor.

Sumber Elektronik

- Eviata, Dimas, dan Rurit. 21 Januari 2002. Awas Kanker Anak
<http://www.korantempo.com/news/2002/1/gaya%20hidup/20.html>.

www.dharmais.co.id

www.yoai.org

PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL

Oleh:

Melisa Amalia Amin, Hetty Krisnani, dan Maulana Irfan

Email:

aminmelisa@gmail.com; hettykrisnany@yahoo.com; sangirfan@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas pelayanan sosial bagi anak jalanan yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Sosial. Bagi lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak jalanan melalui rumah singgah, maka pelayanan yang diberikan menurut perspektif pekerjaan sosial dapat menggunakan model pelayanan *Half-Way House Services*. Adapun model pelaksanaan pelayanan menurut strategi ini dapat menggunakan teori proses pekerjaan sosial yang terdiri atas *Engagement, Intake & Contract, Assessment, Planning, Intervention, Evaluation & Termination*. Pada artikel ini, Salah satu lembaga sosial memberikan pelayanan kepada anak jalanan melalui pelatihan keterampilan, *family development* dan *home visit*. Dimana, sebelum menentukan bentuk pelayanan, lembaga ini sudah menggunakan proses pekerjaan sosial dan didalam pemberian pelayanan, masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pelayanan bagi lembaga ini. Upaya untuk meningkatkan pelayanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial dapat menggunakan sistem dasar yang terdiri atas sistem pelaksana perubahan, sistem klien, sistem sasaran dan sistem kegiatan.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Pelayanan, Pekerjaan Sosial

Pendahuluan

Anak Jalanan merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Semakin menjamurnya jumlah anak jalanan yang berkeliaran di jalan mengakibatkan permasalahan yang cukup besar di Indonesia, terutama pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota Bandung sebagai kota metropolitan juga tidak terlepas dari masalah anak jalanan. Walaupun untuk tahun 2014 jumlah anak jalanan sulit untuk diperkirakan, akan tetapi data terakhir yang diperoleh dari BPS Kota Bandung (2012) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2014-2018 mengenai masalah kesejahteraan sosial di Bandung pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan masih banyak dan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Pada Tahun 2011

No	Jenis Masalah	Satuan	Jumlah
1	Gelandangan	Orang	948
2	Pengemis	Orang	4.162
3	Wanita Tuna Susila	Orang	549
4	Bekas Narapidana	Orang	364
5	Anak Jalanan	Orang	4861

Sumber Data: *BPS Kota Bandung Dalam Angka, 2012*

Keberadaan anak dijalan, merupakan sesuatu yang sangat dilematis. Selain mencari nafkah untuk mendapatkan uang yang membuatnya bertahan hidup, keberadaan anak dijalan sering mengganggu ketertiban umum dan hak mereka sebagai anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kehidupan yang layak tidak terpenuhi sehingga dapat merusak kehidupan mereka dimasa depan. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dari berbagai tindakan fisik, emosi, seksual ataupun kekerasan sosial lainnya.

Berbagai upaya untuk menangani keberadaan anak jalanan telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan hak anak. Berdasarkan Intruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan program yang berkeadilan, ditetapkan sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional, yang didalamnya termasuk Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai wadah yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan.

Dalam menangani keberadaan anak jalanan, salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menganggap perlu adanya suatu pelayanan bagi anak jalanan. Banyak LSM yang melakukan pelayanan terhadap anak jalanan tetapi hasilnya kurang maksimal. Hal ini dijelaskan oleh Departemen Sosial (2005):

Program pembinaan anak jalanan di LSM-LSM dapat dikatakan belum maksimal karena masih belum banyak inovasi baru yang dilakukan dan banyak juga program pembinaan yang dilakukan tidak berkelanjutan yang berdampak banyak anak jalanan kembali kepekerjaan awal mereka di jalanan dan semakin kompleks permasalahan yang mereka hadapi. (Departemen Sosial. 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*)

Selain program pembinaan, permasalahan lainnya didalam pelayanan sosial yang diberikan terletak pada pelayanan yang diberikan masih sebatas kepada anak jalanan dan belum menyentuh keluarga anak. Tidak hanya itu, permasalahan umum yang terjadi pada pelayanan sosial adalah minimnya sumber daya manusia dan minimnya sumber pendanaan.

Dengan penjelasan tersebut maka dibutuhkan penyelesaian yang tepat untuk diberikan kepada anak jalanan. Karena upaya untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memenuhi hak-haknya telah dirumuskan di dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jalanan. Realisasi dari peraturan negara ini salah satunya bisa terwujud dengan dilaksanakannya rumah singgah, rumah perlindungan anak atau rumah perlindungan sosial anak, mobil sahabat anak, panti persinggahan dan program-program lainnya untuk anak jalanan yang mana pasal didalamnya menjelaskan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai dasar dari hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Di Bandung, Sebagai salah satu contoh, Yayasan Saudara Sejiwa merupakan salah satu rumah singgah dan dikenal dengan nama Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang turut mendukung dan membantu pemerintah dalam membina anak jalanan agar anak tidak kembali kejalanan. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Perlindungan Anak yang dikelola Yayasan Saudara Sejiwa pada umumnya sama dengan pelayanan yang diberikan yayasan lainnya.

Hanya saja, perbedaan pelayanan sosial yang diberikan terletak pada tahap pelayanan yang diberikan. Dan tahapan ini menentukan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi awal kepada Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang dikelola yayasan, diketahui bahwa layanan yang diberikan bagi anak jalanan saat ini berupa penjangkauan, *Assessment*, rencana pelayanan, persiapan kegiatan, dan kegiatan yang sedang berjalan berupa pelatihan keterampilan yang terdiri atas pelatihan menjahit serta komputer, pembinaan sikap dan mental positif, *home visit* (kunjungan kerumah atau keluarga anak jalanan) serta *family Develpoment System* yang diberikan kepada orang tua dari anak jalanan yang menjadi anak binaan, diakhiri dengan terminasi.

Yayasan ini membina anak didalam rumah singgah yang dikenal dengan nama rumah perlindungan anak (RPA) dimana anak hanya sekedar singgah dan tidak menetap. Strategi pelayanan sosial yang diterapkan oleh Yayasan Saudara Sejiwa merujuk pada *Half-way House Services* yang dapat berbetuk rumah persinggahan anak dan keluarganya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharto (1997):

Dimana Strategi ini disebut juga strategi semi-panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk berbagai aktivitas, rumah belajar, rumah persinggahan anak dengan keluarganya, rumah keluarga pengganti, atau tempat anak yang mengembangkan sub-kultur tertentu. Para pekerja sosial menentukan program kegiatan. (Suharto, 1997:373)

Adapun pelaksanaan model pelayanan *Half-way House Services* menurut Soetarso (1996) dapat mengikuti struktur dan mekanisme praktek pekerjaan sosial yang terdiri dari "Identifikasi masalah, penyelidikan, Intervensi sosial dan

terminasi.” Struktur dan mekanisme praktek pekerjaan sosial didalam pelayanan sosial dikenal juga dengan nama proses pertolongan atau proses pekerjaan sosial.

Ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial, proses pertolongan atau proses pekerjaan sosial merupakan wujud praktik pekerjaan sosial. Sebagai sebuah wujud praktik dari pekerjaan sosial, maka pelayanan sosial yang diberikan akan selalu berkaitan dengan proses pekerjaan sosial. Serupa halnya dengan pelayanan sosial yang diberikan saudara sejiwa jika ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial, maka akan selalu berkaitan dengan proses pekerjaan sosial.

Proses pekerjaan sosial mempunyai tahapan pertolongan yang berbeda-beda. Adapun salah satu ahli, Max Siporin (1997) dalam Wibhawa (2010) menjelaskan bahwa proses pekerjaan sosial terdiri atas :

“Engagement, Intake & Contract, Assessment, Planning, Intervention, Evaluation & Termination. Setiap tahapan (proses) mesti dilalui dalam mengatasi suatu persoalan sosial tertentu. (Wibhawa,dkk.2010:63)

Berdasarkan uraian diatas, diketahui dalam mendeskripsikan pelayanan sosial yang diberikan oleh *Half-way House Services* seperti RPA yang dikelola Yayasan Saudara Sejiwa, dapat ditinjau dari aspek-aspek yang terdapat pada tahapan pelayanan yang dilakukan. Yang mana, ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial tahap-tahap pelayanan ini dikenal dengan nama proses pekerjaan sosial.

Metode, hasil dan pembahasan

Dalam meninjau pelayanan sosial bagi anak jalanan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai definisi anak jalanan menurut para ahli. Anak jalanan dapat dideskripsikan sebagai anak yang menggunakan sebagian besar waktunya dijalan baik untuk bekerja atau tidak bekerja yang mana keberadaan mereka dijalan dapat mengganggu ketentraman orang lain serta membahayakan diri mereka. Pengertian ini merupakan kesimpulan dari definisi anak jalanan menurut beberapa ahli. Lusk (1989:57-58) dalam hayat (2010:14) menjelaskan yang dimaksud dengan anak jalanan adalah

“Setiap anak perempuan atau laki-laki yang memanfaatkan jalanan menjadi tempat tinggal sementara atau sumber kehidupan dan tidak dilindungi, diawasi atau diatur oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.”

Sedangkan menurut A Soedijar Z.A dalam Sanusi (1997:24) mengemukakan definisi anak jalanan sebagai berikut:

“Anak jalanan adalah anak yang berusia 7-15 tahun yang bekerja dijalan raya dan ditempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya sendiri.”

Dari dua definisi anak jalanan diatas, diketahui bahwa anak jalanan merupakan anak dengan rentang usia dibawah 18 tahun yang menggunakan sebagian besar waktunya dijalan baik untuk bekerja maupun tidak, dimana keberadaan mereka dapat membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri.

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama menurut Depdiknas(2000) yaitu :

1. *Children of the street*

Anak yang hidup dan tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

2. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik

3. *Vulnerable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya.

Anak turun ke jalanan disebabkan oleh berbagai sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, faktor tersebut menurut Huraerah (2003) adalah:

A. Kemiskinan

Kemiskinan selalu diasosiasikan dengan munculnya berbagai gejala sosial. Keluarga yang miskin akan mengerahkan semua sumber daya manusianya untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, selain orang tua yang bekerja, anak-anak sudah dituntut bekerja.

B. Partisipasi Sekolah

Faktor makro lainnya yang sering dihubungkan dengan anak-anak yang menghabiskan waktu luangnya di jalanan adalah partisipasi sekolah. Kita dapat berasumsi bahwa jika anak-anak itu bersekolah, maka sebagian waktunya tidak akan berada di jalanan.

C. Disfungsi Keluarga

Penelitian yang khusus mengacu pada anak-anak yang dikategorikan sebagai *of the street* oleh UNICEF, menunjukkan bahwa motivasi mereka di jalanan bukanlah sekedar ekonomi. Kekerasan keluarga dan keretakan keluarga merupakan tema sentral dalam wawancara dengan mereka. Bagi anak-anak ini, kehidupan di jalanan yang keras lebih memberikan alternatif kekerasan jika dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh kekerasan.(Huraerah,2003:121-139)

Dari penjelasan di atas, diketahui ada berbagai macam penyebab yang mengakibatkan anak berada di jalanan. Untuk itu, model penanganan terhadap anak selalu berbeda dan disesuaikan dengan kondisinya. Pada saat ini, alternatif penanganan anak jalanan mengarah ke pemberian pelayanan sosial kepada anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA). Pada hakikatnya, RPA sama dengan Rumah Singgah. Hanya saja, beberapa lembaga menggunakan

nama yang berbeda untuk penyebutannya. Akan tetapi, pada saat sekarang ini, Rumah Singgah dikenal dengan nama RPA.

RPA sebagai sebuah bentuk pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak, maka pelayanan ini berhubungan dengan Pekerjaan Sosial. Adapun definisi mengenai pekerjaan sosial menurut Scrafia (1983) dalam Wibhawa, dkk (2010:45) memaparkan pengertian pekerjaan sosial sebagai :

Social work is the profession which is primarly concerned with organized social service activity aimed to facilitate and strengthen basic relationship in the mutual adjustment between individual, and their social enviroentment for the good of the individual and society, by the use of social work method.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, dimana tujuannya untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya, melalui penggunaan metode-metode Pekerjaan Sosial. (Scrafica, 1983:3)

Hampir serupa dengan Scrafica, Friedlander, walter dan Apte (1980) dalam Wibhawa, dkk(2010:45) menjelaskan mengenai pekerjaan sosial yaitu :

“Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relation. Which help individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfication and interdependence.”

Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. (Friedlander, Walter A. Dan Apte 1980:4)

Dari dua definisi diatas, dijelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pengetahuan dan keterampilan guna membantu individu dalam hal ini anak jalanan. Pengetahuan dan keterampilan dari pekerjaan sosial salah satunya meliputi proses pekerjaan sosial guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Jika dikaitkan dengan pelayanan sosial yang diberikan kepada anak jalanan, maka diketahui, RPA merupakan sebuah wadah pelayanan sosial yang terorganisasi untuk membantu anak jalanan. Dengan demikian, sebagai sebuah wadah yang membantu anak jalanan, maka bisa dikatakan, bahwa pekerjaan sosial sedang dilakukan didalam RPA melalui tahapan pelayanan sosial yang diberikan kepada anak jalanan.

Pekerjaan sosial sangat berperan penting didalam pelayanan kepada anak. Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak jalanan, dikenal dengan nama pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Adapun strategi yang menjurus kepada pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak menurut Suharto terbagi atas beberapa strategi :

1. *Child Based Services.*
2. *Institutional Based Services.*
3. *Family Based Service*

4. *Community Based Services.*
5. *Location Based Services.*
6. *Half-way House Services.*
7. *State Based Service.* (Suharto, 1997:373-375)

Soetarso (1996) dalam Suharto (1997) selanjutnya menjelaskan, Adapun pelaksanaan model pelayanan *Half-way House Services* menurut Soetarso (1996) dapat mengikuti struktur dan mekanisme praktek pekerjaan sosial yang terdiri dari “Identifikasi masalah, penyelidikan, Intervensi sosial dan terminasi.” Struktur dan mekanisme praktek pekerjaan sosial didalam pelayanan sosial dikenal juga dengan nama proses pertolongan atau proses pekerjaan sosial.

Rumah Perlindungan Anak sebagai wadah penanganan anak jalanan, dalam memberikan pelayanan kepada anak binaan menggunakan strategi pelayanan *Half-way House Services* dimana anak-anak jalanan dan keluarga anak bisa datang kapanpun ke rumah perlindungan anak dan Pekerja Sosial yang berada di rumah ini, menentukan program kegiatan serta berbagai rumah perlindungan anak ini bersama dengan pengurus RPA. Dalam membahas pelayanan sosial yang diberikan oleh RPA, peneliti meninjau aspek-aspek yang terdapat pada tahapan pelayanan sosial yang dilakukan oleh RPA pada umumnya yang meliputi penjangkauan, *assessment*, rencana pelayanan, persiapan kegiatan, kegiatan dan tahap terakhir adalah terminasi.

1. Penjangkauan

Merupakan Tahap pertama yang mesti dilalui didalam pelayanan sosial yang diberikan kepada anak binaan oleh Yayasan. Adapun penjangkauan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial menurut Max Siporin (1975 :193) merujuk kepada *engagment, intake dan contract*. Adapun *Engagment* merupakan suatu periode dimana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya. Dalam hal ini, pekerja sosial yang bekerja dengan anak jalanan mulai berorientasi terhadap dirinya dan tugas-tugas mengenai anak jalanan yang ditanganinya. Lalu, proses ini diikuti dengan kontak awal pekerja sosial dengan penerima pelayanan dalam hal ini anak jalanan dan pihak-pihak terkait yang selanjutnya diikuti dengan kontrak antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.

2. *Assessment*

Merupakan tahap kedua yang mesti dilalui oleh anak binaan di Rumah perlindungan anak. Ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial, Dalam kegiatan *Assesment* ini, pekerja sosial melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya pemecahan masalah, mengumpulkan dan menganalisa data serta merumuskan masalah yang dihadapi penerima pelayanan.

3. Rencana Pelayanan

Ditinjau dari proses pekerjaan sosial, tahap ini merupakan tahap *planning*. Max Siporin(1975:251) memberikan pengertian *planning* sebagai berikut :

“Planning defined as a deliberate, rational process that involves the choice of actions that are calculated to achieve specifik objectives at some future time.” It also is describe as policy choice and programming in the light of facts. Projection and application of value.” (Perencanaan didefinisikan sebagai sebuah perundingan, proses rasional yang melibatkan pilihan, tindakan-tindakan yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik di waktu yang akan datang dan program yang dilihat dari fakta-fakta, proyeksi dan aplikasi nilai-nilai)

4. Persiapan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan

Ditinjau dari proses pekerjaan sosial, tahap ini merupakan tahap intervensi Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan pemecahan permasalahan penerima pelayanan selain itu, dalam pelaksanaan intervensi ini, pekerja sosial dituntut untuk berusaha melibatkan penerima pelayanan secara aktif pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Adapun kegiatan yang diberikan kepada anak berupa pendidikan dan pelatihan vocational (kecakapan hidup) seperti pelatihan keterampilan yang terdiri atas pelatihan menjahit serta komputer, pembinaan sikap dan mental positif, *home visit* (kunjungan kerumah atau keluarga anak jalanan) serta *family Development System* yang diberikan kepada orang tua dari anak jalanan yang menjadi anak binaan, lalu selanjutnya ditinjau dari perspektif Pekerjaan Sosial dilanjutkan dengan tahap evaluasi. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan penilaian kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilan maupun hambatan-hambatannya. Dalam tahap ini pekerja sosial memulai kembali apa yang telah dilakukan. Evaluasi merupakan unsur yang cukup penting dalam pertolongan, Karena memungkinkan suatu lembaga memberikan respon dan pertanggung jawaban, baik kepada klien maupun kepada keluarga klien. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali semua kegiatan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan, kegagalan dan juga kendala.

5. Terminasi

Tahap pelayanan terakhir yang diberikan oleh RPA sama dengan tahap terakhir pada proses pekerjaan sosial yakni tahap terminasi. Ditinjau dari proses pekerjaan sosial, terminasi merupakan tahap pengakhiran kegiatan pertolongan pekerjaan sosial yang dilakukan apabila tujuan pertolongan telah tercapai atau penerima pelayanan memerlukan rujukan ke lembaga lain. Sedangkan terminasi yaitu tahap paling akhir dalam proses pelayanan sosial. Tahap terminasi dilakukan bila tujuan pertama telah dicapai. Terminasi adalah perencanaan awal kerjasama antara pekerja sosial dengan klien, terminasi dapat meningkatkan fungsi sosial klien dan juga dapat mengembangkan pengertian antara klien dan pekerja sosial

saat mereka bekerja sama. Tidak hanya pekerja sosial yang melakukan tahapan ini. Akan tetapi, para pengurus yayasan yang bekerja dengan anak juga sebaiknya melakukan tahap-tahap proses pekerjaan sosial didalam memberikan pelayanan sosialnya bagi anak jalanan.

Walaupun lembaga sosial ini telah menggunakan proses pekerjaan sosial dalam menentukan bentuk pelayanan, akan tetapi pelayanan yang diberikan masih perlu ditingkatkan.

Penutup (Simpulan dan Saran)

Sebagai seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak, Maka saran yang bisa diberikan berupa peningkatan pelayanan dengan memperhatikan sistem lingkungan yang disebut dengan sistem dasar. Dalam perpektif pekerjaan sosial, sistem lingkungan memiliki kontribusi signifikan dalam proses dan praktek pekerjaan sosial, Sistem dasar ini merupakan *significant factors* yang harus diidentifikasi dan diklasifikasikan oleh pekerja sosial dalam menjalankan peran-peran profesionalnya. Pincus dan Minahan (1973) dalam Suharto (1997:319) sistem dasar ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Sistem Pelaksana perubahan (change agent system).

Sistem pelaksana perubahan adalah sekelompok orang yang tugasnya memberi bantuan atas dasar keajian yang berbeda-beda dan bekerja dengan sistem yang berbeda-beda pula ukurannya. Seorang pekerja sosial dapat disebut sebagai pelaksana perubahan, sementara itu lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mempekerjakannya disebut sebagai sistem pelaksana perubahan.

Dalam meningkatkan pelayanan, Lembaga sosial merupakan sistem pelaksana perubahan, Dan orang-orang yang berada pada lembaga sosial merupakan pelaksana perubahan. Jika lembaga sosial sudah mempunyai sistem yang jelas ukurannya dalam memberikan pelayanan, maka pelayanan dapat meningkat. Sebagai contoh, jika lembaga memberikan pelatihan maka pelatihan itu harus dibuat ukuran yang jelas seperti rentang waktu pelatihan, metode pelatihan, dan evaluasi dari pelatihan.

2. Sistem klien

Sistem klien dapat merupakan individu, kelompok, keluarga, organisasi atau masyarakat yang meminta bantuan atau pelayanan kepada sistem pelaksana perubahan. Pada artikel ini, yang merupakan klien adalah anak jalanan beserta keluarganya. Lembaga sosial sebaiknya sudah mengetahui siapa saja klien yang akan diberi bantuan, sehingga dalam memberikan pelayanan, bentuk pelayanan tidak hanya ditujukan kepada anak tetapi juga kepada keluarganya dan dengan adanya pengetahuan mengenai sistem klien, maka pelayanan yang diberikan oleh lembaga akan banyak ragam serta jenisnya disesuaikan dengan siapa kliennya.

3. Sistem Sasaran

Sistem sasaran adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan sasaran perubahan, atau dijadikan media yang dapat mempengaruhi proses

pencapaian tujuan pertolongan. Jika pelayanan yang diberikan oleh lembaga sosial belum ada baik dalam segi sumber daya yang kurang atau dana yang belum memadai, dengan menggunakan pengetahuan mengenai sistem sasaran, maka lembaga akan mencari pihak-pihak yang dapat diajak bekerjasama untuk memaksimalkan pelayanan. Misalnya, PKBM setempat sebagai rujukan, jika klien tidak bisa baca dan tulis.

4. Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan menunjuk pada orang-orang yang bekerja sama dengan pekerja sosial untuk melakukan usaha-usaha perubahan melalui pelaksanaan tugas-tugas atau program kegiatan. (Pincus, 1973:53-68)

Pelayanan dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengetahuan dari sistem kegiatan. Caranya, dari setiap pelayanan yang diberikan, Lembaga sebaiknya sudah menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab, selain pekerja sosial dan juga orang-orang yang bisa diajak bekerja sama dalam setiap pelayanan yang diberikan.

Adanya 4 sistem ini, diharapkan dapat digunakan oleh pengurus yayasan beserta pekerja sosial agar tercipta pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Departemen Sosial RI. 2005. Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan. Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta
- Direktorat Kesejahteraan Anak & Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Ri. 2010. Pedoman Pendampingan Kesejahteraan Anak (PKSA). Kementrian Sosial Republik Indonesia. Jakarta
- Friedlander dan Apte. Z. 1980. *Introduction to Social Welfare*. United State : University Of California At Berkeley
- Hayat, Abdul. Kekerasan terhadap anak jalanan .2010. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Huraerah, Abu. 2003. Isu Kesejahteraan Sosial. Bandung: *Centre for political and local Autonomy Studies*.
- Iskandar, Yusman .1993. Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
- Siporin, Max. 1975. *Introduction To Social work Practice*. United State Of America : Macmillan Publishing co.inc
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Utama
- Suharto, Edi. 1997. Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan sosial; spektrum pemikiran: Lembaga studi pembangunan LSP-STKS Bandung.
- Sukoco, Dwi Heru. 1991. Profesi pekerjaan sosial dan proses pertolongannya. Bandung : Kopma STKS
- Soetarso. 1997. Kesejahteraan sosial, pelayanan sosial dan kebijakan sosial. Jakarta : Bina Aksara

Wibhawa, Budi dkk. 2010. Dasar- Dasar Pekerjaan sosial. Bandung: Widya padjadjaran

Sumber lain

Krismiyarsi,Dkk. 2004. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Jalanan Melalui Model Rumah Singgah. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semarang.

<http://sdc.depsos.go.id/>diakses 6 september 2014, pada pukul 09.02 WIB

http://bandung.go.id/site/RPJMD_2014/Rancangan_Akhir_RPJMD_2014_02_16.pdf, di unduh 8 september 2014

HUKUM DALAM PERMASALAHAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Andi Rezky Aprilianty Punagi, Ishartono, & Gigin Ginanjar Kamil Basar

Email:

rezkyaprianty@gmail.com; ishartono@gmail.com; giginkb@yahoo.com

ABSTRAK

Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban trafficking itu miskin dan tidak cukup memiliki peluang ekonomi. Orang yang kurang pendidikan, kurang memiliki keterampilan, atau tersisih dari peluang ekonomi dikarenakan alasan-alasan lain (seperti deskriminasi) adalah pihak yang paling rentan. Perdagangan anak merupakan suatu masalah kompleks yang memerlukan pendekatan dari berbagai sisi. Pembuat undang-undang harus didesak untuk meneliti undang-undang/hukum nasionalnya secara kritis dengan maksud memperkuat atau melengkapi undang-undang tersebut akan membentuk suatu wujud perundang-undangan yang mampu melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Anak adalah mata rantai yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Agar mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. Kebutuhan dasar Maslow ada lima tingkatan yaitu kebutuhan sosiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Hukum yang mengatur mengenai anak di Indonesia telah banyak dibuat. Beberapa diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Dan juga adanya Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, permasalahan perdagangan anak masih belum terselesaikan dengan baik dan menyeluruh dikarenakan para pelaku kejahatan yang tidak memiliki ketakutan akan hukum yang dibuat. Maka dari itu, sudut pandang rubah tidak hanya melihat dari pelaku tetapi juga melihat dari faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan anak.

Kata Kunci: Anak, Perdagangan, Hukum, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan atau dambaan setiap orang atau keluarga. Namun dalam kenyataannya sebagaimana banyak diberitakan, masih banyak anak mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, hak-hak anak semakin terabaikan,

bahkan permasalahan anakpun semakin kompleks. Permasalahan yang menonjol antara lain anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak-anak korban konflik bersenjata, anak-anak korban *trafficking*, sampai anak-anak yang dilacurkan.

Di Indonesia, akhir-akhir ini telah banyak memberitakan mengenai perdagangan anak, baik yang masih bayi, maupun yang remaja untuk dijadikan pekerja seks komersial. Contoh kasus yang menimpa 3 bayi yang menjadi korban perdagangan anak oleh salah satu yayasan yang ada di Bogor. Kasus yang lain yaitu yang menimpa pelajar perempuan yang baru berumur 14 dan 15 tahun yang merupakan korban perdagangan manusia dan dijadikan pekerja seks komersial.

Dalam buku “Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang” dari Unicef, ada banyak faktor yang mendorong terjadinya trafficking dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban trafficking itu miskin dan tidak cukup memiliki peluang ekonomi. Orang yang kurang pendidikan, kurang memiliki keterampilan, atau tersisih dari peluang ekonomi dikarenakan alasan-alasan lain (seperti deskriminasi) adalah pihak yang paling rentan. Faktor-faktor ini, ditingkah dengan adanya deskriminasi jender, ras, etnis, kemiskinan dan pengangguran atau keadaan tidak aman karena konflik bersenjata, memungkinkan jaringan perdagangan manusia tumbuh subur.

Upaya-upaya pencegahan yang dirancang untuk menurunkan permintaan dan pasokan orang yang diperdagangkan harus berfokus pada faktor/akar masalah yang menyebabkan trafficking. Sementara upaya-upaya pencegahan sifatnya penegak hukum, para pembuat undang-undang dapat memanfaatkan kepemimpinan mencoba mencari akar penyebab. Dimana perundang-undangan dipandang sesuai, pembuatan undang-undang harus mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan undang-undang yang cocok atau memperbaharui undang-undang yang ada. Dalam hal demikian, hal-hal berikut harus dipertimbangkan oleh para pembuat undang-undang:

- Banyak orang diperdagangkan karena kemiskinan; tekankan pada kebutuhan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan alternative, dan penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi kaum miskin. Secara khusus, wanita dan anak-anak rentan terhadap pekerjaan-pekerjaan eksploitasi karena berbagai faktor seperti buruknya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, dan undang-undang tentang status pribadi dan kepemilikan. Sayangnya, strategi pembangunan sering gagal untuk mencermati dimensi kemiskinan dari sudut jender, dan karenanya, mempertajam perbedaan antara pria dan wanita dalam pembangunan ekonomi.
- Anak rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif bila mereka dipaksa bekerja untuk memberikan tambahan pendapatan bagi keluarganya. Karena anak-anak biasanya hanya memiliki keterampilan rendah, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang kasar dan berubah rendah atau dipaksa melakukan

berbagai bentuk pekerjaan yang dieksploitatif yang mungkin menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk keluarganya.²²

Perdagangan anak merupakan suatu masalah kompleks yang memerlukan pendekatan dari berbagai sisi. Pembuat undang-undang harus didesak untuk meneliti undang-undang/hukum nasionalnya secara kritis dengan maksud memperkuat atau melengkapi undang-undang tersebut akan membentuk suatu wujud perundang-undangan yang mampu melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

PEMBAHASAN

Anak adalah mata rantai yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak merupakan potensi sumber daya manusia sebagai penerus cita-cita bangsa yang diletakkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, agar mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Pertama, akan dibahas terlebih dahulu mengenai kebutuhan dan hak terhadap anak. Apa yang dibutuhkan anak-anak untuk keselamatan dan perkembangan? Dengan pertanyaan tadi, pertama-tama, dijelaskan terlebih dahulu mengenai hierarki kebutuhan.

Psikolog Abraham Maslow pertama kali memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan di tahun 1943. Hierarki ini menunjukkan bahwa orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum pindah ke kebutuhan lain. Hierarki kebutuhan Maslow paling sering ditampilkan sebagai sebuah piramida. Tingkat terendah piramida terdiri dari kebutuhan yang paling dasar, sementara kebutuhan yang paling kompleks terletak di bagian atas piramida. Kebutuhan di bagian bawah piramida merupakan persyaratan fisik dasar termasuk kebutuhan makanan, air, tidur, dan kehangatan. Setelah kebutuhan tingkat bawah ini telah terpenuhi, orang bisa melanjutkan ke tingkat kebutuhan berikutnya, yaitu untuk keselamatan dan keamanan.

Ketika orang melakukan kemajuan dalam piramida, kebutuhan semakin menjadi bersifat psikologis dan sosial. Tak lama kemudian, kebutuhan akan cinta, persahabatan dan keintiman menjadi penting. Lebih lanjut ke atas piramida, kebutuhan harga diri dan perasaan berprestasi memperoleh prioritas. Maslow menekankan pentingnya aktualisasi diri yang merupakan proses tumbuh dan berkembang sebagai seseorang untuk mencapai potensi individu.

Ada lima tingkat yang berbeda dalam hierarki kebutuhan Maslow:

1. Kebutuhan Sosiologis

Ini termasuk kebutuhan paling dasar yang penting untuk kelangsungan hidup, seperti kebutuhan air, udara, makanan, dan tidur.

2. Kebutuhan Keamanan

²² Unicef. "Memerangi Perdagangan Anak." Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang.

Ini termasuk kebutuhan untuk keselamatan dan keamanan. Kebutuhan keamanan penting untuk kelangsungan hidup, tetapi kebutuhan ini tidak terlalu menuntut seperti kebutuhan fisiologis. Contoh kebutuhan keamanan termasuk keinginan untuk tetap kerja, pendidikan, lingkungan aman dan naungan/perlindungan dari lingkungan.

3. Kebutuhan Sosial

Ini termasuk kebutuhan untuk memiliki, cinta dan kasih sayang. Maslow menganggap kebutuhan ini kurang begitu mendasar dari pada kebutuhan fisiologis dan keamanan. Hubungan seperti persahabatan, ikatan romantis dan keluarga membantu memenuhi kebutuhan akan persahabatan dan penerimaan, seperti halnya keterlibatan dalam kelompok-kelompok sosial, komunitas atau keagamaan.

4. Kebutuhan Harga Diri

Setelah tiga kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan harga diri menjadi semakin penting. Ini termasuk kebutuhan untuk hal-hal yang mencerminkan tentang harga diri, nilai pribadi, pengakuan sosial dan prestasi.

5. Kebutuhan Aktualisasi diri

Ini adalah tingkat tertinggi dari hierarki kebutuhan Maslow. Orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah orang yang sadar diri, peduli dengan pertumbuhan pribadi, kurang peduli dengan pendapat orang lain dan tertarik untuk memebuhi potensi mereka.²³

Menurut Justika (2002), ada 4 hak anak yang telah disesuaikan dengan konvensi hak anak PBB tahun 1989 yaitu:

- a. Hak kelangsungan hidup (*survival right*) adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, sehingga terhindar dari beberapa penyakit infeksi yang mematikan.
- b. Hak berkembang (*development right*) bahwa pemberian gizi dan pendidikan yang baik serta lingkungan sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang sebagai manusia dewasa yang beridentitas dan bermartabat.
- c. Hak memperoleh perlindungan (*protection right*) yaitu memperoleh perlindungan dari berbagai deskriminasi dari tindak kekerasan baik oleh warna kulit, ideology, politik, agama maupun kondisi fisik.
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya. (Justika, S.B. 2002: 29)

Pertanyaan selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai masalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan masih banyak dan maraknya perdagangan anak yang terjadi di Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari

²³ Mallon, Gerald P. dan Joan Morse. 2012. Modul Latihan Pekerjaan Sosial Berpusat pada Anak dan Keluarga. "Perlindungan Anak dan Perencanaan Permanensi." Save The Children, Jakarta

perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23/ 2003: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Dan juga adanya Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.”

Dengan adanya peraturan tersebut, menyiratkan keinginan negara untuk memberikan perlindungan dan juga pengamanan bagi generasi bangsa yang akan datang yang merupakan penerus dalam memajukan bangsa dan memberi bukti adanya perhatian pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin serta melindungi masa depan anak. Tetapi, kenyataan yang terjadi adalah masih banyak kasus-kasus anak yang menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia.

Hukum telah menjadi salah satu harapan yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan perdagangan anak. Akan tetapi, banyaknya pemberitaan di media masa mengenai kasus perdagangan anak menunjukkan bahwa Undang-Undang yang telah ada dan telah dibuat masih belum efektif dalam menangani dan memberantas perdagangan anak.

Permasalahan perdagangan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang mengakibatkan sulit untuk ditanggulangi oleh hukum disebabkan Perdagangan anak merupakan kejahatan dengan modus yang bermacam-macam serta terorganisir dengan rapi pada umumnya, juga kejahatan ini terorganisir sampai keluar negeri sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semua pasal yang dituangkan dalam undang-undang tidak membuat para pelaku menjadi ketakutan, tetapi menciptakan modus baru dalam perdagangan anak. Para pelaku kejahatan perdagangan anak biasanya melakukan berbagai macam modus seperti penculikan, pemalsuan identitas, iming-iming pekerjaan, dan lain sebagainya. Pemimpin dari kejahatan ini belum dapat diungkap oleh hukum, sehingga hukum dirasa belum efektif untuk menanggulangi permasalahan perdagangan anak ini.²⁴

PENUTUP

Anak adalah mata rantai yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak merupakan potensi sumber daya manusia sebagai

²⁴ Markus Tampubolon dalam Makalah “Efektivitas Hukum Dalam Menanggulangi Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia”.

penerus cita-cita bangsa yang diletakkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, agar mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. Anak merupakan harapan atau dambaan setiap orang atau keluarga. Namun dalam kenyataannya sebagaimana banyak diberitakan, masih banyak anak mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, hak-hak anak semakin terabaikan, bahkan permasalahan anakpun semakin kompleks.

Dari penjabaran di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya hukum serta Undang-Undang yang secara jelas menentang adanya perdagangan anak tidak menjadikan pelaku kejahatan jera dan merasa takut, serta tidak menjadikan permasalahan perdagangan anak terselesaikan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak adalah kemiskinan serta pendidikan yang relatif rendah. Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban trafficking itu miskin dan tidak cukup memiliki peluang ekonomi. Orang yang kurang pendidikan, kurang memiliki keterampilan, atau tersisih dari peluang ekonomi dikarenakan alasan-alasan lain (seperti deskriminasi) adalah pihak yang paling rentan. Faktor-faktor ini, ditingkah dengan adanya deskriminasi jender, ras, etnis, kemiskinan dan pengangguran atau keadaan tidak aman karena konflik bersenjata, memungkinkan jaringan perdagangan manusia tumbuh subur. Maka dari itu, upaya-upaya yang dibutuhkan harus melihat dan mengintervensi lebih dulu faktor-faktor penyebab perdagangan anak, seperti untuk masalah kemiskinan, pemerintah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para orang tua, serta keterampilan-keterampilan yang akan berguna kelak untuk rakyat miskin. Untuk pendidikan sendiri, bisa melalui bantuan operasional sekolah serta akses sekolah murah. Tetapi, upaya-upaya tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya dan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dan tidak adanya partisipasi dan kerjasama dari masyarakatnya. Permasalahan perdagangan anak tidak sepenuhnya urusan pemerintah tetapi juga banyak pihak yang ikut andil seperti masyarakat serta LSM yang menangani permasalahan anak.

Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara untuk strategi pemberian bantuan kepada masyarakat. Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.²⁵

Pekerja sosial pada masalah ini sangat memiliki andil dalam penyelesaian masalah. Pekerja sosial selain menjadi profesi yang memahami mengenai intervensi, juga dapat menjadi educator dalam memberikan penyuluhan tentang perdagangan anak, dapat menjadi bagian dalam pembuatan ataupun perbaikan

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi_sosial

dalam Undang-Undang, serta kerjasama dengan pihak LSM yang menangani permasalahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ikawati. 2007. *Pengkajian Model Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pelayanan Kesejahteraan Anak*. Departemen Sosial RI, Yogyakarta.

Mallon, Gerald P. dan Joan Morse. 2012. Modul Latihan Pekerjaan Sosial Berpusat pada Anak dan Keluarga. *Perlindungan Anak Dan Perencanaan Permanensi*. Save The Children, Jakarta

Unicef. *Memerangi Perdagangan Anak*. Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang

Sumber Lain

Tampubolon, Markus. 2012. *Efektivitas Hukum Dalam Menanggulangi Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia*.

http://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi_sosial

KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Oleh:

Winda Marienda, Moch. Zainuddin, & Eva Nuriyah H.

Abstrak

Di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi serta dinamika perubahan sosial-budaya masyarakat yang semakin cepat, maka tuntutan profesionalisme di dalam pelaksanaan tugas juga semakin menjadi tuntutan. Bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), profesionalisme utamanya dapat diukur dari sejauhmana kemampuan mengaktualisasikan kompetensi yang dipersyaratkan. Empat kompetensi inti guru yang dijabarkan ke dalam kompetensi guru PAUD bermuara pada pengaktualisasian profesionalisme. Dalam ruang lingkup tugasnya, guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya. Bila disimpulkan dari pendapat Wragg (1994), maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tuntutan terhadap keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki oleh guru. *Faktor pertama* adalah karena cepatnya perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Implikasi bagi guru adalah di mana guru harus memiliki keterampilan-keterampilan yang cukup untuk mampu memilih topik, aktivitas dan cara kerja dari berbagai kemungkinan yang ada. Guru-guru juga harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan sebagai anggota kelompok. Mereka juga harus menemukan keseimbangan yang tepat antara tradisi dan modernitas, dan antara berbagai gagasan dan sikap yang dibawa oleh anak ke sekolah dan isi kurikulum. Jadi dengan berkurangnya kekakuan pemisahan ruang kelas dengan dunia luar, maka para guru juga perlu berusaha membawa proses belajar ke luar ruang kelas.

Kata Kunci: Profesionalisme, kompetensi, guru, PAUD

A. Pendahuluan

Tuntutan terhadap pemberian layanan yang berkualitas dalam perkembangan terakhir semakin deras menyentuh dunia pendidikan. Masyarakat semakin menyadari bahwa untuk dapat menghasilkan luaran yang berkualitas yakni siswa-siswa yang mampu mencapai prestasi yang tinggi hanya mungkin dapat diwujudkan bilamana semua unsur pelaksana pendidikan, terutama sekali guru-guru mampu melaksanakan fungsinya secara optimal.

Pemberian layanan yang baik untuk mencapai hasil yang diharapkan dapat dilakukan bilamana didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas

dan keahlian di dalam bidangnya. Kualitas dan keahlian merujuk pada profesionalisme. Itulah sebabnya maka tuntutan akan profesionalisme di dalam berbagai bidang saat ini menjadi sesuatu yang tidak lagi dapat ditunda, bahkan menjadi tuntutan untuk dilaksanakan.

Dalam bidang pendidikan, tuntutan terhadap kemampuan memberikan layanan yang lebih profesional khususnya bagi pendidikan anak usia dini semakin memiliki arti penting. Terlebih lagi disadari bahwa perkembangan anak berbeda-beda, baik dalam intelegensi, bakat, minat, kreativitas kematangan emosi, kepribadian, keadaan jasmani dan keadaan sosial. Terkait dengan itu pula cepat mengerti, ada yang lambat.

Dalam upaya mengaktualisasikan profesionalisme guru, pemerintah telah menetapkan standar yang harus dipenuhi bagi setiap pendidik, Pada pasal 26 PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Sedangkan kualifikasi akademik juga telah ditentukan untuk setiap jenjang dan satuan pendidikan.

B. Beberapa Pandangan Tentang Profesional

Konsep, kriteria maupun standar dari suatu pekerjaan atau jabatan profesional saat ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Perkembangan ini terutama disebabkan karena semakin besarnya persaingan dalam mendapatkan layanan yang lebih baik dalam upaya mencapai hasil yang optimal. Dalam bidang pendidikan langkah dan upaya menuju terwujudnya kemampuan melaksanakan tugas secara profesional bagi setiap pendidik menjadi faktor yang sangat menentukan untuk tercapainya kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Terlebih lagi jika dicermati dari berbagai penelitian yang menemukan bahwa performance dan karakteristik guru secara nyata memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan belajar siswa.

Di dalam Undang-undang Guru dan Dosen (Undang-undang nomor 14 tahun 2005, pasal 2), dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada pasal 4, dikemukakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru, sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

C. Tuntutan Terhadap Profesionalisme Guru PAUD

Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk

kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik dalam forum regional, nasional maupun internasional.

Pekerjaan guru adalah salah satu bidang pekerjaan yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu bilamana masyarakat semakin kritis mengamati dan menilai keberhasilan dan kegagalan tugas guru adalah sesuatu yang lumrah. Guru merupakan *‘the front linear’*nya berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan nasional (Sa’ud, 2000:35). Demikian pula guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan di tingkat sekolah (Fullan, 1992; Goodlad, 1990). Terlebih lagi saat ini masyarakat, utamanya para orang tua sangat berkepentingan dengan layanan pendidikan yang berkualitas, dan sebagian besar tanggung jawab terdepan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut memang berada di pundak guru.

Pentingnya peran guru juga dibahas oleh Gaffar (1998: 4) dalam jurnal “Mimbar Pendidikan” bahwa guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut peran guru sulit digantikan oleh yang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peran guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Faktor kedua adalah terjadinya perubahan pandangan di dalam masyarakat yang memiliki implikasi pada upaya-upaya pengembangan pendekatan terhadap siswa. Sebagai contoh banyak guru yang memberikan motivasi seperti mendorong anak-anak bekerja keras di sekolah agar nanti mereka memperoleh suatu pekerjaan yang baik, tidak lagi menarik bagi mereka. Dalam konteks ini gagasan tentang keterampilan mengajar yang hanya menekankan transmisi pengetahuan dapat menjadi suatu gagasan yang miskin dan tidak menarik.

Faktor ketiga adalah perkembangan teknologi baru yang mampu menyajikan berbagai informasi yang lebih cepat dan menarik. Perkembangan-perkembangan ini menguji fleksibilitas dan adaptabilitas guru untuk memodifikasi gaya mengajar mereka dalam mengakomodasi sekurang-kurangnya sebagian dari perkembangan baru tersebut yang memiliki suatu potensi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tuntutan terhadap penguasaan sejumlah keterampilan oleh guru harus lebih mendapat perhatian., utamanya bilamana pembelajaran yang dilakukan diarahkan lebih mendalam pada pengembangan aspek-aspek sikap (afektif).

Sebelum guru menentukan strategi pembelajaran, metode dan teknik-teknik evaluasi yang akan dipergunakan, maka guru terlebih dahulu dituntut untuk memahami karakteristik siswa dengan baik. Hal ini dikarenakan dari hasil sejumlah riset menunjukkan bahwa keberagaman faktor, seperti sikap siswa, kemampuan dan gaya belajar, pengetahuan serta kemampuannya dan konteks pembelajaran merupakan komponen yang memberikan dampak sangat penting

terhadap apa yang sesungguhnya harus siswa-siswa pelajari. Pengenalan terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar, merupakan faktor yang sangat mendasar dan penting untuk dilakukan oleh setiap guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat menyentuh kepentingan siswa, minat-minat mereka, kemampuan serta berbagai karakteristik lain yang terdapat pada siswa, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pengenalan terhadap siswa mengandung arti bahwa guru harus dapat memahami dan menghargai keunikan cara belajar siswa dan kebutuhan-kebutuhan perkembangan mereka. Upaya-upaya mengenal dan memahami siswa merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, karena kebutuhan siswa tidak bersifat menetap, akan tetapi mengalami perubahan sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Bahkan seringkali perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa berlangsung dengan cepat sehingga guru tidak jarang mengalami kesulitan untuk dapat mengenal dan memahaminya secara cermat. Di samping itu pula kebutuhan-kebutuhan mereka menggambarkan keragaman intelegensial, kemampuan maupun ketidakmampuannya. Bagi anak-anak yang memiliki kualitas intelegensi yang baik dan berada dalam tahap atau masa perkembangan tertentu memiliki sejumlah kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak yang tergolong memiliki intelegensi yang rendah walaupun sama-sama berada pada tahap perkembangan tertentu.

D. Standar Kompetensi Guru PAUD

Profesionalisme guru sangat terkait dengan kemampuan mewujudkan atau mengaktualisasikan kompetensi yang dipersyaratkan bagi setiap guru. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Kompetensi yang dimiliki guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu Standar Kompetensi Guru dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 28, ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama tersebut. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Mengacu pada Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 standar kompetensi guru mencakup kompetensi guru inti dan dikembangkan menjadi kompetensi guru pada masing-masing satuan pendidikan. Untuk standar kompetensi guru PAUD/TK adalah seperti dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 1
Staandar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
Kompetensi Pedagogik		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual	1.1. Memahami karakteristik peserta didik usia TK/PAUD yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral dan latar belakang sosial-budaya. 1.2. Mengidentifikasi potensi peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
		1.3. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan. 1.4. Mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD. 2.2. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu	3.1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2. Menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik. 3.3. Menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan. 3.4. Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik yaitu kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan tujuan pengembangan. 3.5. Menyusun perencanaan semester, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan di TK/PAUD. 3.6. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

4.	Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.	<p>4.1.Memahami prinsip-prinsip peran-cangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.</p> <p>4.2.Mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.</p> <p>4.3.Menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas.</p> <p>4.4.Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik dan bermakna.</p> <p>4.5.Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan, inklusif dan demokratis.</p> <p>4.6.Memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar.</p> <p>4.7.Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD</p> <p>4.8.Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.	<p>5.1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik.</p>
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<p>6.1. Menyediakan berbagai kegiatan bermain sambil belajar untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal termasuk kreativitasnya.</p>
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.	<p>7.1.Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.</p> <p>7.2.Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. Dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang</p>

		terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, (c) respon peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8		<p>8.1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi.</p> <p>8.3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4. Mengembangkan instrumen penilaian evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen</p> <p>8.6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar</p>
9.	Memanfaatkan hasil penilaian	<p>9.1. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi.</p> <p>9.2. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>9.3. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>9.4. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	<p>10.1. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi.</p> <p>10.2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan kualitas pembelajaran.</p> <p>10.3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
Kompetensi Kepribadian		
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan	<p>11.1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal dan gender.</p> <p>11.2. Bersikap sesuai dengan norma agama yang</p>

	kebudayaan nasional Indonesia	dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	12.1. Berperilaku jujur, tegas dan manusiawi. 12.2. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 12.3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 13.2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa.
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	14.1. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 14.2. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 14.3. Bekerja mandiri secara profesional.
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru	15.1. Memahami kode etik profesi guru. 15.2. Menerapkan kode etik profesi guru. 15.3. Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
Kompetensi Sosial		
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1. Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 16.2. Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,	17.1. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. 17.2. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik dan

	tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk di dalam memahami bahasa daerah setempat. 18.2. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah bersangkutan.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1. Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 19.2. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunikasi profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	20.1. Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK/PAUD. 20.2. Menguasai penggunaan berbagai alat bermain untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD. 20.3. Menguasai berbagai permainan anak.
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	21.1. Memahami kemampuan anak TK/PAUD dalam setiap bidang pengembangan. 21.2. Memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK/PAUD. 21.3. Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan.

22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	22.1. Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 22.2. Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan	23.1. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
		23.2. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	24.1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

E. Penutup

Kemampuan mewujudkan profesionalisme guru PAUD merupakan respon terhadap semakin derasnya tuntutan lingkungan sosial masyarakat yang menghendaki adanya peningkatan kualitas layanan pendidikan, termasuk bagi anak-anak usia dini. Adanya rumusan empat kompetensi guru yang menjadi kerangka umum dan dasar yang selanjutnya dijabarkan di dalam kompetensi guru PAUD dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauhmana guru-guru PAUD memiliki kemampuan memahami dan mengaktualisasikan dimensi-dimensi kemampuannya. Pengaktualisasian kompetensi ini akan dapat dijadikan standar utama untuk menilai seberapa luas dan mendalamnya profesionalisme guru PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Depdiknas Dirjen Dikdasmen.

- DePorter, B & Hernacki, M. (2001). *“Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan”* (Alwiyah Abdurrahman, Penerjemah). Bandung: Kaifa.
- Djahiri K. (2004). *Membina dan Meningkatkan Profesionalisme Tugas – Peran Pendidik Melalui Peningkatan Kompetensi Guru Serta Sekolah Sebagai Pusat Pembelajaran & Agent of Changes*. Bandung: UPI
- Doyle, Wr. (1990). *“Thema in Teacher Education Research”* dalam Handbook of Research on Teacher Education, A Project of the Association of Teacher Educators (1990). New York: Macmillan Publishing Company.
- Fullan, M. (1992). *The New Menaning of Educational Change*. Toronto: OISE Pres Publishing Co.
- Gaffar, F.G. (1998). “Menghargai Pengabdian Para Guru”. Dalam *Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan* (3, XVII).
- Goodlad, J.I. (1990). *Teachers for Internation’s Schools*. SanFransisco: Jossey Bass Publishing Co.
- Morris, Rt Hon E. (2001). “Professionalism and Trust – the Future of Teachers and Teaching”. *SME Departemen for Education and Skill*. (Online).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Reece, I, dan Walker, S. (1997). *Teaching training and learning A Practical Guide* (Third Edition). Great Britain: Biusiness Education Publisher Limited.
- Sa’ud, Udin S. (2000). “Standarisasi Lulusan dan Program Pendidikan Prajabatan Guru Profesional Sebuah Harapan”. Dalam *Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan* (3, XIX 2000).

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

Oleh:

Mamah Halimah, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah

Email:

mamahhalimah01@gmail.com; hettykrisnani@yahoo.com;
fedry_cons@yahoo.com

ABSTRAK

Sampah merupakan material sisa yang dihasilkan dari aktivitas manusia, hewan, dan alam yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah apabila dibiarkan saja tanpa ada pengelolaan akan menimbulkan berbagai macam masalah baik itu masalah lingkungan fisik, kesehatan manusia, keindahan estetika, dan masalah sosial. Untuk mengatasi volume sampah yang semakin meningkat, maka pengelolaan sampah sangat dibutuhkan. Pengelolaan sampah dilakukan yaitu untuk mengurangi volume timbulan sampah bahkan dapat memusnahkan sampah dari muka bumi ini dengan syarat seluruh manusia sadar akan bahayanya sampah. Dalam melakukan pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintahan saja melainkan masyarakat juga harus ikut terlibat dalam mengatasi masalah sampah ini karena sampah jika dikelola oleh masyarakat akan berdampak positif bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting bagi peningkatan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Dengan demikian, dalam pengolahan sampah dibutuhkan teknik pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi lingkungannya.

Kata kunci: Pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dan Pengembangan Masyarakat.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang jumlah penduduknya menduduki peringkat ke empat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa yang berbanding lurus dengan produksi sampah setiap harinya. Pada tahun 2025 mendatang, produksi sampah diperkirakan akan mencapai 130.000 ton perhari. Pasalnya aktivitas masyarakat pada umumnya akan berhubungan dengan konsumsi makanan dalam kemasan setiap harinya. Oleh karena itu, volume sampah dari tahun ketahun akan semakin meningkat karena hitungan rata-rata setiap orang diperkirakan membuang sampah 0,5 kg sampah

perhari. Maka sampah yang paling dominan adalah sampah rumah tangga yaitu sebanyak 48 persen. (sumber: medialingkungan.com)

Berdasarkan hasil studi pada tahun 2008 yang dilakukan di beberapa kota, pola pengelolaan sampah di Indonesia menurut rasio adalah diangkut dan ditimbun di TPA sebesar 69 persen, dikubur sebesar 10 persen, dikompos dan didaur ulang sebesar 7 persen, dibakar sebesar 5 persen, dan sisanya tidak terkelola. (sumber: liputan6.com)

Meningkatnya volume timbulan sampah tentunya memerlukan upaya pengelolaan agar masyarakat terhindar dari permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Selain itu, pengelolaan sampah yang dilakukan juga perlu menggunakan metode dan teknik-teknik yang baik. Pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, selain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Dalam PP nomor 81 tahun 2012 pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 2 menjelaskan bahwa pengaturan pengelolaan sampah bertujuan; a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh pemerintah berupa ditimbun dan dibakar. sedangkan apabila pengelolaan sampah dilakukan oleh masyarakat, sampah akan terkelola dan teratasi dengan baik dan akan berdampak positif. Ada beberapa kota yang dijadikan percontohan mengenai pengelolaan sampah yang sudah berhasil, salah satunya kota Surabaya, Malang, dan Jombang.

Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang dinilai mampu mengelola sampah dengan baik, melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*). Tidak hanya itu, program 3R dinilai telah menjadi landasan upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dalam rangka mengurangi sampah dan mengambil nilai ekonomis dari sampah. Hal ini, menjadikan kota Surabaya sebagai *role model* negara-negara di Asia Pasifik. Kunci sukses keberhasilan program pengelolaan sampah terletak pada peran serta aktif masyarakat beserta seluruh elemen yang ada. Keterlibatan semua pihak dalam upaya mengurangi sampah, menjadikan program 3R dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah tidak semuanya dapat mengatasi masalah volume sampah karena dengan hal tersebut akan menimbulkan masalah baru lainnya. Maka pengelolaan sampah sebaiknya dikelola oleh semua pihak yaitu pihak dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode/teknik *community development*. Pengembangan masyarakat menurut herbert J. Rubin and Irene S. Rubin. Mendefinisikan sebagai:

“suatu upaya pengembangan masyarakat lokal (local Empowering) melalui kegiatan kolektif dari kelompok-kelompok yang terorganisir untuk mengontrol keputusan, proyek, program, dan kebijakan yang mempengaruhi mereka sebagai sebuah komunitas. Dalam model ini digunakan berbagai pendekatan dan teknik pada masyarakat lokal yang terorganisasikan sebagai upaya untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer” (diterjemahkan)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang dirancang untuk membuat kondisi ekonomi dan sosialnya maju dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh sehingga dapat menciptakan prakarsa masyarakat itu sendiri. Sedangkan tujuan dari pengembangan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungannya. Maka metode tersebut melibatkan partisipasi dari masyarakat agar Indonesia bebas dari sampah.

Pengelolaan Sampah

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa dari berbagai macam bentuk, yaitu bentuk sampah padat, cair, dan gas. Akan tetapi, secara sederhana jenis sampah bisa terbagi menjadi dua bagian, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah tidak dapat terurai seperti karet, plastik, kaleng, dll. Sampah apabila dibiarkan saja tanpa ada pengelolaan akan menimbulkan berbagai macam masalah baik itu masalah lingkungan fisik, kesehatan manusia, dan masalah sosial. Sementara apabila sampah dikelola akan menciptakan sebuah peluang untuk dijakikan bisnis, lapangan pekerjaan, sumber energi, dan didaur ulang sehingga sampah dapat bermanfaat dan dapat menghasilkan nilai ekonomis. Maka dari itu pengelolaan sampah sangat dibutuhkan.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan dari material sampah. Pengelolaan sampah biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehaan dan lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperbaiki sumber daya alam yang sudah rusak. Dalam pengelolaan sampah agar dapat tercipta dan terlaksana dengan baik maka diperlukan peran serta atau partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pengembangan masyarakat. Dengan melihat partisipasi masyarakat sebagai kesatuan dalam proses pengembangan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan terkait dengan siskursus komuitas. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian

masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berangkat dari paparan diatas, menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pengelolaan sampah sangat diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan sebuah program. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipatif, potensi dan kreativitas masyarakat akan dapat lebih tergali.

Mikkelsen membuat daftar atau klasifikasi dari para praktisi pengelolaan sampah mengenai arti dari partisipasi. Pertama, Partisipasi diartikan sebagai pemaksaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pengelolaan sampah. Pemaksaan seperti ini agaknya kurang tepat karena memaknai partisipasi hanya sekedar meminta dukungan masyarakat terhadap semua program yang telah disiapkan. Pertemuan (rapat) dengan dalih partisipasi (minta masukan dari warga masyarakat) yang dilaksanakan tidak lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Hal demikian akan memunculkan partisipasi yang semu karena masyarakat tidak diberi hak untuk merancang program kecuali hanya sekedar diajak, dibujuk, diperintah dan bahkan dipisahkan oleh kelembagaan tertentu untuk ikut serta dalam suatu program yang telah dirancang sebelumnya.

Kedua, Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemaksaan ini hampir sama dengan pemaksaan yang pertama, yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek. Karena itu akhir capaian dari partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Masyarakat harus mendukung atau ikut program-program pemerintah secara gratis dengan alasan program-program tersebut pada akhirnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Proyek-proyek pengelolaan sampah yang memiliki anggaran tertentu harus dapat diselesaikan melalui penghematan-penghematan. Makin banyak penghematan atau makin murah biaya suatu proyek, maka dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat. Disini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Ketiga, Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaksaan seperti partisipasi masyarakat dalam program pengolahan sampah ini memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pengelolaan sampah yaitu mulai dari: 1). Keterlibatan pada identifikasi masalah, dimana masyarakat bersama-sama dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi peluang, potensi dan hambatan. 2). Proses perencanaan, dimana masyarakat

dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana dan strategi berdasar pada hasil identifikasi sebelumnya. 3). Pelaksanaan pengolahan sampah. 4). Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pengelolaan sampah yang telah dilakukan, apakah pengelolaan sampah memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan. 5). Monitoring dan 6). Mitigasi, yaitu terlibat dalam mengukur dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek yang sedang dilaksanakan.

Keempat, Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pengelolaan sampah yang telah ditentukan sendiri. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah, terlibat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan terlibat dalam memilih hasil dan manfaat pengelolaan sampah secara berkeadilan.

Kelima, Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pengembangan masyarakat, dimana dalam pengembangan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.

Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggungjawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Penjelasan tersebut sama dengan konsep pengembangan masyarakat.

Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Konsep atau metode pengembangan masyarakat (*community development*) berasal dari pengorganisasian masyarakat (*community organization*); yang bermakna mengorganisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem untuk melayani warganya dalam *setting* kondisi yang terus berubah. Dengan demikian inti pengertiannya adalah mendorong warga masyarakat untuk mengorganisasikan diri untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kesejahteraan sendiri.

Pengembangan masyarakat sebagai sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat. Sedangkan PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses tindakan sosial yang mendorong warga suatu masyarakat untuk:

- a. Mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk menyusun rencana dan melaksanakan tindakan bersama.
- b. Merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah bersama
- c. Menyusun rencana kelompok dan individu untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka sendiri.
- d. Melaksanakan rencana tersebut dengan sebanyak mungkin mengandalkan sumber-sumber yang ada.
- e. Menjangkau akses terhadap sumber-sumber diluar masyarakat baik dari badan-badan pemerintah maupun swasta guna mendukung sumber-sumber yang ada.

Teknik pengembangan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan karena masyarakat dalam mengolah sampah membutuhkan pengetahuan mengenai cara-cara pengolahan sampah yang benar. Oleh karena itu, dalam mengolah sampah dibutuhkan pengembangan yang diberikan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat yang sudah ahli dalam mengolah sampah. Sehingga masyarakat bisa mengolah sampahnya sendiri. Sejalan dengan pengembangan masyarakat menurut Rudito Bambang adalah suatu proses sosial dimana manusia dapat menjadi lebih kompeten untuk hidup dengan dan mempunyai sebuah kontrol atas sumber daya lokal. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungannya sendiri.

Pengembangan masyarakat dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat. Adanya pengembangan masyarakat dalam pengolahan sampah akan menumbuhkan partisipasi baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh faktor lain. Partisipasi dapat tumbuh dengan sendirinya apabila segala kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup. Faktor lainnya, partisipasi dapat tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena pergaulan hidup dalam bermasyarakat.

Kesimpulan

Dalam suatu program pemerintahan akan berhasil apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program. Karena apabila melibatkan warga masyarakat, maka masyarakat akan sadar bahwa program yang dibuat merupakan program yang penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan.

Referensi:

- Aziz Muslim., Pendekatan Partisipatif Dalam Pengembangan Masyarakat. Vol. VIII, No. 2 Desember 2007:89-103
- Britha, Mikkelsen., *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pengembangan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Terjemahan Matheos Nalle, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pengembangan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 227,228,229,230,231
- Wibhawa, Budhi., dkk. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Rudito, Bambang dkk. 2003. Akses Peran Masyarakat “Lebih Jauh Memahami Community Development”. Jakarta : ICSD

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN

Oleh:
Yesi Fitriani, & Hery Wibowo

Email :
(yesifitriani39@gmail.com; hery_fortune@yahoo.com)

ABSTRAK

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Paparan singkat ini bertujuan untuk memberikan gagasan mengenai program-program pemberdayaan baik oleh pemerintah maupun swasta. Ditengah gencarnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, meskipun berbagai prestasi yang telah dicapai tetapi di sisilain masih terdapat banyak catatan buruk mengenai implementasi dan hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Dapat dilihat dari beberapa program pemberdayaan yang dijalankan selama ini, terutama oleh pemerintah pusat. Betapa banyak program pemberdayaan yang dijalankan namun berakhir dengan kegagalan. Atau pada kondisi lain, misi pemberdayaan yang diemban program-program tersebut justru bermuara pada semakin tidak berdayanya kelompok masyarakat yang seharusnya diberdayakan.

Berpijak pada perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, bahwa membangun dan memberdayakan masyarakat memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan isu-isu lokal dan global. Hal ini dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Kata kunci : Pembangunan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan, Program

Pendahuluan

Pembangunan masyarakat seringkali memakai istilah pemberdayaan masyarakat, karena dalam perkembangannya istilah pemberdayaan ini telah menjadi wacana (*discourse*) publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci (*key word*) bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat (Huraerah, 2011: 95). Hal tersebut sejalan dan dapat dibuktikan dengan banyaknya program-program pemerintah yang bertemakan pemberdayaan, mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (1994-1998), Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Jaring Pengaman Sosial (JPS), P2KP, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan sebagainya.

Namun pada kenyataannya meskipun sedang gencar-gencarnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pada pelaksanaannya program pemberdayaan

kini tengah kehilangan makna pemberdayaan sebenarnya. Dapat kita rasakan sendiri program pemberdayaan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, justru membuat masalah sosial baru. Serta pada pelaksanaannya masih banyak memiliki kekurangan, hal ini sejalan dengan pendapat oleh Ife, (1996:56)

“..., pemberdayaan menjadi “*trademark*” atapun jargon yang dapat dicontohkan pada agenda dan kegiatan apa saja. Kondisi ini, dalam batas-batas tertentu, telah menyebabkan reduksi makna pemberdayaan sekaligus membelokkan pemberdayaan dari orientasi awalnya. Dengan kata lain, pemberdayaan telah semakin kehilangan makna substantifnya bersamaan digunakannya konsep tersebut untuk berbagai situasi dan kondisi.”

Seperti yang diungkapkan di muka, bahwa banyak sekali program pemberdayaan yang menuai kegagalan. Serta banyak kelompok target yang menjadi sasaran pemberdayaan justru menjadi korban dari program pemberdayaan itu sendiri. Satu-satunya program pemberdayaan yang cukup sukses dalam mengetaskan kemiskinan adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang digulirkan pada masa Soeharto. Program tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil menanggulangi kemiskinan, karena terjadi peningkatan 20% saat itu. Namun, ketika tahun 1997 Indonesia mengalami krisis keuangan, jumlah orang miskin yang tadinya berkurang secara drastis meningkat lagi.

Contoh lainnya seperti pada program BLT, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disebut juga dengan Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 lalu. BLT ini disalurkan secara langsung dan tunai diberikan melalui cabang-cabang PT. Pos Indonesia, dengan alokasi anggaran untuk setiap rumah tangga miskin mendapatkan jatah Rp. 100.000,- /bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Pada pelaksanaannya program BLT ini cukup menuai kontroversi, karena bahwasanya pelaksanaan program BLT ini memiliki catatan-catatan buruk. Seperti, banyaknya penerima bantuan yang bukan penyandang masyarakat golongan tidak mampu atau miskin (tidak tepat sasaran), penerima bantuan tidak sepenuhnya menerima uang dengan jumlah sebenarnya hal ini terjadi karena ada sistem yang dibuat oleh masyarakat. Dengan beralasan masih banyaknya Kepala Keluarga yang tidak mampu, belum terdaftar menjadi penerima program maka penerima program yang telah terdaftar harus memotong uang bantuan sebagian untuk diberikan kepada Keluarga miskin yang lain. Fenomena ini memperjelas bahwa tidak efektifnya program BLT ini, selain permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya yang dampak yang terpenting perlu di fahami adalah bahwa program ini menimbulkan efek ketergantungan pada masyarakat.

Hal serupa terjadi pada program PNPM, program PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin

dengan melibatkan semua komponen masyarakat (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten, dinamis dan berkelanjutan. Jika melihat pedoman pelaksanaan program ini, rangkaian pemberdayaan meliputi *capacity building* masyarakat. Dimana dalam kegiatan tersebut menekankan pada proses pendampingan melalui fasilitator, mediasi, pengembangan kapasitas, dimana relawan adalah aktor utama penggerak masyarakat. Selain itu, penyediaan dana bagi masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Serta tidak ketinggalan adalah penyediaan sarana dan prasarana fisik, sosial, ekonomi secara padat karya.

Meskipun program berbasis masyarakat, program PNPM Mandiri belum cukup memperlihatkan pencapaian yang berhasil memberdayakan masyarakat. Pada pelaksanaannya yang terjadi dilapangan, diantaranya masyarakat membuat program yang akan dilaksanakan diwilayahnya hanya berorientasi pada masalah pembangunan fisik seperti sarana prasarana umum (perbaikan jalan, pembangunan sekolah). Bukan dalam arti perbaikan secara fisik tidak penting, akan tetapi kapasitas masyarakat turut serta penting menjadi ukuran keberhasilan pemberdayaan.

Lalu apa yang salah pada program-program pemberdayaan masyarakat selama ini, sehingga permasalahan masyarakat tidak kunjung selesai meskipun dengan telah banyaknya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Maka hal yang perlu dilakukan adalah meninjau lebih dalam terkait dengan program pemberdayaan masyarakat apakah program yang dilaksanakan telah memberdayakan apa sebaliknya, serta perlu adanya peninjauan ulang mengenai makna pemberdayaan itu sendiri.

Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat kini mengalami penyempitan makna, dapat terlihat dari dominannya program-program pengembangan masyarakat (community development) yang bermatra usaha ekonomi produktif berskala mikro, seperti “warungisasi” (setiap kelompok sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal agar dapat membuka warung) atau “kambingisasi” (pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok) (Suharto, 2005).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa, kegiatan pemberdayaan selama ini hanya berorientasi lokal. Memang tidak ada yang salah dengan pendekatan secara lokal. Hanya saja tanpa dengan adanya perspektif holistik (luas) yang memadukan kegiatan-kegiatan lokal dengan analisis kelembagaan dan kebijakan sosial secara terintegrasi, pendekatan tidak akan berkelanjutan.

Pendekatan secara holistik ini merupakan pendekatan dengan melihat aspek yang mempengaruhi secara keseluruhan (sistem sosial secara luas), misalnya mengenai pembangunan sosial, kebijakan sosial dan sistem sosial lainnya yang ada dalam masyarakat apakah telah mendukung dalam keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat atau malah sebaliknya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan, sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mengenai pemberdayaan sejatinya memiliki makna dan aktifitas tersendiri yang bertujuan untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, hal ini dikemukakan oleh Wilson (Sumaryadi, 2004) bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat / perbaikannya.
5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang tepat menunjukkan seseorang atau kelompok itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Maka yang menjadi pertanyaan besar adalah, sudahkah program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama ini berhasil membuat kelompok rentan atau tidak berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti yang sudah disebutkan tadi dalam indikator pemberdayaan?

Maka jawabannya dapat kita lihat sendiri bahwa pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah terutama ataupun swasta, program yang digulirkan belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan meskipun tidak semua pemberdayaan yang berakhir kegagalan.

Terpusatnya perhatian pada upaya pemberdayaan masyarakat, terutama untuk golongan yang kurang beruntung (*powerless*), merupakan cara pandang simplistik yang berusaha mengeliminasi persoalan ketidakberdayaan pada kelompok masyarakat. Sementara realitas ketidakberdayaan pada dua pilar *good governance* lainnya masih agak luput dari perhatian. Hal itu menjadi salah satu penyebab, bahkan penyebab utama, gagalnya program-program pemberdayaan selama ini adalah masih kuatnya peran negara, dan oleh karenanya, sangat bias kepentingan negara yang antara lain dapat dilihat dari model pendekatan yang digunakan (Fakih, 1996 dalam artikel KPEL).

Selain itu, kegagalan kebijakan-kebijakan pemberdayaan juga disebabkan oleh tidak adanya pendekatan yang baik dan integral yang mampu menjamin sustainability program. Hal tersebut telah disinggung sebelumnya, bahwa kegagalan program pemberdayaan juga dapat disebabkan karena tidak memperhatikan aspek sistem sosial yang lebih luas. Justru dengan sistem sosial ini berpengaruh terhadap keberlangsungan program pemberdayaan, sejalan dengan pendapat tersebut Rubin, 1986 berpendapat bahwa

“..., kelembagaan merupakan salah satu jalan keluar yang menjanjikan “.

Kelembagaan disini merupakan salah satu sistem sosial yang mendukung dan berpengaruh terhadap keberlangsungan program pemberdayaan. Dengan berbagai karakter inherennya, pendekatan ini mampu menjamin sustainability kebijakan apapun yang sedang dijalankan sejauh diintroduksi secara konsisten. Tuntutan ini sekaligus menjadi salah satu titik terlemah dalam berbagai program pemberdayaan yang dijalankan selama ini.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai konsep pemberdayaan, dan beberapa implementasi beberapa program pemberdayaan. Maka penulis berkesimpulan, bahwa pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dan terjadi banyak kekurangan serta pada program pemberdayaan telah kehilangan makna pemberdayaan sebenarnya. Berikut point alasan kenapa program pemberdayaan selalu berakhir pada kegagalan,

- Program pemberdayaan masih banyak bersifat karikatif
Pemberian bantuan-bantuan sosial yang bersifat karikatif memang perlu, asalkan tidak dijalankan secara terus menerus, karena hal ini menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memberdayakan diri secara mandiri. Seperti misalnya program BLT, pemberian bantuan ini masih sebatas memenuhi *basic needs* masyarakat.
- Kebijakan program tidak disertai dengan manajemen yang baik
Seperti halnya penyaluran program Raskin dan BLT tidak tepat sasaran, akibat dari data penduduk yang tidak valid yang dipakai pemerintah. Contohnya orang sudah meninggal dicatat sebagai penerima bantuan ataupun keluarga yang mampu secara ekonomi pun juga menerima.
- Program pemberdayaan masih bersifat tidak berkelanjutan, disebabkan program yang dibuat tidak serta didukung dengan sistem sosial yang mempengaruhi berjalannya program.
- Tidak banyak program yang dibuat secara partisipasi, dalam arti partisipasi disini adalah masyarakat ikut serta dalam pembuatan program.

Saran

Salah satu alternatif untuk program pemberdayaan di bidang ekonomi adalah pengembangan ekonomi lokal, sebetulnya program di bidang ekonomi ini telah dilakukan oleh beberapa pihak pemerintah maupun swasta. Namun, program pengembangan ekonomi lokal ini masih belum banyak dilakukan dan bahkan belum optimal.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Dari sisi masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen

kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun asset pengalaman (Haeruman, 2001 dalam artikel KPEL).

Pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan ekonomi lokal tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang.

Maka jika dilihat program pemberdayaan melalui dengan pengembangan ekonomi lokal, serta didukung dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (*capacity of institutions*) akan membuat program pemberdayaan cukup berhasil.

Adapun untuk masa-masa yang akan datang, upaya pemberdayaan dalam hal apapun harus terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan fundamental berikut:

Pertama, siapa atau kelompok mana yang harus diberdayakan? Pertanyaan tersebut akan mengarahkan pada upaya identifikasi secara obyektif dan relatif komprehensif aktor-aktor mana yang menentukan masa depan pembangunan, tetapi mengalami banyak keterbatasan, dan oleh karenanya, harus dijadikan sasaran pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, pertanyaan tersebut akan mengarah pada *economic cluster* yang semakin spesifik seperti kelompok petani, nelayan, pengusaha kecil, pedagang eceran, dan sebagainya. Identifikasi semacam itu sangat penting sehingga nantinya dapat ditetapkan strategi yang tepat dalam sebuah konteks yang spesifik. Sebaliknya, identifikasi yang kabur dan cenderung bias akan berakibat pada kesalahan menentukan kelompok sasaran serta strategi implementasinya. Muaranya adalah, lagi-lagi, terjadinya kegagalan dalam upaya pemberdayaan.

Kedua, dalam hal apa kelompok-kelompok yang telah diidentifikasi tadi harus diberdayakan? Atau singkatnya, apa yang mau diberdayakan? Pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan persoalan fundamental apa yang benar-benar dialami suatu kelompok. Dikatakan fundamental apa yang benar-benar sedang dialami suatu kelompok. Dikatakan fundamental karena persoalan tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan dan akses mereka dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan derajat keberdayaannya. Pada tataran yang lebih riil, pertanyaan tersebut akan berhubungan dengan pilihan hidup seseorang atau suatu kelompok, proses definisi kebutuhan untuk mewujudkan pilihan tersebut, bagaimana pengembangan gagasan, bagaimana mengembangkan institusi atau organisasi pendukung, sumberdaya apa yang paling dibutuhkan, apa aktivitas-aktivitas ekonomi pokoknya, bagaimana sistem produksi, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya pemberdayaan tidak saja memiliki objek yang jelas tetapi juga fokus yang spesifik.

Ketiga, bagaimana atau dengan cara apa pemberdayaan dilakukan? pertanyaan tersebut berkaitan dengan strategi yang akan ditempuh untuk mengupayakan pemberdayaan. Pertanyaan itu sangat mendasar, dan karenanya,

harus dijawab dengan tepat sehingga upaya implementasi program-program pemberdayaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sebaliknya, pilihan strategi yang keliru akan berakibat pada gagalnya misi pemberdayaan yang diemban suatu program atau kebijakan. Atau lebih buruk lagi, program pemberdayaan yang coba diintroduksi untuk memperbaiki nasib target group itu tidak memberikan solusi apa-apa, tetapi malah menciptakan masalah baru.

Daftar Pustaka

- Huraerah, Abu (2011). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Bandung: Humaniora
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka, ed. (1996). Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta : CSIS
- Suharto, Edi (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : PT. Refika Aditama
- Wibhawa, Raharjo dan Budiarti S (2010). Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial, Bandung: Widya Padjadjaran
- Wiranto, Tatag dan Tarigan, Antonius (2002). Artikel : Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), : Universitas Gajah Mada

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Oleh :
Endah Puspa Pratiwi, & Budhi Wibhawa

Email:
(endahpuspap@gmail.com; budhiwibhawa@gmail.com)

ABSTRAK

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang cukup memegang peranan penting di masyarakat, dengan di satu sisi pendidikan mengalami problem yang semakin meningkat, membangun suatu komunitas dalam menciptakan perubahan yang diharapkan menjadi satu langkah yang harus terus dilakukan (keberlanjutan), peran *stakeholder* dibutuhkan dalam setiap proses pendidikan. Salah satunya dapat melalui program keaksaraan fungsional, program ini mempunyai tujuan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Pengembangan pendidikan non formal ini pada dasarnya merupakan sarana substansial untuk membantu masyarakat yang mengalami buta aksara supaya dapat mengenal angka dan huruf tanpa terhalang oleh biaya, tempat, usia, dan lain sebagainya. Ditambah dengan ada sekitar 300.000 – 400.000 anak yang potensial buta aksara akibat putus sekolah di kelas 1-3 SD. Sehingga tingginya masalah buta aksara pada penduduk usia produktif dan usia sekolah perlu penanganan secara khusus. Dalam program ini pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dengan prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang mengalami buta aksara.

Kata kunci: pendidikan non formal, keaksaraan fungsional, PKBM

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam menyiapkan generasi berkualitas, sebagai institusi utama dalam upaya pembentuk sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, pendidikan menjadi *taken for granted* terkait dengan eksistensi suatu bangsa. Dengan perkembangan jaman dan teknologi yang semakin pesat menuntut individu untuk dapat beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Di era globalisasi seperti ini, keterampilan dan keahlian menjadi dasar utama yang dapat mengantarkan seseorang menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan lebih baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau keahlian tersebut, salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU

Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan lingkungan hidup berkelompok untuk mengembangkan dirinya, serta mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi (materi dan spiritual). Proses belajar menjadi satu fase penting yang dilalui oleh setiap individu tidak terlepas dari motivasi apa yang melatarbelakanginya untuk mau belajar. Supaya siap dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi.(Bigge and Hunt, 1969, p.260).Oleh sebab itu, pendidikan sebagai suatu subsistem memegang peranan penting dalam membangun kualitas masyarakat kearah yang lebih baik.

Namun pada praktiknya, pendidikan yang terjadi di masyarakat mengalami banyak hambatan dan tantangan tersendiri yang sangat memprihatinkan. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas secara signifikan, tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai orientasi pendidikan yang sebenarnya sedang ingin dicapai.Menurut Syafaruddin anzizhan dalam bukunya yang berjudul *sistem pengambilan keputusan pendidikan* menyatakan bahwa problem dunia pendidikan khususnya yang ada di sekolah semakin kompleks dari tahun ke tahun masih banyak masyarakat yang putus sekolah, tinggal kelas, motivasi belajar rendah, kemampuan menerima pelajaran lemah, dan prestasi tak dapat dibanggakan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya keterbatasan biaya, sulitnya akses pendidikan, hingga pergaulan dan budaya yang masih tertanam kuat di masyarakat (faktor lingkungan).

PEMBAHASAN

Isu pendidikan telah menjadi salah satu permasalahan serius yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan yang optimal dari semua kalangan masyarakat.Banyak faktor yang menyebabkan sistem pendidikan tidak berjalan secara maksimal.Menurut Muhammad Firman (2009), faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab paling dominan putus sekolah. Kenyataanitu dibuktikan dengan tingginya angka rakyat miskin di Indonesia yang anaknya tidak bersekolah atau putus sekolah berasal dari aspek internalnya, yaitu tidak adakeinginan atau motivasi untuk melanjutkan sekolah dalam diri anak sehinggamenyebabkannya memutuskan untuk berhenti sekolah. Burhannudin (dalam Prihatin, 2011), menyatakan bahwa setidaknya ada enam faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau jarak sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatin Pebriana dengan judul skripsi Faktor-Faktor Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun 2011.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditemukan penyebab anak putus sekolah dari faktor ekonomi keluarga dan perhatian orang tua. Dari faktor ekonomi keluarga antara lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah mengakibatkan terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup termasuk pendidikan. (Prihatin Pebriana, 2011).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Ayu Krisna Dewi¹, Anjuman Zukhri¹, I Ketut Dunia² (2014) mengenai analisis *faktor penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013* menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah diantaranya:

1. faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
2. Kurang perhatian orang tua, rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.
4. Rendahnya minat bersekolah, minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman.
5. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah diarahkan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
6. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit

merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Selain itu juga dengan akses yang dirasa sulit, keselamatan pun dianggap tidak terjamin.

Baharuddin M (1982:320) juga mengatakan: “Nampaknya di negara kita faktor dana merupakan penghambat utama, untuk mengejar ketinggalan kita dalam dunia pendidikan. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa dana yang cukup, tidak akan dapat diharapkan pendidikan yang sempurna. Selain faktor ekonomi, sarana dan prasarana sekolah juga ikut menentukan seseorang mengalami putus sekolah. Baharuddin M (1982:320) mengemukakan bahwa: Apabila faktor sarana tidak terpenuhi, maka banyak murid usia sekolah, maupun berbagi tingkat pendidikan yang tidak bisa bersekolah, atau tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Bila hal tersebut terjadi berarti “putus sekolah” pun terciptalah dikarenakan faktor tersebut. yang vital adalah kurangnya pengadaan sarana tempat belajar dan pengadaan guru. Lingkungan dan masyarakat juga tidak terlepas menjadi faktor penyebab seseorang mengalami putus sekolah.

A.H. Harahap (1981:143) juga menyatakan bahwa lingkungan masyarakat merupakan faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi perkembangan anak remaja yang sulit dikontrol pengaruhnya. Orang tua dan sekolah adalah lembaga yang khusus, mempunyai anggota tertentu, serta mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang pasti dalam mendidik anak. Berbeda dengan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan. Berlaku untuk segala tingkatan umur dan ruang lingkup yang sangat luas.

Mencari dan menemukan solusi dari semua permasalahan pendidikan diatas tidaklah sepraktis dan semudah yang dibayangkan, melakukan suatu perubahan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang berkesinambungan antara semua pihak. Salah satunya yaitu masyarakat, masyarakat yang transparan adalah masyarakat yang anggotanya langsung berpartisipasi di dalam pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan harus mengikutsertakan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakatlah yang menjadi *stake-holders* pertama dan utama dari proses pendidikan tersebut. Menurut M. Sobry Sutikno dalam bukunya yang berjudul *pendidikan sekarang dan masa depan: pemberdayaan dalam upaya mengelola pendidikan* merupakan salah satu perwujudan dari demokratisasi pendidikan. Tidak mengherankan dewasa ini, muncul suatu gerakan yang bernama *community-based education, community-based education* merupakan dasar dari pembangunan suatu masyarakat yang demokratis (Edward B. Fiske, 1998:26).

Untuk mengatasi persoalan di atas pendidikan non formal menjadi suatu alternatif solusi tersendiri. PNF juga menjadi salah satu upaya dalam perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat. Coombs (Trisnamansyah, 2003: 19) mendefinisikan nonformal *education* sebagai setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan baik dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian penting dari kegiatan yang lebih besar, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai

tujuan belajarnya. Berbeda dengan pendapat dari Sudjana (2000: 63) yang menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah telah hadir di dunia ini sama tuanya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini dimana situasi pendidikan ini muncul dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan sekolah lahir di dalam kehidupan masyarakat. Pada waktu permulaan kehadirannya, pendidikan luar sekolah dipengaruhi oleh pendidikan informal, yaitu kegiatan yang terutama berlangsung dalam keluarga dimana terjadi interaksi di dalamnya berupa transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan. Artinya pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat, jauh sebelum masyarakat menyadari akan pentingnya sebuah pendidikan itu sendiri.

Salah satu pengembangan pendidikan yang berbasis masyarakat (*community-based education*) yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah dibentuk dan dilegalisasi keberadaannya dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 26 ayat 4. Dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal, lembaga ini telah diakreditasi sejak Tahun 2010 oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). Program-program yang diselenggarakan di PKBM sangat beragam dan tidak terbatas. Namun, harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan relevan dengan suatu kondisi masyarakat PKBM itu berada (<http://pkbm-Indonesia.com/pkbm>).

Menurut Mustofa kamil dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Non Formal: Pengembangan melalui PKBM*: Pendidikan non-formal sebagai bagian dari system pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat terutama masyarakat sasaran pendidikan non-formal. Sasaran pendidikan non-formal yang semakin luas yang tidak hanya sekedar berhubungan dengan masyarakat miskin dan bodoh (terbelakang, buta pendidikan dasar, drop out pendidikan formal), akan tetapi sasaran pendidikan non-formal terus meluas maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertaperkembangan lapangan kerja dan budaya masyarakat itu sendiri. Mengingat sasaran tersebut, maka program/kegiatan pendidikan non-formal harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat.

Menurut salah satu data dari PKBM Riau menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan penduduk usia 15 tahun hanya 7,1 % dibawah pendidikan dasar 9 tahun. Angka partisipasi sekolah penduduk usia SD (7-12 tahun) 96%, usia SMP (13-15 tahun) 81% dan SMA (16-18 tahun) 50,97 %. Angka partisipasi sekolah ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah penduduk yang tidak dapat meneruskan semakin tinggi pula. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 %, kondisi ekonomi nasional masih labil, dunia usaha belum normal, pertumbuhan angkatan kerja berkisar 2,3 – 2,75 juta orang, pemutusan hubungan kerja terjadi, dan daya beli masyarakat turun terus. Kondisi ini akan berakibat langsung dengan ketidakmampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-

anaknya dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan, dengan sarana infrastruktur yang ada sangat minim sehingga tidak mendukung untuk pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonominya. Tentu banyak faktor yang menyebabkannya, fakta menunjukkan bahwa karena kemiskinan dan kondisi daerah menjadi penyebab permasalahan.

Krisis yang terjadi khususnya krisis ekonomi langsung mempengaruhi peta pendidikan dan kondisi sosial masyarakat. Angka putus sekolah meningkat, lapangan kerja semakin langka, dan jumlah pengangguran bertambah, sehingga putaran kemiskinan kembali terjadi yang menyebabkan kualitas pendidikan penduduk rendah, sehingga produktivitas masyarakat juga akan rendah. Masih tingginya buta aksara pada penduduk usia produktif dan usia sekolah perlu penanganan secara khusus. Secara keseluruhan tercatat sebanyak 18,7 juta penduduk buta aksara, dan dari jumlah tersebut sebesar 5,2 juta adalah penduduk usia produktif. Ditambah lagi diperkirakan ada sekitar 300.000 – 400.000 anak yang potensial buta aksara akibat putus sekolah di kelas 1-3 SD, dan sekitar 3 juta anak yang tidak tertampung atau mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMP/MTs.

Dalam bukunya Mustofa Kamil juga menjelaskan salah satu program yang ada di PKBM yaitu program keaksaraan fungsional, program ini bertujuan membelajarkan masyarakat (warga belajar) agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Program keaksaraan diselenggarakan secara massal dengan melibatkan berbagai masyarakat dan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pembebasan buta aksara. Kesadaran ini didasarkan pada tanggung jawab dalam pembebasan buta aksara dan atas pandangan bahwa terdapat hubungan antara kebuta aksaraan dengan kemiskinan. Program Keaksaraan Fungsional adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya. Program keaksaraan mempunyai dua tahapan yang pertama adalah tahap keaksaraan dasar dan tahap keaksaraan mandiri. Tahap keaksaraan dasar adalah warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang calistung (baca tulis hitung) tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah tahap keaksaraan mandiri pada tahap ini warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selanjutnya diarahkan kepada tahap kemandirian.

KESIMPULAN

Perubahan jaman yang semakin canggih membuat individu untuk dapat beradaptasi dengan setiap perubahan. Pendidikan sebagai suatu subsistem yang cukup memegang peranan penting dalam mensejahterakan kehidupan bangsa, saat ini dianggap mengalami banyak kegagalan dari setiap sistem dan prakteknya. Hal

tersebut terlihat dari masih tingginya angka putus sekolah yang dialami oleh masyarakat sehingga berpotensi mengalami buta aksara.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, diantaranya faktor ekonomi keluarga, fasilitas pendidikan yang kurang, minat belajar rendah, perhatian orang tua, partisipasi masyarakat yang menurun, hingga akses pendidikan yang masih sulit didapat oleh sebagian masyarakat. Pendidikan formal dianggap belum cukup memainkan perannya dalam mengatasi setiap permasalahan tersebut. Hingga munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola pendidikan di luar lingkup pendidikan formal membuat suatu kondisi baru yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan fenomena tersebut.

Bagaimanapun, masyarakat yang mengalami buta aksara tetap memiliki hak untuk dapat mengembangkan setiap kemampuan dan potensinya terlepas dari hambatan yang dihadapi seperti batas usia dan financial. Cara lain dalam pembaharuan pendidikan yaitu melalui pengembangan pendidikan masyarakat lokal yang berbasis masyarakat (*school-based education*) melalui pembentukan Program keaksaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamalik, Oemar (1989). *Metodologi Pengajaran Ilmu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Harahap, A.H (1981). *Bina Remaja*. Medan: Yayasan Bina Pembangunan Indonesia
- Kamil, Mustofa (2009). *Pendidikan Non Formal Pengembangan melalui PKBM*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- M, Baharuddin (1982). *Putus Sekolah dan Masalah Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66
- Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc. Ed (1999). *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Sutikno, M. Sobry (2006). *Pendidikan Sekarang dan Masa Depan Suatu Refleksi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermakna*. Mataram-Lombok: Penerbit NTP PRESS
- Sudjana, D. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah. Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falasafah, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Penerbit Falah Production.
- Trisnamansyah, Sutaryat. (2003). *Materi Pokok Perkuliahan Filsafat, Teori, dan Konsep Dasar PLS*. Bandung: Makalah tidak diterbitkan

Sumber lain

- Burhannudin (2008). *Penetaan Anak Tidak dan putus Sekolah di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Besar Usia 5-12 Tahun*. http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_peserta/30_Burhanudin_Pemetaan.pdf. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 17.34 WIB
- Dewi, Ni Ayu Krisna dkk., (2004). *Analisis Faktos-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Kecamatan Gerokgat Tahun 2012/201*. Vol 4. No 1. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/viewFile/1898/1650>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 19.33 WIB
- Firma, Muhammad (2009). *Problem Putus Sekolah yang Kompleks*. http://kosmo.vivanews.com/news/read/70884problem_putus_sekolah_yan_g_kompleks .Diakses pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 17.44 WIB
- PKBM Pelita riau (2012). *Pkbm Solusi Pendidikan Memberdayakan Masyarakat Marginal*. <http://pkbmpelitariau.wordpress.com/artikel/> . 14 Desember 2014 pukul 19.53 WIB

APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR

Oleh:

Muhammad Fahmi Amrullah, Moch Zainuddin & Muhammad Fedryansyah

Email:

(fahmimahameru@gmail.com; moch.zainuddin57@gmail.com;
fedry_cons@yahoo.com)

ABSTRAK

Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Melihat kondisi kecamatan Jatinangor yang semakin maju di bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesehatan, tidak dapat dipungkiri permasalahan-permasalahan yang ada pun semakin kompleks sebagai dampak dari kemajuan tersebut. Khusus dalam bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Jamkesda merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin akses untuk masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh daerah. Melihat RPJMD Kabupaten Sumedang tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) maka dalam mengaplikasikan kebijakan, semua orang harus ikut serta mengawasi dimulai dari proses formulasi kebijakan sampai dengan proses implementasi kebijakan di masyarakat. Hal ini sangat penting jika kebijakan sosial mampu di terapkan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Proses pembentukan kebijakan ini meliputi *political sphere*, *administrative sphere*, dan *operational sphere*. Oleh sebab itu jika kebijakan jaminan kesehatan ini mampu di implementasikan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Kata kunci: Kesehatan, jaminan kesehatan, dan formulasi kebijakan

PENDAHULUAN

Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Melihat kondisi kecamatan Jatinangor yang semakin maju di bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan dan lain-lain, begitu pula pertumbuhan permasalahan-permasalahan yang juga semakin kompleks. Khusus dalam bidang kesehatan pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Jaminan kesehatan Semesta (Jamkesta), yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat atau bagi seluruh penduduk Sumedang akan dimulai pada 2014. Saat ini, masyarakat Sumedang yang terlindungi asuransi kesehatan hanya 30

persen. Itupun ada yang disubsidi pemerintah ada yang tidak, seperti askes, jamkesmas, jamkesda, dan jamsostek, serta asuransi kesehatan lainnya.

Saat ini sekitar 63,5 persen penduduk Indonesia atau 151,5 juta jiwa telah mempunyai jaminan kesehatan dengan berbagai cara penjaminan. Itu termasuk para peserta Jamkesmas, Jamkesda, Askes, PNS Pensiunan dan Veteran, TNI POLRI aktif, Jamsostek, jaminan oleh perusahaan dan individu peserta jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi kesehatan swasta. Artinya, masih terdapat 37 persen penduduk atau 87 juta jiwa yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan.

Setiap pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten atau kota wajib menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah. Berupa RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk kurun waktu perencanaan 20 tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurun waktu perencanaan 5 tahun dan, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) untuk kurun waktu perencanaan 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah bentuk perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Melihat RPJMD Kabupaten Sumedang tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

PEMBAHASAN

Jaminan Kesehatan Daerah

Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda adalah bentuk perlindungan di bidang sosial, dalam Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2010, apa yang dimaksud dengan Jamkesda adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin akses untuk masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh daerah.

Menurut konsep diatas pada dasarnya kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dibuatlah sistem perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat akan berdampak pula pada aspek-aspek lainnya.

Oleh karena itu maksud dan tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah sebagai landasan awal untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, melalui upaya pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia dan pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Terselenggaranya jaminan kesehatan oleh pihak masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, sehingga tercapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya meliputi :

1. Pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh peserta
2. Pemberian kemudahan terhadap keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta

3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang tersetandar bagi peserta
4. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Setiap penduduk kabupaten sumedang wajib menjadi anggota Jamkesda. Peserta wajib terdaftar dengan diberikan kartu identifikasi peserta. Pengaturan kepesertaan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Kebijakan Sosial

Dalam buku “*Social Policy in The Post-Welfare State – Adam Jamrozik*” kebijakan sosial memiliki pengertian :

Social policy is concerned with the regulation of social relationships for the purpose of affirming certain values and interest through the implementation of appropriate means designed to achieve corresponding ends (Gil 1976).

Terkait pengertian “*through the implementation of appropriate means*” jika kebijakan sosial mampu di terapkan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.(Jamrozik,1992) Kebijakan di bagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahapan pertama yaitu *Political Sphere (policy formulation)*. Tahapan ini yaitu dimana setiap aturan yang dibuat pemerintahan baik undang-undang sampai dengan peraturan daerah di terjemahkan kedalam sebuah kebijakan. Selanjutnya adalah tahapan *Administrative Sphere*. Dalam tahap ini, semua bentuk birokrasi pemerintah dan non pemerintah menginterpretasikan kebijakan menjadi sebuah program-program. Menurut Jamrozik untuk menginterpretasikan kebijakan ini mampu dilakukan oleh “*one of government department or non-government sector*”.

Jamrozik menyebutkan dalam tahapan ini sebagai regulator, dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang *as the govrnment department*. Tahapan selanjutnya adalah *Operational Sphere*. Dalam tahapan ini produk dari kebijakan yaitu program-program diimplementasikan (*policy application*). Pelaksanaan program Jamkesda dalam hal ini yaitu puskesmas sebagai implementor.

Akhir-akhir ini penyelenggaraan jaminan kesehatan sering terdengar berita sulitnya masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan. Misalnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Banyaknya masyarakat yang masih sulit mendapatkan perlindungan atau jaminan keehatan menjadi alasan utama, apakah program jaminan kesehatan daerah sudah sesuai dengan proses formulasi kebijakan kesehatan. Apakah permasalahan ini diakibatkan kesalahan formulasi kebijakan, yang mana tahap formulasi kebijakan ada tiga yaitu *Political Sphere, Administrative Sphere, dan Operational Sphere* (Jamrozik, 1992). Oleh karena itu dalam mengaplikasikan kebijakan harus diawasi penuh oleh berbagai pihak agar implementasi program yang sudah di rancang yaitu Jaminan Kesehatan Daerah bisa terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan, untuk menjamin akses

bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu maksud dan tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah sebagai landasan awal untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan, melalui upaya pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia dan pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Fasilitas kesehatan harus semakin ditingkatkan, dan fasilitas kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat yaitu puskesmas dan klinik seharusnya bisa melayani pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Daerah. Oleh sebab itu jika kebijakan jaminan kesehatan ini mampu di implementasikan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Colby, Ira.C. 2008. *Social Work and Social Welfare – Social Policy and Policy Practice*.USA. John Wiley & Sons, Inc.
- PUSDATIN, Kesos.2009.“GLOSARIUM-Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Jakarta. Departemen Sosial Republik Indonesia
- Zamrozik, A. (2009). *Social Policy In The Post-Welfare State*. australia.
- Zastrow, Charles.1994.“*The Practice of Social Work – 5th Edition*”.California. Brooks/Cole Publishing Company

PENTINGNYA PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Oleh:

Dwi Putri Apriyan, Ishartono, & Maulana Irfan

Email:

(kesosish@gmail.com; ishartonopeksos@gmail.com; sangirfan@gmail.com)

Abstrak

Permasalahan di dalam lingkup pendidikan kini mulai bermunculan dikarenakan kenakalan remaja yang melanggar norma hukum. Salah satunya adalah tawuran remaja. Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan kriminal, sebab telah banyak siswa yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Perilaku menyimpang yang terjadi disebabkan oleh faktor internal yaitu yang berasal dari diri individu itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu lingkup yang sering berhubungan dengan individu yaitu lingkungan sosialnya. Di dalam profesi pekerjaan sosial, ada salah satu cabang yang khusus memberikan pelayanan bagi para siswa disekolah, yaitu pekerja sosial di lembaga pendidikan (*School Social Work*). Dalam permasalahan ini, pekerja sosial memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Pihak sekolah bekerja sama dengan pekerja sosial untuk melakukan pendekatan terhadap pelajar untuk menanamkan nilai-nilai yang benar. Pelayanan pekerjaan sosial sebagai bagian dari program sekolah memberikan pertolongan terhadap anak-anak yang memiliki permasalahan sosial dan emosional yang menjadi penyebab kesulitan bagi mereka dalam penyesuaian di sekolahnya. Di negara maju, profesi ini sudah menjadi salah satu unsur dari sistem pendidikan. Tugasnya memberikan pelayanan konseling kepada para siswa yang mengalami problem, baik disekolah maupun di rumah. Namun sebaliknya, profesi pekerja sosial dalam bidang pendidikan belum cukup dikenal. Pekerjaan sosial sekolah perlu diakui eksistensinya oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan bidang pekerjaan sosial, utamanya pekerjaan sosial di dunia pendidikan. Peran pekerjaan sosial sekolah merupakan peran strategis yang penting ketika siswa menemui kendala-kendala dalam perkembangan sosialnya.

Keyword: pekerja sosial, eksistensi, *school social work*

Pendahuluan

Kenakalan remaja meliputi perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun menyimpang dari norma-norma hukum. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Contoh kenakalan remaja yang melanggar hukum, salah satunya adalah permasalahan tawuran di kalangan pelajar semakin banyak, dampak dari tindakan tersebut mengakibatkan korban jiwa. Terjadinya tawuran pelajar sudah menjadi

indikasi tindakan kriminal, karena tidak sedikit siswa yang membawa senjata tajam dan benda-benda lain yang membahayakan.

Hal ini pun tidak sepenuhnya kesalahan pihak pendidik. Perlu adanya analisis yang komprehensif untuk membuat kesimpulan. Berdasarkan perspektif pekerja sosial yang dikuti dalam website resmi Kemensos menuliskan bahwa, perilaku seseorang yang cenderung agresif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, yaitu adanya gangguan dari kepribadian dan mentalitas remaja. Sedangkan faktor eksternal berasal dari keluarga ataupun lingkungan sosial. (puslit.kemensos.go.id diakses 30/10/14 pukul 20.24 WIB)

Kenakalan remaja dikategorikan kedalam perilaku menyimpang yang menimbulkan masalah sosial. Perilaku ini dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan individu dan lingkungan sekitarnya. Dalam penanganannya, pekerja sosial ikut terlibat dalam menangani masalah sosial yang dilakukan remaja. Profesi ini ditempatkan di lembaga pendidikan dengan melakukan pendekatan secara personal kepada para pelajar yang melakukan kenakalan atau tindakan penyimpangan.

Pekerja sosial berupaya menciptakan hubungan yang seimbang atau serasi antara unsur-unsur yang ada di dalam sekolah seperti antara guru dan peserta didik, antara sekolah dan orang tua, antara sekolah dan lingkungan masyarakat, dan antara peserta didik dan orang tuanya.

Pelayanan pekerjaan sosial sebagai bagian dari program sekolah memberikan pertolongan terhadap anak-anak yang memiliki permasalahan sosial dan emosional yang menjadi penyebab kesulitan bagi mereka dalam penyesuaian di sekolahnya. Seperti yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial, profesi pekerjaan sosial mempunyai tujuan, fungsi, serta kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang tumpang tindih dengan profesi-profesi lainnya, yang juga bergerak dalam upaya pemberian bantuan kepada orang (Budhi Wibhawa, dkk. 2011. Hlm. 34).

Kenakalan Remaja

Menurut epistemologi kenakalan remaja adalah berarti suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain. (Hasan Basri. 1996. Hlm.13). Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang dilakukan oleh para siswa yang melakukan kenakalan.

Dampaknya akan dirasakan oleh pelaku dan orang disekitarnya. Misalnya seperti ada siswa yang melakukan tawuran, maka yang menjadi korban pada saat itu adalah orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan dampak dalam jangka panjangnya seperti hukuman sosial yang didapat oleh siswa yang melakukan kenakalan tersebut. Menurut Sofyan Wilis kenakalan remaja terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor pada diri remaja sendiri.
 - a. *Responding factor*, faktor ini memberikan kecenderungan tertentu pada diri remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir oleh remaja. Hal ini dapat berupa

- birth injury*, yaitu luka dikepala ketika bayi ditarik dari perut ibu, faktor lainnya yaitu kelainan pada kejiwaan.
- b. lemahnya pertahanan diri, faktor ini ada dalam diri remaja untuk mengontrol dan mempertahankan diri.
 - c. Kurangnya kemampuan penyesuaian diri, inti permasalahan nya pada ketidak mampuan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Pada remaja kurang mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.
2. Penyebab kenakalan remaja yang disebabkan oleh lingkungan keluarga seperti kurangnya kasih sayang atau karena faktor ekonomi di dalam keluarga tersebut.
 3. Penyebab kenakalan remaja yang disebabkan dari lingkungan masyarakat seperti remaja berada dilingkungan masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan.
 4. Penyebab kenakalan remaja yang berasal dari sekolah. (Sofyan Wilis. 2008. Hlm.93-118)

Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang dilakukan tidak hanya dari tindakan tawuran saja. Pekerja sosial yang berada di dalam lingkup sekolah harus mengetahui bentuk dari kenakalan remaja, untuk membantu memudahkan dalam melakukan intervensi. Ada beberapa bentuk kenakalan remaja menurut Sarlito Wirawan Sarwono, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang seperti perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pemerasan, pencopetan, dan pencurian.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, seperti merokok, pelacuran, dan menyalahgunakan obat terlarang.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya pelajar yang menerobos, anak yang melawan orang tua, dan saudara yang saling bertengkat. (1994. Hlm.205)

Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Secara garis besar, ada empat peran dalam profesi pekerjaan sosial diantaranya (Budhi Wibawa, dkk. 2010. Hlm.33-34):

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam menangani masalah yang dihadapinya.
2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia disekitar klien.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial.
4. Mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan.

Pekerja sosial melakukan proses pemberian bantuan terhadap klien. Hal ini berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien untuk melihat kebutuhan kebutuhan klien dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa peran pekerja sosial menurut Parsons, Jorgensen, dan Hernandez yang dikutip oleh Edi Suharto (2009) yaitu sebagai enabler atau fasilitator, broker, mediator, pendidik, dan konselor.

Pekerja sosial yang bekerja di dalam lembaga pendidikan menggunakan perannya sebagai pendidik dan konselor. Dalam perannya sebagai pendidik, pekerja sosial harus mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi klien agar dapat berfungsi secara sosial dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena seperti yang dikutip dari Edi Suharto, sering kali klien keterbatasan akan pengetahuan dan keterampilan sehingga masuk kedalam kelompok yang rentan dalam menghadapi guncangan sosial. (Edi Suharto, hlm. 97-101). Sedangkan peran sebagai konselor tidak dapat begitu saja diperankan oleh siapa saja. Konseling yang dilakukan merupakan metode yang professional yang diperoleh dari pendidikan formal ataupun pengalaman yang telah teruji. Dalam hal ini seorang konselor di lingkungan pendidikan membantu pelajar yang terlibat tawuran agar menyadari kesalahan yang diperbuatnya.

Pelayanan Pekerja Sosial Sekolah

Pekerja sosial sekolah memainkan peranan penting dalam hubungan kapasitas antara sekolah dan agensi-agensi sosial masyarakat yang lain yang menolong sekolah dan sumber-sumber lainnya satu sama lain bermanfaat terhadap yang lainnya. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pekerja sosial di sekolah, menurut Costin (1972· Hlm. 351):

1. Pekerja sosial harus mempermudah persyaratan bagi pendidikan langsung dan pelayanan sosial terhadap para siswa serta menyediakan pelayanan sosial langsung terhadap para siswa terpilih.
2. Pekerja sosial harus bertindak sebagai pengacara siswa, berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang penting dari kelompok siswa terpilih.
3. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para administrator sekolah agar bersama-sama mengidentifikasi situasi permasalahan atau permasalahan yang kompleks yang mana pendekatan pelayanan direncanakan akan dituju, bantuan dalam mengembangkan hubungan kerjasama dengan agen-agen kemasyarakatan, dan membantu dalam merumuskan kebijakan sekolah yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dan generasi muda.
4. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para guru tentang teknik-teknik untuk menciptakan iklim di mana anak-anak mereka bebas dan termotivasi untuk belajar. (Sebagai contoh, melalui penafsiran sosial dan pengaruh budaya dan kehidupan siswa, memfasilitasi penggunaan teman sebaya untuk menolong anak yang bermasalah, atau membantu dalam aspek lainnya dari seni mengatur hubungan di dalam kelas).
5. Pekerja sosial harus mengorganisir orang tua dan kelompok masyarakat untuk saluran perhatian yang efektif tentang siswa dan sekolah serta bertindak sebagai seorang pembangun kekuatan di dalam hubungan dengan sekolah dan masyarakat.
6. Pekerja sosial harus mengembangkan dan menjaga hubungan yang produktif antara sekolah dan wilayah kritis pekerjaan sosial serta praktek legal supaya memudahkan efektivitas pelayanan masyarakat untuk sekolah

anak dan keluarga mereka, membantu dengan perubahan yang direncanakan dalam pola organisasi dari program-program, dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, dan bertindak sebagai katalis terhadap agen tersebut dalam masyarakat yang merupakan fungsi utama adalah perubahan pola dari struktur sosial kemasyarakatan (contohnya, kesejahteraan anak, perbaikan kesehatan mental masyarakat, dan pelayanan legal untuk kemiskinan).

7. Akhirnya, pekerja sosial harus menetapkan kepemimpinan dalam koordinasi keahlian multi disiplin ilmu atas nama siswa antara tenaga pelayanan siswa (contohnya, konselor bimbingan, psikolog, perawat, dan petugas pelayanan).

Metode Pekerjaan Sosial Sekolah

Adapun dalam pelaksanaan metode intervensi pekerjaan sosial yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Intervensi mikro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan problem psikologis, seperti stress dan depresi, hambatan dengan relasi, penyesuaian diri, kurang percaya diri, keterasingan. Metode yang diterapkan dalam setting ini adalah terapi perseorangan (*casework*).
2. Intervensi mezzo dalam hal ini keahlian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok. Metode utama yang dilakukan adalah terapi *groupwork* yang didalamnya melibatkan berbagai teknik pemberian bantuan seperti *self help group*, dan lainnya.
3. Intervensi makro adalah keahlian untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat, lingkungannya (sistem sosialnya). (Edi Suharto. 2009. Hlm. 4)

Dalam menjalankan perannya, pekerja sosial memiliki 3 metode yang dilakukan. Pertama adalah pada tingkat mikro, yaitu yang menangani masalah individu, kedua adalah pada tingkat mezzo yang menangani masalah-masalah yang dihadapi sekelompok siswa, dan yang terakhir adalah tingkat makro, pekerja sosial yang menangani masalah yang dialami dalam komunitas.

Penutup

Pekerja sosial merupakan kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial. (Adi Fahrudin. 2010. Hlm. 60). Pada praktiknya, pekerja sosial ada di setiap setting kehidupan seperti keluarga, sekolah, industri, rumah sakit, penjara, dan lainnya. Ketidakhadiran profesi ini mengakibatkan permasalahan tidak tuntas. Kurangnya eksistensi mengenai profesi pekerjaan sosial ini pun ikut berpengaruh pada praktik pekerja sosial didalam bidang yang sebenarnya membutuhkan profesi ini.

Perhatian profesi pekerja sosial adalah berfokus pada upaya pemberian bantuan, namun terdapat pula profesi lain yang juga bergerak dalam upaya pemberian bantuan pula (Budhi Wibhawa, dkk. 2010. Hlm. 34). Kemudian muncul pandangan dari masyarakat mengenai pekerja sosial sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, sehingga bukan sebuah profesi eksklusif yang harus ditangani dengan sikap profesionalisme. Ditambah lagi belum adanya kepastian hukum yang jelas tentang status pekerja sosial. (diakses di dpr.go.id. 14/10/14 pukul 22:06 WIB). Dengan kondisi ini, hal yang harus dilakukan oleh pihak terkait mengenai kejelasan profesi para pekerja sosial adalah mengadakan sosialisasi mengenai peran pekerja sosial kepada pihak yang terkait mengenai penerimaan profesi ini.

Rekomendasi

Pekerjaan sosial sekolah merupakan bagian dari bidang garapan pekerjaan sosial. Namun eksistensi pekerjaan sosial sekolah di Indonesia belum diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa pekerjaan sosial sekolah perlu diakui eksistensinya oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan bidang pekerjaan sosial, utamanya pekerjaan sosial di dunia pendidikan. Peran pekerjaan sosial sekolah merupakan peran strategis yang penting ketika siswa menemui kendala-kendala dalam perkembangan sosialnya di tiga lingkungan kehidupan.

Melalui berbagai perannya di sekolah, pekerja sosial sekolah dapat menjadi tim yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya di sekolah. Pekerja sosial sekolah dapat bekerjasama dengan seluruh staf yang berada di sekolah tempat para pekerja sosial bekerja. Dengan demikian, pekerja sosial sekolah memiliki bidang khusus yang sesuai dengan bidang keahliannya di sekolah yang membedakan dengan profesi lainnya di sekolah

Daftar Pustaka

- Basri, Hasan. 1996. Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Edi Suharto. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung
- Edi Suharto. 2007. Pekerja Sosial di Dunia Industri (*Corporate Social Responsibility*). PT. Refika Aditama. Bandung
- Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung
- Lela B. Costin. 1972. Penyesuaian dalam Penyampaian Pelayanan Pekerjaan Sosial Sekolah. *Social Casework*.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1993. Psikologi Remaja. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Soetarso. 1993. Praktek Pekerjaan Sosial. Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pekerjaan Sosial. Bandung

Sofyan, Willis. 2008. Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya.

Wibhawa, Budi. Raharjo, T.Santoso. Budiarti. S, Meilany. 2010. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial. Widya Padjadjaran. Bandung. Alfabeta. Bandung.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. ANEKA TAMBANG UBPE SEBAGAI SOLUSI MASALAH PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR

Oleh:

Danis Dea Rizky, Santoso Tri Raharjo, & Risna Resnawaty

Email:

(deadanis@gmail.com; santosotriharjo@gmail.com; happytruz@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu mengenai rendahnya pendidikan yang dialami oleh masyarakat kabupaten Bogor. Dilihat dari kondisi wilayah kabupaten Bogor pada bidang pendidikan, yaitu mengalami kerusakan fasilitas gedung sekolah, minimnya jumlah guru yang berstatus PNS, dan berpengaruh pada siswa menerima pelajaran yang tidak efektif. Permasalahan yang dihadapi kabupaten Bogor di bidang pendidikan ini tercermin dari ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1999. Dilihat dari hasil ukuran IPM tahun 1999 beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Bogor yaitu salah satunya kecamatan Nanggung cengan kondisi masyarakat tertinggal, pendapatan rendah, serta hubungan antar daerah tidak lancar atau terisolasi. Dilihat isu tersebut selain pemerintah yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kecamatan Nanggung maka perlu peran swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).PT. Antam UPBE Pongkor ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah operasi pertambangan melalui program CSR nya, yaitu pemberian bantuan guru honorer, siswa berprestasi, dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Adanya program CSR yang dilakukan oleh PT. Antam UPBE akan membantu peningkatkan mata pencaharian masyarakat dan menciptakan kondisi kehidupan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pekerjaan Sosial Industri, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Community Development*.

ABSTRACT

Research was triggered by the emergence of the issues concerning the low level of education that is experienced by people bogor regency. Seen from the condition of bogor regency the education sector, namely the school building, damaged facility " the lack of status pns, the number of teachers and influential on the kids accept the lessons that are not effective. The problems faced by bogor regency in the education sector is reflected in the size of the human development index (IPM) in 1999. Seen from the results of the size of ipm 1999 some sub-districts in the county of bogor sub-district is one of them is left behind, nangnung cengan condition of a community low incomes, and of inter-regional relation not

smooth or isolated. Seen the issue in addition to the government that can help improve the quality of education in the sub-district nanggung should be the role of private sector through corporate social responsibility (CSR). PT. Antam UBPE Pongkor to contribute to improve the quality of education in the region of operation of mines through csr its, namely aid permanent teachers, students, and improved infrastructure of school. The presence of CSR done by PT. Antam UBPE will help increase livelihood society and create sustainable conditions of life. The methods used in this research are using methods research qualitative with the study practice.

Keywords: social work industry, corporate social responsibility (csr), community development

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan dapat membentuk manusia yang berkualitas dan mampu bertahan hidup dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Pendidikan membentuk dasar manusia berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Bogor pada bidang pendidikan salah satunya mengalami kerusakan fasilitas gedung sekolah yang kondisinya hampir merata, sehingga dengan fasilitas gedung terbatas para siswa menerima pelajaran tidak memuaskan karena terjadi kekhawatiran apabila fasilitas gedung tiba-tiba mengalami ambruk. Selain itu, minimnya jumlah guru yang berstatus PNS turut menjadi persoalan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sehingga dengan minimnya jumlah guru mengakibatkan para siswa menerima pelajaran tidak efektif dikarenakan sistem belajar mengajar dilakukan dalam satu ruangan. Kondisi demikian proses pendidikan tidak mencapai hasil yang optimal terutama pada siswa-siswi. Hal ini perlu adanya antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. (Sumber: diakses pada <http://www.ombudsman.go.id>).

Permasalahan yang dihadapi kabupaten Bogor di bidang pendidikan ini tercermin dari ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pada tahun 1999 mencapai 66,6% dilihat dari Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) penduduk sebesar 93,7%, Angka Harapan Hidup sebesar 65,2% dan Rata-rata Lama Sekolah 8,0%. Dilihat dari hasil ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1999 di Kabupaten Bogor masih mengalami minimnya kualitas pendidikan, pada kenyataannya beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Bogor salah satunya yaitu kecamatan Nanggung merupakan salah satu kecamatan dengan kondisi pendidikan rendah. Kondisi masyarakat di kecamatan ini termasuk dalam kategori tertinggal, berpendapatan rendah, serta hubungan antara daerah tidak lancar atau terisolasi (Setyaningsih, 2005).

Kondisi masyarakat yang masih memiliki pendapatan rendah, terutama keluarga yang masih mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya sehingga bagi mereka sekolah tidak dianjurkan. Keadaan kondisi masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki bidang usaha yaitu bertani dan berdagang di mana sebagian masyarakat masih mengalami buta huruf. Dilihat dari karakteristik masyarakat yang telah dikemukakan tersebut, hal ini berdampak pada rendahnya pendidikan di Kecamatan Nanggung.

Mengenai kondisi pendidikan rendah di kecamatan Nanggung berakibat pengetahuan masyarakat minim, sulit memenuhi kebutuhan hidup, sulit berkembangnya mata pencaharian, kurangnya kesadaran sosial akan pentingnya pendidikan untuk perkembangan di masa yang akan datang, dan masyarakat masih menganut budaya tradisional.

Rendahnya pendidikan yang dialami kecamatan Nanggung tidak sesuai dengan cita-cita (*Millennium Development Goals*) MDG's di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini menjadi kewajiban semua anak menerima pendidikan dasar sebagai tujuan MDG's di Indonesia untuk mewujudkan target meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan angka partisipasi anak untuk bersekolah memang cukup berhasil, namun keberhasilan sesungguhnya dilihat ketika anak mendapatkan pendidikan dasar yang utuh. Disamping itu, sekolah juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dapat memberikan sesuatu yang bernilai bagi anak-anak misalnya tidak memiliki buku atau peralatan yang memadai serta bangunan fisik sekolah yang tidak layak digunakan. Selain itu kualitas pendidikan ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Dalam hal ini guru merupakan sumber daya manusia yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (pada situs <http://www.undp.or.id>).

Pemerintah kabupaten Bogor bertanggungjawab terhadap sekitar duapertiga pengeluaran publik untuk pendidikan, dengan demikian Pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas pendidikan khususnya di kecamatan Nanggung yang masih mengalami rendahnya pendidikan. Namun, pengeluaran publik tersebut tidak mencakup kebutuhan dalam memenuhi peningkatan kualitas pendidikan maka diperlukan peran swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT. Antam UBPE Pongkor memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam membantu menyelesaikan masalah sosial khususnya pada masalah pendidikan melalui program CSR PT. Antam UBPE berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui peningkatan kualitas pendidikannya. Demikian untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah kecamatan Nanggung, pihak perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah memberikan bantuan guru honorer sebagai guru pengajar di sekolah, pemberian beasiswa berprestasi, dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Dengan program CSR yang dilakukan oleh PT. Antam UBPE di Kecamatan Nanggung, masyarakat dapat memperoleh pendidikan dan pengetahuan

yang lebih baik yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan generasi produktif bagi masyarakat kecamatan Nanggung.

Dalam pelaksanaannya PT. Antam bekerja sama dengan UPTK Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor dan masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam menerima pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kreatifitas para siswa di sekolah, mendorong para siswa untuk memiliki bekal dimasa yang akan datang, meningkatkan pola perilaku para siswa, serta memiliki cita-cita sebagai harapan anak bangsa.

Dalam upaya pemberian bantuan guru honorer, siswa berprestasi, dan didukung dengan perbaikan sarana prasarana yang lebih baik terdapat proses pelaksanaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat yang memiliki potensi terhadap pengembangan pendidikan. Pelaksanaan yang terdapat dalam program ini perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PT. Antam. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Antam melibatkan UPTK Kecamatan Nanggung diharapkan terus berjalan sehingga mereka dapat mengembangkan pendidikan bagi siswa-siswi dan guru dengan penuh tanggung jawab.

Dengan rendahnya kualitas pendidikan yang dialami oleh masyarakat kecamatan Nanggung, maka penelitian ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu masalah yang menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat. PT. Antam UBPE memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program CSRnya yaitu program pemberian bantuan guru honorer, siswa berprestasi, dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Antam UBPE Pongkor sebagai solusi masalah pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa definisi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda, sesuai sudut pandang dan pemahaman yang berbeda mengenai CSR. Dalam hal ini perlu dikemukakan beberapa definisi sebagai pedoman dan pengantar kajian mengenai CSR. Berikut definisi CSR yang dikemukakan oleh Schermerhorn (1993) dalam buku Suharto, 2009: 102 yaitu: “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal”

Lebih lanjut ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi CSR. Meskipun pedoman CSR standard internasional ini baru diterapkan tahun 2010, draft pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000 (Suharto, 2009:104), CSR adalah :

“Tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh” (Daft 3, 2007).

Definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam mengartikan dan mengimplementasikan CSR, sehingga sampai saat ini tidak ada kesepakatan mengenai batasan tanggung jawab sosial perusahaan (McWilliams, et.al., dalam Radyati, M.R. & Nindita. 2008). Namun demikian terdapat suatu pemahaman yang sama di masyarakat Eropa mengenai CSR dalam buku Raharjo, 2013: 28 sebagaimana pernyataan berikut :

“There is broad agreement in Europe on the definition of CSR as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns – on a voluntary basis- into their business operations as well as their interactions with stakeholders”.(European Communities 2007)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik inti bahwa CSR merupakan di mana perusahaan mengintegrasikan sosial terhadap kepedulian organisasi bisnis dalam memenuhi kepentingan publik dengan carainteraksi para stakeholders dari dampak kegiatan-kegiatan usahanya pada lingkungan dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Community Development

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga lebih maju dan sejahtera. Salah satu strategi yang digunakan dalam pelaksanaan CSR adalah melalui metode *Community Development*.

Community Development (pengembangan masyarakat) merupakan penyelesaian masalah dengan media masyarakat yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan seluruh potensi masyarakat sehingga muncul kontribusi masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan. Tujuan utama pendekatan *Community Development* membantu masyarakat agar memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mampu mendorong dirinya sendiri. Budimanta (2003) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat (*Community Empowering*) dalam lingkungan *Community Development* perusahaan sebagai program-program yang dilakukan berkaitan dengan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menunjang kemandiriannya.

Karakteristik *Community Development* menurut David Harrison (1995):

1. Praktek *Community Development* memiliki fokus secara luas pada tujuan partisipasi masyarakat yang akan sangat berperan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan bersama.
2. Praktek *Community Development* meliputi penemuan tujuan-tujuan yang biasanya terdapat dalam masyarakat.
3. Praktek *Community Development* melibatkan organisasi dalam menolong anggota masyarakat dalam mengembangkan cara baru untuk menjaga keberfungsian organisasi.

Pendekatan *Community Development* atau pengembangan masyarakat mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development* yang menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR. Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan hanya berupa kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial (CSR) dan lingkungannya. Dengan kata lain perusahaan harus memiliki visi pengembangan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat secara total, bekerjasama dengan stakeholder, agar mereka menjadi berdaya dan mandiri serta tumbuh menjadi agen perubahan sosial yang efektif di lingkungannya, baik ketika perusahaan beroperasi maupun pasca eksplorasi.

Pekerja sosial dapat dilihat perannya melalui tipe-tipe CD worker, CD worker tidak bisa mengambil keputusan secara keseluruhan tetapi harus mementingkan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, CD worker harus mempunyai keterampilan dalam menganalisis, memiliki kesadaran, dan pengalaman sehingga mampu melakukan pemberdayaan pada masyarakat dengan tepat. Terdapat 4 (empat) tipe CD Worker, yaitu :

1. Adviser ; merupakan konsultan yang dituntut untuk bisa menghubungkan permasalahan antara faktor eksternal dan internal sehingga dapat mengetahui segala kondisi yang terdapat pada masyarakat.
2. Advokat ; merupakan orang yang sangat memiliki kepedulian terhadap aspirasi atau keinginan masyarakat.
3. Planner ; merupakan pihak yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat tetapi memiliki kemampuan dalam merancang dan merencanakan berbagai hal yang bersangkutan dengan sumber, proses, model, dan lain-lain.
4. Fill Agent ; merupakan pihak yang ada dalam masyarakat yang dengan intens melakukan hubungan komunikasi dengan masyarakat. Seseorang *fill agent* menjadi pihak yang sangat penting untuk dilibatkan menjadi seorang pendamping karena lebih mengetahui kondisi dan karakteristik pada masyarakat.

Aspek terpenting dalam proses *Community Development* adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. Proses pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar, dan tidak dapat ditentukan oleh pekerja masyarakat, dewan lokal atau departemen pemerintah. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri sehingga peningkatan kesadaran dalam pengembangan masyarakat menjadi bagian terpenting untuk menghasilkan

perubahan yang diinginkan. Dalam buku CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat (Indonesia Business Links) mengatakan bahwa dalam strategi perencanaan CSR terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan CSR, yang disebut dengan tiga jenis *Community Development Approach*, yaitu:

- a. *Development for Community* (Pengembangan untuk Komunitas)
Pencetus kegiatan CSR adalah perusahaan, yang mempunyai status sebagai pendonor, sedangkan kedudukan dari komunitas target adalah sebagai obyek dari kegiatan CSR. Tujuan dari CSR adalah mencapai suatu hasil akhir. Efek dari kegiatan CSR jenis ini adalah adanya ketergantungan dari komunitas terhadap perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu, maka jangka waktu program relative pendek. CSR ini adalah berorientasi pada perusahaan (*inkind*).
- b. *Development with Community* (Pengembangan bersama Masyarakat)
Dalam program ini, kegiatan dirumuskan bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat. Kedudukan perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, sedangkan komunitas adalah sebagai subyek sekaligus obyek dari program CSR. Tujuan program CSR ini adalah berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan pada proses pembangunan. Dampak positif program adalah komunitas tidak sepenuhnya bergantung pada perusahaan, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. Jangka waktu program ini biasanya cukup lama dan berkelanjutan. Karakteristik program adalah berorientasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekaligus tujuan perusahaan.
- c. *Development of Community* (Mengembangkan Komunitas)
Karakteristik utama dari program ini adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas. Tujuan akhirnya adalah pembangunan yang berproses. Disini yang menjadi pencetus ide adalah komunitas sendiri, jadi komunitas yang mengidentifikasi sendiri kebutuhan dan program. Dengan demikian komunitas berkedudukan sebagai subyek sedang perusahaan sebagai agen pembangunan. Dampak positifnya adalah membuat komunitas menjadi *self-reliance* oleh karena mereka terlibat langsung sepenuhnya pada program ini dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan usahanya. Oleh karena itu, maka jangka waktunya panjang dan biasanya bentuknya dikenal dengan kemitraan, yakni pelatihan dan pendampingan.

Pekerjaan Sosial Industri

Menurut Suharto (2006b) definisi Pekerjaan Sosial Industri sebagai lapangan praktiks Pekerjaan Sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja.

Pekerjaan Sosial Industri menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program, dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Sebagaimana dinyatakan akabas inti Pekerjaan Sosial meliputi kebijakan, perencanaan, dan pelayanan sosial pada persinggungan antara pekerjaan sosial dan dunia kerja. Di antara berbagai kegiatan Pekerjaan Sosial Industri antara lain adalah program bantuan (bagi) pegawai, promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, tindakan *affirmative* (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan, dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja, pengembangan jabatan, perencanaan sebelum dan sesudah pension, serta bantuan pemindahan posisi kerja.

Konsep Pekerjaan Sosial Industri lebih luas daripada konsep Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun Pengembangan Masyarakat (ComDev). Pekerjaan Sosial Industri mencakup pelayanan sosial yang bersifat internal dan eksternal. Hal ini CSR termasuk pada pelayanan eksternal Pekerjaan Sosial Industri.

PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan terpenting bagi sumber daya manusia untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, khususnya bagi generasi muda menjalankan kehidupan di masa yang akan datang. Perkembangan zaman yang semakin pesat terjadinya perubahan sosial akan berpengaruh pada sikap dan kebiasaan masyarakat untuk mampu bertahan hidup dengan kondisi yang dinamis. Hal ini peran pemerintah sangatlah penting dalam membangun pendidikan bagi generasi muda dan peduli akan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dapat membangun bangsa Indonesia lebih maju.

Pemerintah sebagai peran utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan akan tetapi tidak sepenuhnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat oleh sebab itu peran swasta yang dapat membantu pemerintah. Dengan demikian salah satu perusahaan yang berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yaitu PT. Antam UBPE Pongkor yang memproduksi emas tentunya memiliki dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Hal ini masyarakat Kecamatan Nanggung yang terdekat dengan kegiatan tambang dari PT. Antam maka perusahaan dapat mengatur pengolahan limbahnya agar tidak merugikan masyarakat. Masyarakat pun tidak ingin terganggu dengan kegiatan tambang dari perusahaan oleh karena itu PT. Antam sebagai sektor industri memiliki peran swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR yang dilakukan oleh PT. Antam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik salah satunya program dalam bidang pendidikan. Kondisi wilayah terbilang pendidikan rendah berada di daerah pegunungan maka PT. Antam

berkontribusi dalam bidang pendidikan untuk masyarakat Kecamatan Nanggung untuk menciptakan kualitas SDM yang lebih baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Antam sebagai solusi masalah bagi masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor di mana kondisi wilayah pegunungan masyarakat tidak banyak mementingkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Masyarakat yang cenderung lebih mementingkan kepada pekerjaan maka pola pikir anak-anak tidak peduli dengan kehidupan di masa yang akan datang. CSR ini yang mampu membuka pola pikir anak-anak agar mampu bertahan hidup di masa akan datang tentunya dengan perubahan sosial yang akan terjadi. Masalah pendidikan yang dialami masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor setidaknya dapat mengurangi permasalahan yang ada bahkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang kreatif dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor. (2012). Tersedia :<http://www.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Lakip-01.pdf> (Diakses Tanggal 15 Mei 2014, Pukul 12.30 WIB).
- Mulyasari, Rini. (2013). *Corporate Social Responsibility* Oleh PT. East West Seed Indonesia. Jatinangor. Universitas Padjadjaran (Skripsi)
- Raharjo, Santoso Tri. (2013). Relasi Dinamis Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Lokal: Kajian Mengenai Kegiatan Tanggungjawab Sosial Industri Geothermal Kepada Masyarakat Lokal. UNPAD PRESS: Bandung.
- Setyaningsih, Luluk dan Tun Susdiyanti.(2005). Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Keberadaan PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Universitas Nusa Bangsa. Tersedia: e-journal.kopertis4.or.id (Diakses Tanggal 25 April 2014).
- Suharto, Edi. (2009). Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan”. ALFABETA: Bandung.
- (2003). *Gambaran IPM Data Basis*. Tersedia :www.jabarprov.go.id (Diakses tanggal 29 Mei 201).

PEKERJA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA

Oleh:

Usep Rochmat, Nandang Mulyana, & Maulana Irfan

Email:

(rochmatusep553@gmail.com; mulyanandang@gmail.com; sangirfan@gmail.com)

ABSTRAK

Konflik merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal perilaku kehidupannya. Konflik pun tidak bisa dihilangkan dari diri manusia itu sendiri, karena konflik merupakan suatu sikap yang dimiliki manusia atas dasar perbedaan, baik untuk diri sendiri maupun kelompok atau organisasi. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya melakukan proses penyelesaian konflik dengan baik, dan sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Penegakan hukum yang sesuai, serta menjalankannya dengan baik akan mengurangi tindakan terjadinya konflik kembali. Dalam kaitannya dengan konflik, tentunya yang harus menjadi perhatian adalah orang-orang yang harus terlibat dalam resolusi konflik. Seperti dalam resolusi konflik atau penyelesaian konflik melalui jalur Non-Litigasi. Dalam proses resolusi konflik jalur Non-Litigasi ini memerlukan orang yang handal dalam memerankan diplomasi ini Non-Litigasi ini. Seperti Negosiator, Mediator, dan itu dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Karena seorang pekerja sosial sudah dibekali dengan berbagai ilmu elektik lainnya, dalam proses kemanusiaan, dan akan sangat tepat jika pekerja sosial terlibat di dalam resolusi konflik-konflik di Indonesia.

Kata kunci: Peran pekerja sosial dalam Resolusi konflik

PENDAHULUAN

Konflik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lainnya. Baik itu secara individu maupun kelompok, konflik merupakan tindakan kejahatan karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan, dan selalu memakan korban yang tidak sedikit, namun sepanjang manusia masih hidup dan berada di muka bumi maka demikian pula konflik akan selalu ada. Sebagai manusia adalah meminimalisir kejadian konflik di tengah-tengah kehidupan kita, agar tercipta suatu rasa aman kebersamaan, sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini konflik sudah sering kali terjadi, bahkan sebelum perang dunia I dan perang dunia ke II pun yang disebut sebagai konflik yang sangat besar, konflik sudah terjadi jauh sebelum itu terjadi, sudah sering melanda umat manusia di muka bumi ini. Karena pada dasarnya konflik diciptakan oleh manusia itu sendiri yang

bersandar pada kepentingan mereka masing-masing. Karena manusia hidup di bumi membawa kepentingannya masing-masing, sehingga pada dasarnya konflik akan selalu terjadi pada sendi-sendi kehidupan manusia.

Sejarah mencatat konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia ternyata itu di ciptakan oleh manusia itu sendiri karena kepentingan yang mereka pertahankan, dan mereka anggap benar, baik untuk mereka sendiri secara individu maupun secara kelompok atau organisasi. Sehingga pada dasarnya konflik tidak akan hilang dari kehidupan manusia, namun hanya dapat dicegah agar tidak terus terjadi dan meninggalkan korban terhadap manusia lainnya. Bencana konflik lebih menekankan dan berakibat pada bencana sosial yang selalu berkepanjangan, bencana konflik bisa juga disebut bencana sosial karena akan berdampak pada tatanan dan nilai-nilai sosial yang berada pada masyarakat itu sendiri, dan lebih merusak dari pada bencana yang di timbulkan oleh bencana Alam. Bencana sosial yang ditimbulkan karena konflik selalu berujung pada nilai-nilai sosial dan akan menggerus atau memaksa nilai-nilai sosial menjadi berubah karena konflik terjadi pada masyarakat. Seperti yang sudah di singgung sebelumnya bahwa yang namanya konflik akan selalu terjadi pada tatanan kehidupan manusia, selama manusia itu berada. Karena konflik menjadi ciri khas manusia untuk mempertahankan dirinya dan kepentingannya masing-masing. Meskipun tidak sama dengan yang terjadi pada makhluk hidup lainnya, seperti hewan. Namun justru konflik manusia jauh lebih patal dari pada konflik hewan, karena ketika manusia itu konflik dengan manusia yang lainnya, yang digunakan oleh manusia tidak hanya nafsu namun akal dan fikiran, sehingga manusia mempunyai cara yang lebih banyak untuk mengalahkan lawannya dalam konflik tersebut, dan korban pun bisa menjadi lebih banyak. Ketika dua orang manusia terlibat konflik maka yang akan terjadi ketika konflik itu muncul yang kedua kalinya akan menjadi dua kubu yang akan berkonflik, sehingga akibat dari konflik tersebut akan semakin luas dan semakin banyak juga menimbulkan korbannya.

Konflik identiknya akan menimbulkan luka yang amat mendalam bagi mereka yang terkena konflik, apa lagi bagi mereka yang terlibat langsung dalam konfliknya. Bahkan mereka akan sangat susah untuk melupakan konflik tersebut, sehingga berujung pada dendam dan akan menimbulkan konflik kembali. Sejauh ini konflik pada manusia yang dilandasi karena kepentingan, baik kepentingan jabatan, atau kekuasaan, baik dalam kekuasaan bisnis, mau pun perkara kekuasaan di pemerintahan, bahkan berkaitan dengan kepentingan Agama pun tidak kalah menarik dari kepentingan lainnya. Malah justru konflik yang terjadi akibat agama atau yang di sebut dengan konflik horizontal, lebih banyak menimbulkan kerusakan yang berlipat dari pada konflik yang disebabkan oleh konflik lainnya, seperti konflik, karena kekuasaan bisnis, budaya, dan lainnya.

Konflik yang di sebabkan oleh kesalah pahaman karena agama yang satu dengan agama yang lainnya, selalu memberikan misteri yang sangat mengerikan, kejadiannya di negara kita Indonesia tepatnya di poso, konflik poso merupakan konflik yang di sebabkan karena kesalah pahaman antar umat beragama, sehingga menimbulkan korban dan kerugian yang sangat luar biasa besarnya, bahkan bisa

mengganggu kesetabilan dan keutuhan negara tersebut, karena pada tahap penyelesaian konflik tersebut akan mendapatkan intervensi dari Negara lain, yang bisa saja menekankan tidak condong ke salah satu pihak saja. Sehingga kasus konflik sungguh sangat berat dalam proses penyelesaiannya. Namun sebagai manusia yang sering menciptakan konflik maka harus mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut, baik secara individu, kelompok atau golongan dan organisasi.

PEMBAHASAN

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. (sumber UU No 7 Tahun 2012). Sehingga ini berdampak pada kesetabilan sosial, dan mempengaruhi keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, seperti terjadinya konflik dan kekerasan yang terjadi di negara Indonesia.

Seperti yang sering kita saksikan di berbagai media, baik media Elektronik mau pun media cetak, benturan fisik yang sering kita sebut dengan konflik akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga perlu adanya suatu kebijakan dan tindakan yang mendorong dalam penyelesaian konflik atau resolusi konflik. Perlu di akui tindakan aparat penegak hukum memang sudah menunjukkan adanya kemauan untuk mengendalikan konflik-konflik yang terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian memang patut di apresiasi oleh bangsa Indonesia, karena apa pun yang di lakukan oleh kepolisian memang sangat memberikan harapan bagi bangsa Indonesia kalau lah mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan dan mengendalikan konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun ada satu yang kurang, diantaranya ketika memberikan solusi atau pada saat ingin mendamaikan atau kembali merujuk kedua belah pihak yang konflik sering tidak tepat sarannya.

Ketika melakukan negosiasi atau proses mediasi sering terjadi kesalahan, antara yang berkonflik dan yang tidak berkonflik, yang berkonfliknya siapa, dan yang di suruh negosiasi dan mediasinya siapa, sehingga tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Padahal seharusnya yang konflik lah yang harus di suruh atau di mediasi dalam resolusi konflik itu sendiri. Juga sering terjadinya Negosiator dan mediator, mereka yang kurang menguasai proses tersebut sehingga kesepakatan yang di lakukan menjadi Win-los. Padahal yang di harapkan dalam proses tersebut adalah Win-Win solution, sehingga ada kesepakatan yang pasti antara kedua belah pihak yang berkonflik. Disini lah diperlukan orang yang secara menyeluruh mempunyai kemampuan dalam melakukan kedua hal tersebut, menjadi Negosiator dan Mediator yang baik dalam proses Resolusi konflik di Indonesia.

Pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses Resolusi konflik, seperti menjadi Negosiator atau pun Mediator, karena untuk seorang Negosiator dan Mediator, tidak hanya sekedar mengetahui atau memahami ilmu tersebut, namun terlebih harus mengetahui dan memahami keadaan manusia atau orang yang terlibat konflik, bagai mana memberikan pandangan, dan arahan kepada kedua belah pihak yang berkonflik, dan itu yang menguasai adalah pekerja sosial, karena mereka adalah diajari prihal berhadapan dengan manusia. Karena pada dasarnya konflik merupakan tindakan kekerasan yang sangat mendalam, seperti pengertian berikut:

Pengertian kekerasan dalam arti luas diajukan oleh Johan Galtung yang mendefinisikan kekerasan sebagai “*any avoidable Impediment to self realization*” (sesuatu yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar). Penghalang itu menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, dan oleh karenanya kekerasan sebenarnya bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.

Pekerjaan sosial (*social work*) yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan sebuah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu keberfungsian sosial (*social functioning*) individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya (Siporin, 1975; Morales dan Sheafor, 1989; Zastrow, 1982; 1989; Suharto, 1997). Dianalogikan dengan profesi kedokteran yang bergerak dalam bidang kesehatan atau profesi guru yang bertugas dalam domain pendidikan, maka tugas dan peran pekerjaan sosial lebih dominan dalam arena kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, para pekerja sosial dilengkapi dengan seperangkat ilmu (*body of knowledge*), keterampilan (*body of skills*) dan nilai (*body of value*) yang secara eklektik dibangun dari ilmu politik, psikologi, sosiologi, antropologi dan filsafat sosial. Kompetensi pekerja sosial profesional umumnya diperoleh melalui pendidikan formal (S1, S2 dan S3). Jadi sangat jelas kalau pekerja sosial bukan lah seorang pekerja yang tanpa tujuan, atau hanya pekerja sukarela, melainkan sebuah profesi dan domainnya adalah untuk memberikan kesejahteraan seperti yang sudah di jelaskan di atas. Terkait dengan resolusi konflik pekerja sosial memiliki kemampuan dalam membangun dinamika hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah ke ilmunan pekerja sosial.

Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam penanganan konflik. Tiga peran di bawah ini – mediator, fasilitator dan broker – sangat relevan dalam proses penanganan konflik dan dapat dijadikan model bagi para pendamai, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembimbingan sosial yang bertugas di lapangan. Peran mediator dilakukan pada tahap berlangsungnya konflik. Sedangkan peran fasilitator dan broker umumnya dilakukan pada fase “paska konflik” dimana “pertempuran” dan “benturan-benturan fisik” sudah menurun. Dua peran ini sering pula diterapkan pada tahap pra-konflik atau pencegahan konflik.

Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam penanganan konflik, terutama pada fase berlangsungnya konflik. Peran mediator dilakukan pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada clash fisik antara berbagai pihak. Dalam konteks ini, pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Ini lah yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam penanganan konflik yang terjadi di Indonesia, karena pada dasarnya konflik merupakan suatu kodratan manusia yang tak bisa di hilangkan dalam kehidupan manusia. Konflik hanya dapat di minimalisir atau di kendalikan dan dicegah supaya tidak terjadi secara luas dan sering meletus, bagai mana pun itu konflik hanya dapat di di sikapi dengan resolusi dan penyelesaian yang berkeadilan, dan orang-orang yang turut dalam penyelesaian konflik haruslah mereka yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam mewujudkan kedamaian dalam konflik tersebut, dan itu pekerja sosial memiliki kemampuan untuk penanganan konflik di Indonesia ini. Dalam prosesnya pekerja sosial, sebagai Mediator atau Negosiator, mempunyai strategi, seperti yang di kemukakan oleh, Compton dan Galaway (1989: 511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator: sebagai berikut.

- Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

Inilah strategi yang akan dipakai oleh seorang pekerja sosial dalam penanganan atau tahapan pada proses Resolusi konflik, dengan dasar-dasar ini lah pekerja sosial layak terlibat dalam proses resolusi konflik yang sering terjadi di Indonesia.

Selain sebagai Mediator atau Negosiator, seorang pekerja sosial mampu bisa menjadi Fasilitator dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Indonesia, dengan ,pekerja sosial sebagai Fasilitator dalam resolusi konflik maka penyelesaian konflik tersebut dapat memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Fasilitator

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), “*The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.*” Selanjutnya Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Mendefinisikan tujuan keterlibatan.
- Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.
- Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.
- Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
- Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.
- Memfasilitasi penetapan tujuan.
- Merancang solusi-solusi alternatif.
- Mendorong pelaksanaan tugas.
- Memelihara relasi sistem.
- Memecahkan konflik.

Dalam penyelesaian konflik, sering terlihat yang menjadi Fasilitatornya bukan orang yang tepat, sehingga dengan pandangan ini, di harapkan dalam penanganan kasus-kasus konflik di Indonesia seorang pekerja sosial dapat ambil bagian sebagai orang yang siap dalam resolusi konflik di Indonesia, karena pekerja sosial mempunyai kemampuan dan kerangka analisis dalam kasus penyelesaian konflik di Indonesia. Pekerja sosial, selain menjadi Mediator, negosiator,

Fasilitator, pekerja sosial bisa menjadi *Broker* dalam penyelesaian konflik di Indonesia yang saat-saat ini sering terjadi. Peran sebagai *Broker* yang diperankan oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut.

Broker

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Dalam konteks penanganan konflik, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam penanganan konflik terdapat “klien” atau “konsumen”, yakni kelompok-kelompok yang bertikai. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pertolongan sosial. Selain pengetahuan mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya, pemahaman dan penghargaan pekerja sosial terhadap nilai-nilai pluralisme (non-judgemental, individualisation, self determination), sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kenetralan. Dalam proses penanganan konflik, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Disinilah seorang pekerja sosial dapat mengambil peran sebagai seorang yang mempunyai kemampuan dalam penanganan konflik, atau sebagai pihak yang siap memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian konflik di Indonesia.

Pekerjaan sosial memandang bahwa kedamaian sosial bukanlah keadaan yang taken for granted, sekali jadi, dan ditentukan oleh kondisi-kondisi alam. Meskipun bencana alam dapat menjadi sumber ketidakdamaian sosial, manusia merupakan faktor penentu bagi terciptanya kedamaian sosial. Ketidakdamaian sosial dapat terjadi karena struktur-struktur kekuasaan yang timpang; yang secara tidak adil menetapkan siapa yang berhak memperoleh “kedamaian” dan siapa yang tidak. Struktur-struktur tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat global, regional, nasional dan lokal. Misalnya, kegagalan pemerintahan nasional dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan sosial dan tercapainya keadilan sosial, dapat menimbulkan pencarian kedamaian sosial melalui saluran-saluran informal dan bahkan illegal; diluar lembaga-lembaga

formal negara. (edi Soeharto dlm *modal kedamaian sosial & resolusi konflik : Perspektif pekerjaan sosial*).

Perlu adanya perbaikan dari lembaga-lembaga yang sangat bertanggung jawab dalam resolusi konflik di Tanah Air Indonesia, karena saat ini Indonesia masih rentan terjadinya konflik, seperti yang kita lihat, konflik-konflik di daerah di Indonesia sering terjadi, belum satu konflik terselesaikan sudah muncul konflik baru lagi, kalau pun sudah dai damaikan dan disuruh damai, belum beberapa bulan atau bahkan kurang dari satu bulan konflik tersebut sudah kembali meletus atau pecvah lagi. Ini mungkin sebabkan karena ketidak dewasaan bangsa Indonesia, yang masih belum mampu menerima perbedaan, dan belum mampu menerima perbedaan prinsi-prinsip dan Ideologi yang berbeda. Namun yang jelas bukan itu yang harus dibahas melainkan tingkat penyelesaian yang tepat.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas yang penulis uraikan, maka kesempulannya bahwa yang namanya konflik tidak akan secara keseluruhan dapat di hilangkan dari kehidupan manusia, karena manusia mempunyai keinginan yang berbeda, mempunyai kepentingan yang berbeda, mempunyai tujuan yang pastinya berbeda maka sudah jelas pstinya manusia akan berbenturan dengan manusia yang lainnya ketika mereka mempunyai keinginan dan tujuan yang berbeda dari manusia yang lainnya, maka sudah tentu perbedaan ini akan menimbulkan penolakan dari pihak yang tidak setuju, sehingga akan menimbulkan suatu gesekan dan prasangka yang tidak baik antara manusia yang satu dengan yang satunya lagi.

Namun ini tentu bukan harus menjadi hambatan dalam proses mewujudkan kedamaian sosial dalam tataran kehidupan manusia di dunia. Memang selama ada manusia di bumi ini, maka keteraturan sosial dan tatan nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan akan mengalami gangguan, namun bukan itu yang jadi pilihan, melainkan bagai mana caranya kita menanggapi dan menyikapi perbedaan, terutama konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Melaikan bagaimana menyelesaikannya, dan bagai mana proses penyelesaiannya sehingga mempunyai kesepakatan yang fositif dalam setiap penyelesaian konflik
Dalam prosesnya, penyelesaian konflik:

- -Harus sesuai dengan Hukum dan UU Negara republik Indonesia yang telah di sepakati bersama oleh seluruh Masyarakat melalui pemerintah dan legislatifnya.
- -Dalam penyelesaian dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan peraturan penyidikan atau uu
- -Memberikan keputusan atau hukuman kepada mereka yang membuat konflik haruslah sesuai dengan uu, dan tindakan yang tegas terhadap mereka yang terbukti bersalah
- -Dalam proses penyelesaian konflik secara Litigasi dan Non-Litigasi harus melibatkan Mediator, Negosiator, fasilitator dan harus orang yang tepat dan memahami proses itu. Seperti pekerja sosial yang mestinya dilibatkan dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Frans Parera dan Thomas Santoso (eds), *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Dominasi Kekerasan atas Dialog Publik*, Jakarta: The Go-East Institute, hal.1-7.

Jim Ife. 2006 *Community Development* . Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Kleden dan John Julaman (eds), *Timur dan Barat di Indonesia: Perspektif Integrasi Baru*. Jakarta: The Go-East Institute, (hal.117-128)

Kleden, Ignas (2000), *Epistemologi Kekerasan di Indonesia*, dalam Paul Tahalele, Salusu. Jonatan (2000). *Stabilitas Nasional, Perdamaian dan Komunikasi Politik*. dalam Ignas

Wibawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran

Sumber artikel, jurnal dan hasil penelitian :

www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_20.htm(21-12-2014 : 14.00)

<http://devisofiah23.blogspot.jp/2013/09/contoh-artikel-tentang-konflik-sosial.html>
(21-12-2014 : 14.33)

ratnandoet.wordpress.com/konflik-sosial/(21-12-2014 : 15.23)

MENELAAH TEORI *DISTRIBUTIVE JUSTICE* PADA ISU SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Oleh
Santo Arimartin
Santo.arimartin@gmail.com

ABSTRAK

Terkait dengan perkembangan jaman, lahan-lahan persawahan sudah mulai berubah menjadi pabrik-pabrik. Sejalan dengan perkembangan teknologi Negara agraris mulai berubah menjadi Negara industri dan membangun banyak perusahaan. Sumber Daya Manusia mengambil peranan penting dalam pertumbuhan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kinerja SDM harus selalu dalam posisi yang maksimal dan terjamin demi mendapatkan keuntungan. Jaminan yang perlu diperhatikan terkait dengan kesehatan dan keselamatan SDM tersebut. Jaminan kesehatan dan keselamatan ini tertuang kedalam suatu sistem manajemen yang mengatur tentang bagaimana jaminan tersebut dapat menjaga semua karyawan disuatu perusahaan mendapat hak-haknya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu bentuk dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah jaminan kesehatan, fenomena yang terjadi adalah perbedaan jaminan kesehatan kerja dibedakan berdasarkan golongan kerja di perusahaannya. Pada dasarnya konsep *distributive justice* berkaitan erat tentang keadilan. Pekerja sosial hadir di setting industri untuk membantu menyelesaikan masalah yang terkait dengan kesejahteraan karyawan dan kemajuan perusahaan. Dengan intervensi yang tepat, hak-hak karyawan dalam perusahaan akan tetap terpenuhi dan perusahaan akan semakin berkembang.

Kata Kunci : Industrialisasi, Jaminan, Sistem Manajemen K3, Pekerjaan Sosial Industri, *Distributive Justice*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Seperti kita ketahui bahwa kecelakaan kerja bukan hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha tetapi dapat juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara maksimal. Apabila kita lakukan analisis secara mendalam maka kecelakaan,

peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja pada umumnya disebabkan karena tidak dijalanannya syarat-syarat K3 secara baik dan benar.

Suma'mur (1981) menjelaskan bahwa Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegaha kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan seain menjadi sebab hambatan langsung juga merupakan kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat kerusakan pada ingkungan kerja, dll. Kondisi pekerja yang baik dan merasa aman dengan pekerjaannya akan mempengaruhi produktivitas perusahaan atau industri tersebut.

Pekerja yang sehat akan memberikan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya dibandingkan dengan pekerja yang sakit. Oleh karenanya, keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja harus diperhatikan bagi setiap pemilik usaha. Dengan memberikan jaminan atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja, setiap pekerja akan merasa bahwa dirinya memiliki jaminan atas semua resiko yang diakibatkan oleh pekerjaannya dan dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan. Jaminan ini dapat berupa penyediaan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, atau berupa penataan ruang kerja yang tepat.

Setiap perusahaan atau industri pasti memiliki standar keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerjanya sendiri – sendiri. Namun terkadang prosedur K3 yang telah diupayakan oleh pemilik perusahaan atau industri tersebut seringkali diabaikan oleh pekerjanya. Hal ini disebabkan para pekerja masih belum menyadari pentingnya mengikuti prosedur keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Padahal sebenarnya jika mengikuti prosedur K3 yang telah disediakan oleh perusahaan atau industri akan dapat meminimalisir resiko kecelakaan kerja.

PT Pertamina (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina (persero) adalah bahan bakar minyak, non-minyak, gas, pelumas dan petrokimia. Sebagai suatu badan perusahaan, PT Pertamina (persero) tentunya bertujuan mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif, efisien dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tujuan tersebut tentunya PT Pertamina (persero) mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kualitas produk yang dihasilkan tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan. Faktor-faktor produksi dalam perusahaan seperti modal, mesin, dan material dapat bermanfaat apabila telah diolah oleh SDM. Sebagai perusahaan yang memiliki banyak pekerja, PT PERTAMINA (Persero) memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan bahkan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dengan membuat sistem manajemen K3 yang menguntungkan pekerja maupun perusahaan.

Sumber daya Manusia (SDM) di PT PERTAMINA (Persero) sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja. Oleh karena itu tenaga kerja perlu menjadi pusat perhatian, karena merupakan salah faktor pendukung utama keuntungan atau keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Riset yang dilakukan badan dunia International Labour Organization (ILO) menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Secara keseluruhan kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun (ILO, 2003 dalam Suardi, 2007: 1).

Kegiatan PT Pertamina (persero) yang dapat menimbulkan bahaya dan resiko pekerja menurut Prosedur Tanggap Darurat P-001/SHE/05 Pertamina adalah semburan liar gas/minyak, kebakaran dan peledakan, tumpahan minyak dan kimia, terlepasnya gas H₂S, kondisi yang terkait georgrafis, politik dan social Indonesia berupa kerusuhan massa, ancaman bom, gempa bumi, tabrakan kapal, dan penyelamatan di laut (Prosedur Tanggap Darurat, 2005:4). Jika keadaan ini tidak mampu dikendalikan oleh PT Pertamina (persero), tenaga kerja mendapat kerugian berupa sakit, kecacatan, sampai kepada kematian yang tentunya akan berpengaruh dalam kehidupan sosial.

PEMBAHASAN

Menurut Kurniawan (2002), program K3 memengaruhi kualitas hidup karyawan melalui jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan yang merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan dimana hal ini menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Hal ini di perkuat dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa *“setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.”*

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukkan komitmen serta kebijakan K3, yaitu suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan

program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Ketika membicarakan tentang prosedur K3, maka akan terlihat keadilan distribusi dari program tersebut. Tentunya manajemen K3 haruslah berpihak kepada karyawan suatu perusahaan karena pada dasarnya program K3 ini merupakan hak yang di dapatkan karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukanya. Keadilan distributif atau *distributive justice* seharusnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hak-hak yang akan diterima karyawan berdasarkan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Sebagai seorang pekerja sosial yang memegang teguh prinsip keadilan sosial, maka keadilan distributif dari program K3 ini dapat dijadikan salah satu tempat praktik pekerjaan sosial untuk membantu karyawan mendapatkan hak-haknya terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Mangkunegara (2000) tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja sebenarnya telah terdapat di dalam UU No.1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut adalah tujuan dari K3:

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologi.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan se-efektif mungkin.
- c. Agar semua hasil produksi di pelihara keamananya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkat kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Berangkat dari tujuan tersebut, pada dasarnya tujuan utama dari adanya kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pemenuhan hak-hak karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Mulai dari pemenuhan hak keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pekerjaanya yang akan menimbulkan perasaan nyaman bagi karyawan untuk bekerja secara maksimal di dalam perusahaan tersebut. Tentunya keselamatan dan kesehatan pekerja harus sangat diperhatikan oleh sebuah perusahaan karena Kartono (1971) menjelaskan bahwa :

“Di setiap perusahaan, faktor yang terpenting adalah manusia. Karena dari manusia itulah bergantung perkembangan dan kemajuan organisasi, apabila manusia-manusia itu menjalankan tugasnya dengan baik, maka baik pula hasil yang dicapai perusahaan, sedangkan sebaliknya, apabila manusia itu menjalankan kewajibannya dengan acuh, maka perusahaan itu akan mundur atau ambruk sama sekali.”

Penjelasan Kartono tersebut akan memperkuat bahwa untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik pencapaiannya dibutuhkan pekerja-pekerja yang menjalankan tugas dengan baik. Untuk menjalankan tugas dengan baik, maka pekerja membutuhkan salah satunya rasa aman dan sehat dalam bekerja dan hal ini dapat diwujudkan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik.

Johnson (1984:261) mengklasifikasikan akibat-akibat industrialisasi yang bersifat negatif terhadap kesejahteraan manusia kedalam 5A, yaitu:

1. Alienation: perasaan keterasingan dari diri, keluarga dan kelompok sosial yang dapat menimbulkan apatis, marah, dan kecemasan.
2. Alcoholism atau Addiction: ketergantungan terhadap alkohol, obat-obat terlarang atau rokok yang dapat menurunkan produktifitas, merusak kesehatan fisik dan psikis, dan kehidupan sosial seseorang.
3. Absenteeism: kemangkiran kerja atau perilaku membolos kerja dikarenakan rendahnya motivasi pekerja, perasaan-perasaan malas, tidak berguna, tidak merasa memiliki perusahaan, atau sakit fisik dan psikis lainnya.
4. Accidents: kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh menurunnya konsentrasi pekerja atau oleh lemahnya sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
5. Abuse: bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (istri/suami), seperti memukul dan menghardik secara berlebihan yang ditimbulkan oleh frustrasi, kebosanan dan kelelahan di tempat pekerjaannya.

Salah satu dari kelima akibat industrialisasi yang telah disebutkan Johnson membahas tentang kecelakaan kerja yang di akibatkan oleh sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Oleh karena itu pekerja sosial industri muncul sebagai jawaban atas dampak dari industrialisasi yang terjadi di dunia. Menurut Johnson (1984:263-264) ada tiga bidang tugas pekerja sosial yang bekerja di perusahaan:

1. Kebijakan, perencanaan dan administrasi. Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perumusan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif, pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam departemen-departemen perusahaan.
2. Praktik langsung dengan individu, keluarga dan populasi khusus. Tugas pekerja sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (crisis intervention), asesmen (penggalian) masalah-masalah personal dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, pelayanan dan perawatan sosial bagi anak-anak pekerja dalam perusahaan atau organisasi serikat kerja, dan pemberian konseling bagi para pensiunan atau pekerja yang menjelang pensiun.
3. Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan.

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya (Siporin, 1975; Morales dan Sheafor, 1989; Suharto, 1997). Para pekerja sosial memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pertolongan profesional yang diperoleh melalui pendidikan (perguruan tinggi). Secara konvensional, pekerjaan sosial biasanya dipandang sebagai profesi yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial baik pada setting lembaga maupun masyarakat. Dalam setting lembaga, pekerja sosial biasanya bekerja pada institusi-institusi pelayanan sosial, seperti lembaga rehabilitasi sosial, pengasuhan anak, perawatan orang tua, penanganan korban narkoba dll. Dalam setting masyarakat, pekerja sosial menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan pembangunan lokal (pedesaan dan perkotaan), pengentasan kemiskinan atau perancangan proyek-proyek pengembangan masyarakat (community development)

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, sasaran, bidang garapan dan intervensi profesi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi membuka kesempatan bagi pekerjaan sosial untuk terlibat dalam bidang yang relatif baru, yakni dunia industri. Seperti halnya pekerja sosial medik (medical social worker) yang bekerja di rumah sakit, para pekerja sosial industri (industrial social worker) ini bekerja di perusahaan-perusahaan, baik negeri maupun swasta, untuk menangani kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, atau perekrutan dan pengembangan pegawai.

Salah satu tujuan dari hadirnya profesi pekerjaan sosial tidak lain untuk membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh klien. Salah satu prinsip keadilan distributif yang disampaikan John Rawl (1999), sebagai berikut:

the different principle” dan ”the principle of (fair) equality of opportunity”, merupakan “prinsip perbedaan obyektif”, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (obyektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat good faith and fairness (redelijkheid en billijkheid). “

Pada dasarnya Rawls menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewajibannya secara proporsional. Pertukaran hak dan kewajiban haruslah sesuai dan objektif tanpa disamaratakan. Keadilan yang diusung John Rawls lebih menekankan kepada setiap orang memiliki hak. Namun, hak-hak yang dia dapat akan seimbang dengan kewajiban yang dia lakukan.

Menurut (Van den Bos : 1999). Keadilan distributif terletak pada implementasi peraturan. Untuk menilai distribusi adil atau tidak, dapat dilihat dari tegaknya peraturan yang diterapkan. Bila peraturan yang disepakati tidak dijalankan sama sekali atau dijalankan sebagian, keadilan distribusi tidak tercapai. Oleh karena itu tegaknya peraturan yang telah dibuat dapat dijadikan indikator dari tercapainya keadilan distributif.

KESIMPULAN

Dunia industri kini sedang menggali manfaat-manfaat positif dari adanya pelayanan sosial tersebut, baik terhadap aspek finansial maupun relasi sosial dengan para pekerja dan masyarakat. Di AS, sekitar setengah dari perusahaan-perusahaan terbesar kini memiliki apa yang dinamakan Employee Assistance Programs (EAPs), program-program bantuan kesejahteraan sosial bagi para pekerja dan keluarganya. Dalam upaya menurunkan tingkat kemangkiran kerja saja, perusahaan-perusahaan sanggup mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk program-program sosial dan penanggulangan alkoholisme. Pelayanan sosial seperti ini seringkali disebut sebagai “kontrak kemanusiaan” (human contract) atau “wajah manusiawi industri” (the human face of industry) (Johnson, 1984).

Selain program-program unggulan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, jaminan-jaminan perusahaan kepada pekerjanya semakin diperbaiki. Didasari prinsip teori keadilan distributive yang diusung John Rawls, maka perbedaan jaminan kesehatan berdasarkan golongan kerja yang diterapkan di PT PERTAMINA (PERSERO) merupakan sebuah keadilan distributif. Hal ini akan diperkuat jika implementasinya berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat Van den Bos (1999) yang menyatakan jika implementasi berjalan dengan baik dan disepakati bersama, maka keadilan distributif sudah tercapai.

pekerjaan sosial biasanya dipandang sebagai profesi yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial baik pada setting lembaga maupun masyarakat. Dalam setting pekerjaan sosial industri, pekerja sosial diharapkan mampu menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutam lingkungan kerja. Jadi system manajemen kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi salah satu bidang garapan seorang pekerja sosial yang berada di *setting* industri. Tujuan dari hadirnya pekerja sosial di bidang industri akan kembali kepada bagaimana pekerja sosial mampu membantu pengorganisasian perusahaan dan pemenuhan hak-hak dari para pekerjanya untuk mencapai keadilan distributive.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang, Guntur ; 2002 ; *Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Depkes* ; Jakarta : Universitas Indonesia
- Dassler, Gary; 1993. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.
- Googins, Bradley dan Joline Godfrey. 1987. *Occupational Social Work*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Johnson, Wayne (1984), *The Social Services: An introduction*, New York: FE Peacock.
- Kartono; 1971 ; *Unsur Manusia dalam Perusahaan Modern* ; Jakarta ; Pradya Paramita
- Kurniawan, Yudhi; 2002. *Sistem Manajemen Pelaksanaan Manajemen K3 dalam perusahaan*; Depok. Universitas Indonesia

- K. Suma'mur ; 1981 ; *Keselamatan Kerja dan pencegahan kecelakaan*; Jakarta ; Gunung Agung
- Mangkunegara, Anwar ; 2000 ; *Manajemen SDM Perusahaan* ; Bandung ; PT Remaja Rosdakarya
- Rawls, John ; 1999 ; *A Theory of Justice* ; Boston ; Harvard University Press.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta
- Wibhawa, Budi, dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran

PENGARUH GADGET PADA INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA

Oleh:

Inda Lestari, Agus Wahyudi Riana, & Budi M. Taftarzani

Email:

(indalessembiring@yahoo.com; wahyudiriana@yahoo.com;
budimtunpad@gmail.com)

ABSTRAK

Dunia sudah memasuki era baru yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini terjadi sangat pesat, teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai *gadget high technology*. Pada umumnya teknologi (gadget) telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan agar tetap menggunakan internet lewat gadgetnya dengan cerdas. Namun dewasa ini gadget dalam penggunaannya sering kali terjadi secara berlebihan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pengaruh tersebut dapat dirasakan baik pada diri tersebut dan pada orang yang berada disekitar penggunaannya. Salah satu lingkungan terdekat yang dikenai pengaruh oleh penggunaan gadget pada adalah keluarga. Keluarga yang secara harfiah memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing pada anggota keluarganya menjadi terganggu akibat adanya penggunaan gadget yang berlebihan pada penggunaannya. Salah satu aspek yang terganggu dalam keluarga adalah aspek interaksi sosial antar anggota keluarga, yang mencakup di dalamnya pola komunikasi dan kontak sosial. Lewat komunikasi dan kontak sosial inilah perubahan interaksi sosial dalam keluarga tersebut dapat diukur. Adanya perbedaan dan perubahan komunikasi dan kontak sosial yang terjadi di dalam keluarga sebelum dan sesudah penggunaan gadget pada anggota keluarga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dalam keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian dapat dilihat pengaruh atas penggunaan gadget tersebut terhadap interaksi sosial dalam keluarga.

Kata kunci : gadget, interaksi sosial, keluarga.

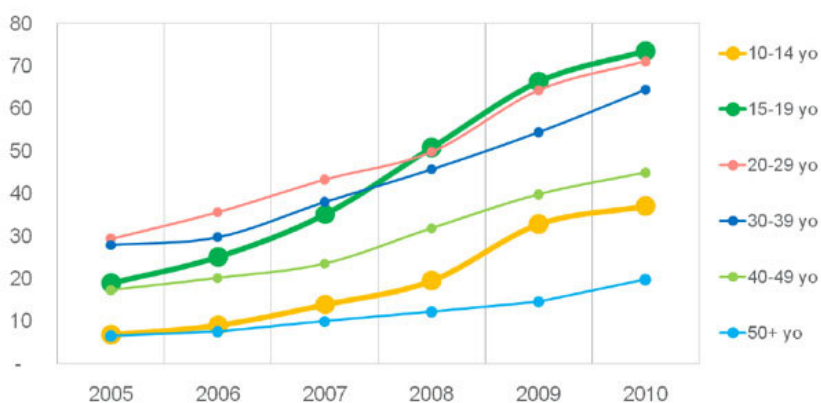
I. PENDAHULUAN

Dunia sudah memasuki era baru yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terjadi sangat pesat, teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis *gadget* yang memiliki klasifikasi sebagai *gadget high technology*. Ada banyak varian *gadget* yang kini tersebar di Indonesia khususnya *seperti smartphone, tablet*, komputer, kamera, laptop dan lainnya. Penggunaan bermacam jenis *gadget* kini telah menjadi gaya hidup di Indonesia. Penggunaan *gadget* dapat

dilihat langsung di tempat-tempat umum seperti sekolah, stasiun, terminal, halte bahkan di bus sekalipun. Pengguna alat sosial media ini seakan telah membudaya di masyarakat Indonesia.

Penggunaan gadget telah mencapai pasar umum, dalam artian kalangan dan dimensi umur tidak lagi menjadi penghalang dalam penggunaan gadget. Berikut gambar dari grafik penggunaan *handphone* di Indonesia yang dilakukan oleh tecno journal.

Mobile Consumers are getting younger → 15-19yo and more recently 10-14yo driving the growth



Gambar 1.1 Konsumen *handphone* di Indonesia berdasarkan umur

Dapat dilihat dari gambar tersebut pengguna *handphone* di Indonesia pada tahun 2005-2010 telah menyentuh rentan umur mulai dari 10 hingga 50 tahun atau lebih. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan gadget (*handphone*) tidak memberikan batasan umur bagi penggunaannya.

Kini pengguna gadget menghabiskan banyak waktunya untuk sekedar bermain dengan *gadget* mereka tanpa kepentingan yang penting atau mendesak. *Gadget* digunakan untuk berbagai macam keperluan. Pada umumnya *gadget* digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh yang dalam kata lain komunikasi tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Namun seiring berkembangnya teknologi, fitur yang terdapat pada *gadget* semakin berkembang dan beragam. Kini *gadget* selain berfungsi untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi antar pribadi, *gadget* juga dapat menjadi media aktualisasi diri yaitu dengan penggunaan fitur *social media* seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *path*. Selain itu *gadget* juga digunakan sebagai alat hiburan, *gadget* kini memiliki fitur *games* atau fitur hiburan dan informasi lainnya seperti *youtube* sebagai penghilang jenuh di waktu senggang.

Namun yang terjadi adalah penggunaan *gadget* ini mulai sulit terkontrol, mulai dari waktu penggunaan hingga tempat penggunaan. Pengguna *gadget* ini menggunakan *gadget*-nya kapanpun dan dimanapun. Fenomena komunikasi yang dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media kadang kala juga ikut memengaruhi isi informasi (I) dan penafsiran (II), bahkan menurut Marshall

McLuhan dalam Bungin (2006:57) media juga adalah pesan itu sendiri. Sehingga penggunaan *gadget* tersebut mengganggu komunikasi sehari-hari termasuk di dalam aktivitas interaksi di dalam keluarga.

Pada awalnya *gadget* yang berfungsi memudahkan upaya interaksi antar individu kini mulai berdampak sebaliknya. Pengguna *gadget* kini lebih sering menghabiskan waktunya dengan gadgetnya daripada bercengkrama atau sekedar menghabiskan waktu mengobrol bersama dengan anggota keluarga yang lain. Penggunaan *gadget* yang tidak terkontrol seperti inilah yang dapat mengganggu proses interaksi sosial. Atau bahkan bisa jadi terisolasi dari lingkungan sosialnya, termasuk di dalam lingkungan sosial terdekatnya yaitu keluarga. Interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut seperti bagaimana interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkemvang serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media itu sendiri (Bungin, 2006:57). Bila pengguna *gadget* ini terus dibiarkan tanpa diberikan pemahaman atas dampak lain selain diluar gadget secara fungsional banyak memberikan kemudahan bagi penggunaanya bisa jadi para pengguna gadget mulai sulit berinteraksi secara nyata dengan keluarganya. Dan hal tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan dari keluarganya.

Penggunaan *gadget* dalam keluarga mempengaruhi keseluruhan interaksi sosial dalam keluarga tersebut. Dimana interaksi yang biasanya dilakukan antara orang tua pada anaknya sebagai bentuk pengasuhan dan komunikasi untuk menciptakan kekukuhan keluarga akan terganggu, hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan kesatuan sistem yang utuh, dimana bila salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi secara langsung, hal tersebut membuat keluarga secara sadar atau tidak akan mengurangi atau melakukan perubahan dalam pola interaksi sosialnya.

Interaksi yang pada awalnya dilakukan secara langsung (tatap muka) kini mulai digantikan menjadi interaksi dengan *gadget*. Perubahan dalam pola interaksi sosial dalam keluarga tersebut menghasilkan pola sikap yang menjadi lebih individualis. Sebab perubahan interaksi langsung menjadi interaksi yang lebih sering dilakukan dengan gadget memiliki perbedaan. Diantara peran emosional dan kontak sosial yang tidak dilakukan secara utuh.

Bentuk interaksi sosial dalam keluarga yang dipengaruhi oleh penggunaan *gadget* dapat mengubah fungsi dari keluarga itu sendiri. Dimana perilaku antar orangtua, atai orangtua kepada anak dalam pengasuhannya tidak terjalin secara utuh, dimana komunikasi, kedekatan, dukungan maupun keterlibatan orangtua tidak lagi dirasakan atau dilakukan dengan maksimal. Seperti definisi keluarga dari sudut pandang fungsional menurut Konner dan Mary Anne Fitzpatrick (2004) yaitu definisi keluarga yang mencakup pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak,

dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

II. PEMBAHASAN

Interaksi Sosial dalam Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah, biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak atau anak-anak. Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya (W.A Gerungan,200:194) . Di dalam keluarga pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termasuk pembentukannya norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya *frame of reference*, *behaviorisme*, dan lain-lain.

Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih luas (masyarakat). Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian masyarakat, wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial.

Pemahaman atas keluarga sebagai unit sosial terkecil dan menjadi sosialisasi terdekat inilah yang mendasari kebutuhan sistem keluarga dalam melakukan interaksi sosial untuk mrndapatkan hubungan yang dinamis. Pengertian interaksi sosial menurut Soerjono Soekanto dalam Burhan Bungin (2006:55) bahwa Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Yang juga dikuatkan oleh Seodjono Dirdjosisworo dalam Nasrullah Nazsir (2008:26) lewat upaya proses sosial yang dilakukan dalam anggota atau bagian dari interaksi tersebut dimana beliau mengatakan bahwa proses sosial yang menunjuk pada hubungan sosial yang dinamis.

Kontak dan Komunikasi Sebagai Syarat Interaksi Sosial

Proses interaksi sosial memiliki dua syarat utama yaitu kontak sosial (*social contact*) dan komunikasi (*communication*). Kontak sosial berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* (bersama-sama) dan *tango* (menyentuh), jadi, artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh (Soekanto dalam Bungin, 2006:55). Artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisik, sebagai gejala sosial hal itu bukan semata-mata hubungan badaniah, karena hubungan sosial terjadi tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat berhubungan dengan orang lain tanpa harus menyentuhnya (Bungin, 2006:56). Namun Syani dalam Baswori (2005:141) mengatakan bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat, konflik sosial pihak satu dengan pihak lainnya.

Suatu kontak juga dapat pula bersifat primer atau sekunder. Dimana kontak primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan. Sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perantara untuk saling berhubungan yang bersifat manusiawi maupun dengan teknologi.

Ketika masyarakat saat ini telah berkembang dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan canggih, maka kontak-kontak sosial primer dan sekunder ini semakin sulit dibedakan satu dengan lainnya. Seperti penggunaan gadget yang membantu proses kontak sosial terjadi dengan lebih mudah. Hal tersebut membuat konsep kontak sosial menjadi samar.

Syarat kedua dalam melakukan interaksi sosial adalah komunikasi. Menurut Soejono Soekanto (2006:60) arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap). Komunikasi dapat diartikan sebagai pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia.

Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang (I) terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang (II) lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerak, atau sikap, perilaku dan perasaan-perasaan, sehingga seseorang (I) membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia (I) alami.), menurut Marshall McLuhan dalam Bungin (2006:57) Fenomena komunikasi yang dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media kadang kala juga ikut memengaruhi isi informasi (I) dan penafsiran (II).

Dalam komunikasi ada tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi (*receiver*), saluran (media), dan penerima informasi (*audience*). Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi (pemberitaan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan *audience* adalah per orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi.

Bidang Praktek Pekerjaan Sosial dalam Interaksi Sosial

Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang *many faces* (mempunyai bentuk wajah) karena menangani berbagai macam permasalahan manusia dan melakukan berbagai kegiatan perubahan sosial. Dalam proses pertolongannya pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang komprehensif artinya tidak memandang dari salah

satu perspektif saja, melainkan lebih bersifat menyesuaikan dengan *setting* lapangan yang ada (Dwi Heru Soekoco, 1995:59). Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk meningkatkan individu, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik-baiknya.

Definisi pekerjaan sosial menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (dalam Dwi Heru Soekoco, 1995:59): “Social work is concerned with the interaction between people and their social environment which affect the ability of people to accomplish their life task, alleviate distress, and realize their aspiration and values”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Dari pemaparan diatas, pekerjaan sosial sangat berkaitan dengan interaksi antara orang dengan lingkungannya sosialnya. Oleh sebab itu, kegiatan pekerjaan sosial diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan seseorang terkait interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini yaitu remaja dengan lingkungan sosialnya yaitu keluarga yang dipengaruhi oleh penggunaannya terhadap gadget.

Boehm seperti yang dikutip oleh Renny Sekarningsih dalam Soetarso (1992:19) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi yang :

”... berusaha untuk meningkatkan kemampuan individu, baik secara perorangan maupun dalam satu kelompok, untuk melaksanakan fungsi sosial melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan pada antar hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dengan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi, yaitu pemulihan kemampuan orang, pengadaan sumber-sumber manusia dan sosial, serta pencegahan terhadap disfungsi sosial.”

Adapun fungsi pekerjaan sosial sebagaimana diungkapkan Soetarso (1992:6) yaitu :

1. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan untuk melaksanakan tugas dan memecahkan masalahnya.
2. Menciptakan jalur hubungan pendahuluan diantara orang dengan sistem sumber.
3. Mempermudah interaksi, menambah dan menciptakan hubungan baru antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan.
4. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan atau perundang-undangan sosial.
5. Masyarakat sumber sosial.
6. Bertindak sesuai pelaksanaan kontrol sosial.

III PENUTUP

Penggunaan gadget pada era teknologi seperti sekarang dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Dimana Aseperti yang dikatakan oleh McLuhan bahwa media dapat mengubah pola komunikasi seseorang. Gadget sebagai media secara umum memiliki fungsi positif bagi penggunaannya. Namun penggunaan gadget yang kurang cerdas baik secara kuantitas atau kualitas dapat memberikan dampak yang lain, termasuk pada keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat bagi suatu individu.

Keluarga sebagai kelompok primer bagi suatu individu memiliki peran dalam hal sosial. Penggunaan gadget yang tidak cerdas pada anggota keluarga berpotensi untuk mengubah peran-peran dari keluarga tersebut dan mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan bagi setiap anggota keluarga.

Fenomena penggunaan gadget pada anggota keluarga yang pada akhirnya berpotensi mengubah suatu pola interaksi sosial di dalam keluarga ini dapat diminimaisir dengan pemberian intervensi dari pekerja sosial keluarga sesuai fungsinya. Pekerja sosial keluarga dapat berupaya melakukan *family therapy* yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga guna menyadarkan akan perubahan pola interaksi yang berpotensi mempengaruhi peran dan fungsi keluarga secara keseluruhan. Sehingga keluarga dapat memperbaiki pola penggunaan gadget minimal dalam keadaan berinteraksi dengan keluarga.

Intensitas penggunaan gadget memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial didalam keluarga. Dimana hakikatnya gadget dibuat dengan fungsi untuk mempermudah kegiatan seseorang, dalam artian fungsi gadget disini adalah baik. Namun dapat mengalami perubahan fungsi bila penggunaan gadget tersebut tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup, dalam artian harus adanya pengelolaan dan pengendalian penggunaan gadget mulai dari kuantitas waktu pengguna sampai pada kualitas isi dari pengguna yang dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gerungan, W.A. 2009. *Psikologi Sosial (Edisi Ketiga)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Goode, William J. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Terjemahan Lailahanoum Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazsir, Nasrullah. 2008. *Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran

- Skidmore, R.A., M.G. 1994. *Introduction in Social Work Sixth Edition*. University of Utah
- Soekanto, Soeryono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soelaeman, M. Munandar. 2006. *Ilmu Sosial Dasar: Teori & Konsep Ilmu Sosial (Edisi Kelima)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
- Walgito, Bimo 1978. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Willis, Sofyan S. 2011. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta

Sumber Lain

- Ayu, Sukma DW. (2013). *Dinamika Komunikasi Keluarga Pengguna Gadget (skripsi)*. Jurusan Psikologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- <http://teknournal.com/perkembangan-pasar-handphone-di-Indonesia-dari-tahun-2005-hingga-2010/> diakses pada tanggal 25 April 2014 pukul 20.30 WIB
- <http://www.sumbaronline.com/berita-15577-teknologi-dan-interaksi-sosial.html> diakses 25 April 2014, 20.00
- <http://www.anneahira.com/komunikasi-dalam-keluarga.html>, diakses pada tanggal 27 April 2014 pukul 20.00 WIB
- <http://www.nuga.co/nuga-life/gadget-kini-sudah-jadi-wabah-pengganggu.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB

EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA, MALAYSIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh:

Adetya Nuzuliani Rahma, R.Nunung Nurwati, & Budi Muhammad taftazani

Email:

(adetya.nuzuliani@gmail.com; nngnurwati@yahoo.co.id;
budimtunpad@gmail.com)

ABSTRAK

Dengan masyarakat sejahtera di dalam suatu negara, dapat dijadikan indikator negara tersebut maju atau berkembang. Sehingga kesejahteraan sosial menjadi salah satu indikator yang penting dalam pembangunan suatu negara.

Berbicara mengenai kesejahteraan sosial, sangat erat kaitannya dengan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial dengan keterampilan, nilai-nilai, dan metode serta pendekatan yang dimilikinya mampu meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Dengan demikian keberadaan profesi pekerjaan sosial penting dan berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu negara.

Dalam tulisan ini, penulis menggambarkan profesi pekerjaan sosial di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan tujuan untuk memberikan informasi, gambaran umum dan pengetahuan mengenai eksistensi pekerja sosial di masing-masing negara. Selain itu, dari informasi-informasi tersebut dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan eksistensi pekerja sosial di Indonesia.

Kata Kunci : kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial,

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial suatu negara erat kaitannya dengan pembangunan negara tersebut. Kesejahteraan sosial dapat dijadikan sebagai indikator negara tersebut maju atau masih berkembang. Edi Suharto (2007:1) dalam tulisannya yang berjudul Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang pembangunan sosial.

Di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2006a;2006b). Menurut Wibhawa Budhi, dkk,(2010:23-25), di dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Pekerjaan Sosial, konsep kesejahteraan dapat dilihat dari empat sisi, sebagai berikut :

- a. Sebagai system pelayanan sosial Elizabeth Wickenden mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai :

”a system of laws, programs, benefits, and services which strengthen or assure provision for meeting social needs recognized as basic for the welfare of the population and for the functioning of the social order.”

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa konsep pelayanan sosial mencakup perundangan-undangan sampai pemberian bantuan secara langsung, konsep kebutuhan sosial yang merupakan dasar dalam kesejahteraan sosial, dan tujuannya ialah mencapai keberfungsian sosial.

b. Sebagai suatu disiplin keilmuan

Menurut Wibhawa Budhi, (2010:25) mengemukakan sebagai berikut :

Konsep kesejahteraan sosial dipandang sebagai sebuah bidang kajian keilmuan yang ditujukan untuk mengkaji, mengantisipasi keadaan, dan perubahan kehidupan sosial, serta merumuskan alternatif tindakan guna menciptakan situasi kehidupan sosial yang kondusif bagi upaya warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri.

Dari definisi di atas, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan dasar pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab dan strategi penanggulangannya untuk kehidupan masyarakat suatu negara agar menjadi lebih baik.

Menurut Edi Suharto dalam tulisannya yang berjudul Paradigma Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa pada masa awal perkembangannya, kesejahteraan sosial memiliki basis ilmu yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu sosial lain, terutama filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi.

c. Sebagai suatu keadaan hidup

Menurut Wibhawa Budhi, (2010:26), kata ‘sosial’ dalam kesejahteraan sosial, memiliki arti hubungan sosial. Mengacu pada kata ‘sosial’ tersebut, kesejahteraan sosial sebagai:

“suatu keadaan hidup ialah keadaan hubungan manusia yang baik, artinya yang kondusif bagi manusia untuk melakukan upaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.”

Dari definisi di atas, konsep baik dalam hubungan manusia diukur dari nilai-nilai dan norma-norma sosial di dalam masyarakat. Konsep kondusif tersebut, berarti hubungan manusia tersebut berwujud dalam tatanan sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha mencapai kesejahteraan hidupnya.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan bagi negara dimanapun. Semua negara pasti memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Manusia yang sejahtera ialah manusia yang mempunyai kemampuan menjalin interaksi yang baik dengan sesamanya, artinya kebahagiaan dan ketidakhahagiaan manusia terletak pada kualitas hubungannya dengan manusia lain.

Berbicara mengenai kesejahteraan sosial, maka erat kaitannya dengan pekerjaan sosial. Layaknya pendidikan berhubungan dengan guru, kesehatan dengan dokter. Maka ketika berbicara mengenai kesejahteraan sosial, maka profesi yang terlibat ialah pekerjaan sosial.

Dalam tulisan ini, penulis akan menggambarkan profesi pekerjaan sosial di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Pekerja Sosial Sebagai Suatu Profesi

Berbicara mengenai pekerja sosial, tentunya terlebih dahulu harus mengetahui definisi pekerjaan sosial. Definisi pekerjaan sosial menurut Zastrow, Charles ialah sebagai berikut :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas, guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya. (dalam Wibhawa,dkk,2010:45).

Profesi dikatakan professional apabila memiliki bidang keahlian yang ditempuh melalui sekolah atau perguruan tinggi. Hal ini senada dengan Wibhawa Budhi, (2010:42),

Pekerjaan sosial sebagai sebuah bidang keahlian (profesi) yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi).

Dengan demikian, pekerjaan sosial berbeda dengan kegiatan sosial atau *charity* yang dapat dilaksanakan oleh siapapun yang memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Para penyandang profesi pekerjaan sosial memiliki kewenangan sebagai akibat sosial dari pendidikan keahliannya, untuk menyelenggarakan pelayanan sosial dalam semua bentuk dan tingkatnya. Keahlian khusus dalam profesi pekerjaan sosial adalah manipulasi perilaku manusia (secara individual maupun dalam unit sosial), yang ditujukan untuk meningkatkan keberfungsian sosial manusia sebagai makhluk sosial.

Selain ilmu yang didapat dari perguruan tinggi, pekerja sosial dapat dikatakan sebagai profesi pekerjaan sosial, karena hal-hal berikut ini yang dikemukakan oleh Johnson dan Schwartz (1991 :120) :

1. *A systematic body of theory*
2. *Professional authority*
3. *Community sanction*
4. *Code of ethics*
5. *Professional culture*

William Wickenden juga mengemukakan suatu bidang keahlian dikatakan sebagai profesi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Body of knowledge*
2. Proses pendidikan

3. Kode etik
4. Pengakuan status
5. Wadah atau organisasi

Kelima hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah profesi.

Nilai-nilai Dasar Pekerjaan Sosial

Sebagai suatu profesi pekerjaan sosial memiliki nilai-nilai dasar yang dijunjung. Menurut Johnson dan Schwartz (1991 :132), nilai-nilai profesi pekerjaan sosial ialah :

1. *The worth and dignity of people*
menghargai harkat dan martabat manusia seutuhnya
2. *The self determination of people*
Memberikan kebebasan mengambil keputusan oleh klien. Penting bagi klien untuk memilih keputusan yang tepat menurut dirinya sendiri.
3. *The purposefulness of human behavior*
Pekerja sosial percaya bahwa setiap tingkah laku manusia memiliki tujuan. Walaupun ada tingkah laku yang diluar kebiasaan, pekerja sosial tidak boleh memberikan *stereotype* atau *label* yang negative.
4. *People capacity to grow and change*
Menyadari bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan merubah dirinya.
5. *People's need for opportunity for growth and development*
Membantu kebutuhan manusia yang memiliki kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang serta berfungsi secara sosial
6. *People's right to participate actively in social work practice*
Pekerja sosial melibatkan klien dalam pemberian bantuan dan pengambilan keputusan
7. *Confidentiality*
Pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan informasi seputar klien, isi pembicaraan dengan klien, pendapat professional lain, atau catatan-catatan kasus mengenai klien. Dengan demikian, klien akan merasa nyaman mengungkapkan masalahnya. Kerahasiaan ini merupakan bagian dari etika dalam praktik pekerjaan sosial.

Selain itu, ada beberapa penambahan dari Wibhawa (2010:130), yakni sebagai berikut :

1. *Acceptance*
Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam pekerjaan sosial. Pekerja sosial menunjukkan sikap toleran terhadap keseluruhan dimensi klien.
2. *Nonjudgemental*

Pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya tanpa disertai pemikiran atau penilaian. Maksudnya pekerja sosial menerima klien dengan segala keadaannya, menilai klien sebagai manusia dengan latar belakang sejarahnya sendiri, tidak menilai perilakunya, dan tidak memaksakan nilai-nilai yang dimiliki oleh pekerjaan sosial terhadap klien.

3. Individualisasi

Pekerja sosial memandang dan mengapresiasi sifat unik dari klien. Setiap klien memiliki karakteristik kepribadian, dan permasalahan yang unik, dan berbeda satu sama lain. Setiap individu dibentuk oleh pengalaman, kebutuhan situasi, dan pengetahuannya. Dengan demikian pekerja sosial tidak dapat menggeneralisasi persoalan yang sama pada klien yang berbeda.

Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerjaannya.

Keterampilan Pekerja Sosial

Sebagai profesi yang professional, pekerja sosial tentunya memiliki keterampilan yang menunjang pekerjaannya. Johnson dan Schwartz (1991 :133) membagi keterampilan pekerja sosial menjadi 3 bagian yakni :

1. *Interpersonal helping skills*
2. *Social work process skills*
3. *Evaluation and accountability skills.*

Keterampilan dalam membangun hubungan interpersonal dengan klien ialah :

1. Keterampilan pekerja sosial untuk berkomunikasi dengan klien, keterampilan mendengarkan secara aktif, keterampilan untuk mengerti, dan menginterpretasi komunikasi klien, baik verbal maupun non verbal serta membantu klien untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya
2. Kemampuan pekerja sosial untuk membangun kepercayaan dengan klien
3. Kemampuan wawancara atau konseling dengan menggunakan *active listening* dan keterampilan lainnya seperti *paraphrasing, reflection of feeling, confrontation*, dan sebagainya.

Keterampilan-keterampilan tersebut sangat berguna bagi pekerja sosial dalam melaksanakan peran dan tugasnya seperti mengidentifikasi permasalahan klien dengan lingkungan sosialnya, menerapkan *treatment*, dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder-stakeholder*, dan meningkatkan keberfungsian sosial klien, baik itu individu, kelompok, dan masyarakat dengan berbagai metode dan pendekatan yang dimiliki pekerja sosial.

Metode dan Pendekatan Pekerja Sosial

Sebagai sebuah profesi, pekerja sosial memiliki metode dan pendekatan dalam melakukan intervensi kepada klien, baik itu individu, keluarga, dan masyarakat.

Metode pekerja sosial ialah sebagai berikut :

1. Social case work

Metode pemberian bantuan kepada orang yang didasarkan atas pengetahuan, pemahaman, serta penggunaan teknik-teknik secara terampil yang diterapkan untuk membantu orang-orang guna memecahkan masalahnya dan mengembangkan dirinya. (Wibhawa Budhi,2010:97).

Metode *social case work* bersifat individual karenanya dikatakan pendekatan mikro yaitu membantu individu-individu yang memiliki masalah, baik yang bersifat eksternal yakni masalah yang berasal dari lingkungan sosialnya, atau masalah yang bersifat internal, atau yang berasal dari dalam dirinya sendiri.

2. Social group work

Suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial;serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. (Wibhawa, Budhi, 2010:99).

Pada intinya *social group work* ialah meningkatkan keberfungsian individu dengan bantuan kelompok.

3. Community Organizing/ community development

PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut :

“Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri.” (dalam Wibhawa Budhi, 2010:109)

4. Administrasi dan Organisasi Pelayanan Manusia atau Sosial

John Kidneigh menyatakan bahwa administrasi pekerjaan sosial adalah proses transformasi kebijakan sosial ke dalam pelayanan sosial melalui proses dua cara yakni transformasi kebijakan ke dalam pelayanan-pelayanan sosial konkrit, dan menggunakan pengalaman dengan merekomendasikan modifikasi kebijakan.

Metode atau pendekatan ini menekankan bahwa pekerja sosial tidak hanya berkonstrasi dalam individu saja namun akan menjadi perencana dan administrator program-program pekerjaan sosial daripada bekerja dengan klien perseorangan.

Pekerja Sosial di Indonesia

Perkembangan pekerja sosial di Indonesia berawal dari nilai gotong royong masyarakat sebagai sistem pelayanan sosial. Gotong royong dianggap sebagai nilai paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika terjadi

penjajahan Belanda, pemerintah Belanda memandang pelayanan sosial hanya berupa kegiatan amal, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada badan-badan swasta misalnya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Missi Katholik, dan sebagainya. Pada masa penjajahan Jepang, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin memburuk, dan lembaga-lembaga pelayanan sosial yang sudah dibentuk tidak berjalan sebagaimana mestinya

Pada masa kemerdekaan, sebagai pencerminan akan pentingnya kesejahteraan sosial dan praktik pekerjaan sosial dalam bentuk pelayanan sosial, maka dibentuklah Kementrian Sosial pada 19 Agustus 1945. Pada masa ini, pelayanan sosial dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya pelayanan masyarakat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan nilai gotong royong, kemudian beralih oleh swasta pada masa penjajahan Belanda, dan setelah kemerdekaan hingga sekarang, pelayanan sosial dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Di Indonesia, kesejahteraan sosial dibahas dalam perundang-undangan. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Apabila dilihat dari pengertiannya, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2005). Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi : menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Dalam upaya mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial memberikan pelayanan sosial yang merupakan wujud aktivitas pekerja sosial dalam praktik profesionalnya.

Dalam artikel yang berjudul Indonesia Butuh 139 Ribu Pekerja Sosial Profesional, yang dikutip dari metrotvnews.com, menyebutkan di Indonesia, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah sebanyak 15,5 juta rumah tangga. Indonesia masih membutuhkan setidaknya 139 ribu orang pekerja sosial. Sementara saat ini jumlah pekerja sosial yang tersedia hanya sekitar

15.522 orang. Hal ini untuk memenuhi rasio ideal antara pekerja sosial dengan masyarakat yaitu 1:100. Kebutuhan akan pekerja sosial terus meningkat untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut. Sehingga membutuhkan jumlah pekerja sosial di berbagai bidang untuk mengatasi masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Sektor-sektor yang membutuhkan pekerja sosial antara lain untuk keperluan medis di rumah sakit, industri, forensik di lembaga pemasyarakatan (LP) atau badan pemasyarakatan (bapas), pekerja sosial klinis di Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Napza, pekerja sosial, spesialis perlindungan anak serta spesialis manajemen bencana.

Walaupun sebagian besar masyarakat masih tidak mengetahui profesi pekerjaan sosial, namun keberadaan pekerja sosial kini semakin dikuatkan dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial. Pemberian sertifikasi difasilitasi pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang dapat menerbitkan lisensi. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) yang akan memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial, sekaligus menjadi landasan kebutuhan pekerja sosial profesional di Indonesia, (metrotvnews.com diakses pada Minggu 2 November 2014 pukul 10:29).

Pekerja sosial di Malaysia

Dikutip dari www.masw.org. Di Malaysia pekerjaan sosial professional diperkenalkan pada masa pemerintahan jajahan Inggris, awal tahun 1930-an. Pada masa ini, pekerjaan sosial difokuskan pada masalah buruh migran dari India dan China. Setelah Perang Dunia II, pada tahun 1946 didirikan Departemen Kesejahteraan Sosial. Awalnya pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial ialah dalam hal bantuan keuangan bagi yang membutuhkan, program percobaan untuk kenakalan remaja, rumah perlindungan bagi perempuan dan anak, dan perawatan untuk penyandang cacat dan lanjut usia. Pada tahun 1950 adanya spesialisasi bidang pekerjaan sosial, yaitu pekerja sosial medis dan pekerja sosial yang menangani kenakalan remaja. Pada tahun 1955 *The British Almoners* telah membentuk badan profesional pertama bagi pekerja sosial, Asosiasi Malayan of Almoners (MAA). Pada akhir tahun 1960 bernama *Malaysian Association of Medical Social Work* (MAMSW) yang berhasil diperjuangkan. Kemudian terbentuklah asosiasi pekerja sosial di Malaysia dengan nama *Malaysian Association of Social Workers* (MASW) yang terbentuk pada 3 Maret 1973.

Dikutip dari stks.ac.id, di Malaysia sendiri, program Magister of Medical berada dibawah fakultas kedokteran USM. Kedudukan *medical social work* (sebutan untuk pekerja sosial medis di Malaysia), berada dibawah divisi *Public Health/Care* yang merupakan *secondary setting* di bagian klinik kesehatan. Hingga saat ini, sekitar 250 orang *medical social work – hospital* telah mendapat perhatian dari pemerintah Malaysia dan mereka bekerja di klinik-klinik kesehatan yang digaji oleh pemerintah. Satu tahun terakhir ini, parlemen akan segera mengesahkan

undang-undang (act) tentang standard kompetensi pekerja sosial medis yang akan memperkuat profesi tersebut.

Kondisi eksistensi pekerja sosial di Indonesia dengan Malaysia hampir mirip. Dilihat dari sejarah perkembangannya pun berdekatan, hanya berbeda beberapa tahun. Namun, jika dilihat dari pekerja sosial medis di Malaysia sudah cukup berkembang, di negaranya, dibandingkan di Indonesia.

Pekerja Sosial di Amerika Serikat

Cox (1992:40) mengemukakan :

pekerjaan sosial lahir di Barat (Eropa) dan tumbuh serta berkembang di Barat (Amerika Serikat). Secara simultan, pekerjaan sosial diekspor ke negara-negara berkembang (dunia ketiga), terlepas dari kemungkinan penerapan dan relevansinya. (Wibhawa Budhi.2010:57).

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa, pekerja sosial telah lebih dahulu lahir dan dikenal oleh masyarakat di Amerika Serikat, dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia.

Dikutip dari *socialworkers.org*, berdasarkan data dari U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics (BLS) profesi yang memiliki perkembangan yang pesat dibandingkan profesi lainnya. Lebih dari 650.000 orang memilih program atau jurusan pekerja sosial. Dengan demikian pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya sudah mengenal profesi pekerjaan sosial, dan mengetahui eksistensi profesi tersebut di negaranya.

Dikutip dari *socialwork.org* *The U.S. Department of Veterans Affairs employs more than 10,000 professional social workers. It is one of the largest employers of MSWs in the United States.* Dari pernyataan tersebut, di Amerika Serikat pekerja sosial sudah berkembang dan diketahui eksistensinya oleh masyarakat luas.

Dalam situs *socialwork.org* pun menjelaskan eksistensi pekerja sosial dalam berbagai bidang, yakni sebagai berikut:

“Today, almost 50 special interest organizations contribute to the vitality and influence of the social work profession. There are social work groups for educators and researchers, as well as organizations for practitioners in health care leadership, nephrology, oncology, child welfare, schools, prisons, courts, and many other settings.”

Di Amerika Serikat, pekerja sosial telah terspesialisasi dan telah diakui eksistensinya oleh masyarakat disana. Sehingga kini perkembangannya pesat dibandingkan negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, dan Malaysia. Dalam melaksanakan perannya pun, pekerja sosial di Amerika Serikat telah dibagi ke dalam berbagai bidang, seperti dalam kesejahteraan anak, sekolah, kesehatan, onkologi, dan bidang lainnya.

Penutup

Perbandingan eksistensi pekerja sosial dilakukan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai profesi pekerja sosial di Malaysia dan Amerika Serikat. Dengan mengetahui eksistensi pekerja sosial di negara lain, dapat meningkatkan eksistensi pekerja sosial di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan eksistensi pekerja sosial di Indonesia. Adapun, saran dari penulis ialah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan kompetensi dan kontribusi pekerja sosial dalam berbagai pembangunan sosial agar dikenal oleh masyarakat luas, misalnya dalam program-program kementerian sosial,
2. Mengembangkan pendidikan pekerjaan sosial. Misalnya, melengkapi mahasiswa dengan keahlian yang spesifik, karena spesialisasi dalam pendidikan pekerjaan sosial tampaknya semakin penting.
3. Memperkuat organisasi-organisasi profesi pekerjaan sosial Indonesia, serta meningkatkan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional.

Daftar Pustaka

- Johnson, Louise and Schwartz Charles. 1991. *Social Welfare A Response to Human Need Second Edition*. Allyn and Bacon: Massachusetts
- Skidmore. 1987. *Introduction to Social Work Sixth Edition*. Prentice Hall International Edition
- Wibawa, Budhi, et al. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran: Bandung
- Suharto Edi. *Peran Pekerja Sosial dalam Community Development*. International Policy Fellow, Open Society Institute Central European University. Budapest, Hungary
- Suharto Edi. 2007. *Paradigma Kesejahteraan Sosial*.
metrotvnews.com diakses pada 2 November 2014 pukul 10:29
<http://www.stks.ac.id> diakses pada 10 Desember 2014 pukul 14.00
www.umj.ac.id diakses pada 10 Desember 2014 pukul 14.00
<http://kesos.umm.ac.id> diakses pada 11 Desember 2014 pukul 11.00
<http://www.masw.org.my> diakses pada 12 Desember 2014 pukul 10.00
<http://www.socialworkers.org> diakses pada 12 Desember 2014 pukul 11.00

PELAYANAN SOSIAL BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH

Oleh:

Elita Metica Tamba, Hetty Krisnani, & Arie Surya Gutama

Email:

(elitametica@yahoo.com; budimtunpad@gmail.com;
ariesurya_gutama@yahoo.com)

ABSTRAK

Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan potensi, minat dan bakat dirinya agar mereka kelak dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan intelektual sehingga dapat dijadikan sumber daya manusia yang berpotensi dalam memimpin bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Namun banyak faktor yang akhirnya membuat anak-anak Indonesia mengalami putus sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah adalah ekonomi keluarga, kurangnya kemampuan dan minat remaja dalam mengikuti pendidikan di sekolah, kondisi tempat tinggal remaja, pandangan masyarakat terhadap pendidikan, adat istiadat dan ajaran-ajaran tertentu. Remaja putus sekolah merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena dampak yang ditimbulkan tidak lagi hanya dirasakan oleh individu remaja itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan yaitu pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja. Diperlukan upaya penanganan remaja putus sekolah untuk mengurangi dampak negatif yang mereka timbulkan. Dalam upaya mengurangi remaja putus sekolah, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut bertujuan agar remaja putus sekolah tetap mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang dapat dijadikan bekal untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pelayanan sosial yang diberikan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan remaja putus sekolah. Pelayanan sosial yang dapat diberikan yaitu berupa pembinaan bagi remaja putus sekolah melalui bimbingan. Bimbingan yang diberikan yaitu bimbingan mental agama, bimbingan sosial dan fisik, bimbingan keterampilan dan Praktek Belajar Kerja (PBK).

Kata kunci: Pelayanan Sosial, Pekerjaan Sosial, Remaja Putus Sekolah

PENDAHULUAN

Putus Sekolah dipandang sebagai masalah pendidikan dan sosial yang amat serius selama beberapa dekade terakhir ini. Dengan meninggalkan sekolah sebelum lulus, banyak individu putus sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup sehingga kesejahteraan ekonomi dan sosialnya menjadi terbatas sepanjang hidup sebagai orang dewasa. Pendidikan diperlukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan potensi, minat dan bakat generasi muda. Oleh sebab itu, remaja

harus mendapatkan perhatian khusus dalam pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat agar mereka dapat meneruskan perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan cara mengembangkan kreativitas mereka melalui pendidikan.

Setiap individu tidak terkecuali remaja tentunya ingin memperoleh pendidikan agar dapat mencapai cita-cita. Diperlukan usaha, sarana dan prasarana untuk memperoleh pendidikan. Namun kenyataannya untuk memenuhi kondisi tersebut tidak mudah dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada pada sebagian individu, keluarga maupun masyarakat. Ketika kendala tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan menyebabkan remaja putus sekolah. Padahal sekolah merupakan salah satu sarana untuk memperoleh pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kehidupan di masa mendatang.

Kusumah (2008) mengatakan bahwa permasalahan remaja putus sekolah merupakan persoalan yang besar dan serius. Persoalan ini tidak hanya sekedar ketidakberdayaan atau hanya putus sekolah tetapi persoalan berkurangnya sumber daya manusia yang pada saatnya tidak sanggup berbuat apa-apa, karena tidak dipersiapkan untuk menghadapi tantangan. Keadaan ini nantinya akan mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa Indonesia ketika jutaan generasi penerus bangsa mengalami putus sekolah. Selain itu juga, permasalahan remaja putus sekolah akan menimbulkan berbagai akibat, karena mereka tidak memiliki bekal yang menunjang hidup mereka saat menjadi dewasa. Hal ini akan menimbulkan tidak tercapainya cita-cita mereka, sehingga timbul ketidakberdayaan remaja, perasaan rendah diri dan terasingkan dari lingkungan sosialnya.

Diperkirakan setiap tahun remaja putus sekolah terancam haknya untuk terus bersekolah. Berdasarkan data BPS 2011, jumlah anak putus sekolah yang berumur 7-17 tahun sebesar 2,91 persen, artinya setiap 1000 orang penduduk usia 7-17 tahun, terdapat 29 anak yang putus sekolah. Setiap anak putus sekolah tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Anak yang bertempat tinggal di daerah perdesaan lebih banyak yang mengalami putus sekolah dibandingkan anak yang berada di daerah perkotaan (<http://www.bps.go.id/>)

Faktor remaja putus sekolah menurut Widodo (2012:88) antara lain yaitu ekonomi keluarga, kurangnya kemampuan dan minat remaja dalam mengikuti pendidikan di sekolah, kondisi tempat tinggal remaja, pandangan masyarakat terhadap pendidikan, adat istiadat dan ajaran-ajaran tertentu. Dengan kondisi tersebut, akhirnya saat ini banyak remaja putus sekolah yang terpaksa harus bekerja dengan kemampuan seadanya, untuk membantu perekonomian keluarga. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan waktu, fenomena anak yang bekerja, tentunya banyak berkaitan dengan alasan ekonomi keluarga dan kesempatan memperoleh pendidikan serta faktor sosial dan lingkungan.

Keberadaan remaja putus sekolah perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Remaja yang mengalami putus sekolah membutuhkan bimbingan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja ataupun melanjutkan sekolahnya kembali. Seperti yang diungkapkan Santrock (2003:265), pendekatan yang bisa dipertimbangkan oleh institusi masyarakat adalah mengarahkan kembali

pendidikan kejuruan agar mereka memperoleh keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan sejumlah besar pekerjaan, dan jaminan untuk bisa melanjutkan pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, khususnya yang berhubungan dengan program bimbingan.

Di Indonesia, pelayanan sosial yang diberikan bagi remaja putus sekolah biasanya berupa pembinaan di dalam panti. Dalam proses pembinaan tersebut, remaja putus sekolah akan diberikan bimbingan. Bimbingan-bimbingan yang diberikan antara lain: bimbingan mental agama, bimbingan sosial dan fisik, bimbingan keterampilan dan Praktek Belajar Kerja (PBK).

PEMBAHASAN

Istilah Remaja atau *Adolescence* berasal dari kata latin *Adolescere* yang artinya tumbuh ke arah kematangan (Muss,1968:4). Kematangan yang dimaksud tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial-psikologis. Arti luas dari istilah remaja saat ini mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget dalam Hurlock (1991:206) :

Secara Psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak... . Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok Transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir masa remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas, yang umum dari periode perkembangan ini.

Batas usia remaja secara umum adalah berkisar antara 13 sampai 21 tahun. Sedangkan batas usia remaja sebenarnya, yaitu remaja yang ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku atau disebut juga remaja pada fase akhir adalah antara 18 sampai 21 tahun. (Cole, 1963:25),

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiqon, 2007:19). Sedangkan menurut R. Iyeng Wiraputra, M.Sc. dan Drs. Adim,dkk. dalam kamus istilah pendidikan (1997 : 290), yang dimaksud dengan anak putus sekolah adalah anak yang karena satu atau alasan lain meninggalkan sekolah, tidak menyelesaikan jenjang sekolah yang telah ditentukan. Dengan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan remaja putus sekolah adalah remaja yang tidak menyelesaikan jenjang sekolah yang telah ditentukan karena satu atau alasan lain meninggalkan sekolah.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah, selain faktor yang berasal dari dalam diri anak didik sendiri, seperti kemalasan dan ketidakmampuan diri, bisa juga karena faktor diluar anak didik, seperti ketiadaan biaya dan sarana pendidikan, sebagaimana menurut Baharuddin M. (1981 : 252), faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah adalah faktor kependudukan, faktor ledakan usia sekolah, faktor biaya, faktor kemiskinan, faktor sarana, faktor sistem pendidikan. faktor I.Q. (Intelegensi), faktor mentalitet anak didik.

Dari faktor penyebab terjadinya putus sekolah diatas, maka kita bisa melihat bahwa ternyata penyebab putus sekolah tidaklah sederhana dan bersifat tunggal melainkan banyak faktor yang menyebabkannya. Berdasarkan pengertian remaja putus sekolah tersebut, kita bisa mengartikan bahwa yang menjadi inti persoalan remaja putus sekolah adalah ketidak mampuan, apakah itu ketidak mampuan kemampuan diri anak didik atau ketidak mampuan diluar diri anak didik.

Kondisi yang dialami oleh remaja putus sekolah menurut Combs (1973:53), yaitu:

1. Timbul rasa kecewa dan patah semangat karena terpaksa keluar dari sekolah, padahal mereka masih memiliki keinginan untuk belajar.
2. Dapat menimbulkan kemerosotan moral karena ada kekosongan dalam jiwa remaja sehingga mudah berperilaku negatif.
3. Mereka terancam menjadi buta huruf karena biasanya mereka segera mengemban tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa (hidup berumah tangga, ikut mencari nafkah), walaupun berusaha mengembangkan diri melalui latihan-latihan.
4. Mereka kurang mampu mencapai kedewasaan sehingga kurang siap untuk berkeluarga, kurang pergaulan, kurang mandiri.
5. Masyarakat banyak dirugikan karena biasanya remaja putus sekolah dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, dan mereka tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Remaja putus sekolah merupakan salah satu masalah sosial yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, remaja putus sekolah dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja. Diperlukan upaya penanganan remaja putus sekolah untuk mengurangi dampak negatif yang mereka timbulkan. Menurut Santrock (2003:265), pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengawasi pengalaman kerja, seperti melalui pendidikan kooperatif, magang, kerja praktek, pelatihan sebelum bekerja, dan perusahaan yang dikelola oleh remaja.
- b. Layanan masyarakat dan lingkungan, termasuk layanan sukarela dan layanan bimbingan oleh remaja.
- c. Mengarahkan kembali pendidikan kejuruan, dimana prinsipnya seharusnya bukan menyiapkan remaja untuk melakukan pekerjaan tertentu, namun lebih

kearah memperoleh keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan pada sejumlah besar pekerjaan.

- d. Jaminan untuk bisa melanjutkan pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, khususnya yang berhubungan dengan program bimbingan (*mentoring*).

Pelayanan sosial merupakan salah satu upaya yang tepat untuk memperbaiki keberfungsian sosial remaja putus sekolah. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan dalam arti sempit ialah pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung (Sukoco, 1991:3). Pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah adalah kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap masalah remaja putus sekolah dan dilaksanakan secara langsung dan terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu remaja putus sekolah agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tujuan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah adalah membantu para remaja putus sekolah terlantar untuk dapat mewujudkan tujuan mereka serta memecahkan permasalahan yang mereka hadapi agar dapat memperbaiki kondisi kehidupannya secara mandiri.

Pelaksanaan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah merupakan suatu proses pelayanan untuk mengembalikan peranan sosial penerima manfaat sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan perannya. Pelayanan sosial yang berbasis lembaga atau sering dikenal dengan pelayanan sosial di dalam panti menurut Kurniasari dkk (2009:19) adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan fisik, meliputi permakanan, kegiatan olahraga, perawatan kesehatan.
- b. Bimbingan mental, meliputi:
 1. pemenuhan kebutuhan akan privasi.
 2. memberikan kesempatan menentukan pilihan sesuai dengan bakat dan minat penerima manfaat.
 3. pemberian pelayanan pendidikan kecerdasan.
- c. Bimbingan sosial, meliputi:
 1. Bermain, rekreasi serta pemanfaatan waktu luang
 2. Kegiatan kesenian
 3. Menjaga martabat penerima manfaat
 4. Membina relasi dan kedekatan
 5. Memberikan peluang partisipasi penerima manfaat dalam mengungkapkan perasaannya.
- d. Bimbingan keterampilan kerja
Dalam bimbingan keterampilan kerja ini akan diberikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh penerima pelayanan. tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang selain membutuhkan sikap dan kepribadian yang baik juga harus didukung oleh keterampilan.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani remaja putus sekolah. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan sosial sistem panti

melalui Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR). Setiap provinsi di Indonesia memiliki PSBR yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi. Dalam Buku Standar Pelayanan Sosial PSBR yang diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Anak (2008) mengatakan bahwa PSBR memiliki peranan atau tugas yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja putus sekolah terlantar. Tujuan pelayanan sosial di PSBR adalah untuk memperbaiki keberfungsian sosial remaja putus sekolah agar nantinya mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga tanpa harus bergantung dengan orang lain.

Dalam memberikan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah tentulah tidak mudah. Seorang pekerja sosial harus mampu mendampingi dan membantu remaja putus sekolah dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi selama proses pelayanan sosial agar pelayanan sosial yang diberikan kepada remaja putus sekolah dapat sesuai dengan kebutuhannya.

Tujuan pemberian pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah adalah untuk membantu memperbaiki keberfungsian sosial remaja putus sekolah dan mempersiapkan remaja putus sekolah untuk masuk ke dalam dunia kerja, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Selain itu juga, dengan adanya pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

PENUTUP

Pemberian pelayanan sosial kepada remaja putus sekolah, harus dilakukan sesuai dengan dengan tahap-tahap yang ada. Tahap-tahap tersebut dapat mempermudah para pekerja sosial dalam menentukan treatment apa yang akan diberikan kepada remaja putus sekolah. Dalam memberikan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah, harus disesuaikan dengan kebutuhan remaja, sehingga pelayanan sosial yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi remaja tersebut.

Pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah tentunya sangat diperlukan agar remaja tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya di masyarakat sesuai dengan perannya. Selain itu juga, pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Ketika remaja putus sekolah yang telah mendapatkan pelayanan sosial telah mampu melaksanakan tugasnya secara baik di masyarakat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, maka pelayanan sosial tersebut dikatakan berhasil. Namun sebaliknya, ketika remaja putus sekolah yang telah mendapatkan pelayanan sosial belum mampu melaksanakan perannya di masyarakat dan belum dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, berarti terdapat kesalahan pada pelaksanaan pelayanan sosialnya ataupun terhadap remaja itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Cole, L. (1963). *Psychology Of Adolescence. 5 Edition*. New York : Holt Rinehard and Winston Inc.
- Dariyo, Agoes.2004. Psikologi Perkembangan Remaja. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Direktoral Pelayanan Sosial Anak. Depsos RI. (2008). *Standar Pelayanan Sosial Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)*. Jakarta.
- Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta : Erlangga
- Kusumah, Inu Hardi. 2008. Model Kewiraswastaan Bidang Jasa Keterampilan Otomotif. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence* Perkembangan Remaja. Erlangga. Jakarta
- Soetarso. 1997. Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial . Bandung : STKS
- Wibhawa, Budhi, dkk. 2010. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Widodo,Nurdin Dkk. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Pada Panti Sosial : Pembinaan Lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitas Sosial. P3KS Press (Anggota IKAPI). Jakarta
- www.bps.go.id (diunduh pada 2 November 2011 pukul 15.09)

PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA

Oleh:

Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi

E-mail:

(indahpermatadarma@gmail.com; titi.rusyidi06@gmail.com)

ABSTRAK

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara dikelas biasa bersama teman-teman usianya.

Selama ini anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka.

Kenyataan penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia masih belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan dan pedoman penyelenggaraan, baik dari segi siswa, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, dukungan orang tua dan masyarakat. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia saat ini masih menjadi fenomena.

Kata Kunci: layanan sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusi

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata tentu sangat berpengaruh dan penting dalam pengembangan pendidikan. Selama ini Anak Berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya, hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang

tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, dan begitupun sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat disekitarnya.

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan sekolah inklusi ini diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

Pembahasan

Pendidikan inklusi telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan inklusi didasari oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994.

Pendidikan inklusi menurut beberapa ahli mempunyai pengertian yang beragam, diantaranya :

- a. Tarmansyah (2009:75) mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama.
- b. Tarmansyah (2009:76) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler.
- c. L.K.M. Marentek (2007:145) mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (*slow learner*) maupun yang berkesulitan belajar lainnya.

Saat ini Indonesia memang belum memiliki data yang akurat dan spesifik tentang berapa banyak jumlah anak berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata ada sekitar 1,5 juta jiwa. Namun secara umum, PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah, yaitu 5 - 14

tahun, ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia ternyata cukup besar.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang berkebutuhan khusus seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan pendidikan inklusi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas-dinas pendidikan di provinsi, Kota/Kabupaten. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusi menemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala tersebut yang sering dilaporkan adalah kesalahan pemahaman tentang konsep pendidikan inklusi, peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang tidak luwes dan sebagainya.

Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga Negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya.

Strategi, metode, atau cara mengimplementasikan pendidikan inklusif di masing-masing negara sangat bervariasi (UNESCO, 200; Stubbs, 2002). Keberagaman implementasi ini disebabkan karena tiap-tiap negara memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Di samping itu, perbedaan implementasi ini juga terjadi di tingkat provinsi, kota, bahkan sekolah.

Upaya memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor budaya, politik, sumber daya manusia (Kwon, 2005). Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut *index for inclusion* (Ainscow, 2000). Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi Kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) dimensi Praktik (*evolving inclusive practices*). Setiap dimensi dibagi dalam dua seksi, yaitu: Dimensi budaya terdiri atas seksi membangun komunitas (*building community*) dan seksi membangun nilai-nilai inklusi (*establishing inclusive values*). Dimensi kebijakan terdiri atas seksi pengembangan tempat untuk semua (*developing setting for all*) dan seksi melaksanakan dukungan untuk keberagaman (*organizing support for diversity*). Sedangkan dimensi praktik terdiri atas seksi belajar dan bermain

bersama (*orchestrating play and learning*) dan seksi mobilisasi sumber-sumber (*mobilizing resources*).

Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun”.

Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat *segregasi* atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan pendidikannya seperti sekolah SLB yang di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatanya seperti: SLB-A untuk sekolah anak *tuna netra*, SLB-B untuk sekolah anak *tunarungu*, SLB-C untuk sekolah anak *tunagrahita*, SLB-D untuk sekolah anak *tunadaksa*. Selanjutnya menuju pada pendidikan integratif, atau dikenal dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan anak luar biasa masuk ke sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut dan kemudian inklusi yaitu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu.

Selama ini anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kebutuhannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak berkebutuhan khusus dengan anak – anak pada umumnya. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok berkebutuhan khusus menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok berkebutuhan khusus. Sementara kelompok berkebutuhan khusus sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok berkebutuhan khusus dalam menyuarkan hak – haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem

pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan.

Meski sampai saat ini sekolah inklusi masih terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, namun dilihat dari sisi idealnya sekolah inklusi merupakan sekolah yang ideal baik bagi anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung terhadap anak dengan berkebutuhan khusus, mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya terutama dari aspek sosial dan emosional. Sedangkan bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus memberi peluang kepada mereka untuk belajar berempati, bersikap membantu dan memiliki kepedulian. Disamping itu bukti lain yang ada mereka yang tanpa berkebutuhan khusus memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikitpun.

Penyelenggaraan sistem sekolah inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun masyarakat inklusi. Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai realitas kehidupan. Banyak kasus yang muncul terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusi belum dipersiapkan dengan baik.

Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Penyelenggaraan sekolah inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan dilapangan adalah hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasan yang masih dibawah rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima, serta belum memiliki sarana prasaranan khusus. Dukungan dari orangtua anak berkebutuhan khusus, orangtua siswa reguler, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral. Padahal seharusnya dukungan yang dibutuhkan berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah belum merata di semua daerah dan masih sangat terbatas, baik dalam bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan : monitoring, pembimbingan maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi) maupun bantuan non-teknis (dana maupun peralatan).

Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut (Ashman, 1994 dalam Emawati, 2008) :

1. Kelas Reguler (Inklusi Penuh)

- Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
2. Kelas reguler dengan *Cluster*
Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus.
 3. Kelas Reguler dengan *Pull Out*
Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
 4. Kelas Reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*
Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak norma di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
 5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian
Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler.
 6. Kelas Khusus Penuh
Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Di beberapa kota di Indonesia pun sudah muncul sekolah inklusi yang pelaksanaannya atas kerjasama sekolah dan pemerintah kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih sulit mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Salah satu bentuk kesulitan tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum menerima adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, selain itu juga ketidakharmonisan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan sekolah inklusi, seperti diperlukannya guru yang berkualitas dan pihak sekolah yang baiknya mendukung penuh pelaksanaan sekolah inklusi. Setiap pihak hendak bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia dalam usaha bersama mewujudkan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar supaya di masa mendatang anak berkebutuhan khusus betul-betul mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya dan dapat menghormati realitas keberagaman dalam kehidupan di masyarakat secara maksimal.

Daftar Rujukan

- Budhi Wibhawa, Santoso T. Raharjo, Meilany Budiarti S. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*, Bandung : Widya Padjadjaran.
- Openshaw, Linda. 2008. *Social Work In School*. New York : The Guildford Press
- Stubbs, Sue. 2002. *Inclusive Education Where There Are Resources : The Atlas Alliance*
- Suparno, Edi Purwanto. Tanpa Tahun. Pendidikan Akan Kebutuhan Khusus Unit 2 *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. “Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar. Vol. 1, No. 1, Januari 2012
- Jurnal Pendidikan Khusus*. Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol. 7, No. 2, November 2010

PEKERJA SOSIAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI

Oleh:

Nurul Fadhilah Rezeki, & Binahayati Rusydi

Email:

(nurulfadhilahr@gmail.com; titi.rusydi06@gmail.com)

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang, termasuk bagi anak dengan disabilitas. Indonesia dengan beribu pulau yang dimilikinya sampai saat ini belum merata pembangunannya, termasuk di dalamnya akses terhadap pendidikan. Data yang diperoleh dari buku Profil Anak Indonesia 2013 menyebutkan bahwa sebanyak 35,25% anak dengan disabilitas belum/tidak pernah sekolah, 43,13% tidak/belum tamat SD. Menurut Rustanto (2013), pekerja sosial sekolah merespon perwujudan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus serta keluarganya. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, pekerja sosial sekolah memiliki peranan menjadi jembatan bagi anak dengan disabilitas, masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Profesi pekerja sosial professional yang masih berkembang di Indonesia menjadi salah satu hambatanya. Tidak banyak orang yang mengetahui apa itu pekerja sosial professional membuat urgensi pekerja sosial di berbagai setting tidak begitu tampak. Hal yang sama terjadi bagi para pekerja sosial sekolah. Pentingnya peran pekerja sosial di sekolah tidak tampak karena hingga saat ini hanya sedikit sekolah yang memiliki pekerja sosial dan banyak sekolah yang tetap melaksanakan “inklusi”-nya tanpa keberadaan pekerja sosial. Sebenarnya dengan melihat begitu pentingnya peran pekerja sosial di sekolah, pelaksanaan pendidikan inklusi akan lebih maksimal dan mengakomodir kebutuhan dan hak para siswa.

Kata-kata kunci: ADD (anak dengan disabilitas), Inklusi, pekerjaan sosial, pendidikan, pekerja sosial sekolah

Pendahuluan

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dengan beragam *setting* yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Fokusnya, terutama, pada hak asasi manusia yang dimiliki seseorang. Walaupun masih banyak orang yang menganggap bahwa pekerja sosial bukan merupakan suatu profesi yang professional, melainkan merupakan bagian dari gerakan sosial seperti relawan. Namun, di sisi lain pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memiliki poin-poin untuk dapat dikatakan sebagai profesi, seperti kode etik, *body of knowledge*, dsb. Pekerja sosial, saat ini sudah mulai di kenal dalam perannya di *setting-setting* tertentu. Sebut saja pekerja sosial sekolah yang saat ini sudah mulai di kenal keberadaannya, walaupun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak

memiliki pekerja sosial. Salah satu bentuk sekolah yang dianggap sangat perlu memiliki pekerja sosial sebagai bagiannya adalah sekolah inklusi. Hal tersebut menjadi penting mengingat masyarakat Indonesia masih belum bisa dikatakan sebagai masyarakat yang inklusif. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kecacatan fisik, mental, bahkan gangguan belajar sebagai hal yang membuat mereka merasa risih.

Pelaksanaan pendidikan inklusif tak jarang dianggap sebagai salah satu langkah dan upaya pemerintah dalam mengupayakan dan membentuk masyarakat yang inklusif, masyarakat yang terbuka dengan beragam perbedaan yang dimiliki individu, serta melihat seseorang sebagai manusia seutuhnya yang memiliki beragam keunikannya. Pendidikan juga merupakan upaya untuk memanusiakan manusia dan upaya mengurangi angka/tingkat kemiskinan. Tak jarang mereka yang berkebutuhan khusus/ mengalami disabilitas dianggap sebagai aib keluarga, dikekang dan di batasi gerak sosialnya oleh keluarga. Hal tersebut secara tidak langsung membuat mereka menjadi pengisi angka pengangguran mutlak, padahal mereka yang mengalami disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam mengakses pendidikan dengan mudah. Dengan tidak mengupayakan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi mereka, sama saja dengan membiarkan mereka menjadi “beban bagi negara”, karena mereka yang sudah masuk usia kerja dan dianggap dapat menyumbang pemasukan bagi negara justru tidak bekerja dan tidak berprestasi.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi anak dengan disabilitas dan anak lainnya belajar di kelas yang sama, untuk itu sekolah secara fasilitas dan cara pegajaran perlu melakukan penyesuaian. Orang tua murid lain juga perlu melakukan penyesuaian dalam bentuk mendorong anaknya untuk bergaul dan membantu anak dengan disabilitas dalam proses belajar, tidak memberikan stigma kepada anak dengan disabilitas, mengajak masyarakat khususnya orang tua lain yang belum menerima keberadaan anak dengan disabilitas di sekolah agar tidak menyudutkan anak dengan disabilitas. Murid perlu memahami bahwa diantara mereka terdapat teman-teman yang tidak sama keadaannya dengan dirinya, mereka perlu belajar menerima kekhususan teman-teman dengan disabilitas, membantu mereka dan sebagainya. Tidak hanya sekolah, orang tua murid, dan murid saja yang perlu melakukan penyesuaian, tetapi pemerintah juga perlu melakukan hal yang sama dengan mengusahakan infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung anak dengan disabilitas untuk sekolah, membuat peraturan yang mengharuskan sekolah yang menjadi sekolah inklusi untuk mengikuti perdoman pelaksanaan inklusi yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pendidikan inklusi yang dilakukannya dapat berjalan dengan optimal. Penyesuaian yang sama juga perlu dilakukan masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di daerahnya. Namun, tidak jarang masyarakat sulit dalam menerima kehadiran mereka, oleh karena itu peran pekerja sosial dalam pendidikan inklusi menjadi penting. Pekerja sosial dalam pelaksanaan pendidikan inklusi memiliki beragam peran termasuk di dalamnya menjadi jembatan antara sekolah-masyarakat-orang tua murid-murid-pemerintah. Pekerja sosial sekolah berusaha untuk menunculkan/ meningkatkan

penerimaan masyarakat terhadap anak dengan disabilitas sehingga pencapaian dari anak dengan disabilitas di sekolah menjadi lebih optimal.

Pendidikan Inklusif

Pentingnya pendidikan terutama pada anak, sudah diakui secara internasional dan sudah menjadi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Tahun 1989 *UN General Assembly* mengadopsi *The Convention on The Rights of the Child* yang mengikrarkan “*Make primary education compulsory and available free to all*” (Ban Ki-Moon, 2007:38). Pernyataan/ ikrar tersebut muncul sebagai langkah awal untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan di sekolah yang saat itu masih rendah karena beragam hal mulai dari gender, budaya, hingga fisik anak. Ikrar tersebut kemudian berkembang menjadi lebih spesifik lagi dalam bentuk ikrar lain. Ikrar mengenai pendidikan inklusif muncul dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*, tahun 1995. Dalam deklarasi ini, 92 negara dan 25 organisasi internasional berkumpul di Salamanca, Spanyol untuk mendukung pencapaian *Education for All* dengan menyatukan persepsi mengenai anak yang salah satu outputnya adalah menyelenggarakan pendidikan inklusif agar semua anak dapat mengakses pendidikan. Deklarasi ini percaya bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapat pendidikan, memiliki karakteristik khusus/unik dan sistem serta program pendidikan harus disesuaikan untuk mengakomodir kekhususan yang ada.

Banyak anggapan, bahwa pendidikan inklusif merupakan upaya bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (anak dengan disabilitas) yang dikembangkan pemerintah untuk mengatasi presentase populasi anak berkebutuhan khusus (anak dengan disabilitas) bersekolah yang kecil dan mengupayakan pendidikan untuk semua. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi semua anak. Bentuk komitmen ini dilakukan dengan menjabarkan landasar filosofis, landasan yuridis, dan mengajak semua stake holder yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi untuk bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya.

Di Indonesia, landasan filosofis dari pendidikan inklusi menurut Suparno dalam Pendidikan Anak Kebutuhan Khusus UNIT 2 adalah

- Pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
- Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda
- Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua masyarakat dan pemerintah
- Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak
- Setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya

Dari pernyataan diatas, tersirat bahwa pendidikan inklusif memiliki tujuan yang beragam, misalnya meningkatkan angka partisipasi ABK yang bersekolah, hingga menciptakan masyarakat yang memandang seseorang bukan dari label (kecatatan) namun sebagai individu seutuhnya yang memiliki keunikan tersendiri. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Warner (2006), yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, karena pendidikan inklusif tidak lepas dari kerja sama antara orang tua, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Saat semua pihak terkait sudah dapat melaksanakan pendidikan inklusif dengan baik, dapat dikatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap anak/mereka yang berkebutuhan khusus sudah baik dan tercipta lingkungan yang inklusif. Hal ini menjadi penting karena pendidikan tidak hanya terkait akses, namun proses memberfungsikan anak berkebutuhan khusus untuk menerima hak mereka dan meningkatkan pencapaian prestasi yang akan meningkat seiring meningkatnya penghargaan dan percaya diri. Warner (2006).

Di Indonesia pendidikan inklusi tidak hanya muncul sebagai bentuk mendukung terciptanya *Education for All* saja, namun juga merupakan upaya untuk memberikan pendidikan bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Indonesia dengan beribu pulau yang dimilikinya sampai saat ini belum merata pembangunannya, termasuk di dalamnya akses terhadap pendidikan. Data yang diperoleh dari buku Profil Anak Indonesia 2013 menyebutkan bahwa sebanyak 35,25% anak dengan disabilitas belum/tidak pernah sekolah, 43,13% tidak/belum tamat SD. Selain itu, juga di sebutkan bahwa sebanyak 36.66% anak dengan disabilitas di pedesaan belum/tidak sekolah sedangkan 19.98% lainnya putus sekolah, dan sisanya sekolah. Mengingat presentase jumlah anak yang tidak sekolah yang masih tinggi pemerintah bersama NGO (*Non Government Organization*) terkait berusaha untuk mengupayakan pendidikan inklusi di daerah-daerah sehingga anak dengan disabilitas di pedesaan juga mengakses pendidikan. UNESCO 1994 dalam Alimin (2008:7), memberikan gambaran bahwa:

“Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak, tanpa kecauali ada perbedaaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan *one school for all*.”

Dari pendapat tersebut tergambarakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh warga negara untuk mengakses pendidikan sehingga prinsip *Education for All* akan tercapai, salah satunya melalui *one school for all*.

Pekerja Sosial Sekolah

Sebagai pekerja sosial, dengan membahas pendidikan inklusi kita tidak dapat memisahkannya dari konteks hak asasi manusia. Pekerjaan sosial dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. HAM menjadi dasar

para pekerja sosial dalam memberikan pelayanan. Menurut Ife (2008), pekerja sosial yang bergerak di bidang HAM akan memiliki banyak peran dalam memperjuangkan hak, mereka bisa berperan sebagai *a child protection social worker, a social worker at a women's refuge*, pekerja sosial yang dalam tim assessment untuk orang dengan disabilitas, dsb. Diskriminasi merupakan salah satu hal yang di tentang HAM, termasuk didalamnya diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (ADD).

Dalam membahas mengenai pendidikan inklusi salah satu setting pekerja sosial yang terkait adalah pekerja sosial yang bekerja di sekolah. Pekerja sosial yang berkerja di sekolah dan berusaha untuk memastikan agar setiap anak terjamin pemenuhan hak-nya adalah pekerja sosial sekolah.

Pekerja sosial sekolah adalah salah satu bidang praktek pekerjaan sosial, yang antara lain memberikan pelayanan konseling penyesuaian diri di sekolah (*school adjustment counseling*), tes kemampuan pendidikan (*educational testing*), konseling keluarga (*family counseling*) dan pengelolaan perilaku (*behaviour management*). Pekerja sosial sekolah juga merespon perwujudan hak – hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak – anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak penyandang cacat) serta keluarganya. Rustanto (2013)

Berbeda dengan pendapat yang diutarakan Rustanto, Openshaw (2008) menjelaskan bahwa 4 tugas pokok pekerja sosial, adalah :

1. Konsultasi dengan pihak lain dalam sekolah
2. Assessment dalam pelayanan langsung, konsultasi dan pengembangan program
3. Intervensi dengan anak, keluarga dan kelompok
4. Membantu pengembangan program
(diterjemahkan oleh penulis)

Pekerja sosial sekolah memiliki tugas lain selain yang telah diutarakan diatas, yaitu menjadi jembatan antara sekolah-masyarakat-orang tua murid-murid-dinas terkait. Tidak sedikit masyarakat yang merasa risih dengan keberadaan anak dengan disabilitas di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya, ini merupakan salah satu tugas dari pekerja sosial untuk membuat mereka dapat menerima keberadaan anak dengan disabilitas di sekolah, baik itu dengan melakukan FGD, pendekatan personal, dsb. Dalam penyediaan fasilitas sekolah yang ramah bagi anak dengan disabilitas, pekerja sosial dapat mengadvokasi sekolah terhadap dinas terkait. Bagi murid yang memiliki masalah dalam sekolah baik yang berasal dari dalam diri maupun luar diri anak, pekerja sosial pun berusaha untuk meminimalisir baik dengan memberikan pelayanan langsung berupa konsultasi, konseling keluarga, *behavior management*, dsb.

Peran lain dari pekerja sosial adalah membantu pengembangan program, dalam konteks pendidikan inklusi pekerja sosial dapat membantu untuk mengembangkan program pelayanan/ penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dapat mengakomodir kebutuhan dari anak dengan disabilitas dan anak normal di waktu yang bersamaan. Pengakomodiran/ penjaminan hak ini juga merupakan

salah satu kewajiban bagi pekerja sosial yang bekerja di sekolah, karena salah satu tugas pekerja sosial sekolah adalah memastikan hak dari anak dari anak dengan disabilitas dari sejak lahir hingga berumur 21 tahun, termasuk keluarganya, terpenuhi seperti yang dinyatakan Openshaw (2008).

Pekerja Sosial dan Pendidikan Inklusi

Peran pekerja sosial yang penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia sampai saat ini belum berjalan beriringan. Profesi pekerja sosial professional yang masih berkembang di Indonesia menjadi salah satu hambatanya. Tidak banyak orang yang mengetahui apa itu pekerja sosial professional membuat urgensi pekerja sosial di berbagai setting tidak begitu tampak. Hal yang sama terjadi bagi para pekerja sosial sekolah. Pentingnya peran pekerja sosial di sekolah tidak tampak karena hingga saat ini hanya sedikit sekolah yang memiliki pekerja sosial dan banyak sekolah yang tetap melaksanakan “inklusi”-nya tanpa keberadaan pekerja sosial. Sebenarnya dengan melihat begitu pentingnya peran pekerja sosial di sekolah, pelaksanaan pendidikan inklusi akan lebih maksimal dan mengakomodir kebutuhan dan hak para siswa saat pekerja sosial dilibatkan.

Kesimpulan

Sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan inklusi seharusnya memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kekhasan/ kekhususan dari setiap anak, terutama dari ABK. Hal tersebut tampak dari cara dan teknik pengajaran, fasilitas, dan kurikulum yang ada. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelayana pendidikan inklusi adalah keterbatasan tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Dengan tenaga pengajar yang terbatas dan latar belakang pendidikan pengajar yang memiliki latar pelakang dari pendidikan luar biasa, akan berimplikasi pada guru pengajar kelas yang akan kewalahan saat melaksanakan proses belajar mengajar. Mungkin, masalah kemampuan dari para pengajar dalam menghadapi ABK sudah terbantu dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, masalah yang muncul dari ketidakjelasan standarisasi sekolah inklusi tidak hanya sampai disitu.

Mengingat masih banyaknya keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, pekerja sosial memegang salah satu peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini dapat mengakomodir kebutuhan semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus (dengan disabilitas) dan dapat berjalan secara optimal. Sebagai pekerja sosial, peranannya tidak hanya sebatas itu, namun juga membantu agar anak-anak dengan disabilitas dapat mengembangkan dirinya secara optimal baik dari segi sosial maupun akademis. Jadi pelayanan yang diberikan pekerja sosial dalam setting sekolah tidak hanya terbatas pada anak yang bersekolah saja, namun juga pada keluarga, kelompok, masyarakat dan di tingkat regulasi dan perencanaan program.

Saran

Saran dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusi agar dapat mengakomodir hak dari anak dengan disabilitas adalah dengan melibatkan pekerja sosial dalam tim yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan juga jika nantinya di Indonesia keberadaan pekerja sosial sekolah menjadi salah satu syarat bagi sekolah untuk mendapat akreditasi “A”, sehingga diharapkan setiap sekolah akan berlomba-lomba mempekerjakan pekerja sosial seperti apa yang terjadi pada rumah sakit dengan pekerja sosial medis. Regulasi mengenai siapa saja dan peran dari masing-masing profesi yang terlibat dalam proses *assessment* anak di sekolah inklusi juga harus diperjelas agar tidak terjadi kesalah pahaman peran (tumpang tindih) pekerjaan. Selain itu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi yang terkait dengan pendidikan inklusi, seperti perguruan tinggi untuk guru, pekerja sosial, psikolog, dsb., perlu memberikan pemahaman kepada siswanya mengenai bekerja dalam tim yang terdiri dari beragam disiplin ilmu, sehingga dalam prakteknya mereka tidak akan merasa kaget dan canggung saat bekerja dalam tim.

Sumber buku :

Ife, Jim. 2008. *Human Rights and Social Work: Toward Rights-Based Practice*. Sidney: Cambridge University Press.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS. 2013. Profil Anak Indonesia 2013. Jakarta : PT. Desindo Putra Mandiri.

Ki-Moon, Ban. 2007. *Children and The Millennium Development Goals : Progress towards A World Fit for Children*. New York: UNICEF.

Openshaw, Linda. 2008. *Social Work in Schools*. New York : The Guilford Press

Warner, Helen K. 2006. *Meeting the Needs of Children with Disabilities: Families and Professionals Facing The Challenge Together*. New York: Routledge.

Sumber Lainnya :

Anuar, Azad Athahiri dan Rozubi, Norsayyidatina Che.2010. “Keperluan Pendidikan Inklusif dalam Program Pendidikan Arus Perdana di Malaysia”. International Conference on Learner Diversity.

Pendidikan Anak Kebutuhan Khusus UNIT 2, Suparno, Edi Purwanto, Hakikat Layanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Alimin, Zaenal. (2008). Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus Dan Anak Berkebutuhan Khusus.(Online). Tersedia: <http://zalimin.blogspot.com/2008/03/pemahaman-konsep-pendidikan-kebutuhan.html>. [31/10/14]

Konselor qita. 2014. “PENDIDIKAN INKLUSIF”. Melalui <http://konselorqita.blogspot.com/2014/01/pendidikan-inklusif.html>, [14/03/14]

Rustanto, Bambang. 2013. “Pekerjaan Sosial di Sekolah”. Melalui <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2013/08/pekerjaan-sosial-di-sekolah.html>, [20/09/14]

THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI

Oleh :

Rizki Bunga Lestari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan

Oleh:

(rizkibungalestari@yahoo.com; soninulhaqim@yahoo.com; sangirfan@gmail.com)

Abstract

Social Work Existence as a Profession. The fundamental essence of the packaging development of social welfare through a variety of welfare services is equitable distribution of all components with human rights standards. With a base rights, quality of service has become a claim. Social services as demand human rights are very important, and a good quality of service becomes a necessity that can not be denied. Therefore, social services should be planned systematically, and meet the quality standards of service in accordance with the philosophy of the nation, and the demands of professionalism. In the circumstances of the development of social problems and public demand for policy orientation and development programs of social welfare, which is based on fairness for all and protect human rights in the future, it takes a professional staff of social work. Thus, the purpose of writing this article is to change the mindset of society, to improve the existence of social workers as a profession to the public not just a charity activity but as a profession that has the knowledge, skills, and values in practice.

Key words: *existence, profession, social work*

Abstrak

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai Suatu Profesi. Esensi mendasar dari kemasan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai pelayanan adalah pemerataan kesejahteraan hidup seluruh komponen bangsa dengan standar hak asasi manusia. Dengan basis hak asasi, kualitas pelayanan sudah menjadi tuntutan. Pelayanan sosial sebagai tuntutan hak asasi manusia sangat penting, dan kualitas pelayanan yang baik menjadi keharusan yang tidak dapat dipungkiri. Karenanya, pelayanan sosial harus terencana secara sistematis, serta memenuhi standar kualitas pelayanan yang sesuai dengan filosofi bangsa, dan tuntutan profesionalisme. Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional pekerjaan sosial. Maka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengubah *mindset* masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial sebagai suatu profesi kepada khalayak bukan hanya sekedar kegiatan *charity* melainkan sebagai suatu profesi yang memiliki *knowledge, skill, dan values* dalam praktiknya.

Kata kunci: eksistensi, pekerja sosial, profesi

PENDAHULUAN

Dalam berita website Metro TV dijelaskan bahwa kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai sebanyak 15,5 juta jiwa.

Dari fakta tersebut, maka dibutuhkan suatu profesi yang sangat berperan dalam hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial. Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial.

“Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial. Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu. Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.” (Zastrow, 2004: 13)

Selain itu, dalam referensi tersebut dipaparkan definisi lainnya. The National Association of Social Work (NASW) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini. Praktek kerja sosial terdiri dari profesional penerapan sosial nilai kerja, prinsip, dan teknik untuk satu atau lebih untuk membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata (misalnya, yang melibatkan penyediaan makanan, perumahan, atau pendapatan); memberikan konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. (NASW, 1973, p. 4-5)

NASW melaporkan bahwa Bob Etheridge (D-N.C.) sebagai wakil rakyat memberi penghormatan kepada pekerja sosial. Ia berbagi dengan pembicara dari DPR AS dan memberikan komentar sebagai berikut:

“Para pekerja sosial mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Pekerjaan mereka menyentuh kita semua sebagai individu dan sebagai seluruh masyarakat. Mereka berpendidikan, sangat terlatih, dan

berkomitmen profesional. mereka bekerja dalam pelayanan keluarga dan kesehatan mental masyarakat instansi, sekolah, rumah sakit, panti jompo, dan banyak lembaga swasta dan publik lainnya. Mereka mendengarkan, mereka peduli. Dan yang paling penting, mereka membantu mereka yang membutuhkan.” (Vallianatos, 2012)

Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 Pekerja Sosial profesional lulusan dari 37 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial. Sebagian besar dari jumlah Pekerja Sosial profesional tersebut tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Banyak dari mereka bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional. Sebagian besar lagi bekerja di Instansi Pemerintah dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). Berdasarkan data populasi Pekerja Sosial tersebut, diketahui pula data sampai Mei 2013 jumlah Pekerja Sosial fungsional sebanyak 1.154 orang yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. (<http://www.microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2014/09/02/3/185591/> diakses pada 1 Oktober 2014 pukul 14.07 WIB)

Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional pekerjaan sosial. Jika ratio Pekerja Sosial (Social Worker) dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial minimal satu berbanding 100, maka kebutuhan Pekerja Sosial di Indonesia paling sedikit sebanyak 155.000 orang. Estimasi jumlah PMKS tahun 2014 sebanyak 15,5 juta keluarga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial saat ini sekitar 15.522 orang. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 139.000 Pekerja Sosial.

Kebutuhan akan pekerja sosial yang terus meningkat untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 15,5 juta rumah tangga tidak diimbangi dengan lulusan perguruan tinggi kesejahteraan sosial serta peminat masyarakat untuk mengikuti pendidikan pekerjaan/kesejahteraan sosial, hal ini salah satunya dikarenakan masyarakat belum mengenal pekerja sosial sebagai profesi yang profesional, masyarakat lebih mengenal pekerjaan sosial sebagai kegiatan karitas. Mereka berpandangan bahwa bidang pekerjaan ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapun, tidak harus dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini pula yang kemudian dapat menyebabkan kualitas pelayanan dan penanganan masalah menjadi tidak optimal dan mencapai hasil yang diharapkan.

Hal tersebut diperjelas dalam website P4S Kemsos (2014) bahwa sebutan pekerja sosial profesional ini dimaksudkan untuk membedakan dengan mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan sosial tapi bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Namun, hal ini tidak dapat dihindari karena dalam kenyataannya banyak bidang pekerjaan sosial yang digarap oleh mereka yang

bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Lahan yang seharusnya digarap oleh profesi pekerjaan sosial akan diambil alih oleh profesi lain.

Lahan yang dimaksud adalah ranah pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Banyak bidang pekerjaan peksos yang saat ini masih menjadi garapan profesi lain, seperti psikolog, keperawatan dan profesi lainnya. Pekerja sosial memang profesi yang menggunakan hati, tapi RUU akan memperkuat posisi pekerja sosial profesional dan bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban praktik pekerjaan sosial kepada masyarakat luas. Dalam beberapa kasus bahkan kita menemukan adanya pegiat dalam bidang pekerjaan sosial yang bukan berasal dari pendidikan pekerjaan sosial yang berhasil menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial lebih baik. Kedua kondisi tersebut semakin memperlemah eksistensi pekerjaan sosial sebagai bidang keahlian yang spesifik.

Ditambah lagi saat ini jabatan peksos bisa diisi oleh semua jurusan untuk masuk CPNS di beberapa provinsi. Berdasarkan hemat saya, hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya regulasi yang mengatur bahwa bidang pekerjaan yang sesungguhnya secara spesifik hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial tidak dapat diserahkan kepada oleh mereka yang bukan pekerja sosial.

Berdasarkan situs resmi KemenPAN-RB, adapun 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan masing-masing instansi adalah, Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perakayasa, dan Pemeriksa. “Bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk 11 jabatan yang bisa dilamar oleh saraja dari semua jurusan tersebut supaya segera mengalokasikannya,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman.

Namun sayangnya, sampai sekarang banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5% yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Tarmizi, B.Sc, S.Sos saat dikonfirmasi mengatakan tidak semua jabatan tersebut akan diisi. Hanya dua jabatan yang memungkinkan, yakni Pekerja sosial dan Penyuluh sosial. “Kalau untuk jabatan lain sudah banyak, seperti auditor. Dan kedua jabatan itu (Pekerja sosial dan Penyuluh sosial), juga tidak begitu spesifik,” kata Tarmizi. (<http://harianrakyatbengkulu.com/> ver3/2014/07/25/11-jabatan-cpns-bisa-dilamar-sarjana-semua-jurusan/#)

Banyak pilar penting yang telah dibangun untuk mengembangkan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. Sudah ada UU yang menuntut profesi Pekerjaan Sosial untuk melaksanakan praktik, seperti (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak yang mengamatkan pendampingan Pekerja Sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, (b) UU tentang Sisdiknas atau peraturan turunannya yang mengharapkan adanya praktik Pekerjaan Sosial di sekolah, (c) UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (d) UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi

panduan utama dalam penciptaan kerangka sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

UU ini menyebutkan pekerja sosial sebagai “*the primary profession*” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial, sebagaimana terkandung dalam UU No 11 Th 2009 ini merupakan arah sistematis dalam mencapai kondisi yang akan dituju. Namun, UU ini mengandung banyak kelemahan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum mengatur standar Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Adanya kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi, dan sertifikasi. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Indonesia (LSPSI) serta Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) sebagai pilar pengendali praktik pekerjaan sosial maupun lembaga pelayanan kesejahteraan sosial juga telah terbentuk dan akan terus berkembang.

Maka dari itu, untuk mewujudkannya dibutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan salah satunya melalui penulisan artikel ini diharapkan dapat mengubah paradigma khalayak akan pekerja sosial sebagai suatu profesi begitupun dengan lapangan praktik pekerja sosial akan lebih diakui oleh semua pihak.

EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI

Apa itu Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial?

Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial. Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial.

“Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial. Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu. Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.” (Zastrow, 2004: 13)

Selain itu, dalam referensi tersebut dipaparkan definisi lainnya. The National Association of Social Work (NASW) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini. Praktek kerja sosial terdiri dari profesional penerapan sosial nilai kerja, prinsip, dan teknik untuk

satu atau lebih untuk membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata (misalnya, yang melibatkan penyediaan makanan, perumahan, atau pendapatan); memberikan konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan (NASW, 1973, p. 4-5).

Di samping itu, kesejahteraan sosial adalah sistem program suatu negara, manfaat, dan layanan yang membantu orang, ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. Reid (1995) menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai "ide, bahwa ide menjadi salah satu dari masyarakat yang layak yang menyediakan kesempatan untuk bekerja, memberikan keamanan yang wajar dari keinginan dan penyerangan, mengutamakan kejujuran dan evaluasi berdasarkan pada jasa individu, dan ekonomi produktif dan stabilitas". (hal. 206).

Lalu, bagaimana kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial terkait? Sederhananya, pekerjaan sosial berfungsi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Fokus pekerja sosial bukan satu-satunya dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat saja. Namun, hal ini berarti mencakup kesehatan, pendidikan, rekreasi, jasa, dan keamanan masyarakat.

Keberlanjutan Karir Pekerjaan Sosial

Ada berbagai cara untuk melihat kemajuan melalui karir pekerjaan sosial. Beberapa kemajuan pekerja sosial melalui serangkaian tingkatan.. Derajat dalam pekerjaan sosial meliputi sarjana muda, master, dan doktor. Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini. Kesejahteraan sosial adalah sistem suatu negara program, manfaat, dan layanan yang membantu orang bertemu orang-orang sosial, ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan kesehatan yang penting untuk pemeliharaan masyarakat.

Bidang praktik pekerjaan sosial

Bidang praktek dalam pekerjaan sosial termasuk anak-anak dan keluarga, lansia, disabilitas, kesehatan, kesehatan mental, penyalahgunaan zat, sekolah, dan koreksional. Konteks lain untuk praktek pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial pedesaan, polisi pekerjaan sosial, dan forensik pekerjaan sosial.

Pekerjaan Sosial dan Disiplin Lainnya

Dasar dari pekerjaan sosial profesional adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Pengetahuan tidak hanya dari pekerja sosial tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman kebutuhan dan perilaku masyarakat. Hal ini termasuk psikologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, biologi, psikiatri, konseling, dan antropologi budaya.

Para pekerja sosial menggunakan pengetahuan yang diambil dari masing-masing bidang, dalam hubungannya dengan keterampilan kerja sosial dan nilai-nilai, untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Keunikan Pekerjaan Sosial

Bidang lainnya melakukan beberapa fungsi yang sama sebagai pekerjaan sosial. Misalnya, kesehatan mental dokter di bidang psikologi, psikiatri, dan konseling menggunakan keterampilan wawancara, dan beberapa juga menggunakan sebuah rencana pendekatan.

Semuanya, memiliki kesamaan inti dari wawancara dan konseling keterampilan. Namun, pekerjaan sosial melibatkan lebih dari hanya duduk dengan individu, kelompok, atau keluarga dan memecahkan beberapa masalah. Pekerjaan Sosial memiliki setidaknya lima dimensi utama yang membuatnya unik. Pertama, pekerja sosial dapat fokus pada masalah atau kelompok masalah yang kompleks dan sulit. pekerja sosial tidak menolak untuk bekerja dengan klien atau merujuk mereka ke tempat lain karena klien-klien memiliki karakteristik. Misalnya, mungkin ada sebuah keluarga di mana pelecehan seksual terjadi, dan penyalahgunaan yang harus dihentikan. Demikian juga, mungkin ada komunitas di mana tingkat kejahatan remaja adalah merajalela, dan sesuatu harus dilakukan. Tidak setiap masalah dapat diselesaikan, tetapi beberapa dapat menjadi-atau setidaknya diringankan. Praktisi kerja sosial dilengkapi dengan repertoar keterampilan untuk membantu mereka mengidentifikasi dan memeriksa masalah. Mereka kemudian membuat pilihan tentang di mana usaha mereka bisa menjadi yang terbaik untuk diarahkan.

Dimensi kedua yang membuat pekerjaan sosial yang unik adalah bahwa hal itu sering menargetkan lingkungan meliputi klien, dan bukan klien sendiri untuk perubahannya. Kadang-kadang layanan tidak tersedia atau sulit untuk mendapatkan, kebijakan yang tidak adil, atau orang-orang ditindas oleh orang lain. administrator dan orang yang berkuasa tidak selalu memiliki motivasi atau wawasan untuk memulai perubahan yang diperlukan. Pekerja sosial harus melihat di mana perubahan sangat penting di luar individu dan bekerja dengan lingkungan untuk memberlakukan perubahan tersebut.

Dimensi ketiga yang membuat pekerjaan sosial yang unik terkait dengan penargetan lingkungan: yaitu, pekerja sosial sering merasa perlu untuk mengadvokasi klien mereka. Pembelaan melibatkan secara aktif campur tangan untuk membantu klien mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Paling sering, intervensi ini berfokus pada "hubungan antara klien dan 'sistem' tidak responsif" (Epstein, 1981, p. 8). Klien telah ditentukan kebutuhan, dan lembaga sosial, organisasi. Sistem tidak responsif harus ditekan untuk membuat perubahan sehingga kebutuhan bisa dipenuhi.

Dimensi keempat yang membuat pekerjaan sosial yang unik adalah penekanan pada dan kepatuhan terhadap inti profesional nilai-nilai. Kode Etik NASW berfokus pada hak individu untuk membuat pilihan bebas dan memiliki kualitas hidup (NASW, 1999). Para pekerja sosial tidak memaksa cara berpikir atau bertindak orang tertentu. Sebaliknya, mereka membantu orang membuat keputusan sendiri tentang bagaimana untuk berpikir atau bertindak.

Kelima dimensi membuat pekerjaan sosial yang unik berkaitan dengan inti nilai-nilai pekerjaan sosial yakni betapa pentingnya untuk klien dalam membuat keputusan mereka sendiri. Para pekerja sosial tidak melacak cara spesifik berpikir atau bertindak seseorang. Sebaliknya, mereka berlatih dalam suatu kemitraan dengan klien, membuat dan melaksanakan rencana bersama-sama. Kebanyakan profesi lain menekankan otoritas dan keahlian profesional, pada satu tangan, dan status bawahan klien sebagai penerima jasa.

Tujuan Pendidikan, Kurikulum, dan Kompetensi Pekerjaan Sosial

Selanjutnya, muncullah pertanyaan utama: “Bagaimana dengan identitas pekerja sosial?” Pengetahuan dan kemampuan apa yang mereka miliki? Kedua faktor berperan dalam menetapkan identitas dan merupakan pertanyaan dasar bertanya dari banyak profesi. Tentu saja, masyarakat juga ingin tahu apakah mereka layak legitimasi.

Reiner Wendt, wakil dari Ekologis Teori Sosial dalam IUC Jurnal of Social Work bertanya: Bagaimana kita menciptakan identitas pekerjaan sosial, jika dalam citra diri profesional setiap bidang pekerjaan menjelaskan dirinya sebagai bidang khusus pekerjaan sosial? Konseling, pelayanan sosial klinis, karya sosial masyarakat, semua mengklaim identitas tertentu. Apakah mereka memiliki kesamaan? Apa jenis pola dasar yang dapat menggambarkan dari pekerja sosial? Bagaimana seorang pekerja sosial melihat identitasnya sendiri?

Dr. Heiko Kleve, anggota dari DBSH menunjukkan bahwa identitas ini adalah identitas pekerjaan sosial. Keterbukaan, kerapuhan, dan ambivalensi adalah karakter pekerjaan sosial. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada citra idealis. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa memiliki identitas seragam - tetapi jika hal ini tidak mungkin, dan diskusi tidak akan berhenti, maka akan tetap sulit untuk menciptakan landasan profesionalisme untuk seorang pekerja sosial.

Salah satu cara untuk memahami pekerjaan sosial yakni dengan meninjau konten dan harapan dalam akreditasi program kurikulum pekerjaan sosial. Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE) adalah organisasi akreditasi program kerja sosial di seluruh Amerika Serikat. Akreditasi adalah sebutan resmi oleh yang berwenang tubuh (dalam hal ini, CSWE) bahwa pendidikan Program memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini biasanya diperlukan dalam berlisensi sebagai pekerja sosial. Kebijakan Pendidikan CSWE dan Standar Akreditasi (EPAS) menekankan bahwa program kerja sosial harus mencerminkan nilai-nilai tertentu seluruh kurikulum mereka. EPA menyatakan bahwa "layanan, keadilan sosial, martabat dan nilai seseorang, pentingnya hubungan manusia, integritas,

kompetensi, hak asasi manusia, dan penelitian ilmiah adalah salah satu nilai-nilai inti pekerjaan sosial "(CSWE, 2008b, hal. 2). EPA juga menetapkan 10 daerah yang lulusan dari program pekerjaan sosial harus mempunyai kompetensi.

Kompetensi adalah "perilaku praktek terukur yang terdiri dari pengetahuan yang cukup, keterampilan, dan nilai-nilai, serta memiliki tujuan untuk berlatih secara efektif. Bagian berikut menjelaskan setiap kompetensi dan mengidentifikasi bidang dalam kurikulum tradisional pekerjaan sosial. Lima kompetensi pertama melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang jelas seluruh kurikulum pekerjaan sosial. Lima terakhir kompetensi berhubungan dengan bidang isi tradisional atau kursus dalam program-sosial pekerjaan sosial penelitian, perilaku manusia dan lingkungan sosial, kebijakan sosial kesejahteraan, serta praktek pekerjaan sosial (kompetensi 9 dan 10).

a. Kompetensi 1: Identifikasi

Sebagai pekerja Pekerja Sosial profesional harus "melayani sebagai wakil profesi, misinya, dan nilai-nilai inti" (CSWE, 2008b, hal. 3). Mereka harus memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan pekerjaan sosial. Mereka harus melakukan sendiri dalam etika, secara profesional, memberikan pelayanan yang efektif untuk klien dan menghormati hak klien untuk menentukan nasib sendiri. Dalam prakteknya, pekerja sosial harus mengadvokasi atas nama ketika layanan klien mereka atau kebijakan peningkatan penyediaan layanan pemerintahan diperlukan. Mereka harus terus mengembangkan keterampilan mereka dan memperoleh pengetahuan baru sepanjang karier mereka untuk melayani klien. Akhirnya, mereka harus mencari bantuan dari pengawas dan konsultan bila diperlukan.

b. Kompetensi 2: Penerapan Sosial

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa nilai-nilai pekerjaan sosial dan etika sangat penting untuk praktek pekerjaan sosial. Mereka membantu para praktisi menilai apa yang penting atau benar dalam situasi dan memberikan panduan untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Pekerja sosial profesional harus menunjukkan kompetensi dalam mengenali nilai-nilai pribadi. "Prinsip-prinsip penalaran etis untuk tiba di berprinsip keputusan "(CSWE, 2008b, hal. 4). Dalam kode etik NASW disebutkan sebelumnya mengenai beberapa pedoman dasar bagi para praktisi pekerjaan sosial, seperti halnya Asosiasi Internasional Pekerja Sosial Internasional / Sekolah Etika Pekerjaan Sosial di Pekerjaan Sosial.

c. Kompetensi 3: Penerapan Kritis

Pentingnya berpikir kritis, hal ini didefinisikan sebagai (1) pengawasan hati-hati apa yang dinyatakan sebagai benar atau apa yang tampaknya menjadi benar dan ekspresi yang dihasilkan dari pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengawasan itu, dan (2) perumusan kreatif pendapat atau kesimpulan ketika disajikan dengan pertanyaan, masalah, atau isu. Sebaliknya, berpikir kritis

memerlukan menggunakan analisis kreatif pengandaian untuk menentukan sendiri apa yang benar-benar benar atau apa pilihan terbaik di antara alternatif yang ada. Hal ini juga menyangkut kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis.

d. Kompetensi 4: Keterlibatan Keanekaragaman dalam Praktek

Keanekaragaman mengacu pada berbagai perbedaan karakteristik orang. Fokus dari profesi pekerjaan sosial meliputi kelompok yang dibedakan dengan "usia, kelas, warna, budaya, kecacatan, etnis, gender, identitas gender dan ekspresi, status imigrasi, ideologi politik, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual" (CSWE, 2008b, hal. 5). Setiap kali seseorang dapat diidentifikasi sebagai milik kelompok yang berbeda dari sebagian besar orang lain dalam masyarakat.

Karena pekerja sosial memiliki berbagai macam klien, menunjukkan hampir setiap jenis kebutuhan dan masalah, mereka harus secara integral akrab dengan konsep keragaman manusia. Adapun empat aspek utama. Pertama, pekerja sosial harus menghargai perbedaan dan fokus pada kekuatan. Kedua, mereka harus peka terhadap dan mengatasi setiap kesulitan dan klien pengobatan negatif mungkin menghadapi karena mereka milik beberapa kelompok yang beragam. Ketiga, mereka harus introspektif menilai sikap mereka sendiri dan berusaha untuk menghilangkan prasangka yang mungkin mereka miliki. Keempat, pekerja sosial harus melihat diri mereka sebagai peserta didik seumur hidup tentang banyak aspek keragaman manusia, khususnya karakteristik klien.

e. Kompetensi 5: Peningkatan Hak Asasi Manusia serta Keadilan Sosial dan Ekonomi

Konsep hak asasi manusia dan keadilan sosial-ekonomi terkait dengan konsep keragaman manusia. Hak asasi manusia melibatkan premis bahwa semua orang, terlepas ras, budaya, atau asal negara, berhak untuk hak-hak dasar dan pengobatan. Keadilan sosial adalah gagasan bahwa di dunia yang sempurna semua warga negara akan identik "hak, perlindungan, peluang, kewajiban, dan manfaat sosial" (Barker, 2003, hal. 405). Demikian pula, keadilan ekonomi melibatkan distribusi sumber daya secara adil dan merata. Lulusan pekerja sosial harus menunjukkan kompetensi dalam memahami konsep-konsep dan dasar teoritis mereka; pekerja sosial harus membela atas nama prinsip-prinsip ini dan menggabungkan prinsip ke dalam praktek mereka (CSWE, 2008b, hal. 5).

Konsep lain yang penting dalam pekerjaan sosial adalah populasi, kelompok yang terdiri dari beberapa orang diidentifikasi karakteristiknya, beserta risikonya karena praktek pekerjaan sosial melibatkan mendapatkan sumber daya manusia dan membantu mereka memecahkan masalah, pekerja sosial sering bekerja dengan populasi yang berisiko dari deprivations tersebut. Berarti pekerja sosial membutuhkan informasi dan wawasan tentang isu-isu khusus dan kebutuhan orang-orang ini. Oleh karena itu, pekerja sosial mengharuskan kedua teoritis dan konten praktek mengenai dinamika dan hasil diferensial, perlakuan tidak adil.

Satu nilai pekerjaan sosial sangat penting adalah "proses peningkatan pribadi pemberdayaan-, interpersonal, atau politik kekuasaan sehingga individu dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka" (Gutierrez, 2001, hal. 210). Beberapa kelompok orang mengalami stereotip, diskriminasi, dan penindasan. Adalah tugas pekerja sosial untuk memberdayakan klien secara umum dan anggota kelompok tertindas pada khususnya.

f. Kompetensi 6: Keterlibatan dalam Penelitian

Mahasiswa pekerja sosial harus menunjukkan kompetensi dalam *research*. Ini berarti pekerja sosial harus menggunakan pendekatan dan intervensi dalam praktek mereka bahwa penelitian telah ditentukan efektif. Para pekerja sosial harus menggunakan "temuan penelitian untuk memperbaiki praktek, kebijakan, dan pelayanan sosial" (CSWE, 2008b, hal. 5). Para pekerja sosial mungkin juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam praktek berdasar pada penelitian. Penelitian yang erat ini melibatkan pekerjaan sehari-hari para praktisi berfokus pada pengumpulan data dan hasil yang terkait dengan proses praktek pekerjaan sosial (Tripodi & Lalayants, 2008, p. 518). Program "Penelitian Pekerjaan Sosial" menjadi urutan program dalam kurikulum mereka.

Pengetahuan tentang penelitian pekerjaan sosial adalah penting karena dua alasan mendasar. Pertama, dapat membantu pekerja sosial menjadi lebih efektif dalam praktek langsung mereka dengan memilih intervensi yang telah terbukti berhasil, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih jelas. Framing intervensi pekerjaan sosial sehingga mereka dapat dievaluasi melalui penelitian memberikan informasi tentang teknik-teknik khusus bekerja yang baik dengan yang bermasalah. Evaluasi praktek di seluruh proses intervensi dapat membantu menentukan apakah seorang pekerja benar-benar membantu klien. Kedua, akumulasi penelitian membantu membangun lembaga untuk merencanakan intervensi yang efektif. Pengetahuan dari apa yang telah bekerja terbaik di masa lalu memberikan pedoman untuk pendekatan dan teknik yang akan digunakan di masa sekarang dan di masa depan. Menetapkan penelitian dasar untuk pengembangan program dan kebijakan yang mempengaruhi banyak orang. Pengetahuan tersebut dapat juga dapat digunakan untuk menghasilkan teori-teori baru dan ide-ide untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sosial praktek.

Based-practice merupakan istilah lain yang sering digunakan dalam pekerjaan sosial, yang memiliki arti mirip dengan *research-information practice*, yaitu praktik berbasis informasi yaitu "hati nurani, eksplisit, dan penggunaan bukti/informasi terbaik saat ini dalam pembuatan keputusan tentang perawatan klien" (Gambrill, 2000, hal. 46; Race, 2008; Rubin, 2008). Gambrill (2000) menjelaskan:

"Ini meliputi keahlian praktek integrasi individu dengan fakta eksternal terbaik yang tersedia dari sistematis penelitian serta mempertimbangkan nilai-nilai dan harapan klien. Temuan penelitian eksternal berkaitan dengan masalah yang diambil jika mereka bersedia dan berlaku untuk klien tertentu mereka. Peksos melibatkan klien sebagai peserta kolaboratif membantu hubungan yang

merupakan ciri dari praktek berbasis fakta. Klien sepenuhnya diinformasikan tentang risiko dan manfaat dari layanan yang direkomendasikan serta alternatif (termasuk alternatif melakukan apa). . . . Istilah praktek evidence-based adalah lebih baik untuk praktek jangka empiris. Istilah yang terakhir sekarang tampaknya diterapkan dalam materi. (pp. 46-47)

Kandungan penelitian pekerjaan sosial cenderung turun dalam empat hal berikut (Reid, 1995; Tripodi & Lalayants, 2008). Pertama, banyak studi melibatkan perilaku individu klien dan interaksi mereka dengan orang lain dekat dengan mereka, termasuk keluarga dan kelompok-kelompok kecil. kedua, banyak penelitian berfokus pada bagaimana layanan disediakan untuk klien, layanan apa yang terlibat, dan hasil mereka dalam mencapai tujuan. Ketiga, beberapa studi mengatasi sikap pekerja sosial dan latar belakang pendidikan, di samping tren utama dalam profesi. Keempat, beberapa penelitian melibatkan studi tentang "organisasi, masyarakat, dan kebijakan sosial" (Reid, 1995, hlm. 2044). Kategori terakhir menekankan pentingnya lingkungan sosial yang lebih besar dan dampaknya pada perilaku dan kondisi klien.

g. Kompetensi 7: Penerapan Pengetahuan Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial

Pekerja sosial harus berpengetahuan tentang perilaku manusia dan lingkungan sosial. Fungsi masyarakat dalam konteks lingkungan merupakan dorongan penting dari pekerjaan sosial. Hanya setelah menilai dan pemahaman bahwa fungsi dapat pekerja sosial melanjutkan dengan rencana intervensi. Para pekerja sosial harus memiliki pengetahuan tentang "biologis, sosial, budaya, psikologis, dan pengembangan spiritual" karena hal ini terjadi atas umur (CSWE, 2008b, hal. 6). "Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial" adalah dasar untuk kursus lain atau urutan program tradisional dimasukkan dalam kurikulum pekerjaan sosial. Orang-orang terus-menerus dan dinamis terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung dan komunikasi dengan orang lain di lingkungan. Penilaian adalah identifikasi dari "sifat dan tingkat kebutuhan klien dan keprihatinan, serta informasi penting tentang sumber daya klien dan mendukung dan faktor lingkungan lainnya" sehingga rencana untuk membantu dapat dirancang dan dilaksanakan (Blythe & Reithoffer, 2000, hal. 551).

Assesment pekerja sosial dilakukan untuk menemukan situasi tertentu apa yang menyebabkan masalah untuk melanjutkan perubahan yang diinginkan klien. Berfokus pada lingkungan berarti tidak hanya melihat pada individu itu sendiri tetapi juga pada keterlibatan mereka dengan anggota keluarga, tetangga, pekerjaan kolega, sistem politik, dan lembaga layanan di dalam masyarakat. Berarti bahwa masalah-masalah klien tidak melihat semata-mata sebagai kesalahan milik mereka.

Kemiskinan, diskriminasi, tekanan sosial, dan efek dari kebijakan kesejahteraan sosial, semua aspek kehidupan masyarakat yang dapat jatuh di bawah pengawasan.

h. Kompetensi 8: Keterlibatan dalam Praktek Kebijakan untuk Memajukan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Para pekerja sosial harus memahami kebijakan sosial, kesejahteraan, sejarah mereka, dan bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap klien. Kebijakan, dalam bentuk yang paling sederhana, dapat dianggap sebagai aturan. Hidup kita dan orang-orang dari klien pekerja sosial diatur oleh aturan-tentang bagaimana kita berkendara, ketika kita pergi ke sekolah, bagaimana kita berbicara atau menulis kalimat, dan sebagainya.

Kebijakan, pada dasarnya, aturan yang memberitahu kita tindakan antara tindakan kita yang dapat dilakukan dan yang tidak. Kebijakan memandu pekerjaan dan keputusan. Untuk tujuan pemahaman kesejahteraan sosial dan penyediaan kesejahteraan sosial jasa, kebijakan mungkin dibagi menjadi dua kategori utama: kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan lembaga. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah hukum dan peraturan yang mengatur program kesejahteraan sosial mana yang ada, kategori klien apa yang dilayani, dan siapa yang memenuhi syarat untuk program yang diberikan. Mereka juga menetapkan standar tentang jenis layanan yang akan diberikan dan kualifikasi dari penyedia layanan. Selain ranah yang lebih luas kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan lembaga yang standar yang diadopsi oleh organisasi individu dan program yang menyediakan layanan (misalnya, sebuah lembaga pelayanan keluarga, Departemen suatu pelayanan manusia, atau panti jompo). Standar tersebut dapat menetapkan struktur badan, kualifikasi supervisor dan pekerja, aturan yang mengatur apa yang dapat dilakukan pekerja, dan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan penilaian keluarga. Pengetahuan tentang kebijakan sangat penting bagi pekerja sosial. Kebijakan organisasi dapat menentukan berapa banyak liburan yang dimiliki seorang karyawan dan bagaimana kenaikan gaji yang diperoleh. Kebijakan menentukan siapa yang membutuhkan pelayanan dan sumber daya.

Para pekerja sosial harus turut berperan aktif dalam membangun dan perubahan kebijakan kesejahteraan sosial bagi kepentingan klien mereka; Kebijakan menentukan bagaimana uang dianggarkan dan dihabiskan, dan di mana sumber yang dibuat tersedia untuk klien. Praktisi harus kompeten dalam melakukan praktek kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan layanan pekerjaan sosial yang efektif bagi masyarakat. Praktek kebijakan melibatkan "upaya untuk mengubah kebijakan, pengaturan lembaga, dan komunitas legislatif, apakah dengan menetapkan kebijakan baru, meningkatkan yang sudah ada, atau mengalahkan inisiatif kebijakan orang lain" (Jansson, 2011, hal. 15).

Kadang-kadang, kebijakan kesejahteraan sosial tidak adil atau menindas kepada klien. Ironisnya, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kadang-kadang malah sebaliknya. Pekerja sosial dapat memutuskan bahwa kebijakan yang etis dan mengadvokasi atas nama klien, mencoba untuk mengubahnya. Praktisi dapat bekerja untuk mengubah kebijakan untuk memajukan keadilan sosial dan ekonomi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap berbagai orang.

i. Kompetensi 9: Responsif terhadap Konteks dari Bentuk Praktik

Para pekerja sosial harus menunjukkan kompetensi dalam berbagai konteks dan pengaturan. Mereka harus memahami dinamika dan terlibat dalam lingkungan makro seperti organisasi, masyarakat, dan badan legislatif yang menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial. Praktisi harus berfungsi dalam sistem, melayani sebagai pemimpin untuk mengadvokasi atas nama klien. Mereka harus mengikuti perkembangan teknologi baru, perubahan demografi, dan tren sosial dalam rangka untuk menanggapi isu-isu saat ini.

j. Kompetensi 10: Perjanjian, Assessment, Intervensi, dan Evaluasi dengan Individu, Keluarga, Kelompok Besar, Organisasi, dan Komunitas

Ada dua dimensi utama yang melekat dalam Kompetensi 10. Pertama, proses pekerjaan sosial meliputi keterlibatan, penilaian, intervensi, dan evaluasi (CSWE, 2008b; Kirst-Ashman & Hull, 2012b). Keterlibatan/perjanjian adalah periode awal ketika praktisi mengorientasikan diri untuk masalah yang dihadapi dan mulai menjalin komunikasi dan hubungan dengan lain juga mengatasi masalah. Assessment melibatkan penyelidikan dan penentuan variabel yang mempengaruhi identifikasi masalah termasuk kebutuhan dan kekuatan klien. Intervensi adalah perencanaan dan pelaksanaan rencana untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Evaluasi adalah "proses penentuan apakah perubahan yang terjadi bermanfaat." (Kirst-Ashman & Hull, 2012a, hal. 34). Keterampilan lain yang terlibat dalam praktek pekerja sosial meliputi "memberikan kepemimpinan untuk kebijakan dan jasa serta mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi" (CSWE, 2008b, hal. 7). Dimensi penting kedua yang melekat dalam kompetensi 10 adalah bahwa praktek melibatkan bekerja dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi (besar dan kecil), dan masyarakat.

keterampilan

Basis pengetahuan pekerjaan sosial mencakup informasi tentang keterampilan di samping data mengenai masalah dan layanan. seorang pekerja sosial harus tahu keterampilan apa yang paling efektif dalam situasi seperti apa, keterampilan-keterampilan untuk mencari dan menghubungkan orang-orang dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Para pekerja sosial dapat memilih dari banyak teknik praktek dan teori. Pengetahuan tentang efektivitas berbagai teknik sangat penting untuk memilih orang-orang yang dapat mencapainya dalam situasi tertentu dan untuk melaksanakan praktek *research-information* (kompetensi 6). Terlepas dari teknik yang dipilih dan digunakan, penekanan ditempatkan pada kekuatan klien dan pemberdayaan, kolaborasi klien yang sedang berlangsung di semua tahap proses perubahan, dan penghargaan keanekaragaman (Pinderhughes, 1995). Landasan praktek pekerja sosial adalah praktek generalis.

Praktek Generalis

Praktek generalis menggabungkan semua 10 kompetensi dan merupakan inti dari pendidikan dan praktek pekerjaan sosial. Ini membedakan pekerjaan sosial

dari profesi lain. Praktek generalis adalah aplikasi dari basis pengetahuan eklektik, nilai-nilai profesional, dan berbagai keterampilan untuk menargetkan berbagai ukuran sistem untuk perubahan dalam konteks empat primer proses (Kirst-Ashman & Hull, 2012b). Pertama, generalis praktek menekankan pemberdayaan klien. Kedua, melibatkan bekerja secara efektif dalam sebuah struktur organisasi dan melakukannya di bawah pengawasan. Ketiga, memerlukan asumsi lebar berbagai peran profesional. Keempat, melibatkan aplikasi keterampilan berpikir kritis untuk perencanaan proses perubahan (intervensi).

Advanced Practice

Mencirikan kurikulum MSW, memberikan konsentrasi khusus yang dibangun berdasarkan landasan praktek generalis. Misalnya, spesialisasi dalam kesehatan mental, pekerja sosial sekolah, bekerja dengan anak-anak dan keluarga, koreksi, kesehatan, pelayanan sosial administrasi, atau organisasi masyarakat.

Bidang Pendidikan

Merupakan bentuk pusat instruksi dan pembelajaran di mana sosialisasi profesi untuk melakukan peran praktisi" (CSWE, 2008b, hal. 8). Bidang pendidikan menyediakan pengalaman kehidupan nyata dalam lingkungan kerja sosial di mana pekerja sosial ditempatkan dan dapat berlatih keterampilan mereka di bawah pengawasan. Pengaturan penempatan dapat bervariasi. Mereka termasuk lembaga pelayanan sosial, rumah sakit, sekolah, lembaga pemasyarakatan, organisasi penempatan seperti kantor cabang NASW negara, penempatan yang berkaitan dengan kebijakan seperti kantor legislatif, atau penempatan dalam organisasi masyarakat. Setiap dari pengaturan ini harus menyediakan pengawasan kerja sosial yang sesuai. Penempatan BSW memerlukan minimal 400 jam dan MSW penempatan minimum 900 jam. Banyak siswa pekerjaan sosial menemukan pendidikan bidang mereka untuk menjadi titik pengalaman pendidikan mereka.

Konsep penting dalam sistem teori dan ekologi merupakan perspektif yang relevan dengan praktek kerja sosial termasuk sistem (mikro, mezzo, dan makro), sistem klien, lingkungan sosial, dan *coping*.

PENUTUP

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan. Bidang praktek dalam pekerjaan sosial termasuk anak-anak dan keluarga, lansia, *difable*, kesehatan, kesehatan mental, penyalahgunaan zat, sekolah, dan koreksi. Konteks lain untuk praktek pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial pedesaan, polisi pekerjaan sosial, dan pekerjaan sosial forensik.

Pekerjaan sosial dibangun di atas berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, biologi, psikiatri, konseling, dan antropologi. Pekerjaan sosial adalah unik karena berfokus pada masalah orang-

orang yang paling sulit, sering menargetkan lingkungan untuk perubahan, menekankan perlunya advokasi klien, berdasarkan pada inti profesionalitas seperti nilai-nilai, dan menekankan pentingnya kerja dalam kemitraan dengan klien.

Pengembangan diri, penguasaan teknologi pekerjaan sosial dan kiprah yang lebih profesional merupakan hal yang krusial yang harus segera dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial, sehingga pekerjaan sosial bisa diakui keberadaannya oleh masyarakat secara luas, dan juga oleh profesi lainnya sebagai sebuah profesi yang profesional, bukan lagi kegiatan amal/karitas lagi. Setidaknya ada sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam prakteknya.

Adapun dalam “IUC Journal of Social Work: Theory and Practice” disebutkan mengenai lima praktek pekerja sosial. Pertama, pekerja sosial membantu individu, kelompok, atau komunitas. Para pekerja sosial memberikan konseling bila diperlukan untuk membantu klien mengatasi masalah. Selain konseling individu atau keluarga, banyak pekerjaan sosial melibatkan bekerja sama dengan organisasi dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan layanan sosial. Kedua, pekerjaan sosial memerlukan dasar yang kuat; nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memandu praktisi apa harus dan tidak boleh dilakukan. Ketiga, dasar yang kuat mengenai teknik dan keterampilan memberikan petunjuk bagaimana pekerja sosial harus memberikan treatment dan mencapai tujuan. Keempat, pekerja sosial membantu orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan menghubungkan mereka dengan sumber daya yang tersedia. Jika sumber daya yang tepat tidak tersedia, pekerja sosial dapat melakukan advokasi untuk pengembangan layanan atas nama klien mereka. Kelima, pekerja sosial berpartisipasi dalam proses legislatif untuk mempromosikan perubahan sosial positif. Para pekerja sosial juga dapat berfungsi sebagai saksi/ahli untuk mendidik legislator tentang masalah dan kebutuhan klien, berbagi pendapat, bertanggung jawab secara sosial, dan menjalankannya.

Wilfried Ferchhoff mengembangkan tiga jenis identitas (tiga konsep) profesionalisme yang dipengaruhi oleh proses sejarah identitas pekerja sosial, yang terdiri dari pekerja sosial sebagai pribadi altruistik (produk dari waktu Alice Salomon, 1872 - sampai 1930); *sosial engineer*; dan pekerja sosial sebagai *hermeneutik-people*. Saran dari Uhlendorff Ferchhoff lebih menyukai jenis ketiga yaitu pekerja sosial sebagai pribadi hermeneutik. Uhlendorff menyarankan memanfaatkan untuk jenis identitas, diagnosis sosial hermeneutik dalam proses bantuan. Di satu sisi Uhlendorff menyatakan bahwa diagnosis mencegah kerjasama antara klien dan orang yang profesional. Pekerja sosial dan klien bekerja sama sebagai sebuah tim. Mereka mengamati dan menafsirkan biografi, situasi konflik dan lingkungan klien.

DAFTAR RUJUKAN

Ashman, Karen K. Khirst. 2013. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Critical Thinking Perspective*. USA: Cengage Brain.

- Reid, K. 1999. *Truancy and Schools*. Routledge Taylor and Francis Group: New York and London.
- Skidmore. *Introduction to Social Work Sixth Edition*. Prentice Hall International Edition.
- Wibawa, Budhi, et al. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran: Bandung.

Sumber Jurnal/Artikel

- Azril. 2014. *Eksistensi Pekerja Sosial Diperkuat Akreditasi*. Tribun, 3 Oktober 2014.
- Badiklitkesos. 2013. *Sejarah Baru Perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia*. Jakarta: OHH.
- Hare, Isadora. 2009. *Defining Social Work: The International Federation of Social Worker*. London: Sage Publications. 47 (3), 7-14.
- Jung, Barbara. 2007. *Social Worker Identity Between Critical and Rational Understanding*. IUC Journal of Social Work: Theory and Practice.
- Martin, etc. 2009. *Multidiciplinary Team Working: From Theory to Pactice*. Discussion paper MHC. Waterloo Dublin 4.
- P4S Kemsos. 2014. *Standar Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pekerja Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Widgren, Erja. 2013. *Social Work in a Multi-Professional Environment*. IUC Journal of Social Work: Theory and Practice.

Sumber Lainnya

- <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi8/2014/feb/04/7538/perlu-standarisasi-kompetensi-pekerja-sosial> diakses pada 1 Oktober 2014 pukul 15.05 WIB.
- <http://www.iassw.aiets.org> diakses pada 1 Oktober 2014 pukul 14.48 WIB.
- <http://www.microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2014/09/02/3/185591/> diakses pada 1 Oktober 2014 pukul 14.07 WIB.

KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA

Oleh

Benediktus Vito, Hetty Krisnani, & Risna Resnawaty

Email:

(vitobenediktus@yahoo.co.id; hettykrisnani@yahoo.com; happytruz@yahoo.com)

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dikarenakan memperoleh pendidikan merupakan hak dari warga negara. Begitu juga untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan, mereka semua berhak menerima pendidikan yang layak. Namun kenyataannya masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah tenaga pengajar yang terdapat di sekolah perkotaan dan sekolah di pedesaan. Jumlah guru lebih banyak terdapat di perkotaan dibandingkan dengan dipedesaan. Rendahnya minat guru mengajar di pedesaan diakibatkan oleh minimnya akses transportasi serta fasilitas sekolah yang buruk yang terdapat di pedesaan. Selain itu kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dapat terlihat dari sekolah- sekolah di perkotaan yang mempunyai fasilitas baik pastinya juga memiliki pengajar yang berkompeten sehingga nantinya menghasilkan siswa- siswa yang cerdas. Hal ini berbanding terbalik terhadap sekolah- sekolah yang terdapat di pedesaan yang mempunyai fasilitas sekolah yang kurang baik dan tenaga pengajar yang kurang kompeten. Pemerintah dengan segala upayanya khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini sedang berupaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan yaitu dengan mengeluarkan Program Sarjana Mendidik di Daerah(SM3T) yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Tentunya pekerja sosial bisa membantu mengontrol hasil dan ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci: Pendidikan, pekerja sosial, kesenjangan pendidikan desa dan kota.

Pendahuluan

Sebagai Negara yang besar dan dengan sumber daya alamnya yang melimpah pada dasarnya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu Bangsa yang maju, bermartabat dan lebih baik dari saat ini, dan itu semua dapat terwujud tentunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan memiliki visi yang jelas dan terarah untuk kemajuan Bangsa. Untuk memenuhi tujuan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya pendidikan adalah faktor terpenting yang tidak dapat dipisahkan.

Tujuan dari pendidikan nasional tidak saja hanya mencetak sumber daya manusia yang cerdas akan tetapi juga mampu mencetak kepribadian yang berkarakter, berakhlak, kreatif, memiliki misi visi dan bertanggung jawab serta sebagai warga negara yang baik. Kesuksesan seseorang tidak pernah lepas dari potensi yang dimiliki oleh orang tersebut, potensi dalam arti tidak saja berbicara tentang skill akan tetapi meliputi kemampuan seseorang mengimplementasikan potensi yang dimiliki untuk orang banyak, kemampuan mengelola diri dan orang lain.

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang professional yang mempunyai banyak kajian fokus, salah satu fokusnya yaitu menangani masalah-masalah yang ada di sekolah atau lebih dikenal dengan pekerja sosial sekolah walaupun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memiliki pekerja sosial. Selain menjadi pekerja sosial sekolah, peran pekerja sosial juga dapat menjadi mengontrol dan ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan (controlling and communicator).

Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota

Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa dan menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji. Pendidikan nasional tak henti-hentinya menuai banyak permasalahan. Pengertian pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan berupa awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.

Mengacu pada definisi pendidikan diatas, yaitu pendidikan sebagai proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat desa juga memiliki peluang yang sama dengan masyarakat kota untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah membuka peluang pendidikan yang sama untuk masyarakat desa maupun kota. Bahkan, semangat juang masyarakat desa lebih tinggi daripada masyarakat kota. Karena masyarakat kota beranggapan bahwa pendidikan di desa tidak begitu maju karena kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai. Karena pendidikan di desa dengan dikota berbeda jauh.

Berikut beberapa contoh timpangnya pendidikan antara pendidikan di desa dan di kota. Dikutip dari **kompas.com mengenai** *murid SD Negeri Cicaringin 3, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten yang harus meniti kabel baja menyeberang Sungai Ciliman saat pulang dari sekolah. Lambannya pemerintah membangun infrastruktur membuat mereka harus rela berjalan sejauh 6 kilometer*

pergi dan pulang untuk mencapai sekolah dan berisiko terjatuh ke sungai. Bahkan berita ini sempat terdokumentasikan oleh majalah dailymail, yang bertuliskan *Think the school run is bad? Children face Indiana Jones-style river crossing every day after floods cut off their community.* Hal ini telah mencoreng wajah pendidikan Indonesia di tingkat dunia, dan tentunya contoh kasus ini memalukan nama Indonesia di tingkat dunia, berita ini sempat menjadi trending topic saat itu.

Sebuah jembatan di Kampung Sungai Tanuak Kenagarian Barung Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Padang. Putus sejak 25 November dan sampai saat ini masih belum diperbaiki, putusnya jembatan membuat anak-anak di kampung itu yang bersekolah di SDN nomor 42 Talawi terpaksa harus turun menyeberangi sungai untuk mencapai sekolah mereka. (<http://www.padangmedia.com/1-Berita/89949-Jembatan-Putus--Anak-Sekolah-Harus-Menyeberang-Sungai.html>)

Setelah kasus jembatan miring di Lebak, Banten dan kasus di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang. Kasus Jembatan miring juga ada di Desa Kangeran, Pamekasan, Jatim. Di jembatan inilah, warga yang akan pergi kerja atau sekolah, mempertaruhkan nyawa termasuk para pelajar terpaksa harus melintas jembatan tersebut karena merupakan akses terdekat ke tempat tujuan. (<http://foto.detik.com/readfoto/2012/03/26/143618/1876475/157/2/kembali-nyawa-anak-sd-dipertaruhkan-di-jembatan>).

Susahnya akses menuju sekolah, tidak membuat patah semangat anak-anak yang berada di pedesaan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan meski mereka harus bersusah payah dan menghadapi rintangan yang begitu berat untuk mencapai tujuan mereka, yaitu belajar di sekolah untuk mencapai cita-cita. Hal ini berbanding terbalik dengan pendidikan yang berada di perkotaan, yang dimana akses menuju sekolah sangatlah mudah dan banyak alat transportasi yang memudahkan anak-anak yang bersekolah untuk sampai ditujuannya dalam waktu yang singkat.

Kesenjangan pendidikan yang terdapat di pedesaan dan perkotaan tidak hanya dalam akses menuju sekolahnya saja, tetapi masih banyak aspek-aspek kesenjangan pendidikan yang lainnya, aspek yang lainnya adalah kesenjangan sarana dan prasarana sekolah yang terdapat di pedesaan dengan sekolah yang terdapat di perkotaan. Dikutip dari Liputan 6 Pagi SCTV, memberitakan kondisi memprihatinkan Madrasah Ibtidaiyah (SD) Darul Ulum di pesisir pantai Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Sekolah yang berdiri sejak 2007 hanya memiliki fisik bangunan semi permanen. Berdinding anyaman bambu dan berlantai tanah. Tanpa bantuan pemerintah, pendiri sekolah dan para guru tetap tegar hingga kini. Bisa dibayangkan, seperti apa kondisi waktu belajar setiap hari. Di sisi lain, guru pun seakan hanya berbekal idealisme mereka sebagai pengajar, tanpa imbalan yang memadai sebagai pemberi ilmu bagi masa depan muridnya. (<http://news.liputan6.com/read/2044900/potret-pendidikan-daerah-terpencil>)

Ditempat berbeda namun masih menyorot tentang buruknya sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di pedesaan. Terdapat sebuah gubuk nyaris rubuh berdiri di Desa Bukit Subur, Kecamatan Tabir Hilir, Merangin, Jambi. Orang

desa sana menyebutnya sekolahan. Gubuk itu dibangun murni oleh warga setempat, tiga tahun silam, untuk tempat anak-anak mereka belajar. Bangunan tersebut memang sekolahan. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 29 Kelas Jauh namanya. Sekolah ini sangat jauh dari layak untuk disebut sebuah sekolahan. Kelas belajarnya hanya ada dua ruangan. Berbeda sekali dengan sekolah kebanyakan. Ironisnya, bangunan kelas jauh SDN 29 ini hanya terbuat dari kayu dan beberapa barang bekas. Dindingnya terbuat dari papan. Tiangnya dari kayu balok bulat tanpa disuguh halus. Atapnya hanya memakai seng-seng bekas, yang jika hujan datang pasti bocor. (<http://infojambi.com/topik-utama/8306-potret-dunia-pendidikan-merangin-ada-sekolah-mirip-kandang-kambing.html>)

Tentu hal ini sangat kontras dengan sekolah yang terdapat di perkotaan. Sekolah dengan bangunan yang nyaman dan aman untuk ditempati. Fasilitas yang sangat memadai, seperti ruangan komputer, sarana olahraga, ruangan puskesmas dan kantin maka akan membuat suasana belajar akan sangat nyaman bagi siswa-siswa yang bersekolah di perkotaan. Jika dibandingkan dari contoh kasus diatas terkait dengan sarana dan prasana pendidikan pedesaan dan perkotaan tentu akan terlihat sekali kesenjangan pendidikan yang terjadi.

Aspek kesenjangan pendidikan yang terakhir adalah sumber tenaga pengajar atau guru yang terdapat di sekolah pedesaan dan perkotaan. Guru di kota jauh lebih banyak dibandingkan guru di desa. Hal ini dapat terlihat dari contoh kasus berikut ini. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar, berunjukrasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Kamis (2/5/14). Sejumlah mahasiswa yang berunjukrasa meminta pemerintah lebih serius dalam menangani jumlah guru yang menurut mereka hampir 80 persen jumlah guru tersebar dikota dan 20 persen sisanya tersebar di desa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan sangat timpang karena hanya penduduk kota saja yang mempunyai kualitas SDM handal, sedangkan penduduk desa akan terus terbelakang. (<http://www.beritasatu.com/pendidikan/123153-kesenjangan-guru-di-kota-dan-desa-masih-tinggi.html>)

Sementara di perkotaan jumlah tenaga pengajar sangatlah memadai bahkan melebihi kapasitas, bahkan ada satu mata pelajaran yang memiliki dua guru. mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara karena dengan memperoleh pendidikan, otomatis setiap warga negara akan mendapatkan pekerjaan. Dengan pekerjaan, masyarakat bisa produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tentu akan berdampak pada perekonomian, saat ini hanya penduduk di kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya yang mempunyai kualitas pendidikan yang bagus sementara kualitas pendidikan di desa masih sangat buruk. salah satu penyebab rendahnya minat mengajar guru di desa adalah minimnya akses transportasi serta fasilitas komunikasi yang buruk. Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan memberikan upah yang lebih besar kepada guru yang mau mengajar di daerah terpencil daripada upah guru yang mengajar di kota. jika porsi guru di desa dan di

kota sudah seimbang, maka kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik karena semua penduduk mendapatkan pendidikan.

Kesimpulan

Kesenjangan Pendidikan pedesaan dan perkotaan dapat diatasi dengan langkah- langkah berikut, pemerintah dalam hal ini menjadi perhatian yang khusus. Tugas pemerintah disini tidaklah mudah, mulai dari merehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak guna yang terdapat di pedesaan. Ataupun membangun ruangan-ruangan yang juga mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah yang terdapat di pedesaan. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan anggaran APBN untuk pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor terpenting dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan yang terdapat di pedesaan dan perkotaan adalah guru. Guru adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Meskipun dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu tidaklah hanya faktor tenaga pendidik yang harus diperhatikan tetapi juga masalah alokasi dana, sarana dan prasarana yang juga mendukung. Namun, guru tetaplah yang memiliki peranan besar dalam memajukan dunia pendidikan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyebarkan guru-guru berkualitas ke desa-desa agar kualitas pendidikan di pedesaan bisa mengimbangi pendidikan di perkotaan untuk mendukung rencana tersebut maka pemerintah bisa menyiapkan insentif yang lebih besar bagi guru berprestasi yang mau mengajar di desa.

Pendidikan seharusnya menjadi skala prioritas bagi agenda pembangunan pemerintah daerah. Melalui percepatan pembangunan pendidikan yang menyentuh segala aspek dan dinamika pendidikan diharapkan akan mampu mengangkat kualitas pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan di daerah harus bersifat adil, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan mutu yang ada saat ini dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dan sedang diluncurkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, semuanya itu tujuannya hanya pada upaya pencapaian tingkat kualitas pendidikan. Walaupun di satu sisi, untuk mengatasi ketertinggalan mutu pendidikan suatu daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri, namun pemerintah pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

Pemerintah juga sudah mengeluarkan solusi dalam mengatasi keterbatasan guru di pedesaan yaitu dengan program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. SM3T telah mengirimkan lebih dari 10.000 sarjana pendidikan terbaik dari seluruh Indonesia baik yang berasal dari PTN maupun PTS. SM3T ini sudah berjalan dari tahun 2012. Sarjana- sarjana yang baru lulus ini akan ditempatkan di pelosok daerah dan mengabdikan menjadi pengajar selama satu tahun disana. Setelah mengabdikan

selama satu tahun di daerah mereka kemudian mengikuti pendidikan profesi guru untuk menjadi guru profesional.

Dari banyaknya keterbatasan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pekerja sosial memegang salah satu peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerataan pendidikan antara desa dan kota.

Salah satu peran dari profesi pekerja sosial adalah sebagai advokator, dimana pekerja sosial dapat mengetahui dan berusaha untuk menegakkan hak-hak anak khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pekerja sosial bisa sebagai advokator bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Peran pekerja sosial selanjutnya adalah sebagai pemercepat perubahan (enabler). Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Dalam hal ini pekerja sosial dapat membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dari Dinas Pendidikan baik untuk direnovasi sekolahnya ataupun penyediaan fasilitas sekolah.

Pekerja sosial juga bisa menjadi tenaga ahli (expert). Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat). Dalam hal ini pekerja sosial dapat memberikan masukan dan saran untuk pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan desa dan kota. Terakhir pekerja sosial dapat menjadi perencana sosial (social planner). Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini pekerja sosial akan menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang terdapat di desa dan menyediakan solusi untuk pemerintah sehingga dapat mengatasi kesenjangan pendidikan desa dan kota.

Daftar Rujukan

- Demani, Juda. 2008. *Pekerja Sosial Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Lie, Anita dkk. 2014. *Menjadi Sekolah Terbaik; Praktik-Praktik Strategis dalam Pendidikan*. Jakarta : Tanoto Foundation & Raih Asa Sukses
- Openshaw, Linda. 2008. *Social Work in Schools*. New York : The Guilford Press
- Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran

Sumber Lainnya :

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/23/09200422/PHOTO.STORY.Perjuangan.untuk.Pendidikan>

<http://infojambi.com/topik-utama/8306-potret-dunia-pendidikan-merangin-ada-sekolah-mirip-kandang-kambing.html>

<http://news.liputan6.com/read/2044900/potret-pendidikan-daerah-terpencil>

<http://news.liputan6.com/read/2109668/kemendikbud-bangga-atas-dedikasi-guru-sm3t-mendidik-anak-negeri>

<http://www.padangmedia.com/1-Berita/89949-Jembatan-Putus--Anak-Sekolah-Harus-Menyeberang-Sungai.html>

<http://wawachayoo.blogspot.com/>

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT INDONESIA (PENGETAHUAN, DAN KETERBUKAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN MENTAL)

Oleh:

Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama

Email:

(adistywismaniputri@gmail.com; budhiwibhawa@gmail.com;
ariesurya_gutama@yahoo.com)

ABSTRAK

Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres.

Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi. Gangguan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan. Tuntutan hidup yang berdampak pada *stress* berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang lebih buruk.

Di Indonesia, berdasarkan Data Riskesdas tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 1.740.000 orang saat ini mengalami gangguan mental emosional (Depkes, 2007). Data yang ada mengatakan bahwa penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia tidaklah sedikit sehingga sudah seharusnya hal tersebut menjadi sebuah perhatian dengan tersedianya penanganan atau pengobatan yang tepat.

Di berbagai pelosok Indonesia masih ditemui cara penanganan yang tidak tepat bagi para penderita gangguan kesehatan mental. Penderita dianggap sebagai makhluk aneh yang dapat mengancam keselamatan seseorang untuk itu penderita layak diasingkan oleh masyarakat. Hal ini sangat mengecewakan karena dapat mengurangi kemungkinan untuk seorang penderita pulih. Untuk itu pemberian informasi, mengedukasi masyarakat sangatlah penting terkait kesehatan mental agar stigma yang ada di masyarakat dapat dihilangkan dan penderita mendapatkan penanganan yang tepat.

Kata Kunci : Kesehatan Mental, Gangguan Kesehatan Mental, Paradigma Masyarakat

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sama halnya seperti kesehatan fisik pada umumnya. Dengan sehatnya mental seseorang maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Kondisi mental yang sehat tidak dapat terlepas dari kondisi kesehatan fisik yang baik.

Berbagai penelitian memberikan hasil bahwa adanya hubungan antara kesehatan fisik dan mental seseorang, dimana pada individu yang menderita sakit secara fisik menunjukkan adanya masalah psikis hingga gangguan mental. Sebaliknya, individu dengan gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan fungsi fisiknya. Sehat dan sakit merupakan kondisi biopsikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Pengenalan konsep sehat dan sakit, baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap kondisi dirinya dan bagaimana penyesuaiannya dengan lingkungan sekitar.

Pada konsep *Person in Environment* menjelaskan bahwa keberadaan individu pada sebuah lingkungan akan saling mempengaruhi. Hadirnya individu akan menghasilkan kondisi yang dinamis bagi lingkungannya, dan juga lingkungan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi individu dan berdampak pada perubahan di diri individu tertentu. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang yang menderita gangguan kesehatan mental merupakan hasil dari gagalnya individu dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi dimana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi dimana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya.

Saat ini lebih dari 450 juta penduduk dunia hidup dengan gangguan jiwa. Prevalensi gangguan mental pada populasi penduduk dunia menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2000 memperoleh data gangguan mental sebesar 12%, tahun 2001 meningkat menjadi 13%. Tahun 2002 hasil survei menunjukkan bahwa 154 juta orang secara global mengalami depresi dan 25 juta orang menderita skizofrenia, 15 juta orang berada di bawah pengaruh penyalahgunaan zat terlarang, 50 juta orang menderita epilepsy dan sekitar 877.000 orang meninggal karena bunuh diri tiap tahunnya. Diprediksikan pada tahun 2015 menjadi 15%, dan pada negara-negara berkembang prevalensinya lebih tinggi.

Dilihat dari angka penderita gangguan mental yang tiap tahun meningkat maka seharusnya perawatan atau pengobatan yang ditawarkan juga semakin beragam, namun sayangnya hal ini tidak berlaku di Indonesia dimana penderita gangguan kesehatan mental masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan penderitanya harus dikucilkan. Berbagai stigma diberikan pada penderita gangguan

kesehatan mental sehingga untuk keluarga penderitapun lebih memilih menutupi kondisi anggota keluarganya.

Hal ini sangat disayangkan mengingat di zaman sekarang ini masyarakat diberikan berbagai opsi untuk pengobatan penderita gangguan kesehatan mental namun lebih memilih untuk berobat ke dukun atau orang pintar karena masih beranggapan bahwa sakit mental atau sakit jiwa itu dikarenakan adanya gangguan makhluk halus atau sebagainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat diedukasi tentang kesehatan mental, dan bagaimana cara penanganannya, agar penderita dapat diminimalisir kondisi buruk mentalnya dan masyarakat akan menghilangkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai terhadap para penderita gangguan kesehatan mental

PEMBAHASAN

Gangguan kesehatan mental merupakan kondisi dimana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebih menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya dinyatakan terkena sebuah gangguan kesehatan mental.

Di Indonesia, berdasarkan Data Risesdas tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 1.740.000 orang saat ini mengalami gangguan mental emosional (Depkes, 2007).

Menurut data Risesdas 2007 angka rata-rata nasional gangguan mental emosional (cemas dan depresi) pada penduduk usia 15 tahun adalah 11,6% atau sekitar 19 juta penduduk. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata sebesar 0,46% atau sekitar 1 juta penduduk. Dari angka yang besar tersebut, penderita gangguan mental yang diberikan fasilitas pengobatan sangatlah sedikit. Menurut perhitungan utilisasi layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder dan tersier kesenjangan pengobatan diperkirakan >90% (Diatri, 2011). Hal ini berarti bahwa hanya <10% orang dan masalah kesehatan jiwa terlayani di fasilitas kesehatan. Kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan jiwa berdasarkan hasil Risesdas 2007 tersebut mencapai Rp.20T, merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnya (Depkes, 2007).

Gangguan kesehatan mental dapat diperoleh semenjak anak dari dalam kandungan maupun ketika seseorang tumbuh dewasa namun dalam perkembangannya ditemui hal-hal yang dapat berdampak pada stres yang berlebihan. Kehidupan yang semakin modern membawa berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi. Bukan hanya karena sifatnya yang wajib atau penting melainkan keinginan diakui oleh masyarakat menjadikan individu merasa harus mengikuti *trend* yang sedang berlangsung tanpa sadar akan kapasitasnya.

Penyebab Gangguan Kesehatan Mental

Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1966 yang dimaksud dengan "Kesehatan Jiwa" adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

“Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain”.

Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan dan merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental dan sosial individu secara optimal, dan yang selaras dengan perkembangan orang lain. Seseorang yang “sehat jiwa atau mental” mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merasa senang terhadap dirinya serta
 - a. Mampu menghadapi situasi
 - b. Mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup
 - c. Puas dengan kehidupannya sehari-hari
 - d. Mempunyai harga diri yang wajar
 - e. Menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan
2. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain serta
 - a. Mampu mencintai orang lain
 - b. Mempunyai hubungan pribadi yang tetap
 - c. Dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda
 - d. Merasa bagian dari suatu kelompok
 - e. Tidak "mengakali" orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain "mengakali" dirinya
3. Mampu memenuhi tuntutan hidup serta
 - a. Menetapkan tujuan hidup yang realistis
 - b. Mampu mengambil keputusan
 - c. Mampu menerima tanggungjawab
 - d. Mampu merancang masa depan
 - e. Dapat menerima ide dan pengalaman baru
 - f. Puas dengan pekerjaannya

Gangguan kesehatan mental adalah kondisi individu yang memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan. Terdapat berbagai unsur penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada seseorang, gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi tiga kategori penyebab yakni faktor-faktor somatogenik, psikogenik, dan sosiogenik.

Faktor somatogenik yang terdiri dari neroanatomi, nerofisiologi, nerokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, dan faktor-faktor pre dan perinatal.

Faktor psikogenik meliputi interaksi ibu-anak yang tidak abnormal seperti tidak adanya rasa percaya, peranan ayah, *sibling rivalry*, intelegensi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau salah, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosi. Faktor sosiogenik yang di dalamnya terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. (<http://elib.fk.uwks.ac.id/>)

Dari ketiga faktor tersebut diketahui bahwa penyebab gangguan kejiwaan atau gangguan mental tidak hanya dapat disebabkan salah satu faktor, karena sifat manusia yang utuh dimana sistem dalam diri manusia merupakan sebuah kesatuan oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa penyebab gangguan kesehatan mental merupakan kombinasi dari ketiga kategori dengan satu kategori sebagai penyebab utamanya. Oleh sebab perihal ini lah dalam melakukan *assessment* pada penderita haruslah dilakukan secara detail dan menyeluruh.

Menurut Santrock (1999) penyebab gangguan jiwa pada umumnya dikategorikan menjadi aspek jasmaniah atau biologi seperti contohnya keturunan, kegemukan yang cenderung psikosa manik depresi dan dapat pula menjadi skizofrenia, tempramen karena orang yang telalu sensitif, penyakit, dan cedera tubuh.

Santrock juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor psikologi dimana seseorang dengan pengalaman frustrasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai perilaku, kebiasaan, dan sifatnya di masa yang akan datang. Pernyataan bahwa hidup manusia dapat dibagi atas 7 masa dan pada suatu keadaan tertentu dapat mendukung terjadinya gangguan jiwa.

Gangguan Kesehatan Mental di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang semakin berkembang, Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan *trend* yang sifatnya positif namun juga membawa perkembangan yang sifatnya merugikan seperti gangguan jiwa. Dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan mental atau jiwa dapat disebabkan oleh aspek dari luar individu, seperti halnya kehidupan dalam bermasyarakat. Ketika seseorang dituntut untuk memenuhi atau melakukan hal-hal di luar kapasitasnya maka akan menimbulkan stres yang berlebihan, dan jika tidak ditangani dengan tepat maka kondisinya akan menjadi lebih buruk dan berakhir pada gangguan kejiwaan.

Diketahui dari Guru Besar ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ascobat Gani kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan mental berdasarkan Riskesdas 2007 adalah sebesar Rp 20 triliun. Jumlah pasien Jamkesmas rawat inap terbanyak di rumah sakit (RS) Kelas A pada 2010 lalu adalah Hebephrenic Schizophrenia (1.924 orang), Paranoid Schizophrenia (1.612 orang), Undifferentiated Schizophrenia (443 orang), Schizophrenia Unspecified (400 orang) dan Other Schizophrenia (399 orang). Jumlah itu belum termasuk

pasien rawat jalan. Dari total populasi risiko 1,093,150 hanya 3.5 persen atau 38,260 yang baru terlayani di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai. Menurut Pendiri Rumah Komunitas Penderita Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bagus Utomo, penanganan atau proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia masih buruk. (www.merdeka.com)

Di negara-negara maju sudah banyak cara pencegahan dan juga pengobatannya, berbeda dengan di Indonesia khususnya beberapa daerah yang dalam urusan kesehatan mental masih jauh dari memadai, dan cenderung bersifat primitif. Minimnya informasi mengenai gangguan kesehatan mental membuat masyarakat masih menganggap bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan, sehingga tidak ada pengobatan yang dapat diberikan pada penderita gangguan kesehatan mental kecuali diasingkan atau dikucilkan yang terkadang caranya tidak manusiawi seperti mengurung di dalam sebuah kandang atau dipasung.

Menurut Pendiri Rumah Komunitas Penderita Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bagus Utomo, penanganan atau proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa, salah satunya Skizofrenia di Indonesia masih buruk. Masih terdapat 18 ribu penderita gangguan kesehatan mental khususnya orang dengan Schizophrenia (ODS) yang dipasung. Umumnya dipasung dengan rantai. Banyak tempat-tempat pengobatan jiwa di Indonesia ini tidak manusiawi. Ada pasien yang disuntik asal-asalan atau di pasung sampai mengidap penyakit kulit. Ada yang tidak manusiawi, dipaksa mengemis, pasiennya sampai korengan, kudisan, kurus, tak diberi baju. Belum lagi biaya perawatan di beberapa rumah sakit dan yayasan itu mahal. (www.merdeka.com)

Data yang telah dijabarkan sebelumnya sedikit menggambarkan bagaimana kondisi para penderita gangguan kesehatan mental. Dukungan masyarakat yang menjadi aspek penting dalam berkembangnya seseorang menjadi hal yang sangat sulit diraih oleh penderita gangguan kesehatan mental. Masyarakat sulit menerima kondisi para penderita, mereka menganggap para penderita adalah orang berbahaya, pasien yang tidak dapat pulih kesehatan mentalnya, dan layak untuk diasingkan.

Memberikan edukasi mengenai kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, berikut dengan penanganannya bukan hanya dibutuhkan oleh keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan kesehatan mental, melainkan kepada masyarakat pada umumnya. Dalam konsep *person in environment* yang menjadi salah satu ciri khas dari pekerjaan sosial menjelaskan bahwa keberadaan seseorang individu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Untuk perihal kesembuhan penderita gangguan kesehatan mental maka seluruh lapisan masyarakat wajib dan berhak mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapinya untuk menciptakan lingkungan (sosial) yang proporsional bagi kesembuhan para penderita.

Dengan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan mental atau kejiwaan (termasuk psikososial) kepada masyarakat maka secara bertahap stigma 'orang aneh yang harus dikucilkan' akan sedikit demi sedikit berkurang, dan bagi

keluarga yang anggotanya memiliki gangguan kesehatan mental atau kejiwaan akan langsung memberikan pengobatan di tempat yang sesuai, selain itu dengan terbukanya pikiran masyarakat maka secara berkala profesi pekerja sosial dalam bidang medis khususnya akan ikut terangkat. Tersedianya berbagai macam *treatment* seharusnya dapat menjadi solusi atau jawaban bagi masyarakat yang mempertanyakan dan meragukan akan kesembuhan bagi para penderita gangguan kesehatan mental atau kejiwaan.

Kuatnya stigma negatif masyarakat pada penderita gangguan kesehatan mental menjadikan penderita tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Dianggap sebagai sebuah aib, keluarga penderita gangguan kesehatan mental lebih memilih mengurung anggota keluarga yang terkena gangguan mental di rumah, bahkan masih sering ditemui yang memilih memasing karena berpikiran bahwa penderita gangguan kesehatan mental dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Dengan stigma negatif tersebut maka akan sulit institusi kesehatan yang menangani persoalan ini untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental, maupun gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat memilih untuk diam, dan melakukan hal yang sangat sederhana sebagai bentuk pengobatan. Kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat terjebak di perspektif masing-masing.

Untuk mencapai jiwa yang sehat diperlukan usaha dan waktu untuk mengembangkan dan membinanya. Jiwa yang sehat dikembangkan sejak masa bayi hingga dewasa, dalam berbagai tahapan perkembangan. Pengaruh lingkungan terutama keluarga sangat penting dalam membina jiwa yang sehat.

Apabila seseorang mengalami perubahan maka akan terjadi reaksi, baik secara jasmani maupun kejiwaan yang disebut dengan stres. Sebagai contoh misalnya para karyawan atau manajer merasakan stres apabila ada pekerjaan yang menumpuk atau jika ada kesulitan dalam hubungan kerja. Stres dapat terjadi pada setiap orang dan pada setiap waktu, karena stres merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Pada umumnya orang menyadari adanya stres, namun ada juga yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami stres.

Reaksi seseorang terhadap stres dapat bersifat positif maupun dapat bersifat negatif. Reaksi yang bersifat negatif atau merugikan, jika terjadi keluhan atau gangguan pada orang tersebut. Reaksi bersifat positif, jika menimbulkan dampak yang menjadi pendorong agar orang berusaha. Stres yang bersifat negatif/merugikan dapat terjadi apabila stres terlalu berat atau berlangsung cukup lama.

PENUTUP

Kesehatan mental atau kejiwaan merupakan hal vital bagi manusia sama halnya seperti kesehatan fisik atau tubuh pada umumnya. Dengan sehatnya mental atau kejiwaan seseorang maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal.

Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dalam berbagai aspek menjadikan masyarakatnya semakin modern, yang identik dengan meningkatkannya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada tekanan yang berlebihan di pikiran masyarakat, sehingga menjadi rentan terkena stress yang secara tidak langsung (sedikit-banyak) dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental atau kejiwaan. Penderita gangguan kesehatan mental masih dianggap sebagai hal yang memalukan atau sebuah aib bagi keluarga atau kerabat yang salah satu anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan mental atau kejiwaan. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa gangguan kesehatan mental atau kejiwaan tidak dapat disembuhkan sehingga bagi penderitanya layak dikucilkan.

Kuatnya stigma negatif masyarakat pada penderita gangguan kesehatan mental menjadikan penderita tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Dianggap sebagai sebuah aib, keluarga penderita gangguan kesehatan mental lebih memilih mengurung anggota keluarga yang terkena gangguan mental di rumah, bahkan masih sering ditemui yang memilih memasung karena berpikiran bahwa penderita gangguan kesehatan mental dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Dengan stigma negatif tersebut maka akan sulit institusi kesehatan yang menangani persoalan ini untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental, maupun gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat memilih untuk diam, dan melakukan hal yang sangat sederhana sebagai bentuk pengobatan. Kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat terjebak di perspektif masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mokhamad. (2012). "Rancangan Instrumen Deteksi Dini Gangguan Jiwa Untuk Kader dan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan". Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol V No.2 September 2006.
- Dewi, Kartika Sari. 2012. Buku Ajar Kesehatan Mental. UPT UNDIP Press : Semarang.
- Kaplan, Tony. 2009. *Children and Adolescent with Mental Health Problems*. The Royal College of Psychiatrists : London.
- Semrud-Clikeman, Margaret. 2007. *Social Competence in Children*. Springer Science+Business Media, LCC: USA.
- Wibhawa, Budhi, dkk. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung. Widya Padjadjaran
- Modul Kesehatan Mental Dalam Kedaruratan. WHO
- Faperta.ugm.ac.id. Kesehatan Jiwa. Diunduh pada tanggal 17 November 2014. Pukul 21.05 WIB.
- Faperta.ugm.ac.id. Kesehatan Jiwa. Diunduh pada tanggal 20 november 2014. Pukul 21.05 WIB.
- <http://www.merdeka.com>. Di Indonesia, ada 18 ribu penderita gangguan jiwa berat dipasung. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014. Pukul 20.05 WIB.

PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG KESETARAAN GENDER

Oleh :

Resti Fauziah, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo

Email:

(resfauziah@gmail.com; mulyananandang@gmail.com;
santosotriraharjo@gmail.com)

ABSTRAK:

Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Walaupun isu gender telah lama merebak di Indonesia, namun banyak orang yang masih salah mengartikan tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Selain gender yang sering disamakan dengan arti seks (jenis kelamin), kemudian salah arti lainnya dimana kesetaraan gender seolah-olah dianggap sebagai tindakan atau keinginan menomorsatukan perempuan yang ada di belahan dunia. Sebuah penelitian pada kelompok perempuan petani pedesaan di Jambi mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat setempat sangat risih berbicara dengan kesetaraan gender. Mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang tidak lazim dibicarakan, terlalu vulgar dan mendukung aliran liberalisasi serta sekularitas. Penulis memandang kesetaraan gender ini dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini. Pola pikir yang positif tentang kesetaraan gender akan membantu mengurangi kasus-kasus ketimpangan gender di Indonesia. Mengubah pola pikir masyarakat tentunya harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat di daerah itu sendiri. Pekerja sosial khususnya bidang pekerja sosial feminis bertugas untuk mengubah pola pikir dan mengedukasi masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan. Inti dari artikel ini bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan memerlukan tambahan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender yang positif pada masyarakat memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan terutama untuk mengurangi kasus-kasus ketidakadilan gender dan permasalahan rumah tangga. Adapun yang menjadi dasar bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi ialah pendidikan, umur, dan sumber informasi di suatu daerah atau masyarakat tersebut.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender, Pengetahuan, Masyarakat Desa.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang menarik untuk diperbincangkan apabila menilik pro kontra yang kerap melekat pada isu ini. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Secara perlahan, gerakan feminisme di Indonesia ini menuntut pergeseran posisi kaum

perempuan ke tempat yang lebih setara dalam mendapatkan hak-haknya di bidang sosial maupun budaya. (Nurrahmi : 2009)

Walaupun isu gender telah lama merebak di Indonesia, namun banyak orang yang masih salah mengartikan tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Gender sering diartikan dengan seks yang didefinisikan sebagai jenis kelamin yaitu pengkategorian perempuan dan laki-laki. Namun sebenarnya pengertian antara gender dan seks itu berbeda. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin secara biologis. Perbedaan ini sering dikatakan sebagai ketentuan dari Tuhan yang didapat secara kodrati, permanen, tidak berubah, tidak dapat dipertukarkan antara kodrat laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pembagian sifat yang ada pada manusia, yang penentuannya didasari secara sosial maupun kultural. Sifat ini dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Pembagian sifat pada manusia terbagi atas feminim yang identik dengan karakteristik perempuan, seperti sifat lembut dan sabar, sedangkan maskulin yang identik dengan karakteristik laki-laki mempunyai sifat yang sebaliknya dengan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Mansour Fakih (1996) bahwasannya perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (seks) sementara gender adalah *behavioral differencess* antara laki-laki dan perempuan yang *socially conructed*. Gender merupakan perbedaan yang bukan kodrat ciptaan Tuhan namun diciptakan oleh masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Kemudian salah arti lainnya dimana kesetaraan gender seolah-olah dianggap sebagai tindakan atau keinginan menomorsatukan perempuan yang ada di belahan dunia. Padahal hal ini bukan merupakan tujuan dari adanya kesetaraan gender itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh R. Valentina (2013) bahwa :

“Tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan HAM; menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan; menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi; menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; menghapus prasangka, kebiasaan, dan praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip perempuan dan laki-laki.” (www.institutperempuan.or.id)

Maka dari itu penulis memandang bahwa kesetaraan gender merupakan suatu norma yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat dengan mengacu pada ajaran agama yang dianut masing-masing. Seperti halnya didalam agama Islam, melalui kedua sumbernya Al Qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. (Dr. Marzuki, M.Ag., 2008.) Sehingga apabila kita memahami makna gender secara bijaksana dan obyektif berdasarkan dasar hukum dan agama yang dianut, tentu tidak akan memunculkan penolakan terhadap konsep kesetaraan gender itu sendiri karena sesungguhnya kesetaraan gender adalah hal yang positif.

Di Indonesia saat ini, beberapa pihak mengubah makna kesetaraan gender yang sesungguhnya menjadi semakin melenceng dari hal positif. Sebagaimana dilansir oleh salah satu surat kabar yang menyatakan:

“Di Indonesia, sejumlah pegiat kesetaraan gender tampak semakin aneh ketika mereka tidak segan-segan mendukung eksploitasi perempuan berbentuk beauty contest, seperti ajang Miss Universe atau Putri Indonesia. Padahal, ini bertentangan dengan prinsip feminisme diawal kemunculannya.

Walau dibungkus dengan brain dan behaviour, tapi kemolekan tubuh dan kecantikan wajah para perempuan yang mengikuti ajang tersebut tetap saja menjadi penilaian utama. Bahkan, anehnya, para aktivis gender ini mendukung sepenuhnya, para perempuan itu mengumbar auratnya.”
(www.republika.co.id)

Keadaan yang dijelaskan diatas menurut pandangan penulis tentu akan melahirkan stigma-stigma negatif masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender. Sehingga pada akhirnya muncul stigma kemaksiatan dan kemunkaran dipuja sebagai kebebasan dan kemajuan perempuan. Stigma inilah yang berbanding terbalik dengan tujuan kesetaraan gender pada awalnya. Kesetaraan gender dilahirkan dengan tujuan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan di masyarakat seputar isu gender dan kesetaraan gender itu sendiri, bukan untuk menomorsatkan perempuan atau membawa perempuan ke arah negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Erna Surjadi dalam bukunya yang berjudul *Gender Skateboard* (2011). “Kesetaraan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.” Oleh karena itu, kesadaran tentang isu kesetaraan gender merupakan hal yang perlu diraih baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan.

Didalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dede William kepada kelompok perempuan petani pedesaan di Jambi mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat setempat sangat risih berbicara dengan kesetaraan gender. Mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang tidak lazim dibicarakan, terlalu vulgar dan mendukung aliran liberalisasi serta sekularitas. Namun dalam beberapa waktu kemudian, kelompok perempuan disana akhirnya menerima bagaimana konsep kesetaraan gender yang sebenarnya. (Dede William, 2006)

Di dalam pekerjaan sosial, terdapat bidang praktik yang menjunjung kesetaraan gender yang disebut dengan pekerja sosial feminis. Teori feminis menjadi paradigma tersendiri yang dikenal dengan nama *feminist social work* (pekerja sosial feminis). Beranjak dari organisasi sukarela dan aksi masyarakat, perspektif feminis kini merangsek masuk ke bidang-bidang praktik pekerjaan sosial yang lain seperti konseling, terapi kelompok, terapi organisasi, analisis kebijakan sosial, dan penelitian pekerjaan sosial. (Edi Suharto, 2011) Bidang – bidang tersebut adalah lahan bagi pekerja sosial untuk mengedukasi dalam rangka penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Kasus-kasus seputar kesetaraan

gender di Indonesia memang banyak ditemukan. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita tidak perlu berlebihan dalam membela hak perempuan dengan cara propaganda atau kampanye yang melanggar demokrasi. Kesetaraan gender ini dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini.

Mengubah pola pikir masyarakat tentunya harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat di daerah itu sendiri. Sehingga pengetahuan masyarakat dapat dijadikan landasan bagaimana dan apa tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya untuk menjadikan masyarakat tersebut lebih paham dan peduli pada isu kesetaraan gender. Sebagaimana dikemukakan Arianto Nugroho dalam Kompas, 2011 : 10 bahwa kesetaraan gender tidak terjadi secara ilmiah, terutama di daerah yang memiliki subkultur yang kuat. Dengan demikian, penulis mengemukakan pertanyaan inti yang akan dibahas pada artikel ini yaitu Bagaimana pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender?

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s NewWorld Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris.

Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab. Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dengan menggunakan pendekatan bahasa. Kata ini masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir. Pengertian gender secara terminologis cukup banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Julia Cleves Musse dalam bukunya *Half the World, Half a Chance* mendefinisikan gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Rukmina, 2007).

Menurut BKKBN (2007) Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Sedangkan Depkes RI (2008) menjelaskan bahwa gender adalah pembedaan peran, perilaku, perangai laki-laki dan perempuan oleh budaya/masyarakat melalui

interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Jadi gender, tidak diperoleh sejak lahir tapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, gender dapat disesuaikan dan diubah.

B. Kesetaraan dan Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi kesetaraan gender adalah menerima dan menilai secara setara (Sufiarti, 2007):

- a. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan
- b. Perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- c. Memahami bahwa perbedaan kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan
- d. Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah
- e. Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan
- f. Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan, sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan disemua bidang kehidupan domestik dan publik.

Berdasarkan penjelasan tentang kesetaraan gender di atas penulis dapat mengemukakan bahwa kesetaraan gender cenderung bersifat abstrak, karena murni berasal dari pemahaman dan pola pikir manusia itu sendiri. Oleh karena hal itu, seseorang yang benar-benar memahami konsep kesetaraan gender sesuai dengan pengertian sesungguhnya dan menerima segala hal tentang konsep tersebut maka ia akan bertindak sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Inilah yang menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan / diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah segala bentuk tindakan yang menunjukkan keadaan atau posisi tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana penjelasan BKKBN (2007) bahwa Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarganya masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu

- a. *Stereotip/Citra Baku*, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-kanak; kaum perempuan ramah dianggap genit; kaum laki-laki ramah dianggap perayu.
- b. *Subordinasi/Penomorduuan*, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah” atau “teman yang ada di belakang”.
- c. *Marginalisasi/Peminggiran*, adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan

secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki.

- d. *Beban Ganda/Double Burden*, adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.

C. Konsep Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Adapun cara mengetahui sesuatu dapat dilakukan dengan cara mendengar, melihat, merasakan sebagainya yang merupakan bagian dari alat indera manusia (Ahmad, 2008).

Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan menurut Sunaryo (2005) mempunyai 6 tingkatan yaitu :

a. *Tahu*

Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Tahu artinya dapat mengingat atau mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

b. *Memahami*

Memahami diartikan suatu kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang diketahui. Seseorang yang telah paham tentang sesuatu harus dapat menjelaskan, memberikan contoh dan menyimpulkan.

c. *Penerapan*

Yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau dapat menggunakan hukum-hukum, rumus, metode dalam situasi nyata.

d. *Analisis*

Suatu kemampuan menguraikan objek-objek kedalam bagian-bagian kecil, tetapi masih di dalam suatu struktur objek tersebut dan masih terkait satu sama lain. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menggambarkan, membuat bagan, membedakan, memisahkan, membuat bagan proses adopsi perilaku dan dapat membedakan pengertian psikologi dengan fisiologi.

e. *Sintesis*

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menyusun, meringkaskan, merencanakan dan menyesuaikan suatu teori atau rumusan yang telah ada.

f. *Evaluasi*

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu objek. Evaluasi dapat menggunakan kriteria yang telah ada atau disusun sendiri. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau

kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut diatas(Notoatmodjo, 2007).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

1. Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2005) konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok dan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah suatu proses yang unsurnya terdiri dari masukan(input) yaitu sasaran pendidikan (out put) yaitu suatu bentuk perilaku dan kemampuan dari saran-saran pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan anggapan bahwa manusia selalu dapat belajar atau berubah, karena manusia selama hidupnya selalu berubah untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan (Notoadmodjo, 2009).

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas (Depdiknas, 2004 Dalam Notoatmodjo, 2009):

- a. Pendidikan Dasar, Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah, Pendidikan menengah berbentuk: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi, Perguruan tinggi dapat berbentuk: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau vokasi.

Gangguan terhadap kesehatan juga disebabkan oleh manusia terutama menyangkut pendidikan, pengetahuan dan sikap seseorang dalam menjaga kesehatan apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi maka bisa memperbaiki pengetahuan, sikap dan perilaku orang tersebut sehingga mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga, Pendidikan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh hasil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang (Notoadmodjo, 2009).

2. Umur

Umur adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Umur juga berpengaruh terhadap psikis seseorang dimana usia muda sering menimbulkan ketegangan, kebingungan, rasa cemas dan rasa takut sehingga dapat berpengaruh

terhadap tingkah lakunya. Biasanya semakin dewasa maka cenderung semakin menyadari dan mengetahui tentang permasalahan yang sebenarnya. Semakin bertambah umur maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh, sehingga seseorang dapat meningkatkan kematangan mental dan intelektual sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam bertindak (Hurlock, 2005).

Pieter (2010) menguraikan bahwa secara umum masa dewasa dikelompokkan atas tiga bagian yaitu:

- a. Dewasa dini (*early adulthood*) (21-35 tahun) Masa dewasa dini selalu dianggap sebagai penyesuaian diri terhadap kehidupan dan harapan sosial baru. Kriteria utama periode dewasa dini yaitu interdependen, kesediaan untuk bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan. Interdependen dan tanggung jawab menentukan kondisi kehidupan emosional, sosial dan ekonomi.
- b. Dewasa madya (*middle adulthood*) (35-45 tahun) Kangas dan bradway menyimpulkan bahwa saat periode dewasa madya terdapat kenaikan pada kemampuan intelektual, terutama pada tingkat kecerdasan tinggi. Pria akan menunjukkan perubahan intelektual lebih tinggi dibandingkan wanita. Pria akan menunjukkan peningkatan nilai intelegensi ketika mereka tua.
- c. Dewasa akhir (*late adulthood*) (45-60 tahun) Batasan usia dewasa akhir adalah usia 45-65 tahun dengan perubahan fisik yang menonjol dibandingkan dengan perubahan psikologis. Bagi pria yang memasuki periode ini ditandai dengan memasuki fase klimakterium, sedangkan wanita ditandai dengan fase menopause. Ketidakseimbangan fisiologis akan berdampak pada terganggunya keseimbangan emosi seperti stres dan depresi.

3. Sumber Informasi

Menurut Notoatmodjo (2005), sumber informasi mempengaruhi pengetahuan baik dari media maupun orang-orang dalam terkaitanya dengankelompok manusia memberi kemungkinan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi anggota-anggota. Seseorang di dalam proses pendidikan juga memperoleh pengetahuan melalui berbagai macam alat bantu. Alat Bantu media akan membantu dalam melakukan penyuluhan. Alat Bantu dapat dibagi dalam tiga macam:

a. *Media Cetak*

Yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kesehatan dengan variasi seperti: (1) Booklet. Suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk tulisan maupun gambar. (2) Leaflet. Bentuk penyampaian informasi melalui lebaran yang dilipat. informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk gambar. (3) Selebaran. (4) Lembar balik (Flip Chart). Bentuk penyampaian pesan atau informasi-informasi dalam bentuk lembar balik di manatiap lembar berisi gambaran peragaan dan di baliknya berisi kalimat yang berkaitan dengan gambar tersebut. (5) Rubik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah yang berkaitan dengan topik terkait. (6) Foster. Bentuk media cetak berisi pesan-pesan atau informasi kesehatan yang biasanya ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum atau dikendaraan umum.

b. *Media Elektronika*

Media sarana komunikasi merupakan sarana komunikasi dengan menggunakan elektronik terdiri dari televisi, radio, video, dan lain-lain. Untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi

c. *Media Papan*

Papan yang dipasang di tempat-tempat umum yang diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Informasi adalah keterangan pemberitahuan kabar berita tentang suatu media dan alat (sarana) komunikasi seperti Koran, majalah, radio, televisi, poster, spanduk, internet. Media komunikasi adalah media yang digunakan pembaca untuk mendapatkan informasi sesuatu atau hal tentang pengetahuan.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesetaraan gender berbicara tentang penerimaan dan penilaian seseorang terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender menggambarkan bagaimana masyarakat menerima dan menilai dua jenis kelamin yang berbeda dalam kedudukan dan posisi setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan tingkat pengetahuan, maka pengetahuan masyarakat desa dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Namun, penulis memandang hal ini secara nyata tidak menentukan tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kesetaraan gender. Salah satu keadaan pada kehidupan nyata misalnya pada keluarga petani di suatu desa. Suami dan istri membagi tugas secara adil dalam hal pekerjaan tanpa memandang pekerjaan tersebut cenderung harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Suami dan istri pada keluarga petani saling bekerja sama ketika mereka sedang berada di sawah. Sehingga perempuan yang melekat dengan kata lemah lembut, gemulai, dan tidak mampu melakukan pekerjaan berat semuanya tidak berlaku lagi ketika sedang bekerja di sawah. Pembagian-pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dilakukan atas kesadaran masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau disampingkan. Hal yang demikian menggambarkan bahwa keluarga petani di desa tersebut sesungguhnya telah menerapkan konsep kesetaraan gender pada kehidupan keseharian mereka di sawah. Akan tetapi kondisi tersebut belum tentu mengartikan bahwa mereka telah paham apa makna dari kesetaraan gender itu sendiri.

Beralih dari konsep yang pertama mengenai tingkatan pengetahuan, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, diantaranya : pendidikan, umur, dan sumber informasi. aspek-aspek tersebut dijadikan kategori oleh penulis dalam melakukan analisis bagaimana pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender.

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan pengetahuan seseorang. Seperti yang dijelaskan pada tinjauan pustaka, manusia selama hidupnya selalu berubah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dengan demikian pengetahuan seseorang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Jalur pendidikan dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal pada fasilitas-fasilitas yang tersedia. Namun, hal yang menjadi titik kesulitan utama masyarakat desa ialah kekurangan fasilitas pendidikan terdekat. Sehingga sebagian besar masyarakat desa yang mengalami kesulitan dalam biaya transportasi tidak meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya hingga saat ini masih banyak masyarakat desa yang memiliki pendidikan lulusan SD terutama penduduk usia dewasa akhir dan lansia. Selain karena faktor jarak, adapula faktor ekonomi yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang umumnya bermatapencaharian sebagai petani. Seperti yang telah diungkapkan pada tinjauan pustaka bahwa masyarakat kota pada awalnya merupakan masyarakat desa. Oleh karena itu pendidikan di pedesaan tidak diam di tempat melainkan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga wajar bila pada saat ini sebagian kecil penduduk di desa sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. Secara linear, hal ini juga berhubungan dengan pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender. Didalam tinjauan pustaka disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan orang tersebut. Oleh karena itu tidak semua warga desa yang belum memahami konsep gender dan kesetaraan gender. Akan tetapi bergantung pada tingkat pendidikan seluruh penduduk yang ada di desa tersebut. Sehingga penulis mengasumsikan jika tingkat pendidikan penduduk di suatu desa sangat rendah atau termasuk desa tertinggal maka pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan genderpun akan rendah. Masyarakat yang tidak memahami konsep gender dan kesetaraan gender kemudian akan menganggapnya sebagai salah satu hal yang tabu. Oleh karena itu, desa dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah berpotensi besar bagi pekerja sosial untuk diberikan intervensi.

2) Umur

Semakin bertambah umur maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh, sehingga seseorang dapat meningkatkan kematangan mental dan intelektual sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam bertindak (Hurlock, 2005).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa pengetahuan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia atau pengalaman seseorang tersebut. Oleh karena itu, semakin tua umur seseorang maka seharusnya ia semakin mengerti tentang konsep kesetaraan gender. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan di pedesaan yang rata-rata penduduk berpendidikan rendah adalah ia yang berusia tua, maka pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan genderpun akan rendah pada penduduk dengan usia tua. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa intervensi pekerjaan sosial perlu diberikan kepada usia penduduk desa

dengan tingkat pendidikan rendah dan kategori usia yang paling membutuhkan. Kategori usia yang paling membutuhkan ialah usia yang rawan berhadapan dengan kasus-kasus ketidakadilan gender diantaranya dewasa dini dan dewasa madya.

3) Sumber Informasi

Sumber informasi baik dari media maupun orang-orang di sekitar akan mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian diperoleh analogi jika sumber informasi tentang kesetaraan gender di suatu daerah jumlahnya terbatas maka pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat tentang kesetaraan genderpun akan kurang. Namun, sumber informasi juga dapat menjadi penyebab munculnya kekeliruan paham masyarakat tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu diperlukan media dan cara penyampaian yang tepat untuk mengubah paham masyarakat dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dan asalnya berfikir negatif menjadi berfikir positif. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat pedesaan dengan kategori daerah terpencil, tingkat ekonomi rendah atau pendidikan rendah, dan tingkatan religius yang kental (tinggi).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender berawal dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang positif tentang kesetaraan gender akan membawa manfaat yang banyak bagi setiap perempuan dan laki-laki dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Sedangkan kekeliruan atau ketidakpahaman masyarakat mengenai makna kesetaraan gender dapat menjadi penyebab bertambahnya kasus-kasus kesetaraan gender yang terjadi pada masyarakat Indonesia baik pada laki-laki maupun perempuan. Kasus KDRT, perceraian yang semakin marak terjadi pada awalnya disebabkan oleh disfungsi pembagian kerja, peran, hak, dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pemahaman tentang kesetaraan gender tujuan utamanya adalah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan mendorong terbentuknya keluarga-keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian bukan hanya perempuan yang perlu memahami kesetaraan gender, tetapi justru laki-laki. Secara fakta tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dialami oleh kaum perempuan. Dengan demikian yang perlu mendapatkan perubahan sikap ialah orang yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Memberikan pemahaman hingga berwujud menjadi kesadaran dan perubahan sikap merupakan bagian dari tugas fungsi pekerjaan sosial sebagai pembawa perubahan sekaligus *problem solver*. Dalam hal ini intervensi pekerjaan sosial dapat berbentuk tiga upaya yaitu, *engage, educate, empower*.

Engage diantaranya merupakan upaya pekerjaan sosial untuk menghubungkan korban-korban ketidakadilan gender kepada pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan. Educate yaitu upaya memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada masyarakat terutama kelompok-kelompok yang

mempengaruhi pengetahuan. Faktor-faktor tersebut diantaranya pendidikan, umur, dan sumber informasi.

Berdasarkan pendidikan, kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan rendah berpotensi besar memiliki pengetahuan yang rendah tentang kesetaraan gender. Berdasarkan usia, pengetahuan tentang kesetaraan gender semakin meningkat seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pendidikan seseorang. Namun kategori usia yang paling membutuhkan edukasi ialah mereka yang rawan berhadapan dengan kasus ketidakadilan gender yaitu penduduk yang telah berrumah tangga diantaranya usia dewasa dini dan dewasa madya. Berdasarkan sumber informasi, pengetahuan masyarakat desa tentang kesetaraan gender akan rendah pada daerah yang memiliki kekurangan sumber informasi mengenai hal terkait. Sumber informasi juga merupakan faktor penyebab penting ketidakpahaman dan kekeliruan masyarakat pedesaan memaknakan kesetaraan gender. Oleh karena itu tugas pekerja sosial feminis yaitu memberikan pemahaman yang sesuai kepada kelompok yang tepat melalui media penyampaian yang tepat. Karakteristik masyarakat pedesaan menjadi dasar utama yang harus dipertimbangkan oleh pekerja sosial dalam melakukan praktik pelayanan.

Inti dari artikel ini bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan memerlukan tambahan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender yang positif pada masyarakat memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan terutama untuk mengurangi kasus-kasus ketidakadilan gender dan permasalahan rumah tangga. Adapun yang menjadi dasar bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi ialah pendidikan, umur, dan sumber informasi di suatu daerah atau masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan e-Book

Surjadi, Erna. 2011. *Gender Skateboard: Kekuatan spirit Gender dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Pustaka Harapan.

Fakih, Mansoer. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmawati, Ika. 2003. *Modul Analisis Gender*. Jakarta: The Asia Foundation.

Notoatmodjo S. (2007). *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Rineka Cipta, Jakarta.

Depkes RI, (2008), *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi Untuk Petugas Kesehatan Di Tingkat Pelayanan Dasar*, Depkes RI, Jakarta.

Dede William, (2006), *Gender Bukan Tabu, Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan Di Jambi*, CIFOR, Bogor, Indonesia.

BKKBN, (2007), *Program Pembinaan Jarak Jauh, Pangarusutamaan Gender (PJJ-PUG), Konsep Dan Teori Gender*, BKKBN, Jakarta.

Jurnal, Hasil Penelitian, dan Skripsi

Asyhari. 2009. Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Skripsi).

Rukmina, (2007), *Fenomena Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal, Vol.4, Jakarta.

Sufiarti, (2007), *Laporan Penelitian Persepsi Perempuan Berkarir Di Lingkungan UPI Tentang Konsep Kesetaraan Gender*, Jurnal, Jakarta.

Website dan Blog

<http://syafroafni.wordpress.com/2013/01/12/masyarakat-desa-dan-masyarakat-kota/>
diunduh pada Selasa, 4 November 2014 pukul 04.10 WIB.

www.institutperempuan.or.id
(www.republika.co.id)

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA

Oleh:

Derin Darachita Pradini, Dessy Hasanah Siti A., & Maulana Irfan

Email:

(derindp@gmail.com; dessyhasanahsiti@yahoo.com; sangirfan@gmail.com)

ABSTRAK

Artikel ini berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Dunia Industri di Indonesia”. Sebagai negara berkembang yang tidak luput dari arus globalisasi dan industrialisasi, kebutuhan akan Pekerja Sosial khususnya di dunia industri di Indonesia pun semakin terasa. Hanya saja kesadaran akan kebutuhan Pekerja Sosial dalam bidang industri di Indonesia masih minim. Dalam artikel ini, penulis berupaya menjabarkan andil Pekerja Sosial industri dalam memanusiawikan dunia kerja di Indonesia akibat dari industrialisasi. Diantaranya dengan cara memberikan pelayanan yang menangani kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, atau perekrutan dan pengembangan pegawai serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial lainnya terhadap masyarakat. Dalam praktiknya di perusahaan, pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial industri di antaranya adalah bagian *Employee Assistance Programs (EAPs)*, *Human Resources Development (HRD)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta kebijakan dan advokasi. Dilihat dari permasalahan sosial yang diakibatkan dunia industry, banyak peran Pekerja Sosial di Indonesia yang dapat dijalankan, hanya saja kesadaran perusahaan dan *stakeholder* terkait yang berada dalam duni industry belum paham betul dan sadar akan kebutuhan Pekerja Sosial industry di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak penyebaran informasi dan juga bukti nyata dari praktik Pekerja Sosial industry. Perlu lebih banyak lagi sosialisasi dan penyajian data pasti mengenai Pekerja Sosial, seperti dengan mengesahkan RUU mengenai Pekerja Sosial sebagai payung hukum sehingga posisi Pekerja Sosial di Indonesia menjadi lebih diakui dan jelas bidang intervensinya, khususnya Pekerja Sosial industri.

Kata Kunci: Peran Pekerja Sosial Industri, Akibat Industrialisasi, Pelayanan Pekerjaan Sosial Industri

ABSTRACT

This article titled “The Role of Social Worker in The Industry in Indonesia”. As a developing country that can’t escape from globalization and industrialization, the need for Social Worker, especially in the industrialized world in Indonesia was increasingly felt. However, awareness of the need for Social Worker in the field of industry in Indonesia is still lacking. In this article, author try to describe the role

of Social Worker in humanizing the industrial world in Indonesia which is caused by industrialization. By providing services that deal with welfare, health and safety, labor relations with the employer, or recruitment and employee development and community empowerment, and also social responsibility towards the community. In the corporate, the services that provide by Occupational Social Work are Employee Assistance Programs (EAPS), Human Resources Development (HRD), Corporate Social Responsibility (CSR), Occupational Health and Safety (K3), and policy and advocacy. Based on the social problems caused by industry, many roles that can Social Worker do. However, corporate and mutual stakeholder awareness about the needs of occupationa; Social work still not enough to make it come true. Need more information and real action that Social Worker present. Need more socialization and factual data about occupational Social Worker in Indonesia, like by authorize the RUU about Social Worker that can be legal protection, so that the role and field of intervention of Social Worker, especially occupational Social Worker, can be recognized.

Keywords: Role of Occupational Social Work, Caused of Industrialization, Services of Occupational Social Work

Pendahuluan

Industrialisasi dan globalisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan yang memiliki pengaruh satu sama lain. Karena pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan bagian dari proses modernisasi yang dipengaruhi oleh semakin maju dan canggihnya teknologi. Salah satu efek dari globalisasi dan industrialisasi adalah keadaan masyarakat yang semakin berkembang sehingga menyebabkan perubahan yang mempengaruhi kondisi social masyarakat. Berkembangnya kondisi social masyarakat otomatis menyebabkan permasalahan sosial yang ada berkembang pula. Isu-isu social yang ada menjadi semakin kompleks, oleh sebab itu dibutuhkan penyelesaian yang memiliki efek berkelanjutan atau setidaknya dapat meminimalisir efek dari permasalahan social tersebut dengan meningkatkan keberfungsian social masyarakat. Disinilah peluang Pekerja Sosial untuk turut memiliki andil dalam menangani masalah sosial yang ada diantaranya dalam bidang yang terkait dengan hasil globalisasi dan industrialisasi, yakni dunia industri sebagai Pekerja Sosial industri (*industrial social worker*) atau Pekerja Sosial di perusahaan (*occupational social work*).

Sebagai negara berkembang yang tidak luput dari arus globalisasi dan industrialisasi, kebutuhan akan Pekerja Sosial di Indonesia pun semakin terasa. Hanya saja kesadaran dunia industri di Indonesia akan kebutuhan dari peran Pekerja Sosial industri masih minim. Padahal jika dilihat dari sejarahnya, Pekerja Sosial yang khusus menangani bidang industry ini hadir sejak tahun 1920an di Eropa. Berarti sudah hampir satu abad salah satu bidang garapan Pekerja Sosial ini ada.

Di Indonesia, seperti yang dilansir dari situs resmi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih

sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial industri, Pekerja Sosial forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di lembaga-lembaga rehabilitasi sosial, korban penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial spesialis perlindungan anak, Pekerja Sosial spesialis manajemen bencana dan sebagainya. Sayangnya di Indonesia belum ada data pasti mengenai jumlah Peksos Industri yang ada.

Seperti halnya Pekerja Sosial medik (*medical social worker*) yang bekerja di rumah sakit, para Pekerja Sosial industri (*industrial social worker*) ini bekerja di perusahaan-perusahaan, baik negeri maupun swasta, untuk menangani kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, atau perekrutan dan pengembangan pegawai. (lihat Friedlander dan Thackeray, 1982; Payne, 1991; Johnson, 1984; DuBois dan Miley, 1992; Suharto, 1997).

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa peran Pekerja Sosial industri bukan hanya meliputi kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, serta pengembangan dan pelatihan pemilik kepentingan di perusahaan ataupun karyawannya saja, melainkan seluruh aspek yang terlibat dan menjadi bagian dari perusahaan. Seperti masyarakat sekitar tempat perusahaan berdiri, ataupun masyarakat secara lebih luas lagi yang salah satunya dituangkan perusahaan dalam bentuk program sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Akibat Industrialisasi

Fenomena industrialisasi melahirkan mekanisasi dan otomatisasi yang menggeser pekerjaan manusia dengan alat dan mesin sehingga membuat tenaga dari para pekerja seperti tidak penting. Sebagai contoh, sekarang sudah hampir seluruh pintu masuk jalan tol di Indonesia menggunakan sensor otomatis pendeteksi kendaraan yang hendak masuk ke jalan tol sehingga tidak lagi membutuhkan operator (manusia). Dengan digunakannya mesin ini, lapangan pekerjaan pada perusahaan jasa yang mengurus jalan tol ini menjadi berkurang, karena perusahaan menganggap bahwa penggunaan mesin tersebut jauh lebih efisien dibanding menggunakan jasa manusia. Dan bisa jadi di tahun-tahun yang akan datang, seluruh operator yang bertugas di pintu masuk ataupun pintu keluar tol akan digantikan semuanya oleh mesin. Hal inilah yang kemudian menyebabkan rasa tidak berdaya pada diri pekerja yang tidak hanya berdampak pada diri mereka pribadi saja, tapi juga lingkungan social di sekitarnya terutama orang-orang terdekat seperti keluarga. Penggunaan mesin yang semakin canggih dan dalam skala yang berlebihan juga dapat menimbulkan rasa malas dan membuat para pekerja ini justru menjadi budak dari mesin.

Adapula klasifikasi dari dampak-dampak negatif yang menimbulkan masalah sosial sebagai dampak dari industrialisasi yang dikemukakan oleh Johnson (1984:261) yang disingkat menjadi 5A, yaitu:

1. *Alienation*: perasaan keterasingan dari diri, keluarga dan kelompok sosial yang dapat menimbulkan apatis, marah, dan kecemasan.
2. *Alcoholism* atau *Addiction*: ketergantungan terhadap alkohol, obat-obat terlarang atau rokok yang dapat menurunkan produktifitas, merusak kesehatan fisik dan psikis, dan kehidupan sosial seseorang.
3. *Absenteeism*: kemangkiran kerja atau perilaku membolos kerja dikarenakan rendahnya motivasi pekerja, perasaan-perasaan malas, tidak berguna, tidak merasa memiliki perusahaan, atau sakit fisik dan psikis lainnya.
4. *Accidents*: kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh menurunnya konsentrasi pekerja atau oleh lemahnya sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
5. *Abuse*: bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (istri/suami), seperti memukul dan menghardik secara berlebihan yang ditimbulkan oleh frustrasi, kebosanan dan kelelahan di tempat pekerjaannya.

Beberapa permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan industrialisasi adalah: diskriminasi di tempat kerja atau tindakan-tindakan tidak adil terhadap wanita, kaum minoritas, imigran, remaja, pensiunan, dan para penyandang cacat. Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi (udara, air, suara) dan kerusakan-kerusakan fisik dan psikis bagi para pekerjanya. Para pekerja sosial industri dapat membantu dunia industri untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai biaya sosial (*social costs*) yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Di Indonesia saat ini para buruh sedang marak-maraknya menuntut kenaikan upah, terlebih lagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang mempengaruhi harga seluruh kebutuhan pokok dan juga tarif transportasi umum. Hal tersebut terasa miris, karena disaat para buruh di negara lain khususnya negara-negara di ASEAN sedang mempersiapkan diri untuk menyambut AFTA dan MEA di tahun 2015 yang tinggal menghitung hari, buruh di Indonesia malah sibuk berdemonstrasi, menuntut pemerintah untuk menaikkan upahnya. Padahal keterampilan jauh lebih penting dan akan terus bermanfaat daripada kenaikan upah yang tidak seberapa dan tidak akan pernah cukup untuk menutupi kebutuhan. Hal tersebutlah yang perlu disampaikan agar dipahami oleh para buruh di Indonesia, agar mata mereka terbuka, bahwa kesejahteraan tidak akan terwujud jika hanya bermodal materi. Hal-hal tersebut tentunya dapat diupayakan agar tersampaikan pada para buruh oleh Pekerja Sosial industri, karena memang itulah salah satu ranah dari intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang Pekerja Sosial industri khususnya di Indonesia.

Di sisi lain, terlepas dari masalah mekanisasi dan otomatisasi, fenomena dari industrialisasi juga menyebabkan jam kerja yang tak kenal waktu. Sebagai

contoh, pekerja yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti bankir, menghabiskan kurang lebih 80 jam setiap minggunya untuk bekerja. Sedangkan menurut pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem seperti yang telah disebutkan di atas yaitu:

- a. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- b. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Waktu 80 jam kerja yang biasanya sudah termasuk waktu lembur tersebut terlihat jauh selisihnya dengan jam kerja yang ada dalam Undang-undang. Namun waktu kerja yang begitu pada tersebut tidak bisa dihindari karena merupakan tuntutan pekerjaan dan sudah menjadi resiko bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia industri perbankan. Salah satu contoh padatnya jam kerja ini, membuktikan bahwa Pekerja Sosial industri memang dibutuhkan dalam rangka memanusiawikan dunia kerja.

Peran Pekerja Sosial Industri

Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik Pekerjaan Sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Dalam konteks ini, PSI menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi lain yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Suharto, 2006; dalam Suharto 2009)

Pekerja Sosial sebagai agen perubahan yang bertugas mewujudkan keberfungsian sosial masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sosial memiliki peran-peran tersendiri dalam menjalankan praktiknya. Dalam dunia industri, pekerja sosial memiliki tugas serta peranan tersendiri. Bidang tugas Pekerja Sosial yang bekerja dalam dunia industri dijelaskan oleh Johnson (1984:263-264), sebagai berikut:

1. Kebijakan, perencanaan dan administrasi. Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan tidak melibatkan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif, pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam departemen-departemen perusahaan.
2. Praktik langsung dengan individu, keluarga dan populasi khusus. Tugas Pekerja Sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (crisis intervention), asesmen (penggalian) masalah-masalah personal dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi pecandu alcohol dan obat-

obatan terlarangm pelayanan dan perawatan sosial bagi anak-anak pekerja dalam perusahaan atau organisasi serikat kerja, dan pemberian konseling bagi pensiunan atau pekerja yang menjelang pension.

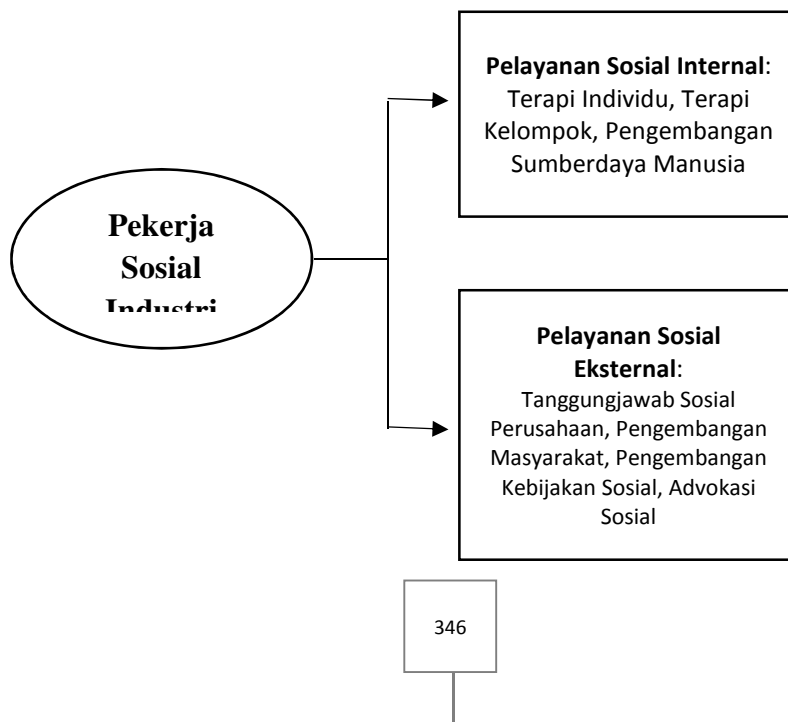
3. Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan Pekerja Sosial industry dalam perusahaan sangatlah luas cakupannya. Tidak hanya sekedar menangani dampak dari pemanfaatan teknologi saja, tapi berbagai aspek seperti dampak dari meningkatnya jumlah karyawan, peran Pekerja Sosial untuk menjawab isu pemberhentian karyawan dan pada saat perasaan tidak aman timbul pada pegawai (*declining mode*), dan juga pada saat terjadi *conflict of interest* pada karyawan seperti konflik karyawan dengan serikat kerja, dengan masyarakat lokal, dengan pemerintah, maupun dengan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan. Semua hal tersebut direalisasikan dalam bentuk pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial industry.

Pelayanan Pekerjaan Sosial Industri

Dalam menjalankan tiga bidang tugas dalam ranah industri, Pekerja Sosial dapat menggunakan dua pendekatan baik mikro maupun makro. Dalam pendekatan mikro, terdapat beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi individu dalam perusahaan, seperti dengan konseling dan terapi pada individu. Untuk pendekatan makro, pelayanan yang diberikan kepada kelompok melalui terapi kelompok, serta pelatihan dan pengembangan.

Bentuk pelayanan dari pekerja sosial industry di perusahaan tidak hanya mencakup bagian internal perusahaan saja tapi juga mencakup bagian eksternal dari perusahaan, karena di masa sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan lingkungan dari suatu perusahaan sama dengan kesuksesan komersil.



Pelayanan Sosial Internal dan Eksternal Pekerja Sosial Industri (Suharto, 2009:8)

Adapun tipologi model *setting* Pekerja Sosial Industri (Straussner, 1989:8-13, dalam Suharto, 2009:16) yang merupakan konseptualisasi tentang beragam pelayanan, juga peranan dan keterampilan yang dimiliki Pekerja Sosial Industri, diantaranya adalah:

1. Model pelayanan sosial bagi pegawai (*the employee service model*)
2. Model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan (*the employer-work organization service model*)
3. Model pelayanan sosial bagi konsumen (*the consumer service model*)
4. Model tanggungjawab sosial perusahaan (*the corporate social responsibility model*) atau model investasi sosial perusahaan (*the corporate social investment*)
5. Model kebijakan public di bidang pekerjaan (*work related public policy model*).

Dari kelima model dalam tipologi di atas terlihat bahwa peran Pekerja Sosial industry di Indonesia harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani model-model pelayanan tersebut. Tentunya perlu dibekali keterampilan serta pengetahuan yang sesuai diawali dengan melakukan assesmen terhadap budaya yang ada dalam perusahaan agar nantinya memiliki gambaran intervensi seperti apa yang akan diberikan. Dan tentunya yang menjadi catatan penting adalah intervensi yang dilakukan harus secara holistik. Agar hasil dari intervensi menimbulkan perubahan yang maksimal dan berkelanjutan.

Human Resource Development (HRD)

Human Resource Development (HRD) yang secara harfiah berarti pengembangan sumberdaya manusia, merupakan salah satu bagian dalam perusahaan yang menjadi ranah Pekerja Sosial industry. Dalam HRD Pekerja Sosial industry memiliki tugas untuk melakukan perekrutan, dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia yang ada dalam perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja sumberdaya manusia yang dimiliki perusahaan. HRD merupakan bagian penting dalam perusahaan, oleh karena itu peran Pekerja Sosial yang memang memiliki kompetensi untuk menjadi bagian dari HRD sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan perusahaan. Salah satu program yang menjadi bagian dari HRD adalah *Employee Assistance Programs (EAPs)* yang pada praktiknya langsung berhubungan dengan pegawai.

Employee Assistance Programs (EAPs)

Employee Assistance Programs (EAPs) merupakan salah satu program yang dijalankan Pekerja Sosial industry untuk melakukan asistensi terhadap pegawai yang memberikan pelayanan bagi pekerja baik bersifat penyembuhan (*treatment*) maupun pelatihan serta pengembangan. EAPs merupakan wujud dari

model pelayanan sosial dari pegawai. EAPs pada umumnya diberikan pada pengguna alcohol dan bebas biaya (ditanggung perusahaan melalui asuransi kesehatan, jika menolak beresiko dipecat), walaupun di Indonesia pelayanan seperti ini belum terdengar keberadaannya di perusahaan. Selain itu adapula konseling-konseling mengenai kesulitan emosional ataupun perilaku, keluarga, karier, pendidikan, pelatihan, kredit dan juga mengenai perencanaan pensiun pegawai (Zastrow, 2010).

Dalam EAPs, Pekerja Sosial banyak berperan sebagai konselor, *linking*, *broker*, serta *trainer*. Dalam praktiknya pada program EAPs ini, Pekerja Sosial industry banyak dituntut untuk menggunakan pendekatan mikro atau secara individu. Kejelian dalam melakukan assesmen dan menentukan intervensi pun sangat dibutuhkan disini. Seperti halnya pada isu gender yang masih banyak terjadi di perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini seorang Pekerja Sosial industry harus jeli dalam melakukan assesmen dan intervensi, bahwa yang seharusnya mendapat intervensi bukanlah perempuan yang menjadi sasaran, tapi *human system*-nya lah yang membutuhkan intervensi.

Di Indonesia sendiri peran Pekerja Sosial sebagai konselor di perusahaan masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat awam, contoh kecilnya dapat dibuktikan dengan jenis lowongan kerja yang tersedia, sulit sekali menemukan konselor pada perusahaan yang memang khusus ditujukan bagi Pekerja Sosial. Sebagai *linking* dan *broker*, Pekerja Sosial industry berperan untuk menghubungkan pegawai yang menjadi klien pada sumber-sumber internal maupun eksternal perusahaan yang mendukung keberfungsian klien dalam perusahaan khususnya, lalu memberikan bimbingan lanjut. Sebagai contoh, mengarahkan tempat penitipan anak pada pegawai yang merupakan seorang ibu dan suaminya pun bekerja. Sebagai *trainer* Pekerja Sosial industry harus mampu menyuguhkan baik pelatihan, seminar maupun workshop bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas serta performa kerja pegawai agar dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Diantaranya adalah pelatihan dan seminar mengenai *time management*, relaksasi untuk menghadapi *burn out*, seminar mengenai *positive self talk*, *problem solving*, dan pelatihan serta seminar lainnya.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Nuryana (2005) secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Di Indonesia, keberadaan sudah cukup populer. Terbukti dari telah banyaknya perusahaan yang menerapkan pendekatan CSR dan memiliki program CSR dalam perusahaannya.

Hubungan antara Pekerja Sosial Industri dengan CSR muncul karena yang terjadi pada masyarakat industry sehingga menimbulkan fenomena DEAF (Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi) yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006). Berikut ini adalah penjabarannya:

1. Dehumanisasi Industri

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Tindakan merger dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

2. Equalisasi Hak-hak Publik

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan, bukan saja dalam proses produksi, melainkan juga dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

3. Aquariumisasi Dunia Industri

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak akan mendapat dukungan public. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.

4. Feminisasi Dunia Kerja

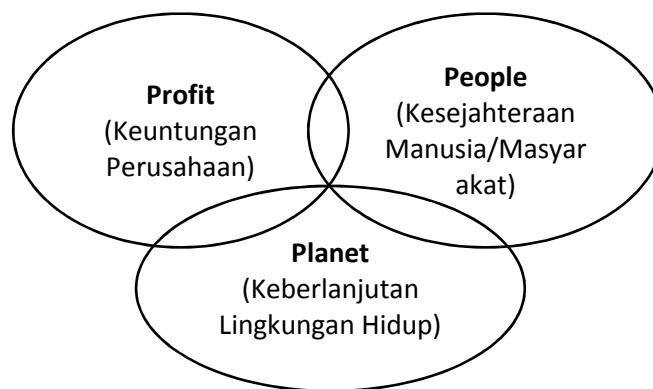
Semakin banyak wanita yang bekerja menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan juga terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

Penelitian *Public Interest Research and Advocay Center* (RIRAC) pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial. Ditambah lagi dengan keberadaan perusahaan besar di Indonesia yang sudah peduli untuk melakukan CSR, seperti PT Pertamina, Coca Cola, Unilever, Nestle, serta Indocement dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan akan pentingnya menjaga masyarakat serta lingkungan sekitar, jadi tidak hanya mencari kesuksesan ekonomi belaka, tapi juga keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan serta dalam memberdayakan masyarakat setempat sudah menjadi indikator dari keberhasilan perusahaan.

Seperti yang dikembangkan oleh Archie B. Carrol mengenai hal-hal yang membuat CSR perlu diterapkan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Konsep tersebut kemudian dinamakan konsep Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Saidi dan Abidin, 2004; Suharto, 2009:102), yang berisi sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab ekonomis. Kata kunci: *make a profit*.
- b. Tanggungjawab legal. Kata kunci: *obey the law*.
- c. Tanggungjawab etis. Kata kunci: *be ethical*.
- d. Tanggungjawab filantropis. *be a good citizen*.

Dengan tanggungjawab ekonomis sebagai bagian dasar dari piramida maka keuntungan atau profit perusahaan tetaplah menjadi hal utama karena hal tersebut merupakan modal utama suatu perusahaan dapat terus berjalan. Di bagian kedua berisi tentang kewajiban perusahaan untuk selalu taat pada hukum yang berlaku, dan menjalankan setiap program berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah tanggungjawab etis perusahaan dalam setiap langkah kerjanya. Perusahaan bukan hanya harus taat pada hukum yang berlaku, tapi juga sesuai dengan nilai, norma dan etika yang ada. Yang terakhir, ditingkat teratas terdapat tanggungjawab filantropis dari perusahaan, yakni seputar kedermawanan perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan cara menyalurkan bantuan baik melalui *community development*, *sponsorship* dan program pemberi bantuan bagi masyarakat, maupun bantuan langsung pada korban bencana. Salah satu contohnya adalah program bantuan penyediaan sumber air di daerah yang membutuhkan di Papua yang dilakukan oleh Aqua.



Triple Bottom Lines dalam *Corporate Social Responsibility* (Suharto, 2009:107)

Untuk lebih dapat memahami konsep piramida milik Archie B. Carol, adapula prinsip dasar CSR atau yang lebih dikenal dengan *Triple Bottom Lines* yang dikemukakan oleh Elkington, yang disebut 3P, seperti yang terlihat pada gambar di atas, terdiri dari *profit*, *planet* dan *people*. Ketiga hal ini pada akhirnya menimbulkan kesadaran bagi perusahaan bahwa keuntungan dan keberhasilan perusahaan tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi keuntungan ekonominya saja, namun juga keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keberlangsungan alam.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

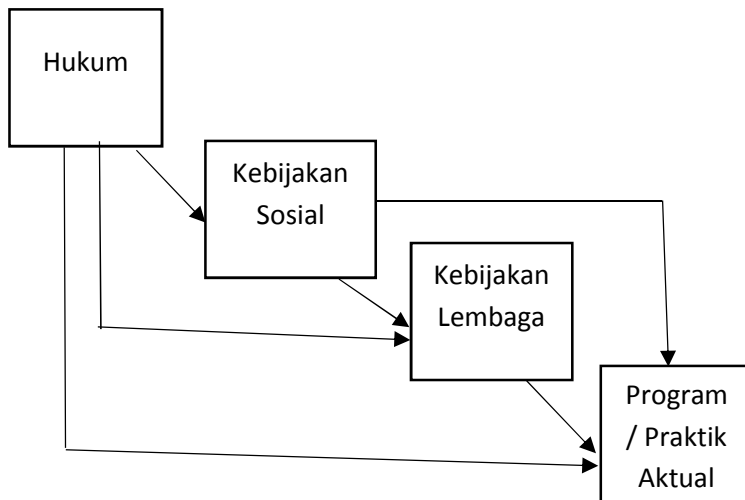
Akhir-akhir ini, isu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pekerja sudah bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pada bulan Mei tahun 2014 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja nasional mencapai 8.900 dari bulan Januari hingga bulan April 2014. Melihat tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi serta potensi akan pengaruh terhadap individu sebagai pekerja dan keluarganya, maka perhatian perusahaan akan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja merupakan hal yang perlu diutamakan. Kesehatan dan keselamatan kerja pegawai ini diberlakukan bukan hanya pada saat pekerja mengalami kecelakaan, tapi juga sebagai pencegahan agar angka kecelakaan dan ketidaksehatan pekerja dapat diminimalisir bahkan dihindari.

Kesehatan dan keselamatan kerja ini juga tidak hanya seputar individu yang bekerja dalam perusahaan, tapi juga anggota keluarga individu. Dalam praktiknya, Pekerja Sosial industry pada bagian ini harus mampu menyatukan pengetahuan seputar sosial, ekonomi, dan politik dengan keterampilan yang dimiliki seperti pelayanan langsung yang mencakup assesmen terhadap aspek psikososial, menjadi caseworker, dan juga terapi serta pelatihan bagi pekerja seputar kesehatan dan keselamatannya pada saat bekerja. Selain itu, pelayanan sosial yang diberikan Pekerja Sosial industry ini juga mencakup advokasi bagi pekerja serta keluarganya yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mendapatkan haknya.

Advokasi Sosial dan Kebijakan Sosial

Advokasi sosial termasuk ke dalam bagian CSR dalam perusahaan. Secara singkat, advokasi sosial merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan Pekerja Sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat dan juga memberikan bantuan pada klien, dengan cara membantu klien untuk mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan serta *stakeholder* terkait, serta merancang kebijakan dan program terkait kesejahteraan sosial mereka.

Berkaitan dengan advokasi sosial, pelayanan yang dapat pula dilakukan Pekerja Sosial adalah dengan cara turut andil dalam kebijakan sosial. Hasil dari kebijakan sosial yang dapat diterapkan dalam perusahaan mencakup bidang jaminan sosial, pelayanan sosial personal, perumahan, kesehatan, dan juga pendidikan. Berikut adalah proses kebijakan sosial.



Sumber: Thomson (2004:45; Suharto, 2009)

Penutup

Pekerja Sosial industry di Indonesia memiliki peran yang penting dalam memmanusiawikan dunia industri. Dengan banyaknya permasalahan dalam dunia industry di Indonesia, seperti jumlah angkatan kerja yang besar namun kualitas kerja yang relative rendah, kesehatan dan keselamatan kerja yang belum sepenuhnya diterapkan perusahaan, adanya isu gender, kebijakan yang tidak mendukung, serta hal-hal lain yang mengganggu dan menghambat kesejahteraan pekerja, membuka lapangan atau bidang garapan bagi Pekerja Sosial industry.

Hanya saja kesadaran perusahaan dan stakeholder terkait yang berada dalam duni industry belum paham betul dan sadar akan kebutuhan Pekerja Sosial industry di Indonesia. Oleh itu diperlukan lebih banyak penyebaran informasi dan juga bukti nyata dari praktik Pekerja Sosial industry.

Begitu pula dengan Pekerja Sosial industry dan lembaga terkait yang memiliki andil dalam eksistensi dari peran Pekerja Sosial industry. Perlu lebih banyak lagi sosialisasi dan penyajian data pasti mengenai Pekerja Sosial, seperti dengan mengesahkan RUU mengenai Pekerja Sosial sebagai payung hukum sehingga posisi Pekerja Sosial di Indonesia menjadi lebih diakui dan jelas bidang intervensinya, khususnya Pekerja Sosial industri.

Lulusan atau mereka yang memiliki dasar pendidikan pekerjaan sosialpun diharapkan memiliki kompetensi yang cukup, diantaranya dengan mengikuti sertifikasi pekerjaan sosial, untuk bekerja dalam sector yang menjadi garapan pekerjaan sosial dan tentunya harus diiringi dengan rasa percaya diri dan bangga atas profesi Pekerja Sosial. Karena jika bukan dimulai dari diri sendiri, siapa lagi yang akan memperkenalkan Pekerja Sosial di kancah nasional?

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Johnson, Wayne. 1984. *The Social Services: An Introduction*. Illinois: F.E. Peacock Publisher.
- Skidmore, Rex A., Milton G. Thackeray dan William O. Farley (1991). *Introduction to Social Work*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerja Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel:

- Kemensos RI. 2013. Sejarah Baru Perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia. Melalui < <http://dissos.jabarprov.go.id/> > [13/12/2014]
- Suharto, Edi. (tanpa tahun). *Pekerjaan Sosial Industri*. Melalui <[http://policy.hu/suharto/modul a/makindo 26.htm](http://policy.hu/suharto/modul_a/makindo_26.htm)> [13/12/2014]

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

Oleh:

Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar

Email:

(oktavianindya@yahoo.com; rsdarwis@gmail.com; giginkb@mail.unpad.ac.id)

ABSTRAK

perempuan dalam kelompok perempuan kepala keluarga diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Perempuan harus mempunyai kemampuan untuk melihat potensi yang ada, peluang-peluang yang mungkin dapat dikembangkan, sehingga dengan mudah peluang tersebut untuk diperluas menjadi jaringan yang lebih kuat. Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Perempuan yang berstatus kepala keluarga dimana ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya. Besarnya peran perempuan merupakan pendekatan praktis yang dapat dilakukan seperti disaat kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan memainkan perannya sebagai penyangga ekonomi keluarga. Sejumlah aktivitas dapat digambarkan terkait cara program perempuan kepala keluarga dalam memotivasi mengembangkan potensi, membangkitkan kesediaan, peningkatan keterampilan anggota, membangkitkan rasa percaya diri, menghilangkan hambatan, penguatan kelompok, pemberian bimbingan dan dukungan, serta pengembangan jaringan dan pemeliharaan kemampuan anggota. Kemudian kegiatan pemberdayaan perempuan ini dinilai bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, peran perempuan, kepala keluarga

PENDAHULUAN

Di era modernisasi, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Banyak hal yang melatarbelakangi perempuan turut menopang perekonomian keluarga. Pertama, perempuan yang ditinggal cerai atau mati oleh suaminya (janda). Mereka harus bekerja keras mencari nafkah menggantikan peran suami agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang mempunyai anak. Kedua, perempuan

yang masih bersuami tetapi pendapatan suami dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau suaminya tidak dapat bekerja karena sakit atau cacat. Ketiga, perempuan yang hidup sendiri dan harus menggantikan peran orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi bekerja. Kondisi-kondisi demikian yang menuntut perempuan harus mampu menopang perekonomian keluarga.

Dalam kondisi tersebut, perempuan harus mempunyai kemampuan untuk melihat potensi yang ada, peluang-peluang yang mungkin dapat dikembangkan, sehingga dengan mudah peluang tersebut untuk diperluas menjadi jaringan yang lebih kuat. Besarnya peran perempuan merupakan pendekatan praktis yang dapat dilakukan seperti disaat kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan memainkan perannya sebagai penyangga ekonomi keluarga. Bahkan beberapa usaha ekonomi perempuan yang awalnya merupakan usaha sampingan, kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Adanya peran perempuan yang ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga inilah yang menjadi menarik. Peran perempuan pada umumnya yaitu hanya melakukan pekerjaan domestic saja, seperti mengurus suami dan anak, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tetapi disisi lain perempuan dengan kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya harus mampu bekerja tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus ditumbuhkan rasa kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut dapat dijadikan bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga guna membantu perekonomian keluarga, sehingga perempuan tidak perlu bekerja di sector formal atau mencari pekerjaan di luar, cukup dengan menggali potensi dan memanfaatkan sumber yang ada. Dengan demikian, perempuan dapat menjadikan potensi dan sumber yang ada sebagai peluang untuk menghasilkan pendapatan keluarga guna membantu perekonomian keluarga.

Namun tak jarang perempuan menemukan kesulitan dalam membantu perekonomian keluarga. Perempuan masih banyak yang merasa kurang percaya diri dan belum sadar akan potensi yang ia miliki. Ditambah lagi dengan tidak dibekali pengetahuan, keterampilan, dan modal membuat perempuan tidak dapat menjalankan peran untuk ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga. Disisi lain, ruang gerak perempuan pun semakin sempit sebab struktur sosial yang masih menempatkan kaum perempuan dibawah kaum laki-laki hal tersebut yang membuat kaum perempuan menjadi semakin sulit untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Jika perempuan diberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dibantu dengan pemberian modal, mereka dapat menciptakan peluang usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan baru bagi mereka. Keberadaan perempuan saat ini jarang diperhatikan, padahal dengan waktu luang yang mereka miliki dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan tersebut dapat menggali potensi yang mereka miliki untuk dijadikan suatu bentuk keterampilan yang dapat dijadikan peluang menciptakan produk usaha yang memiliki nilai jual guna meningkatkan perekonomian keluarga. Perempuan memiliki kegigihan, keuletan, dan kesabaran di dalam diri yang mereka tidak sadari.

Selain itu tak jarang perempuan yang belum menyadari potensi yang ia miliki, seperti ada perempuan yang dapat membuat kue tetapi mereka hanya membuat kue untuk keluarganya saja. Padahal jika ia sadari itu dapat dijadikan peluang usaha, maka ia akan menghasilkan pendapatan dari potensi yang ia miliki. Tetapi pada kenyataannya mereka hanya menjadikan potensi tersebut sekedar kebiasaan sehari-hari. Padahal jika kebiasaan tersebut disadari dan dikembangkan akan dapat menghasilkan pendapatan karena saat ini banyak bisnis dari hasil olah makanan yang berhasil dijual di pasaran dan dapat dijadikan sumber pendapatan. Dari hal tersebut perempuan harus disadarkan akan potensi yang dimiliki agar dari potensi yang ia miliki tersebut dapat menghasilkan kegiatan ekonomi produktif. Karena pada dasarnya banyak potensi yang dimiliki perempuan yang perlu digali agar potensi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupannya apalagi jika dibarengi dengan kegigihan, keuletan, dan kesabaran yang dimiliki perempuan, maka usaha yang ditekuni akan lebih berkembang lagi.

Melihat hal tersebut, banyak program yang mendukung perempuan untuk mengembangkan potensinya yaitu melalui program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya peningkatan kemampuan, keterampilan, dan sikap agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mencukupi kebutuhan hidup secara layak.

Program pemberdayaan perempuan yang fokus dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan potensi perempuan untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membantu perekonomian keluarga yaitu dengan program Perempuan Kepala Keluarga. Perempuan kepala keluarga adalah suatu program pemberdayaan perempuan yang diturunkan dan diluncurkan pada tahun 2009 oleh BKBPIA bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka ikut menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Program ini mendorong perempuan yang ingin ikut serta dalam menopang kebutuhan keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Program ini menekankan pada upaya pengkondisian penumbuhan minat dan motivasi usaha tenaga terampil bagi anggota keluarga melalui proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan kelompok.

PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

Pemberdayaan perempuan pertama harus dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, mendekatkan dengan sumber-sumber. Selain itu meminimalisir ancaman-ancaman yang datang dari luar dan melakukan pembinaan secara terus menerus sampai kelompok tersebut mandiri. Pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik karena di dalam prosesnya dapat terlihat dari aspek-aspek yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan. Adapun aspek pemberdayaan tersebut yang dapat disingkat menjadi 5P Yaitu, adanya pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Pemberdayaan menurut Ife memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Adapula menurut Shardlow pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Program Perempuan Kepala Keluarga adalah suatu program pemberdayaan perempuan yang diturunkan dan diluncurkan pada tahun 2009 oleh BKBPIA bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka ikut menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Program ini mendorong perempuan yang ingin ikut serta dalam menopang kebutuhan keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Program ini awalnya mengadopsi dari *widows project* atau proyek untuk janda yang bermaksud untuk mengubah *stereotype* negative masyarakat terhadap janda. Artinya dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan perempuan malang yang tidak berdaya dan tidak berguna, tetapi mereka dapat diberdayakan agar tetap bertahan dan membantu perekonomian keluarga. Dengan munculnya perempuan atau ibu rumah tangga yang ingin turut membantu suami dalam perekonomian keluarga, saat ini perempuan kepala keluarga membuka program untuk perempuan miskin. Sasaran dari program ini antara lain perempuan yang berstatus mengambang karena suami pergi merantau, perempuan yang suaminya bekerja tetapi dirasa belum mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, perempuan hamil dan mempunyai anak setelah ditinggal oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, lajang yang belum menikah yang menanggung beban keluarga dan para istri yang suaminya cacat, pension, atau sakit permanen.

Sebenarnya, perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dan perempuan yang demikian juga belum mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Bahkan, di dalam undang-undang pun juga belum mengakui keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga.

Beberapa perempuan memiliki peran ganda, yaitu sebagai seorang pekerja (pemimpin) dan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga.

Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik.

Perempuan yang berstatus kepala keluarga dimana ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.

Perempuan sangat penting dalam keluarga, yang mengatur dan membuat rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan tentram untuk anggota

keluarganya. Untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan seorang sosok perempuan yang dapat menjaga anak-anak.

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, suami merantau, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia.

Tidak mudah jika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga. Selain mempunyai beban dan tanggungan yang berat untuk keluarganya, ia juga harus mengurus keluarga secara total. Ia memikul beban ganda dalam rumah tangga, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah.

Peran perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak dapat di pisahkan dari kehidupan keluarganya. Menurut Mutawali (1987) keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang merupakan inti dan sendi-sendi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat itu. apabila keluarga-keluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera pula. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebagai kepala rumah tangga, seorang perempuan juga bertanggung jawab untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera. dalam hal ini perempuan yang berstatus janda harus mampu menghidupi kebutuhan anak-anaknya demi kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya yang ada dalam keluarga. Begitu pula dengan perempuan yang masih memiliki suami yang ingin membantu suaminya dalam meningkatkan perekonomian keluarga tidak lepas dari keinginan untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat saling membantu sehingga menciptakan kesejahteraan keluarga.

Perempuan sebagai pelaksana urusan rumahtangga menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan atau mengerjakan usaha ekonomi, di lain pihak perempuan juga berupaya sebagai pencari nafkah dalam keluarga disaat pasangan hidupnya tiada, berpisah atau mengalami sakit berkepanjangan. Perempuan juga mengalami diskriminasi ketika ia bekerja pada pabrik/perusahaan atau pertanian dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama sehingga menyebabkan upah yang diterimanya kecil (tersubordinasi) dan tidak mencukupi pemenuhan kehidupan bagi diri dan keluarganya. Kondisi tersebut semakin meningkat ketika kondisi perempuan berada dalam keadaan miskin. Ia harus mencari nafkah tambahan sementara suaminya menganggur karena PHK atau tidak mempunyai pekerjaan. Dalam hal ini program perempuan kepala keluarga membuka wadah untuk perempuan kepala keluarga untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara menciptakan usaha sendiri dari potensi yang dimiliki untuk menghasilkan ekonomi produktif, sehingga ada wadah tersendiri bagi para perempuan kepala keluarga untuk berkreasi dan memproduksi di sector informal tanpa adanya keenjangan yang dialami seperti contoh diskriminasi di atas.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan menjadi kepala keluarga yaitu karena perceraian, perempuan yang

hamil dan mempunyai anak setelah di tinggalkan oleh laki-laki, dan karena suami meninggal dunia. Perempuan kepala keluarga juga memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang mengharuskan perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Perempuan yang berstatus kepala keluarga juga harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya. Oleh karena itu dibutuhkan pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan proses pembelajaran akan menimbulkan proses yang semakin lama semakin kuat dan dapat menyebarkan kepada individu lainnya. Sehingga dalam pemberdayaan ini dapat mempengaruhi banyak orang dan keberlanjutannya akan terlihat. Seperti halnya program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang ingin mendorong perempuan yang ingin ikut serta dalam menopangkebutuhan keluarga dalam meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga, mengubah pribadi individu dalam kelompok sehingga individu yang tergabung dalam kelompok lemah tersebut yaitu perempuan kepala keluarga dapat keluar dari masalah dan dapat menunjukkan perubahan yang berarti.

Daftar rujukan

Sumber Buku:

- Risyanti Riza, H. Roesmidi, (2006). "Pemberdayaan Masyarakat". Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR.
- Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*: Widya Padjadjaran, Bandung.

Sumber lain:

- Sugeng Haryanto (2008). "Peran Akif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus pada Wanita Pemecah Batu di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.9, No.2, hal.216-227.
- Epon Ningrum (2008). "Pewirausahaan Wanita dan Perannya dalam Ekonomi Keluarga".
- Suryani (2008). "Kewirausahaan Wanita dalam Pembangunan Ekonomi di Keluarga".
- <http://www.wawasanews.com/2012/12/ketika-perempuan-jadi-kepala-keluarga/>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 20.13

KEBERFUNGSIAN SOSIAL BURUH PEREMPUAN PADA SEKTOR INDUSTRI DALAM KELUARGA

Oleh:

Dessy Fitri Pratiwi, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis

Oleh;

(dessyfitri.pratiwi@gmail.com; hrachim@yahoo.co.id; rsdarwis@gmail.com)

ABSTRAK

Partisipasi buruh perempuan dalam sektor industri telah menggeser komitmen sebagai ibu rumah tangga. Keterlibatan buruh perempuan di sektor industri tidak sedikitnya karena masalah ekonomi. Dalam hal ini buruh perempuan dihadapkan dengan dua tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah yang menuntut kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara bersamaan. Adapun dilematis peran ganda yang buruh perempuan rasakan adalah perasaan bersalah kerap muncul manakala buruh perempuan dihadapkan pada situasi yang mengharuskan keberadaannya di tengah keluarga. Jam kerja yang panjang dan tidak teratur membuat buruh perempuan sulit mengatur tugas sebagai ibu rumah tangga. Karena sebagian besar waktu buruh perempuan adalah di tempat kerja untuk mengejar target produksi. Dilematis yang dirasakan buruh perempuan akan menimbulkan konflik-konflik yang cukup pelik dalam diri buruh perempuan maupun dalam keluarga. Tak jarang buruh perempuan mengalami emosi tidak stabil, stress, mudah marah, sering kelelahan dan gangguan kesehatan. Selain itu, tak jarang menimbulkan perselisihan dengan anggota keluarga, hilangnya komunikasi, serta disfungsi-fungsionalitas dalam keluarga. Akibatnya keberfungsian sosial buruh perempuan dalam keluarga tidak dapat dilakukan secara efektif, sehingga akan menimbulkan permasalahan yang dapat mengurangi kualitas hidup buruh perempuan. Dalam hal ini pekerja sosial berperan untuk membantu buruh perempuan untuk dapat meningkatkan kemampuan buruh perempuan dalam menjalankan perannya, pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperbaiki relasi buruh perempuan dengan anggota keluarganya, serta mampu mengatasi masalahnya dalam keluarga dengan cara memperbaiki komunikasi di antara anggota keluarga. Selain itu, kebijakan dari pemerintah maupun perusahaan mengenai jam kerja perlu dikaji kembali, khususnya untuk perempuan.

Kata kunci : faktor ekonomi, peran ganda, konflik, jam kerja, keberfungsian sosial.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat memicu seseorang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Tentu hal ini juga dilakukan oleh buruh perempuan di Indonesia yang berpartisipasi dalam sektor industri. Adapun data perempuan yang bekerja dalam sektor industri di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat 2010

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan
Pertanian / <i>Agriculture</i>	68,92	31,08
Industri / <i>Manufactory</i>	61,36	38,64
Perdagangan / <i>Trade</i>	60,24	39,76
Jasa-jasa / <i>Services</i>	60,88	39,12
Lainnya/ <i>Other</i>	92,63	7,37
Jumlah	67,80	32,20

Sumber : Sakernas BPS Provinsi Jawa Barat

(http://jabar.bps.go.id/publikasi_BPS/2013/inkesra2012/files/search/searchtext.xml diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 07.05 WIB)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa buruh perempuan di sektor industri 38,64% lebih rendah daripada jumlah buruh laki-laki di sektor industri 61,36%.

Keterlibatan buruh perempuan di sektor industri tidak sedikitnya karena dorongan faktor kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan buruh perempuan rata-rata adalah perempuan golongan menengah ke bawah yang masih memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah. Adapun penyebab rendahnya pendidikan adalah karena masyarakat miskin terbatas dalam mengakses layanan pendidikan karena tingginya beban biaya pendidikan (<http://jito-um.blogspot.com/2009/05/permasalahan-kemiskinan.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2014 pukul 17.15 WIB). Selain itu, adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dimana adanya perbedaan dalam hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam mengecap pendidikan formal (Suleman, 1995). Adapun data tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 2010

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Tamat Perguruan Tinggi	19.483	16.879
Tamat SLTA	87.302	69.876
Tamat SLTP	87.205	84.082
Tamat SD	185.045	205.358
Tidak/Belum Tamat SD	13.527	17.677

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, (<http://www.benangmerah.net/place/idn/jawa-barat/kabupaten-sumedang#dataukpgoiddatasetjumlah-penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-per-kabupaten.com> diakses pada tanggal 6 November 2014 pukul 16.10 WIB)

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibanding tingkat pendidikan laki-laki. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya perempuan yang tidak/belum tamat SD sebanyak 17.677 orang sedangkan jumlah laki-laki yang tidak/belum tamat SD sebanyak 13.527 orang.

Bagi perempuan yang sudah bekerja akan dihadapkan dengan dua tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Kedua peran yang harus dimainkan oleh buruh perempuan membawa konsekuensi kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan secara bersamaan dan keduanya menuntut untuk dapat dilakukan secara optimal. Hal ini akan membawa dampak yang cukup dilematis pada buruh perempuan untuk dapat memfungsikan perannya sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, sehingga akan menimbulkan konflik yang cukup pelik dalam diri buruh perempuan untuk dapat mengoptimalisasikan perannya tersebut (Ella, 2003:286).

Bentuk konflik yang dialami buruh perempuan biasanya terkait mengenai pekerjaan dan keluarga. Konflik pekerjaan terhadap keluarga terjadi saat pengalaman bekerja mempengaruhi kehidupan keluarga. Contohnya tekanan dalam lingkungan kerja, seperti jam kerja yang panjang dan tidak fleksibel, perjalanan yang jauh, beban kerja yang berlebihan, stress kerja, organisasi atau atasan yang tidak mendukung. Konflik keluarga terhadap pekerjaan terjadi saat pengalaman dalam keluarga mempengaruhi kehidupan kerja, seperti tekanan dalam keluarga, seperti hadirnya anak masih kecil, konflik diantara anggota keluarga, dan kurangnya dukungan dari keluarga.

Adapun konflik lain dalam diri buruh perempuan adalah perasaan bersalah yang kerap muncul manakala dihadapkan pada situasi yang mengharuskan keberadaannya di tengah keluarga pada saat dibutuhkan dengan kewajibannya pada pekerjaannya. Menurut Meyrs (1993) dalam Ella (2003:286-287) bahwa apabila seseorang dihadapkan pada dua tuntutan harapan sesuai dengan perannya yang berbeda dan harus ditampilkan dalam waktu yang bersamaan, maka orang tersebut mengalami konflik. Konflik peran ganda yang dialami buruh perempuan adalah dia merasakan ketegangan ketika tidak mampu memenuhi tuntutan antara rumah tangga dan pekerjaannya.

Seseorang yang hidup tak lepas dari peran yang harus dijalani dalam perkembangan kehidupannya, demikian halnya juga dengan buruh perempuan. Dia memiliki peranan dalam keluarga, sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Adapun peran istri dalam keluarga adalah sebagai pendamping suami, pendorong dan pembangkit suami, dan penerus keturunan. Sedangkan Ibu berperan merawat, mendidik dan membimbing putera puterinya menuju kedewasaan, memberikan peneladanan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sebagai teman bermain dan berbicara dari putera puterinya, mengatur dan mengurus rumah tangga, mengamati tingkah laku putera puterinya (Direktorat Keluarga, Jenderal Pemberdayaan Sosial, 2003:25).

Adapun persoalan yang kerap kali dihadapi oleh buruh perempuan adalah jam kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa jam kerja buruh perempuan terbilang panjang dan tidak teratur, mulai pada pagi hari hingga sore hari atau tergantung

pada keadaan jadwal masing-masing buruh. Hal ini diperkuat dengan pendapat Jumisih, selaku Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik bahwa dia bekerja sebagai buruh selama 9 sampai 10 jam setiap harinya (<http://m.rnw.nl/bahasa-Indonesia/node/137853> diakses pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 19.30 WIB). Padahal dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, jam kerja orang dewasa yang sesuai di Indonesia adalah 40 jam perminggu. Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu sehingga terhitung 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja 5 hari dalam seminggu kewajiban bekerja mereka adalah 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu.

Menurut Mulyanto dalam Sumarsono (2009) tingkat pencurahan jam kerja adalah presentase banyaknya jam kerja yang dicurahkan terhadap jumlah jam kerja yang tersedia. Jam kerja dan pendapatan merupakan variabel yang sulit untuk dipisahkan. Pendapatan/upah diperoleh seseorang dari suatu pekerjaan melalui pencurahan jam kerja untuk bekerja yang menghasilkan barang dan jasa. Hal itulah yang membuat buruh perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja karena mengejar target produksi perusahaan, di mana target produksi mempengaruhi besar kecilnya upah yang didapat.

Dalam studi kasus buruh perempuan di KBN Cakung yang banyak menitipkan anaknya kepada orang lain sebelum memulai bekerja. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mengizinkan karyawannya untuk membawa anak serta dikhawatirkan mengganggu konsentrasi dan kinerja mereka. Adapun data hasil penelitian dari Lembaga Analisis kebijakan dan Advokasi Perburuhan bahwa seribu buruh perempuan yang diteliti, semuanya telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak. Sebanyak seribu anak dari buruh perempuan, 970 anak diantaranya dititipkan di kampung halaman untuk diasuh sanak keluarga. Sedangkan 30 orang anak buruh perempuan yang berusia bayi, pengasuhannya dititipkan kepada warga setempat atau tetangganya (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51ca80df50bad/anak-anak-pekerja-butuh-perhatian> diakses pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 20.00 WIB).

Salah satu contoh yang menunjukkan indikasi akan terganggunya keberfungsian sosial buruh perempuan adalah adanya pengaruh perubahan peran yang dialami buruh perempuan terhadap keharmonisan keluarga. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan isteri yang bekerja dengan tingkat harmonisasi keluarga, terjadi melalui tingkat pendapatan isteri. Dalam arti bahwa jika isteri yang bekerja tersebut pendapatannya dapat untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, maka disfungsional bagi urusan-urusan kerumahtanggaan, ketergantungan ekonomis kepada suaminya menjadi rendah, sikap kemandirian isteri menjadi tinggi, sehingga tingkat harmonisasi keluarga dapat menjadi goyah, meskipun seluruh kebutuhan ekonomi keluarga relatif dapat tercukupi. (Nurhadi, Muflich. 2009:52).

Hasil penelitian Muflich Nurhadi menunjukkan bahwa 36,6% suami menyatakan isteri sebenarnya lebih pas untuk mengurus urusan-urusan rumah tangga dan 26,66 % suami menyatakan bahwa sebaiknya seorang istri memang tidak usah mencari nafkah, tetapi mendidik dan mengurus anak-anak di rumah.

Selain itu, presentase yang kurang lebih sama 23,33 % suami merasa bahwa isterinya kadang-kadang dan sering bersikap kurang menyenangkan suami, dan sikap kurang menyenangkan tersebut menurut suami dikarenakan isterinya merasa juga bekerja atau dapat menghasilkan uang. (Nurhadi, Muflich. 2009. *Perubahan Peran Ibu Rumah Tangga Pengaruhnya Terhadap Harmonisasi Keluarga*)

Adapun unsur-unsur keberfungsian sosial menurut Skidmore (1994) dalam Edi Suharto (2005:28) adalah kemampuan dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta mengatasi masalah. Akibat keberfungsian sosial dalam keluarga tidak bisa diciptakan maka akan menimbulkan permasalahan yang dapat mengurangi kualitas hidup seseorang, baik dalam berperan, mengatasi masalah maupun dalam pemenuhan kebutuhan.

Disharmoni Keluarga

Di dalam suatu keluarga pasti memiliki permasalahan-permasalahan yang menyangkut anggota keluarga. Ada kalanya suatu keluarga terjadi disharmoni keluarga. Faktor-faktor penyebab disharmoni keluarga seperti yang diungkapkan oleh Strong, DeVault, dan Cohen (2011) antara lain lingkungan keluarga itu sendiri, konflik suami-isteri, kecemburuan dan pengaruh pekerjaan terhadap keluarga.

Dalam kaitannya dengan buruh perempuan, tak jarang mereka juga mengalami disharmoni keluarga. Disharmoni keluarga dipicu karena faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui, saat ini tuntutan hidup semakin berat, sehingga sudah banyak perempuan yang memiliki peran ganda sebagai seorang isteri/ibu sekaligus pencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga.

Akibatnya timbullah disfungsi sosial dalam keluarga, yaitu suatu kondisi ketidakmampuan anggota keluarga untuk menjalankan peran-peran dan status-status sosialnya dalam keluarga. Disfungsi keluarga merupakan masalah yang disebabkan oleh keberadaan orang-orang dewasa/orang tua yang tidak sehat jiwanya dalam keluarga, gagal menjalankan fungsi pemeliharaan, perlindungan, dan pembimbing bagi anak-anaknya. Adapun salah satu ciri keluarga yang disfungsi menurut Hawari (dalam Yusuf, 2004) adalah orang tua sibuk dan jarang berada di rumah (*parent's absence*)

Faktor Pendorong Bekerjanya Buruh Perempuan

Pembangunan saat ini telah memberikan perubahan dalam bidang ekonomi. Perubahan ekonomi telah membuka gerbang setiap orang untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan didukung pendidikan yang baik, dan kesempatan kerja lebih terbuka, sehingga perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dan ingin membuktikan bahwa perempuan juga mampu membantu mencari nafkah. Dari wanita yang bekerja 85% mengajukan kebutuhan ekonomi sebagai motivasi dasar untuk bekerja (Utami Munandar, 1967:54)

Adapun alasan mengapa perempuan mengalokasikan waktunya untuk bekerja (Mardikanto, 1990:75), yaitu :

1. Untuk menambah pendapatan keluarga (*family income*), terutama jika pendapatan suami atau keluarga relative kecil.
2. Memiliki berbagai keunggulan (pendidikan, keterampilan, model relasi, dan lain-lain), sehingga merasa lebih efisien untuk meniti karir dibanding jika hanya melakukan pekerjaan rumah tangga.
3. Untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia mampu berprestasi di tengah kehidupan keluarga dan masyarakatnya.
4. Untuk memperoleh status atau kekuasaan lebih besar di dalam kehidupan rumah tangganya.

Dilihat dari perspektif konsep diri dasar Staines (1954) dalam Burns (1993:81), yaitu persepsi individu mengenai kemampuan-kemampuannya, status-statusnya, dan peran-perannya di dunia luar bahwa faktor ekonomi yang melatarbelakangi buruh perempuan bekerja lebih didorong oleh keyakinan perempuan yang bekerja merasa mampu menjalankan perannya di luar rumah sebagai pencari nafkah. Walaupun peran sebagai istri dan ibu tidak “membanggakan”, tetapi peran sebagai pencari nafkah juga memiliki pengaruh terhadap keluarganya, yaitu meningkatkan perekonomian keluarga. Mereka ingin dianggap sebagai orang yang berpengaruh dan membawa dampak yang besar untuk keluarga.

Konflik-Konflik yang Dihadapi Buruh Perempuan

Menurut Meyers (1993) dalam Ella (2003:286-287) bahwa apabila seseorang dihadapkan pada dua tuntutan harapan sesuai dengan perannya yang berbeda dan harus ditampilkan dalam waktu yang bersamaan, maka orang tersebut mengalami konflik. Seseorang perempuan bekerja mengalami konflik peran ganda jika dia merasakan ketegangan dalam memenuhi tuntutan antara rumah tangga dan pekerjaan, semakin mengkonsentrasikan diri pada pekerjaan, maka akan semakin sulit untuk memenuhi tuntutan yang datang dari keluarganya.

Konflik yang dihadapi buruh perempuan adalah jam kerja yang panjang dan tidak teratur. Hal tersebut membuat buruh perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, sehingga suami dan anak kurang mendapatkan kasih sayang, tumbuh kembang anak tak terpantau, suami kurang mendapatkan motivasi, bahkan kebutuhan mereka sulit dipenuhi.

Menurut Sri Kuntari Ludiro (1980) yang dikutip oleh Utami Munandar (1985:57) mengungkapkan bahwa selain waktu menjadi kendala menjalankan peran dalam keluarga, buruh perempuan juga merasakan kesulitan-kesulitan lain, seperti mereka merasa tidak tenang ketika meninggalkan anak mereka sedang sakit atau usia anak masih dini sehingga mempengaruhi konsentrasi dan kualitas kinerja mereka, kekhawatiran yang timbul kepada orang yang mereka percayai untuk mengasuh dan menitipkan anak pergi meninggalkan mereka, serta keterbatasan kondisi fisik yang melemah akibat terkuras saat bekerja dan ketika sampai di rumah harus menjalankan peran sebagai istri maupun ibu.

Dampak Negatif Buruh Perempuan Bekerja

Kegiatan buruh perempuan di luar rumah akan berdampak negatif pada diri buruh perempuan maupun keluarga. Buruh perempuan dan wanita bekerja lainnya tentu mengalami dampak psikologis pada diri mereka seperti emosi tidak stabil, stress, mudah marah, sering kelelahan dan gangguan kesehatan (Hidayati & Alteza, 2009:8). Dalam keluarga, apabila anggotanya tidak mampu menjalankan fungsinya yang sesuai dengan peran sosialnya, akan terjadi disorganisasi keluarga, yakni hilangnya komunikasi antar anggota keluarga yang oleh Goode dinamakan *empty shell family* (dalam Gerungan, 1991:43).

Hasil penelitian Hidayati & Alteza (2009:8) menunjukkan dampak yang ditimbulkan pada keluarga antara lain anak kesulitan dalam belajar, emosi yang kurang terkontrol, sering terjadi konflik dengan anggota keluarga mengenai cara mendidik anak, anak menjadi manja, keterbatasan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak, interaksi yang terjadi dengan suami relatif terbatas dan ini sering berujung pada kesalahpahaman, anak lebih dekat dengan pengasuh, dan gangguan bicara pada anak

Salah satu dampak komunikasi antar anggota keluarga yang tidak efektif menyebabkan kerawanan akan perselisihan di antara anggota keluarga. Penyediaan waktu sangat penting dalam proses komunikasi antar anggota keluarga dan penanaman nilai-nilai kebaikan kepada anggota keluarga melalui sosialisasi.

Definisi Keluarga

Burgess dkk (1963) dalam Zaidin Ali (2006:5) menyebutkan bahwa (1) keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan ikatan adopsi, (2) para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga atau jika hidup terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka, (3) anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dalam peran sosial. Keluarga seperti suami dan isteri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara dan saudari, (4) keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.

Kedudukan Buruh Perempuan dalam Keluarga

Kedudukan buruh perempuan memiliki kedudukan yang sangat krusial di dalam keluarga karena buruh perempuan berperan sebagai isteri dan sebagai ibu. Kedua peran tersebut adalah kunci dari kesuksesan di dalam keluarga. Apabila tidak ada kedua peran tersebut dalam keluarga, sistem dalam keluarga akan rusak.

a) Peran sebagai ibu

Begner dalam Sofia Retnowaty Noor (2008) membagi peran ibu menjadi tujuh peran penting, sebagai berikut adalah :

- 1) Membina keluarga sejahtera sebagai wahana penanaman nilai agama, etik dan moral serta nilai-nilai luhur bangsa, sehingga memiliki integritas kepribadian dan etos kemandirian yang tangguh;

- 2) Memenuhi kebutuhan anak (perhatian/atensi, kasih sayang, penerimaan/*acceptance*, perawatan/*care*, dan lain-lain);
- 3) Bersikap bijaksana dengan menciptakan dan memelihara kebahagiaan. Kedamaian dan kesejahteraan yang berkualitas dalam keluarga serta pemahaman atas potensi dan keterbatasan anak;
- 4) Melaksanakan peran pendamping terhadap anak, baik dalam belajar, bermain dan bergaul, serta menegakkan disiplin dalam rumah, membina kepatuhan dan ketaatan pada aturan keluarga;
- 5) Mencerahkan kasih sayang namun tidak memanjakan, melaksanakan kondisi yang ketat dan tegas namun tidak percaya atau mengekang anggota keluarga;
- 6) Berperan sebagai kawan terhadap anak-anaknya, sehingga dapat membantu mencari jalan keluar dari kesulitan yang dialami anak-anaknya;
- 7) Memotivasi anak dan mendorong untuk meraih prestasi setinggi-tingginya.

b) Peran sebagai isteri

Perempuan yang bekerja mengundang polemik tersendiri di dalam keluarga, terutama dari sisi suami. Masih banyak suami yang tidak mengizinkan perempuan untuk bekerja karena takut suami tidak diurus, urusan rumah terbengkalai, takut karir suami tersaingi, bahkan takut sang istri tidak puas dengan penghasilan suami (Achir, 1985:58)

Fungsi Keluarga

Akibat dari kendala-kendala yang dialami buruh perempuan juga mempengaruhi fungsi dari keluarga buruh perempuan itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi keluarga menurut Horton dan Hunt (1984:274-279), yaitu :

- 1) Fungsi Pengaturan Seksual, yaitu keluarga berfungsi untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual.
- 2) Fungsi Reproduksi, yaitu keluarga berfungsi sebagai cara memperoleh keturunan.
- 3) Fungsi Sosialisasi, yaitu keluarga berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk kepribadian anak. Selain itu keluarga juga sebagai model bagi anak dalam bersikap dan bertindak.
- 4) Fungsi Afeksi, yaitu keluarga berfungsi untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anggota keluarga.
- 5) Fungsi Penentuan Status, yaitu keluarga berfungsi sebagai dasar untuk memberi beberapa status sosial kepada anggota keluarga.
- 6) Fungsi Perlindungan, yaitu keluarga berfungsi memberikan perlindungan secara fisik, psikis dan sosial kepada anggota keluarga.
- 7) Fungsi Ekonomi, yaitu keluarga berfungsi memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari anggota keluarga.

Fungsi pengaturan seksual dan fungsi reproduksi adalah mengatur dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual serta mendapatkan keturunan. Pada

buruh perempuan tentu mengalami kesulitan pada fungsi ini ketika tidak bisa melayani suami dengan baik, bahkan terlalu lelah untuk melakukan fungsi ini karena seharian bekerja. Fungsi sosialisasi ini salah satunya adalah membimbing dan mendidik anak serta mengenalkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di keluarga maupun di masyarakat. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh perempuan bekerja yang hampir tidak ada waktu menjalankan peran dan fungsi dari seorang ibu, dapat membahayakan si anak. Si anak akan cenderung melakukan hal-hal negatif. Selain itu, fungsi perlindungan yang harusnya diberikan kepada anggota keluarganya, berupa mental dan moral. Hal ini dapat membentuk kepribadian yang kuat pada anak maupun suami. Fungsi afeksi berhubungan dengan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan dan persamaan pandangan nilai-nilai. Apabila fungsi ini mengalami masalah, tentu akan terjadi perselisihan di antara suami-istri. Perselisihan yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan pribadi anak. Suami-istri yang sibuk berselisih hingga urusan anak terbengkalai. Fungsi penentuan status berhubungan dengan menjalankan peran sesuai status sosial kepada anggota keluarga. Dalam hal ini, buruh perempuan juga mengalami kesulitan melaksanakan peranannya sebagai isteri maupun ibu. Fungsi yang terakhir adalah fungsi ekonomi yang berhubungan pemenuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Fungsi ini identik dilakukan oleh seorang suami yang berperan sebagai pencari nafkah. Namun, yang dialami buruh perempuan justru kebalikannya. Mereka berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga fungsi ini tentu dapat dilakukan.

Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial (*social functioning*) adalah suatu konsep kunci untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep yang penting bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan manusia (*The Human Service Profession*) yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya sehingga dapat menjalankan keberfungsian sosial dengan baik. Budhi Wibhawa dkk dalam buku *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial* (2010:21) mengatakan bahwa konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga, atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Selain itu, keberfungsian sosial juga melibatkan sistem sosial yang terkandung dalam kehidupan masyarakat karena kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat adalah wujud lain dari sistem sosial yang menjadi pendukung dalam interaksi sosial.

Keberfungsian sosial itu sendiri menurut Skidmore dalam Edi Suharto (2005:28) adalah :

“keberfungsian sosial adalah sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (badan/lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan

peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shock and stresses*)”.

Berdasarkan dampak yang dialami buruh perempuan dalam keluarga tentu dapat mempengaruhi keberfungsian sosial buruh perempuan itu sendiri. Keberfungsian sosial pada buruh perempuan dianggap tidak baik karena terbatas oleh jenis pekerjaan sebagai buruh sektor industri yang tak lepas dari jam kerja yang padat dan tidak teratur. Tentu hal ini akan mempengaruhi bagaimana buruh perempuan berperan dalam keluarga baik sebagai seorang isteri maupun seorang ibu. Di samping itu, ketika buruh perempuan bekerja, kebutuhan dasar anggota keluarga akan terabaikan, mulai kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan sebagainya. Dalam hal mengatasi masalah, buruh perempuan juga kurang waktu untuk berkumpul dan berdiskusi dengan anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah yang ada. Komunikasi yang kurang terjalin dengan anggota keluarga menimbulkan ketidakterbukaan buruh perempuan dengan anggota keluarga.

Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerja sosial dalam menyelesaikan masalah keberfungsian sosial yang dialami buruh perempuan dalam keluarga adalah social casework. Hal ini karena yang dijadikan klien adalah buruh perempuan. Social casework menurut Perlman (1967) dalam Betty J. Piccard (1983:51) sebagai berikut :

“Social casework is a process used by certain human welfare agencies to help individuals to cope more effectively with their problems in social functioning....”

Dalam menangani permasalahan keberfungsian sosial pada buruh perempuan dalam keluarga, pekerja sosial memiliki peran sebagai enabler. Enabler menurut Zastrow (2010: 70-72) adalah pekerja membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka, untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah mereka, untuk mengeksplorasi strategi resolusi, untuk memilih dan menerapkan strategi, dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk berurusan dengan masalah mereka sendiri secara lebih efektif. Adapun metode yang digunakan dengan melakukan konseling keluarga. Tujuan umum konseling keluarga (Perez, 1979), antara lain :

- a. Membantu anggota keluarga untuk belajar dan secara emosional menghargai bahwa dinamika keluarga saling bertautan di antara anggota keluarga.
- b. Membantu anggota keluarga agar sadar akan kenyataan bila anggota keluarga mengalami problem, maka ini mungkin merupakan dampak dari satu atau lebih persepsi, harapan, dan interaksi dari anggota keluarga lainnya.

- c. Bertindak terus menerus dalam konseling/terapi sampai dengan keseimbangan homeostasis dapat tercapai, yang akan menumbuhkan dan meningkatkan keutuhan keluarga.
- d. Mengembangkan apresiasi keluarga terhadap dampak relasi parental terhadap anggota keluarga.

PEMBAHASAN

Perubahan yang terjadi di masyarakat memicu seseorang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup adalah dengan berpartisipasi dalam sektor publik. Tentu hal ini juga dilakukan oleh kaum perempuan yang ingin berpartisipasi ke sektor publik dengan berbagai macam motivasi, salah satunya buruh perempuan.

Salah satu faktor pendorong keterlibatan buruh perempuan di sektor publik adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini termasuk salah satu alasan mengapa perempuan mengalokasikan waktunya untuk bekerja, yaitu untuk menambah pendapatan keluarga (Mardikanto, 1990:75). Penghasilan suami yang rendah membuat suami tidak mampu menafkahi keluarga dengan baik. Mengingat kebutuhan hidup semakin meningkat, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga, buruh perempuan memilih untuk bekerja walau dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan keahlian.

Dalam menjalankan kehidupannya, buruh perempuan dihadapkan dengan dua tuntutan peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah, yang mana kedua peran ini harus dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara optimal. Keadaan dengan menjalankan dua peran secara bersamaan membuat buruh perempuan cukup dilematis serta menimbulkan konflik-konflik yang cukup pelik dalam diri buruh perempuan dalam mengoptimalkan perannya.

Menurut Sri Kuntari Ludiro (1980) yang dikutip oleh Utami Munandar (1985:57) mengungkapkan bahwa para buruh perempuan merasakan kesulitan-kesulitan seperti waktu, perasaan tidak tenang dan merasa bersalah, pengasuhan, dan kondisi fisik yang lelah. Kondisi seperti itu dikarenakan jenis pekerjaan mereka yang menuntut bekerja selama 8 sampai 9 jam dalam sehari untuk mengejar target produksi. Apabila target produksi tidak dapat dicapai, maka akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang didapatkan. Jam kerja yang panjang membuat fisik buruh perempuan kelelahan karena seharian bekerja. Akibatnya buruh perempuan merasa kesulitan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Selama bekerja, tak jarang para buruh perempuan meninggalkan anak mereka yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan lebih menitipkan anak mereka pada keluarga maupun tetangga.

Konflik-konflik yang dialami buruh perempuan akan menimbulkan dampak psikologis pada diri mereka maupun dampak terhadap keluarga. Dampak psikologis yang timbulkan seperti emosi tidak stabil, stress, mudah marah, sering kelelahan dan gangguan kesehatan (Hidayati & Alteza, 2009:8). Sedangkan dampak terhadap keluarga akan terjadi disfungsi sosial keluarga, yaitu suatu kondisi ketidakmampuan anggota keluarga untuk menjalankan peran-peran

dan status-status sosialnya dalam keluarga. Adapun ciri-ciri keluarga yang disfungsi menurut Hawari (dalam Yusuf, 2004) yang menggambarkan keadaan buruh perempuan dalam keluarga adalah hubungan kedua orang tua tidak baik (*poor marriage*), hubungan orang tua dengan anak tidak baik (*poor parent-child relationship*), suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan (*high tension and low warmth*), orang tua sibuk dan jarang berada di rumah (*parent's absence*).

Kondisi buruh perempuan yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa keberfungsian sosial mereka belum optimal. Keberfungsian sosial itu sendiri menurut Skidmore (1994) dalam Edi Suharto (2005:28) adalah kemampuan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta mengatasi masalah.

Dalam menciptakan keberfungsian sosial pada diri buruh perempuan, dibutuhkan peran pekerja sosial. Dalam hal ini pekerja sosial berperan untuk membantu buruh perempuan untuk dapat meningkatkan kemampuan buruh perempuan dalam menjalankan perannya, pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam keluarga, memperbaiki relasi buruh perempuan dengan anggota keluarganya, serta mampu mengatasi masalahnya dalam keluarga dengan cara memperbaiki komunikasi di antara anggota keluarga, seperti berkumpul dan saling terbuka di antara anggota keluarga. Selain itu, pihak perusahaan seharusnya memberikan pelayanan konseling kepada karyawannya agar karyawan dapat menyelesaikan masalahnya dan tidak mempengaruhi kinerja pekerjaannya. Yang paling vital adalah kebijakan dari pemerintah maupun perusahaan mengenai jam kerja yang padat perlu dipertimbangkan lagi, khususnya untuk perempuan. Karena selama ini, kebijakan jam kerja banyak dilanggar oleh perusahaan, di mana buruh perempuan diberikan jam kerja tambahan “lembur” untuk mengejar target produksi, yang belum tentu juga gaji mereka ditambah melainkan dikurangi apabila ada kesalahan dan tidak mencapai target.

PENUTUP

Keterlibatan buruh perempuan di sektor publik telah menggeser komitmen sebagai isteri maupun ibu dalam keluarga. Keterlibatan buruh perempuan tidak sedikitnya karena faktor ekonomi. Dalam menjalankan peran ganda, buruh perempuan mengalami konflik peran dan konflik perasaan.

Konflik yang dialami membuat keberfungsian sosial buruh perempuan belum dapat diciptakan, karena tidak sepenuhnya menjalankan peran sebagai isteri maupun ibu, sehingga mempengaruhi kualitas buruh perempuan sebagai individu yang baik. Oleh karena itu, perlu intervensi pekerja sosial dengan buruh perempuan sebagai klien serta menggunakan metode casework untuk mengembalikan dan menciptakan keberfungsian sosial individu.

Merujuk pada hasil penelitian Muflich Nurhadi (2009), jika istri yang bekerja tersebut pendapatannya dapat untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, maka disfungsi bagi urusan-urusan kerumahtanggaan,

ketergantungan ekonomis kepada suaminya menjadi rendah, sikap kemandiriannya (istri) menjadi tinggi, sehingga tingkat harmonisasi keluarga dapat menjadi goyah, meskipun seluruh kebutuhan ekonomi keluarga relatif dapat tercukupi. Sementara itu istri yang bekerja yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga saja, maka ia akan tetap fungsional bagi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, ketergantungan ekonomisnya kepada suami juga tetap tinggi. Sementara itu sikap kemandiriannya berada dalam kategori rendah, saling ketergantungan suami-istri tetap tinggi, dan keluarganya nampak berada dalam kategori harmonis.

Daftar Rujukan

Ali, Zaidin. 2006. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC

Burns R.B. 1993. *Konsep Diri*. Jakarta: Arcan

Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Keluarga. 2006. *Konsultasi dan Advokasi Sosial Keluarga*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Keluarga.

Gerungan, W.A. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.

Hidayati, Lina Nur & Alteza, Muniya. 2009. *Work-Family Conflict Pada Wanita Bekerja : Studi Tentang Penyebab, Dampak, dan Strategi Coping : Laporan Penelitian*.

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Muniya%20Alteza,%20SE.,M%20Si./Work%20Family%20Conflict%20pada%20Wanita%20Bekerja_Studi%20Tentang%20Penyebab,%20Dampak%20dan%20Strategi%20Coping.pdf Diakses pada 15 Juni 2014 pukul 11.20 WIB

Horton, Paul B dan Chester L. Hunt.1984. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*.Jakarta : Erlangga.

Mardikanto, Totok. 1990. *Wanita dan Keluarga*. Surakarta: PT Tri Tunggal Tata Fajar.

Meyers, D.G., 1993. *Social Psychology*, Tokyo : Mc. Graw hill Book Company. Inc.

Munandar, Utami SC. 1985. *Emansipasi Dan Peran Gender Wanita Indonesia: Suatu Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Universitas Indonesia

Noor, Sofia Retnowaty. 2008. *Peran Perempuan dalam Keluarga Islami*.http://sofia-psy.staff.ugm.ac.id/files/peran_perempuan_dalam_keluarga_islami. Diakses pada 6 Mei 2014 pukul 14.00 WIB

Nurhadi, Muflich. 2009. *Perubahan Peran Ibu Rumah Tangga Pengaruhnya Terhadap Harmonisasi Keluarga*, Volume XXI No 2. Surakarta: UNS. Diakses pada 6 Maret 2014 pukul 14.20 WIB

Nurlela, Ella. 2003. *Komitmen Kerja dan Konflik Peran Wanita Bekerja*.Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol 2. Bandung: STKS

Piccard, Betty J. 1983. *An Introduction to Social Work*. USA: The Dorsey Press

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran

Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare, 10th Edition Empowering People*. Brooks/Cole, Cengage Learning: USA.

<http://m.rnw.nl/bahasa-Indonesia/node/137853>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 19.30 WIB

http://jabar.bps.go.id/publikasi_BPS/2013/inkesra2012/files/search/searchtext.xml diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pukul 07.05 WIB

<http://jito-um.blogspot.com/2009/05/permasalahan-kemiskinan.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2014 pukul 17.15 WIB

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51ca80df50bad/anak-anak-pekerja-butuh-perhatian>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 20.00 WIB

<http://www.benangmerah.net/place/idn/jawa-barat/kabupaten-sumedang#dataukpgoiddatasetjumlah-penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-per-kabupaten.com> diakses pada tanggal 6 November 2014 pukul 16.10 WIB

TUJUAN BESAR PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN

Oleh :
Burhan Yusuf Abdul Aziizu

Aziizuu@gmail.com

ABSTRACT

Education is an important indicator for development and advancement a Nation. That required a lot of the quality of education achieved a good education accordance in Indonesian Contitution, which is Educate life of the nation. In fact the Indonesian nation brightest has not yet been fully right correctly. Indonesian people especially students is already brightest right from the academic , but not of deed and moral. We can see many decay moral phenomena , such as corruption, war , and tribal clashes. A portrait of the shadow of death that is supposed to be overcome with a system of education. Education should strives not only for the intellect, we need character education for supporting a nation who smart on act. This according with Indonesian purpose in constitution number 20 of 2003, about National Education system chapter 3. The role of social worker in school should be considered. Impulse required from all parties to make this character education invented, Thus, the purpose of writing this article is to change the mindset of society, to improve the existence of social workers as a profession that has the knowledge, skills, and values in practice.

Key words : Character education, action, social worker

ABSTRAK

Pendidikan adalah indikator penting yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Diperlukan kualitas pendidikan yang baik supaya tujuan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar , yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana dengan baik. Pada kenyataanya bangsa Indonesia belum sepenuhnya tercerdaskan dengan benar. Masyarakat Indonesia terutama pelajar memang sudah tercerdaskan dari sisi akademis, namun tidak dari sisi perbuatan dan moral. Kita bisa melihat banyak fenomena-fenomena kasus kerusakan moral bangsa , seperti korupsi, tawuran, dan bentrok antar suku. Potret kelam yang seharusnya bisa ditanggulangi dengan sistem pendidikan. Pendidikan sudah seharusnya tidak mementingkan hanya kecerdasan otak , diperlukan juga pendidikan karakter untuk mendukung bangsa pintar dalam bertindak. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Peran-peran profesi Pekerja sosial di sekolah harus dipertimbangkan. Dibutuhkan dorongan semua pihak untuk terciptanya pendidikan karakter ini, sehingga peran-peran pekerja sosial dibutuhkan untuk mengintervensi lingkungan supaya menjamin ketercapaian pendidikan karakter ini. Maka, tujuan

penulisan artikel ini adalah untuk mengubah *mindset* masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial di sekolah sebagai profesi yang memiliki *knowledge, skill, dan values* dalam praktiknya.

Kata kunci : Pendidikan karakter, tindakan, pekerja sosial

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal untuk memperoleh manusia yang berkualitas . Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, diperlukan penentuan tujuan pendidikan yang tepat . Tujuan pendidikan inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia yang berkualitas, dengan tanpa mengesampingkan peranan unsur-unsur lain dalam pendidikan.

Proses penentuan tujuan pendidikan membutuhkan suatu kajian yang matang, cermat, dan teliti agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu tujuan pendidikan yang menjadikan moral sebagai dasar yang sangat penting dalam setiap peradaban bangsa.

Tujuan pendidikan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud disini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan meyeluruh yang mengandung makna lebih luas. Seperti yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi :

”...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Tujuan pendidikan menurut undang-undang dapat diartikan lebih luas menjadi sebuah tatanan perilaku individu dalam peranya sebagai warga Negara. membentuk anak menjadi warga negara yang baik. Karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka masalah pokok bagi pendidikan ialah memiliki sebuah tindakan agar dapat mencapai sebuah tujuan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 seharusnya menjadi suatu landasan bagi proses pendidikan yang berlangsung di Indonesia semenjak diberlakukan. Namun demikian, hal ini berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh para pendidik di sekolah saat ini. Satu pertanyaan untuk menguji apakah pendidikan di Indonesia secara hakiki dilandaskan pada UU No. 20 tahun 2003 adalah “apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat ini ditujukan untuk menjadikan potensi peserta didik berkembang sebagaimana mestinya atau hanya sekedar ditujukan untuk menyampaikan materi yang dipersepsi oleh guru-guru yang hanya

mengasah kemampuan otak?” Maka dari itu, untuk merubah dan mewujudkan perubahan sistem pendidikan dibutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan salah satunya melalui penulisan artikel ini diharapkan dapat mengubah paradigma khalayak tentang pendidikan dan peran pekerja sosial yang penting di dalamnya.

PENDIDIKAN KARAKTER

Analisis tentang hal ini merupakan faktor pertama yang harus dikaji untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kenyataan dengan peraturan yang ada. Tentu saja UUSPN No. 20/2003 ini memiliki kesesuaian dengan kajian teori pendidikan yang ada, dimana pendidikan ditujukan untuk perubahan perilaku peserta didik.

Pembelajaran yang dilaksanakan hanya sekedar menyampaikan materi saja dapat dikatakan sebagai sebuah penyimpangan. Penyimpangan proses pendidikan yang diberikan guru tersebut dapat dilihat sebagai “mal praktik pendidikan.” Dikatakan “mal praktik” karena pendidikan seharusnya mengembangkan potensi peserta didik, bukan membebani atau bahkan menyesatkan peserta didik, baik dari sisi pola pikir, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Dampak-dampak dari model praktik pendidikan seperti inilah yang saat ini nampak dalam bentuk perilaku korupsi, pembobolan rekening bank, mafia hukum, mafia pajak, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas, peredaran narkoba, aborsi, pembalakan hutan, perdagangan manusia, dan berbagai fenomena lainnya. Walaupun demikian, pendidikan bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi, tetapi pendidikan seharusnya mampu membentengi perilaku jahat, tidak bermoral, dan merugikan masyarakat. Proses pendidikan yang benar akan membentengi perilaku seseorang dari berperilaku tidak sesuai, baik tidak sesuai dengan norma, peraturan, kesepakatan, maupun agama. Seseorang akan “merasa hidup” ketika ia hidup dalam kondisi pas-pasan tetapi jujur, daripada hidup mewah tapi hasil dari korupsi, jika proses pendidikan memberikan penguatan tentang nilai kejujuran, keikhlasan dan kesederhanaan. Namun jika ketiga nilai tersebut tidak diperkuat dalam proses belajar anak selama ia mengikuti proses pendidikan (SD, SMP, SMA, dan PT) maka ia akan dengan mudah melakukan korupsi ketika ia memiliki peluang. Contoh lain, maraknya kenakalan dikalangan remaja; pergaulan bebas, tawuran, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya merupakan bukti bahwa moral remaja mengalami degradasi yang drastis. Para pejabat sudah tidak mempunyai rasa malu meminta dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Para wanita lebih senang pamer aurat dimuka umum dan bergaul tanpa batas. Dengan alasan seni para artis dan media telah meracuni masyarakat dengan tontonan yang merusak akhlak.

Persoalan ironis yang sekarang kita bisa amati disekitar kita adalah banyak orang-orang yang korupsi saat ini merupakan orang yang berpendidikan, dalam artian mereka telah menamatkan pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang kurang tepat dengan proses pendidikan kita saat ini. Khususnya dilihat dari “apakah pendidikan kita berorientasi pada penguatan potensi (karakter bangsa Indonesia) atau berorientasi

pada penguasaan materi yang ada di mata pelajaran saja?,” sehingga perilaku masyarakat ini rentan dengan tindak kejahatan dan perilaku-perilaku menyimpang. Pendidikan karakter yang saat ini menjadi ramai diusung diberbagai sekolah dipandang sebagai salah satu program prioritas pemerintah saat ini tetapi juga merupakan desakan masyarakat yang sudah tidak puas dikarenakan hasil pendidikan berupa perilaku masyarakat saat ini banyak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Menurut Ratna Megawangi (2004:95) pendidikan karakter “sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.” Definisi lainnya dikemukakan oleh akhmad Sudrajat (2010) “Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang memilikin insan kamil atau budi pekerti yang baik.” [sumber:<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/> diakses pukul 22.30 WIB].

Analisis penulis menjelaskan bahwa karakter manusia saat ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang dialami oleh dirinya baik dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan masyarakat. Apalagi masa perkembangan yang paling mendasar adalah dimasa-masa sekolah dimana pencarian jati diri dimulai. Besar kecilnya pengaruh berbagai pengalaman tersebut, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan proses pendidikan sampai pada pendidikan dasarnya karena banyak waktu yang dihabiskan dilingkungan pendidikan.

1. Perubahan tingkah laku menurut Albert Bandura

Teori *social learning* memposisikan bahwa orang-orang dari satu sama lainnya melalui observasi, imitasi, dan pemodelan. Dalam pandangan Albert Bandura, manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku-perilaku tersebut. Secara tegas, Bandura mengatakan

“Most human behavior is learned observationally through modeling: from observing others, one forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasions this coded information serves as a guide for action.”

Perubahan perilaku peserta didik berubah sesuai dengan apa yang dia pelajari dari lingkungannya. Mereka secara aktif merekonstruksi lingkungan setiap saat. Karena itu patut menjadi perhatian para pendidik, apa sebenarnya yang dipelajari oleh peserta didik dari lingkungan kelas, sekolah, dan rumah? Apakah mereka meniru suatu perilaku yang sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan yang berlaku atau menyalahi itu semua aturan yang ada? Proses ini merupakan proses yang harus bisa menguatkan dan mengembangkan perilaku anak kepada suatu nilai dan norma yang dirujuk oleh lembaga pendidikan dimana ia berada.

2. Perubahan Perilaku menurut Teori Kognitif

Riset awal tentang perubahan sikap berasal dari teori kognitif Segall 1944, yang mengemukakan bahwa setiap persepsi adalah hasil interaksi antara stimulus dan *perceiver* yang dibentuk oleh pengalaman sebelumnya. Seseorang terpersuasi untuk bertindak dengan suatu cara yang sudah ada atau pernah terlihat dan terpikirkan sebelumnya. Perilaku seseorang pada saat tertentu terjadi atau muncul karena adanya keseimbangan antara sebab/alasan dan akibat/keputusan yang diambil. Segala tindakan berawal dari sebuah pemikiran, oleh karena penting sekali bagi peserta didik mendapatkan stimulus-stimulus konstruktif masa lalu yang bisa memperbaiki kognitif supaya tidak terjadi penyimpangan tindakan di kemudian hari. Karakter peserta didik sangat terkait dengan pendidikan karakter yang saat ini menjadi hangat dalam kajian akademik mengenai pendidikan di Indonesia. Pengembangan berkarakter merupakan syarat mutlak untuk dimilikinya perilaku berkarakter pada peserta didik. Mengapa demikian? Karena perilaku berkarakter peserta didik merupakan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar terhadap lingkungannya.

Interaksi antara peserta didik dengan kepemimpinan guru dan kepala sekolah tidak terbatas pada interaksi antar orang (siswa dengan guru atau siswa dengan kepala sekolah), tetapi juga terjadi dari hasil interaksi antara peserta didik dengan segala bentuk hal dan karya yang dihasilkan dan dikesankan oleh kepemimpinan guru dan kepala sekolah. Contohnya, Cat tembok sekolah yang nyaman dipandang oleh peserta didik merupakan suatu proses interaksi antara kepala sekolah dengan peserta didik. Demikian halnya teguran guru kepada seorang peserta didik yang mencontek di kelas pada saat ulangan merupakan proses interaksi antara peserta didik (yang mengamati proses peneguran tersebut) dengan kepemimpinan guru. Jadi dalam arti yang luas, pendidikan berkarakter melibatkan semua hal yang dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah yang kemudian akan berinteraksi /berpadu /menyatu dengan proses belajar peserta didik.

PERAN PEKERJA SOSIAL

Apa yang membedakan pekerja sosial dan fungsi guru BK (Bimbingan Konseling) di sekolah? Analisis penulis guru BK menangani masalah anak dari kondisi saat disekolah saja dan intervensi dilakukan kepada individu saja. Banyak juga anggapan bahwa ketika dipanggil ke guru BK artinya anak bermasalah, padahal seharusnya memang setiap anak membutuhkan pendampingan, bahkan anak yang berprestasi pun membutuhkan pendampingan supaya prestasinya terjaga. Hal ini membuktikan adanya mindset yang negative terhadap pendampingan dari guru, belum adanya frame yang sama diantara guru dan siswa.

Pekerja sosial sekolah memainkan peranan penting dalam hubungan kapasitas antara sekolah dan agensi-agensi sosial masyarakat yang lain yang menolong sekolah dan sumber-sumber lainnya satu sama lain bermanfaat terhadap yang lainnya. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pekerja sosial di sekolah, menurut Costin (1972: Hlm. 351): Pekerja sosial sekolah memainkan

peranan penting dalam hubungan kapasitas antara sekolah dan agensi-agensi sosial masyarakat yang lain yang menolong sekolah dan sumber-sumber lainnya satu sama lain bermanfaat terhadap yang lainnya. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pekerja sosial di sekolah, menurut Costin (1972: Hlm. 351):

1. Pekerja sosial harus mempermudah persyaratan bagi pendidikan langsung dan pelayanan sosial terhadap para siswa serta menyediakan pelayanan sosial langsung terhadap para siswa terpilih.
2. Pekerja sosial harus bertindak sebagai pengacara siswa, berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang penting dari kelompok siswa terpilih.
3. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para administrator sekolah agar bersama-sama mengidentifikasi situasi permasalahan atau permasalahan yang kompleks yang mana pendekatan pelayanan direncanakan akan dituju, bantuan dalam mengembangkan hubungan kerjasama dengan agen-agen kemasyarakatan, dan membantu dalam merumuskan kebijakan sekolah yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dan generasi muda.
4. Pekerja sosial harus berkonsultasi dengan para guru tentang teknik-teknik untuk menciptakan iklim di mana anak-anak mereka bebas dan termotivasi untuk belajar. (Sebagai contoh, melalui penafsiran sosial dan pengaruh budaya dan kehidupan siswa, memfasilitasi penggunaan teman sebaya untuk menolong anak yang bermasalah, atau membantu dalam aspek lainnya dari seni mengatur hubungan di dalam kelas).
5. Pekerja sosial harus mengorganisir orang tua dan kelompok masyarakat untuk saluran perhatian yang efektif tentang siswa dan sekolah serta bertindak sebagai seorang pembangun kekuatan di dalam hubungan dengan sekolah dan masyarakat.
6. Pekerja sosial harus mengembangkan dan menjaga hubungan yang produktif antara sekolah dan wilayah kritis pekerjaan sosial serta praktek legal supaya memudahkan efektivitas pelayanan masyarakat untuk sekolah anak dan keluarga mereka, membantu dengan perubahan yang direncanakan dalam pola organisasi dari program-program, dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, dan bertindak sebagai katalis terhadap agen tersebut dalam masyarakat yang merupakan fungsi utama adalah perubahan pola dari struktur sosial kemasyarakatan (contohnya, kesejahteraan anak, perbaikan kesehatan mental masyarakat, dan pelayanan legal untuk kemiskinan).
7. Akhirnya, pekerja sosial harus menetapkan kepemimpinan dalam koordinasi keahlian multi disiplin ilmu atas nama siswa antara tenaga pelayanan siswa (contohnya, konselor bimbingan, psikolog, perawat, dan petugas pelayanan).

Pekerja sosial sekolah merupakan daerah khusus praktek pekerja sosial. Pekerja sosial sekolah membantu siswa membuat untuk meraih sukses dalam penyesuaian terhadap sekolah untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka

dalam lingkungan pendidikan mereka. Pekerja sosial bekerja sama dengan personil sekolah lainnya dan pelayanan sosial lembaga lokal untuk membantu siswa dalam mengatasi atau menanggulangi fisik, emosi atau kesulitan ekonomi, serta sebagai alamat masalah sosial dan perilaku yang mungkin akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk tampil baik di sekolah. Pekerja sosial sekolah sering memberikan penyuluhan terhadap individu maupun kelompok, berkonsultasi dengan guru, berpartisipasi pada tim pendidikan dalam menentukan kebijakan, memfasilitasi komunikasi dan perubahan untuk kepentingan siswa, dan advokat untuk kebutuhan siswa (NASW, 1973)

Inti dari keahlian pekerja sosial adalah pada pemahaman pembangunan manusia dan perilaku dalam lingkungan sosial, penilaian psikososial, kerja kasus, dan pelayanan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah komponen dari sistem pendidikan yang berisi seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tertera dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terjadinya pendidikan karakter yang diharapkan dapat menghantarkan peserta didik menjadi anak-anak yang berkarakter. Tentu saja kajian ini merupakan kajian awal untuk dikembangkan lebih lanjut. Karenanya diharapkan para akademisi maupun praktisi untuk turut mengkritisi dan mengembangkan kajian mengenai Pendidikan berkarakter ini lebih lanjut.

Pekerja sosial sekolah perlu merespon isu pembentukan karakter ini dengan perwujudan hak – hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak – anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak penyandang cacat) serta keluarganya.

Pekerja sosial berupaya menciptakan hubungan yang seimbang atau serasi antara unsur – unsur yang ada di dalam sekolah seperti antara guru dan peserta didik, antara sekolah dan orang tua (keluarga), antara sekolah dan lingkungan masyarakat, dan antara peserta didik dengan orang tuanya. Jadi di sini pekerja sosial tidak hanya mengurus bagian kesiswaan atau struktur sekolah saja, tapi seorang pekerja sosial juga harus memfokuskan dirinya terhadap hubungan sekolah dengan keluarga siswa maupun dengan lingkungan sekitar sekolah sehingga pembelajaran atau pendidikan berkarakter dapat diwujudkan.

Menanamkan nilai-nilai diatas merupakan hal yang akan sulit jika tidak dimulai dari diri sendiri dan lingkungan tempat kita berada. Pendidikan seperti ini hendaknya dijadikan sebagai sebuah kurikulum, diterapkan dalam metode pendidikan, dan dipraktikkan dalam pembelajaran. Agar generasi-generasi Indonesia yang berkarakter unggul terlahir dari sistem yang telah dibuat yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan nilai-nilai kebenaran menjadi pedoman bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Covey, Stephen R. 2013. *The Leader In Me*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Gross, Richard. 2012. *Phsycology the Sciences of Mind and Behaviour*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Budhi, et al. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran:Bandung.

Sumber Jurnal :

- Lela B. Costin. 1972. Penyesuaian dalam Penyampaian Pelayanan Pekerjaan Sosial Sekolah. *Social Casework*.
- Pipit Uliana, Rr Setyowati. 2013. Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kultur Sekolah. Universitas Negri Surabaya (UNESA)
- Susapti, Pepti . 2009. *Pembelajaran Berbasis Lingkungan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Chrisiana , Wanda . 2005 . Upaya Penerapan Pendidikan Karakter. Universitas Kristen Petra

Website :

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter.com>

APLIKASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TATA RUANG DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Oleh:

Edi Setiawan, Rudi Saprudin Darwis, & M. Fedryansyah,

Email:

edisetiayawan@yahoo.com; rsdarwis@gmail.com; fedry_cons@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah tata ruang di Jatinangor semakin kompleks seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Saat ini masalah tersebut sudah berdampak pada masalah banjir yang kerap muncul setiap musim hujan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melalui BAPPEDA Kab. Sumedang membuat suatu rencana program yaitu CAP - RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman). Dalam program ini terdapat pelibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tata ruang di Jatinangor sebagai tenaga pendamping penggerak masyarakat lainnya guna memahami bagaimana rencana tata letak bangunan diterapkan dalam membangun perumahan. Melalui artikel ini penulis akan mengkaji program tersebut melalui konsep kebijakan sosial dan pembangunan sosial dimana penulis melihat adanya kontribusi konsep tersebut dilihat dari program tersebut yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan adanya pelibatan masyarakat yang menurut konsep kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari perspektif pembangunan sosial.

Kata Kunci : Tata ruang, Pembangunan sosial, kebijakan sosial

PENDAHULUAN

Jatinangor dahulu merupakan salah satu kawasan yang berada di Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang. Penetapan Jatinangor sebagai kota pendidikan tinggi direncanakan sejak tahun 1980 – an sesuai dengan konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. Setelah Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 583/SK-PIK/1989 nama Jatinangor kemudian ditetapkan sebagai kecamatan yang sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Penetapan fungsi Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi secara langsung berdampak pada perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sivitas akademika tetapi juga

karena perpindahan pelaku kegiatan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa.

Perubahan fisik di Jatinangor terjadi antara tahun 1970 sampai dengan awal tahun 1980-an. Sebagian besar perubahan fisik tersebut terjadi karena adanya perluasan kegiatan perdagangan, pemerintahan dan industri. Dan semakin cepat berkembang dengan dibangunnya 4 (empat) Perguruan Tinggi di kawasan tersebut yaitu : IKOPIN, UNPAD, STPDN dan UNWIM, masing-masing pada tahun 1979, 1980, 1981 dan tahun 1986. Kawasan Jatinangor saat ini telah menjadi kota kecil yang terus akan mengalami perkembangan sejalan dengan fungsinya sebagai lokasi pendidikan.

Perkembangan Kawasan Jatinangor pada saat ini semakin tidak terarah, pola pergerakan, transportasi dan kegiatan menjadi lebih hidup dan aktif. Jalan menjadi macet. Lahan beralih fungsi dari peranian/persawahan menjadi permukiman yang tumbuh secara cepat, tidak terkendali bahkan tidak teratur.

Kondisi lingkungan Jatinangor pada saat ini mengalami degradasi akibat pembangunan yang tidak terencana dengan baik, salah satunya adalah tata ruang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan rumah/gedung yang tidak teratur, perumahan yang padat, ketidakteraturan tempat kos, kumuh, jalanan sempit dan rawan macet, penumpukan sampah yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Pembukaan lahan yang tidak terkendali dengan dalih pembangunan mengakibatkan Jatinangor menjadi tidak nyaman, rawan banjir, longsor serta udara terasa panas. Pada musim kemarau, Jatinangor mengalami kesulitan air karena hutan sebagai wilayah konservasi telah rusak.

Masalah tata ruang bangunan secara tidak langsung dapat berpengaruh pada timbulnya masalah-masalah sosial seperti banjir. Setiap hujan besar yang mengguyur Jatinangor, beberapa kawasan seperti di Desa Cikeruh selalu tergenang air. Bahkan pada bulan Maret 2014 banjir bandang pernah terjadi dan merusak satu kos-kostan. Selain itu banjir juga mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang jalan raya Jatinangor. Fenomena ini jika dibiarkan tentu akan merugikan banyak orang termasuk mahasiswa. Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan sosial khusus mengatur masalah tata letak bangunan di Jatinangor agar masalah sosial seperti banjir dan kemacetan dapat teratasi.

Salah satu program untuk mengatasi masalah tata ruang di Kabupaten Sumedang yang diterapkan juga di Kecamatan Jatinangor adalah program Pendampingan Community Action Plan-Rencana Perumahan Dan Permukiman (CAP-RPP). Program ini muncul atas dasar pemenuhan kebutuhan akan rumah dan kawasan permukiman layak yang semakin sulit terpenuhi, karena berbagai keterbatasan dan hambatan diantaranya; masih belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang responsive dengan perkembangan kebutuhan serta layak dari segi penataan sanitasi lingkungan dan ruang terbuka hijau, lalu tidak seimbangya antara tingginya kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau dengan kemampuan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumedang dan dengan

terbatasnya peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman (hanya sebagai fasilitator).

Maka sudah saatnya peran masyarakat didorong, supaya lebih mandiri dan menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang akan/sudah mereka tempati agar layak dari segi sanitasi serta lingkungannya.

Masyarakat belum siap untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman (belum terinformasikan, belum memahami, dan belum bisa menggali dan mengenali potensi ataupun permasalahan lingkungan tempat tinggalnya) maka dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumedang memberdayakan sekaligus melatih masyarakat untuk jadi tenaga pendamping yang nantinya akan membantu masyarakat disekitarnya mampu menyusun CAP - RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman) yang secara konsisten dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Sehingga diharapkan dengan adanya program CAP-RPP ini masyarakat mampu menyusun suatu rencana tindak lanjut di tingkat komunitas untuk perumahan dan kawasan permukimannya (CAP – RPP), yang secara konsisten dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Sedangkan keluaran dari progam ini salah satunya adalah terbentuknya tenaga pendamping/penggerak masyarakat (TPM) sebagai tenaga penggerak masyarakat sekaligus sebagai kader yang akan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam aplikasinya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial dimana peran pekerja sosial dapat diterapkan dan konsep keilmuan kesejahteraan sosial juga dapat menjadi referensi dalam menelaah kebijakan ini.

ISI

Maksud kegiatan CAP-RPP adalah mempercepat tertatanya perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar (rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertata dan terencana), melalui upaya pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis pada keswadayaan masyarakat.

Tujuannya :

1. Membantu masyarakat agar mampu mengenali dan menggali potensi dan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan tempat tinggalnya dan mampu mencari upaya pemecahannya.
2. Membantu masyarakat agar mampu menyusun suatu rencana tindak di tingkat komunitas untuk perumahan dan kawasan permukimannya (CAP – RPP), yang secara konsisten dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Menyediakan pedoman bagi para pelaku pelaksana pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan suatu skenario pembangunan dan penataan perumahan dan

kawasan permukiman yang disusun secara partisipatif menggali potensi dan identitas kawasan.

Keluaran kegiatan CAP-RPP adalah :

1. Terbentuknya tenaga pendamping/penggerak masyarakat (TPM) sebagai tenaga penggerak masyarakat sekaligus sebagai kader yang akan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah.
2. Skenario Penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam bentuk CAP-RPP, yang berisikan :
 - a. Konsep Pembangunan dan Penataan Lingkungan.
 - b. Matriks Program Lima Tahunan.
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penataan perumahan dan Kawasan permukiman yang disusun mencakup :
 - a. Gambar Arah Teknis, untuk keperluan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan tahun pertama serta proyeksi untuk lima tahun yang akan datang.
 - b. Dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk tahun pertama, serta proyeksi untuk lima tahun yang akan datang.

Terbentuknya tenaga pendamping/penggerak masyarakat dalam konteks keilmuan dapat disebut dengan pembangunan sosial. Pembangunan secara umum dapat dikatakan merupakan suatu upaya perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan pembangunan bukan hanya sekedar peningkatan ekonomi masyarakat, seperti yang dikatakan Midgley dalam buku “*Social Development – The Developmental Perspective In Social Welfare*” mengenai *distorted development* :

Distorted development exists in societies where economic development has not been accompanied by a concomitant level of social development. Distorted development is manifested not only in poverty, deprivation, low health status and inadequate housing but in the exclusion of sections of the population from full participation in development. (Midgley 1995: 4&5)

Berdasarkan penjelasan diatas, Midgley berpendapat bahwa *distorted development* adalah suatu kondisi masyarakat dimana terdapat pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pembangunan di bidang sosial yang memadai. *Distorted development* tidak hanya terwujud dalam bentuk kemiskinan, buruknya kondisi kesehatan masyarakat dan perumahan yang tidak memadai, tetapi *distorted development* juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan yang rendah.

Proses pembangunan sudah seharusnya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perorangan dan institusional masyarakat yang menjadi sasaran. Sedangkan yang menjadi permasalahan utama dalam *distorted development* adalah ketidak mampuan dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan di bidang sosial. Dan untuk

mengatasi permasalahan pembangunan ini menurut Midgley, dibutuhkan satu perspektif baru yaitu pembangunan sosial.

As was noted earlier, social development is an approach to promoting people's welfare that is well suited not only to enhancing the quality of life for all citizens but to responding to the problems of distorted development. The conditions of concomitant prosperity and deprivation that characterize so many countries today can best be remedied through an approach that integrates economic and social objectives. (Midgley 1995: 7)

Dalam buku yang sama, Midgley mengungkapkan bahwa pembangunan sosial adalah sebuah pendekatan baru untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini tidak hanya tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi tepat juga untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat *distorted development*.

Kondisi banyak negara saat ini yang mengalami masalah kemakmuran dan kemiskinan dapat diperbaiki melalui pendekatan pembangunan sosial. Karena pendekatan ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial.

Program CAP - RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman) ini merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka mengatur tata ruang mereka. Program ini melibatkan peran aktif masyarakat sebagai tenaga pendamping yang nantinya diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Masyarakat yang diharapkan terlibat dalam program ini adalah masyarakat yang dapat menggerakkan ataupun mempengaruhi warga lainnya.

Dalam buku “Social Policy In The Post-Welfare State” kebijakan sosial memiliki pengertian :

Social policy, in its essence, is concerned with the regulation of social relationships for the purpose of affirming certain values and interests through the implementation of appropriate means designed to achieve corresponding ends. It has been defined as the ‘regulation of intra-societal relations and the shaping of the quality of life’. (Gil 1976) (Adam Zamrozik 2001: 38)

Berdasarkan pengertian diatas, kebijakan sosial merujuk pada bentuk keprihatinan terhadap permasalahan-permasalahan sosial untuk tujuan menegaskan nilai-nilai dan kepentingan tertentu melalui penerapan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang sesuai yang telah ditetapkan sebagai regulasi hubungan intra masyarakat dan pembentukan kualitas hidup.

Berkaitan dengan topik yang akan peneliti lakukan, Program CAP - RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman) di Jatinangor merupakan salah satu bentuk keprihatinan terhadap kondisi tata ruang dan bangunan di Jatinangor. Kondisi tata ruang dan lingkungan di Jatinangor saat ini juga berdampak pada timbulnya permasalahan lain yaitu banjir. Maka dari itu

kebijakan CAP-RPP muncul sebagai solusi yang tujuannya telah ditetapkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Jatinangor yang terbebas dari masalah tata ruang.

Kesimpulan

Program CAP - RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman) di Jatinangor merupakan salah satu bentuk aplikasi konsep pembangunan sosial dan kebijakan sosial dimana ada peran peningkatan kapasitas individu dalam konteks pembangunan. Pembekalan terhadap masyarakat mengenai konsep tata ruang diharapkan dapat mengatasi masalah tata ruang di Jatinangor. Dan dengan adanya program ini membuktikan kepada kita bahwa saat ini peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam penyusunan maupun pelaksanaan pembangunan dan kebijakan sosial. Sebagai bentuk rekomendasi terhadap program ini adalah perlu adanya pengawasan secara formal karena tenaga pendamping yang dipilih adalah masyarakat lokal agar proses pendampingan tetap berada pada jalurnya sehingga program ini dapat berjalan sesuai tujuannya.

Daftar Pustaka

- Midgley, J. (1995). *Social Development - The Developmental Perspective In Social Welfare*. London: SAGE Publication Inc.
- Zamrozik, A. (2009). *Social Policy In The Post-Welfare State*. australia.
- Bapeda Kabupaten Sumedang. (2009). *Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan*, Sumedang

PERAN PENDAMPING BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)

Oleh

Darastri Latifah, Moch. Zainuddin, & Nandang Mulyana

E-mail:

(darastrilatifah@gmail.com; moch.zainuddin57@gmail.com;
mulyananandang@gmail.com)

ABSTRAK

ODHA merupakan singkatan dari Orang Dengan HIV/AIDS. Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS maka bukan hanya fisik yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut terpengaruh. Hal ini dikarenakan ODHA akan dipandang negatif sehingga dijauhi atau dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya bahkan keluarganya. Seringkali dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga tidak didapatkan oleh ODHA. Oleh karena itu, peran pendamping bagi ODHA menjadi sangat strategis dalam upaya mengembalikan keadaan dan kondisi ODHA menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengacu pada Parson, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap ODHA. Pertama sebagai fasilitator, pendamping berperan memfasilitasi ODHA agar mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang dialami. Kedua sebagai broker, pendamping berperan menghubungkan kebutuhan ODHA dengan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Ketiga sebagai mediator, pendamping berperan sebagai penengah bagi ODHA dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Keempat sebagai pembela, pendamping berperan dalam membela hak ODHA dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kelima sebagai pelindung, pendamping berperan melindungi ODHA dari situasi yang rentan dan tidak menguntungkan bagi ODHA.

Kata Kunci: *pendamping, peran, ODHA, HIV/AIDS*

PENDAHULUAN

ODHA merupakan sebutan bagi orang telah terinfeksi HIV/AIDS. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. Sel darah putih sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh maka ketika diserang penyakit tubuh kita tidak memiliki pelindung. Dampaknya adalah orang tersebut dapat meninggal dunia hanya terkena pilek biasa.

AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang merupakan efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Virus HIV membutuhkan waktu untuk menyebabkan AIDS yang mematikan dan sangat berbahaya. Untuk menjadi AIDS dibutuhkan waktu yang lama, yaitu

beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang mematikan. Namun setelah dipastikan menjadi AIDS, maka waktu hidup yang tersisa hanya tinggal beberapa tahun saja.

Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS maka bukan hanya fisik yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut terpengaruh. Secara fisik, ODHA akan menjadi sangat mudah terserang penyakit karena turunya kekebalan dalam tubuhnya. Nafsu makan ODHA semakin berkurang sehingga rentan kehilangan berat badan yang drastis yang akan sangat merubah penampilannya. Selain itu, menurunnya kondisi fisik tersebut juga akan berpengaruh terhadap penurunan produktifitas ODHA dalam kesehariannya.

Secara psikis, ODHA dapat melakukan stigma negatif terhadap dirinya sendiri. HIV dan AIDS masih memiliki citra yang menakutkan di kalangan masyarakat khususnya pada ODHA sendiri, selain karena faktor cara penularannya, AIDS dianggap sebagai suatu vonis hukuman mati. Orang yang pertama kali terdiagnosis HIV dan AIDS seringkali merasa depresi, takut, gundah dan putus asa. Selain itu ODHA akan merasa terasingkan, menganggap orang lain akan menjauhi dirinya karena mengidap penyakit yang ditakuti oleh banyak orang.

Secara sosial, ODHA cenderung mendapatkan hukuman sosial atau stigma negatif oleh masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya tindakan-tindakan pengasingan, penolakan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang yang diduga terinfeksi HIV, diwajibkannya uji coba HIV untuk mendapatkan pekerjaan atau pendidikan, dan penerapan karantina terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV. ODHA sering dihubungkan dengan perilaku negatif homoseksualitas, biseksualitas, pelacuran, dan penggunaan narkoba melalui suntikan. Padahal bisa saja ODHA sama sekali tidak tertular melalui perilaku negatif tersebut melainkan dari transfusi darah atau tertular dari pasangannya.

ODHA cenderung memiliki kondisi yang tidak berdaya baik dari segi fisik, psikis dan sosial. Dengan menurunnya kondisi fisik, psikis dan sosial tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Oleh karena itu, ODHA akan membutuhkan pihak-pihak yang mendampinginya dan memberikan dukungan sosial dalam menghadapi penyakitnya. Situasi ini membutuhkan peran pendamping untuk membantu ODHA mengembalikan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

PERAN PENDAMPING

Menurut Jumali (dalam Wahyudiana:2001) pendampingan adalah suatu proses fasilitasi yang dilakukan oleh para pendamping yang berperan untuk membantu, mengarahkan dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan. Mengacu pada hal tersebut, maka pendamping adalah orang yang berperan membantu dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan dengan cara memfasilitasinya.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu

agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman dalam Zaidin:2010).

Peran pendamping adalah serangkaian perilaku yang diharapkan membantu dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi klien dengan cara mendampinginya. Mengacu pada Parson (dalam Suharto:2010), terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap ODHA.

Fasilitator

Pendamping dapat berfungsi sebagai fasilitator. Istilah fasilitator berasal dari kata fasilitas yang berarti sarana. Maka memfasilitasi berarti memberikan sarana agar tercapai tujuan. Sarana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

Pendamping berperan sebagai fasilitator dengan cara memfasilitasi ODHA agar mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang dialami. Tidak mudah bagi ODHA untuk menerima kenyataan bahwa dirinya menderita penyakit yang ditakuti banyak masyarakat. ODHA cenderung bersikap menyalahkan keadaan, tidak bisa menerima keadaan. Banyak ODHA merasa cemas tidak akan lagi diterima di keluarga, lingkungan dan masyarakatnya serta ketakutan untuk menyongsong masa depan sehingga ODHA tidak lagi mau bergaul, tidak mau melanjutkan pendidikan atau bahkan melakukan bunuh diri.

Kebanyakan stres yang dialami oleh ODHA karena mereka menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang membunuh terutama kaum muda, menyebabkan penderitaan yang buruk dengan stigma negatif. Pengasingan, ketidakamanan, dan ketakutan mengenai masa depan dan dampak pada hubungan pribadi serta keluarga. Dalam situasi seperti ini, pendamping memiliki peran memfasilitasi tekanan psikis yang dialami dengan memberikan layanan konsultasi. Pendamping membantu ODHA untuk berusaha menerima statusnya sehingga diharapkan akan menjaga dirinya sendiri, pasangannya, keturunannya dari penyakit yang sama.

Sebagai fasilitator, pendamping juga berperan memberikan motivasi kepada para penderita terutama yang baru mengetahui dirinya terjangkit penyakit HIV/AIDS. Pendamping dapat membangkitkan semangat ODHA karena meskipun tidak dapat disembuhkan namun dapat diperpanjang masa hidupnya dengan obat-obatan tertentu. Meski tidak bisa menyembuhkan, terapi ARV (*antiretroviral therapy*) bisa memperpanjang hidup pengidap HIV positif dan membuat mereka hidup lebih produktif. Terapi ini mampu mengurangi jumlah virus HIV dengan menghambat penyebaran virusnya. Mengonsumsi ARV membutuhkan tingkat

kedisiplinan yang tinggi. Obatnya harus diminum 12 jam sekali, tidak boleh terlambat. Hal ini harus dilakukan setiap hari tanpa henti, seumur hidupnya.

Obat-obatan tersebut membutuhkan konsistensi dari ODHA sendiri. Oleh karena itu, pendamping berperan memotivasi ODHA agar menguatkan niatnya untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih lama. Apabila ODHA tidak memiliki motivasi yang baik pada dirinya maka kondisinya akan semakin memburuk. ODHA perlu dimotivasi agar dapat melahirkan kehidupan baru, kesempatan memperbaiki diri dan dapat menjalani kehidupan berdampingan dengan masyarakat.

Broker

Dalam pengertian umum, seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dalam konteks pendampingan, peran sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (*linking*), barang-barang dan pelayanan (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*).

Pendamping berperan sebagai broker dengan cara menghubungkan kebutuhan ODHA dengan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Penting bagi ODHA untuk mengetahui seperti apa HIV/AIDS itu, dimana ODHA bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, dan informasi-informasi terkait ODHA lainnya. Pendamping berperan memberikan informasi atau menghubungkan informasi yang dibutuhkan ODHA tersebut.

Informasi mengenai ODHA tersebut perlu diberikan dengan baik agar tidak terjadi salah persepsi. Misalnya informasi yang benar terkait cara penularan virus ini. ODHA tidak akan menularkan virusnya hanya melalui makan dan minum bersama, pemakaian fasilitas umum bersama, seperti telepon umum, WC umum, dan kolam renang, senggolan, pelukan dan kegiatan sehari-hari lainnya atau lewat keringat, dan gigitan nyamuk.

Sebagai broker, pendamping juga dapat berperan menghubungkan ODHA dengan sumber mata pencaharian yang baru jika dibutuhkan. Pada tingkat rumah tangga, keberadaan ODHA cenderung meningkatkan pengeluaran kesehatan dalam suatu rumah tangga bahkan menghilangnya pendapatan karena dikeluarkan dari pekerjaan. Pendamping dapat memberikan informasi kepada ODHA terkait program-program yang dapat menghasilkan pendapatan. Hal ini sangat diperlukan oleh ODHA dan keluarganya untuk mengurangi stres karena pendapatan yang menurun drastis.

Mediator

Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam

mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai "solusi menang-menang" (*win-win solution*).

Pendamping berperan sebagai mediator dengan menjadi penengah antara ODHA dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Misalnya menjadi penengah antara ODHA dengan keluarganya, temannya, pasangannya, atau dengan institusi pekerjaan atau pendidikan yang dinaunginya. Lingkungan sekitar ODHA membuat stigma tidak baik, mereka menganggap ODHA tidak bisa hidup normal dan kehilangan hak reproduksi mereka. Padahal jika ditangani dengan tepat, ODHA dapat hidup normal dan berdampingan dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendamping perlu jadi mediator antara ODHA dengan lingkungannya.

Penularan virus ini memang dapat lahir dari gaya hidup ODHA yang tidak sehat, baik penggunaan narkoba, alat suntik bergantian, dan seks bebas. Namun bukan tidak mungkin ODHA tertular karena mendapat donor darah dari darah yang telah mengandung virus HIV atau bahkan bawaan lahir dari orangtuanya. Ketika lingkungan terdekat ODHA mengetahui kondisinya, dapat dipastikan tidak semua bisa menerima bahkan cenderung dikucilkan. Alasannya takut tertular dan justru berkembang pada kemarahan mereka karena pola hidup yang dianggap diluar norma. Padahal ODHA memerlukan bantuan orang-orang yang mengerti pengobatan dan memahami psikisnya. Pendamping membantu ODHA menciptakan lingkungan yang positif, keluarga dan teman-teman yang ikut mewujudkan kondisi yang menjadikan ODHA tidak makin menderita. Selain itu, pendamping membantu meminimalisir stigma masyarakat sehingga ODHA tetap bisa hidup berdampingan dan berbaur dengan masyarakat.

Pendamping dapat menjadi mediator antara penderita ODHA dengan masyarakat. Misalnya dengan mengadakan pertandingan sepak bola antara ODHA dan masyarakat biasa yang sebenarnya merupakan cara memediasi dengan cara halus. Setelah bertanding, kegiatan ini memberikan pesan bahwa virus ini tidak menular lewat keringat bahkan saat berolahraga bersama. Oleh karena itu pendamping dapat merubah stigma masyarakat yang takut tertular saat bertemu, bersentuhan, berjabat tangan dengan ODHA. Dengan begitu, diharapkan ODHA dan masyarakat sekitarnya akan berhubungan normal kembali seperti biasanya.

Pembela

Pendamping berperan sebagai pembela dengan cara membela hak ODHA dalam memenuhi kebutuhannya seperti dari diskriminasi. ODHA memiliki hak yang sama terutama pada pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Pendamping perlu membela ODHA dari diskriminasi di lingkungan institusi baik di institusi pendidikan, institusi, pekerjaan serta institusi kesehatan.

Di institusi pendidikan, banyak ODHA anak dan anak dari ODHA yang tidak mau lagi melanjutkan pendidikan karena mendapat perlakuan yang berbeda dari guru maupun rekan sesama siswa. Lebih buruk lagi, masih banyak institusi sekolah yang tidak mau menerima ODHA anak atau anak ODHA untuk bersekolah di institusinya.

Di Institusi pekerjaan, saat ini banyak perusahaan yang mengharuskan pelamarnya melakukan tes diagnostik HIV. Bila hasilnya positif, maka pelamar tentu saja tidak diterima bekerja. Tindakan lainnya adalah mencutikan pegawai ODHA dalam waktu yang tidak terbatas, pemecatan secara sepihak, tidak mendapatkan jaminan kesehatan tenaga kerja dan sebagainya.

Di Institusi kesehatan pun masih banyak terjadi tindakan diskriminatif walaupun kebanyakan tenaga kesehatan telah memiliki pengetahuan yang cukup memadai mengenai HIV dan AIDS. Tindakan diskriminatif ini antara lain adalah tenaga kesehatan yang tidak mau melakukan kontak fisik seperti jabat tangan dan pemeriksaan fisik dasar dengan ODHA, tenaga kesehatan tidak mau mengambil sampel darah ODHA dan sebagainya karena takut terular.

Pelindung

Pendamping berperan sebagai pelindung dengan cara melindungi ODHA dari situasi yang rentan dan tidak menguntungkan bagi ODHA seperti stigma negatif. Terdapat banyak stigma negatif yang didapatkan oleh ODHA. Menurut Herek dalam Nurhayati, stigma terkait AIDS adalah segala persangkaan, penghinaan dan diskriminasi yang ditujukan kepada ODHA serta individu, kelompok atau komunitas yang berhubungan dengan ODHA tersebut. Pendamping melindungi ODHA dari diskriminasi yang didapatkan ODHA dan orang-orang yang hidup bersama ODHA.

Pendamping perlu melindungi ODHA dari diskriminasi di lingkungan individual seperti pengucilan atau pembuangan ODHA ke tempat terpencil diluar kota, pengucilan ODHA dari daftar waris keluarga, serta tuntutan perceraian dari pasangan. Pendamping perlu melindungi ODHA dari diskriminasi di lingkungan komunitas seperti halnya pada lingkungan keluarga, stigma dan diskriminasi di lingkungan komunitas pun tindakan diskriminatif yang sebelumnya ada seperti pengucilan, tidak mau berjabat tangan atau melakukan kontak dengan ODHA masih ada di tengah-tengah masyarakat.

Pendamping perlu melindungi ODHA dari diskriminasi di lingkungan kebijakan seperti kebijakan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh memecat karyawan ODHA. Pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak ditemui kasus karyawan dipecat karena terdiagnosis HIV. Kebijakan lainnya ialah pelarangan pemeriksaan HIV pada pelamar kerja. Kenyataannya, masih banyak perusahaan yang meminta pelamar kerja untuk melakukan tes HIV terlebih dahulu sebelum diterima kerja.

PENUTUP

Peran pendamping bagi ODHA menjadi sangat strategis dalam upaya mengembalikan keadaan dan kondisi ODHA menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terdapat lima peran pendamping yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap ODHA. Pertama sebagai fasilitator, pendamping berperan memfasilitasi ODHA agar mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang dialami. Kedua sebagai broker, pendamping berperan

menghubungkan kebutuhan ODHA dengan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Ketiga sebagai mediator, pendamping berperan sebagai penengah bagi ODHA dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Keempat sebagai pembela, pendamping berperan dalam membela hak ODHA dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kelima sebagai pelindung, pendamping berperan melindungi ODHA dari situasi yang rentan dan tidak menguntungkan bagi ODHA.

ODHA bukanlah orang yang harus ditakuti, namun harus dirangkul untuk diberi semangat. Dukungan dan semangat yang diberikan oleh sekitarnya dapat menolong ODHA untuk keluar dari keterpurukan dan membantu ODHA untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya. Oleh karena itu, pendamping memiliki peran untuk mengubah keadaan tidak berdaya yang dialami ODHA tersebut menjadi berdaya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati, Eka. 2013. *Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHA di Kota Bandung*. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran
- Nurnita, Widaykusuma. 2013. *Peran Pendamping Dalam Program Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga (Home Care): Studi Tentang Pendamping Di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial RI
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2003. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial*. Hasil Penelitian. STKS Bandung Press
- Wahyudiyana, Singgih. 2001. *Strategi pendampingan dalam pemberdayaan komunitas petani : Kajian terhadap pemberdayaan komunitas petani melalui kegiatan pendampingan sosial yang dilaksanakan sekretariat Bina Desa /INDHRRRA Jakarta: Studi kasus pendampingan sosial komunitas petani di desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur Singgih*. Jurnal Tesis Ilmu Sosiologi Kekhususan Kesejahteraan Sosial UI.
- Zaidin, Ali. 2010. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta : EGC

Sumber lainnya :

<http://rumahcemara.org/> (diunduh pada tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.30)

<http://www.spiritia.or.id/cst/bacacst.php?artno=1012&menu=perawmenu> (diunduh pada tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.10)

<http://www.matakubesar.com/2014/11/melampaui-mimpi.html> (diunduh pada tanggal 17 Desember 2014 pukul 20.00)

<http://sulis-wanto.blogspot.com/2012/12/seluk-beluk-hiv-aids-dan-penjabarannya.html> (diunduh pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 19.00)

EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh :

Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansyah.

Email:

(santosotriraharjo@gmail.com; fedry_cons@yahoo.com)

Abstrak

Perjalanan panjang eksistensi Pekerjaan Sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa Pekerjaan Sosial merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Asal ada benda atau materi, serta kemauan untuk membantu orang lain atau menyelesaikan masalah sosial maka ia disebut Pekerja Sosial. Hal itu yang pada akhirnya membuat jumlah tenaga Pekerjaan Sosial masih minim. Eksistensi yang dimaksud adalah adanya kebutuhan dari masyarakat secara nyata terhadap Pekerja Sosial yang secara profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, eksistensi terhadap Pekerjaan Sosial tidak begitu saja turun dari langit, melainkan hanya akan dapat diperoleh ketika para Pekerja Sosial dapat menunjukkan karya nyatanya dalam menciptakan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah Pekerja Sosial Profesional inilah yang membedakan dengan profesi lainnya, dimana gelar tersebut disematkan pada orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan di Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Kata kunci : Profesi Pekerjaan Sosial, Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial.

Pendahuluan

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Berkembangnya masalah sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial, membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain ;(1) faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll). (2). faktor budaya (perceraian, kenakalan remaja, dll).(3). faktor biologis (penyakit menular, keracunan makanan, dsb). (4). faktor psikologis (penyakit syaraf, aliran sesat, dsb).

Masalah sosial tersebut dialami oleh anak, keluarga, komunitas dan masyarakat; yang mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial) atau mengalami masalah struktural dan budaya, antara lain:

1. Hambatan fisik, misalnya kecacatan fisik, kecatatan mental,

2. Hambatan ilmu pengetahuan, misalnya kebodohan, kekurangtahuan informasi,
3. Hambatan keterampilan, misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja modern,
4. Hambatan mental/sosial psikologis, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres.
5. Hambatan budaya, misalnya mempertahankan tradisi yang kurang mendukung kemajuan sosial/modernisasi.
6. Hambatan geografis, misal keterpencilan terhadap fasilitas pelayanan sosial dasar.

Dalam kondisi demikian, diperlukan intervensi Pekerjaan Sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial didukung dengan kebijakan dan program pembangunan nasional bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintah pusat yang mempunyai mandat dan tugas pokok serta fungsi di bidang pembangunan Kesejahteraan Sosial. Kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai sebanyak 15,5 juta jiwa.

Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan Kesejahteraan Sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional Pekerjaan Sosial.

Jika rasio Pekerja Sosial (*Social Worker*) dengan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial minimal satu berbanding 100, maka kebutuhan Pekerja Sosial di Indonesia paling sedikit sebanyak 155.000 orang. Estimasi jumlah PMKS tahun 2012 sebanyak 15,5 juta keluarga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial saat ini sekitar 15.522 orang. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 139.000 Pekerja Sosial. (diunduh <http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=182> tanggal 01/12/2014 pukul 23:22)

Pekerjaan Sosial.

Menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte didalam Bukunya yang berjudul : *A Concepts and Methods of Social work*, mendefinisikan Pekerjaan Sosial adalah :

"Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relations, which help individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfaction and independence" (Friedlander dan Apte, 1980:4).

Pekerjaan Sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan kepada pengetahuan dan ketrampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Sedangkan Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*,

” Social Problems, Services, and Current Issues” mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut: ”Social Work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals” (Zastrow,1982: 12).

Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Jika kita mengacu kepada ke dua pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pekerjaan Sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk menolong manusia, baik individu, kelompok, dan masyarakat dimana pelayanannya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, agar mereka (individu, kelompok, dan masyarakat) dapat meningkatkan/memperbaiki kemampuan berfungsi sosialnya. Dengan tujuan, mereka dapat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang membantu manusia mengatasi permasalahannya baik Ia sebagai individu, atau sebagai anggota suatu kelompok dengan teknik relasi manusia. Sesuai hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial dia akan selalu bergantung dengan manusia lainnya, Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena tidak semua masalah yang dihadapinya dapat ditangani sendiri, pasti membutuhkan solusi dari individu lainnya baik anggota keluarga, teman , ataupun siapa saja dari luar dirinya.

Konsep Dasar Profesi Pekerjaan Sosial.

Dari pengertian diatas ada beberapa konsep yang mendasari Praktek Pekerjaan Sosial yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa konsep tersebut adalah :

1. Pekerjaan Sosial adalah kegiatan Profesional.

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebuah profesi jika dia memiliki minimal dua unsur pokok. Dalam Bukunya Dwy Heru Sukoco menjelaskan unsur pokok Profesi Pekerjaan Sosial adalah :

- A. Kegiatan tersebut harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, keahlian/keterampilan,dan nilai-nilai (*value*). Artinya kegiatan yang dilakukan dilaksanakan Pekerja Sosial yang telah mendapatkan pendidikan baik teori serta praktek di Sekolah Khusus/Perguruan Tinggi yang memberikan pendidikan Pekerjaan Sosial. Melalui pendidikan khusus juga Pekerja Sosial diajarkan berbagai teknik-teknik untuk

mengatasi permasalahan yang dihadapi Klien sebagai keahlian Pekerja Sosial. Demikian pula nilai-nilai juga dipelajari dalam pendidikan Pekerjaan Sosial agar Pekerja Sosial dalam menangani masalah Klien memiliki batasan-batasan sehingga tidak terjadi penyimpangan praktek. Dengan adanya ketiga kerangka dasar ini maka Praktek Pekerjaan Sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- B. Kegiatan tersebut harus diarahkan kepada kepentingan umum (*public interest*). Artinya, Suatu kegiatan harus diarahkan untuk semua tanpa memihak kepada golongan tertentu. Pelayanan yang diberikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau bermanfaat bagi kepentingan umum. Tidak boleh membedakan masyarakat tingkat atas, menengah atau bawah. Apabila suatu profesi diperuntukkan hanya bagi golongan tertentu, atau melakukan diskriminasi maka telah melanggar Hakekat Kelahiran dan tanggung jawab sosialnya.
2. Praktek Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan Pertolongan.

Seperti halnya Profesi lain, Profesi Pekerjaan Sosial juga merupakan Profesi Pertolongan (Helping action). Akan tetapi Konsep Pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial berbeda dengan Konsep Profesi lain, Konsep Pertolongan Pekerjaan Sosial adalah "*to help people to help themselves*" (menolong orang agar orang mampu menolong dirinya sendiri). Berlandaskan kepada konsep di atas, maka pertolongan Pekerjaan Sosial mempunyai dua ciri pokok, yaitu:

 - A. Orientasi pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial dipusatkan terhadap kepentingan Klien/Orang yang ditolong.
 - B. Pekerja Sosial selalu bekerja sama dengan Klien (*Working with Client*).
3. Klien yang dibantu adalah orang baik individu atau kolektifitas (keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat).

Pekerja Sosial harus memiliki teknik-teknik serta metode-metode untuk membantu klien yang mengalami masalah dalam interaksi sosial dengan lingkungannya, sehingga memperlemah fungsi Sosialnya dan menimbulkan masalah.
4. Intervensi Pekerjaan Sosial dipusatkan kepada peningkatan fungsi sosialnya.

Intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial harus mengarah kepada kemauan, harapan-harapan, kebutuhan Klien baik fisik dan sosial, serta potensi-potensi yang ada dalam diri Klien. Untuk mengetahui unsur-unsur diatas Pekerja Sosial harus melakukan asesmen terhadap Klien.
5. Dasar pengetahuan ilmiah Pekerjaan Sosial dapat di kelompokkan kepada tiga jenis, yaitu: *tested*, *hypothetical* dan *assumptive knowledge*.
6. Pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk praktek Pekerjaan Sosial ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.
7. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi para Pekerja Sosial Profesional.
8. Keterampilan profesi Pekerjaan Sosial diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

(Skidmore dan Thackeray, 1982: 7).

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah sistem program suatu negara, manfaat, dan layanan yang membantu orang, ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. Reid (1995) menggambarkan Kesejahteraan Sosial sebagai "ide, bahwa ide menjadi salah satu dari masyarakat yang layak yang menyediakan kesempatan untuk bekerja, memberikan keamanan yang wajar dari keinginan dan penyerangan, mengutamakan kejujuran dan evaluasi berdasarkan pada jasa individu, dan ekonomi produktif dan stabilitas". (hal. 206).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dari kedua definisi di atas, Kesejahteraan Sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat fisik maupun nonfisik, yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta dapat menjalankan perannya di masyarakat.

Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial

Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial telah memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia, antara lain:

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan Pekerja Sosial sebagai "the primary profession" dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja Sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap Pekerja Sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi Pekerja Sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal

definisi Pekerjaan Sosial dan praktik Pekerjaan Sosial, persyaratan menjadi Pekerja Sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan Pekerja Sosial bersertifikat dan berlisensi.

Keempat, kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “*one stop services*” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang Pekerjaan Sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan Pekerja Sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau Roadmap Pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia. (dikutip dari <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=17908> tanggal 14/12/2014 pukul 00:06)

Operasionalisasi Pekerjaan Sosial

Pendidikan Pekerjaan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan dan mencetak intelektual sebagai kader bangsa yang peduli terhadap penanganan masalah sosial. Utamanya di wilayah Timur Indonesia yang hingga kini masih banyak membutuhkan Pekerja Sosial untuk melakukan pemberdayaan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, merupakan suatu tugas yang mulia bagi tenaga Kesejahteraan Sosial untuk “Membangun sinergisitas dan profesionalitas Pekerja Sosial yang handal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.” Sangat disadari bahwa Pekerjaan Sosial haruslah menjadi dekat dengan konteks di mana Ia diaplikasikan. Oleh karena itu, memaknai dan mempraktekan Pekerjaan Sosial yang berbasis multikultur sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia adalah tugas yang perlu dilakukan agar Pekerjaan Sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau besar dan kecil, dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dan suku bangsa. Paling sedikit terdapat 300 etnik atau suku-bangsa di Indonesia. Pekerja Sosial yang mendedikasikan diri dalam konteks Indonesia perlu memahami budaya multikultur. Kemampuan

responsif atas keragaman budaya inilah yang disebut kompetensi budaya dari Pekerja Sosial (*Multicultural Social Work*).

- a) Untuk mengintegrasikan kompetensi budaya pada Pekerjaan Sosial, maka ada lima prinsip dasar yang perlu dipahami: Menghargai perbedaan dan keragaman budaya;
- b) Menerapkan instrumen penilaian budaya dalam praktek Pekerjaan Sosial;
- c) Melatih kesadaran Pekerja Sosial tentang dinamika yang terjadi pada saat interaksi lintas-budaya;
- d) Memasukan pengetahuan budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan melatih sikap lentur terhadap keragaman budaya;
- e) Melatih kerjasama lintas-budaya, adaptasi budaya, dan pemahaman keragaman budaya.

Situasi sebagaimana gambaran tadi memotivasi kita untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial dalam konteks Indonesia, yang selaras dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya Indonesia. Dalam upaya mendukung pengembangan Pekerjaan Sosial sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, perlu mencermati dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial berbasis kompetensi generalis dan spesialis

Praktek Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat untuk mencapai kemandirian secara pribadi dan sosial. Berkembangnya masalah sosial yang semakin kompleks, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan Pekerja Sosial yang tidak hanya mampu melaksanakan praktek Pekerjaan Sosial secara generalis, namun mengarah pada spesialisasi kompetensi Pekerjaan Sosial, seperti Pekerjaan Sosial dengan anak, keluarga dan sekolah; Pekerjaan Sosial dalam situasi bencana; Pekerjaan Sosial medis dan kesehatan publik; Pekerjaan Sosial dengan disabilitas; Pekerjaan Sosial forensik/koreksional; dan lain-lain. Kebutuhan Pekerja Sosial yang spesialis dapat dipenuhi apabila sistem pendidikan dan pelatihan profesi Pekerja Sosial juga mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial spesialis.

2. Mengembangkan praktek Pekerjaan Sosial berbasis perseorangan, keluarga dan komunitas yang terintegrasi

Kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral/fragmentaris, jangkauan pelayanan sosial terbatas, reaktif merespon masalah yang aktual, fokus pada pelayanan berbasis institusi/panti sosial, serta belum adanya rencana strategis nasional yang dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau seluruh warga negara yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program Kesejahteraan

Sosial yang melembaga dan profesional, serta mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Para Pekerja Sosial dituntut memiliki kompetensi Pekerjaan Sosial yang mengintegrasikan pendekatan dan intervensi kepada perseorangan, keluarga dan komunitas sebagai satu kesatuan entitas praktek Pekerjaan Sosial. Keberadaan institusi panti sosial perlu direvitalisasi sebagai pusat layanan Kesejahteraan Sosial berbasis keluarga dan komunitas.

3. Mengembangkan organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri

Keberadaan organisasi profesi Pekerja Sosial memiliki keunikan dan berbeda dengan negara-negara lain. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia lahir atas semangat para alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk berhimpun dan berserikat atas nama organisasi profesi, walaupun sistem pendidikan profesi dan sertifikasi Pekerja Sosial belum lahir. Kehadiran sistem sertifikasi bagi Pekerja Sosial akan melahirkan para Pekerja Sosial sebagai profesi yang diakui dan bersertifikat. Adanya sertifikasi bagi Pekerja Sosial, akan menjadikan profesi Pekerja Sosial memperoleh lisensi/mandat bahkan dapat menyelenggarakan praktek secara mandiri. Oleh karena itu, organisasi profesi yang ada sekarang ini diharapkan dapat merevitalisasi diri sebagai organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri.

4. Membangun sistem pencegahan secara dini munculnya masalah sosial

Penekanan kebijakan untuk menjadikan Kementerian Sosial bukan sebagai “pemadam kebakaran” yang hanya beraksi ketika masalah sosial telah marak. Kementerian Sosial senantiasa bersinergi menggalang kekuatan dengan masyarakat serta komponen bangsa lain untuk mencegah permasalahan sosial secara dini. Dampak sosial yang ditimbulkan semakin berat jika masalah sosial telah berlangsung dan membawa dampak sosial ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, sangat diperlukan keterlibatan perguruan tinggi lainnya yang mampu menjadi pilar utama dalam pencegahan secara dini munculnya masalah sosial. Hal ini penting karena menurut sebagian kalangan, Perguruan Tinggi tidak boleh lengah mengemban peran sebagai inisiator dalam pengembangan “sistem peringatan dini”. Pentingnya “*early warning system*” bukan hanya untuk mencegah bencana alam namun juga untuk pencegahan berbagai masalah sosial/bencana sosial. Pekerja Sosial dalam mengemban mandatnya memiliki tugas untuk membangun sistem peringatan dini berbasis keluarga dan komunitas terhadap berbagai ancaman/risiko bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sebelum semuanya sudah menjadi begitu buruk. Untuk itu secara sistematis pendidikan Kesejahteraan Sosial dapat menjadi perintis untuk melahirkan pendekatan khas guna mencegah terjadinya atau meluasnya masalah sosial yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

5. Menanamkan kepekaan dan kesalehan sosial

Kepekaan dan kesalehan sosial tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari sosialisasi nilai dan proses belajar. Kepekaan sosial sangat penting mengingat

sampai saat ini struktur sosial budaya masyarakat Indonesia masih sangat beragam dalam pencapaian taraf Kesejahteraan Sosial. Kepekaan dan kesalehan sosial akan menjadi kekuatan yang sangat penting bagi penanganan masalah sosial. Selain khas Indonesia, nilai-nilai ini diyakini masih kuat melekat pada masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial yang tinggi antara kaum kaya dan miskin berisiko terjadi kecemburuan sosial dan munculnya sikap anti sosial/anti kemapanan, bahkan dapat menimbulkan gejolak kerusuhan dan disintegrasi sosial. Dalam kondisi seperti ini, sifat individualistis yang hanya mementingkan diri sendiri sangat tidak cocok di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011, diketahui indeks Gini Ratio sudah mencapai angka 0,41 yang menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi.

Pendidikan Kesejahteraan Sosial harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Harapan kita kepada para Pekerja Sosial agar memperkuat kepekaan dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya melalui revitalisasi program/kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih terencana, terarah dan terpadu, sambil menginternalisasikan kepekaan dan kesalehan sosial Civitas Academica. Sifat-sifat *Sidik, Amanah, Fathonah dan Tablig*, selayaknya menjadi citra diri Pekerja Sosial di Indonesia.

6. Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Peran Pendidikan Kesejahteraan Sosial dalam perkembangan kehidupan sosial tercermin dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan dharma pendidikan diharapkan perguruan tinggi dapat mencerahkan masyarakat. Dengan dharma penelitian diharapkan dapat melakukan temuan-temuan inovasi teknologi Pekerjaan Sosial. Adapun dharma pengabdian masyarakat diharapkan mampu mengaplikasikan kompetensi Pekerjaan Sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain dengan mengemas substansinya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam rangka mengatasi masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial dapat didekati dari sisi akademis untuk dapat diurai dan dipahami, kemudian masalah sosial dapat dikaji, diteliti agar menghasilkan solusi atau model penanganan yang tepat cara dan diterapkan melalui pengabdian masyarakat dalam kesempatan sesegera mungkin. (dikutip dari <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam-masyarakat.html> pada tanggal 13/12/14 pukul 00:22)

Penutup

Menjadi Pekerja Sosial itu tidak mudah. Pekerja Sosial bukan hanya untuk menyalurkan/memberikan bantuan semata. Sangatlah tidak tepat jika masih ada pihak-pihak yang mengatakan semua orang dapat menjadi Pekerja Sosial karena Pekerjaan Sosial dapat dilakukan bila ada kemauan untuk memberi maka disebut

Pekerjaan Sosial. Banyak hal yang lebih penting yang dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial bagi terciptanya kehidupan yang kondusif terutama dari masalah sosial.

Seorang Pekerja Sosial Profesional, dalam melaksanakan Intervensinya terhadap Klien, harus didasarkan kepada 3 Kerangka Pekerjaan Sosial, yaitu: ilmu pengetahuan, keahlian/keterampilan dan nilai-nilai. untuk meningkatkan keberfungsian sosial Klien.

Pekerja Sosial juga diharuskan untuk memahami tentang teknik komunikasi dan berrelasi dalam Pekerjaan Sosial, memahami langkah-langkah intervensi sehingga masalah Klien dapat diselesaikan dengan tepat. Oleh karenanya kehadiran Profesi Pekerjaan Sosial sangatlah dibutuhkan didalam masyarakat. Apalagi dengan semakin kompleksnya kehidupan kita, jelas semakin banyak timbul masalah-masalah baik yang sifat nya individu, ataupun kolektif.

Daftar Pustaka

- Reid, K. 1999. *Truancy and Schools*.Routledge Taylor and Francis Group:New York and London.
- Skidmore. *Introduction to Social Work Sixth Edition*. Prentice Hall International Edition.
- Wibawa, Budhi, et al. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran: Bandung.

Sumber Jurnal/Artikel

- Azril. 2014. *Eksistensi Pekerja Sosial Diperkuat Akreditasi*. Tribun, 3 Oktober 2014.
- Badiklitkesos. 2013. *Sejarah Baru Perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia*. Jakarta: OHH.
- P4S Kemsos. 2014. *Standar Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pekerja Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Eksistensi Pekerja Sosial.2013. Kementrian Sosial. Jakarta : P4S
- Ayu. Kurangnya Pekerja Sosial Karena Belum Adanya Payung Huku,. 2014.

Sumber lainnya:

http://www.iasswaiets.org/uploads/file/20140627_SW%20definition-Indonesian.pdf

[http://syakhrudin.com/2013/02/06/Pekerjaan Sosial Sebuah Profesi/](http://syakhrudin.com/2013/02/06/Pekerjaan_Sosial_Sebuah_Profesi/) diunduh pada tanggal 15/09/2014 pukul 20:59

<http://www.iassw.aiets.org> diunduh pada tanggal 15/09/2014 pukul 19:15

[http://www.policy.hu/suharto/modul a/makindo 38.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_38.htm) diunduh pada tanggal 03/11/2014 pukul 22:33

<http://kesos.unpad.ac.id/?p=711> diunduh pada tanggal 03/11/2014 pukul 21;11

<http://www.kessosuinjkt.ac.id/kolom-kajur/36-kolom-kajur/72-bedanya-pekerja-sosial-dengan-profesi-lain.html#ixzz3I3KDfy00> diunduh pada tanggal 03/11/2014 pukul 21:21

<http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam-masyarakat.html> pada tanggal 13/12/14
pukul 00:22)

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL

Oleh

Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo

Email:

halimah.puti@gmail.com; desyhasanahsta@yahoo.co; hery_fortune@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang tema yang menurut penulis masih tabu di masyarakat, khususnya Indonesia, yaitu perempuan dan lembaga pemasyarakatan. Artikel ini di latar belakang dengan kasus kriminal yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, serta peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada narapidana wanita, contohnya tercatat pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA, Bandung, Jawa Barat , Lembaga Pemasyarakatan ini telah melebihi kapasitas penampungan atau *over capacity*. Seperti yang dilansir dalam website resmi Kementerian Hukum dan HAM, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA, Bandung berjumlah 371 orang, sedangkan kapasitas seharusnya adalah 325 orang. Banyaknya jumlah narapidana wanita yang terus meningkat ini tidak lepas dari peran dari lembaga pemasyarakatan,. Lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk oleh kementerian hukum dan HAM untuk mengatur, mengawasi serta menjamin hak hidup dari narapidana. Berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan, maka tidak lepas pula dari pola pembinaan yang dirancang untuk mengembalikan keberfungsian sosial narapidana pasca masa tahanan. Pola pembinaan yang disusun oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak luput dari peran pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial koreksional. Peran pembimbing kemasyarakatan adalah untuk mengawasi seluruh kegiatan narapidana dari pagi hingga malam hari. Kelebihan jumlah narapidana wanita pada Lapas Klas IIA Tangerang, menyebabkan peran pembimbing kemasyarakatan kurang optimal, tercatat dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas, satu orang pembimbing kemasyarakatan berbanding dengan 25 narapidana. Dalam pekerjaan sosial, ada metode yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, salah satunya adalah metode social group work, dimana metode ini dapat memudahkan para narapidana untuk saling bertukar cerita, apalagi ditambah dengan kesamaan latar belakang serta jenis kelamin sehingga membuat narapidana wanita lebih jujur dengan apa yang diungkapkan.

Kata Kunci : narapidana, wanita, Lembaga pemasyarakatan, program pembinaan

Pendahuluan

Permasalahan wanita yang dikatakan sebagai ‘tiang negara’ dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu, sebelum berkembang

masa emansipasi, wanita dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, begitu pula anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata ‘penjara’ atau lembaga pemasyarakatan maka yang terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu.

Seiring berjalannya waktu, setelah konsep emansipasi yang diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkembang, mulai banyak konsep kesetaraan yang dibuat, misalnya pemimpin perusahaan-perusahaan besar bahkan hingga pemimpin negara telah lumrah ditepati oleh perempuan. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, hingga korupsi. Tuntutan untuk hidup layak dan sejahtera secara financial ataupun emosi pribadi hingga pengaruh lingkungan yang tidak baik merupakan faktor tingginya tindak kriminalitas yang dilakukan perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau warga Binaan Pemasyarakatan tahanan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Berbicara tentang lembaga pemasyarakatan, maka tidak lepas kaitannya dengan program pembinaan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian sosial seorang narapidana hingga masa tahanan mereka selesai, untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka pasca masa tahanan, pada masing-masing lembaga pemasyarakatan memiliki program pembinaan masing-masing. Untuk ‘memulihkan’ keberfungsian sosial seorang narapidana maka peran pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu hal tersebut.

Artikel ini akan membahas tentang urgensi program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan khusus wanita, serta bagaimana pekerjaan sosial memandang hal tersebut.

Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga

Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita sendiri berdiri karena intervensi terhadap narapidana wanita harus berbeda dengan narapidana laki-laki maupun anak-anak, misalnya seharusnya ada pembeda dalam bentuk lapas serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan karena banyak beberapa ke-stress-an yang sering dialami kaum perempuan namun tidak dialami kaum laki-laki misalnya stress karena harus meninggalkan anak.

Klien Pekerjaan Sosial Koreksional

Setting pekerja sosial yang menangani isu lembaga pemasyarakatan serta kriminalitas merupakan setting dari pekerjaan sosial koreksional. Pekerjaan sosial koreksional dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu narapidana atau tahanan pada lembaga pemasyarakatan untuk dapat hidup normal kembali saat bermasyarakat ketika masa tahanan mereka telah habis.

Pekerjaan sosial koreksional, seperti setting pekerjaan sosial yang lain juga memiliki beberapa kategori klien. Ada beberapa kategori dari klien yang menerima perhatian, pertolongan, treatment, dan pengawasan melalui institusi pemerintahan. Beberapa contoh dari klien pekerjaan sosial koreksional, antara lain, seorang klien harus 'layak' dianggap sebagai seseorang yang berurusan dengan hukum. Pada kasus ini seseorang yang disebut 'sakit jiwa' dapat menerima bantuan Negara seperti diberikan proses hukum yang sesuai serta menerima pelayanan rumah sakit khusus, begitu pula dengan anak dengan disabilitas, lansia dan tuna netra harus dilindungi pula oleh hukum yang berlaku. Seorang anak yang memiliki

IQ dibawah 70 juga memiliki hak yang sama untuk belajar disekolah umum. Contoh lains, seorang pecandu obat-obatan juga dapat menerima pelayanan yang sama di rumah sakit umum seperti layaknya masyarakat lain. Tidak satupun dari klien tersebut yang benar-benar memiliki ‘kerusakan’ dalam hubungan mereka dengan masyarakat.

Klien dari pekerjaan sosial koreksional merupakan seseorang yang memiliki kesalahan dalam bermasyarakat dan secara legal bertanggungjawab dengan apa yang telah mereka perbuat. Klien telah melanggar hukum yang berlaku kemudian merusak keteraturan sosial yang telah ada oleh kesalahannya, untuk itu klien dari pekerjaan sosial koreksional adalah mereka yang menginginkan dirinya memperbaiki kesalahannya untuk diterima kembali oleh masyarakat. Salah satu dari klien pekerjaan sosial koreksional adalah narapidana wanita yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan wanita yang akan dibahas dalam artikel ini.

Konsep Gender

Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian kepada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Untuk memperjelas peran analisis gender, kita perlu memahami pradigma di balik gerakan dan teori feminisme. Gerakan feminis pada umumnya mereka mempunyai kesamaan kepedulian, yakni memperjuangkan nasib perempuan. Secara gerakan feminis terdiri dari dua bagian, besar dalam ilmu sosial yakni aliran status quo atau fungsionalisme dan aliran konflik.

Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum perempuan atau dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya. Melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik. Feminitas dan maskulinitas mempunyai ideologi yang berbeda dan kontradiktif. Feminitas adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Sementara maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Dalam perjalanannya maskulinitas mampu berhasil mendominasi dan hegemonic

Pertanyaan apakah dan mengapa ada masalah bagi kaum perempuan yang merupakan akar perdebatan isu perempuan telah memunculkan tanggapan yang sangat beragam. Tanggapan pertama memandang bahwa sesungguhnya tidak ada masalah bagi kaum perempuan sehingga sistem hubungan antara laki-laki dan perempuan saat ini adalah yang terbaik dan karena itu kondisi dan posisi kaum perempuan tidak perlu dipersoalkan. Responsi kedua datang dari mereka yang menganggap bahwa saat ini kaum perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang ditindas dan dieksploitasi. Setelah kita telaah secara mendalam, perbedaan gender ini ternyata telah mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotipe yang oleh masyarakat dikanggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan.

Konsep gender yang telah diterangkan sebelumnya, maka tak lepas kaitannya dengan masalah narapidana perempuan serta program pembinaan yang dijalankan. Contohnya, program pembinaan pada Lapas Klas IIA khusus wanita Bandung Jawa Barat mengadakan beberapa program pembinaan, namun dilihat dari program pembinaan yang dijalankan walaupun memiliki program ketrampilan dan lain-lain namun tidak mememberikan perhatian khusus mengenai sifat dasar wanita seperti ke-lemah lembut-an, penyaluran rasa sayang kepada anak-anak serta program-program lain yang tidak bisa secara general disamakan dengan lembaga pemasyarakatan umum.

Program Pembinaan

Pembinaan bertujuan agar ketika narapidana setelah telah menyelesaikan masa pidananya diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar dan dapat berpartisipasi didalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina agar dapat menggali potensinya dan mengembangkannya menjadi narapidana yang baik dan taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah keluar dari Lembaga Perasyarakatan

Pola pembinaan ini, seperti yang dikatakan oleh Vernon Fox, dalam bukunya ‘Introduction of Corection’ , mengatakan bahwa :

“ Proses *treatment* dicapai melalui beberapa cara. Secara umum ada masa penerimaan dan diagnosis, setelah itu tahanan di tempatkan di program yang sesuai. Kedua, periode penahanan dimana rata-rata 2 dan 1,5 tahun dikarakterisasi melalui penugasan kerja, program sekolah, dan program *treatment* individu dan kelompok terapi, tergantung pada fasilitas yang dimiliki institusi. Tahap terakhir adalah pembebasan bersyarat atau pembebasan. Selama periode *treatment*, personil koreksional bekerja dengan tiap tahanan. Pekerjaan mereka mungkin di bagian klasifikasi, edukasi/pendidikan, medis dan perawatan gigi, psikologis/psikiater, konseling individu, terapi kelompok, atau pelayanan lain yang diselenggarakan.”

Program Pembinaan Lapas Wanita dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Pada banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia baik umum, khusus wanita, hingga Lapas anak-anak ada satu fenomena yang seringkali dijumpai yaitu over capacity atau kelebihan muatan, hal tersebut berdampak pula pada pembibing pemasyarakatan yang memiliki tugas seperti pekerja sosial koreksional sulit untuk mengintervensi. Sebagai contoh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang hingga tahun 2012 (data 30 Mei 2012) tercatat 362 orang (Napi 304 orang + Tahanan 58 orang), kapasitas yang mampu ditampung Lapas hanya 250 orang. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas sampai 102 orang. Over kapasitas masih menjadi masalah pokok, karena kelebihan kapasitas itu, tak pelak menimbulkan sejumlah masalah di Lapas ini. Konsekuensinya, 1 orang petugas Lapas harus mengawasi lebih dari 25 orang narapidana. Jumlah ini jelas jauh dari kondisi ideal (1 dibanding 25).

Kasus tersebut bukan hanya terjadi pada Lapas Wanita Tangerang saja, hal serupa terjadi pula pada Lapas wanita klas IIA Bandung, Lembaga Pemasarakatan ini telah melebihi kapasitas penampungan atau over capacity seperti yang dilansir dalam website Kementerian Hukum dan HAM, jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA, Bandung berjumlah 371 orang, sedangkan kapasitas seharusnya adalah 325 orang.

Dalam hal pembinaan, pekerja sosial sangat berperan penting untuk kembali membantu keberfungsian sosial narapidana wanita, istilah ‘pembimbing pemsarakatan’ atau ‘wali’ dengan kata lain dirujuk sebagai definisi lain dari pekerja sosial. Jika dilihat dari perbandingan antara wali dengan narapidana yang ada, dapat dilihat bahwa banyak narapidana yang tidak terawasi dengan baik serta tidak mendapat pembinaan yang baik pula yang akan dikhawatirkan tidak memberi pengaruh apa-apa ketika narapidana telah menyelesaikan masa tahanan pada lembaga pemsarakatan tersebut.

Pada salah satu metode pekerjaan sosial ada metode Social Grup Work dimana orang-orang yang memiliki ‘masalah’ yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok kemudian mereka akan saling bercerita, bermain serta mendapatkan pesan dan kaitan dengan cerita orang lain yang berada dalam satu kelompok bersama mereka. Pola social group work ini dapat dimasukkan dalam salah satu pola pembinaan lembaga pemsarakatan wanita. Hal lain yang dapat menguatkan metode social group work untuk pola pembinaan adalah konsep gender, masing-masing individu khususnya wanita akan lebih nyaman untuk bercerita dan lebih terbuka apabila bercerita dengan sesama wanita. Hal ini akan membantu proses social group work, dan apabila dilakukan secara berkala akan berdampak pada diri narapidana kembali lebih merasa diterima dalam kelompoknya.

Selain itu, masalah yang disoroti dalam pola pembinaan narapidana adalah masalah minimnya pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial yang dimiliki lembaga pemsarakatan, setelah melihat beberapa fenomena yang dipaparkan di atas maka berikut adalah solusi atas keterbatasan tersebut yang ditawarkan :

1. Optimalisasi sumber daya dari pihak luar, misalnya penyelenggara kegiatan pembinaan dari dinas kesehatan, guru atau ustadz serta stakeholders lain yang mengatur pola pembinaan kerohanian serta petugas Lapas lain untuk tetap membimbing narapidana sekalipun bukan wali dari narapidana tersebut
2. Memaksimalkan peran kementerian hukum dan HAM untuk mendata narapidana yang ada sehingga kasus over capacity tidak terjadi lagi, karena selain mengganggu pola pembinaan hal tersebut akan pula mengganggu hak dari narapidana itu sendiri
3. Selama proses pembinaan, narapidana diajarkan untuk bisa saling memotivasi satu sama lain dan diberikan tugas khusus yang bisa merekatkan hubungan antar narapidana.

4. Melakukan assessment tentang pola pembinaan seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan narapidana agar mereka dapat berkembang serta kedepannya dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

embaga Pemasyarakatan hadir dikarenakan jumlah tindakan kriminal yang semakin meningkat dari hari ke hari karena bermacam faktor. Konsep lembaga pemasyarakatan meniadakan kata ‘penjara’ bagi pelaku tindak kriminal karena konsep ‘penjara’ dianggap tidak manusiawi bagi para pelaku yang seharusnya diharapkan dapat kembali hidup bermasyarakat dengan normal selama menjalani masa pembinaan.

Pada setiap lembaga pemasyarakatan pasti memiliki pola pembinaan tersendiri berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada UU tentang lembaga pemasyarakatan, misalnya pada lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Bandung, petugas mengharuskan para narapidana wanita bangun pada waktu subuh dan melanjutkan aktivitas olahraga kemudian membersihkan lingkungan sekitar, selain itu pelatihan ketrampilan seperti menjahit dan penyuluhan juga merupakan bagian dari pola pembinaan rutin yang diberikan kepada narapidana lembaga pemasyarakatan wanita.

Peran pekerja sosial dalam isu koreksional adalah sebagai pembimbing atau wali dalam pola pembinaan tersebut, namun sayangnya, fenomena di Indonesia banyak Leapas yang melebihi kapasitas, sehingga jumlah wali atau pembimbing lebih sedikit dari jumlah narapidana yang ada.

Saran yang dapat penulis berikan adalah pihak lembaga pemasyarakatan harus lebih memperhatikan narapidana dengan memberikan hak mereka yaitu diberi pola pembinaan yang baik dengan cara memenuhi kebutuhan akan wali atau pendamping pemasyarakatan. Metode social group work dapat diterapkan pula dalam proses pembinaan ini karena akan membantu narapidana merasa diterima kembali oleh kelompok tersebut dan nantinya diharapkan narapidana akan merasa diterima pula di masyarakat luas yang akan hidup berdampingan dengan mereka kelak.

Daftar Rujukan

Buku :

Fakih, Mansoer.1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Carney, Louis P. 1980, Corrections Treatment and Philosophy. Prentice-Hall, Inc
Englewood Cliffs

Wibhawa, budhi dkk. 2010. Dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Bandung: Widya
Padjadjaran

Rujukan elektronik :

*id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diunduh pada 3 November 2014,
11:18*

“POLA KOMUNIKASI INTERPESONAL ANTARA PETUGAS,
NARAPIDANA DAN PEMBESUK LEMBAGA PEMASYARAKATAN
“[http://digilib.unmuhjember.ac.id/POLA KOMUNIKASI INTERPESONAL
ANTARA PETUGAS, NARAPIDANA DAN PEMBESUK LEMBAGA
PEMASYARAKATAN JEMBER](http://digilib.unmuhjember.ac.id/POLA_KOMUNIKASI_INTERPESONAL_ANTARA_PETUGAS,_NARAPIDANA_DAN_PEMBESUK_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_JEMBER) diunduh pada 3 november 2014, 22.30
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial/ diunduh pada 4 November 2014,
07.00

Jurnal :

Jurnal Info Baru. “ Pola Pembinaan Napi Wanita: Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang”. Volume 10 Agustus 2014

Hasil Penelitian :

Teguh, Santoso, 2013, PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM BIDANG KRIMINALITAS(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA). (e-book)

COMMUNITY BASED DISASTER MANAGEMENT

Oleh :

Ridwan Herianto, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hadiyanto A. Rachim

Email:

heriantoridwan@gmail.com; soninulhakim@yahoo.com; hrachim@gmail.com

Abstrak

Urgensi dari manajemen bencana adalah pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang bergeser dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan preparedness. Hal yang paling mendesak adalah menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman dan resiko bencana. Penciptaan *community-based disaster* dengan kata lain membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pada sebelum, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana. Dalam praktiknya dibutuhkan peran dari pekerja sosial. Peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam pemberfungsian masyarakat melalui *community-based disaster*. Hal tersebut dapat berupa dalam pendampingan dan perancangan *community-based disaster* bersama masyarakat maupun menghubungkan masyarakat sebagai basis dengan stakeholders. Dapat melalui kegiatan formal maupun informal dalam bentuk sosialisasi maupun edukasi dan simulasi. Penerapan *community-based disaster* tentunya memiliki kelemahan dan kunci keberhasilan tergantung pada proses dan aktualisasinya.

Kata kunci: manajemen bencana, paradigma, *community based disaster management*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi untuk timbulnya bencana alam, seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi peristiwa alam lainnya. Hal ini terjadi karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tersebar mulai Sabang sampai Merauke. Dalam kaitannya dengan fenomena alam tersebut dibutuhkan upaya penanggulangan bencana dengan memperhatikan faktor penyebab terjadinya bencana tersebut.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 menyatakan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam termasuk manusia itu sendiri (karena konflik maupun teror) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana haruslah dilakukan oleh semua pihak, seperti pemerintah, pekerja sosial, masyarakat, maupun stakeholders lain yang dapat terkait. Hal yang paling mendesak adalah menumbuhkan kesadaran

dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman dan resiko bencana.

Pekerja sosial dalam praktiknya terutama pada *community based practice* sangat berperan dalam intervensi pengorganisasian masyarakat menghadapi bencana. Peran tersebut adalah melalui pembentukan *Community-based disaster* di masyarakat. Penciptaan *community-based disaster* dengan kata lain membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana pada sebelum, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana.

Fenomena Manajemen Bencana Di Indonesia

Penanggulangan bencana memiliki tiga siklus: Pencegahan–Tanggap Darurat–Pemulihan. Tren yang masih terjadi di Indonesia dalam berhadapan dengan bencana adalah pada tanggap darurat. Padahal meskipun tidak ada kejadian yang memerlukan tanggap darurat, seharusnya tetap ada upaya-upaya permanen untuk pencegahan. Dalam tahap pencegahan dengan adanya edukasi terhadap masyarakat agar bergerak secara mandiri dan gotong royong dalam berhadapan dengan bencana.

Meskipun kita masih belum memiliki teknologi secanggih negara lain tetapi itu bukanlah alasan bahwa kita tidak mementingkan pentingnya pencegahan bencana dalam pra darurat (pencegahan) . Kita memiliki sumber daya manusia yang banyak yang berpotensi diarahkan untuk lebih “dewasa” dalam berhadapan dengan bencana.

Jika dibandingkan dengan Jepang yang merupakan negara yang sama rawannya dengan Indonesia terkait bencana, ada beberapa perbedaan signifikan antara manajemen bencana ala Jepang dengan yang ada di negeri ini. Di Jepang semakin sering bencana, semakin terlatih dan semakin baik pola penanganan bencana. Berbeda dengan di Indonesia, meski sering dilanda bencana, akan tetapi kapasitas bangsa ini dalam menanggulangi bencana nyaris belum banyak berubah. Poin penting yang dapat diambil adalah perlunya perubahan paradigma masyarakat Indonesia untuk bergerak secara mandiri dan gotong royong (mempersiapkan diri) bukan berpasrah dan hanya menunggu bantuan tanggap darurat pemerintah dalam menghadapi bencana.

Selain itu jika berbicara tentang pemerintah, maka akan terkait dengan kerawanan yang terjadi pada badan penanggulangan bencana di Indonesia (BNPB dan BPBD) yang hanya diisi dengan personel dan peralatan ala kadarnya. Mereka lebih mengandalkan pada personil yang dipinjam dari instansi lain seperti dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, bahkan hingga BPPT atau Bakosurtanal dalam bentuk Tim Satuan Respon Cepat (SRC) atau Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Teorinya, personil pinjaman ini sudah sekuat siap dikerahkan sewaktu-waktu ada bencana. Kenyataan di lapangan tidak semudah itu. kadang-kadang anggota SRC ataupun TAGANA sedang menghadapi tugas pokok sehari-hari di instansinya. Dan tidak selalu mudah untuk setiap saat meninggalkan tugas pokoknya tersebut dan dikerahkan ke daerah bencana.

Berdasarkan pembahasan tersebut, jika kita ambil sebuah contoh kasus bencana yang pernah terjadi dan membandingkan manajemen bencana di Indonesia dengan Jepang seperti gempa. Pada hal pra bencana lah yang begitu membedakan manajemen bencana di Indonesia dengan Jepang. Kalau di Indonesia proses pencegahan bencana hanya pada edukasi sederhana seperti tindakan apa yang dilakukan saat gempa (seperti berlindung di bawah meja) dan sasarannya kebanyakan anak sekolah. Selain itu dari sisi lain, masyarakat Indonesia cenderung larut dalam rasa kehilangan setelah bencana. Sedangkan di Jepang pada proses pencegahan sudah dibentuk komunitas yang berbasis masyarakat yang berfungsi untuk bergerak secara mandiri dan gotong royong dan terdukasi dengan baik sehingga masyarakat Jepang sudah terlatih dengan disiplin dan ketika bencana sudah terjadi, mereka tidak larut dalam kesedihan dan segera saling membahu untuk bangkit.

Pembaruan Manajemen Bencana di Indonesia

Dari pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari penanganan bencana di Indonesia:

- Pemerintah masih belum maksimal dalam penangan bencana.
- Perlunya paradigma penanggulangan bencana yang bergeser dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan preparedness.
- Perlunya perubahan paradigma masyarakat Indonesia dalam berhadapan dengan bencana, dari yang berpasrah menjadi menyiapkan diri dalam berhadapan dengan bencana.
- *Community based disaster management* adalah opsi yang menawarkan solusi terhadap penanganan bencana di Indonesia yang lebih baik.

Melihat betapa pentingnya manajemen bencana di Indonesia kita tidak dapat menyalahkan berbagai pihak, justru lebih baik merefleksi diri dan membangun karakter manusia yang mau bersama-sama melakukan perubahan pada manajemen bencana. Dengan kata lain penciptaan komunitas yang siap menghadapi bencana. Komunitas ini tentunya akan diberi edukasi dan pendampingan agar dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana yang terkadang datang begitu saja. Juga agar memiliki paradigma yang baru dalam memandang bencana, bukan untuk berpasrah tetapi menyiapkan diri.

Community Based Disaster Management (CBDM)

Berangkat dari pemikiran bahwa ketika masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri maka otomatis masyarakat tersebut sudah dapat berdaya atau dengan kata lain berfungsi secara sosial. Demikian pula dalam menghadapi bencana yang merupakan masalah sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, hadirilah *Community Based Disaster Management* (CBDM) sebagai sikap baru untuk masyarakat Indonesia dalam berhadapan dengan bencana.

Community Based Disaster Management (CBDM) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko

bencana lokal setempat. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya dalam melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/pengurangan risiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Namun pokok dari keduanya adalah penyelenggaraan yang seoptimal mungkin memobilisasi sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasainya serta merupakan bagian internal dari kehidupan keseharian komunitas (Paripurno, 2006a).

Community-based disaster membantu masyarakat mengorganisir dirinya untuk mandiri menghadapi bencana baik dari pra, saat terjadi, dan pasca bencana. Selain hal yang telah disebutkan, pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang bergeser dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan preparedness adalah hal utama. *Community-based disaster* dapat membantu meminimalisir korban bencana, kerugian yang diakibatkan bencana, maupun ketergantungan terhadap bantuan. Pentingnya penciptaan *community-based disaster* tentunya perlu didukung dengan penciptaan ruang yang dapat memfasilitasi pekerja social sebagai salah satu pihak yang bergerak di setting primer dan sekunder manajemen bencana yang berbasis komunitas. Hal tersebut dapat berupa dalam pendampingan dan perancangan *community-based disaster* bersama masyarakat maupun menghubungkan masyarakat sebagai basis dengan stakeholders. Dapat melalui kegiatan formal maupun informal dalam bentuk sosialisasi maupun edukasi dan simulasi. Melalui berbagai kegiatan pelatihan formal/informal fasilitator masyarakat maupun relawan-relawan desa menekankan pada beberapa hal: (a) pengenalan konsep dasar pengurangan resiko bencana, (b) pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, (c) pelatihan pengenalan standar minimum dalam situasi darurat, (d) pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (e) gender dan bencana (f) penyusunan rencana kontijensi kedaruratan dan standar operasional dan (g) teknis manajemen darurat dan berbagai materi dasar yang dianggap relevan. Berikut tahapan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman:

1. Pra Bencana
 - 1.1 Kesiagaan
 - 1.2 Peringatan Dini
 - 1.3 Mitigasi
2. Saat Bencana
 - 2.1 Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana
 - 3.1 Rehabilitasi
 - 3.2 Rekonstruksi

Kelemahan Dalam Manajemen Bencana

Walau bagaimanapun baiknya prosedur dan sistem yang dibangun jika tidak dilakukan dengan konsisten tentu tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan berbagai hal yang dapat mengganggu kelancaran dan

keberhasilan manajemen bencana karena pada dasarnya sebaik apapun manajemen bencana pasti tetap saja ada celah yang dapat melemahkan.

Menurut penelitian National Safety Council (Carl Griffith, National Safety Council Utilities Division Manager) ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan sistem manajemen bencana dalam suatu organisasi yaitu:

1. Kurangnya dukungan manajemen puncak
Manajemen bencana sering hanya menjadi retorika dan tidak didukung secara politis dan teknis. Tanpa dukungan manajemen tentu program manajemen bencana tidak akan berhasil baik.
2. Kurangnya keterlibatan dan dukungan pekerja dan masyarakat
Program manajemen bencana tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat atau anggota pekerja yang akan menjadi subyek dalam proses tanggap darurat.
3. Kurang atau tidak ada perencanaan
Manajemen bencana juga tidak dilengkapi dengan perencanaan yang baik sehingga ketika terjadi bencana semua prosedur berantakan.
4. Kurangnya pelatihan dan pendidikan
Tidak dilakukan pembinaan dan pelatihan yang diperlukan untuk masing-masing bencana baik untuk tim penanggulangan maupun untuk anggota masyarakat yang terkena bencana.
5. Tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk khusus untuk mengkoordinir sistem tanggap darurat
6. Sistem tanggap darurat tidak dievaluasi atau disempurnakan secara berkala
Kebiasaan yang paling buruk adalah tidak pernah melakukan evaluasi, terutama jika bencana tidak pernah datang, sehingga program bencana terlupakan.
7. Sistem komunikasi dan peringatan dini tidak memadai. Sebagai akibatnya, ketika terjadi bencana semua pihak panik dan prosedur tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak terintegrasi dengan prosedur operasi misalnya untuk mematikan mesin atau pabrik.
8. Pekerja tidak dijelaskan mengenai tindakan atau langkah yang dilakukan jika terjadi keadaan darurat

Seluruh kelemahan di atas dapat teratasi jika seluruh elemen tanggap darurat di atas dijalankan dengan baik dan konsisten.

Kunci Keberhasilan

Pengembangan manajemen bencana memang tidak mudah dan memerlukan kerja keras dan berkesinambungan. Untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan dan mengembangkan manajemen bencana diperlukan hal sebagai berikut.

- a. Dukungan manajemen secara penuh dan konsisten yang ditunjukkan secara nyata. Manajemen bencana harus dianggap sebagai program strategis untuk memelihara dan menjaga hasil pembangunan atau proses produksi.

- b. Peran serta semua pihak yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses manajemen bencana sesuai dengan porsinya masing-masing. Semakin tinggi keberhasilannya.
- c. Ketersediaan sumberdaya yang memadai untuk menangani bencana sesuai dengan kondisi dan sifat masing-masing.

Penutup

Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana haruslah dilakukan oleh semua pihak, seperti pemerintah, pekerja sosial, masyarakat, maupun stakeholders lain yang dapat terkait. Hal yang paling mendesak adalah menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman dan resiko bencana.

Pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang bergeser dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan preparedness. *Community-based disaster* dapat membantu meminimalisir korban bencana, kerugian yang diakibatkan bencana, maupun ketergantungan terhadap bantuan. Pentingnya penciptaan *community-based disaster* tentunya perlu didukung dengan penciptaan setting yang dapat memfasilitasi pekerja sosial.

Referensi Buku:

- Arief Mustofa Nur. 2009. *Bencana Geologi Dan Manajemen Pengelolaannya. Modul Pelatihan*. Balai Informasi dan Konservasi Kebumihan Karangsambung LIPI.
- Ramli, Suhatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta. Dian Rakyat.
- UNDP. *Panduan: Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas*. 2012. Agus Rahmat, Manajemen Mitigasi Bencana.
- Eko Teguh Paripurno. *Modul Manajemen Bencana Seputar Beberapa Bencana di Indonesia*

Referensi Lain:

- <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=469>, diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 17.18 WIB
- <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=509>, diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 17.27 WIB
- http://www.academia.edu/7280326/Penanggulangan_Bencana_dan_peran_pekerja_sosial, diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 17.49 WIB
- http://www.scribd.com/doc/50639641/Belajar-Manajemen-Bencana-Dari-Jepang#force_seo, diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 19.34 WIB

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI PERKASA PALEMBANG

Oleh
Metra Naibaho, Hetty Krisnani, & Eva Nuriyah H

ABSTRAK

Penyandang disabilitas dalam kehidupannya sering menghadapi masalah masalah yang menghambat perkembangan kepribadian maupun mentalnya. Banyak tekanan tekanan yang datang kepada penyandang disabilitas dalam menghadapi kehidupannya. Misalnya adalah yang berasal dari keluarga, teman dekat maupun dari tengah tengah masyarakat. Dalam mengembangkan kemampuannya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan penguatan atau dukungan yang baik oleh masyarakat dimana dia tinggal.

Dalam hal ini perlu diadakan rehabilitasi sosial untuk memberikan dorongan kepada penyandang disabilitas supaya bisa mengembangkan kemampuannya lebih lagi dan agar dapat melihat kelebihan meskipun memiliki kekurangan, namun bisa berdaya guna di tengah tengah masyarakat. Rehabilitasi sosial diharapkan memberikan pengaruh pada perkembangan mental penyandang disabilitas. Sangat banyak penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk mengembangkan diri dan kemampuan karena tidak adanya dukungan sosial dari masyarakat dan juga karena tidak adanya rehabilitasi sosial.

Melalui rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diberikan materi materi berupa penguatan mental, pengembangan kemampuan, dan pengembangan kreativitas sehingga tidak dianggap sebagai manusia yang tidak produktif. Disamping itu diajarkan untuk mampu menghadapi lingkungan masyarakat, keluarga dan sebagainya agar ketika mereka masuk dan bergabung dengan masyarakat, tidak ada pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas.

PENDAHULUAN

Definisi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat)

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental;

Penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan atau gangguan pada alat gerak tubuh meliputi tulang, otot dan persendian baik dalam

struktur maupun fungsinya sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara wajar. Penyandang disabilitas berhak untuk menjalani kehidupan mereka walau mereka memiliki keterbatasan. Disamping itu penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Ini lah yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah sesuai dengan undang undang negara republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 pasal 8 dimana “Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas”. Pemerintah dalam hal ini membangun panti sosial tersebut untuk mewujudkan nya, dimana dengan di bangun nya panti sosial ini akan membuat keterbatasan tersebut menjadi kelebihan sehingga penyandang disabilitas mampu memenuhi kebutuhan mereka nantinya.

Kecacatan adalah suatu kondisi dimana adanya kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi seseorang untuk melakukan aktivitas secara selayaknya. Mengacu, pada pasal 1, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Teori kecacatan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ;

Disability adalah keterbatasan atau kekurang mampuan untuk melaksanakan kegiatan secara wajar bagi kemanusiaan yang diakibatkan oleh kondisi impairment.

Menurut NASW (asosiasi pekerja sosial Amerika Serikat) :

Disability may be defined as a reduction in personal coping and adaptive function that causes significant limitation in overall daily living. (Kecacatan dapat didefinisikan sebagai keadaan berkurangnya fungsi pribadi dalam memenuhi kebutuhan dan daya penyesuaiannya sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keseluruhan penampilan hidup sehari-hari).

Ciri-ciri Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Cacat Fisik, yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan gerak.
2. Penyandang Cacat Mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yaitu individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya.

Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Penyandang Cacat Fisik

a. Tuna Netra

Berarti kurang penglihatan. Keluarbiasaannya ini menuntut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tuna netra dapat berkembang secara optimal.

b. Tuna Rungu/ Wicara

Tuna Rungu, ialah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. Sedangkan Tuna Wicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta produksi suara.

c. Tuna Daksa

Secara harfiah berarti cacat fisik. Kelompok tuna daksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit epilepsy (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot, serta yang mengalami amputasi.

d. Tuna Laras

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

e. Tuna Grahita

Sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik :

- Eks psikotik penderita gangguan jiwa, sering mengganggu.
- Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku.

2) Penyandang Cacat Mental Retardasi :

- Tuna Grahita Ringan (Debil)

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

- Tuna Grahita Sedang (Embisil)

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

3) Tuna Grahita Berat (Idiot)

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

2. Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda)

Tuna Ganda

Kelompok penyandang jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Jenis jenis pengembangan keterampilan

Penyandang disabilitas dalam hal ini agar tidak ketergantungan dengan lingkungannya sebaik nya diberikan pelatihan pelatihan yang dapat membuat mereka menjadi produktif dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan memberikan pelatihan pelatihan dapat membuat mereka menjadi percaya diri dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan tidak bergantung kepada orang lain di sekitarnya. Penyandang disabilitas menjadi tidak bergantung kepada orang lain dan tidak menjadikan kekurangan fisik menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk dapat bekerja atau pun untuk berkreativitas. Dengan pelatihan mereka akan mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain bahkan bisa membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Departemen Sosial RI yang dalam hal ini merupakan departemen yang menanungi Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk membantu mengembangkan percaya diri dan kreativitas penyandang disabilitas khususnya di daerah Palembang. Penyandang disabilitas di panti sosial bina daksa di berikan berbagai pelatihan yang dapat menumbuh kembangkan kreativitas dan meningkatkan percaya diri mereka agar tidak merasa diasingkan. Selain itu penyandang disabilitas di bantu untuk membuka diri dan menjalani proses keterampilan tanpa di pungut biaya selama proses pelatihan.

Jenis bimbingan latihan dan keterampilan meliputi :

1. Penjahitan baik dilakukan oleh laki laki atau perempuan. Pada pelatihan penjahitan akan di ajarkan bagaimana untuk menjahit dengan mesin dan bisa untuk menghasilkan suatu barang jadinya.
2. Elektro meliputi latihan untuk memperbaiki barang barang elektronik.

3. Las Listrik/ Karbit seperti membuat gerbang atau pun menghasilkan barang barang yang terbuat dari besi.
4. Pertanian terpadu berisi pelatihan bagaimana cara cara untuk bertani secara benar dan bisa menghasilkan dengan baik dan nilai jual tinggi.
5. Komputer berisi pelatihan menjadi seorang yang bisa mengerti dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan komputer.
6. Otomotif Motor yaitu pelatihan agar bisa memperbaiki mesin ataupun body motor.
7. Kerajinan Wanita dikhusus kan untuk wanita dimana pelatihan nya berisi pelatihan untuk membuat kerajinan yang berdaya guna seperti membuat tas, makanan makanan dan masih banyak lagi.
8. Salon

Disamping itu ada bimbingan pemakaian alat bantu :

1. Ergosyky (Sepeda Statis) alat untuk menguatkan otot kaki
2. Rowing Machine alat untuk menguatkan tangan

Disamping kegiatan kegiatan di atas masih ada kegiatan ekstra kulikuler berupa tata boga dan kesenian.

Pengertian rehabilitasi

Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang tidak berbeda dengan manusia normal pada umum nya, hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang dimiliki sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan nya. Kebutuhan penyandang disabilitas seperti:

1. Kebutuhan fisik

Yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Apabila kebutuhan fisik ini dapat di penuhi akan memungkinkan penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas lainnya karena sudah ada energy yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari hari.

2. Kebutuhan psikologis

Didalam nya termasuk kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan merasa bebas dan merdeka. Kebutuhan akan rasa aman yaitu mereka bebas melakukan aktivitas mereka tanpa ada rasa takut atau intimidasi dari orang lain yang dapat menurunkan tingkat keinginan mereka untuk melakukan aktivitas.

3. Kebutuhan sosial

Yang termasuk di dalam adalah rasa ingin di hargai dan diakui keberadaannya. Dalam hal ini, penyandang disabilitas juga ingin di hargai orang meskipun mereka memiliki keterbatasan dan mereka merasa diakui karena mereka ingin di ikut sertakan ooleh masyarakat dan juga ingin di akui keberadaannya bukan sebaliknya.

Permasalahan Yang di Alami Oleh Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sangat erat kaitannya dengan permasalahan. Baik itu yang berasal dari lingkungan maupun dari dalam dirinya sendiri. Menurut Ngadijo (1989:19), permasalahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan pribadi

1. Aspek jasmani

Permasalahan ini berkaitan dengan hilangnya organ tubuh yang mengakibatkan mobilitas jasmani menjadi kurang dan aktivitas sehari-harinya menjadi terganggu.

2. Aspek mental

Hambatan mental yang timbul pada penyandang disabilitas tubuh antara lain sifat rendah diri, mudah tersinggung, apatis dan kurang percaya diri pada kemampuannya.

3. Aspek sosial kemasyarakatan

Dengan kedisabilitasannya yang disandangnya, seseorang kurang dapat mengikuti kegiatan yang diadakan di lingkungan masyarakatnya, sehingga hubungan pergaulan dengan masyarakat atau pihak lain menjadi terbatas. Keterbatasan juga dipengaruhi adanya nilai masyarakat yang memandang penyandang disabilitas tubuh sebagai obyek yang harus dikasihani.

4. Aspek ekonomi

Penyandang disabilitas pada umumnya sulit untuk mendapat pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghidupan. Sulit bagi penyandang disabilitas untuk menemukan pekerjaan yang layak.

5. Aspek hukum

Di Indonesia penyandang disabilitas tidak mendapatkan advokasi yang baik, terbukti dengan masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan porsi bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di dalamnya.

b. Permasalahan keluarga

Masih ada keluarga yang memandang bahwa apabila ada anggota keluarga yang disabilitas maka dianggap bahwa anak yang disabilitas tersebut adalah anak yang membawa musibah dan membuat malu keluarga.

c. Permasalahan masyarakat

Penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan ikut berkontribusi di dalamnya. Dalam hal ini, penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan tidak dapat melakukan fungsi dan kewajiban dirinya sebagai seorang anggota masyarakat.

Tinjauan mengenai rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi

Rehabilitasi didefinisikan sebagai "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian

pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia” (Banja,1990:615).

Menurut Soewito dalam (Sri Widati, 1984:5) menyatakan bahwa:

Rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi continuous process, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan Negara.

Suparlan (1993:124) mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.36/1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan menurut PP No.72/1991 tentang PLB dan SK Mendikbud No.0126/U/1994 pada lampiran 1 tentang Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa, disebutkan bahwa rehabilitasi merupakan upaya bantuan medik, sosial, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan, dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Rehabilitasi

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu penca mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.

Tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak/peserta didik berkelainan yang berguna (usefull). Pengertian berguna tersebut mengandung dua makna, yaitu: Pertama, peserta didik mampu mengatasi masalah dari kecacatannya, dapat menyesuaikan diri terhadap kekurangan-kekurangannya, serta mempunyai kecekatan-kecekatan sosial dan vokasional.

Kedua, pengertian berguna juga mengandung makna bahwa peserta didik memiliki kekurangan-kekurangan. Artinya kondisi pencapaian maksimal mungkin

tidak sama dengan anak-anak normal, dan dalam kondisi minimal peserta didik cacat tidak bergantung pada orang lain dalam mengurus dan menghidupi dirinya.

Di samping itu, aspek berguna juga dapat mencakup self realization, human relationship, economic efficiency, dan civic responsibility. Artinya, melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi, peserta didik cacat diharapkan:

- a. Dapat menyadari kelainannya dan dapat menguasai diri sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain (self realization).
- b. Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya tersebut. Dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dapat mengerti batas-batas dari kelakuan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, etika pergaulan, agama, dan tidak memisahkan diri, tidak rendah diri, dan tidak berlebihan, serta mampu bergaul secara wajar dengan lingkungannya (human relationship)
- c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupannya kelak di bidang ekonomi (economic efficiency). Di samping itu kemampuan keterampilan menggunakan organ gerak tertentu yang sudah terampil (misalnya mampu menggunakan kursi roda) diusahakan tetap terjaga keterampilannya.
- d. Memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakat, minimal ia tidak mengganggu kehidupan masyarakat (civic responsibility).

Disamping mengadakan pelatihan, Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa mengadakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dimana dengan adanya rehabilitasi sosial di harapkan mampu mengembangkan percaya diri mereka dan mental penyandang disabilitas yang ada di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang.

Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas berfungsi untuk tindakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan/pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan/penjagaan (promotif). Disamping memberikan pelatihan, diberikan juga rehabilitasi sosial, dimana rehabilitasi sosial berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas.

Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa memiliki 4 orang pekerja sosial yang memberikan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas beraneka ragam. Ada yang tidak bisa melihat (tuna netra) ada juga yang salah satu anggota tubuhnya tidak lengkap (misalnya adalah tangan atau kaki). Setiap penyandang disabilitas tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya adalah seorang tuna netra perlu untuk di berikan rehabilitasi sosial dengan memberikan motivasi berupa pemberian materi materi yang membangkitkan motivasi tuna netra tersebut. Motivasi tersebut misalnya adalah mengadirkan seorang tuna netra yang sudah sukses dan diharapkan mampu memotivasi tuna

netra tersebut untuk dapat mengembangkan mental nya sehingga dia bisa ikut sukses.

Namun di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa penyandang disabilitas beragam jenis dan pekerja sosial memberikan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas berbeda beda dan tidak bisa di samakan. Dengan di lakukan nya kesamaan rehabilitasi di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa maka pengembangan mental penyandang disabilitas di panti sosial ini tidak akan berhasil dengan benar dan baik.

Ini lah yang menjadi permasalahan, perlakuan yang sama terhadap beragam penyandang disabilitas di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa tidak menghasilkan sesuatu perubahan yang signifikan terhadap penyandang disabilitas di panti tersebut. Tuna netra seharus nya diberikan rehabilitasi sosial yang berbeda dari penyandang disabilitas lain nya, hal ini tentunya akan lebih efektif dan membuat para penyandang disabilitas mengembangkan mental untuk dapat mengembangkan kreativitas nya. ketika di kelas, membuat kerajinan tangan seperti accessories, membuat telur asin, budi daya jamur dalam hal proses penanaman, penyiraman, sampai penjualan.

Aspek kekeluargaan melekat pada yayasan tersebut, adanya nilai yang baik di masyarakat membuat yayasan tersebut mendapatkan simpati dari masyarakat luas sehingga banyak orang yang berkunjung dan melihat bagaimana aktivitas pengembangan yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Komitmen dalam melayani dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan aset utama dalam keberlangsungan program.

Yayasan ini memiliki tanggung jawab dengan memberikan pelayanan kepada tuna netra ganda. kondisi dimana setiap penyandang nya memiliki dua atau lebih hambatan, dengan hambatan utama pada penglihatan (buta atau low vision). Belum banyak lembaga yang mewadahi para penyandang disabilitas dengan dua atau lebih hambatan. Penyandang disabilitas yang berada di yayasan ini berjenis laki-laki dan perempuan dengan jumlah kurang lebih 68 siswa, dengan staff, pegawai berjumlah 52 orang, serta sukarelawan yang membantu proses pemberian pelayanan kepada para penyandang. Tidak semua penyandang menetap di yayasan ini, ada juga penyandang yang diantar dan dijemput oleh keluarga. Aspek pembiayaan juga sangat beragam, ada yang menggunakan biaya mandiri, subsidi, ataupun bebas dari biaya.

PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan alat gerak baik meliputi tulang, alat sendi gerak baik dalam struktur maupun fungsinya. Dalam hal ini struktur maupun fungsi tubuh yang ada pada diri seseorang mengalami kelainan atau bahkan tidak ada. Dalam hal ini hal tersebut mengganggu aktivitas dari seseorang sehingga tidak dapat melakukan aktivitas layak nya manusia pada umum nya.

Penyandang disabilitas dalam keseharian nya seringkali mendapatkan gangguan dalam menjalankan aktivitasnya, baik yang berasal dari dalam diri

mereka sendiri, dari lingkungan, dari keluarga maupun dari teman teman sekitarnya. Dari dalam diri sendiri penyandang disabilitas bahkan sudah ada pemikiran bahwa dia memiliki kekurangan dan tidak mungkin dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan nya. Ada yang merasa minder, putus asa dan malah memisahkan diri dengan lingkungan nya.

Dari lingkungan keluarga tentu ada beberapa keluarga yang tidak menerima dengan baik keadaan dari anggota keluarga mereka yang mengalami disabilitas tersebut. Ada keluarga yang tidak mengharapkan keberadaan si penyandang disabilitas sehingga dia malah tertekan dan menjadi susah dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan kemampuannya.

Dari lingkungan, penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya, misalnya adalah ketika penyandang disabilitas berada di lingkungan nya banyak yang menganggap jika orang tersebut hanyalah orang yang menyusahkan dan tidak berdaya guna bagi lingkungan sekitar. Bahkan ada juga penyandang disabilitas yang menjadi bahan bulliying oleh orang di lingkungan nya.

Tidak dapat di pungkiri bahwa penyandang disabilitas sangat banyak mendapatkan tekanan tekanan dari dirinya sendiri bahkan dari lingkungan sekitarnya. Ini lah yang menjadi perhatian pekerja sosial di dinas sosial provinsi Sumatera Selatan. Selain memberikan pengembangan kreativitas bagi penyandang disabilitas, pekerja sosial juga memberikan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di provinsi Sumatera Selatan. Pekerja sosial disamping memberikan pengembangan keterampilan namun juga memberikan program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial menjadi jawaban akan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial dalam hal ini diberikan di sela sela kegiatan pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas yang di maksud adalah latihan keterampilan untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Bagi perempuan diberikan pelatihan salon dan kursus kecantikan, bagi laki laki diberikan pelatihan seperti las karbit dan elektronik.

Program di atas diberikan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan dirinya supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Diharapkan setelah keluar dari panti, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan mempergunakan bekal yang telah diterima oleh mereka ketika masa pelatihan. Atau dengan kata lain mereka mempraktikkan apa yang mereka dapatkan selama pelatihan diberikan.

Dengan mengadakan pelatihan, penyandang disabilitas menjadi orang orang yang mampu mengembangkan kemampuan dan tidak bergantung pada orang lain. Hal ini lah yang menjadikan mereka meningkat percaya dirinya dan mampu mengembangkan dirinya.

Dalam mengembangkan dirinya, banyak sekali rintangan yang di hadapi oleh penyandang disabilitas. Tidak lah mudah bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan nya, banyak faktor faktor yang menghambat dalam perjalanannya. Ini lah yang menjadi konsentrasi pekerja sosial, kemauan untuk

berkembang terkadang tidak hanya berasal dari diri individu melainkan ada yang berasal dari luar diri individu tersebut. Misalnya saja, ada dorongan dari seorang individu untuk mengembangkan dirinya, namun dorongan dari dalam dirinya itu di rasa tidak cukup dan butuh dorongan dari orang-orang sekitarnya.

Keinginan penyandang disabilitas akan hal ini di jawab oleh pekerja sosial dengan memberikan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah program yang di canangkan untuk mengembalikan kondisi semula dimana tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah memulihkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas caranya adalah dengan memberikan dan meningkatkan rasa percaya diri agar mampu keluar dan dapat mengatasi masalah yang dialaminya. Melalui rehabilitasi sosial diharapkan penyandang disabilitas mampu menunjukkan jati diri dan kemampuannya di depan banyak orang.

Salah satu penyandang disabilitas yang bernama Peni berasal dari desa pelabuhan dalam kecamatan pemungutan kabupaten Ogan Ilir yang mengalami kebutaan sejak lahir diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk masuk dan mengikuti kegiatan di panti sosial kemudian mendapatkan rehabilitasi sosial mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan rehabilitasi sosial banyak sekali manfaat yang didapat, misalnya sebelum mendapat rehabilitasi sosial dia adalah sosok pemalu, tidak percaya diri dan bahkan putus asa dan di tinggalkan oleh teman-temannya.

Kemudian klien ini diberikan kesempatan oleh pemerintah Ogan Ilir untuk mendaftar di panti sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang, selain mendapatkan pengembangan kreativitas, klien ini juga mendapatkan program rehabilitasi sosial.

Ada suatu perbedaan yang di rasakan oleh klien tersebut. Pada mulanya memang sulit baginya untuk melakukan adaptasi dan sulit untuk mengeluarkan bakat-bakatnya. Pada mulanya klien ini masih lebih banyak berdiam diri dan masih memikirkan bagaimana respon masyarakat sekitar tentang dirinya. Pada dasarnya dia berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya cukup rendah, apalagi ditambah dengan keadaan klien yang secara fisik kurang. Hal ini semakin menambah banyaknya tekanan yang diterimanya. Baik itu konflik dari batinnya sendiri maupun yang berasal dari keluarga, teman-teman dan lingkungan sekitarnya.

Banyak dari penyandang disabilitas mengalami hal serupa ketika mulai memasuki panti sosial. Banyak yang sulit beradaptasi, sulit menerima kekurangan fisik dan mental, sulit juga untuk memotivasi dirinya sendiri. Inilah yang dilihat oleh pekerja sosial di panti sosial tersebut.

Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sharing kelompok yang di dalamnya akan dilakukan penguatan-penguatan oleh anggota dalam kelompok itu sendiri maupun yang diberikan oleh pekerja sosial kepada penyandang disabilitas.

Disamping itu pekerja sosial terkadang mendatangkan narasumber yang merupakan salah satu penyandang disabilitas yang pernah merasakan seperti apa yang mereka rasakan namun tetap melakukan kegiatan dan aktivitas yang dapat membuat dia tidak di anggap rendah oleh masyarakat bahkan masyarakat menerima dengan baik keadaannya dan bisa dikatakan sukses setelah keluar dari panti sosial.

Mendatangkan seorang narasumber yang demikian bisa membangkitkan semangat penyandang disabilitas untuk memotivasi dirinya untuk bisa seperti narasumber atau bahkan melebihi narasumber. Karena mereka akan memotivasi diri mereka untuk bisa seperti narasumber.

SIMPULAN DAN SARAN

Pekerja sosial dalam menghadapi tuna daksa bertidak sebagai pemberi rehabilitasi sosial. Dimana pekerja sosial tidak bertindak dalam pengembangan kreativitas penyandang disabilitas, namu lebih kepada pemberian rehabilitasi, dimana penyandang disabilitas diberikan dorongan dorongan dan semangat serta memberikan pengetahuan bahwa mereka masih banyak orang diluar yang memiliki keterbatasan tapi mengembangkan kemampuan nya.

Pekerja sosial harusnya lebih jeli melihat keadaan penyandang disabilitas, lebih memahami apa yang menjadi “**need**” nya, sehingga akan lebih mudah memberikan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Penyandang Disabilitas Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF) by Dr. Marjuki, M.Sc., Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia
- Oliver, Michael. 1991. Social Work Disabled People and Disabling Environments. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Sunaryo.1995. Dasar-Dasar Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPTG.
- Payne, James S, Mercer, Cecil D, and Epstein, Michael H. 1982. Education and Rehabilitation Techniques. Homewood Illinois: The Dorsey Press.
- Parker, Randall M, Szymanski, Edna Mora, and Patterson, Jeanne Boland. 2005. Rehabilitation Counseling Basics and Beyond. Austin Texas: PRO-ED Inc.
- Drs.Sumanto.M.A. , 1995 , Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan , Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadi, Sutrisno, 1997. Metodologi Research, Yogyakarta : Andy Offset.
- Winarno, Surachmad, 1995. Metode Penelitian, Bandung : Tarsito.Williams Richard. 2007. Mental Health Interventions and Services for Vulnerable Children and Young People. Jessica Kingsley Publisher: London and Philadelphia
- Choiri, A Salim. 1997. Penyandang Cacat Tubuh Dan Kebutuhan Rehabilitasi: Suatu Potret Hasil Penelitian Masalah Kecacatan. Jurnal Rehabilitasi dan Remediasi Nomor: 16 Th. 2-1997. Surakarta: PRRR- Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret
- Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat (International Convention on the Rights of Persons With Disabilities)

Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Sekolah Luar Biasa, 2010
Services for People, U.S. Departement of Health, Education, and Welfare,
Washington, D.C., 1968)

Penelitian:

Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Cacat
Tubuh di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun 2009

Rujukan Elektronik:

<http://penyandangdisabilitas.wordpress.com/2009/05/22/klasifikasi-penyandang-disabilitas-2/>

<http://budiperkasa.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18>

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development

PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM*

Oleh:

Fildzah A'inun N, Hetty Krisnani, & Rudi Saprudin Darwis

email:

fildzahainun@gmail.com; hettykrisnani@yahoo.com; rsdarwis@yahoo.com

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan pariwisata, sehingga industri pariwisata semakin berkembang pesat di Indonesia. Pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Indonesia juga saat ini sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang semakin terkenal bukan hanya di kalangan wisatawan lokal, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah melanglangbuana hingga masyarakat-masyarakat di berbagai Negara di dunia. Kemajuan pariwisata beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di wilayah pariwisata tersebut untuk menunjang infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini keberadaan pariwisata dan kemajuannya masih belum bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kenyatannya beberapa provinsi yang menjadi primadona pariwisata di Indonesia masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh para investor. *Community based tourism* merupakan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, dalam CBT masyarakat di berdayakan untuk mengelola objek wisatanya sendiri. salah satu bentuk dari CBT adalah pengembangan desa wisata.

PENDAHULUAN

Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan social dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azazi manusia, sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox* yakni bahwa “*we here once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right*”. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk pula Indonesia.

Pariwisata di Indonesia adalah sektor ekonomi mutlak di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata tempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa sesudah komoditi minyak dan gas bumi dan minyak kelapa sawit. Menurut data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau

tumbuh sebesar 10, 74% dibanding tahun 2009. pada mulanya, dan menyumbangkan devisa untuk negara sebesar 7. 603, 45 juta dolar Amerika Serikat. Namun, kemajuan pariwisata tersebut sayangnya tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Manfaat terbesar dari kemajuan pariwisata di Indonesia sangat dirasakan oleh investor-investor yang memiliki modal besar untuk membangun segala fasilitas yang menunjang di area wisata. Oleh karena itu, saat ini mulai bermunculan desa-desa wisata yang menerapkan konsep *community based tourism* , dimana masyarakat secara bersama-sama membangun dan mengelola pariwisata dengan menggali potensi yang mereka miliki dan juga potensi yang dimiliki desa atau wilayah nya.

Keberadaan desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah kunjungan ke desa wisata bertambah lima kali lipat. Mengacu data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saat ini di Indonesia terdapat 987 desa wisata. Jumlahnya semakin meningkat sejak pertama diselenggarakannya desa wisata pada tahun 2009.

Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri, diantaranya adalah akan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut, selain itu desa wisata yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu desa dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya desanya. Hal lainnya adalah, desa wisata dapat membuat suatu desa menjadi desa yang mandiri karena dapat menyediakan alternatif pekerjaan yang dapat dimasuki oleh masyarakat setempat.

Desa wisata saat ini memiliki kecenderungan menggunakan konsep ekowisata, dimana pariwisata yang ditawarkan adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pariwisata pedesaan menjadikan masyarakat lebih menjaga keaslian budaya dan alam di desanya untuk dapat mempertahankan minat wisatawan dalam berwisata di desa wisata.

Keadaan Pariwisata di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki keindahan alam untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata. Keindahan alam Indonesia saat ini sudah terkenal bukan hanya di Negara Indonesia sendiri, informasi mengenai keindahan alam Indonesia sudah menyebar luas ke berbagai Negara di dunia. Keadaan tersebut, membuat sektor pariwisata tumbuh pesat di Indonesia, menurut data yang dikemukakan oleh menpar, pada tahun 2014 ini, pertumbuhan pariwisata di Indonesia adalah sebesar 9,39%, mengalahkan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,04 %. Artinya, sektor pariwisata tumbuh dengan pesat di Indonesia.

Saat ini, pariwisata adalah sektor ekonomi mutlak di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa sesudah komoditi minyak dan gas bumi dan minyak kelapa sawit. Menurut data BPS tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10, 74% dibanding tahun 2009. Pada mulanya, dan menyumbangkan devisa untuk negara sebesar 7. 603, 45 juta dolar Amerika Serikat.

Namun, pada kenyataannya kemajuan sektor pariwisata di Indonesia belum memberikan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat disekitarnya. Keuntungan dari kemajuan pariwisata di Indonesia masih dikuasai oleh investor-investor yang memiliki modal besar untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata di Indonesia. Pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang perhotelan dan restoran tentu mendapat keuntungan yang sangat besar akan keberadaan pariwisata di suatu wilayah.

Lalu bagaimana keadaan masyarakat disekitar wilayah pariwisata? Masyarakat hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari pariwisata yang berada di wilayahnya sendiri. Sebagai contoh nyata, siapa di Indonesia ini yang tidak mengenal Bali? Bahkan masyarakat diberbagai negara yang ada di dunia ini sudah tidak asing dengan Bali. Bagaimana tidak, Bali merupakan surganya pariwisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bali memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan, serta kaya akan budaya yang menjadikannya memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Jika kita melihat keadaan Bali saat ini, pembangunan terlihat dilakukan dengan cepat, mengubah Bali menjadi kota besar yang memanjakan para wisatawan. Pembangunan ini nyata terlihat dimulai dengan kedatangan wisatawan yang disambut oleh Bandara Ngurah Rai yang sangat megah, juga hotel-hotel dan restoran berstandar Internasional yang kini sudah semakin banyak kita temui di Bali.

Keadaan tersebut tentu saja menjadi anggapan bagi kita bahwa Bali saat ini merupakan provinsi yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik bagi masyarakatnya. Sayangnya, pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Bali yang kita lihat sangat maju, tidak menyebar ke seluruh wilayah di Bali. Karangasem adalah salah satu wilayah di Bali yang belum lepas dari jerat kemiskinan. Berdasarkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Karangasem Tahun 2008 jumlah KK Miskin di Kabupaten Karangasem ternyata terbanyak di Bali, yakni 40.272 KK atau sebesar 39,13% yang terdiri dari RTS sangat miskin 3.898 KK, Miskin 17.315 KK dan Hampir Miskin 19.059 KK. Namun, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan jumlahnya mencapai 153.096 orang (35,8%). Dari delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem ternyata, sebagian besar penduduk karangasem tersebut ternyata terdapat di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Karangasem (84.806 orang atau 19,84%), Kecamatan Kubu (70.718 orang atau 16,54%), Kecamatan Abang (68.294 orang atau 15,98%), dan kecamatan Bebandem 948.989 orang atau 11,46%). Disisi lain keempat kecamatan tersebut termasuk daerah kering

Kemiskinan yang terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi yang menjadi surga pariwisata di Indonesia tentu sangat ironis, dibalik kemewahan dan kemegahan pembangunan-pembangunan pariwisata di Bali, masih banyak masyarakat yang bahkan harus meminta-minta hanya untuk membeli air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara, coba kita hitung secara kasar, berapa penghasilan pengusaha perhotelan dan restoran yang ada di Bali. Menurut beberapa informasi yang penulis dapat, investor-investor di Bali saat ini di dominasi bukan oleh masyarakat Bali sendiri, melainkan di dominasi oleh investor dari kota-kota

lain, bahkan dari Negara-negara lain, yang semakin kaya raya seiring kemajuan pariwisata Bali.

Selain kemiskinan yang kita temui di Bali, kemiskinan juga masih menjerat masyarakat Yogyakarta, provinsi yang kaya akan budaya dan peninggalan sejarah ini merupakan provinsi yang menjadi tujuan wisata di pulau Jawa. Namun siapa sangka, jika Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi se-Jawa, mengalahkan provinsi DKI Jakarta. Menurut data BPS Yogyakarta tahun 2012, tingkat kemiskinan di Yogyakarta adalah 15,08% dan menjadi yang tertinggi di pulau Jawa. Jika kita mengingat, Yogyakarta memiliki objek pariwisata yang sangat beragam dan memiliki daya tarik yang tinggi, di mulai dari kebudayaan, peninggalan sejarah seperti candi Prambanan, wisata alam, dan lain halnya. Namun, pada kenyataannya kemajuan dan kekayaan pariwisata yang dimiliki Yogyakarta belum berdampak banyak bagi masyarakatnya.

Community Based Tourism dan Desa Wisata

Masyarakat saat ini seharusnya mampu mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pariwisata di wilayahnya. Pariwisata berbasis komunitas (*community based tourism*) adalah sebuah konsep yang menekankan masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan objek wisata oleh mereka sendiri.

Definisi CBT yaitu :

1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan. (Garrod 2001:4)

Selain yang dikemukakan oleh Garrod, dalam pandangan Hausler CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal.

Hausler menyampaikan gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan, atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* menurut Hudson (Timothy, 1999:373) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya

perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan Murphy (1985:153) menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata. Menurut Murphy setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat.

Wujud dari konsep *community based tourism* adalah dikembangkannya desa-desa wisat, dimana dalam desa wisata, masyarakat desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya, dan juga potensi sumber daya manusianya (masyarakat setempat). Keberadaan desa wisata di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah kunjungan ke desa wisata bertambah lima kali lipat. Mengacu data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, saat ini di Indonesia terdapat 987 desa wisata. Jumlahnya semakin meningkat sejak pertama diselenggarakannya desa wisata pada tahun 2009.

Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri, diantaranya adalah akan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut, selain itu desa wisata yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu desa dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya desanya. Hal lainnya adalah, desa wisata dapat membuat suatu desa menjadi desa yang mandiri karena dapat menyediakan alternatif pekerjaan yang dapat dimasuki oleh masyarakat setempat.

Desa wisata saat ini memiliki kecenderungan menggunakan konsep ekowisata, dimana pariwisata yang ditawarkan adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pariwisata pedesaan menjadikan masyarakat lebih menjaga keaslian budaya dan alam di desanya untuk dapat mempertahankan minat wisatawan dalam berwisata di desa wisata. Konsep yang digunakan dalam CBT sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan, dimana masyarakat diberdayakan terlebih dahulu agar mampu mengembangkan potensinya sendiri, dengan pemberdayaan masyarakat dilatih untuk bisa menolong dirinya sendiri (*self help*), sehingga, pada pembangunan desa wisata, masyarakat dikembangkan dan diberdayakan untuk mampu mengelola desa wisatanya sendiri.

Penutup

Pariwisata di Indonesia saat ini semakin berkembang, beberap hasil survey menyatakan bahwa industri pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar ekonomi Negara yang cukup besar. Namun, hal tersebut tidak membuat masyarakat sekitar tempat wisata menikmati banyak manfaat dari berkembangnya aspek wisata di daerahnya. Pariwisata di Indonesia saat ini dikuasai oleh investor-investor yang memiliki modal besar untuk membangun fasilitas-fasilitas yang

menunjang di beberapa tempat wisata. Maka, berkembangnya tempat-tempat wisata di Indonesia saat ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki modal besar.

Masyarakat sekitar tempat wisata tidak jarang hanya dapat melihat kemajuan daerahnya dalam aspek pariwisata tanpa dapat merasakan manfaatnya. Permasalahan seperti ini terjadi karena masyarakat sekitarpun belum mampu memanfaatkan potensi masyarakat dan juga wilayah sekitarnya. Masyarakat belum tergerak untuk mengelola pariwisata secara bersama-sama untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan pariwisata di wilayahnya.

Community Based Tourism merupakan sebuah konsep pariwisata yang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata di wilayahnya. CBT adalah sebuah konsep pariwisata yang dimana pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan menggunakan konsep pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sangat ditekankan dalam konsep CBT, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan pilar utama agar masyarakat mampu mandiri dan mampu mengelola potensi pariwisata di wilayahnya secara bersama-sama. Konsep CBT juga mengacu pada kearifan lokal setiap wilayah, dimana desa-desa wisata yang dibangun dengan menerapkan konsep CBT menawarkan pariwisata yang memang sudah menjadi budaya wilayah itu sendiri. Keberadaan desa wisata juga mampu mengangkat budaya lokal setiap wilayah di Indonesia. Sehingga, wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengetahui setiap budaya yang ada di wilayah pariwisata yang menjadi tujuannya. Hal tersebut dapat mengangkat keberagaman budaya Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan budaya.

Kesimpulannya adalah, sebuah desa wisata yang dibangun dengan konsep *community based tourism* menjadi sebuah langkah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya untuk dapat mengelola pariwisatanya sendiri dan menjadikan desa mereka sebagai desa mandiri. Pembangunan desa wisata tersebut sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki pariwisata tersebut secara bersama-sama, dengan seperti itu, masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan desa wisata di wilayahnya sendiri.

Daftar Pustaka :

(1) Pengarang tunggal:

Asy'ari, Imam Sapari. 1993. Sosiologi Kota dan Desa Surabaya : Usaha Nasional.

Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama.

Soekanto, Soejono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

(2) Pengarang bersama:

Wibhawa, Budhi, Santoso T Raharjo, dan Meilany Budiarti S. 2010 Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial. Bandung : Widya Padjadjaran.

(6) Jurnal :

Sutiyono. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koswara, Agus. 2011. Materi Tentang Konsep Desa Wisata. Kabupaten Garut.

Isnaini. 2007. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di kota Yogyakarta. Jurnal penelitian BAPEDA Kota Yogyakarta. Hal 7-3.

Tonny, Fredian. 2006. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Institut Pertanian Bogor.

(7) Rujukan elektronik:

<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/12/definisi-pengembangan.html>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2014.

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/121/jtptunimus-gdl-dennyoctav-6015-3-babiii.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2014.

<http://ilmukepariwisataan.blogspot.com/2011/09/definisi-wisatawan.html>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2014.

<http://imamutasim.blogspot.com/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2014.

<http://www.parekraf.go.id/asp/ringkasan.asp?c=11>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2014.

<http://www.parekraf.go.id/asp/ringkasan.asp?c=11>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2014.

<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-enabling-empowering-and-protecting.html#more-90>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2014.

<http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/pemberdayaan-masyarakat-adat-dan-tantangannya.html>. Diakses pada tanggal 06 Maret 2014.

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2014.

shop.mango.com/catalog.faces?state=she_700_IN. Diakses pada tanggal 04 Desember April 2014.

<http://wisatakampung.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2014.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI

Oleh:

Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi

Email:

dhioadenansi@gmail.com; mochzainuddin@yahoo.com; titi.rusyidi06@yahoo.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah terlalu kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi salah satunya karena masyarakat Indonesia terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan. Masyarakat terlalu pasif dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya ini masih sangat kurang. Pada kondisi ini pemerintah perlu melakukan suatu bentuk kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah perlu melakukan metode pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para agen perubahan. Disini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlunya peran – peran pihak lain agar bisa mencapai target yang diharapkan. Pihak lain disini maksudnya seperti LSM, masyarakat itu sendiri, dan pihak lainnya.

Program pemerintah akan bisa terealisasikan dengan baik apabila dalam prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Seperti misalnya program yang dicanangkan oleh pemerintah yakni PNPM Mandiri. Pada PNPM mandiri adalah program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan yang sudah begitu kompleksnya di Indonesia. Di program PNPM mandiri ini masyarakat terkait dituntut untuk berpartisipasi dalam proses kegiatannya. Partisipasi disini dituntut agar masyarakat terbiasa untuk bertanggung jawab atas kondisi di lingkungannya. Maka dari itu agar tumbuhnya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.

Pendahuluan

Kemiskinan sudah bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga kita. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintah. Badan Pusat Statistik di Indonesia mencatat bahwa terjadi angka penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia. Buktinya pada tahun 2009 angka kemiskinan tercatat

sebesar 32,53 juta orang, tahun berikutnya tepatnya tahun 2010 angka kemiskinan tercatat menjadi 31,02 juta orang, lalu pada tahun selanjutnya yakni 2011 angka tersebut menurun lagi menjadi 30,12 juta orang, dan tahun 2012 terjadi penurunan lagi menjadi 29,25 juta orang, serta ditahun 2013 tercatat sebanyak 28,17 juta orang (BPS, 2011 : dds.bps.go.id). Penduduk Indonesia memang mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi perbedaan angka kemiskinan antara di kota dengan di desa juga menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Pada tahun 2011 saja penduduk miskin di perkotaan sebesar 9,23% dan penduduk miskin di pedesaan sebesar 15,72%. Besar angka tersebut menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan mendominasi angka kemiskinan dan masyarakat miskin di Indonesia lebih tersebar di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan sendiri pun ketidakmerataan kesejahteraan masih sering kali dijumpai terutama pada kelurahan – kelurahan yang jauh dari pusat perkotaan. Kondisi sosial ini perlu

Pemerintah terus berupaya dalam mengatasi dan memecahkan masalah kemiskinan. Pemerintah juga menjadikan masalah kemiskinan sebagai sebuah prioritas dalam pembangunan rencana kerja pemerintah tahun 2012. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ialah dengan memunculkan sebuah kebijakan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri perkotaan, PNPM Mandiri pedesaan, dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan daerah tertinggal.

Pembangunan di perkotaan sampai saat ini masih terpusat ditengah kota dimana pembangunan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesan kepada para pendatang terhadap kota tersebut. Dengan terpusatnya pembangunan di tengah kota maka daerah sekitar yang lokasinya jauh dari tengah kota menjadi luput dari perhatian pemerintah. PNPM Mandiri perkotaan ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan masalah kemiskinan, dengan memberdayakan daerahnya serta menciptakan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan sehingga angka kemiskinan bisa dikurangi atau bahkan teratasi.

Masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat besar perannya, keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal penentu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan diperlukan peran serta masyarakatnya agar pemenuhan hak dari masyarakat bisa terpenuhi. Aktifnya masyarakat akan mempermudah tercapainya target pemerintah dimana target tersebut juga akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Selain masyarakat ada juga hal yang perlu diberdayakan, yakni aspek

kelembagaan masyarakat. Lembaga merupakan wadah masyarakat untuk bisa ikut serta dalam sebuah kegiatan. Memanfaatkan kelembagaan yang ada atau menciptakan lembaga masyarakat merupakan langkah yang tepat mempermudah proses tercapainya tujuan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat. Semua itu tetap yang menyelenggarakan adalah pihak pemerintah dan masyarakat sebagai objek yang ditujukan harus diarahkan dan diawasi agar bisa selalu dalam koridornya. Pemerintah hanya perlu mengoptimalkan daya yang ada di masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui pelayanan umum yang disediakan. PNPB mandiri sebagai alat yang disediakan pemerintah untuk masyarakat perlu diawasi dengan benar penyelenggaraannya agar masyarakat bisa menikmati pelayanan tersebut dengan nyaman.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau Empowerment secara garis besar memiliki makna memberikan bantuan kepada masyarakat agar diberdayakan atau dengan kata lain masyarakat dioptimalkan kemampuannya agar bisa mengelola kehidupan bermasyarakatnya secara mandiri. Maka pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya dalam merubah masyarakat dari yang pasif menjadi aktif, masyarakat diciptakan agar menjadi mandiri, berpikir kritis serta bisa mengendalikan dan juga bertanggung jawab atas perbaikan kualitas kehidupannya.

Agar pengertian pemberdayaan dapat dipahami lebih, maka disini dipaparkan beberapa pemahaman terkait pemberdayaan menurut ahlinya ; Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri. Mandiri disini maksudnya adalah kemandirian dalam berpikir lalu bertindak dan mampu mengendalikan apa yang dilakukan. Masyarakat diberdayakan agar sadar dengan apa yang dialaminya tidak hanya untuk individu dari tiap masyarakat tp masyarakat diberdayakan agar terbentuk masyarakat yang aktif dan tidak apatis lagi dengan kondisi sekitar. Terbentuknya masyarakat yang bertransformasi dari pasif menjadi aktif serta kritis akan menciptakan masyarakat yang mandiri, dengan kemandirian tersebut masyarakat nantinya tidak perlu lagi

berpangku tangan atau mengandalkan lagi bantuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya. Masyarakat akan terbiasa untuk bergerak inisiatif ketika terjadi permasalahan di lingkungannya. Pemerintah juga menjadi tidak terlalu terbebani lagi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam prosesnya. Dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat, nantinya akan diketahui bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan seperti apa pola pikir masyarakat. Ketika sikap partisipasi di masyarakat sudah terbangun maka terlihatlah perkembangan pemikiran masyarakat akan sadarnya dengan kondisi mereka. Partisipasi adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan bagaimana cara menanganinya, keputusan atau tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi masalah tersebut.

Menurut Keith Davis, pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.

Mikkelsen membuat daftar atau klasifikasi dari para praktisi pembangunan mengenai arti dari partisipasi. Pertama, Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Pemaknaan seperti ini agaknya kurang tepat karena memaknai partisipasi hanya sekedar meminta dukungan masyarakat terhadap semua program yang telah disiapkan. Pertemuan (rapat) dengan dalih partisipasi (minta masukan dari warga masyarakat) yang dilaksanakan tidak lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Hal demikian akan memunculkan partisipasi yang semu karena masyarakat tidak diberi hak untuk merancang program kecuali hanya sekedar diajak, dibujuk, diperintah dan bahkan dipisahkan oleh kelembagaan tertentu untuk ikut serta dalam suatu program yang telah dirancang sebelumnya.

Kedua, Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini hampir sama dengan pemaknaan yang pertama, yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek. Karena itu akhir capaian dari partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Masyarakat harus mendukung atau

ikut program-program pemerintah secara gratis dengan alasan program-program tersebut pada akhirnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan yang memiliki anggaran tertentu harus dapat diselesaikan melalui penghematan-penghematan. Makin banyak penghematan atau makin murah biaya suatu proyek, maka dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat. Disini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Ketiga, Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti partisipasi masyarakat dalam program pengolahan sampah ini memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pembangunan yaitu mulai dari: 1). Keterlibatan pada identifikasi masalah, dimana masyarakat bersama-sama dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi peluang, potensi dan hambatan. 2). Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana dan strategi berdasar pada hasil identifikasi sebelumnya. 3). Pelaksanaan pengolahan sampah. 4). Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan pengolahan sampah yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan. 5). Monitoring dan 6). Mitigasi, yaitu terlibat dalam mengukur dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek yang sedang dilaksanakan.

Keempat, Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan dan terlibat dalam memilih hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Kelima, Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar keikutsertaan dalam bekerja akan tetapi partisipasi adalah bagaimana individu atau kelompok masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi sekitar menganggap hal tersebut sebagai hal yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Partisipasi merupakan sebuah sikap kerelaan untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan. Dalam hal ini masyarakat menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Pada kondisi ini masyarakat dalam program PNPM mandiri diajak untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaanya. PNPM

sebagai alatnya yang disediakan pemerintah untuk masyarakat dan masyarakat diarahkan untuk bagaimana memanfaatkan PNPM mandiri ini dengan bijak.

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Secara garis besarnya PNPM mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja untuk masyarakat secara mandiri. Tetapi tujuan secara khususnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengaktifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

P2KP Memfasilitasi Masyarakat serta Pemerintah Daerah Untuk Mampu Menangani Akar Penyebab Kemiskinan Secara Mandiri dan Berkelanjutan

P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (*edukasi*) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses transformasi P2KP dari '*tataran Proyek*' menjadi '*tataran program*' oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab berbasis program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai "*gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal*" diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun : daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat

pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kondisi yang terjadi bahwa masyarakat harus mau berpartisipasi dalam program pemerintahan. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat itu seperti masyarakat diajak untuk menyumbangkan ide / pikirannya pada tahap perencanaan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Masyarakat juga diajak untuk membuat keputusan dan pembentukan kepanitiaan masyarakat yang nantinya akan menjadi perwakilan dari masyarakat dalam kegiatan di program PNPM Mandiri. Bentuk lainnya adalah masyarakat juga bisa memberikan partisipasi dalam bentuk tenaga dan keuangan yang sudah diadministrasikan oleh masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi tidak semata – mata berjalan begitu saja akan tetapi diawal pelaksanaan kegiatan, masyarakat diberikan pengarahan dan penyuluhan dari tim pelaksana perubahan terkait pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat akan dirubah *mindsetnya* agar mulai bertanggung jawab terhadap kondisi sosial di lingkungannya, memiliki rasa simpati dan berempati serta mengajak masyarakat untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut.

Simpulan

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah sosial khususnya di masalah kemiskinan. Di sisi lain masyarakat sebagai objek dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga memiliki tanggung jawab akan mengatasi masalahnya, jadi dalam mengatasi masalah sosial pemerintah dan juga masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasinya. Karena pemerintah hanya bisa memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya. Tinggal bagaimana respon masyarakat atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Pada kali ini pemerintah mengeluarkan kebijakan PNPM mandiri sebagai sarana untuk masyarakat dalam mempermudah mengatasi kondisi kesulitan yang terjadi di masyarakat. Disini PNPM mandiri memiliki konsep memberdayakan masyarakat, tidak hanya sekedar memberikan bantuan secara pendanaan saja tetapi PNPM mandiri juga mengajari dan membentuk masyarakat untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam kondisi yang terjadi di masyarakat serta diajak untuk berpartisipasi aktif dalam program yang diadakan di PNPM mandiri ini. Kesadaran menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan masalah sosial ini. Karena dengan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat maka pemerintah menjadi terbantu dalam proses mengatasi masalah sosial di masyarakat. Keuntungan yang didapat juga diperoleh kedua pihak, masyarakat juga akan merasakan hak – haknya terpenuhi dan pemerintah menjadi berkurang beban kerjanya.

Daftar Pustaka

- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama.
- Finna Rizqinna. 2010. *Partisipasi Masyarakat*. www.lontar.ui.id. Hal 14

- Rudito, Bambang dkk. 2003. Akses Peran Masyarakat “Lebih Jauh Memahami Community Development”. Jakarta : ICSD
- Jim Ife .2006. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 294,295,296,297,
- Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 227,228,229,230,231
- Britha, Mikkelsen., *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Terjemahan Matheos Nalle, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI RANAH INDUSTRI INDONESIA

Oleh :

Danny Dwi Septianto, Sri Sulastri, Gigin Ginanjar Kamil Basar

ABSTRAK

Setiap pekerja industri di seluruh dunia pasti memiliki resiko kecelakaan yang besar khususnya di Indonesia, hal tersebut tentu membuat perasaan cemas ke para pekerja di perusahaan tersebut belum lagi resiko kehilangan pekerjaan yang bukan karena kinerja mereka buruk atau kesalahan kerja, melainkan karena adanya pergantian pekerja dari manusia ke mesin hal itu tentu member rasa cemas yang bertambah besar dan belum lagi masalah sosial kronis seperti *alienation, alcoholism, absenteeism, accidents dan abuse* yang masih menyelimuti banyak pekerja yang bekerja di ranah industrialisasi. Dan di Indonesia masih belum ada indikasi bahwa Indonesia akan lebih memperhatikan dan mensejahterakan para pekerja dan lebih memanusiawi kan pekerja di ranah industrialisasi khususnya kepada pekerja yang tidak memiliki jabatan yang tinggi. Mungkin karena para pekerja tersebut dianggap tidak berpengaruh atau memang belum ada atau sengaja tidak mengadakan program pelayanan sosial bagi pegawai, yang jelas adalah Indonesia kini butuh pekerja sosial industri untuk memperhatikan pekerja, memberi rasa aman bagi para pekerja dan memberi rasa aman kepada keluarga yang ditinggalkan pekerja baik itu untuk keluar kota karena pekerjaan atau meninggal dunia. Serta dengan metode yang dimiliki pekerja sosial khususnya pekerja sosial industri maka masalah sosial kronis yang diderita oleh pekerja yang bekerja di ranah industrialisasi dapat ditangani agar pekerja dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik dan member dampak positif pada perusahaan. Hal tersebut yang harus di perhatikan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini mengingat industrialisasi merupakan salah satu faktor prnting pembangunan sebuah negara.

Keyword: Industri, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Industri

Pendahuluan

Sadarkah anda sekarang bahwa segala sesuatu yang ada disekeliling anda seperti yang anda lihat, anda rasakan, anda kenakan, anda makan sampai yang anda gunakan untuk tidur nanti sampai bangun kembali, semua adalah hasil dari kegiatan industri. Secara sadar atau tidak sadar anda sudah mengeluarkan banyak atau sedikit uang untuk perusahaan industri tersebut, anda telah memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut anda juga telah menggaji semua karyawan perusahaan terkait. Tapi tahukah anda apa yang sebenarnya terjadi, masalah dan

resiko apa yang terdapat didalam kegiatan industri khususnya di negara kita Indonesia, yang kita tahu sebagian besar orang menganggap segala sesuatunya tidak berjalan dengan semestinya? Dan apakah perusahaan di Indonesia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada pegawainya agar selalu merasa aman dan nyaman ketika bekerja begitu pula tanpa memikirkan keluarga mereka ketika bekerja?

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah namun masih belum sejahtera sampai saat ini, banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang terkuras habis namun tidak memberikan efek positif kepada masyarakat Indonesia sendiri, hal itu dikarenakan sumber daya alam yang ada di Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari negara luar dan hanya sedikit sekali masyarakat Indonesia yang terkena efek positif dari keberadaan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Selain itu kondisi pekerja Indonesia khususnya di ranah industri sangat memprihatinkan baik itu pegawai yang memiliki jabatan atau buruh. Berbicara tentang industri khususnya kepada pegawai dan buruh, Indonesia merupakan negara yang belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan pegawainya, padahal kesejahteraan pegawai sangat penting untuk kondisi perusahaan. Bila pegawai didalam kondisi yang sedang menurun diakibatkan adanya masalah pribadi baik dari keluarga atau lingkungan kerja maka dikhawatirkan pegawai tersebut bekerja tidak maksimal dan menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan, begitu juga dengan kondisi buruh di Indonesia, kesehatan tempat kerja seakan tidak menjadi urusan pihak perusahaan dan hal itu juga tidak diseimbangkan dengan upah yang diberikan perusahaan terhadap buruh, hal itu juga dikhawatirkan dapat memberi dampak negatif terhadap perusahaan. Kita dapat mengetahui bahwa ranah industri merupakan salah satu kekuatan untuk pembangunan ekonomi sebuah negara dan kesejahteraan rakyatnya.

ISU DAN MASALAH PEGAWAI

Kita dapat mengetahui orang yang bekerja di ranah industri tidak dihadapkan pada “*pekerjaan rumah*” perusahaan saja, mereka harus berjibaku dengan dunia luar perusahaan seperti kemungkinan timbul masalah keluarga, kemacetan di jalan, kebutuhan yang belum tercukupi sampai dengan isu pemecatan atau sistem outsourcing yang tidak memberi kepastian kepada pegawai dan memberikan kecemasan setiap waktunya. Dan khusus di Indonesia masalah juga semakin diperparah dengan kurang berlaku sampai tidak adanya jaminan untuk pegawai khususnya buruh dan pegawai dengan jabatan rendah.

Pekerjaan, seperti kata **Smith** (1988), merupakan salah satu dimensi yang paling penting dalam kehidupan seorang individu. Dalam beberapa aspek, setiap individu memaknakan dirinya dalam kaitanya dengan apa yang dia lakukan melalui pekerjaanya. Mengutip **Perlman, Smith** menambahkan bahwa pekerjaan memberikan seseorang sebuah identitas sosial –yakni sebuah pijakan bagi masyarakat yang lebih luas serta sebuah medium dengan mana nilai dan kedudukan seseorang dalam masyarakat diketahui oleh orang lain (**Smith, 1988:3**).

Namun demikian, perubahan sosial kadangkala tidak selalu ramah terhadap manusia. Industrialisasi, misalnya, adalah salah satu proses perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap pekerjaan manusia.

Masalah yang sekarang dikhawatirkan para pegawai khususnya di Indonesia adalah mekanisasi dan otomatisasi yang merupakan fenomena industrialisasi yang melahirkan rutinitas dan membuat tenaga manusia tampak semakin tidak penting. Para pegawai kerah biru maupun putih merasa tidak bermakna dan terancam kapan saja dapat digantikan oleh saingannya, mesin. Perubahan teknologi, pergantian tenaga kerja (shift), dan pemutusan hubungan kerja yang semakin menjadi fenomena sehari-hari pada masyarakat industri, sering menimbulkan kecemasan bagi para pegawai. Mengutip **Edi Suharto (2005)**, beliau mengatakan bahwa, di Amerika Serikat proses otomatisasi menggantikan sekitar dua juta pekerjaan setiap tahunnya (**Suharto, 2005:15**). Para pegawai yang merasa tidak berguna dan tidak berdaya dalam pekerjaannya seringkali membawa permasalahan tersebut ke rumah dan lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah ancaman yang dianggap menakutkan bagi para pegawai perusahaan dan perasaan terlupakan tersebut harus segera dilupakan untuk menunjang kestabilan kerja mereka dan memberikan profit yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.

Ada beberapa permasalahan sosial kronis yang memang sering sekali terjadi di dalam dunia industri yang menghampiri individu/pegawai. Dan masalah yang terkait dengan dampak negatif industrialisasi yang oleh **Johnson** disingkat menjadi 5A (dalam **Suharto,2005: 16**).

- *Alienation*: perasaan keterasingan dari diri ,keluarga, dan kelompok sosial yang dapat menimbulkan apatis, marah dan kecemasan
- *Alcoholism atau addiction*:ketergantungan terhadap alcohol ,obat-obatan terlarang atau rokok yang dapat menurunkan produktivitas, merusak kesehatan fisik dan psikis, dan kehidupan sosial seseorang
- *Absenteeism*: kemangkiran kerja atau perilaku membolos kerja dikarenakan rendahnya motivasi pegawai, perasaan-perasaan malas, tidak berguna, tidak merasa memiliki perusahaan, atau sakit fisik dan psikis.
- *Accidents*:kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh penurunan konsentrasi pegawai atau oleh lemahnya sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja
- *Abuse*: bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (suami terhadap istri atau sebaliknya), seperti memukul dan menghardik secara berlebihan yang ditimbulkan oleh frustrasi, kebosanan, dan kelelahan di tempat kerjanya.

Beberapa permasalahan sosial lainnya yang sering ditangani pekerja sosial adalah: diskriminasi di tempat kerja atau tindakan-tindakan tidak adil terhadap wanita, kaum minoritas, imigran, remaja, pensiunan dan para penyandang cacat. Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi (udara, air, suara) dan kerusakan fisik dan psikis bagi para pegawai.

Pekerja sosial dapat membantu dunia industri untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai biaya sosial (*social costs*) yang ditimbulkan oleh perusahaan. Namun apakah industrialisasi di Indonesia sudah memiliki divisi atau bahkan lembaga untuk pelayanan pegawainya? Hal itu sangat ironis jika kita mengetahui bahwa di Indonesia pekerja sosial industri belum banyak dikenal di dunia kerja Indonesia serta belum banyak memiliki pekerja sosial di dalam industrialisasi dan masih kurangnya perhatian kepada program pelayanan pegawai sehingga wajar saja jika para pekerja di Indonesia belum memiliki rasa aman dan nyaman akan pekerjaannya karena belum memiliki jaminan di tempat kerjanya.

PERAN PEKERJA SOSIAL

Pekerjaan sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi diantara orang dengan lingkungan sosial sehingga orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka. Atas dasar pengertian ini, **Soetarso** mengatakan pekerjaan sosial memiliki tujuan, fungsi dan tugas-tugas sebagai berikut (**Soetarso, 1995**):

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
2. Mengkaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan anyang dibutuhkannya.
3. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif
4. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial (**1995:5**)

Serta terdapat pula fungsi praktek pekerjaan sosial dan tugas –tugas pekerja sosial yaitu:

1. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka
2. Menciptakan jalur hubungan pendahuluan diantara orang dengan sistem sumber
3. Mempermudah interaksi, merubah dan menciptakan hubungan baru diantara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan
4. Mempermudah interaksi, merubah dan menciptakan hubungan diantara orang-orang dilingkungan sistem sumber
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijaksanaan dan perundang-undangan sosial
6. Meratakan sumber-sumber material
7. Bertindak sebagai pelaksana control sosial (**1995:5**)

Tugas-tugas pekerja sosial yaitu :

1. Pekerja sosial menentukan dan mengadakan hubungan dengan orang yang membutuhkan guna penyelesaian tugas kehidupannya
2. Pekerja sosial dapat memberikan pengertian, dukungan, dan dorongan kepada orang-orang yang mengalami kritis seperti seseorang yang kehilangan pekerjaannya dan lain-lain
3. Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang untuk mengutarakan kesulitan-kesulitan mereka
4. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk meneliti berbagai pilihan tentang cara menangani masalah dan cara menaggulangi masalah
5. Pekerja sosial dapat mengkonfrontasikan orang dengan realitas situasi yang nerekka hadapi dengan jalan memberikan keterangan yang dapat mengganggu keseimbangan pribadi seseorang untuk kemudian diberikan motivasi guna terjadinya perubahan tertentu
6. Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan kepada orang untuk mewujudkan aspirasi mereka. (1995:7)

Jika melihat dari seluruh peran yang dimiliki pekerja sosial rasanya Indonesia sangat membutuhkan peran dari pekerja sosial tersebut khususnya di bidang industri karena lingkungan industrilaisasi merupakan sebuah wilayah dimana banyak sekali masalah-maslah terjadi baik itu masalah kelompok atau individu, baik itu masalah di perusahaan sampai masalah keluarga di rumah, namun Indonesia masih belum peka bahwa sebenarnya pekerja sosial-lah yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat industri karena tidak jarang timbulnya sebuah konflik dan penurunan kinerja akibat masalah-masalah yang ditimbulkan.

Profesi pekerja sosial sebenarnya juga sudah lama masuk ke ranah industrialisasi namun hanya di Indonesia yang memang belum banyak mengetahui tentang pekerja sosial industri, padahal bila ditelaah kehadiran pekerja sosial industri amat sangat membantu pegawai untuk memecahkan masalah atau hanya sekedar memotivasi pegawai agar kinerja mereka semakin baik dan memberikan profit yang besar bagi perusahaan.

PEKERJA SOSIAL INDUSTRI

Masyarakat berkembang kompleks. Sasaran, bidang garapan dan intervensi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi telah membuka kesempatan bagi pekerja sosial untuk terlibat dalam bidang yang relative baru, yakni dunia industri. Dunia industri kini sedang menggali manfaat positif dari adanya kehadiran Pekerja Sosial Industri (PSI), baik terhadap aspek financial maupun relasi sosial dengan para pekerja dan masyarakat. Menurut **Johnson** (1984) di Amerika Serikat, sekitar setengah dari perusahaan terbesar kini memiliki apa yang dinamakan *employee assistance programs* (EAPs), program bantuan kesejahteraan sosial bagi para pekerja dan keluarganya. Dalam upaya kemangkiran kerja saja, perusahaan sanggup mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk program-program sosial dan penanggualngan alkoholisme (dalam **Suharto**, 2005). Pelayanan sosial seperti ini seringkali disebut sebagai "kontrak kemanusiaan" oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa misi utama PSI adalah lebih memanusiawikan dunia kerja.

Istilah “pekerjaan sosial industri“ sesungguhnya memiliki beberapa nama lain, misalnya pekerjaan sosial kepegawaian (*occupational social worker*), pekerjaan sosial di tempat kerja atau bantuan pelayanan bagi pegawai yang secara konsep PSI lebih luas dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun pengembangan masyarakat (*comdev*). PSI mencakup pelayanan sosial yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal, PSI melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling, terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, PSI berwujud dalam berbagai bentuk program CSR termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat (dalam **Suharto**, 2005:3).

Definisi dari pekerjaan sosial industri sendiri adalah sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dengan lingkungannya, terutama di lingkungan kerja (**Suharto**, 2005:3). Dalam konteks ini, PSI dapat menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, rekasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)

Tugas Pekerja Sosial Industri

Menurut **Johnson** (1984:263-264) ada tiga bidang tugas pekerja sosial yang bekerja di perusahaan:

1. Kebijakan, perencanaan dan administrasi. Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perumusan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif, pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam departemen-departemen perusahaan.
2. Praktik langsung dengan individu, keluarga dan populasi khusus. Tugas pekerja sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (*crisis intervention*), asesmen (*penggalian*) masalah-masalah personal dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, pelayanan dan perawatan sosial bagi anak-anak pekerja dalam perusahaan atau organisasi serikat kerja, dan pemberian konseling bagi para pensiunan atau pekerja yang menjelang pensiun.
3. Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan.

Para pekerja sosial telah memberikan kontribusi penting dalam memanusiawikan dunia kerja. Mereka umumnya terlibat dalam pemberian konseling di dalam maupun di luar perusahaan, pengorganisasian program-program

personal, konsultasi dengan manajemen dan serikat-serikat kerja mengenai konsekuensi kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap pekerja, serta bekerja dengan bagian kesehatan dan kepegawaian untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dan kualitas tenaga kerja (dalam **Suharto**, 1997).

Menurut **Straussner** ada itu cara lagi untuk mengkonseptualisasikan beragam pelayanan sosial yang diberikan pekerja sosial beserta peranan dan keterampilan yang dijalankannya adalah dengan membuat sebuah tipologi model *setting* PSI (**Straussner**, dalam **Suharto**, 2005: 17), yaitu:

1. Model pelayanan sosial bagi pegawai
2. Model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan
3. Model pelayanan sosial bagi konsumen
4. Model tanggung jawab sosial bagi perusahaan
5. Model kebijakan di bidang kepegawaian

Konsep yang di paparkan Straussner diatas semakin menguatkan indikasi bahwa pekerja sosial industri memiliki peran yang penting dalam sebuah perusahaan, karena dari pemaparan Straussner tersebut secara detail dan sistematis pelayanan apa saja yang dapat diberikan oleh pekerja sosial industri terhadap pegawai/pekerja dalam suatu perusahaan yang memiliki masalah sosial yang dapat mengganggu pekerjaan pegawai tersebut.

Dunia industri kini sedang menggali manfaat-manfaat positif dari adanya pelayanan sosial tersebut, baik terhadap aspek finansial maupun relasi sosial dengan para pekerja dan masyarakat. Di Amerika Serikat, sekitar setengah dari perusahaan-perusahaan terbesar kini memiliki apa yang dinamakan Employee Assistance Programs (EAPs), program-program bantuan kesejahteraan sosial bagi para pekerja dan keluarganya. Dalam upaya menurunkan tingkat kemangkiran kerja saja, perusahaan-perusahaan sanggup mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk program-program sosial dan penanggulangan alkoholisme. Pelayanan sosial seperti ini seringkali disebut sebagai “kontrak kemanusiaan” (human contract) atau “wajah manusiawi industri” (the human face of industry) (**Suharto**, 2006: 32)

Penutup

Indonesia pengetahuan tentang PSI ini masih amat sangat kurang padahal kita tahu bahwa bila kita mengevaluasi kegiatan dan program yang dimiliki oleh pekerja sosial industri pasti kita akan memberikan sebuah argumen bahwa yang sangat dibutuhkan oleh para pekerja di Indonesia adalah pekerja sosial industri, karena mayoritas pekerja di Indonesia masih belum mencapai kata sejahtera, masih ada pekerja/pegawai yang dilanda kecemasan berlebih dan terlebih jika memiliki masalah keluarga itu akan membuat pekerja tidak bekerja secara maksimal dan memiliki tingkat stress yang sangat tinggi dan memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan.

Rekomendasi

Seharusnya perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih memperhatikan pekerja yang bekerja di perusahaan mereka, karena hal itu merupakan sebuah tanggung jawab dan merupakan sebuah aspek yang mempengaruhi perusahaan mereka karena kondisi pegawai mempengaruhi cara kerja mereka dan hal itu penting untuk kelangsungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto,Edi.2005.Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility).
- Soetarso (1995). Praktek Pekerjaan Sosial: Koperasi Mahasiswa STKS, Bandung: LSP STKS
- Suharto, Edi (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: LSP STKS

PERKEMBANGAN PERILAKU KEPERIBADIAN REMAJA DENGAN LATAR BELAKANG KEDUA ORANG TUA BERCERAI

Oleh:

Aziza Trizilvania Amadea, Santoso Tri Raharjo, & Budi M. Taftazani

Email:

azizatrizilvania@gmail.com; santosotriraharjo@gmail.com;
budi.m.taftazani@yahoo.com

ABSTRAK

Dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak merupakan akibat dari perceraian yang membuat perilaku anak mengalami kemerosotan antara lain mengalami depresi, menkonsumsi alkohol, aktifitas seksual dini (pemeriksaan), menjadi keras kepala, sering minum mabok, mengganggu ketenangan tetangga, anak menjadi rendah diri. Hal tersebut perlu diperhatikan terutama ketika pelaku perceraian yang memiliki anak remaja. Dikarenakan remaja merupakan masa penuh kegoncangan, taraf mencari identitas diri dan merupakan periode yang paling berat. Adanya akibat yang langsung terhadap sikap dan tingkah laku serta akibat-akibat jangka panjangnya menjadikan periode remaja lebih penting daripada periode lainnya. Selain itu perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada awal remaja, yang semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai dan minat baru.

Kata kunci : Perkembangan perilaku remaja, dampak perceraian bagi remaja.

PENDAHULUAN

Menurut data yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Kota Bandung pada tahun 2011 tercatat bahwa angka perceraian yang terjadi di Kota Bandung meningkat. Data per November 2011 kasus perceraian yang masuk ke pengadilan mencapai 3.795 perkara, sedangkan sepanjang tahun 2010 sebanyak 2.629 perkara. Permasalahan yang terjadi akibat perceraian tidak hanya melibatkan kedua belah pihak saja yaitu seorang istri dan suami melainkan orang terdekat yang melakukan perceraian tersebut. Salah satu contohnya jika kedua pasangan tersebut telah memiliki anak dalam pernikahan mereka. Maka perceraian tersebut juga akan membawa dampak terhadap anak yang mereka miliki. Terlebih lagi ketika anak tersebut menginjak usia remaja, dimana usia remaja merupakan usia pencarian jati diri dalam hidupnya. Dalam usia remaja inilah seorang anak butuh didampingi oleh kedua orangtuanya. Peran orang tua pada masa perkembangan remaja adalah sebagai panutan bagi perkembangan remaja terutama pada perkembangan psikis dan emosi, karena orang tua merupakan pendorong pembentukan karakter yang terdekat. Jika remaja dihadapkan pada kondisi orang tua bercerai, dimana orang tua

mereka tidak lagi menjadi panutan bagi dirinya maka akan berdampak besar pada perkembangan dirinya. Dampak psikis yang dialami oleh remaja dengan orang tua bercerai, remaja menjadi lebih pendiam, pemalu, bahkan depresi berkepanjangan. Karena dampak seperti itulah yang membantu terbentuknya perilaku remaja.

Selain dampak negatif yang bakal terjadi terhadap perilaku perkembangan remaja, tidak menutup kemungkinan dari perceraian ini menimbulkan dampak positif juga bagi perilaku perkembangan bagi remaja. Contohnya pada saat remaja dihadapkan oleh situasi kedua orang tuanya yang bercerai, maka timbulnya motivasi dalam dirinya agar kelak kehidupannya di masa depan tidak “gagal” seperti orang tuanya. Selain itu dikarenakan pandangan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anak yang berasal dari keluarga dari kedua orang tua yang bercerai sering dipandang negatif, hal tersebut bisa menjadi acuan remaja untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak yang berasal dari kedua orang tua yang bercerai pun tidak selamanya berperilaku negatif.

Dari kemungkinan dampak yang terjadi itulah maka perceraian yang dialami oleh orang tuanya menjadi faktor pembentuk perilaku perkembangan remaja. Orang tua berperan penting dalam perilaku remaja, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini pula menunjukkan bahwa orang tua masih merupakan lingkungan yang sangat penting bagi remaja. Namun bagaimanapun hubungan orang tua dan remaja begitu baik, tetap saja dengan adanya masalah yang timbul dalam keluarga itu sendiri terutama masalah antara ibu dan ayah yaitu salah satunya perceraian, maka mau tidak mau anak secara tidak langsung akan menjadi korbannya dan sangat berakibat fatal bagi perkembangan kepribadian remaja.

Banyak fenomena – fenomena yang terjadi bahwa anak yang diasuh satu orang tua akan jauh lebih baik dari pada anak yang diasuh keluarga utuh yang dipenuhi dengan rasa tertekan. Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa dampak negatif. Perbedaan paham yang terus – menerus, maka peristiwa perceraian itu satu – satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri. Bagaimana remaja bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku, selama dan sesudah perpisahan. Remaja akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialami selama masa sulit ini. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial.

Perkembangan perilaku merupakan hal yang penting bagi masa depan remaja untuk menuju tahap dewasa anak. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk melihat perkembangan perilaku remaja yang dilantar belakangi oleh kedua orang tua bercerai.

Terbentuknya perilaku dapat terjadi karena proses kematangan dan dari proses interaksi dengan lingkungan. Terbentuknya dan perubahan perilaku karena proses interaksi antara individu dengan lingkungan ini melalui suatu proses yakni proses belajar. Oleh sebab itu, perubahan perilaku dan proses belajar sangat erat kaitannya. Perubahan perilaku merupakan hasil dari proses belajar.

Di dalam proses pembentukan atau perubahan perilaku yang di hasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari dorongan gerakan inilah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Perilaku yang berlaku pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya. Tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan. Baik itu stimulus eksternal maupun stimulus internal (Walgito, 1991).

Didalam teori perkembangan perilaku terdapat teori kognitif yang dekat dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti. Berikut adalah penjelasannya:

Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, yaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan syaraf; 2) pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya; 3) interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, dan 4) ekuilibrisasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

a. Kematangan

Kematangan system syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akan membatasi secara luas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri.

b. Pengalaman

Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalamantersebut.

c. Interaksi Sosial

Lingkungan social termasuk peran bahasa dan pendidikan, pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif

d. Ekuilibrisasi

Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri (ekuilibrisasi), mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman social dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik.

Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka:

1. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif, karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bias masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya.
2. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan perubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sekaligus.

Perkembangan Perilaku Remaja dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi, agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan, Skidmore dan Thackeray dalam (Wibhawa, 2010:42). Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Edi Suharto (2009) mengenai definisi pekerjaan sosial:

Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. (Suharto, 2009:1)

Salah satu yang menjadi bidang garapan pekerja sosial di dalam perkembangan perilaku remaja adalah dengan cara pendampingan. Pekerja sosial perlu memahami siapa yang menjadi fokus utama dari pekerjaannya atau intervensinya, apakah anak atau keluarga. Kesejahteraan anak merupakan fokus yang terpenting, namun untuk mencapai hasil tersebut pekerja sosial juga perlu bekerja dengan keluarga. Sebagai seorang profesional pekerja sosial harus berkomitmen untuk standar-standar perilaku tertentu dan memberikan pelayanan dengan baik ke pada anak dan keluarga yang menggunakan jasanya. Selain itu, pekerja sosial yang bekerja dengan anak dan keluarga perlu mengerti mengenai nilai-nilai serta kode etik, serta perlu menyadari bahwa setiap keluarga itu berbeda-beda dan harus mampu menilai manfaat yang dapat diambil dari permasalahan keluarga yang mereka hadapi. Terdapat enam poin utama dalam kode etik tersebut dalam O'Loughlin (2008:6-7):

1. Melindungi dan meningkatkan hak-hak serta kepentingan klien.
2. Mengupayakan untuk membangun dan memelihara kepercayaan dan keyakinan dari klien.
3. Meningkatkan kemandirian dan melindungi klien dari hal-hal yang membahayakan.
4. Menghormati hak-hak klien dan memastikan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.
5. Menjunjung tinggi kepercayaan dan keyakinan dalam memberikan pelayanan.

6. Bertanggungjawab atas kualitas dari pekerjaan yang dilakukan dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Ketika melakukan intervensi, pekerja sosial perlu mengetahui aspek pengasuhan yang penting untuk mencapai tahap perkembangan dan mengembangkan potensi anak. Daniel dalam (O'Loughlin, 2008:69) mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas dalam pengasuhan anak dalam kelompok usia yang berbeda, hal tersebut dapat membantu pekerja sosial dalam melakukan intervensi dengan orang tua untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak. Adapun tujuan Profesi Pekerjaan Sosial yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam menjalankan peran ini, Pekerja Sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pekerja sosial juga menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Beberapa tugas Pekerja Sosial yang terkait dengan peran ini antara lain: a) Membantu klien menjangkau klien-klien yang diperlukannya; b) Mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien; c) Meningkatkan komunikasi diantara para petugas kemanusiaan; dan d) Mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelayanan sosial bagi klien.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan warga setempat dan efektif dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat.
4. Mengoptimalkan keadaan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Dalam menjalankan peran ini, Pekerja sosial mengidentifikasi isu-isu sosial dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, Pekerja Sosial membuat naskah kebijakan (*policy paper*) yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru maupun perbaikan dan pergantian kebijakan-kebijakan lama yang tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam melaksanakan peran ini, Pekerja Sosial juga dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien. (Dubois dan Miley dalam Wibhawa, 2010:50)

No	Sub Topik	Aspek yang mempengaruhi
1	Kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf	<ul style="list-style-type: none"> – Manfaat yang di peroleh dari perkembangan fisik – Bentuk adaptasi dari perubahan fisik yang mempengaruhi individu terhadap lingkungannya
2	Pengalaman sebagai hubungan timbal balik antara remaja dengan dunianya	<ul style="list-style-type: none"> – Aktualisasi diri terhadap lingkungan – Manfaat yang di dapat dari pengalaman yang terjadi pada remaja
3	Interaksi social sebagai pengaruh yang diperoleh dalam hubungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Manfaat yang terjadi akibat adanya interaksi sosial – Perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi sosial
4	Ekuilibrasi sebagai kemampuan atau sistem yang mengatur remaja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> – Bentuk pengaturan diri dengan interaksi sosial – Bentuk pengaturan diri dengan perkembangan fisik

Simpulan

Perkembangan remaja yang memiliki orang tua bercerai akan berdampak pada remaja yang merupakan individu yang masih menentukan jati dirinya. Oleh karena itu remaja sangat membutuhkan sosok seseorang yang dapat memberikan pengetahuan atau contoh tentang pelajaran hidupnya. Dikarenakan orang tua berperan penting dalam perilaku remaja, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini pula menunjukkan bahwa orang tua masih merupakan lingkungan yang sangat penting bagi remaja. Namun bagaimanapun hubungan orang tua dan remaja begitu baik, tetap saja dengan adanya masalah yang timbul dalam keluarga itu sendiri terutama masalah antara ibu dan ayah yaitu salah satunya perceraian, maka mau tidak mau anak secara tidak langsung akan menjadi korbannya dan sangat berakibat fatal bagi perkembangan kepribadian remaja.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyarankan kepada kedua orang tua yang bercerai yang memiliki anak remaja dapat diharapkan untuk terus berperan aktif dalam menjaga dan memberikan pembinaan kepada anaknya meskipun ayah dan ibunya sudah berpisah dan tidak tinggal di satu rumah lagi. Hal tersebut merupakan hal yang penting bagi tumbuh kembang anak, apalagi anak yang sedang berada di fase remaja. Fase dimana anak melakukan pencarian jati diri, oleh karena itu peran kedua orang tua tetap sangat dibutuhkan. Dengan penelitian ini pula diharapkan orang tua yang bercerai dan memiliki anak bisa mengantisipasi untuk tidak terjadinya perlakuan negatif yang dilakukan oleh remaja dengan bantuan pengawasan dan perhatian dari orang tuanya.

**PROMOSI KESEHATAN IBU DAN ANAK
MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK**

Oleh:

Gina Indah P. Nastia, Hadiyanto A. Rachim, & Maulana Irfan

Email:

gyn_nastia@yahoo.co.id; hrachiim@yahoo.co.id; mifran_crb@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini yang berjudul Promosi Kesehatan Ibu dan Anak Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, yang masih tergolong rendah akibat masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak, yang disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat yang rendah di bidang kesehatan, faktor lingkungan yang tidak memadai, faktor pemanfaatan layanan kesehatan, dan status gizi masyarakat yang rendah. Selain itu, artikel ini pun memberikan penjelasan mengenai pentingnya pelaksanaan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak, dan juga menjelaskan mengenai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak yang hendaknya dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak merupakan tolok ukur yang sangat penting bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh sebab itu, konsep-konsep berkaitan dengan upaya promosi kesehatan ibu dan anak akan ditelaah lebih jauh dalam artikel ini.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, Kesehatan Ibu dan Anak, Angka Kematian Ibu dan Anak, Promosi Kesehatan

ABSTRACT

This article titled Mother and Child's Health Promotion Through Corporate Social Responsibility (CSR) in Mother and Child's Health Field, has the aim to give a description of society's low health condition in Indonesia, effected by the high Number of Maternal and Child's Death, which caused by society's low education in health field, inadequate environment, health services functioning, and society's nutrition status factors. Besides it, this article also gives the explanation of the importance of CSR activities in mother and child's field, and it also explains about the mother and child's health promotion which should be attempted in the implementation of CSR activities in mother and child's health field. Mother and child's health is the most important benchmark in creating good qualities of nation's future generation.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Mother and Child's Health, Number of Maternal and Child's Death, Health Promotion

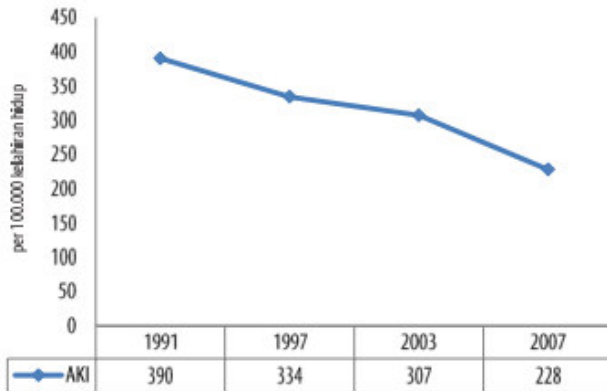
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mencakup pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat, dan pengembangan manusia. Fungsi pertumbuhan ekonomi menunjuk pada bagaimana melakukan wirausaha guna memperoleh pendapatan finansial yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya. Dalam hal ini, fungsi perawatan masyarakat mencakup sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, fungsi pengembangan manusia menunjuk pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas guna mendukung pembangunan. Fungsi pengembangan manusia dalam hal ini mencakup sektor pendidikan. Oleh karena itu, agar pembangunan nasional berjalan secara optimal dan mampu bersaing secara global, maka ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara seimbang. Hal ini dikarenakan fungsi pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan fungsi perawatan masyarakat dan fungsi pengembangan manusia. Sementara itu, fungsi perawatan dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang tak kalah penting, yakni kedua fungsi tersebut merupakan substansi dari pembangunan sosial yang mampu menopang pembangunan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Suharto, 2005: 5).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, kesehatan merupakan salah satu indikator yang mampu menopang pembangunan nasional disamping pendidikan dan ekonomi, sehingga kesehatan masyarakat dalam hal ini harus menjadi perhatian seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2007). Besarnya Angka Indeks Kesehatan, salah satunya dapat dipengaruhi oleh besarnya Angka Kematian Ibu dan Anak di suatu wilayah (www.bkkbn.go.id, diakses 21 Juni 2014, pukul 21.11 WIB).

Di Indonesia, tingkat kesehatan masyarakat justru masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, bahkan Vietnam. Hal ini dilihat dari besarnya Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia. Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun, namun laju peningkatan tersebut sangat lambat. Hal ini salah satunya dikarenakan masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak (www.health.kompas.com, diakses 8 April 2014, pukul 13.52). Menurut buku Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012 Republik Indonesia, dari tahun ke tahun, Indonesia mengalami laju penurunan Angka Kematian Ibu yang lambat sebagai berikut.

Gambar I



Angka Kematian Ibu di Indonesia Tahun 1991-2007

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

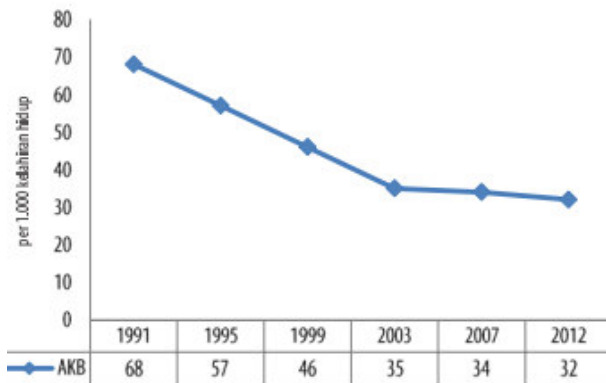
Dari gambar yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui pada tahun 1991, angka tersebut mencapai 390. Pada tahun 1997, angka tersebut mencapai 334. Pada

tahun 2003, angka tersebut mencapai 307. Pada tahun 2007, angka tersebut mencapai 228. Selain itu, laju penurunan Angka Kematian Bayi pun pada tahun 1991 hingga 2012 lambat. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II

Angka Kematian Bayi di Indonesia Tahun 1991-2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

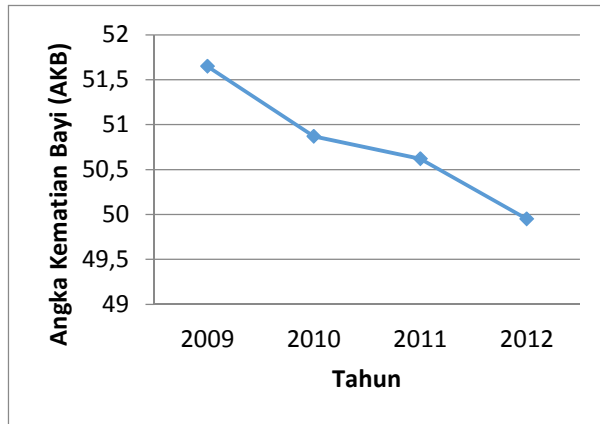


Berdasarkan gambar yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui pada tahun 1991, angka tersebut mencapai 68. Pada tahun 1995, angka tersebut mencapai 57. Pada tahun 1999, angka tersebut mencapai 46. Pada tahun 2003, angka tersebut mencapai 35. Pada tahun 2007, angka tersebut mencapai 34. Pada tahun 2012, angka tersebut mencapai 32.

Selain itu, masih terdapat wilayah yang memiliki Angka Kematian Ibu dan Anak yang tinggi di Indonesia, salah satu contohnya adalah Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang capaian Indeks Kesehatannya sebesar 68,90 poin. Angka tersebut masih berada di bawah capaian Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 72,67 poin. Hal ini dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih tinggi (www.inilahkoran.com, diakses 20 September 2014, pukul 11.59 WIB). Menurut data Departemen Kesehatan, pada tahun 2012, jumlah kematian ibu hamil di Kabupaten Garut mencapai 9 kasus, jumlah kematian ibu bersalin sebanyak 12 kasus, dan jumlah kematian ibu nifas sebanyak 7 kasus. Sementara itu,

jumlah kematian bayi di Kabupaten Garut mencapai 298 kasus dan jumlah kematian anak balita mencapai 15 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 persen kasus kematian bayi disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, laju penurunan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Garut setiap tahunnya lambat. Hal ini dapat dilihat pada deskripsi laju penurunan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Garut pada tahun 2009 hingga 2012 sebagai berikut.

Gambar III



Angka Kematian Bayi di Kabupaten Garut Tahun 2009-2012

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2012

Dari gambar yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Garut mencapai 51,65 pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, angka tersebut turun menjadi 50,87. Pada

tahun 2011, angka tersebut kembali menurun, yaitu mencapai 50,62, dan pada tahun 2012 Angka Kematian Bayi di Garut mencapai 49,95. Lambatnya penurunan Angka Kematian Bayi dan masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Garut ini diantaranya dikarenakan faktor ekonomi, faktor pemanfaatan layanan, kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta perilaku dan pendidikan masyarakat yang minim di bidang kesehatan

(www.fokusjabar.com, diakses 14 Juni 2014, pukul 0.09 WIB).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, rendahnya pendidikan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam hal perawatan ibu selama hamil dan proses melahirkan anak serta pemberian nutrisi yang cukup bagi ibu dan balitanya, berakibat pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penanganan proses kelahiran dengan pertolongan tenaga non medis, merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di masyarakat ini. Hal ini berakibat pada tidak terselamatkannya ibu dan/atau anak (www.garutkab.bps.go.id, diakses 8 Mei 2014, pukul 14.09 WIB). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia, dan salah satunya adalah oleh perusahaan melalui program kepeduliannya terhadap masyarakat, yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam ini mengundang kehadiran berbagai perusahaan eksploratif di Indonesia, seperti PT. Pertamina, PT. Chevron Geothermal Indonesia, PT. Indonesia Power, dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan yang aktivitas bisnisnya menggunakan sumber daya alam, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki

kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat (CSR). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara, kewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Tahun 2007 Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”

Kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, disamping ekonomi dan pendidikan. Kegiatan CSR dalam bentuk karitas saja kini belum cukup untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat yang rendah, terutama kesehatan ibu dan anak. Hal ini dikarenakan kegiatan CSR yang bersifat karitas tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat dan menyentuh perhatian masyarakat, namun hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti ketergantungan masyarakat terhadap bantuan perusahaan (Suharto, 2008). Oleh karena itu, pemeliharaan dan promosi kesehatan merupakan upaya yang sebaiknya dilakukan dalam kegiatan CSR perusahaan guna menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak dalam pelaksanaan kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak di Indonesia hendaknya dialamatkan pada empat determinan kesehatan, yakni perilaku, lingkungan (mencakup lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya), pelayanan kesehatan, dan hereditas. Dengan kata lain, upaya tersebut meliputi intervensi terhadap faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor hereditas (Notoatmodjo, 2007: 11-13). Intervensi pada faktor perilaku meliputi pendidikan kesehatan. Intervensi terhadap faktor lingkungan meliputi perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan pendidikan, perbaikan sosial ekonomi masyarakat, penstabilan politik dan keamanan, dan sebagainya. Intervensi terhadap faktor pelayanan kesehatan meliputi penyediaan atau perbaikan fasilitas pelayanan

kesehatan, perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Sementara itu, intervensi terhadap faktor hereditas meliputi perbaikan gizi ibu hamil dan anak. Intervensi yang dilakukan terhadap keempat faktor tersebut dikatakan efektif apabila mampu memberikan dampak positif terhadap aspek kognitif, afektif, psikomotor, serta lingkungan eksternal masyarakat yang dapat mendukung kesehatan. Dalam hal ini, kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak hendaknya bersifat promotif. PT. Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anaknya berupa promosi kesehatan yang telah dialamatkan pada keempat faktor tersebut.

Selain dialamatkan kepada keempat faktor kesehatan, upaya promosi kesehatan dalam kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak pun hendaknya melibatkan berbagai ahli yang bekerja dalam ranah kesehatan masyarakat, seperti pekerja sosial klinis, perawat, pendidik kesehatan, psikiater, dan ahli non klinis, seperti epidemiologis, administrator, dan pembuat kebijakan. Sebelum kegiatan dilakukan, *assessment* dan penggalan informasi terkait dengan penyebaran penyakit, serta determinan kesehatan ibu dan anak di dalam masyarakat. Perusahaan dalam hal ini melalui kegiatan CSR memiliki peran untuk mencegah masyarakat dari penyakit serta mengorganisir berbagai ahli yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memfasilitasi masyarakat (dalam Browne, 2006).

Kesehatan ibu dan anak merupakan tolok ukur yang sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak.

KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat sekaligus salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Suharto, 2007). Oleh karena itu, kesehatan masyarakat perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagai berikut: “Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun pada tahun 1948 mendefinisikan kesehatan sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial sejahtera dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan”. Kemudian pada tahun 1986, WHO dalam Piagam Ottawa untuk promosi kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan memiliki pengertian sebagai berikut: “Kesehatan merupakan sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif yang menekankan pada sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik.” Sementara itu, menurut Winslow (1920), kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai berikut.

“Ilmu dan seni pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat

untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya.”

Dari definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan kesehatan yang memperhatikan aspek perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan hereditas masyarakat, sehingga masyarakat mampu mandiri di bidang kesehatan.

Ilmu kesehatan masyarakat didasari oleh berbagai disiplin ilmu lainnya, yakni mencakup ilmu biologi, kedokteran, kimia, fisika, lingkungan hidup, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu pendidikan. Oleh karena itu, ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin (Winslow, 1920).

PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu bagian dari kesehatan masyarakat. Kesehatan ibu dan anak merupakan kondisi yang sangat penting bagi bangsa di masa yang akan datang. Kesehatan seorang ibu, baik secara jasmani maupun rohani, sangat berpengaruh pada kelahiran anak yang sehat secara jasmani maupun rohani. Anak yang terlahir sehat merupakan aset penting bagi bangsa. Hal ini dikarenakan anak merupakan penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kesehatan ibu dan anak harus diupayakan oleh seluruh pihak, baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, bahkan masyarakat itu sendiri. Upaya ini dapat dilakukan melalui Program Kesehatan Ibu dan Anak.

PROMOSI KESEHATAN

Promosi kesehatan sebagai bagian dari ilmu kesehatan, juga memiliki dua sisi, yakni sisi ilmu dan seni. Dari sisi seni, yakni praktisi promosi kesehatan merupakan penunjang bagi program-program kesehatan lain. Artinya, setiap program kesehatan, misalnya pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan, dan sebagainya, perlu ditunjang atau dibantu oleh promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Dalam hal ini, promosi kesehatan bukan hanya penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tapi juga disertai upaya-upaya memfasilitasi perubahan perilaku. Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2007: 23), promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Hal ini berarti bahwa promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan (baik fisik maupun nonfisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka.

PERAN PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

Menurut Notoatmodjo (2007: 11-13), terdapat empat faktor yang mempengaruhi kesehatan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor lingkungan (mencakup lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya), perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas (keturunan). Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat hendaknya dialamatkan pada keempat faktor tersebut. Dengan kata lain, intervensi atau upaya kesehatan masyarakat juga dikelompokkan menjadi intervensi terhadap faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas.

a) Peran Pendidikan Kesehatan dalam Faktor Lingkungan

Telah banyak fasilitas kesehatan lingkungan yang dibangun oleh instansi, baik pemerintah, swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, banyak pula proyek pengadaan sarana sanitasi lingkungan dibangun untuk masyarakat, seperti jamban keluarga, jamban umum, MCK (sarana mandi, cuci, dan kakus), tempat sampah, dan sebagainya. Namun, karena perilaku masyarakat, sarana atau fasilitas sanitasi tersebut kurang atau tidak dimanfaatkan dan dipelihara sebagaimana mestinya. Agar sarana sanitasi lingkungan tersebut dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka diperlukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Demikian pula dengan lingkungan non fisik, akibat masalah-masalah sosial banyak warga masyarakat yang menderita stres dan gangguan jiwa. Oleh karena itu, baik dalam memperbaiki masalah sosial maupun dalam menangani akibat masalah sosial (stres dan gangguan jiwa), diperlukan pendidikan kesehatan.

b) Peran Pendidikan Kesehatan dalam Perilaku

Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatannya, bagaimana menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan orang lain, ke mana harusnya mencari pengobatan bila sakit, dan sebagainya. Kesehatan bukan hanya diketahui dan disikapi, namun juga harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, atau masyarakat dapat berperilaku hidup sehat.

c) Peran Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Namun, pemanfaatan Puskesmas oleh

masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

d) Peran Pendidikan Kesehatan dalam Faktor Hereditas

Orang tua, khususnya ibu adalah faktor yang sangat penting dalam mewariskan status kesehatan kepada anak-anaknya. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Rendahnya kesehatan ibu bukan hanya karena sosial ekonominya rendah, namun sering juga disebabkan karena ibu tidak mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatannya atau tidak mengetahui makanan yang bergizi yang harus dimakan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan diperlukan pada kelompok ini agar masyarakat atau orang tua menyadari dan melakukan hal-hal yang dapat mewariskan kesehatan yang baik kepada keturunannya.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perusahaan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat berdiri sendiri. Eksistensi perusahaan memberikan pengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan perusahaan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitar wilayah operasinya, sehingga merugikan kehidupan masyarakat, seperti penggundulan hutan, kebakaran hutan, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Pengrusakan lingkungan tersebut membuat resah masyarakat, karena membuat mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun di sisi lain, perusahaan membutuhkan wilayah operasi yang ada di masyarakat untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan perlu memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat dengan membina hubungan baik yang bersifat timbal balik dengan lingkungan di sekitarnya. Artinya, adanya hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Hubungan baik ini diciptakan melalui penyelenggaraan program dari perusahaan yang dinamakan *Coprorate Social Responsibility* (CSR).

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* dalam Suharto (2009), CSR didefinisikan sebagai berikut:

“Tanggungjawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.”

Selain itu, menurut Johnson dan Johnson (2006) dalam Nor (2014), “*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan cara perusahaan dalam memanje proses bisnisnya untuk menghasilkan dampak yang positif terhadap

masyarakat secara keseluruhan”. Selanjutnya, Elkington (1998) menjelaskan bahwa CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan, di mana perusahaan menyisihkan sebagian dari keuntungannya (*profit*) untuk kepentingan *people* dan *planet* secara berkelanjutan dengan prosedur yang tepat serta profesional.

Selain itu, Rudito dan Famiola (2013) mendefinisikan CSR sebagai berikut:

“Secara umum, CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara”. Oleh karena itu, buku ini sedikit relevan dengan tema “CSR di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak.”

Mereka pun menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan CSR haruslah memperhatikan aspek kemanusiaan, *sustainable development* akan berjalan. *Sustainable future* ini tidak saja terwujud dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun juga memperhatikan aspek *human sustainability*. *Human sustainability* dalam hal ini didefinisikan sebagai berikut: “peningkatan kualitas manusia secara etika, seperti pendidikan, kesehatan, rasa empati, saling menghargai, dan kenyamanan yang terangkum dalam tiga kapasitas, yaitu spiritual, emosional, dan intelektual”. Dari definisi-definisi tersebut, CSR di bidang kesehatan ibu dan anak ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak.

PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mampu mempengaruhi ketiga indikator kesejahteraan dan pembangunan nasional, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan menurunnya tingkat perekonomian, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk berpengaruh terhadap semakin besarnya kesenjangan pendapatan dan sosial antar wilayah, yakni penduduk yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan ini tentu berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan mereka yang rendah, karena untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, masyarakat harus memiliki kondisi ekonomi yang cukup untuk membayar biaya pelayanan-pelayanan tersebut.

Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam bidang kesehatan, sebagai akibat dari rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini dapat diketahui dari faktor-faktor penyebab tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni faktor pendidikan dan perilaku masyarakat yang minim di bidang kesehatan, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, serta faktor status gizi masyarakat yang minim. Oleh karena

itu, upaya peningkatan (promosi) kesehatan ibu dan anak hendaknya dialamatkan pada keempat faktor kesehatan tersebut guna menciptakan masyarakat yang mandiri di bidang kesehatan ibu dan anak. Hal ini diungkapkan oleh Notoatmodjo (2005:11) dalam bukunya yang berjudul *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*.

Selama ini, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui Program Kesehatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah selama ini merupakan satu-satunya sektor formal yang memiliki tanggungjawab atas penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia. Namun, upaya pemerintah belum berhasil menurunkan laju Angka Kematian Ibu dan Anak secara cepat. Pemerintah dalam hal ini membutuhkan bantuan berbagai sektor lainnya untuk dapat menurunkan laju Angka Kematian Ibu dan Anak secara cepat. Salah satu sektor yang memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia adalah perusahaan, melalui program CSRnya.

Promosi kesehatan merupakan bentuk dari upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak secara berkelanjutan, dengan meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak. Salah satu perusahaan yang mampu melaksanakan promosi kesehatan melalui program CSRnya adalah PT. Pertamina. Pelaksanaan promosi kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan dalam program CSR di bidang kesehatan ibu dan anak oleh PT. Pertamina, telah dialamatkan pada faktor-faktor kesehatan yang sesuai dengan konsep Notoatmodjo (2005), dan telah terbukti berhasil dalam pelaksanaan programnya, sehingga PT. Pertamina merupakan salah satu contoh perusahaan yang perlu menjadi contoh bagi perusahaan lainnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CSR di bidang kesehatan ibu dan anak.

PENUTUP

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan dan pembangunan nasional, sehingga kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. Namun, kondisi kesehatan di Indonesia tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu dan Anak yang masih tinggi di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia menurun, namun laju penurunannya lambat, sehingga ini masih menjadi permasalahan. Lambatnya laju penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang minim di bidang kesehatan, faktor lingkungan yang tidak memadai, pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tidak optimal, dan status gizi masyarakat yang minim. Pasalnya, kesehatan ibu dan anak merupakan tolok ukur yang penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dalam hal ini perlu diupayakan guna menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak sekaligus memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia.

Berbagai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh perusahaan melalui kegiatan CSRnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan CSR yang dilakukan tersebut hendaknya dialamatkan pada keempat faktor kesehatan, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan hereditas. Hal ini berarti kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak sudah seharusnya tidak lagi berbentuk *charity*, seperti pemberian pengobatan gratis dan sejumlah uang, melainkan harus memberikan intervensi terhadap keempat faktor kesehatan tersebut dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Browne, Arthur. 2006. *Handbook of Health Social Work. First Edition*. Hoboken, New Jersey: Wiley, John and Sons, Inc.
- Buku Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012 Republik Indonesia
- Elkington, John. 1998. *Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers
- Hadi, Nor. 2014. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu Cetakan Kedua
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- _____. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Corporate Social Responsibility: What Is and Benefits for Corporate*. Jakarta: Majalah Bisnis dan CSR. Vol. 1 No. 4
- _____. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta

Sumber Elektronik:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. *Kesehatan*.
<http://garutkab.bps.go.id/index.php?hal=subject&id=6> (diakses 8 Mei 2014, pukul 14.09 WIB)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2013. *Sembilan Indikator Pembangunan Kesehatan Perlu Perhatian Serius*.
<http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=794> (diakses 21 Juni 2014, pukul 21.11 WIB)
- Departemen Kesehatan. 2012. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012*.
www.depkes.go.id/downloads/PROFIL_KES_PROVINSI_2012/12_Profil_Kes.Prov.JawaBarat_2012.pdf (diakses 14 Juni 2014, pukul 21.03 WIB)

Fokus Jabar. 2013. *Jangan Bangga Tempat Lima Besar Kematian Ibu dan Anak di Jabar*. <http://fokusjabar.com/2013/02/18/jangan-bangga-tempati-lima-besar-kematian-ibu-dan-anak-di-jabar/> (diakses 14 Juni 2014, pukul 0.09)

Kompas. *Soal Kesehatan, Indonesia Tertinggal dari Tetangga*. 2013. <http://health.kompas.com/read/2013/05/22/09522188/Soal.Kesehatan.Indonesia.Tertinggal.dari.Tetangga> (diakses 8 April 2014, pukul 13.52)

Zainulmukhtar, Nul. 2013. *IPM Garut Masih di Bawah IPB Jabar*. <http://www.inilahkoran.com/read/detail/2054954/ipm-garut-masih-di-bawah-ipm-jabar> (diakses 20 September 2014, pukul 14.17 WIB)

Sumber Lainnya:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Menteri Negara BUMN Tahun 2007

PENANGANAN GIZI BURUK DENGAN PERSPEKTIF PERSON IN ENVIRONMENT OLEH PEKERJA SOSIAL

Oleh:

Zulkarnain Bastari, Moch. Zainuddin, Nurliana Cipta Apsari

Email:

zulkarnainbastarii@gmail.com; moch.zainuddin@yahoo.com;
nurliana.apsari@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Anak harus mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan makan-makanan yang bergizi masih kurang. *Person in environment* memandang faktor penyebab gizi buruk berasal dari individu dan lingkungan. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke 5 di dunia dengan jumlah penduduk 252.124.458 jiwa, jumlah penduduk miskin 28,53 juta orang dan hidup dilingkungan tidak sehat, dan setiap 5-6 juta bayi lahir di Indonesia, 75 - 85 persen berasal dari keluarga miskin, sekitar 1,67 juta jiwa menderita gizi buruk dan sekitar 10ribu anak meninggal akibat gizi buruk sehingga dibutuhkan intervensi khusus oleh pekerja sosial yang melihat dari *person in evirenment* untuk menanggulangi gizi buruk yaitu berupa pemberdayaan masyarakat miskin, penyadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan penguatan sektor pertanian.

Kata kunci: Gizi Buruk, *Person In Envirenment*, Pekerja Sosial

Pendahuluan

Banyaknya kasus meninggalnya anak balita gizi buruk banyak terjadi didaerah Indonesia. banyak hal yang menyebabkan anak balita gizi buruk. Seperti yang dikutip dari surat kabar online atcjejpos sebagai berikut:

Dua dari tujuh anak yang menderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara dikabarkan meninggal dunia. Data tersebut merupakan hasil survey Dinas Kesehatan Aceh Utara terhitung awal Januari hingga awal November 2014. "Tahun ini terdapat tujuh kasus anak penderita gizi buruk. Satu kasus di Sawang, satu di Cot Girek, satu di Lhoksukon, satu di Matangkuli, satu di Samudera, dan tiga kasus di Syamtalira Bayu," ujar Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, dr Effendi kepada ATJEHPOST.co, Rabu 12 November 2014. Ia menyebutkan dua penderita gizi buruk di Syamtalira Bayu sudah meninggal dunia. Meskipun angka tersebut masih tinggi, tapi terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 21 kasus. "Untuk anak penderita gizi buruk lainnya kini kondisinya mulai membaik dan berat badan mulai naik. Selama enam bulan secara rutin kita berikan penyuluhan kepada ibunya, anaknya kita rawat dan kita berikan PMT (makanan tambahan) berupa susu, bubur, kacang hijau dan biscuit," katanya. Angka gizi

buruk di Aceh Utara masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya faktor kemiskinan, dan minimnya pengetahuan orangtua dalam merawat anak. “Kita terus berupaya untuk menekan angka gizi buruk di Aceh Utara dengan memberikan penyuluhan ke desa-desa. Besar harapan untuk tahun mendatang kasus gizi buruk semakin berkurang,” (<http://atjehpost.co/m/read/14833/Tujuh-Anak-di-Aceh-Utara-Derita-Gizi-Buruk-Dua-Meninggal-Dunia>) Di unduh pada tanggal 17 desember 2014.

Diketahui sampai saat ini gizi buruk masih terus terjadi di Indonesia sampai sekarang ini, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan terpisok. Gizi buruk yaitu yang biasa kita kenal sebagai malnutrisi atau Kurang Energi Protein (KEP) yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian pada anak-anak dan balita.

Gizi buruk di Indonesia menurut kementerian kesehatan biasa disebut dengan busung lapar atau *Honger oedema* disebabkan dari salah satu dari simtoma *marasmus* dan *kwashiorkor*. Gizi buruk disebabkan karena kekurangan protein kronis pada anak-anak yang sering disebabkan oleh beberapa hal, seperti anak tidak cukup mendapat makanan bergizi, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai dan anak menderita infeksi penyakit. selain itu bencana alam, daya beli masyarakat rendah, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan yang rendah mempengaruhi gizi buruk.

Pekerja sosial memiliki peranan dalam mengembalikan keberfungsian sosial. Pekerja sosial memiliki tahapan-tahapan intervensi untuk mengurangi gizi buruk pada anak. Tahapan-tahapannya adalah assessment, plant of treatment treatment dan terminasi. Gizi buruk menurut Kleigmen *et al*, (2007) dibagi menjadi dua menurut yaitu malnutrisi primer dan malnutrisi sekunder.

Malnutrisi Primer adalah penyebab gizi buruk di daerah pedesaan atau daerah miskin lainnya sering disebut malnutrisi primer, yang disebabkan karena masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan, dan kurangnya asupan gizi. Gejala klinis malnutrisi primer sangat bervariasi tergantung derajat dan lamanya kekurangan energi dan protein, umur penderita dan adanya gejala kekurangan vitamin dan mineral lainnya. Kasus tersebut sering dijumpai pada anak usia 9 bulan hingga 5 tahun. Pertumbuhan yang terganggu dapat dilihat dari kenaikan berat badan terhenti atau menurun, ukuran lengan atas menurun, pertumbuhan tulang (maturasi) terlambat, perbandingan berat terhadap tinggi menurun. Gejala dan tanda klinis yang tampak adalah anemia ringan, aktifitas berkurang, kadang di dapatkan gangguan kulit dan rambut

Malnutrisi sekunder adalah gangguan pencapaian kenaikan berat badan yang bukan disebabkan penyimpangan pemberian asupan gizi pada anak karena adanya gangguan pada fungsi dan sistem tubuh. Gangguan sejak lahir yang terjadi pada sistem saluran cerna, metabolisme, kromosom atau kelainan bawaan jantung,

ginjal. Kasus gizi buruk di kota besar biasanya didominasi oleh malnutrisi sekunder.

Gizi buruk pada Anak Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia yang tidak terkendali menimbulkan persoalan gizi buruk di kalangan anak-anak dan balita, karena jumlah penduduk yang tidak terkendali menjadikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Persoalan gizi buruk di sejumlah daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke mengkhawatirkan karena jumlah penderita gizi buruk yang masih tinggi dari setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian serius, baik perhatian pemerintah maupun semua lapisan masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia 252.124.458 jiwa pada tahun 2013. Penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 28,553.930 orang, sekitar 11,25% dan 20% dari jumlah penduduk miskin adalah anak-anak dan setiap 5-6 juta bayi lahir di Indonesia, 75 - 85 persen berasal dari keluarga miskin. Dan sekitar 1,67 juta jiwa anak-anak menderita busung lapar

Perbandingan gizi kurang gizi buruk tahun 2007 dan 2013. Jumlahnya meningkat dari tahun 2007 hingga 2013. Yaitu sebagai berikut:

Secara nasional diperkirakan jumlah Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang sebesar 19,6 %. Jumlah ini jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2007, terjadi peningkatan yaitu dari 18,4 %. Bila dilakukan konversi ke dalam jumlah absolutnya, maka jumlah Balita pada tahun 2013 adalah 23.708.844, sehingga jumlah Balita Gizi buruk dan kurang sebesar 4.646.933 Balita.

Mengatasi gizi buruk pada anak balita, dibutuhkan pekerja sosial. pekerja sosial berperan dalam Peranan Fasilitatif, peranan Educational. Peranan-peranan Representasional, Peranan Teknis

Pekerjaan Sosial bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu, baik secara individual maupun kelompok, dimana kegiatannya difokuskan kepada relasi sosial mereka khususnya interaksi orang-orang dengan lingkungannya. (Dalam Rex A. Skidmore, Milton Thackeray, dan O William Farley Introduction to Social Work, 1988 : 6, New Jersey: Simon & Scuster Englewood Cliffs.)

Definisi peran menurut Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (1997) adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam praktik pekerjaan sosial sebuah proses pemecahan masalah sesuai peran dan tujuan meliputi : **assessment—> plan → intervention—> termination and evaluation.**

Pekerja sosial melihat permasalahan diatas dilihat dari perspektif *person in envirenment*. Menurut Budhi Wibawa (2010:170), PIE adalah suatu metode untuk menggambarkan, mengklasifikasi dan mengkoding permasalahan-permasalahan

pasien dan klien dewasa yang memperoleh pelayanan pekerja sosial. PIE adalah suatu *holistic model system* yang mengidentifikasi dan mengklasifikasi permasalahan-permasalahan klien atau pasien dalam keberfungsian sosial. Di dalamnya termasuk assessment mengenai individunya dan lingkungannya.

person in environment (PIE) dalam suatu *assessment* fokusnya tidak hanya manusia tetapi juga system lingkungan yang berdampak pada kehidupannya. Pekerja sosial mengassessment penyebab-penyebab busung lapar dari perspektif *person in environment*. Pekerja sosial melihat kondisi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua dan kondisi lingkungan

Kondisi ekonomi keluarga berpengaruh karena ekonomi berhubungan dengan pendapatan. pendapatan orangtua yang rendah menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga daya beli dan akses terhadap makanan yang bergizi dan bermutu menjadi sulit, permasalahan tersebut berdampak kepada anak-anak dan balita. Anak-anak dan balita yang akan menjadi korban karena makan-makanan yang di beli orang tua tidak bergizi

Pendidikan orang tua yang rendah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pemilihan makan-makanan bergizi. Anak tidak mendapatkan makan-makanan yang bergizi membuat anak-anak dan balita tidak bisa menjadi anak-anak yang berbadan sehat. Hal itu karena anak-anak tidak mendapatkan makanan yang sehat dan menyehatkan. Kadar protein yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya sangat minim dan berada di angka nol. Sangat wajar, apabila makanan yang masuk ke tubuhnya pun tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan seluruh sel tubuhnya untuk menjadi sehat.

Pekerja sosial melihat tidak adanya minuman yang mengandung zat-zat vitamin juga berdampak pada gizi buruk anak dan balita. Minumannya sangat jauh dari kadar-kadar vitamin. Selain itu, air yang digunakan untuk minum berasal dari air yang tidak bersih, karena sumbernya tidak bersih. hal itu, sangat dimungkinkan untuk menghambat kemajuan kesehatan anak-anak. lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih, dapat menyebabkan sirkulasi udara menjadi tidak sehat, hal itu berdampak kepada kesehatan pernapasan anak-anak.

Pekerja sosial melihat kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat membuat penyakit akan mudah datang terhadap anak. Akses pelayanan kesehatan sangat penting karena penderita gizi buruk harus terus diawasi oleh medis mengenai nutrisi yang diterima. Biasanya anak yang menderita gizi buruk akan mudah terkena penyakit.

Gizi buruk mengakibatkan kebodohan atau kurangnya tumbuh kembang otak yang dapat bersifat permanen dan tidak dapat terpulihkan. Jutaan anak dan balita tumbuh dengan kualitas rendah serta kehilangan masa emas.

Seharusnya nutrisi kepada anak harus tercukupi dengan memberikan makanan yang bergizi berupa sayur mayur, buah-buahan, makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Selain itu setiap balita yang baru lahir wajib diberikan asi eksklusif selama 6 bulan untuk memenuhi nutrisinya.

Nutrisi pada anak harus terpenuhi karena anak merupakan aset bangsa, generasi dan penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap anak mempunyai hak-hak untuk dapat tumbuh, berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi masih banyak anak yang tidak mendapatkan haknya karena menderita gizi buruk. Anak tidak dapat menyelesaikan task-task pada masa perkembangannya. Anak menjadi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indoensia bergantung pada kualitas penerus bangsa. Namun masih banyak anak yang menderita gizi buruk. Anak sebagai generasi penerus bangsa bisa terhambat perkembangannya karena dampak yang dapat ditimbulkan oleh gizi buruk.

Pekerja sosial dalam tahapan plan of treatment melihat dari assessment yang dilakukan. Plan of treatment yang dilakukan adalah memberdayakan masyarakat miskin, menyadarkan masyarakat akan hidup sehat, mempermudah akses terhadap pelayanan sosial, kebijakan untuk masyarakat dan pertanian untuk keberlanjutan pang masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut edi suharto merupakan salah satu metode atau pendekatan inti yang menunjukkan keunikan pekerja sosial. pekerja sosial menfokuskan kepada keberfungsian klien dalam konteks organisasi, masyarakat dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan individu dan kelompok.

Pekerja sosial menintervensi masyarakat miskin dengan memusatkan kepada pemberdayaan masyarakat miskin, misalnya dengan pelatihan atau program padat karya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti dibukanya akses lapangan pekerjaan, dengan adanya lapangan pekerjaan, masyarakat akan mudah untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki pendapatan. Masyarakat juga akan bisa memanfaatkan hasil pendapatannya untuk membeli makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.

Membuat pelayanan kesehatan yang mudah diakses rakyat kecil, seperti puskesmas dan posyandu dan program-program pemberian makanan tambahan. Pelayanan posyandu yang diselenggarakan pemerintah harus mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Pemerintah memberikan pemberdayaan kepada kader-kader posyandu. Kader adalah anggota masyarakat yang diberi keterampilan untuk dapat menjalankan posyandu, peran masyarakat sangat penting dalam melibatkan organisasi seperti karang taruna, LKMD dan PKK, untuk memperluas jaringan posyandu. Melalui posyandu, pemerintah ingin menciptakan masyarakat sehat dengan pembangunan kesadaran mengenai arti pentingnya masalah gizi terhadap kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata. hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya posyandu gratis, dan penyuluhan terhadap ibu hamil dan balita Menuju Sehat.

Mengubah arah kebijakan publik agar segala kebijakannya pertama-tama adalah kepentingan rakyat/umum (public oriented). Pemerintah mengubah arah kebijakannya dari yang sekadar emergensi dengan pendekatan jangka pendek menjadi pendekatan jangka panjang serta mengambil kebijakan publik yang memberikan hak-hak masyarakat atas pembangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan

Pekerja sosial menyadarkan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan menyadarkan pola hidup sehat. Penysadaran pola hidup sehat membuat masyarakat memilih makan-makanan yang bergizi dan sehat.

Pekerja sosial bisa menerapkan atau mengaplikasikan pemberdayaan teknologi pertanian yang tepat yang sesuai dengan kondisi alam di setiap daerah. Di samping itu, perlu juga mengembangkan komoditi yang merupakan kelebihan atau keunggulan dari daerah tersebut, misalnya mengembangkan peternakan dengan membagikan 'pinjaman' bibit hewan dengan bunga lunak.

Pekerja sosial saat terminasi tetap dalam kerangka jangka panjang sehingga tidak membuat rakyat menjadi tergantung. Dari sisi pemerintah sendiri, hendaknya prinsip good government benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan.

Mencuatnya kasus-kasus gizi buruk juga sangat berkaitan erat dengan faktor budaya yang ada di masyarakat kita. Selama ini masih banyak budaya di masyarakat kita yang kurang mendukung kesadaran tentang pentingnya gizi anak. Oleh karena itu, sudah saatnya budaya yang menyimpang harus kita ubah dan meluruskan pandangan masyarakat selama ini apabila kita semua tidak ingin kehilangan generasi penerus bangsa.

Kesimpulan

Masalah gizi buruk mempunyai dimensi yang sangat luas, baik dari konsekuensinya terhadap penurunan kualitas sumberdaya manusia maupun faktor penyebab. Gizi buruk secara langsung maupun tidak langsung akan menurunkan kecerdasan anak, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta menurunkan produktivitas. Dari aspek penyebab, gizi buruk sangat terkait dengan kondisi daya beli keluarga, tingkat pendidikan dan pola asuhan gizi keluarga serta keadaan kesehatan.

Menyelesaikan permasalahan kematian Anak akibat gizi buruk, sangat diperlukan keterlibatan pemerintah dan lapisan masyarakat untuk mengelola penanganan anak gizi buruk. sehingga diharapkan semua kasus gizi buruk dapat ditangani dengan baik.

Penanggulangan gizi buruk tidak dapat melibatkan satu sector saja yaitu sektor kesehatan, tetapi semua sector. Pekerja sosial melihat gizi buruk dari *person in environment*. Sehingga dalam penyelesaian masalah gizi buruk perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, penysadaran masyarakat dan peningkatan sekto pangan.

Daftar Pustaka

Skidmore.1987.*Introduction to Social Work Sixth Edition*. Prentice Hall
International Edition

Wibawa, Budhi, et al.2010.*Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya
Padjadjaran:Bandung

Rex A. Skidmore, Milton Thackeray, dan O William Farley Introduction to Social Work, New Jersey: Simon & Scuster Englewood Cliffs

Itasca, Illinois Social Work Practice: Model and Methode, Peacock Publishers

Soejanto, Agoes. 2005. Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT Rineka Cipta

KPAI. 2007, Jalan Terjal Menujun Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Jakarta

RISKEDES 2013, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2006

Suahrto, Edi, Pengembangan masyarakat dalam praktek pekerjaan sosial

Risk Factors of Protein Energy Malnutrition "Kwashiorkor and Marasmus" among Children Under Five Years of Age in Assiut University Children Hospital

Rencana Aksi Nasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk Tahun 2005 – 2009, Kementrian Kesehatan RI

Pedoman Pelayanan Anak Gizi Buruk 2011, Kementrian Kesehatan RI

Jeffrey R. EdwardsKenan-Flagler Research, Person-Environment Fit Theory: Conceptual Foundations, Empirical Evidence, and Directions for Future, Business School University of North Carolina

<http://www.bps.go.id/getfile.php?news=1070>

<http://atjehpost.co/m/read/14833/Tujuh-Anak-di-Aceh-Utara-Derita-Gizi-Buruk-Dua-Meninggal-Dunia>

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENTAL

oleh:

Berry Choresyo, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hery Wibowo

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang keberadaan penyakit mental yang muncul di masyarakat namun kurang disadari oleh masyarakat itu sendiri sehingga seringkali menimbulkan perlakuan maupun anggapan yang salah terhadap penderita kelainan mental baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai kelainan mental dan kurangnya kesadaran untuk menghubungi pihak ahli yang mampu menangani penyakit mental tersebut. Sosialisasi terkait penyakit mental sangat diperlukan karena fenomena kelainan mental seperti autism, down syndrome maupun penyakit mental lainnya yang juga bisa terjadi pada orang dewasa seperti Skizofrenia, bipolar atau depresi berat, sudah ada sejak dulu dan fenomenanya masih sering ditemukan namun pemahaman akan hal ini masih kurang di masyarakat, terutama masyarakat daerah pedalaman atau terpencil.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial. Kondisi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya dengan baik.

Kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, serta kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. (*Zakiyah Darojah, 1975*). Kesehatan mental atau dapat juga disebut Kesehatan jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia, kerja dan fisik individu.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit atau kelainan mental, seringkali menimbulkan perlakuan yang salah terhadap penderita

penyakit mental. Seperti contohnya terdapat fenomena dimana keluarga di daerah pelosok Indonesia lebih memilih memasung anggota keluarganya yang mengidap penyakit mental seperti Skizofrenia ketimbang membawanya ke rumah sakit. Belum lagi penderita penyakit mental yang diolok-olok dan dijauhi lingkungannya karna dianggap menyusahkan. Ada terdapat banyak jenis penyakit mental diluar down syndrome dan autisme yang sulit terdeteksi melalui penampilan luar dan bukan merupakan bawaan dari lahir seperti contohnya schizophrenia, bipolar disorder, manic, depresi, paranoid dan lain-lain. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai penyakit mental, ada yang percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap penyakit jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang keberadaan berbagai penyakit mental, cara mengidentifikasinya dan bagaimana menanganinya, seringkali menjadi pemicu terjadinya perlakuan yang salah dari masyarakat terhadap penderita. Kurangnya pengetahuan akan gejala-gejala penyakit mental juga membuat orang yang sebenarnya mengalami gejala penyakit mental menjadi tidak sadar dan enggan berkonsultasi dengan spesialis kejiwaan untuk memeriksa keadaan jiwanya.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Indonesia 2007 menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa berat (psikosis) di Indonesia adalah 0.46 persen atau sejuta orang. Dari total populasi risiko 1,093,150 hanya 3.5 persen atau 38,260 yang baru terlayani di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai. Penyakit mental tidak hanya terjadi pada orang dewasa yang mengalami tekanan pada hidupnya, banyak juga penyakit mental yang tidak terlihat secara fisik terjadi pada anak-anak. Seperti contohnya ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) yang tidak terlihat secara fisik namun dapat diidentifikasi melalui tingkah laku anak yang seperti tidak bisa diam, sulit mendengarkan perintah, tidak sabaran dan tidak bisa fokus. Jika orang tua tidak menyadari hal ini dan tidak memberikan treatment yang tepat, anak yang mengidap penyakit tersebut akan tumbuh dewasa dengan terus membawa gejala tersebut dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu, penting bagi masyarakat Indonesia baik di daerah perkotaan sampai pedesaan untuk mengetahui dan mengenal gejala-gejala penyakit mental dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut dan juga mengerti bagaimana perlakuan kita seharusnya ketika menemui penderita penyakit mental di sekitar kita.

Pembahasan

Definisi dan Penyebab

Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah-laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian

dengan baik. Contoh-contoh yang termasuk kedalam penyakit mental atau yang biasa disebut juga kelainan mental antara lain: Depresi, Anxiety Disorder (Rasa Takut), Skizofrenia, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), Eating disorder sampai kepada tindakan adiksi yang atau kecanduan terhadap sesuatu yang tidak wajar seperti obat-obatan atau bahan kimia tertentu. Banyak orang yang mengalami kejang-kejang yang terjadi pada mentalnya seperti misalnya merasa stress, depresi takut, maupun gelisah, kondisi tersebut dapat juga dikatakan sebagai gejala awal dari gangguan mental, namun baru dapat dikatakan sebagai sebuah gangguan mental apabila perasaan-perasaan tersebut sudah melewati batas kewajaran sehingga mengganggu keberfungsian sosial atau dapat juga berpengaruh kepada menurunnya kondisi kesehatan secara jasmani. Gangguan mental dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan banyak masalah dalam keberfungsian sosial seperti tidak dapat bekerja sama dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Gejala-gejala dan penyakit mental tersebut dapat disembuhkan melalui konseling dan terapi oleh ahli kejiwaan atau psikiater.

Penyebab terjadinya penyakit mental belum ditemukan secara jelas dan sangat bervariasi. Namun dalam penelusurannya, penyebab utamanya kemungkinan di badan (somatogenik), dilingkungan sosial (sosiogenik) ataupun pada psikologis (psikogenik). Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbullah gangguan badan ataupun jiwa. Umpamanya seorang dengan depresi, karena kurang makan dan tidur daya tahan badaniah seorang berkurang sehingga mengalami keradangan tenggorokan atau seorang dengan mania mendapat kecelakaan.

Sebaliknya seorang dengan penyakit badaniah umpamanya keradangan yang melemahkan, maka daya tahan psikologiknya pun menurun sehingga ia mungkin mengalami depresi. Sudah lama diketahui juga, bahwa penyakit pada otak sering mengakibatkan gangguan jiwa. Contoh lain ialah seorang anak yang mengalami gangguan otak (karena kelahiran, keradangan dan sebagainya) kemudian menjadi hiperkinetik dan sukar diasuh. Ia mempengaruhi lingkungannya, terutama orang tua dan anggota lain serumah. Mereka ini bereaksi terhadapnya dan mereka saling mempengaruhi.

Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor pada ketiga unsur itu yang terus menerus saling mempengaruhi, yaitu:

1. Faktor keturunan

Pada mongoloisme atau sindroma Down (suatu macam retardasi mental dengan mata sipit, muka datar, telinga kecil, jari-jari pendek dan lain-lain) terdapat trisoma (yaitu tiga buah, bukan dua) pada pasangan Kromosoma No. 21.

Sindroma Turner (dengan ciri-ciri khas : tubuh pendek, leher melebar, infantilisme seksual) ternyata berhubungan dengan jumlah kromosoma sex yang abnormal. Gangguan yang berhubungan dengan kromosoma sex dikatakan “terikat pada sex” (“sex linked”), artinya bahwa efek genetik itu hanya terdapat pada kromosoma sex. Kaum wanita ternyata lebih kurang peka terhadap gangguan yang terikat pada sex, karena mereka mempunyai dua kromosoma X : bila satu tidak

baik, maka yang lain biasanya akan melakukan pekerjaannya. Akan tetapi seorang pria hanya mempunyai satu kromosoma X dan satu kromosoma Y, dan bila salah satu tidak baik, maka terganggu lah ia. Masih dipermasalahkan, betulkan pria dengan XYY lebih cenderung melakukan perbuatan kriminal yang kejam?

2. Faktor Konstitusi

Konstitusi pada umumnya menunjukkan kepada keadaan biologik seluruhnya, termasuk baik yang diturunkan maupun yang didapati kemudian; umpamanya bentuk badan (perawakan), sex, temperamen, fungsi endoktrin daurat syaraf jenis darah Jelas bahwa hal-hal ini mempengaruhi perilaku individu secara baik ataupun tidak baik, umpamanya bentuk badan yang atletik atau yang kurus, tinggi badan yang terlalu tinggi ataupun terlalu pendek, paras muka yang cantrik ataupun jelek, sex wanita atau pria, fungsi hormonal yang seimbang atau yang berlebihan salah satu hormon, urat syaraf yang cepat reaksinya atau yang lambat sekali, dan seterusnya. Semua ini turut mempengaruhi hidup seseorang.

3. Cacat Kongenital

Cacat kongenital atau sejak lahir dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, terlebih yang berat, seperti retardasi mental yang berat. Akan tetapi pada umumnya pengaruh cacat ini pada timbulnya gangguan jiwa terutama tergantung pada individu itu, bagaimana ia menilai dan menyesuaikan diri terhadap keadaan hidupnya yang cacat atau berubah itu.

Orang tua dapat mempersukar penyesuaian ini dengan perlindungan yang berlebihan (proteksi berlebihan). Penolakan atau tuntutan yang sudah di luar kemampuan anak. Singkatnya : kromosoma dan “genes” yang defektif serta banyak faktor lingkungan sebelum, sewaktu dan sesudah lahir dapat mengakibatkan gangguan badaniah. Cacat badaniah biasanya dapat dilihat dengan jelas, tetapi gangguan sistim biokimiawi lebih halus dan sukar ditentukan. Gangguan badaniah dapat mengganggu fungsi biologik atau psikologik secara langsung atau dapat mempengaruhi daya tahan terhadap stres.

4. Perkembangan Psikologik yang salah, Perkembangan psikologik yang salah, seperti:

- a. Ketidak matangan atau fixasi, yaitu individual gagal berkembang lebih lanjut ke fase berikutnya;
- b. “Tempat-tempat lemah” yang ditinggalkan oleh pengalaman yang traumatik sebagai kepekaan terhadap jenis stres tertentu, atau
- c. disorsi, yaitu bila individu mengembangkan sikap atau pola reaksi yang tidak sesuai atau gagal mencapai integrasi kepribadian yang normal. Kita akan membicarakan beberapa faktor dalam perkembangan psikologik yang tidak sehat

5. Deprivasi dini

Deprivasi maternal atau kehilangan asuhan ibu di rumah sendiri, terpisah dengan ibu atau di asrama, dapat menimbulkan perkembangan yang abnormal. Deprivasi rangsangan umum dari lingkungan, bila sangat berat, ternyata berhubungan dengan retardasi mental. Kekurangan protein dalam makanan, terutama dalam jangka waktu lama sebelum anak berumur 4 tahun, dapat mengakibatkan retardasi mental. Deprivasi atau frustrasi dini dapat menimbulkan “tempat-tempat yang lemah” pada jiwa, dapat mengakibatkan perkembangan yang salah ataupun perkembangan yang berhenti. Untuk perkembangan psikologik rupanya ada “masa-masa gawat”. Dalam masa ini rangsangan dan pengalaman belajar yang berhubungan dengannya serta pemuasan berbagai kebutuhan sangat perlu bagi urutan perkembangan intelektual, emosional dan sosial yang normal

6. Pola keluarga yang patagonik

Dalam masa kanak-kanak keluarga memegang peranan yang penting dalam pembentukan kepriadian. Hubungan orangtua-anak yang salah atau interaksi yang patogenik dalam keluarga sering merupakan sumber gangguan penyesuaian diri. Kadang-kadang orangtua berbuat terlalu banyak untuk anak dan tidak memberi kesempatan anak itu berkembang sendiri. Ada kalanya orangtua berbuat terlalu sedikit dan tidak merangsang anak itu atau tidak memberi bimbingan dan anjuran yang dibutuhkannya. Kadang-kadang mereka malahan mengajarkan anak itu pola-pola yang tidak sesuai.

Akan tetapi pengaruh cara asuhan anak tergantung pada keadaan sosial secara keseluruhan dimana hal itu dilakukan. Dan juga, anak-anak bereaksi secara berlainan terhadap cara yang sama dan tidak semua akibat adalah tetapi kerusakan dini sering diperbaiki sebagian oleh pengalaman di kemudian hari. Akan tetapi beberapa jenis hubungan orangtua-anak sering terdapat dalam latar belakang anak-anak yang terganggu, umpamanya penolakan, perlindungan berlebihan, manja berlebihan, tuntutan perfeksionistik, standard moral yang kaku dan tidak realistik, disiplin yang salah, persaingan antar saudara yang tidak sehat, contoh orangtua yang salah, ketidak-sesuaikan perkawinan dan rumah tangganya yang berantakan, tuntutan yang bertentangan.

Jenis-Jenis penyakit mental:

Penyakit mental memiliki jenis atau tipe berbeda yang juga akan berpengaruh terhadap tingkat parahnya penyakit. Beberapa tipe penyakit sosial yang ada antara lain: Anxiety Disorder (Paranoid), Depresi, Skizofrenia, Bipolar Mood Disorder, Personality Disorder, Trauma dan kelainan makan. Penyakit sosial yang paling umum terjadi adalah Paranoid dan depresi. Terkadang ada saatnya manusia berhadapan dengan perasaan tertekan, ketakutan atau kesedihan. Perasaan yang terlalu kuat dari itu akan menimbulkan gejala awal depresi atau Anxiety Disorder dan hal tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan bisa juga merusak

hubungan sosial dengan orang lain dan dalam kondisi yang lebih parah, seseorang dengan gejala depresi dapat berhari-hari tidak mau keluar dari kamar dan tidak mau berhubungan dengan dunia luar serta tidak peduli akan kesehatan badannya. Seseorang yang mengalami Paranoid, dalam kondisi yang parah, bisa saja tidak mau meninggalkan kamar atau rumah karena merasa terancam akan sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam dirinya. Penderita Paranoid, biasanya juga memiliki ritual tertentu yang terbilang janggal untuk membuang rasa takut dari dalam dirinya.

Jenis penyakit mental lain yang lebih sedikit ditemukan adalah jenis penyakit mental yang berhubungan dengan kegilaan (psychosis) contoh dari jenis ini adalah Skizofrenia dan Bipolar mood disorder.

Skizofrenia

Skizofrenia biasanya terjadi pada usia muda antara akhir usia remaja hingga 20an akhir, penyakit ini merupakan gangguan pada kemampuan kognitif, emosi dan tingkah laku yang masih belum ditemukan pasti penyebab terjadinya. Tanda-tanda gejala orang yang menderita skizofrenia adalah sebagai berikut:

1. *Delusi*: Penderita skizofrenia tidak mampu membedakan realita dan khayalan. Penderita lebih sering mempercayai bahwa apa yang ada di dalam khayalannya adalah kenyataan dan tidak menyadari keadaan realita yang sebenarnya
2. *Halusinasi*: Mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata.
3. *Berbicara Tidak Jelas*: Tidak mampu berbicara dengan baik, seperti memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan dalam percakapan sehari-hari.
4. *Gejala Negatif*: Yang dimaksud disini adalah tidak berjalannya fungsi emosi manusia. Seperti misalnya berbicara datar tanpa nada atau ekspresi wajah, tidak melihat ke lawan bicara ketika sedang berbicara, tidak memiliki semangat atau minat terhadap kegiatan sehari-hari dan tidak memiliki niat dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain.

Bipolar Disorder

Bipolar Disorder adalah kondisi dimana ada ketidakjelasan antara perasaan Manic (Euforia) dan Depresif. Penderita bipolar dapat seketika merasa senang luar biasa dan kemudian secara tiba-tiba merasa depresif, bertolak belakang dari apa yang dirasa sebelumnya, tanpa ada sebab yang jelas. Bipolar disorder merusak sistem kerja emosi seseorang. Hal ini dapat merusak keberfungsian sosial dan hubungan sosialnya di masyarakat sebagaimana penderita tidak memiliki keadaan emosi yang tidak jelas dan bisa saja tiba-tiba melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bipolar disorder memiliki dua fase yaitu Manic dan Depressive. Gejala yang muncul ketika penderita ada dalam fase manic antara lain: Euforia, Rasa percaya diri yang tinggi, Agresif, berdelusi, kehilangan rasa takut dan berani mengambil resiko dalam batas yang tidak normal. Sementara dalam fase depresif: Penderita

mengalami kesedihan, putus asa, rasa takut, menyesal, kelelahan, rasa sakit tanpa ada sebab dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Penderita bipolar seringkali mengalami kedua fase tersebut secara berubah-ubah tanpa ada sebab yang jelas dan gejala ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau remaja, tapi juga bisa terjadi pada anak-anak dan inilah yang seringkali tidak disadari oleh para orang tua sehingga anak yang menderita bipolar tidak mendapat penanganan yang tepat.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Ada jenis penyakit mental terjadi yang pada anak, diluar down syndrome atau autisme yang secara fisik sudah dapat teridentifikasi yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Penyakit mental ini biasanya hanya terjadi pada anak-anak, namun apabila penyakit mental ini tidak mendapat penanganan hingga si anak tumbuh dewasa, sifat-sifat buruk dari kelainan ini akan terus terbawa dan menjadikan anak tersebut menjadi sulit bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain ketika sudah bertumbuh dewasa. Anak yang menderita ADHD biasanya sulit fokus dan menerima perintah. Tidak sabaran, cepat bosan atau marah serta bertindak impulsif dalam batasan yang tidak normal. Perasaan kurang percaya diri, selalu cemas dan selalu merasa kurang adalah hal yang sering terjadi pada penderita ADD dewasa yang sudah membawa penyakit tersebut sejak kecil. Walaupun banyak penderita sebenarnya cerdas, kreatif, dan energik, mereka sering merasa harus berupaya lebih keras dari orang lain untuk mendapat kedudukan yang sama.

Salah satu karakteristik utama adalah perasaan berlebihan bahwa mereka tidak berhasil. Mereka mencari pertolongan karena tidak dapat bekerja dengan teratur. Mereka menjadi kecewa dan frustrasi. Sekalipun sudah berusaha, mereka tidak pernah kelihatan berhasil menuntaskan pekerjaan yang mereka lakukan dan selalu tidak yakin dengan potensi mereka sesungguhnya.

Penderita ADD juga gampang depresi, cemas, dan kelelahan. Karena mereka selalu bekerja, mereka cenderung tidak menjaga diri dengan baik, sering mengandalkan makanan cepat saji dan mengorbankan waktu tidur untuk menuntaskan pekerjaannya. Karena kondisi ini menyebabkan mereka sering mengalami stres dan kecemasan. Mereka akan mencari hiburan dan minum minuman keras atau mengonsumsi obat-obatan. Mereka juga jadi gemar mengambil risiko dan gampang terlibat dalam perjudian, kekerasan, atau pergaulan bebas. Mereka suka hidup di 'jalur cepat' dan harus merasa terstimulasi setiap saat. Maka akhirnya mereka bertindak berlebihan, lah yang perlu disadari oleh orang tua dalam memperhatikan anaknya yang masih kecil. Kesadaran akan penyakit ini sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih lagi dalam keberfungsian sosial di kemudian hari.

Kesadaran Masyarakat

Sudah seharusnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap fenomena penyakit mental karena fenomena sudah lama ada dan hingga hari ini masih banyak orang-orang yang secara tidak sadar menderita penyakit

mental namun tidak ada orang disekitarnya juga yang cukup memahami kondisi kejiwaannya dan merujuknya ke pihak yang ahli dalam menangani penyakit mental. Citra yang terbentuk di dalam sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap penderita penyakit mental atau lebih sering dikenal dalam percakapan sehari-hari dengan sebutan “sakit jiwa” atau “gila”, masih merupakan sesuatu yang memalukan. Banyak keluarga yang merasa malu untuk membawa anggota keluarganya ke rumah sakit jiwa karena anggapan buruk terhadap penyakit mental yang telah terbentuk di masyarakat Indonesia dan akhirnya penderita penyakit mental tidak mendapatkan penanganan yang semestinya dan kondisi bisa saja menjadi lebih parah. Tidak sedikit juga, keluarga yang menolak atau mengusi anggota keluarganya yang bertingkah laku aneh karena penyakit mental diderita. Hal tersebut biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit mental yang mungkin terjadi pada manusia sehingga tidak ada pengertian atas tindakan tidak wajar yang dilakukan penderita dan juga tidak ada upaya pengobatan atau dukungan dari anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk membantu kesembuhannya. Persepsi yang juga berkembang dalam masyarakat adalah bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit yang terjadi karena hal-hal mistis sehingga kadang masyarakat melakukan tindakan penanganan yang salah terhadap penderita penyakit mental.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (ARSAWAKOI), dr Bambang Eko Suryananto, SpKJ, menjelaskan, Gangguan jiwa yang terjadi pada seseorang, menurut Bambang, disebabkan oleh interaksi manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-spiritual. Secara biologis, penyakit mental seperti contohnya skizofrenia disebabkan karena peningkatan neurotransmitter dopamin di otak, sehingga dapat timbul gejala-gejala perilaku, gangguan persepsi (mendengar suara meskipun tidak ada sumber suara), gangguan isi pikir yang berupa keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak wajar, dan lain-lain.

Kesimpulan

Penyakit mental tetaplah sebuah penyakit yang mengganggu keberfungsian manusia namun hanya saja tidak secara fisik, melainkan mental, namun bukan berarti penyakit mental tidak dapat disembuhkan. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (ARSAWAKOI), dr Bambang Eko Suryananto, SpKJ, menjelaskan, sudah banyak kisah sukses seorang penderita penyakit mental berat seperti skizofrenia atau bipolar disorder dapat disembuhkan dan dapat kembali bertingkah normal. Jika pasien segera dibawa berobat pada tahap awal menderita penyakit, penurunan fungsi peran dapat diminimalkan. Namun, masalahnya adalah stigma masyarakat tentang gangguan jiwa seringkali membuat pasien skizofrenia terlambat dibawa ke petugas kesehatan. Pentingnya dukungan keluarga juga dapat menjadi faktor keberhasilan pasien kelainan mental untuk sembuh. Karena itu, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan seputar penyakit mental di masyarakat luas supaya tidak lagi beredar anggapan yang salah dan memunculkan kesadaran untuk lebih peduli dan memahami penanganan penderita penyakit mental.

Daftar Rujukan

- Kaplan, Tony. 2009. Children and Adolescent with Mental Health Problems. The Royal College of Psychiatrists: London.
- Williams, Lippincott. 2000. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry 7th edition. Wilkins Publisher: Baltimore, United States
- Schneiders, Alexander. 1955. Personal Adjustment and Mental Health. Rinehart & Company: United States
- Semrud-Clikeman, Margaret. 2007. Social Competence in Children. Springer Science+Business Media, LCC: USA.
- Hallowell, Edward. 1995. Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood. Touchstone: New York, United States.
- www.mayoclinic.org. disease and condition of mental illness. Diunduh pada 9 desember 2014 pukul 19.35 WIB
- www.academia.edu. Jurnal. Buku Ajar Kesehatan Mental. Diunduh pada 14 desember 2014 pukul 14.52 WIB
- www.mayoclinic.org. Schizophrenia Symptoms. Diunduh pada 14 desember 2014 pukul 16.57 WIB
- www.mayoclinic.org. Bipolar Disorder Symptoms. Diunduh pada 14 desember 2014 pukul 19.12 WIB
- www.academia.edu. Nur, Margo. Jurnal. FAKTOR PENYEBAB DAN PROSES TERJADINYA GANGGUAN MENTAL. Diunduh pada 13 desember 15.47 WIB
- <http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/pengertian-definisi-gangguan jiwa> diunduh pada 9 desember pukul 17.44 WIB
- <http://health.kompas.com>. Gangguan Jiwa Masih Diabaikan. Diunduh Pada Tanggal 13 Desember 2014 Pukul 22.31 WIB
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/15/mupu4v-atasi-skizofrenia-perlu-perhatian-bersama>. Diunduh pada 15 desember pukul 11.04 WIB
- www.jurnal.upi.edu. Purwanti, Isti. Pengantar Kesehatan Mental. Diunduh pada 9 desember 2014 pukul 18.46 WIB

PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL

Oleh:

Nadira Lubis, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah

Email:

nadiralubis23@gmail.com; hettykrisnani@yahoo.com; fedry_cons@yahoo.com

ABSTRAK

Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental sangat minim. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental menyebabkan penderita kerap kali mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari masyarakat bahkan dari keluarga penderita sendiri. Salah satunya di negara Indonesia, perlakuan yang di dapatkan oleh penderita gangguan jiwa dan keterbelakangan seperti diskriminasi, mereka terisolasi, dikucilkan bahkan hingga dipasung, padahal penderita gangguan jiwa dan cacat mental adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai seorang manusia yang dapat mengembangkan diri dan mengasah potensi-potensi yang dimilikinya. Penyakit gangguan jiwa dan keterbelakangan mental memiliki pemahaman yang berbeda akan tetapi penderita sering kali mendapatkan perlakuan yang serupa dari masyarakat maupun keluarga penderita. Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang dapat menyerang seseorang kapan saja dan dimana saja dan penyakit ini dapat disembuhkan dengan mendapatkan penanganan yang tepat, sedangkan cacat mental bukanlah suatu penyakit akan tetapi cacat mental merupakan suatu keadaan yang telah dialami seseorang dari semenjak dikandung, akan tetapi bukan berarti mereka tidak dapat mengembangkan diri sebagai manusia, penanganan sejak dini dan dengan tepat juga diperlukan oleh penderita cacat mental. Maka dari itu, peran dari masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk membantu penderita dalam rekreasi hingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dengan cara mengetahui bagaimana harus bersikap kepada mereka dengan tidak memandang penderita sebelah mata. Peran dari seorang pekerja sosial dalam hal ini dapat membantu masyarakat dan keluarga penderita gangguan jiwa atau cacat mental sebagai educator, motivator dan sebagai konselor.

Kata Kunci : Gangguan Jiwa, Keterbelakangan Mental, Cacat Mental, Pekerja Sosial

PENDAHULUAN

Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Terdapat bermacam-macam gangguan jiwa dengan penderita yang kerap kali dikucilkan, mendapat perlakuan diskriminasi, di isolasi bahkan hingga di pasung. Padahal perlakuan-perlakuan tersebut tidak akan membantu penderita sama sekali bahkan dapat menjadi lebih parah. Sedangkan manusia dengan keterbelakangan mental yang berbeda dengan penyakit mental atau yang sering disebut dengan gangguan jiwa juga kerap kali mendapatkan perlakuan yang serupa.

Masalah gangguan jiwa yang menyebabkan menurunnya kesehatan mental ini ternyata terjadi hampir di seluruh negara di dunia. WHO (World Health Organization) yaitu suatu badan dunia PBB yang menangani masalah kesehatan dunia, memandang serius masalah kesehatan mental dengan menjadikan isu global WHO. WHO mengangkat beberapa jenis gangguan jiwa seperti Schizoprenia, Alzheimer, epilepsi, keterbelakangan mental dan ketergantungan alkohol sebagai isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius lagi. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Indonesia 2007 menunjukkan bahwa:

“Penderita gangguan jiwa berat (psikosis) di Indonesia adalah 0.46 persen atau sejuta orang. Dari total populasi risiko 1,093,150 hanya 3.5 persen atau 38,260 yang baru terlayani di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai. Hal ini menunjukkan tidak semua penderita mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang manusia dan warga negara di Indonesia. Penderita gangguan kejiwaan atau mental masih dianggap sebagai hal yang memalukan atau sebuah aib bagi keluarga atau kerabat yang salah satu anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan mental atau kejiwaan. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa gangguan kesehatan mental atau kejiwaan tidak dapat disembuhkan sehingga bagi penderitanya layak dikucilkan”.

Penderita gangguan jiwa dan keterbelakangan mental sangatlah berbeda. Gangguan jiwa disebabkan karena banyak hal salah satunya yang banyak terjadi di Indonesia karena pengalaman kehidupan yang di alami penderita sehingga mengganggu pikiran serta jiwa mereka, sedangkan pada penyandang keterbelakangan mental disebabkan karena rendahnya IQ yang membuat sikap dan perilaku mereka berbeda dengan manusia normal lainnya. Penderita gangguan jiwa dan keterbelakangan mental adalah warga negara Indonesia dan memiliki hak-hak sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Wartawan Majalah Time, Andrea Star Reese, pernah sempat mengunjungi Indonesia dan menemukan orang di daerah pelosok Indonesia lebih memilih memasung anggota keluarganya yang mengidap penyakit mental seperti Skizofrenia ketimbang membawanya ke rumah sakit. Kendala umum bagi masyarakat Indonesia sehingga memilih memasung anggota keluarganya karena masalah akses ke perawatan; biaya pengobatan mahal dan kurangnya penyebarluasan informasi dasar.

Penderita gangguan kejiwaan atau mental masih dianggap sebagai hal yang memalukan atau sebuah aib bagi keluarga atau kerabat yang salah satu anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan mental atau kejiwaan. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa gangguan kesehatan mental atau kejiwaan tidak dapat disembuhkan sehingga bagi penderitanya layak dikucilkan. Minimnya pengetahuan tentang gangguan kesehatan mental atau kejiwaan, membuat masyarakat Indonesia memberikan penilaian bahwa penderita gangguan kesehatan mental atau kejiwaan berbeda dengan para penderita sakit fisik yang dapat disembuhkan maupun sulit disembuhkan. Sehingga *labelling* penderita gangguan kesehatan mental atau kejiwaan adalah 'orang aneh'.

Dengan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan mental atau kejiwaan (termasuk psikososial) kepada masyarakat maka secara bertahap stigma 'orang aneh yang harus dikucilkan' akan sedikit demi sedikit berkurang, dan bagi keluarga yang anggotanya memiliki gangguan kesehatan mental atau kejiwaan akan langsung memberikan pengobatan di tempat yang sesuai, selain itu dengan terbukanya pikiran masyarakat maka secara berkala profesi pekerja sosial dalam bidang medis khususnya akan ikut terangkat.

SEBAB-SEBAB GANGGUAN JIWA DAN CACAT MENTAL

Menurut Sigmund Freud dalam Santrock (1999) adanya gangguan tugas perkembangan pada masa anak terutama dalam hal berhubungan dengan orang lain sering menyebabkan frustrasi, konflik, dan perasaan takut, respon orang tua yang mal adaptif pada anak akan meningkatkan stress, sedangkan frustrasi dan rasa tidak percaya yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan regresi dan withdrawal. Disamping hal tersebut di atas banyak faktor yang mendukung timbulnya gangguan jiwa yang merupakan perpaduan dari beberapa aspek yang saling mendukung yang meliputi Biologis, psikologis, sosial, lingkungan. Tidak seperti pada penyakit jasmaniah, sebab-sebab gangguan jiwa adalah kompleks.

Pada seseorang dapat terjadi penyebab satu atau beberapa faktor dan biasanya jarang berdiri sendiri. Mengetahui sebab-sebab gangguan jiwa penting untuk mencegah dan mengobatinya. Umumnya sebab-sebab gangguan jiwa menurut Santrock (1999) dibedakan atas jasmaniah/*biologic* seperti halnya, keturunan, jasmaniah seperti kegemukan yang cenderung menderita psikosa manik depresi dan dapat pula menjadi skizofrenia, temperamen karena orang yang terlalu peka/ sensitif, penyakit dan cedera tubuh.

Selain karena jasmaniah/*biologic*, gangguan jiwa dapat pula terjadi karena psikologik seperti pengalaman frustrasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya dikemudian hari. Hidup seorang manusia dapat dibagi atas 7 masa dan pada keadaan tertentu dapat mendukung terjadinya gangguan jiwa.

Gangguan jiwa dapat pula terjadi karena Sosio Kultural yaitu, kebudayaan secara teknis adalah ide atau tingkah laku yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat. Faktor budaya bukan merupakan penyebab langsung menimbulkan

gangguan jiwa, biasanya terbatas menentukan “warna” gejala-gejala. Di samping mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang misalnya melalui aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dalam kebudayaan tersebut.

Pada keterbelakangan mental memiliki bermacam-macam penyebab seperti karena keturunan atau gen dari orang tua, pola makan sang Ibu pada masa kehamilan, pola hidup sang ibu ketika masa kehamilan dan umur ibu pada masa kehamilan juga dapat menjadi penyebab anak terlahir dengan cacat mental. Walau penyebab antara penyakit mental dan keterbelakangan mental berbeda akan tetapi perlakuan masyarakat yang mereka terima kerap kali serupa.

MACAM-MACAM GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL

Terdapat macam-macam gangguan jiwa yang dimiliki oleh beberapa penderita di dunia, menurut Rusdi (1998) adapun macam-macam dari gangguan jiwa, yaitu:

“Gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onsets masa kanak dan remaja (Rusdi, 1998)”.

Walaupun Retardasi mental termasuk dalam macam-macam dari gangguan jiwa, akan tetapi pada kenyataannya mereka yang memiliki keterbelakangan mental memiliki perbedaan dari mereka yang memiliki gangguan jiwa. Keterbelakangan mental atau cacat mental bukanlah suatu penyakit sehingga keadaan tersebut tidak dapat dicegah, sedangkan gangguan jiwa seperti skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, dsb, dapat disembuhkan melalui pengobatan medis. Macam-macam gangguan jiwa juga memiliki penyebab yang berbeda, mereka yang memiliki gangguan jiwa dapat disembuhkan dengan penanganan yang tepat.

MACAM-MACAM KETERBELAKANGAN MENTAL

Pada keterbelakangan mental atau cacat mental (Mental Retardation) sendiri memiliki macam-macam jenis. Pengelompokan pada umumnya berdasarkan pada taraf intelegensinya, yang terdiri dari terbelakang ringan, sedang dan berat. Pengelompokan seperti ini sebenarnya bersifat artificial karena ketiga kelompok di atas tidak dibatasi oleh garis demargasi yang tajam. Gradasi dari satu level ke level berikutnya bersifat kontinyu. Kemampuan inteligensi anak cacat mental kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC), yaitu, Cacat mental ringan disebut juga debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52

menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Namun pada umumnya anak cacat mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian social secara independen dan anak ini tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada umumnya. Oleh karena itu agak sukar membedakan secara fisik antara anak cacat mental dengan anak normal.

Anak cacat mental sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 berdasarkan skala Binet sedangkan menurut Skala Wsechler memiliki IQ 54-40. Anak cacat mental sedang masih memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak usia dini. Walaupun agak lambat. Anak dapat mengurus atau merawat diri sendiri dengan pelatihan yang intensif. Mereka dapat memperoleh manfaat latihan kecakapan sosial dan pekerjaan namun tidak dapat menguasai kemampuan akademik seperti; membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi mereka masih dapat bepergian di lingkungan yang sudah dikenalnya.

Kelompok anak cacat mental berat disebut juga idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Wechsler (WISC) Anak cacat mental sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut skala Wechsler (WISC). Anak cacat mental berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dll. Hampir semua anak cacat mental berat dan sangat berat menyandang cacat ganda. Umpamanya sebagai tambahan cacat mental tersebut si anak lumpuh (karena cacat otak) , tuli atau cacat lainnya.

FENOMENA DI INDONESIA

Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

Orang dengan keterbelakangan mental atau cacat mental berbeda penanganannya dengan mereka yang menderita sakit mental. Cacat mental bukanlah suatu penyakit, mereka adalah suatu keadaan yang tidak dapat dicegah. Akan tetapi mereka dapat belajar sehingga mampu untuk menjalankan hidup. Pembelajaran yang mereka dapat perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Orang dengan gangguan jiwa dan keterbelakangan mental kerap kali mendapatkan perlakuan yang sama dan dianggap sebagai sebuah musibah atau bencana. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat sendiri mengenai gangguan jiwa dan cacat mental.

Di zaman ponsel pintar seperti sekarang, realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam tentang gangguan jiwa dan cacat mental.

Masih lebih banyak orang yang mengabaikan pentingnya menimbang, mengupayakan dan mempertahankan kesehatan jiwa dan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sebagian anggota masyarakat baru akan memperhatikan masalah kesehatan jiwa dan mental, hanya disaat mereka dihadapkan pada gangguan kesehatan mental dan jiwa.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang orang dengan penyakit mental dan keterbelakangan mental menimbulkan perlakuan dan sikap yang salah terhadap orang yang memiliki penyakit mental dan keterbelakangan mental. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental berbeda di setiap kebudayaan. Dalam suatu budaya tertentu, orang-orang secara sukarela mencari bantuan dari para profesional untuk menangani gangguan jiwanya. Sebaliknya dalam kebudayaan yang lain, gangguan jiwa cenderung diabaikan sehingga penanganan akan menjadi jelek, atau di sisi lain masyarakat kurang antusias dalam mendapatkan bantuan untuk mengatasi gangguan jiwanya. Bahkan gangguan jiwa dianggap memalukan atau membawa aib bagi keluarga. Hal kedua inilah yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat saat ini (<http://health.kompas.com/>).

Pengetahuan mengenai penyakit mental dan keterbelakangan mental harus kita pahami, karena apabila kita acuh terhadap informasi dan pengetahuan ini mereka tidak dapat berkembang karena kurangnya motivasi akan menghambat perkembangan mereka dan menimbulkan ketergantungan. Pemasungan, diskriminasi dan isolasi terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang apa itu penyakit mental dan keterbelakangan mental?. Di negara Indonesia terutama adalah negara yang masih ditemukan kasus pemasungan terhadap anak dengan penyakit mental atau cacat mental yang di lakukan oleh keluarga mereka sendiri dengan diperlakukan seperti bukan seorang manusia.

Model kesehatan di dunia barat memandang gangguan jiwa sebagai suatu hal yang harus disembuhkan. Sehingga pelayanan kesehatan jiwa cenderung berorientasi hanya pada gangguan jiwa yang menimpa orang tersebut dan sering mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan kliennya. Maka dari itu, di dunia barat mereka yang mengidap penyakit mental memiliki penanganan khusus tanpa mengisolasi penderita atau bahkan hingga memasung seperti yang banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Berbeda dengan negara barat, masyarakat Indonesia masih belum terlalu peduli terhadap penanganan dan perawatan penderita penyakit mental dan keterbelakangan mental seperti di beberapa daerah di Indonesia (Sumber: rsjlawang.com).

Beberapa kasus di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil kerap kali ditemukan kasus pemasungan atau kurungan terhadap mereka yang menderita penyakit mental atau keterbelakangan mental. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena perilaku mereka dianggap aib atau mengganggu ketenangan masyarakat setempat sehingga hak asasi manusia mereka direnggut karena pemasungan atau kurungan tersebut. Pemasungan dan kurungan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, walau bagaimanapun mereka memiliki hak untuk dapat hidup dengan layak seperti layaknya orang

normal. Perilaku tidak menyenangkan ini seperti yang telah disebutkan terjadi karena minimnya pengetahuan dan informasi bagaimana cara berkomunikasi terhadap penderita penyakit mental dan keterbelakangan mental.

Pemicu dan faktor resiko sakit jiwa bisa disebabkan karena stressor yang berlebihan dan tidak bisa ditangani dengan baik, contoh mudahnya adalah tertimpa musibah, mengidap penyakit maupun faktor sosial lainnya. Pemerintah juga membantu untuk pengobatan dan perawatan penderita gangguan sakit jiwa ini. Kementerian Kesehatan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa di Indonesia yang dimiliki pemerintah hanya 33 buah. Sedangkan rumah sakit jiwa atau klinik-klinik penderita gangguan jiwa yang dikelola swasta berjumlah sekitar 40-an. Jumlah ini dirasa masih sangat kurang karena penderita gangguan jiwa di Indonesia masih cukup banyak. Ada sedikit perbedaan antara sakit jiwa dan gangguan jiwa. Bila gangguan jiwa adalah gangguan pikiran, perasaan atau tingkah laku sehingga menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi kehidupan sehari-hari. Sedangkan sakit jiwa lebih dominan dan menjurus pada gangguan jiwa berat yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus pula.

PENTINGNYA SIGNIFICANT OTHERS

Kelemahan yang dimiliki anak-anak penyandang cacat mental dan penyakit mental menyebabkan mereka membutuhkan bantuan yang lebih banyak dan intensif dari orang-orang sekitar dalam menjalani kehidupannya. Masalah utama bagi perkembangan anak penyandang cacat mental adalah ketidakmampuan mereka dalam mempelajari situasi yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, Seseorang dengan gangguan mental dengan segera membutuhkan perawatan atau kontrol, seseorang tersebut haruslah di bawa ke tempat yang aman. Orang harus diperiksa oleh dokter dan diwawancarai oleh seorang praktisi kesehatan mental disetujui (sebelumnya seorang pekerja sosial yang disetujui terlebih dahulu). Di masing-masing level dari pemasungan, isolasi dan diskriminasi memiliki isu perkembangan koresponden yang merefleksikan fungsi sosial. Bagian selanjutnya yang mendiskusikan tantangan yang dihadapi oleh individu-individu pada berbagai macam level yang menekankan orang dengan disabilitas mental. Oleh karena itu, keadaan lingkungan sosial haruslah mendukung perkembangan pada orang pengidap penyakit mental dan keterbelakangan mental. Lingkungan sosial sangat berperan terhadap aktifitas sehari-hari yang di jalani oleh penderita, melalui lingkungan sosial mereka dapat hidup selayaknya orang normal.

Pentingnya pendidikan yang baik untuk anak penyakit mental dan anak dengan keterbelakangan mental, karena perkembangan pada mereka memerlukan perhatian yang khusus. Walau anak dengan keterbelakangan mental memiliki IQ di bawah rata-rata, akan tetapi buka berarti mereka tidak memiliki potensi dalam dirinya. karena anak penderita down syndrome juga dapat mengukir prestasi yang dapat meraih penghargaan dari kejuaraan-kejuaraan salah satunya adalah Stephanie Handojo (21) yang telah tampil sebagai peraih emas cabang renang di *World Special Olympics* di Athena, Yunani, pada Juli 2011 (Republika, 2012:04). Sama

halnya dengan pengidap keterbelakangan mental, penderita penyakit mental pun memiliki potensi-potenti yang dapat dikembangkan apabila didukung oleh keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial mereka.

Penderita gangguan jiwa tidak mungkin mampu mengatasi masalah kejiwaanya sendiri. Individu tersebut membutuhkan peran orang lain di sekitarnya, khususnya keluarganya. Peran keluarga dalam kesembuhan dan kekambuhan penderita gangguan jiwa sangat penting, karena keluargalah orang yang paling dekat dengan penderita gangguan jiwa. Pencegahan kekambuhan atau mempertahankan penderita gangguan jiwa di lingkungan keluarga dapat terlaksana dengan persiapan pulang yang adekuat serta mobilisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat khususnya peran serta keluarga.

Tersedianya berbagai macam *treatment* dan terapi seharusnya dapat menjadi solusi atau jawaban bagi masyarakat yang mempertanyakan dan meragukan akan kesembuhan bagi para penderita gangguan kesehatan mental atau kejiwaan. Banyak terapi pada zaman sekarang yang banyak dilakukan untuk menyembuhkan orang dengan penyakit mental untuk orang dengan keterbelakangan mental pendidikan menjadi kunci utama mereka untuk berkembang dan menggali potensinya.

Pengetahuan dan informasi mengenai penyakit mental dan keterbelakangan mental harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak kembali lagi terjadi perilaku-perilaku yang melanggar hak asasi manusia pada penderita. Mulai dari penyebab mereka menderita gangguan jiwa atau keterbelakangan mental, cara berkomunikasi dengan mereka hingga mengetahui perawatan yang tepat untuk mereka agar dapat sembuh atau dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

PENUTUP

Manusia dengan Gangguan mental dan keterbelakangan mental bukanlah suatu kutukan dan hal yang menakutkan akan tetapi, perilaku dan tindakan mereka kerap kali melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan hingga melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri banyak kasus ditemukan yang memprihatinkan seperti kasus pemasangan dan pengurangan terhadap mereka yang menderita gangguan mental atau cacat mental.

Mereka dengan penderita gangguan mental dan keterbelakangan mental adalah manusia yang berhak mendapatkan hak untuk hidup dengan layak seperti manusia normal pada umumnya. Pendidikan, perawatan, sosialisasi dengan lingkungan sekitar juga berhak mereka dapatkan sebagai seorang manusia, akan tetapi karena minimnya pengetahuan dan informasi pada masyarakat mengenai penyakit mental dan keterbelakangan mentalah yang merenggut hak-hak asasi mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia.

Maka dari itu, pengetahuan dan informasi mengenai penyakit mental dan keterbelakangan mental sangat penting di ketahui dan di pahami oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Perhatian yang khusus dan perawatan

terhadap mereka dapat membuat mereka mampu mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki bahkan tidak jarang diantara mereka yang dapat berprestasi hingga membanggakan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan informasi mengenai penderita penyakit mental dan gangguan mental diharapkan dapat menambahkan rasa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap hak-hak mereka sebagai penderita. Motivasi adalah keadaan psikologis yang merangsang dan memberi arah terhadap aktivitas manusia. Dialah kekuatan yang menggerakkan dan mendorong aktivitas seseorang. Motivasi menjadi salah satu kunci sebagai alat penyembuhan terhadap mereka yang menderita gangguan jiwa.

DAFTAR RUJUKAN

- Wibhawa, Budhi, dkk. 2010. Dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Bandung. Widya Padjadjaran
- Koplan, Tony. 2009. Children and Adolescent with Mental Health Problems. The Royal College of Psychiatrists: London.
- Maslim, Rusdi. 1998. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa. Jakarta
- Semrud-Clikeman, Margaret. 2007. Social Competence in Children. Springer Science+Business Media, LCC: USA.
- Prinz, Ronald J. (1991). "Advances in Behavioral Assessment of Children and Families". Volume 5. London: Jessica Kingsley Publishers.*
- Hendriani, Wiwin, dkk. (2006). "Penerimaan Keluarga terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental". INSAN Vol. 8 No.2 Agustus 2006.
- Republika. 2012. Penderita Down Syndrome Mengukir Prestasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Jiwa No.3 Tahun 1996
- www.terapicalistung.com. Anak Keterbelakangan Mental. Diunduh Pada Tanggal 16 September 2014. Pukul: 07.44 WIB.
- Faperta.ugm.ac.id. Kesehatan Jiwa. Diunduh Pada Tanggal 22 Oktober 2014. Pukul: 20.46 WIB.
- Psikologi.ug.ac.id. Aksi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Diunduh Pada Tanggal 30 Oktober 2014 Pukul 17.05 WIB.
- <http://health.kompas.com>. Gangguan Jiwa Masih Diabaikan. Diunduh Pada Tanggal 13 Desember 2014 Pukul 17.14 WIB
- rsjlawang.com. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Pemahaman dan Pelayanan Masyarakat. Diunduh Pada Tanggal 13 Desember 2014 Pukul 16.50 WIB

PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH DAN COPING BEHAVIOR SISWA SMA DALAM MENGHADAPI LINGKUNGAN SOSIAL DI SEKOLAH

Oleh:

Rizkia Annisa Frabandani, Agus Wahyudi R., & Santoso Tri Raharjo

Abstrak

Coping behavior atau penyesuaian diri yang dilakukan siswa SMA dalam menghadapi lingkungan sosial di sekolah adalah topik yang akan digambarkan dalam pembahasan ini. Dari tujuan tersebut maka fenomena yang menjadi latar belakang akan dibahas secara deskriptif.

Untuk seorang remaja yang bersekolah, sekolah merupakan lingkungan yang hampir setiap hari dihadapi oleh remaja selain lingkungan rumah dan keluarganya. Sebagaimana halnya keluarga, sekolah sebagai lembaga pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat disamping mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada para siswa. Pada dasarnya setiap siswa yang masuk ke sekolah berasal dari beragam latar belakang, maka dari itu dibutuhkanlah penyesuaian diri untuk menghadapi lingkungan sekolah. Sekolah tentunya diharapkan memberikan pengaruh positif dalam perkembangan jiwa remaja agar mereka dapat berfungsi secara sosial, namun pada kenyataannya jika penyesuaian diri yang dilakukan siswa tidak sesuai dengan harapan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh negatif juga dapat muncul pada diri siswa yang terbukti dengan adanya fenomena perilaku menyimpang pada siswa seperti tawuran antar siswa, seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang dikalangan siswa.

Penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial sekolah baik dengan *Problem Focused Coping* (PFC) ataupun *Emotion Focused Coping* (EFC) tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa, baik itu faktor jenis kelamin, kepribadian, tingkat pendidikan, situasi sosial ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkanlah dukungan sosial yang mendorong siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekolahnya agar mereka tetap bisa bersekolah.

Kata-kata kunci (*Key words*): *Coping behavior*, Penyesuaian diri, Remaja, Kenakalan remaja

Pendahuluan

Pada saat sekarang ini berbagai kasus kenakalan remaja terjadi dimana-mana. Telah tercatat berbagai kasus kenakalan remaja atau perilaku menyimpang dari remaja. Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Ajiseno mengatakan bahwa terjadi peningkatan kenakalan remaja sebanyak 11 kasus atau 36.66% di tahun 2012. Total kasus kenakalan remaja yang terjadi selama 2012 mencapai 41 kasus, sementara pada tahun 2011 hanya 30 kasus (<http://news.detik.com>). Situs Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberitakan bahwa dari 2.4 juta kasus aborsi, 700.000 hingga 800.000 pelakunya adalah remaja.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) juga menemukan bahwa jumlah pengguna narkoba sebesar 1.5% dari populasi remaja Indonesia yang mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia atau 3.2 juta orang (<http://ntb.bkkbn.go.id>).

Adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari pola penyesuaian diri pada remaja yang melatarbelakanginya. Carballo (dalam Sarwono, 2002) juga menyampaikan bahwa masa remaja merupakan masa yang memerlukan penyesuaian diri, yaitu:

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang sesuai dengan kebudayaan dimana ia berada.
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaannya.
6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.

Pramadi (dalam Wardani, 2009) mengatakan bahwa penyesuaian diri atau *coping behavior* secara bebas diartikan sebagai suatu perilaku untuk menghadapi masalah, tekanan, atau tantangan, selain itu merupakan respon perilaku yang bersifat perilaku psikologis untuk mengurangi tekanan yang sifatnya dinamis. Perilaku *coping* juga diartikan sebagai tingkah laku ketika individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tujuan menyelesaikan tugas atau masalah. Chaplin (dalam Wardani, 2009).

Seperti yang telah diketahui bahwa masa remaja adalah masa ketika permasalahan kerap muncul pada diri seseorang. Sebagaimana dinyatakan Erickson (dalam Santrock, 2003) bahwa masa remaja merupakan masa krisis identitas dan pencarian jati diri. Ketidaksiapan diri seorang remaja dalam menghadapi berbagai situasi yang ada disekelilingnya adalah penyebab timbulnya masalah pada remaja. Ketika seorang remaja tidak siap menghadapi persoalan dalam hidup tentunya akan memberikan pengaruh negatif bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Berkaitan dengan klasifikasi usia remaja, terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan hal tersebut, seperti menurut Hurlock (1968) remaja adalah mereka yang berada pada usia 13-17 tahun. Monk, dkk (2000) memberi batasan usia remaja pada 12-23 tahun, begitu pula menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan para ahli tersebut maka usia siswa sekolah menengah atas (SMA) yang rata-rata berumur 15-18 tahun termasuk dalam klasifikasi usia remaja.

Remaja yang merupakan bagian dari masyarakat yang begitu mudah menerima perubahan baik positif maupun negatif. Bagi remaja yang belum siap menerima perubahan yang ada di sekitar maka ketidaksesuaian perilaku dengan norma-norma yang ada dapat saja terjadi. Dalam kondisi tersebut peran orang tua

dan teman-teman sebaya mempunyai andil besar dalam pembentukan karakter dan perilakunya.

Kuatnya pengaruh teman sebaya sering kali dituduh sebagai penyebab dari tingkah laku remaja yang buruk, namun berbagai penelitian seperti penelitian yang dilakukan Salikhah (1999) mengenai gejala perkelahian antar remaja (dalam Sarwono, 2000) dan penelitian mengenai remaja dan perilaku seksualnya (Sarwono, 1985) membuktikan bahwa pada hakikatnya faktor terakhir yang menentukan bagaimana tindakan atau perilaku seorang remaja adalah diri remaja itu sendiri. Seperti halnya kebiasaan merokok pada remaja yang dikemukakan Fisher (dalam Sarwono, 1985) bahwa yang selama ini dianggap pengaruh teman dan iklan sebagai penyebabnya, ternyata hal tersebut hanya dapat dikatakan benar sejauh remaja itu sendiri memang sudah perokok atau memang berkeinginan menjadi seorang perokok. Remaja yang tidak menginginkannya atau tidak pernah menjadi perokok tetap saja tidak akan terpengaruh, maka artinya segala sesuatu yang akan dilakukan seseorang tentu akan berpulang pada pribadi mereka masing-masing.

Dalam kaitannya pada seorang remaja yang bersekolah, sekolah merupakan lingkungan yang hampir setiap hari dihadapi oleh remaja selain lingkungan rumah dan keluarganya. Sebagaimana halnya keluarga, sekolah sebagai lembaga pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat disamping mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada para siswa. Pada dasarnya setiap siswa yang masuk ke sekolah berasal dari beragam latar belakang, maka dari itu dibutuhkanlah penyesuaian diri untuk menghadapi lingkungan sekolah. Sekolah tentunya diharapkan memberikan pengaruh positif dalam perkembangan jiwa remaja agar mereka dapat berfungsi secara sosial, namun pada kenyataannya jika penyesuaian diri yang dilakukan siswa tidak sesuai dengan harapan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh negatif juga dapat muncul pada diri siswa yang terbukti dengan adanya fenomena perilaku menyimpang pada siswa seperti tawuran antar siswa, seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang dikalangan siswa.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung pada penyesuaian diri yang dilakukan, baik itu penyesuaian diri yang berupa adaptasi, yaitu mengubah tingkah laku agar sesuai dengan lingkungannya, atau bahkan *adjustment* yang berarti mengubah lingkungan agar menjadi sesuai dengan perilakunya (Sarwono, 1992). Untuk remaja yang bersekolah dalam hal ini adalah siswa, *coping behavior* yang melekat pada diri mereka tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam *setting* baik itu keluarga, sekolah, teman sebaya maupun lingkungan sekitar dan juga memengaruhi keberfungsian sosialnya.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya (Siporin, 1975:17). Pendapat ini sejalan dengan Baker, Dubois dan Miley (dalam Suharto, 2002) yang juga menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakat secara umum,

terhadap lingkungan terdekat dan terhadap dirinya sendiri. Jika siswa dapat menggunakan perilaku *coping* dengan bentuk yang baik maka ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan baik pula begitu pun keberfungsian sosialnya baik fisik, mental maupun hubungan sosialnya.

Coping Behavior Siswa SMA Dalam Menghadapi Lingkungan Sosial Di Sekolah

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya yaitu untuk menggambarkan *coping behavior* atau penyesuaian diri yang dilakukan siswa SMA dalam menghadapi lingkungan sosial di sekolah serta penanganan yang dilakukan pekerja sosial sekolah dalam menyelesaikan masalah penyesuaian diri siswa, maka terpilihlah beberapa kategori yang terdapat di hampir semua sekolah sebagai kasus yang diteliti, diantaranya: kategori berdasarkan jenis kelamin, kategori siswa yang berlatarbelakang ekonomi rendah dan berkecukupan untuk mewakili situasi sosial ekonomi, siswa yang dekat atau akrab dengan guru dan yang sebaliknya, serta siswa yang memiliki kepribadian reaktif dan proaktif.

Anggapan dasar atau pernyataan sementara dari peneliti terkait dengan fenomena yang adalah siswa dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial sekolah baik dengan *Problem Focused Coping* (PFC) ataupun *Emotion Focused Coping* (EFC) tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa, baik itu faktor jenis kelamin, kepribadian, tingkat pendidikan, situasi sosial ekonomi dan sebagainya.

Pramadi (dalam Wardani, 2009) mengatakan bahwa penyesuaian diri atau *coping behavior* secara bebas diartikan sebagai suatu perilaku untuk menghadapi masalah, tekanan, atau tantangan, selain itu merupakan respon perilaku yang bersifat perilaku psikologis untuk mengurangi tekanan yang sifatnya dinamis. Perilaku *coping* juga diartikan sebagai tingkah laku ketika individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tujuan menyelesaikan tugas atau masalah. Chaplin (dalam Wardani, 2009).

Secara terperinci Folkman (1984) mendefinisikan perilaku *coping* sebagai berikut:

“Perilaku *Coping* didefinisikan sebagai bentuk usaha kognitif dan perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengatur tuntutan internal dan eksternal yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungannya, yang dianggap mengganggu batas-batas yang dimiliki oleh individu tersebut, khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan.”

Sedangkan Coyne, Aldwin, dan Lazarus (1981) berpendapat bahwa *coping* merupakan usaha-usaha baik kognitif maupun perilaku yang bertujuan untuk mengelola tuntutan lingkungan dan internal, serta mengelola konflik-konflik yang mempengaruhi individu. Pada dasarnya seseorang dapat dikategorikan berperilaku *coping* hanya jika konflik yang dihadapi individu tersebut sudah melampaui kemampuan individu tersebut dalam menghadapi permasalahan.

Coping behavior pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kondisi yang tidak sejalan dengan yang diharapkan seorang individu. Maka individu menyesuaikan diri dengan berbagai peristiwa atau kenyataan yang tidak diharapkan tersebut dan mempertahankan keseimbangan emosi serta *self image positive* dalam dirinya agar ia kembali berfungsi secara sosial dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan pada penjelasan dari beberapa ahli tersebut dapat dipahami bahwa perilaku *coping behavior* atau penyesuaian diri akan berjalan beriringan dengan permasalahan yang dihadapi seseorang. Dalam kaitannya dengan remaja yang merupakan siswa SMA yang dihadapkan dengan adanya perbedaan kelas sosial dilingkungan sekolahnya dan munculnya berbagai tuntutan baik dalam dirinya maupun terhadap lingkungannya sebagai dampaknya, *coping behavior* merupakan segala aktivitas yang dilakukan individu baik dalam bentuk kognitif maupun perilaku, yang disadari ataupun tidak untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran dari ancaman yang mungkin muncul dari masalah dan tuntutan yang ada dalam diri maupun terhadap lingkungan. Dengan begitu individu tersebut dapat mempertahankan keberadaan dirinya dalam lingkungan tersebut agar ia kembali berfungsi secara sosial dan memperoleh kesejahteraan yang diharapkan.

Secara sederhana jenis-jenis coping behavior dalam kaitan antara manusia dengan lingkungan fisiknya terbagi menjadi dua jenis perilaku penyesuaian diri yaitu adaptasi dan *adjustment*. Adaptasi adalah mengubah tingkah laku agar sesuai dengan lingkungannya, sementara *adjustment* adalah mengubah lingkungan agar menjadi sesuai dengan perilakunya (Sarwono, 1992).

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk tingkah laku *coping* dalam situasi yang berbeda. McCrae (1984) dalam penelitiannya tentang hubungan antara situasi dengan tingkah laku *coping* menemukan ada 19 tingkah laku coping yang signifikan yaitu reaksi permusuhan, aksi rasional, mencari pertolongan, tabah, percaya pada takdir, mengekspresikan perasaan-perasaan, berpikir positif, lari ke angan-angan, penolakan secara intelektual, menyalahkan diri sendiri, tenang, bertahan, menarik kekuatan dari kemalangan, menyesuaikan diri, berharap, aktif melupakan, lelucon, menilai kesalahan dan iman atau kepercayaan. Stone dan Neale (1984) meneliti tentang pengukuran tingkah laku *coping* sehari-hari. Ditemukan delapan tingkah laku, antara lain perusakan, membatasi situasi, aksi langsung, katarsis, menerima, mencari dukungan sosial, relaksasi dan religi.

Lazarus dan Folkman (dalam Aldwin, C.M & Reverson, T.A, 1987) membagi perilaku *coping* menjadi 2 fokus penyesuaian diri sebelum akhirnya masing-masing dari fokus tersebut terbagi menjadi bentuk-bentuk perilaku *coping* seperti berikut:

1. *Problem Focus Coping* (PFC)

Merupakan strategi penyesuaian diri untuk menghadapi masalah secara langsung melalui tindakan yang ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengubah sumber-sumber stress. Bentuk-bentuk dari PFC ini adalah:

- a) *Countiousness* (kehati-hatian) yaitu individu berpikir dan mampu mempertimbangkan beberapa pemecahan masalah serta mengevaluasi strategi-strategi yang pernah dilakukan sebelumnya atau meminta pendapat orang lain.
- b) *Instrumental action*, yaitu usaha-usaha langsung dalam menemukan solusi permasalahannya serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan.
- c) *Negosiasi*, merupakan salah satu taktik dalam PFC yang diarahkan langsung pada orang lain atau mengubah pikiran orang lain demi mendapatkan hal yang positif dari situasi yang problematik tersebut.

Dalam mengatasi masalah dengan *problem focused coping*, individu akan berpikir logis dan berusaha memecahkan permasalahannya dengan positif. Pada *problem focused coping* memungkinkan seseorang untuk membuat rencana dan tindakan lebih lanjut dan berusaha menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi demi memperoleh apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Folkman (1984) menyatakan bahwa *problem focused coping* juga dapat berupa pembuatan rencana tindakan, melaksanakan, mempertahankan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. *Problem focused coping* digunakan untuk mengontrol hal yang terjadi antara individu dengan lingkungannya melalui pemecahan masalah, pembuatan keputusan dan tindakan langsung.

2. *Emotion Focus Coping* (EFC)

EFC merupakan strategi untuk meredakan emosi individu yang ditimbulkan oleh stressor (sumber stress), tanpa berusaha untuk mengubah situasi yang menjadi sumber stress secara langsung. Bentuk dari *coping* ini adalah:

- a) Pelarian diri, individu berusaha untuk menghindari diri dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi.
- b) Penyalahan diri, individu selalu menyalahkan dirinya sendiri dan menghukum diri sendiri serta menyesali apa yang telah terjadi.
- c) Minimalisasi, individu menolak masalah yang ada dengan cara menganggap seolah-olah tidak ada masalah, bersikap pasrah dan tak acuh terhadap masalah.
- d) Pencarian makna, individu menghadapi masalah yang mengandung stress dengan mencari arti kegagalan bagi dirinya serta melihat hal-hal yang penting dalam kehidupannya.

Lazarus dan Folkman (1985) menjelaskan *emotion focused coping* memungkinkan individu melihat sisi baik atau hikmah dari suatu peristiwa, mengharapkan simpati dan pengertian orang lain atau mencoba melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, namun hal ini hanya bersifat sementara.

McCrae (1984) menyatakan bahwa perilaku menghadapi suatu tekanan merupakan proses yang dinamis ketika individu bebas menentukan bahwa perilaku yang sesuai dengan keadaan diri dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam menentukan perilaku tertentu untuk menyesuaikan diri. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kepribadian

Kepribadian digolongkan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu tipe A dengan ciri-ciri ambisius, kritis terhadap diri sendiri, tidak sabaran, melakukan pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang sama, mudah marah dan agresif, dan cenderung akan menggunakan *Emotion Focused Coping* (EFC) dalam penyesuaian dirinya. Selanjutnya adalah tipe B, seseorang dengan kepribadian tipe B ini memiliki ciri-ciri menyukai keadaan rileks, tidak terburu-buru, tidak mudah terpancing emosi, serta bersikap dan berbicara dengan tenang. Tipe B lebih berorientasi menggunakan *Problem Focused Coping* (PFC) dalam menyesuaikan diri.

2. Jenis kelamin

Menurut penelitian yang dilakukan Folkman dan Lazarus (1985) ditemukan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan kedua bentuk perilaku coping yaitu PFC dan EFC. Namun menurut pendapat Billings dan Moos (1984) wanita lebih cenderung berorientasi pada emosi dibandingkan laki-laki yang lebih berorientasi pada tugas dalam mengatasi masalah sehingga wanita diprediksi akan lebih sering menggunakan EFC.

3. Tingkat pendidikan

Menurut Folkman dan Lazarus (1985) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa subjek dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menggunakan PFC dalam mengatasi masalah mereka. Hal ini memiliki efek besar terhadap sikap, konsepsi cara berpikir dan tingkah laku individu yang selanjutnya berpengaruh terhadap penyesuaian dirinya.

4. Konteks lingkungan dan sumber individual

Folkman dan Lazarus (1985) menyebutkan sumber-sumber individu seseorang berasal dari pengalaman, persepsi, kemampuan memahami sesuatu, kesehatan, kepribadian, pendidikan, dan situasi yang dihadapi sangat menentukan proses penerimaan suatu stimulus yang kemudian dapat dirasakan sebagai tekanan atau bahkan ancaman.

5. Situasi sosial ekonomi

Seseorang dengan status sosial ekonomi rendah akan menampilkan coping yang kurang aktif, kurang realistis dan lebih fatal atau menampilkan respon menolak, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki status ekonomi lebih tinggi.

6. Dukungan sosial

Dukungan sosial merupakan salah satu pengubah stress. Dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasihat verbal atau nonverbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena kehadiran mereka dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi individu. Menurut Pramadi dan Lasmono H.K. (2003) jenis dukungan ini meliputi:

- a) Dukungan emosional
- b) Dukungan penghargaan
- c) Dukungan informative

Berdasarkan pada tinjauan konsep yang telah disajikan terangkumlah proposisi penyesuaian diri siswa dengan lingkungan sosial sekolahnya bahwa jika siswa tersebut adalah seorang perempuan maka kecenderungan dari bentuk coping yang digunakan adalah EFC walaupun baik perempuan maupun laki-laki sama-sama dapat menggunakan kedua bentuk *coping* yaitu EFC dan PFC; Jika terdapat siswa yang berlatarbelakang ekonomi rendah cenderung menampilkan *coping* yang kurang aktif, kurang realistis dan lebih fatal atau menampilkan respon menolak, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki status ekonomi lebih tinggi; Untuk siswa yang akrab dengan guru atau berarti mendapatkan dukungan sosial maka ia cenderung aktif untuk melakukan penyesuaian diri; Serta siswa yang memiliki kepribadian reaktif dan proaktif, untuk yang memiliki kepribadian reaktif cenderung menggunakan bentuk *coping* EFC dan yang proaktif menggunakan bentuk *coping* PFC.

Pekerjaan Sosial Sekolah dalam Penanganan Masalah Penyesuaian Diri

Menurut Linda Openshaw (2008), pekerja sosial sekolah merupakan bagian integral dari sistem sekolah yang memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk keberhasilan siswa disekolah dalam mencapai keberfungsian sosialnya. Peran pekerja sosial sekolah dalam menghadapi tantangan disetiap harinya cukup kompleks dan bergantung pada bagaimana pekerja sosial sekolah memanfaatkan pengetahuannya, keterampilannya, dan nilai-nilai untuk memperbaiki keberfungsian sosial siswa dalam kehidupannya. Berbagai hal harus dihadapi seorang pekerja sosial sekolah setiap harinya, salah satunya adalah membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya di sekolah sehingga siswa bisa tetap bersekolah.

Begitu pula dengan pernyataan yang disampaikan O'Donnell (2000) mengenai peran dari pekerja sosial sekolah adalah sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial dalam setting lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam pengembangan siswa dan membantu siswa dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi mereka dalam proses pendidikan.”

Kondisi anak-anak atau remaja yang tidak berhasil dalam penyesuaian diri di lingkungan sosial sekolah sering kali menempatnya dirinya pada sisi negative dalam kehidupan sebagai pelarian dari permasalahan yang dihadapinya. Kemungkinan yang pada akhirnya harus mereka hadapi yaitu seperti penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol serta penyimpangan perilaku lainnya. Dengan situasi dan tantangan tersebut mengharuskan pekerja sosial sekolah mengembangkan dan menerapkan berbagai keterampilan serta pengetahuan untuk menghadapi anak-anak atau remaja agar tetap bersekolah. Adapun tujuan dari pekerja sosial sekolah yaitu harus memberikan semua anak-anak kesempatan dan sumber daya untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang harus mereka hadapi, sehingga mereka dapat meraih keberhasilan secara

akademis dan sosial di lingkungan sekolah. Pada dasarnya tugas Pekerja Sosial Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pendidikan dan pelayanan sosial bagi siswa, serta menyiapkan pelayanan-pelayanan sosial langsung bagi siswa-siswa “khusus”.
2. Bertindak sebagai pembela siswa memfokuskan diri pada kebutuhan-kebutuhan siswa yang urgent.
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat menghambat pelayanan, menghubungkan dengan lembaga-lembaga.
4. Bekerja sama dengan guru menggunakan teknik-teknik yang tepat dalam memotivasi siswa untuk belajar.
5. Menghubungkan orang tua dengan lembaga lain untuk membangun kekuatan relasi antara siswa dengan komunitasnya secara efektif.
6. Berkoordinasi dengan berbagai keterampilan antar disiplin ilmu yang memberikan pelayanan pada siswa.
7. Mengembangkan dan memelihara hubungan produktif antara sekolah, lingkup pekerja sosial dan praktek-praktek lainnya.

Sejalan dengan tugas pokok yang harus dilakukan seorang pekerja sosial sekolah, perencanaan tindakan juga dilakukan. Openshaw (2008) menyampaikan bahwa dalam rencana tindakan ini pada intinya menguraikan ‘Siapa yang akan melakukan’, ‘Kapan’ dan ‘Bagaimana hal itu dapat tercapai’ yang tentunya rencana tindakan tersebut harus mengandung tujuan tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekolah.

Pekerja sosial sekolah perlu membantu siswa dalam menentukan dengan siapa mereka bekerja sama untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang juga akan membantu mereka dalam proses penyesuaian diri di sekolah. Dengan bantuan dari pekerja sosial sekolah, anak dapat menyusun prioritas dari tujuan-tujuan tersebut dan menentukan mana yang ia ingin capai terlebih dahulu.

Dalam penentuan tujuan, partisipasi dari siswa merupakan hal yang penting dan juga sesuai dengan nilai-nilai pekerjaan sosial mengenai tanggung jawab individu dan konsep terkait partisipasi individu tersebut dalam penentuan takdirnya. Turner (dalam Openshaw, 2008). Maksudnya adalah siswa sendiri memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai karena dengan begitu siswa akan memiliki rasa tanggungjawab bukan hanya dalam menentukan tetapi bertanggungjawab dalam mencapai tujuan tersebut pula.

Setelah tujuan yang ingin dicapai siswa ditetapkan, pekerja sosial sekolah dapat membantu siswa dalam memutuskan siapa diantara guru, teman, orang tua, dan pekerja sosial sekolah yang akan membantu siswa tersebut dalam menentukan “apa yang akan dilakukan, kapan, dan bagaimana” untuk tujuan tersebut. Pekerja sosial sekolah juga dapat membantu siswa dalam memprioritaskan tujuan mana yang akan didahulukan sehingga siswa tersebut dapat fokus pada langkah-langkah yang paling mudah terlebih dahulu untuk ia lalui sampai tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Ketika siswa telah mencapai salah satu tujuannya, rencana tindakan selanjutnya adalah memeriksa efektivitas jangka panjang dari intervensi yang dilakukan. Pekerja sosial sekolah juga perlu menerapkan suatu bentuk pengukuran untuk melihat apakah terjadi perubahan yang nyata atau tidak pada siswa. *Charting behavioral Change* dapat menjadi alat konkret untuk membantu siswa melihat dan mengukur perubahan tersebut. *Chart* tersebut dapat memberikan acuan pada pekerja sosial sekolah untuk memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan intervensi dari pekerja sosial sekolah secara bertahap (O'Hare, 2005).

Kesimpulan

Kondisi anak-anak atau remaja yang tidak berhasil dalam penyesuaian diri di lingkungan sosial sekolah sering kali menempatnya dirinya pada sisi negative dalam kehidupan sebagai pelarian dari permasalahan yang dihadapinya. Kemungkinan yang pada akhirnya harus mereka hadapi yaitu seperti penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol serta penyimpangan perilaku lainnya. Dengan situasi dan tantangan tersebut mengharuskan pekerja sosial sekolah mengembangkan dan menerapkan berbagai keterampilan serta pengetahuan untuk menghadapi anak-anak atau remaja agar tetap bersekolah.

Penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial sekolah baik dengan *Problem Focused Coping* (PFC) ataupun *Emotion Focused Coping* (EFC) tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa, baik itu faktor jenis kelamin, kepribadian, tingkat pendidikan, situasi sosial ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkanlah dukungan sosial yang mendorong siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekolahnya agar mereka tetap bisa bersekolah.

Sebagai saran, karena di Indonesia ini keberadaan pekerja sosial sekolah masih jarang ditemui disekolah-sekolah dan masalah penyesuaian diri mada remaja yang dalam hal ini adalah siswa juga kerap ditemui, maka keberadaan pekerja sosial di sekolah dapat menjawab kebutuhan siswa dalam menghadapi lingkungan sosial disekolah. Adanya pekerja sosial sekolah juga membantu siswa untuk memahami lingkungan sekolah dan isu-isu yang berkaitan dengan sekolah secara efektif dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya dan berdasarkan batasan lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bee, H. 1994. *Lifespan Development*. New York: Harper Collins College Publishers.
- Hurlock, Elizabeth B. 1981. *Developmental Psychology Life Span Approach. Fifth Edition*. New Delhi : Tata Mc. Graw Hill.
- _____. 1997. *Psikologi Perkembangan Anak. Edisi Ke Enam*. Jakarta: Erlangga.
- Lazarus RS., Folkman S. 1984. *Stress Appraisal and Coping*. New York: Springer Publishing Company.

- Mappiare, Andi. 1982. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Monks, F. J., Knoers, A. M. P., Haditono, S.R. 2001. *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence. Perkembangan Remaja. Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S.W. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: PT Grasindo.
- _____. 2000. *Psikologi Remaja. Edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2002. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Meode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York: MacMillan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian:

- Wardani, D.S. (2009). *Strategi Coping Orang Tua Menghadapi Anak Autis. Skripsi*, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal:

- Constable, R., Kuzmickaite, D., Harrison, W. D., & Volkman, L. 1999. *The emergent role of the school social worker in Indiana. School Social Work Journal*.
- Coyne, J., Aldwin, C., & Lazarus RS. 1981. *Depression and Coping In Stressfull Episodes. Jurnal Of Abnormal Psychology. Vol. 50*.
- Folkman, S., Lazarus, RS., Dunkel-Schetter, C., De Longis, A., & Gruen, R. J. 1986. *The dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. Jurnal of Personality and Social psychology*.
- Khasan, M; Widjanarko,M. 2011. Perilaku Coping Masyarakat Menghadapi Banjir.
- McCrae, R.R. 1984. *Situational Determinants of Coping Responses: Loss, Threat, and Challenge. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 46*.
- Openshaw, Linda. 2008. *Social work in school: principle and practice*. New York: The Guilford Press.
- Suharto, Edi. 2002. COPING STRATEGIES DAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL: MENGEMBANGKAN PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL

DALAM MENGENAL DAN MENANGANI KEMISKINAN.
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_07.htm

Stone, A. A. and Neale, J. M. 1984. *New Measure of Daily Coping: Development and Preliminary Result. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 46.*

Sumber lainnya:

Sarwono, S.W. 1985. *Remaja dan Perilaku Seksualnya. Sinar Harapan. 23 November.*

<http://news.detik.com/kanal/10/berita?nt10>

<http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=673&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>

PEKERJA SOSIAL MEDIS DALAM MENANGANI ORANG DENGAN SKIZOPHRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

Ajruni Wulandestie Arifin, & Soni A. Nulhakim

Email:

wulansocialworker@yahoo.co.id; soninulhakim@yahoo.com

Abstrak

Skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan jiwa kronik dimana penyandang mengalami halusinasi, delusi, gangguan berfikir dan bertingkah laku. Data riset kesehatan dasar (riskesdas) Departemen Kesehatan sampai dengan bulan Juni 2014 menyebutkan bahwa ada 1 juta pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di Indonesia. UU No. 18 tahun 2014 menyebutkan bahwa tenaga profesi yang menangani Orang Dengan Gangguan Kejiwaan diantaranya yakni Psikiater, Psikolog, Pekerja Sosial, Terapi Okupasi, dan Perawat. Tenaga profesional dan institusi tentunya memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan aspek biopsikososial dan *human right* dari pasien. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu institusi yang menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di lingkup Jawa Barat termasuk Skizofrenia. Pasien Skizofrenia menghadapi kondisi dimana aspek biologis dan aspek sosial merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Oleh karenanya dibutuhkan pelayanan yang holistik terhadap kondisi pasien Skizofrenia, yang tidak hanya berbatas kepada kondisi rehabilitasi medis saja. Pekerja sosial sebagai salah satu profesi untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi klien memiliki salah satu peran yakni sebagai pendamping. Tentu akan banyak sekali hal yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendampingan terhadap pasien Skizofrenia. Oleh karenanya artikel ini akan membahas mengenai peran pendampingan terhadap pasien Skizofrenia yang dilakukan oleh pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci : Human Right, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Medis, Pendampingan, Skizofrenia

PENDAHULUAN

Fenomena Skizofrenia di Indonesia layaknya gunung es yang tidak nampak di permukaan. Bila ditelisik lebih jauh akan diketahui besarnya penyandang Skizofrenia di Indonesia beserta permasalahan yang harus dihadapi. Menurut data riskesdas Jawa Barat, Departemen Kesehatan sampai dengan bulan Juni 2014 menyebutkan bahwa ada 1 juta pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di Indonesia.

Penderita Skizofrenia memiliki tantangan hidup yang begitu sulit ketika harus dihadapkan pada kondisi medis dan sosial secara beriringan. Hal ini kian diperburuk oleh reaksi keliru dari masyarakat bahkan keluarga sendiri dengan stigma “orang gila”, penolakan terhadap kehadirannya, ditakuti, diskriminasi, bahkan penganiayaan. Fenomena tersebut dapat menjadi tekanan psikologis yang dapat memicu kekambuhan ODS (*relaps*). Tak jarang pasca proses rehabilitasi medis di Rumah Sakit, gejala-gejala kekambuhan muncul kembali. Padahal proses penyembuhan di Rumah Sakit bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien, mengurangi gejala-gejala kekambuhan, dan mengupayakan agar pasien dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti sediakala.

Berbicara mengenai proses penyembuhan bagi penyandang Skizofrenia tentu berbicara mengenai aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Keempat aspek ini berbicara mengenai ranah medis dan sosial serta multidisiplin ilmu yang saling terintegrasi untuk memulihkan kondisi klien.

Disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa, “Yang dimaksud dengan tenaga profesional lainnya adalah tenaga profesional di luar tenaga kesehatan yang menggunakan keilmuan dan keterampilannya sebagai profesi untuk melakukan pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa, antara lain pekerja sosial, terapis okupasi, terapis wicara, guru tertentu, dan lain-lain”.

Pekerja Sosial sebagai salah satu profesi yang berfokus pada keberfungsian sosial klien dan interaksi lingkungan sosial klien sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam hal pemulihan sosial bagi penyandang Skizofrenia. Dengan menggunakan pemahaman sistem dasar pekerja sosial, akan terlihat bagaimana lingkungan dapat menjadi satu faktor yang sangat penting bagi proses penyembuhan. Oleh karena itu, untuk membantu pemulihan bagi penyandang Skizofrenia di Rumah Sakit diperlukan tenaga pekerja sosial professional atau pendamping sosial yang kompeten (terstandar).

Orang Dengan Skizofrenia sebagai sosok pribadi yang utuh memiliki hak-hak dasar yang harus diperjuangkan. Gangguan kejiwaan tentunya tidak mempengaruhi lingkungan untuk dapat mengakomodir hak asasi manusia yang dimiliki oleh ODS. Mengacu pada UU No. 39 tahun 1999, disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Salah satu rumah sakit jiwa yang memiliki tenaga pekerja sosial professional dalam memberikan pelayanan terhadap pasiennya yakni Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Kolonel Masturi Km. 07 Cisarua Bandung. Rumah Sakit ini menerima berbagai bentuk pelayanan untuk mengakomodir dan menjangkau kebutuhan pasien dengan masalah kejiwaan. Unit Rehabilitas Medis merupakan salah satu bagian dalam RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

dimana pekerja sosial medis melakukan pelayanan bersama dengan tim yang berasal dari berbagai profesi.

Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien Skizofrenia, serta bagaimana pendampingan tersebut dapat mengakomodir hak asasi manusia setiap individu.

SELAYANG PANDANG SKIZOFRENIA

Menurut buku “Patologi Sosial 3”, Skizofrenia diartikan sebagai kondisi psikotik dengan gangguan disintegrasi, deperonalisasi, dan kelelahan atau kepecahan struktur kepribadian, serta regresi-Aku yang parah. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia menjabarkan bahwasanya Skizofrenia merupakan suatu gangguan kejiwaan kompleks di mana seseorang mengalami kesulitan dalam proses berpikir sehingga menimbulkan halusinasi, delusi, gangguan berpikir dan bicara atau perilaku yang tidak biasa (dikenal sebagai gejala psikotik). Karena gejala ini, orang dengan skizofrenia dapat mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mungkin menarik diri dari aktivitas sehari-hari dan dunia luar.

Skizofrenia hanya dapat dikenali dari gejala-gejala yang tampak melalui perubahan perilaku yang ditampilkan oleh penyandang seperti marah tanpa sebab yang jelas, bicara kacau, menyendiri dan sibuk dengan dirinya, serta cenderung menarik diri. Skizofrenia menjadi bagian dari gangguan mental kronik yang memiliki karakteristik gejala positif seperti waham dan halusinasi, juga gejala negatif seperti afek tumpul dan apatis. Penyakit ini juga sering berhubungan dengan gangguan kognitif dan depresi dan biasanya mulai muncul pada usia dewasa muda dan ditandai dengan terjadinya *relaps* dengan periode remisi sempurna atau parsial.

Tanda pertama dari skizofrenia biasanya muncul saat masa remaja atau awal masa dewasa, tetapi tanda tersebut juga telah diketahui muncul pada orang di atas 40 tahun. Laki-laki maupun wanita memiliki risiko menderita skizofrenia. Gejala pada pria cenderung muncul di usia yang lebih muda daripada wanita. Gejala skizofrenia bervariasi dari satu orang ke orang lain, tetapi secara umum dikategorikan menjadi:

1. Gejala positif (misalnya halusinasi, delusi, pemikiran kacau, dan gelisah) yang biasanya tidak ada pada orang sehat dan dianggap 'ada' sebagai akibat dari gangguan tersebut.
2. Gejala negatif dapat dilihat sebagai perilaku yang 'hilang' (misalnya kurang dorongan atau inisiatif, respon emosional, antusiasme, interaksi sosial). Kebanyakan orang memiliki kemampuan psikologis tersebut tetapi orang dengan skizofrenia mengalami beberapa derajat penurunan.
3. Gejala afektif yang dapat mempengaruhi suasana hati – seperti pikiran depresi, kecemasan, kesepian atau ide bunuh diri.

4. Gejala kognitif meliputi masalah dengan konsentrasi dan memori misalnya kurangnya perhatian, kelambatan pikiran, kurangnya tilikan (pemahaman & penerimaan) mengenai penyakit.

Pasien dengan skizofrenia mungkin mengalami gangguan fungsi dalam satu atau lebih bidang kegiatan hidup yang penting seperti hubungan antarpribadi, pekerjaan atau pendidikan, kehidupan keluarga, komunikasi, dan perawatan diri.

Kebanyakan orang dengan skizofrenia mengalami beberapa episode psikotik (masa dimana gejala positif lebih relevan) selama hidup. Gejala positif biasanya bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin memburuk selama masa kekambuhan dan membaik ketika sedang remisi. Orang dengan skizofrenia dapat menjalani hidup yang secara relatif normal diantara episode psikotik, tampak sehat dan stabil secara emosional, meskipun gejala negatif sering muncul setelah episode pertama dan dapat menetap untuk waktu yang lama dan memburuk setelah itu. Suatu pola berkelanjutan atau berulang dari penyakit ini dikenal sebagai skizofrenia kronis. Kebanyakan orang dengan skizofrenia akan memerlukan terapi jangka panjang untuk mengatasi gangguan, yang umumnya akan mencakup penggunaan obat.

Tidak ada penyebab tunggal skizofrenia. Seperti penyakit kronis umum lainnya, seperti diabetes dan penyakit jantung, berbagai faktor secara bersama-sama diperkirakan memberikan kontribusi untuk berkembangnya skizofrenia. Penyebab Skizofrenia diantaranya yakni faktor genetik dan lingkungan atau cedera otak sekitar masa kelahiran mungkin berperan. Masing-masing faktor ini diyakini akan meningkatkan risiko bagi individu tertentu untuk mengalami gejala psikotik, yang bisa dipicu oleh sejumlah peristiwa kehidupan dan situasi yang berbeda, seperti efek isolasi sosial dan stres, khususnya di sekitar awal masa dewasa. Narkoba, termasuk ganja, juga telah dikaitkan dengan pemicu terjadinya skizofrenia dan gejala psikotik sementara.

Ahli jiwa (Psikiater) sepakat bahwa gejala skizofrenia merupakan akibat dari masalah dalam mengirim, dan memproses informasi dalam otak [Pedoman Klinis APA, 2004]. Masalah ini terjadi saat komunikasi normal antara sel-sel saraf otak yang terjadi akibat pelepasan bahan kimia tidak bekerja seperti seharusnya. Meskipun skizofrenia tidak dapat dicegah, jumlah frekuensi seseorang mengalami gejala skizofrenia (dikenal sebagai 'episode psikotik') dapat dikontrol dan seharusnya menjadi lebih jarang dengan terapi yang tepat (sumber : <http://www.peduliskizofrenia.org/sumber-daya/tentang-skizofrenia>)

HUMAN RIGHTS

Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa mebedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).

Hal yang sama dimiliki oleh seorang penyandang Skizofrenia. Boleh dikatakan ia menghadapi situasi tidak mudah karena masalah kejiwaan terkadang akan sangat sulit disembuhkan jika sudah mencapai di titik kronik. Akan tetapi manusia dalam kondisi apapun memiliki *human right* yang tak dapat dikesampingkan maknanya. Hak asasi manusia dari penyandang Skizofrenia harus tetap diakomodir dan dipenuhi, dan menjadi tanggung jawab lembaga pelayanan, profesi, maupun keluarga ketika bahkan individunya sendiri sudah tak memiliki kesadaran terhadap hal tersebut.

Negara memiliki tugas untuk memenuhi [to fulfill], melindungi [to protect] dan kewajiban untuk memajukan [to promote]. Hal ini merujuk pada UUD 1945, UU HAM, UU Pengadilan HAM dan berbagai UU lain. Pemerintah sudah mengatur regulasi mengenai Hak Asasi Manusia di dalam UU No. 39 tahun Tahun 1999. Pada Bab III Pasal 9, menjelaskan mengenai poin-poin hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak tersebut dikelompokkan, seperti : Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesejahteraan, dan Hak Untuk Turut Serta dalam Pemerintahan.

Fakta yang terjadi, pelayanan dan intervensi yang diberikan baik oleh lembaga pelayanan maupun profesi terkadang melupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Padahal, tujuan dari pelayanan yang diberikan kepada pasien bukan hanya semata-mata untuk memulihkan kondisi klien, akan tetapi juga memanusiakan manusia dalam prosesnya.

Dalam intervensi yang dilakukan kepada pasien, pekerja sosial menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sehingga tidak seluruh pasien dalam rumah sakit mendapatkan pelayanan dari seorang pekerja sosial. Disisi lain, tentunya setiap pasien memiliki tantangan yang sama dari segi lingkungan.

Pekerja sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa program untuk memenuhi beberapa aspek pelayanan, diantaranya terapi kelompok, terapi komunitas, sosialisasi kader, dan pendampingan itu sendiri. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah ketika membantu pasien untuk mengakses bantuan pelayanan, home visit, serta pendampingan keterampilan. Padahal, masih banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial terhadap pasien dengan Skizofrenia di Rumah Sakit, mengingat kompetensi yang dimiliki oleh seorang pekerja sosial tidak terbatas hanya kepada individu yang bersangkutan, tetapi juga mengenai lingkungan sosial yang mempengaruhi pasien.

BIOPSIKOSOSIAL ODS

Setiap individu dibangun oleh aspek diri yang terdiri dari aspek biologi, psikologi, dan sosial yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga konsep ini akan membentuk individu menjadi sosok yang produktif dan dapat berfungsi secara sosial. Orang Dengan Skizofrenia menghadapi situasi yang sulit ketika ia dihadapkan pada stigma dari keluarga maupun masyarakat yang memberikan respon negatif terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Penyandang Skizofrenia cenderung ditakuti karena terkadang mereka memiliki keyakinan yang berbeda dari apa yang mayoritas masyarakat lihat dan rasakan.

Mereka mungkin memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dalam hal yang tidak benar (delusi), misalnya bahwa orang membaca pikiran mereka, mengendalikan pikiran mereka atau berencana menyakiti mereka. Ketika dunia mereka kadang-kadang tampak menyimpang akibat halusinasi dan delusi, orang dengan skizofrenia dapat merasa takut, cemas dan bingung. Mereka bisa menjadi begitu kacau sehingga mereka dapat merasa takut sendiri dan juga dapat membuat orang di sekitar mereka takut.

Penanganan aspek kuratif yang dilaksanakan oleh psikiater maupun psikolog dirasakan belum cukup. Faktor penyebab terbesar bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa justru seringkali berasal dari lingkungan. Sebagai aspek eksternal dari diri klien, tentunya perlu adanya intervensi khusus terhadap lingkungan yang diupayakan oleh profesi. Pekerja Sosial yang memusatkan pelayanannya kepada interaksi antara individu yang bermasalah dengan lingkungan sosialnya memiliki program yang fokus kepada masyarakat. Penekanan yang dilakukan bukan hanya dari inti masalah, akan tetapi juga kepada faktor penyebab sehingga dalam kondisi jangka panjang akan dapat mengurangi dampak terhadap inti masalah itu sendiri. Individu merupakan sistem yang saling mempengaruhi, oleh sebab itu faktor biopsikososial idealnya mendapatkan pelayanan yang holistik.

UPAYA KESEHATAN PEKERJA SOSIAL MEDIS

Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Siregar, 2003).

Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Definisi Pelayanan Kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud yakni meliputi aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Promosi Kesehatan menurut Green (1984) yakni segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan organisasi, yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sementara Ottawa Charter (1986) mengartikan promosi kesehatan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya.

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *pravenire* yang artinya datang sebelum atauantisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, preventi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sementara upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita-penderita yang dirawat dirumah, maupun terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menderita penyakit yang sama.

Pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat meliputi pelayanan dalam aspek preventif, promotif, dan rehabilitatif. Sesuai dengan uraian definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dari pengertian setiap aspeknya itu sendiri.

Untuk aspek preventif, pekerja sosial medis melakukan rawat jalan. Di dalam rawat jalan, pekerja sosial meminimalisir faktor penyebab yang mungkin muncul baik dari segi keluarga, lingkungan, maupun pasien itu sendiri. Hal ini diupayakan agar kondisi pasien tidak semakin parah. Ketika pasien masuk ke Unit

Rehabilitasi Medis, ketika itu pula pasien mendapatkan deteksi mengenai kondisi gangguan kejiwaan yang sedang dialaminya. Rata-rata pasien yang masuk ke Unit Rehabilitasi Medis merupakan pasien yang baru terdeteksi mengalami gangguan jiwa sehingga kondisi yang dimiliki belum mencapai kondisi kronik. Dalam hal ini peran keluarga dan lingkungan untuk memberikan dukungan penuh merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan harus memiliki inside yang baik di dalam dirinya.

Aspek Promotif yang dilakukan oleh pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yakni dengan mengadakan *community meeting* dengan masyarakat di sekitar RS untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait dengan Skizofrenia maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa secara umum. Pekerja sosial memastikan masyarakat paham akan pentingnya mengenal Skizofrenia beserta kondisi yang dihadapi agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dari pasien. Selain itu, pekerja sosial melakukan sosialisasi kader untuk memberikan kapasitas yang terbaik bagi kader-kader pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Hal ini diupayakan agar pelayanan yang diberikan kepada pasien Orang Dengan Gangguan Kejiwaan tidak hanya berpusat kepada basis institusi saja. Akan tetapi, tentunya masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu memulihkan kondisi pasien. Masyarakat sebagai elemen yang pasti akan langsung bersinggungan dengan pasien pasca perawatan di rumah sakit tentunya harus memiliki kondisi yang cukup siap ketika menerima pasien Skizofrenia di tengah-tengah mereka. Penanganan, penerimaan, dan pelayanan berbasis masyarakat dan kader tentunya harus tepat. Oleh karenanya diperlukan sosialisasi kader. Disamping melakukan pelayanan secara langsung, pekerja sosial medis mengupayakan fungsi promotif nya melalui media sosial, dan media cettak seperti pamplet dan poster.

Terakhir, yang dilakukan oleh pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dalam aspek rehabilitatif yakni mengupayakan hadirnya rehabilitasi psikososial bagi kepentingan pasien. Rehabilitasi ini merupakan rehabilitasi yang tidak hanya melibatkan dari sisi medis saja, akan tetapi juga mengutamakan aspek sosial klien yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sehat pasien. Pekerja sosial melaksanakan fungsi pendampingan untuk menambah keterampilan klien untuk lebih memaksimalkan potensinya dalam bidang seni. Klien didorong untuk membuat *handmade* yang dapat bermanfaat untuk sehari-hari dipandu oleh pekerja sosial dan Kelompok Kesenian Perempuan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Hal ini diupayakan agar klien dapat lebih produktif mengisi waktu luang dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar tidak berkebutakan pada masalah yang sedang dihadapinya.

PENUTUP

Pekerja sosial memiliki peran yang cukup krusial dalam menangani Orang Dengan Skizofrenia, terlebih kapasitasnya yang tidak hanya terfokus pada individu-nya saja, akan tetapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karenanya, pekerja sosial pun perlu membekali diri dengan pemahaman mengenai Skizofrenia,

Metode dan Praktek yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan Skizofrenia baik secara individu maupun masyarakat, regulasi yang digunakan ketika melakukan pelayanan bersama dengan lintas profesi, keterampilan berkomunikasi yang baik dan benar, istilah-istilah yang digunakan oleh tim medis, dsb.

Hal yang saya temukan adalah, pekerja sosial ternyata tidak hanya bekerja pada bidang pendampingan saja, akan tetapi jauh lebih luas dari itu. Pekerja sosial yang melakukan pendampingan hanya ketika melakukan bimbingan konseling dan pendampingan keterampilan. Pekerja sosial di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat melakukan pelayanan dalam aspek preventif, promotif, dan rehabilitatif sebagai upaya untuk memaksimalkan keberfungsian sosial pasien Skizofrenia di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Utomo. 2013. Tentang Skizofrenia. Melalui :
<http://www.peduliskizofrenia.org/sumber-daya/tentang-skizofrenia>
[19/12/2014]
- Bestari, Mitra. 2010. Jurnal : Penelitian Kesejahteraan Sosial. B2P3KS :
Yogyakarta.
- Fahrudin Ph. D, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : PT
REFIKA ADITAMA.
- Setiadi, Iman. 2006. Skizofrenia : Memahami Dinamika Keluarga Pasien. Refika
Aditama : Bandung.
- Kartono, Dr. Kartini. 2002. Patologi Sosial 3 “Gangguan-Gangguan Kejiwaan.
Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wibhawa, Budhi dan Raharjo, Santoso T. 2010. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial.
Widya Padjadjaran

PERAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Oleh:

Shinta Puji Triwanti, Ishartono, & Arie Surya Gutama

Email:

(triwantipujishinta@gmail.com, ishartono_kesos@yahoo.com,
ariesurya_gutama@yahoo.com)

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, tindak kekerasan, pelanggaran hukum, terlantar sehingga lansia mengalami ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan lansia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, dan sebagai lembaga primer keluarga mempunyai peran penting untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, pengaruh globalisasi mempengaruhi perubahan nilai dan peran di dalam keluarga, adanya perubahan struktur di dalam keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil sehingga hal ini membuat keluarga lebih banyak yang menempatkan lansia di sebuah panti werdha dibandingkan tinggal dan dirawat oleh keluarga secara bersama-sama. Oleh karena itu, panti werdha memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia melalui pelayanan yang dilakukan. Pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, maupun kebutuhan sosial yang tidak didapatkan ketika berada di dalam keluarga. Melalui pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh panti werdha maka hal ini dapat membantu lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: kesejahteraan lansia; perubahan peran keluarga; pelayanan panti werdha; peningkatan penduduk lansia; permasalahan lansia

PENDAHULUAN

Keberadaan lansia di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan di sebuah Negara, melainkan keberadaan lansia menjadi tanggung jawab keluarga sebagai lembaga primer. Keluarga mempunyai peran penting untuk merawat lansia dan membantu lansia untuk menjangkau sumber-sumber yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan tuntutan hidup yang semakin banyak maka kebiasaan anak atau keluarga merawat orangtua yang sudah berusia lanjut menjadi semakin berkurang. Padahal kebiasaan

untuk merawat dan tinggal bersama orangtua yang sudah berusia lanjut menjadi hal yang sudah biasa terjadi di dalam sebuah keluarga.

Perubahan struktur di dalam keluarga menyebabkan keluarga memandang bahwa keberadaan lansia di dalam lingkungan keluarga merupakan sebuah beban. Keluarga mengalami kesulitan untuk melakukan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan lansia dengan kondisi anak-anak begitu sibuk dengan masalahnya sendiri sehingga mengakibatkan anak-anak secara tidak langsung kurang memperlakukan keberadaan lansia serta jalinan komunikasi antara orang tua dengan anak semakin berkurang. Selain itu, terdapat perubahan peran dan fungsi di dalam keluarga yang menyebabkan pihak keluarga mulai menempatkan para lansia di panti werdha. (Afrida dkk, 2002)

Peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tantangan tersebut semakin berat karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat seperti hasil sensus yang diperoleh bahwa Indonesia selama empat dasawarsa terakhir menempati posisi empat dengan jumlah populasi terbesar di dunia menurut US. *Cencus bureau*. Tercatat bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang diselenggarakan BPS di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dengan jumlah penduduk lansia sebanyak 18.118.699 jiwa. (www.eprints.undip.ac.id)

Tantangan yang dihadapi semakin berat ketika peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan, keterbelakangan, tindak kekerasan dan pelanggaran hukum yang dialami oleh lansia, sehingga hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif dan tentunya lansia membutuhkan pelayanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh lansia.

Ketergantungan yang dialami oleh lansia terjadi karena menurunnya kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga penurunan yang dialami oleh lansia akan memperlambat proses interaksi yang terjadi di dalam lingkungan. Hal ini yang menyebabkan lansia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjangkau sumber-sumber yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan lansia.

Kebutuhan hidup lansia berbeda dengan kebutuhan hidup yang lain sebagai penduduk usia produktif, hal ini dipengaruhi oleh proses penuaan, perubahan, dan kemunduran di dalam tahap kehidupan yang terjadi pada lansia sehingga menyebabkan kebutuhan lansia lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, kehadiran panti werdha di tengah-tengah perubahan nilai dan struktur yang terjadi di dalam keluarga menjadi pilihan yang terbaik untuk membantu lansia dalam menjangkau sumber-sumber yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tingkat kesejahteraan bagi lansia itu sendiri.

PEMBAHASAN

Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan seorang individu yang sudah melewati masa *golden age* dan sudah memasuki usia 60 tahun. Pada usia ini, banyak kemunduran yang dihadapi oleh para lanjut usia baik itu dari segi fisik, psikis, maupun sosial. Kemunduran yang dialami oleh lansia merupakan proses alami yang disebut dengan proses degeneratif. Pada tahap ini lansia mengalami kesulitan untuk melewati masa tuanya, karena sebagian orang beranggapan bahwa lansia tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berguna. Semakin bertambahnya usia yang terjadi melalui proses alamiah pada lanjut usia, maka semakin banyak ketergantungan yang dialami oleh lanjut usia. Hal tersebut disebabkan menurunnya kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga penurunan yang dialami oleh para lanjut usia akan memperlambat proses interaksi yang terjadi di dalam lingkungan.

Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson di dalam Delapan Tahap Perkembangan Manusia bahwa jika di dalam tahap perkembangannya lansia memiliki integritas yang rendah maka lansia akan sulit menerima akhir dari hidupnya dan mengalami kecemasan dalam menjalani hidup. Kemudian, hal ini diperjelas dengan pendapat yang dikemukakan Hurlock, bahwa lansia merupakan tahap akhir siklus perkembangan manusia, masa semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang.

Pada tahap terakhir di masa perkembangan, orang dengan berusia lanjut memikirkan mengenai apa yang telah mereka lewatkan dalam hidup kesalahan yang mereka perbuat, hal-hal yang mereka tidak pernah miliki mungkin diliputi oleh keputusan. Disisi lain, mereka yang dapat melihat kembali hidupnya dengan puas diperkuat oleh rasa integritas pribadi. (Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan Edisi Ketiga, 1995:481)

Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan kegiatan atau tugas di dalam kehidupan lansia. Lanjut usia mengalami berbagai proses perkembangan mulai dari bayi sampai dengan menjadi tua yang disertai dengan berbagai penurunan yang terjadi pada kondisi fisik, psikis dan sosial, sehingga membuat para lanjut usia membutuhkan kehadiran orang lain dalam menjalani proses penuaan.

Keberhasilan lansia dalam menjalani masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain, dapat dilihat dari jenis lansia itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kesejahteraan Lansia dalam BAB I pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Kemudian di pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Kesejahteraan lansia menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh lansia maka hal ini dapat menunjang kualitas hidup lansia. Kualitas hidup yang baik akan berpengaruh terhadap cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya rasa ketergantungan terhadap orang lain sehingga lansia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kemunduran yang terjadi, dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan maka hal ini akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia di dalam lingkungannya.

Kualitas hidup menjadi nilai standar bahwa tingkat kesejahteraan lansia terpenuhi dengan baik. Menurut WHO kualitas hidup merupakan persepsi individu dari posisi laki-laki atau wanita dalam hidup ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai ditempat laki-laki atau wanita itu tinggal dan berhubungan dengan standar hidup, harapan hidup, kesenangan dan perhatian mereka yang terangkum secara kompleks pada kesehatan fisik seseorang, status psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang baik maka hal ini tentunya mempengaruhi kualitas hidup lansia.

Lansia memiliki segala potensi yang dapat dipelihara, dirawat dan dipertahankan bahkan diaktualisasikan untuk mencapai kualitas hidup lansia yang optimal (*optimum aging*). Kualitas hidup lansia yang optimal bisa diartikan sebagai kondisi fungsional lansia berada pada kondisi maksimum atau optimal, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, berguna, dan berkualitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang lansia dapat berguna di masa tuanya yaitu kemampuan menyesuaikan diri dan menerima segala perubahan serta kemunduran yang dialami, adanya penghargaan dan perlakuan yang wajar dari lingkungan lansia tersebut, lingkungan yang menghargai hak-hak lansia serta memahami kebutuhan dan kondisi psikologis lansia dan tersedianya media atau sarana bagi lansia untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. (Depsos, 2007 di dalam tesis Ekawati Sutikno, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia*, 2011:38)

Melalui kualitas hidup yang dimiliki oleh lansia maka akan membantu lansia untuk menikmati masa-masa hidupnya dengan berbagai potensi yang dimiliki di usia yang sudah senja. Selain itu, dengan kualitas hidup yang baik seperti adanya rasa kebermaknaan dalam hidup, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kemunduran yang terjadi, dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan maka hal ini akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia di dalam lingkungannya.

Peran Panti Sosial Tresna Werdha

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi maksimum atau optimal bagi lansia adalah melalui pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada lansia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi sebagai lembaga primer maka keluarga memiliki peranan penting dalam memenuhi

kebutuhan lansia terutama untuk meningkatkan kesejahteraan lansia itu sendiri. Adanya proses globalisasi dan berbagai perubahan yang terjadi akibat perkembangan zaman maka yang terjadi menimbulkan kecenderungan struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, sehingga perubahan yang terjadi mempengaruhi persepsi dalam merawat lansia di dalam keluarga.

Adanya perubahan struktur yang terjadi di dalam keluarga dari keluarga besar berubah menjadi keluarga kecil maka hal ini mempengaruhi pihak keluarga untuk menempatkan lansia di panti werdha sebagai suatu pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan lansia. Upaya yang diberikan oleh panti werdha terhadap para lansia akan mengurangi lansia yang terlantar, walaupun pelayanan yang dilakukan oleh panti werdha merupakan pilihan alternatif terakhir karena basis utama dari pelayanan terhadap lansia dilakukan oleh keluarga sebagai lembaga primer. (Departemen Sosial RI, 2003. *Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial Lansia di Indonesia*)

Pemenuhan kebutuhan terhadap lansia menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keberfungsian lansia dan kesejahteraan lansia. Upaya yang dilakukan dengan mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas dari lansia itu sendiri. Selain itu, melalui pelayanan yang dilakukan terhadap lansia maka lansia akan mendapatkan hak untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh panti werdha merupakan bentuk sistem pelayanan sosial atau sebagai *primary setting*. Pelayanan sosial merupakan wujud aktivitas pekerja sosial dalam praktik profesionalnya. Pelayanan sosial yang diberikan sebagai wujud dari jawaban terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat sebagai akibat perubahan masyarakat itu sendiri. Sehingga bidang-bidang pelayanan sosial akan tergantung pada bagaimana pekerja sosial memandang dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Merton dan Nisbet merinci bahwa masalah sosial terdiri dari perilaku menyimpang dan disorganisasi sosial serta salah satu masalah sosial yang ada di dalamnya adalah lansia (*age and aging*). (Budhi Wibhawa dkk, 2010: 76-77)

Pekerja sosial sebagai pelaksana pelayanan sosial bagi lansia berperan untuk memberikan perlindungan sosial, membantu para lansia untuk menjangkau sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial. Pekerja sosial juga berfokus untuk memberikan pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh lansia di masa tuanya. (Skidmore, 1974: 252)

Pekerja sosial memiliki peranan penting dalam mendukung orang tua untuk hidup mandiri dan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka pada apa yang sering rentan terjadi dalam kehidupan mereka. Pekerja sosial memiliki keahlian dan pelatihan untuk membantu para lansia karena ketidakmampuan, penyakit akibat proses penuaan sehingga para lansia membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengakses pelayanan yang tepat.

(<http://www.tcsw.org.uk/standard-2col-lhm.aspx?id=6442451167> diunduh pada tanggal 17 April 2014 pukul 16:54)

Peran profesi Pekerjaan Sosial menurut Budhi Wibhawa, Santoso T.R, dan Meilanny B.S (2010:33) secara garis besar berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pekerjaan sosial, yaitu meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien, meningkatkan jaringan pelayanan sosial, mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial.

Pada saat bekerja dengan individual, kelompok, keluarga, organisasi, dan juga komunitas, peran pekerja sosial bermacam-macam berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya menurut Zastrow (2010: 70-72) antara lain sebagai *enabler, broker, advocate, activist, mediator, negosiator, educator, initiator, empower, coordinator, researcher, group facilitator, dan public speaker*. Tetapi ketika seorang pekerja sosial berhadapan dengan klien yang sudah berusia lanjut maka pekerja sosial berperan sebagai *broker*. Pekerja sosial berperan untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan oleh klien dalam rangka meningkatkan keberfungsian klien.

Pelayanan yang diberikan pekerja sosial berdasarkan kepada Undang-Undang yang mengatur Kesejahteraan Lansia yaitu UU No. 13 tahun 1998. Sistem pelayanan yang diberikan salah satunya adalah pelayanan yang dilakukan di dalam panti. Pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan dasar lansia yang merupakan hal penting yang harus terpenuhi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia, sehingga semakin lama perawatan lansia di dalam panti merupakan hal yang sering dijumpai di zaman yang sudah berkembang seperti saat ini karena tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar dapat terpenuhi tetapi kebutuhan lain yang tidak di dapatkan oleh lansia selama berada di dalam keluarga di dapatkan di dalam panti. Oleh karena itu, peran panti werdha yang dikenal dengan panti sosial tresna werdha memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia.

Panti Werdha atau yang dikenal dengan Panti Sosial Tresna Werdha merupakan tempat pelayanan sosial bagi orang lansia dan termasuk kedalam *foster care*. Menurut Armando Morales di dalam Budhi Wibhawa dkk, 2010: 81 *foster care* merupakan pelayanan yang bersifat tidak permanen, sehingga masih dimungkinkan untuk berhubungan dengan keluarga aslinya. Dilihat dari strategi pelayanan sosial, maka panti werdha termasuk ke dalam *institutional based services*, yaitu dalam pelayanan ini individu yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial. (Budhi Wibhawa dkk, 2010: 83)

Sebagai tempat dimana berkumpulnya orang-orang lansia yang baik secara sukarela ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya, maka panti werdha yang ada dilihat dari sistem pengelolaannya ada yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini merupakan kewajiban Negara untuk menjaga dan memelihara setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam UU No.12 Tahun 1996 (Direktorat Jenderal, Departemen Hukum dan HAM). Sedangkan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti werdha adalah suatu tempat untuk menampung lansia dan jompo terlantar dengan memberikan pelayanan sehingga mereka merasa aman, tentram dengan tiada perasaan gelisah

maupun khawatir dalam menghadapi usia tua. (<http://e-journal.uajy.ac.id/1070/3/2TA12520.pdf> diunduh pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 13.47)

Berdasarkan Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial Lansia di Indonesia (2003:2) penanganan permasalahan lansia yang berkembang selama ini dikenal dengan melalui dua cara, yaitu pelayanan dalam panti dan luar panti. Pelayanan dalam Panti Sosial Tresna Werdha meliputi pemberian pangan, sandang, papan, pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan bimbingan mental keagamaan, serta pengisian waktu luang termasuk didalamnya rekreasi, olahraga dan keterampilan. Sedangkan pada pelayanan di luar panti para lansia tetap berada di lingkungan keluarganya dengan diberikan bantuan makanan dan pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomis Produktif (UEP) melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial dan merupakan bantuan yang diberikan kepada lansia potensial yang kurang mampu.

Sebagai tempat pelayanan sosial bagi lansia, yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta maka panti werdha memiliki berbagai sumber daya yang berfungsi untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan lansia yang terus meningkat. Berbagai program yang diberikan oleh panti kepada para lansia seperti pelayanan subsidi silang, pelayanan harian lansia (*day-care service*), pelayanan perawatan rumah (*home care service*) yang dilakukan tanpa meninggalkan pelayanan utamanya kepada lansia yang terlantar.

(<http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html> di dalam skripsi Dyah Priyantini Najjah, *Konsep Home Pada Panti Sosial Tresna Werdha*, 2009: 34)

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia yang tercantum di dalam BAB II pasal 9, terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan dalam panti seperti pemberian tempat tinggal yang layak; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

Pendirian panti werdha sebagai suatu sarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia yang terlantar. Kehadiran panti werdha membantu para lansia untuk mempertahankan kepribadiannya, memberikan jaminan kehidupan secara wajar baik secara fisik maupun psikologis. Sesuai dengan permasalahan lansia, pada umumnya penyelenggaraan panti werdha mempunyai tujuan antara lain agar terpenuhi kebutuhan hidup lansia, agar dihari tuanya dalam keadaan tentram lahir dan batin, dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. (Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Panti Sosial Tresna Wredha Percontohan*, Jakarta, 1997)

Secara umum, panti werdha mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan lansia (dalam memenuhi kebutuhan pokok lansia), menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-aktivitas sosial rekreasi, bertujuan membuat lansia dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri. Sedangkan tugas panti

werdha adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Skripsi Syahriani Tri Putri *Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Mappakasunggu Kota Pare-Pare Dalam Menangani Lansia Terlantar*, 2012: 29-30)

Pelayanan yang diberikan oleh panti werdha kepada lansia dengan berbagai program yang ada mempunyai tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia itu sendiri dan terwujudnya kesejahteraan lansia yang berpengaruh terhadap kemampuan lansia untuk melewati masa tuanya dengan berbagai penurunan yang terjadi, sehingga lansia dapat berperan aktif di berbagai kegiatan tanpa adanya rasa beban maupun rasa bersalah karena kurangnya pendampingan dari pihak keluarga.

Keberadaan panti werdha sebagai bentuk dari pelayanan sosial yang diberikan kepada lansia. Walaupun sistem pelayanan yang diberikan berbeda-beda, tetapi baik pelayanan di dalam maupun di luar panti mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan keberfungsian lansia dan mencapai tingkat kesejahteraan lansia di masa tuanya, sehingga dengan proses penuaan dan keterbatasan yang dialami oleh lansia maka lansia dapat berfungsi secara sosial seperti dahulu sebelum memasuki tahap perkembangan akhir di dalam kehidupan.

PENUTUP

Melalui perkembangan zaman yang terjadi saat ini, maka keberadaan panti werdha sebagai solusi alternatif yang dimanfaatkan oleh pihak keluarga untuk menempatkan lansia di dalamnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, keberadaan panti werdha memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup lansia terutama lansia yang tidak tinggal bersama anggota keluarga di rumah akibat kesibukan dan perubahan nilai serta struktur yang ada di dalam keluarga. Melalui kehadiran panti werdha maka pemenuhan kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh lansia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup dapat terpenuhi dengan baik, dan lansia dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Calhoun dan Acocella. 1995. *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Skidmore, Rex et al. 1974. *Introduction to Social Work*. United States of America: Prentice-Hall International, Inc.
- Wibhawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare, 10th Edition Empowering People*. Brooks/Cole, Cengage Learning: USA.

Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel

- Afrida, Wahyuningsih & Sukamto. 2000. *Dalam jurnal Liza Marini dan Sari Hayati "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kesenangan Pada Lansia di Perkumpulan Lansia Habibi dan Habibah"* diakses pada tanggal 17 Maret 2014 pukul 11.40
- Departemen Sosial RI. 2003. *Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial Lansia di Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Sosial RI. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Panti Sosial Tresna Wredha Percontohan*. Jakarta.
- Najjah, Dyah Priyantini. *Konsep Home Pada Panti Sosial Tresna Werdha*, 2009. <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html>
- Putri, Syahrani Tri. *Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Mappakasunggu Kota Pare-Pare Dalam Menangani Lansia Terlantar*, 2012 diunduh melalui unhas.ac.id pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 15.34
- Sutikno, Ekawati. 2011. *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia* diunduh melalui perpustakaan.uns.ac.id pada tanggal 9 Juni 2014 pukul 19.05
- The Collage of Social Work. *Social work and social care for older people* melalui <http://www.tcs.w.org.uk/standard-2col-lhm.aspx?id=6442451167> diakses pada tanggal 17 April 2014 pukul 16:54

Sumber Elektronik

- <http://e-journal.uajy.ac.id/1070/3/2TA12520.pdf> diunduh pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 13.47
- www.eprints.undip.ac.id diunduh pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 11:28

Sumber Lain

- UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia

DESA DAN KOTA DALAM POTRET PENDIDIKAN

Oleh:

Azwar Yusran Anas, Agus Wahyudi Riana, & Nurliana Cipta Apsari

Email:

azr29@icloud.com; wahyudiriana@yahoo.com; nurliana.apsari@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan seharusnya sudah menjadi prioritas seluruh masyarakat di Indonesia. Tetapi pendidikan bagi masyarakat miskin bagaikan barang mewah yang tidak bisa mereka beli dan miliki. Salah satu alasan mengapa pendidikan tidak dapat tersentuh oleh masyarakat miskin adalah karena mahal biaya pendidikan. Kondisi masyarakat seperti ini ada di desa dan juga di kota. Kondisi pendidikan di kota besar yang memang biaya pendidikannya sudah gratis pun masih memiliki masalah yaitu masalah sulitnya biaya untuk membeli seragam dan juga buku buku sekolah karena pihak sekolah tidak memberikan secara gratis sehingga akhirnya banyak anak anak dikota yang putus sekolah dan akhirnya memilih untuk hidup di jalanan. Sedangkan kondisi pendidikan di desa tidak jauh berbeda dengan di kota persamaan masalahnya yaitu biaya dan juga masalah infrastruktur. Masyarakat desa yang miskin tidak akan bersekolah, kondisi ini diperparah dengan infrastruktur yang tidak lengkap di desa seperti tidak ada SMA di suatu desa sehingga bila masyarakat desa ingin bersekolah ke jenjang SMA maka mereka harus pergi sampai ke kota dan ini membuat masyarakat miskin di desa makin sulit untuk mengakses pendidikan. Sebenarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadakan pendidikan yang memadai secara gratis yang di atur dalam *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* mengatakan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu dan juga semua warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Maka dengan adanya undang undang yang mengatur hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan sudah seharusnya seluruh warga negara Indonesia medapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi tanpa harus bergelut dengan permasalahan kemiskinan.

Kata Kunci : Pendidikan, kemiskinan di desa dan kota

Pendahuluan

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes). Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, fungsi laten lembaga sebagai wadah pendidikan, melalui pendidikan di sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.

Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Katanya pendidikan itu mencerdaskan, tapi kenyataannya pendidikan itu menyesatkan. Lihat saja kualitas pendidikan kita hanya diukur dari ijazah yang kita dapat. Padahal sekarang ini banyak ijazah yang dijual dengan mudahnya dan banyak pula yang membelinya. Hasbullah (2005:1) menyatakan bahwa secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradapan manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupannya.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia.

Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1993:159) merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Di dalam konteks pendidikan menurut Umaedi (1999:4), pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Kita ketahui dan rasakan bersama bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sampaisaat ini masih belum memberikan hasil yang memuaskan, terlebih jika dihubungkan dengantujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 yangmenyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watakserta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Pasaltersebut mengisyaratkan bahwa, praktek pendidikan di Indonesia diarahkan kepada upayamengembangkan manusia utuh, manusia yang bukan hanya cerdas dari aspek kecakapanintelektual saja, melainkan juga kepribadian dan keterampilannya, atau dalam istilah penulisinsan yang cerdas otaknya, lembut hatinya dan terampil tangannya.

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnyapembangunan pada lingkup kabupaten/kota) adalah suatu keniscayaan,

melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu row input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa "...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Merujuk kepada petikan pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak Negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan. Barizi (2009:129) mengungkapkan bahwa di era globalisasi ini, pendidikan masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana bagi para peserta didik untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dipergunakan untuk dirinya maupun masyarakat disekelilingnya.

pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan di desa, dimana kota adalah banyaknya informasi yang ada, dan juga adanya internet yang mendunia saat ini. sedangkan di desa tidak seperti itu bahkan mungkin sebaliknya. Di desa mempunyai komitmen untuk memperoleh pendidikan, meskipun mereka jarang memperoleh informasi tentang kejadian yang ada di dunia ini, dan juga mereka berlomba-lomba untuk memperoleh pendidikan yang lebih dari pada yang ada di kota. Banyak orang desa yang pergi merantau ke kota untuk melanjutkan studinya dengan tujuan memperoleh pendidikan yang tinggi. yang pasti mereka akan senang dengan sekolah dikota, karena adanya informasi yang di dapat di dalamnya.

Sangat kontras apabila dicermati dengan kondisi guru di kota yang dipenuhi fasilitas dan kemudahan. Kembali terlintas bagaimana guru di kota mengajar berdasarkan jadwal, dan minus dedikasi serta pengorbanan untuk siswanya, guru kota lebih condong materialistis dan structural. Guru di kota cenderung terikat dengan waktu dan pelit terhadap waktu luang untuk melakukan aktivitas pengembangan siswa. Walaupun tidak keseluruhan berkarakter seperti itu semua,

namun umumnya guru di kota cenderung minim rasa pengorban yang benar-benar ikhlas.

1. Pendidikan Di Kota

Dalam pengertian geografis, kota itu adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kelompok, dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. Sementara kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya.

Fenomena pendidikan masyarakat perkotaan salah satunya yaitu, masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Maka, ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam (Hanakristina,2010). Sekolah yang kualitasnya bagus karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya cerdas akan semakin bagus. Sedangkan sekolah yang kualitasnya sedang justru sebaliknya. Sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang bagus akan menjadi bertambah buruk. Sudah tenaga pengajarnya kurang kompeten, fasilitasnya kurang, siswa-siswanya juga kurang secara akademis.

2. Pendidikan Di Desa

Ketidakmampuan desa untuk berhadapan dengan pesatnya kemajuan kota salah satunya diakibatkan oleh kelemahan sistem pendidikan yang ada di desa itu sendiri. Seringkali pengembangan pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah desa banyak yang tidak disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Bahkan yang lebih memprihatinkan dalam penyusunan kurikulum terkadang disamakan dengan pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah kota. Hal ini kemudian menyebabkan sekolah-sekolah di pedesaan menjadi tidak mungkin mampu dalam menjawab tantangan serta peluang kerja yang ada di daerahnya sendiri. Akhirnya muncul kecenderungan bila ada seorang anak desa yang terdidik, maka ia akan enggan untuk bekerja di desanya dan selanjutnya lebih memilih pergi untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan ke kota.

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia saat ini sudah bukan menjadi masalah baru. Meskipun pemerintah sudah memberikan keringanan melalui beberapa beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan berprestasi tetap saja tidak sesuai dengan standar hidup masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa fenomena yang saat ini terjadi diantaranya tidak meratanya penyebaran beasiswa yang di berikan pemerintah. Contohnya saja beasiswa tidak mampu

tidak tersalurkan seutuhnya pada masyarakat yang memang membutuhkan. Dengan persyaratan yang boleh di bilang tidak terlalu rumit salah satunya adalah melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari pemerintah daerah setempat maka calon mahasiswa yang mendaftar bisa dengan mudah mendapatkan beasiswa. Sayangnya saat ini banyak fenomena pemalsuan identitas yang seharusnya calon mahasiswa itu di golongkan pada tingkat mampu menjadi tidak mampu karena sebagian dari mereka berfikir dan enggan mengeluarkan uang yang besar untuk biaya kuliah. Akibat oknum-oknum seperti itulah, masyarakat yang tidak mampu kehilangan kesempatan. Selain itu sebagian mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung juga mengeluhkan tidak mendapatkan fasilitas yang selayaknya. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia kini dirasakan hampir oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lalu masalah infrastruktur pendidikan dimana banyak sekali fasilitas-fasilitas sekolah yang sangat buruk dan tidak layak untuk dijadikan sarana penunjang pendidikan. Ribuan gedung sekolah banyak sekali yang ambruk, rusak, dan sudah tidak layak pakai, terutama di daerah-daerah pedesaan. Seharusnya, sebagai sarana pembelajaran, sebuah sekolah harus memiliki gedung dan fasilitas yang baik, agar para siswa nyaman dalam proses pembelajaran. Tidak hanya infrastruktur sekolah yang buruk melainkan juga hinggal ke buku-buku pelajaran siswa yang sudah rusak. Konten dalam sebuah buku pelajaran banyak ditemukan terdapat pornografi didalamnya. Hal ini sangat merusak moral dan etika para siswa yang merupakan tunas bangsa. Seharusnya penerbit buku-buku sekolah menjunjung tinggi etika dalam buku-buku pelajaran yang diterbitkannya. Satu lagi masalah pendidikan yang masih terus diperbincangkan adalah mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana ini seakan belum efektif bagi semua kalangan, terutama kalangan siswa yang tidak mampu. BOS memang diperuntukkan untuk siswa-siswa tidak mampu namun dana BOS yang cair belum semuanya sampai ke tangan yang berhak. Banyak sekali kasus dana BOS yang disalahgunakan, seperti diambil pihak sekolah dan tidak diberikan kepada siswanya, diambil oleh siswa kalangan mampu, dan yang tidak dipergunakan untuk keperluan bantuan sekolah.

KESIMPULAN

Dari semua masalah pendidikan di atas, sudah saatnya Indonesia bangkit untuk memperbaiki diri membenahi masalah pendidikan yang ada. Diperlukan peran serta dan pengawasan bersama mulai dari siswa, masyarakat, sampai ke pemerintah. Bagaimanapun juga, pendidikan adalah salah satu aset penting perkembangan dan kemajuan bangsa. Jika para tunas muda bisa sampai kehilangan dan tidak merasakan pendidikan yang baik, Indonesia ke depan juga tidak dapat diharapkan masa depannya karena tidak ada generasi penerus yang dapat membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Oleh karena itu, berkaca dari masalah-masalah di atas, harapannya agar segera dapat diatasi setidaknya mulai dari hal kecil dulu, seperti menanamkan pentingnya pendidikan pada semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali.. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru, 1984
- Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat. Bandung , 2002
- Depdikbud.. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- Fungsi dan Prinsip Model Make-A Match* (Online)
(<http://Tarmizi.Wordpress.com/2008/12/03/pembelajaran-kooperatif->
(<http://herdy07.wordpress.com/2009/04/29/>) (diakses 05 Mei 2014)Dimyati, dkk, 2006, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta. Gagne. (*The Conditions of Learning*, 1977). *Pengertian Belajar* (<http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/>) (diakses di akses 05 Mei 2014) Hamalik. (1994:116).
- Peran Guru dan Siswa dalam Model Make-A Match, Ali Imran, Pembinaan Guru di Indonesia. Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGUATAN KELOMPOK TANI

Oleh:

Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, & Muhammad Fedryansah

ABSTRAK

Masyarakat miskin di pedesaan sebagian besar sebagai petani. Data BPS menunjukkan masyarakat miskin pedesaan sebesar 18,48 juta orang pada tahun 2012. secara khusus perhatian terhadap petani perlu menjadi perhatian, karena berhubungan dengan masa depan usahatani padi dalam kesinambungan produksi petani sebagai makanan pokok Indonesia. program peningkatan produksi usaha tani selalu menjadi prioritas pembangunan pertanian dalam mensejahterakan petani. Dalam penguatan kelompok tani diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun lembaga kelompok tani telah banyak dibentuk, namun cukup sulit untuk saat ini menemukan kelompok tani yang aktif, dimana setiap anggota kelompok tani memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menggerakkan upaya pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan sangat perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan, dan pelatihan untuk pengurus dan anggota. Secara teknis upaya peningkatan kelompok tani dalam pemberdayaan dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga bisa dilakukan oleh LSM dan organisasi lainnya yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam usaha penguatan kelompok tani dalam pemberdayaan.

Key word : peran, fungsi, kelompok tani, penguatan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Untuk itu dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan pertanian kesejahteraan petani selalu menjadi tujuan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat target utama pembangunan pertanian (Kementan, 2010).

Masyarakat miskin di pedesaan yang sebagian besar sebagai petani masih besar. Data BPS (2012) menunjukkan jumlah penduduk miskin di pedesaan yaitu berjumlah 18,48 juta jiwa atau 15,12 persen terhadap total penduduk pedesaan. Secara khusus perhatian terhadap kesejahteraan petani padi perlu menjadi

perhatian, karena berkaitan dengan masa depan usahatani padi dalam kesinambungan produksi padi/beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. masalah-masalah yang dihadapi petani adalah dalam bidang pemasaran, keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan motivasi. Dalam hal masalah penyelesaian masalah tersebut diperlukan suatu kelompok tani.

Kelompok tani adalah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk secara langsung oleh para petani secara terorganisir dalam usaha bertani. Kementerian pertanian disini mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para anggotanya. Kelompok tani yang dibentuk oleh petani dan untuk petani, disini guna mengatasi masalah yang dialami oleh para petani serta menguatkan posisi petani, dalam memasarkan suatu produk pertanian.

Pada tahun 1968 dan tahun 1979 dibentuklah BIMAS program bimbingan masal yang dimana peran petani menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Bahkan didalam pembentukannya pun menjadi suatu kewajiban bagi para petani untuk membentuk suatu kelompok tani yang pada saat itu bukan kebutuhan para petani. Penyaluran usaha kredit petani program-program pemerintah untuk pertanian yang dimana disalurkan kepada para kelompok tani, karena dinilai ampuh dalam penyaluran dana. Konsekuensinya, semua desa harus membentuk kelompok tani agar mendapatkan fasilitas layanan pemerintah. semua petani secara tidak langsung menjadi sebagai anggota kelompok tani. Tidak mengherankan banyak dari petani yang tidak mengetahui bahwa mereka termasuk kedalam anggota kelompok apa dan ketua kelompok didalam kelompok tersebut.

Belakangan ini kelompok tani diperbesar menjadi suatu gabungan kelompok tani yang menjadi satu kawasan administratif (desa) atau yang dikenal dengan sebutan GAPOKTAN (gabungan kelompok tani). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 93/ Kpts/OT.2103/3/1997 tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan “gabungan kelompok tani” adalah merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan agribisnis diatas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya (Syahyuti,2007). Oleh karena itu GAPOKTAN adalah sebuah wadah untuk kerjasama antar kelompok tani.

Alasan dibentuknya GAPOKTAN secara sudut pandang ekonomi adalah sebagai upaya dalam menghindari suatu biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggotanya karena adanya masalah penumpang kepentingan komitmen dan loyalitas yang berbeda, serta faktor eksternal. Meskipun demikian paradigma suatu pembentukan gabungan kelompok tani ini belum tepat dikarenakan pembentukan kelompok tani ini hanya sebatas kelompok formal. Pada tahun 2006 jumlah kelompok tani tercatat 293.568 kelompok dan Gapoktan sebanyak 3000 (Budi dan Aminah,2009)

Peningkatan kelompok tani dalam pemberdayaan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga maasih banyak kelompok tani yang belum

mampu mandiri atau masih tetap ditentukan dari atas dalam berbagai hal seperti menentukan jenis suatu komoditas yang diusahakan, penentuan pasar, penentuan suatu mitra usaha, dan menentukan suatu harga komoditas dan sebagainya. Akibatnya, kualitas kelompok tani yang terbentuk tidak sesuai dengan peran aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, sehingga pengembangannya belum signifikan meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk menjadi mandiri di dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani sebagai bagian dari peran dan fungsi dalam suatu pergerakan pembangunan pertanian di dalam suatu desa tersebut. kelompok tani inilah yang menjadi pelaku utama didalam suatu pembangunan pertanian di suatu pedesaan. Dalam hal ini kelompok tani adalah sebagai wadah untuk membangun suatu pembangunan pertanian seperti peran penyediaan suatu modal, penyediaan informasi, serta pemasaran produk-produk petani ke pasaran.

Peran kelompok tani lebih kepada suatu gambaran mengenai kegiatan-kegiatan didalam kelompok tani yang dikelola oleh kesepakatan dari setiap anggota kelompok tani. Kegiatan yang berada didalam kelompok tani berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti didalam suatu pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya. Pemilihan didalam suatu kelompok tani ini tergantung kepada suatu kesamaan kepentingan, saling percaya, dan keserasian didalam hubungan antar petani, sehingga bisa menjadi pengikat untuk lebih kuat dalam kelestarian kehidupan berkelompok, dimana tiap anggotanya menjadi lebih merasa memiliki kelompok dan menikmati suatu manfaat didalam kelompok petani.

Peranan didalam suatu kelompok bisa dimainkan setiap waktu oleh pemimpin anggota maupun anggota didalam kelompok. pemimpin kelompok tani disini memiliki peran yang sangat penting didalam kelompok yaitu sebagai coordinator kelompok, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat serta saran ,sementara disisi lain setiap anggota berhak memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. dilain hal pemimpin kelompok bisa menjadi suatu penggerak didalam bertindak atau mengambil keputusan dan berusaha untuk merangsang suatu kelompok agar tetap melakukan suatu kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Meningkatnya suatu partisipasi kelompok akan memunculkan peningkatan kedinamisan kelompok. kedinamisan kelompok inilah yang akan membuat peluang sebesar-besarnya kepada anggota kelompok untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam memajukan suatu kelompok yang membuat tujuan yang dibuat tercapai. Kelompok tani yang dinamis ditandai dengan adanya interaksi didalam kelompok baik itu keluar maupun kedalam guna mencapai tujuan kelompok.

Sebagai suatu organisasi sosial kelompok tani adalah suatu wadah untuk belajar maupun mengajar bagi setiap anggotanya guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta bertumbuh dan berkembangnya suatu kemandirian

didalam berusaha dengan suatu produktivitas yang meningkat, pendapatan yang bertambah dan kehidupan yang sejahtera. selain itu kelompok tani ini berfungsi sebagai suatu wahana kerjasama diantara petani dengan kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui suatu kerjasama ini diharapkan dapat membuat usaha taninya lebih efisien dan lebih mampu dalam menjawab suatu ancaman, tantang dan hambatan. Kelompok tani ini juga bisa berfungsi sebagai suatu unit produksi, yang dilaksanakan oleh setiap masing-masing anggota kelompok guna mencapai skala ekonomi yang lebih baik.

Pada saat ini kondisi sebagian besar kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami suatu perkembangan seperti sesuatu yang diharapkan atau hanya berjalan di tempat bahkan sampai menurun. Gambaran dari kelompok tani tersebut seperti status didalam suatu keleasnya tingggi tetapi didalam kegiatannya rendah dan sebagian kelompok tani disini sudah bubar tetapi masih terdaftar.

Rendahnya suatu kinerja didalam kelompok tani antara lain disebabkan oleh kurangnya peran pengurus, anggota kelompok yang kurang jelas, struktur organisasi yang kurang lengkap dan tidak berfungsi, produktivitas usaha tani yang rendah, dan kurangnya pembinaan dari para penyuluh. Selain itu didalam pembentukan kelompok yang tidak secara partisipatif sehingga membuat tidak memuat potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk aksi kebersamaan. Bahkan kelompok tani sering dibentuk ketika ada pemberian modal usaha, pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan lainnya.

Umumnya kelompok tani yang sekarang ini dibentuk dari hasil proyek-proyek sehingga ketika proyek sudah selesai maka kelompok tani ini pun bubar dan tidak berjalan. Namun adapaun kelompok tani yang maju walaupun sudah ditinggalkan oleh proyek maupun bantuan dari pemerintah. oleh sebab itu, upaya didalam peningkatan suatu kapasitas kelompok tani melalui berbagi pembinaan yang sangat penting untuk menjadi kelompok petani yang mandiri dan sejahtera.

Pembentukan dan penumbuhan suatu kelompok tani mestilah ditempatkan kedalam konteks yang lebih luas, yaitu kedalam konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat yang menuju pembangunan yang berkelanjutan. kelompok tani hanyalah suatu alat, dan merupakan salah satu opsi kelembagaan yang dipilih, bukan tujuan dan juga bukan keharusan. Oleh karena, penggunaan suatu kelompok tani yang semata-mata hanya untuk mendapatkan bantuan ataupun modal dan bukan untuk pengembangan kelompok tani itu sendiri, maka yang terjadi adalah suatu kelompok tani yang hanya nama semata dan tidak ada eksistensi kelompok tani tersebut.

Penguatan kelompok tani

Semakin besarnya suatu pembangunan pertanian di masa yang akan datang, terutama didalam mencapai yang namanya kesejahteraan petani, maka didalam kelembagaan kelompok tani yang diseluruh pedesaan Indonesia ini harus dibenahi dan diberdayakan, sehingga menjadi berdaya dalam kehidupan usaha taninya. Untuk mencapai hal keberdayaan tersebut, maka program pemberdayaan yang

dilakukan harus bisa meningkatkan suatu kemampuan kelompok tani dalam hal memahami kekuatan dan potensi dan kelemahan kelompok, memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, memilih alternatif yang ada dalam menyelesaikan masalah, dan menyelenggarakan suatu kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang serasi dengan lingkungannya.

Pada umumnya potensi suatu kelembagaan kelompok tani di dalam pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melasaknakan berbagai program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan karena itulah kelompok tani adalah dasar utama didalam pembangunan pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2006 akhir, jumlah kelompok tani mencapai sebesar 293.568 kelompok tani (syahyutti, 2007). kelembagaan kelompok tani ini sangat penting untuk sarana kegiatan belajar,bekerja sama, dan pengumpulan modal didalam mengembangkan usahatani, jika pemberdayaan kelompok tani ini dilakukan dengan baik.

Pentingnya suatu pemberdayaan kelompok tani ini sangat beralasaan dikarenakan perhatian pemerintah saat ini sudah kurang semenjak otonomi daerah, dimana ada suatu kecenderungan perhatian pemerintah daerah yang sangat kurang terhadap kelembagaan kelompok tani, bahkan terkesan terabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani ini yang sebenarnya adalah aset yang sangat berharga dalam suatu pembangunan pertanian menjadi tidak berfungsi secara optimal.

Apalagi saat ini masih banyak kelompok petani yang lupa modal dasar dalam suatu kelompok tani yaitu kekompakan dan tekad untuk mencapai suatu tujuan. Hal inilah yang membuat suatu kelompok pertanian berjalan. Jika tanpa tekad dan kekompakan maka yang terjadi adalah suatu kelompok yang berjalan tidak tahu arah dan tujuan. Saat ini kebanyakan kelompok tani lebih mementingkan mencari modal yang banyak, baik dengan iuran mupun dari dana pemerintah. Namun jika tanpa tekad dan kekompakan yang terjadi adalah kelompok tersebut hanyalah sebuah nama tanpa ada arti didalam kelompok tersebut yang membuat kelompok tersebut tidak akan aktif lagi. Oleh sebab itu, kekuatan utama didalam suatu kelompok bukan suatu modal tetapi suatu tekad dan kekompakan agar kelompok tersebut bisa menjadi lebih maju.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tekad adalah kemauan (kehendak) yang pasti, kebulatan hati, iktikad. Dalam mencapai tujuan kelompok, kemauan yang kuat diantara setiap petani untuk berkembang perlu dimunculkan sebagai dasar dalam membangun sebuah kelembagaan petani yang efektif.

Selain tekad yang kuat, dibutuhkan pula suatu kekompakan. Kekompakan membutuhkan suatu syarat yang sangat tidak mudah. Salah satu persyaratannya adalah rasa percaya diatara setiap anggota dan kepercayaan anggota kepada pengurus kelompok tani. Untuk mewujudkan suatu kepercayaan diantara anggota dan pengurus diperlukan suatu tanggung jawab dan wibawa yaitu berupa laporan tiap bulan dari pengurus kepada kelompok agar mengikis yang namanya rasa curiga kepada pengurus kelompok tani.

Upaya dalam menumbuh kembangkan kelompok tani di Indonesia ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala yaitu pada zaman Belanda. Dimana

pada zaman orde baru, pengembangan kelompok tani ini telah dilakukan dengan intensif yang membuat jumlah dari tahun ke tahun terus meningkat (Unang, 2009). Meskipun kelompok tani ini sudah banyak jumlahnya tetapi masih belum efektif untuk kepentingan para anggotanya.

Selama ini efektivitas didalam kelompok masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya peran kelompok tani, anggota yang tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap, produktivitas rendah dan pembentukan suatu kelembagaan pertanian yang tidak dilakukan dengan cara yang partisipatif sehingga tidak dapat mengumpulkan potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal utama dalam membangun kelembagaan petani dalam aksi kolektifnya. Bahkan di beberapa tempat yang terjadi adalah kelompok tani ini dibentuk saat-saat tertentu saja seperti dalam pemberian dana pemerintah, pemberian bantuan pupuk, dan bantuan-bantuan lainnya.

Walaupun keberadaan kelompok tani ini telah memberikan hasil yang sangat signifikan didalam membantu suatu pencapaian program pembangunan pertanian, namun paradigma didalam pembangunan kelompok tani ini masih belum tepat. Pembangunan kelompok tani yang dibuat oleh pemerintah cenderung membuat kelompok tani menjadi kelompok formal. Hal ini mengakibatkan kelompok tani yang semula bersifat kelompok sosial (social group) menjadi kelompok tugas tau yang sering disebut Task Group, disini terlalu banyaknya intervensi dari luar terhadap kelompok tersebut.

Keberadaan suatu kelompok tani ini sangat penting untuk diberdayakan karena potensinya yang besar. Tetapi jika hanya disini mengandalkan tenaga penyuluh yang hanya sekitar puluhan ribuan sedangkan petani yang puluhan jutaan yang membuat para tenaga penyuluh ini tidak menggapai para petani dan tidak efektif dalam penyuluhan. Selain penyuluh yang kurang banyak jumlahnya disini penyuluh sendiri terbentur dengan kurangnya alat transportasi, sehingga mengakibatkan mobilitas yang kurang. Melihat dari berbagai masalah Sulit untuk berharap terwujudnya suatu kelompok tani yang penuh keterbatasan tersebut.

Secara umum ada tiga hal dalam menunjukkan kekuatan suatu kelompok yaitu kemampuan kelompok tersebut dalam mencapai tujuan, kemampuan kelompok dalam mempertahankan kelompoknya agar tetap kompak, kemampuan kelompok untuk berkembang dan berubah sehingga dapat terus meningkatkan suatu kinerja kelompok. kelompok yang berhasil adalah mempunyai suatu kuliatas dan pola interkasi yang terintegrasi didalam kegiatan diatas ini (Hermanto,2010)

Upaya didalam suatu peningkatan penguatan kelompok tani merupakan suatu hal yang tidak mudah, bahkan disini ini perlu memerlukan waktu yang sangat lama dan harus mempunyai finansial yang cukup. Namun demikian didalam penguatan kelompok tani ini memerlukan suatu kebijakan strategis dalam penguatan pemberdayaan kelompok tani yaitu diantaranya adalah :

1. Menciptakan suatu iklim yang kondusif didalam lingkungan kelompok tani seperti menumbuhkan rasa kepercayaan kepada setiap kelompoknya.

2. Menumbuhkembangkan suatu kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani agar memanfaatkan peluang usaha, informasi dan akses suatu permodalan yang tersedia.
3. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi suatu masalah serta menyusun dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahatani.
4. Meningkatkan kemampuan dalam mengetahui potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi yang dimiliki agar bisa mengembangkan usahatani yang lebih besar.
5. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota agar menjadi satu unit usaha yang mampu menjamin permintaan pasar.
6. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam dalam memfasilitasi pengembangan modal usaha.

Dalam mengimplementasikan strategi tersebut perlu dilakukan upaya agar strategi tersebut bisa berjalan diantaranya adalah:

1. mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara kelompok.
2. menumbuhkembangkan Kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, peningkatan posisi tawar, pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani.
3. meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani.

Didalam upaya penguatan pemberdayaan kelompok tani ini, secara teknis dilakukan oleh penyuluh pertanian. Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani ini bisa dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dianggap mampu dan berpengalaman didalam suatu pengembangan pemberdayaan masyarakat. dalam hal ini adalah tugas pendamping adalah mengembankan suatu sikap partisipasi, sikap, pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dan anggotanya dalam mencapai suatu tujuan bersama.

KESIMPULAN

Demikian banyak kelompok tani yang dibentuk, namun sebagian besar kinerjanya masih belum bisa diharapkan. Keberadaan kelompok tani yang umumnya dicirikan antara lain: (1) kelompok yang tidak mandiri, (2) partisipasi anggota yang kurang, (3) sebagian kelompok tani yang belum kompak dan sebagian lagi sudah bubar namun masih terdaftar. Meskipun demikian peranan dan fungsi kelompok tani dapat ditingkatkan dengan menumbuhkembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam kelompok tani itu sendiri agar dapat menggerakkan dan mendorong perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan kelompok. oleh karena itu, upaya penguatan pemberdayaan kelompok tani merupakan langkah

strategis yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan kelompok tani, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara kelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, peningkatan posisi tawar, pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani.

Daftar Pustaka

- Budimanta, Arif. 2004. Corporate Sosial Responsibility. Jakarta : Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)
- Tanaya, Jimmy. 2004. Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Surakarta : BWI.
- Suharto, Edi. 1997. Pembangunan Kebijakan dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran Bandung : Sp-STKS
- Koentjaningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia
- Sekarningsih, Renny 1991. Pengantar Pekerjaan Sosial. Bandung: UNPAD
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi pemberdayaan masyarakat. Bandung : Humaira
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Mitra anda
- Saptana. 10 September 2011. Konsep efiseinesi usaha tani pangan dan Implikasinya bagi peningkatan produktivitas. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian. Forum Agro Ekonomi Vol. 30 No. 2 2012
- Rachmat Muchjidin dan Tjetjep Nurasa. 29 Agustus 2013. Nilai tukar petani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi Vol. 31 No. 02 2013
- Ariani Mewa ,Basuno Edi, Purwantini Bastuti Tri dan Yusdja Yusmichad. 1 Mei 2004. Analisis peluang peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan petani melalui pengelolaan usaha tani bersama. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian. Jurnal Agro Ekonomu Vol. 22 No. 1 2014.
- Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rudito, Bambang dkk. 2003. Akses Peran Masyarakat “Lebih Jauh Memahami Community Development”. Jakarta : ICSD
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama.
- Wahyudiyana, Singgih. 2001. Strategi pendampingan dalam pemberdayaan komunitas petani :Kajian terhadap pemberdayaan komunitas petani melalui kegiatan pendampingan sosial yang dilaksanakan sekretariat Bina Desa /INDHRRA Jakarta: Studi kasus pendampingan sosial komunitas petani di desa

PERAN PEKERJA SOSIAL DI PERINDUSTRIAN INDONESIA

Oleh :

Aries Y. Ahmadi, Hadiyanto A. Rachim, & Moch Zaenuddin

Email:

ariesyudieahmadi@gmail.com; hrachim@gmail.com; moch.zainuddin@yahoo.com

ABSTRAK

Pekerjaan sosial industri adalah lapangan praktik pekerja sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara individu dan lingkungan kerja dalam konteks ini. Konsep pekerjaan sosial industri bukan hanya berbicara tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) maupun masyarakat (*community development*) saja. Pekerjaan sosial industri mencakup pelayanan sosial yang bersifat internal dan eksternal, pekerjaan sosial industri melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, pekerjaan sosial industri, berwujud dalam berbagai bentuk program *CSR* termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat serta kebijakannya, dan advokasi sosial. Kehadiran pekerja sosial di perindustrian diharapkan akan memerikan berbagai manfaat terutama manfaat secara finansial maupun secara sosial. Di Indonesia, istilah pekerjaan sosial dalam perindustrian masih belum banyak dikenal , belum banyak perusahaan yang menggunakan jasa pekerja sosial di dalamnya. Sementara itu di era globalisasi ini, bayak perusahaan-perusahaan di beberapa negara maju yang sudah sejak lama menggunakan konsep pekerjaan sosial di dalam perusahaannya, sehingga bisa meningkatkan kualitas perusahaan tersebut dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pekerja Sosial Industri, Peran Pekerja Sosial internal dan eksternal, Industri di Indonesia

PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring dengan berjalannya waktu, globalisasi di bidang perindustrian semakin gencar saja. Banyak perusahaan-perusahaan berlomba-lomba mencari cara untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Berbagai konsep dalam perusahaan terus dicoba dan diterapkan agar mereka menjadi yang terbaik. Salah satu konsep yang dianggap bisa mendorong terjadinya perubahan dan suatu

kemajuan dalam keberlangsungan perusahaan adalah konsep pekerjaan sosial industri

Pekerjaan sosial industri adalah lapangan praktik pekerja sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara individu dan lingkungan kerja dalam konteks ini.

Konsep pekerjaan sosial industri lebih luas dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) maupun pengembangan masyarakat (*community development*). Pekerjaan sosial industri mencakup pelayanan sosial yang bersifat internal dan eksternal, pekerjaan sosial industri melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), perencanaan sebelum dan sesudah pensiun, pembelaan karyawan dan keluarga (afirmatif), terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal pekerjaan sosial industri berwujud dalam berbagai bentuk program *CSR* termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial, dan advokasi sosial.

Johnson (1984:261) mengklasifikasikan akibat-akibat industrialisasi yang bersifat negatif terhadap kesejahteraan manusia kedalam 5A, yaitu alienation, alcoholism, absenteeism, accidents, dan abuse. Beberapa permasalahan tersebut tentunya menjadi permasalahan sosial di lingkungan kerja, pekerja sosial sebagai agen perubahan dapat berperan aktif membantu perusahaan dan khususnya para pegawainya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Bidang bisnis dan berbagai perindustrian di Indonesia sebagai mana kita ketahui sampai saat ini belum banyak yang menggunakan jasa pekerja sosial dalam divisi yang terkait dengan kapasitas dan kompetensi pekerja sosial. Bahkan posisi atau divisi yang sudah seharusnya ditempati oleh para pekerja sosial di perusahaan-perusahaan dan berbagai industri, justru sudah banyak sesak diisi oleh *SDM*nya, tetapi mereka bukan dari pekerja sosial.

Di Indonesia, dunia bisnis dan industri merupakan sektor yang masih jarang melibatkan pekerjaan sosial. Namun demikian, di negara-negara maju seperti AS, Inggris, Australia dan New Zealand, pemberian pelayanan sosial dalam perusahaan telah meningkat secara dramatis selama tiga dekade belakangan ini. Pekerjaan sosial industri atau pekerjaan sosial di perusahaan (*occupational social work*) merupakan profesi yang sangat penting dalam pemberian pelayanan sosial, baik yang bersifat pencegahan, penyembuhan maupun pengembangan. Pekerjaan sosial industri muncul di Amerika Serikat satu abad lalu. Di Eropa, bidang ini muncul pada tahun 1920an. Pekerjaan sosial memang terlahir dalam konteks pertumbuhan masyarakat industri (Suharto,2006).

Berbanding lurus dengan minimnya pekerja sosial di dalam dunia bisnis dan industri di Indonesia, masih banyak sektor bisnis dan perindustrian yang fokus pada profit tanpa terlalu memperhatikan kesejahteraan pegawai serta lingkungan kerja dan sekitarnya. Seperti kita ketahui, tidak sedikit kasus-konflik yang melibatkan berbagai perusahaan atau perindustrian dengan pekerja ataupun dengan

masyarakat yang dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara perusahaan atau perindustrian dengan lingkungan kerja dan sekitarnya.

Adapun maksud dan tujuan penulis dari pengambilan judul tema Pekerja Sosial di Bidang Perindustrian Indonesia ini, adalah untuk lebih memeperkuat alasan tentang bagaimana pentingnya peran pekerja sosial dalam dunia bisnis dan industri di Indonesia. Dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial, pekerja sosial di bidang bisnis dan industri diharapkan bisa memberikan berbagai keuntungan baik dari profit maupun sosial, dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan.

PEMBAHASAN

Di Indonesia, istilah pekerjaan sosial dalam perindustrian masih belum banyak dikenal oleh banyak perusahaan-perusahaan, serta oleh masyarakat luas. Belum banyak perusahaan yang menggunakan jasa pekerja sosial di dalamnya. Sementara itu di era globalisasi ini, bayak perusahaan-perusahaan yang sudah sejak lama menggunakan konsep pekerjaan sosial di dalam perusahaannya. Sehingga bisa meningkatkan kualitas perusahaan tersebut.

Bidang garapan pekerjaan sosial industri meliputi sektor internal dan eksternal. Sektor internal meliputi pelayanan konseling, K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), manajemen sumber daya manusia, layanan pembelaan pegawai dan keluarganya, perencanaan sebelum dan sesudah pensiun dan lainnya. Sedangkan pada sektor eksternal ada yang dinamakan dengankonsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Cooperate Social Responsibility (CSR)*.

Berbagai pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial industri dalam lingkup internal yang ditujukan oleh para pegawai sudah seharusnya mulai diterapkan oleh berbagai perusahaan. Khususnya di Indonesia ini yang kebanyakan perusahaan dan berbagai sektor bisnis di bidang industrinya belum banyak mengenal konsep pekerjaan sosial industri. Memang pada faktanya di Indonesia penerapan pekerjaan sosial di lingkup eksternal lebih populer dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Cooperate Social Responsibility (CSR)* yang banyak dijalankan oleh banyak perusahaan. Tetapi perusahaan juga harus memperhatikan lingkup internal perusahaan dan harus memastikan kesejahteraan bagi pegawai.

Lingkungan dan juga suasana kerja yang kondusif, keadaan psikis pegawai yang terjamin dalam keadaan yang baik dan kesejahteraan pegawai merupakan hal-hal utama dalam kesuksesan dan untuk semakin berkembangnya suatu perusahaan. Tetapi tidak selamanya keadaan internal suatu perusahaan selalu terjamin dalam keadaan yang baik-baik saja, sewaktu-waktu pegawai bisa saja merasa jenuh, tertekan karena pekerjaan, berada dalam keadaan yang sulit karena permasalahan dalam keluarganya, timbal balik dari perusahaan tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan juga permasalahan lainnya yang dapat menyebabkan kondisi atau suasana kerja menjadi sangat tidak kondusif dan tidak menyenangkan sehingga menyebabkan kemunduran prestasi dan produktifitas kerja yang berdampak kepada menurunnya kualitas perusahaan.

Johnson (1984:261) mengklasifikasikan akibat-akibat industrialisasi yang bersifat kesejahteraan manusia kedalam 5A, yaitu:

1. *Alienation*: perasaan keterasingan dari diri, keluarga dan kelompok sosial yang dapat menimbulkan apatis, marah, dan kecemasan.
2. *Alcoholism* atau *Addiction*: ketergantungan terhadap alkohol, obat-obat terlarang atau rokok yang dapat menurunkan produktifitas, merusak kesehatan fisik dan psikis, dan kehidupan sosial seseorang.
3. *Absenteeism*: kemangkiran kerja atau perilaku membolos kerja dikarenakan rendahnya motivasi pekerja, perasaan-perasaan malas, tidak berguna, tidak merasa memiliki perusahaan, atau sakit fisik dan psikis lainnya.
4. *Accidents*: kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh menurunnya konsentrasi pekerja atau oleh lemahnya sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
5. *Abuse*: bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (istri/suami), seperti memukul dan menghardik secara berlebihan yang ditimbulkan oleh frustrasi, kebosanan dan kelelahan di tempat pekerjaannya.

Beberapa permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan industrialisasi adalah: diskriminasi di tempat kerja atau tindakan-tindakan tidak adil terhadap wanita, kaum minoritas, imigran, remaja, pensiunan, dan para penyandang cacat. Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi (udara, air, suara) dan kerusakan-keusakan fisik dan psikis bagi para pekerjanya.

Diterangkan Johnson dengan jelas dalam klasifikasi akibat-akibat industrialisasi, bahwa berbagai permasalahan mungkin akan terjadi kapan saja menimpa perusahaan. *Alienation* atau perasaan keterasingan, sangat mungkin terjadi pada kalangan pekerja yang bekerja di dalam perusahaan yang menerapkan sistem dengan jam kerja yang lama, bekerja dalam ruangan yang tertutup seluruhnya, berhadapan dengan mesin dan kurang berkomunikasi dengan sesama pekerja lainnya. Perasaan jenuh akan pekerjaannya sewaktu-waktu akan datang dengan kondisi seperti ini. Pekerja akan merasa terasing dari kehidupan keluarga, lingkungan rumah dan lingkungan sosial lainnya.

Dalam kasus ini, pekerja sosial dapat berperan sebagai pemberi pelayan konseling menangani pekerja dengan kasus perasaan keterasingan atau *Alienation* ini. Layanan konseling ini bertujuan membantu pekerja yang mempunyai masalah, dan membantu klien untuk dirinya menemukan kembali keberfungsian sosialnya karena waktu sehari-harinya hanya mengurus pekrejaannya.

Tekanan kerja yang tinggi juga bisa menimbulkan pekerja melakukan perlakuan yang menyimpang, seperti melampiaskannya dengan meminum minuman keras, ketergantungan kepada obat-obatan ataupun konsumsi rokok yang berlebih (*Alcoholism* atau *Addiction*). Dalam kasus ini, pekerja sosial dapat berperan dengan mengintervensi para pekrja dengan menggunakan terapi kelompok, untuk menagani permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan

diatas. Karena dalam lingkungan kerja, pekerja akan bekerja sama, berinteraksi dalam suatu kelompok dalam teman kerjanya. Maka dari itu peksos dapat mengumpulkan para pekerja dalam satu lingkungan kerja yan bermasalah dengan minuman keras, ketergantungan kepada obat-obatan ataupun konsumsi rokok yang berlebih (*Alcoholism* atau *Addiction*) untuk bersama mengembalikan keberfungsian sosialnya, untuk mencegah perbuatan ini (*Alcoholism* atau *Addiction*) terus terjadi dan mengarahkan pegawai agar bisa lebih mengintrospeski dirinya sendiri.

Perasaan jenuh pada saat bekerja pastinya akan atau pernah dialami oleh para pekerja di suatu perusahaan. Perasaan jenuh itu dapat diekspresikan dengan bekerja dengan malas, frustasi akan pekerjaan yang begitu banyak, hingga menderita sakit karena pekerjaan dan bahkan sampai membolos kerja (*Absenteeism*). Dampak dari itu, akhirnya akan merugikan perusahaan dan juga tentunya akan merugikan diri sendiri yang mungkin akan mendapatkan sanksi dari perusahaan apabila absen karena alasan yang tidak jelas dan kuat. Pekerja sosial dalam konteks masalah ini, dapat mengintervensi pekerja yang mengalami masalah dengan cara melakukan strategi penanganan *Burnout* dan *Stress*. Strategi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai variasi program penanganannya, seperti mengagendakan kegiatan-kegiatan diluar pekerjaan kepada perusahaan, seperti menjadwalkan kegiatan relaksasi, olahraga, rekreasi, variasi kerja, dan kegiatan lainnya yang membuat suasanalingkungan kerja menjadi menyenangkan dan membuat pekerja lebih bersemangat.

Selain permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, salah satu permasalahan yang seringkali terjadi dalam dunia kerja adalah permasalahan kecelakaan kerja (*Accidents*). Isu tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi salah satu isu yang seringkali diperbincangkan dalam dunia perindustrian di Indonesia. Menurut data ILO (*International Labour Organization*) pada tahun 2013 saja tercatat setidaknya 9 orang meninggal dalam kecelakaan kerja, dan di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu, sekitar 70 persen berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup.

Melihat angka tersebut memang sangat mencengangkan, tentunya banyak pertanyaan yang muncul. Apakah standar K3 yang diterapkan oleh berbagai perusahaan dan perindustrian di Indonesia sangatlah rendah ? Apakah kesadaran para pegawai tentang *savety work* dengan memakai perlengkapan keselamatan kerja begitu kurang pula ?.

Resiko kecelakaan kerja dan juga penyakit yang disebabkan oleh kelalaian kerja tidak hanya menimpa pekerja saja, tetapi bagi perusahaan atau industri yang dekat dengan lokasi pemukiman, bukan tidak mungkin resiko adanya korban dari pihak warga sekitar. Maka dari itu, menurut penulis perlu adanya profesi medis yang selalu siap kapan pun di lokasi perusahaan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Selain itu perusahaan melalui pelayanan pekerja sosialnya harus gencar melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun waraga di lingkugnan sekitar perusahaan akan K3 ini.

Pekerja sosial harus memahami apa saja dampak yang disebabkan oleh kecelakaan dan berbagai penyakit yang timbul dalam dunia kerja, serta membantu

pegawai beserta keluarganya agar bisa menerima dan mampu menghadapi akibat-akibat yang akan timbul. Misalnya pekerja sosial mencarikan jaminan sosial bagi pegawai yang tidak dapat meneruskan pekerjaannya, melakukan perubahan-perubahan di tempat kerja, atau memperluas akses terhadap pelayanan-pelayanan rehabilitasi dan pelatihan kejuruan terutama bagi pegawai yang ingin kembali ke tempat bekerjanya semula (Suharto, 2009 : 77).

Kasus terakir yang terkait permasalahan-permasalahan dalam industrialisasi yang bersifat kesejahteraan manusia adalah permasalahan pekerja dengan keluarganya. Seringkali pekerja yang bermasalah dengan keluarga menunjukkan prestasi yang kurang baik dan tidak maksimal dalam bekerja. Atau pun sebaliknya, pekerja yang mempunyai tekanan kerja yang tinggi sering kali melampiaskannya kepada orang-orang yang ada dirumahnya, yaitu keluarganya. Tindakan yang dilakukan dapat berupa perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (istri/suami), seperti memukul dan menghardik secara berlebihan (*Abuse*). Dalam hal ini pekerja sosial dapat melakukan intervensi dengan menggunakan terapi kelompok dan peksos sebagai fasilitator, untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tindakan *Abuse*. Dengan menggunakan terapi kelompok, para pekerja dikumpulkan dalam kelompok untuk menyampaikan keluh-kesahnya secara bergiliran, dan diharapkan dalam kelompok ini dapat berbagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat pekerjaannya.

CSR (*Coorporate Social Responsibility*)

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer di kalangan perusahaan. Oleh karena itu semakin banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tetapi dapat memahami dampak positif dan berbagai manfaatnya baik itu untuk perusahaan maupun manfaat bagi masyarakat. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Penerapan program *CSR* oleh suatu perusahaan atau perindustrian mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat didalam dan diluar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai contoh kegiatan program *CSR* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia seperti, program WASH (*Water Access, Sanitation, Hygiene Program*) tujuannya untuk memberikan solusi dalam penyediaan air bersih di Indonesia yang dilaksanakan di NTT, Pertamina Scholarship (*Basiswa*) Diberikan kepada 1.450 Siswa di Jabodetabek, 300 mahasiswa diploma di Padang, Palembang, dan Solo, *Basiswa S-2* untuk 25 PNS Non-Dosen, dan 25 pegawai DESDM, *Basiswa* 10 Siswa terbaik untuk menempuh pendidikan tinggi di ITB,

S2 Luar Negeri, dan Beasiswa untuk 100 Siswa Madrasah, dan masih banyak perusahaan lainnya yang telah sadar melakukan program *CSR*.

Pengertian *CSR* diadaptasi dari Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. (Widjaja dan Ardi Pratama, 2008: 7)

Perusahaan memberikan kontribusi sosial yang biasanya bersifat materil dan berbagai program-programnya, diharapkan mampu mengembangkan serta bisa membangun masyarakat dari berbagai bidang. Perusahaan pun tidak bisa memungkiri bahwa *CSR* ini merupakan salah satu strategi mereka untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

Konsep *CSR* begitu identik dengan metode Community Development atau pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Einsiedel (dikutip dalam Suharto, 1997: 98) mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu 'proses' dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Pekerja sosial dalam konteks *CSR*, melakukan community development dan segala bentuk yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat adalah untuk membantu masyarakat atau penerima bantuan memiliki kemampuan untuk menolong atau memberdayakan dirinya sendiri dan lingkungannya.

Manfaat Pekerja Sosial Industri Bagi Keberlangsungan Perusahaan Perindustrian di Indonesia

Dampak globalisasi begitu terasa pada kehidupan manusia, manusiapun semakin berkembang pesat dengan berbagai inovasinya di berbagai sektor kehidupan. Begitupun dengan profesi pekerjaan sosial, perkembangan bidang sasaran dan intervensi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya semakin hari semakin berkembang luas. Perkembangan di dunia industri pun menjadi sebuah peluang bagi pekerja sosial. Semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran pengusaha mengenai berbagai cara untuk memajukan perusahaannya. Di Indonesia pekerja sosial Industri memanglah masih relatif baru dan belum begitu populer.

Pada saat ini dunia industri sudah bisa merasakan manfaat dari adanya pekerja sosial industri. Manfaatnya berorientasi kepada keuntungan secara finansial maupun secara sosial. Keuntungan secara finansial karena pekerja sosial dapat menangani berbagai bidang garapan yang diantaranya bermanfaat kepada meningkatnya kinerja pegawai sehingga lebih produktif dan lebih menguntungkan secara finansial. Sedangkan keuntungan dari aspek sosialnya adalah pekerja sosial di industri bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan intervensi-

intervensi yang dilakukan kepada pegawai, dan selain itu dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui kontribusi pada program CSR.

PENUTUP

Kesimpulan

Pekerjaan sosial di seputar dunia kerja atau yang disebut pekerja sosial industri di Indonesia memanglah belum begitu populer, tetapi penerapan pekerjaan sosial industri di suatu perusahaan sangatlah akan mendatangkan keuntungan tersendiri, selain dari segi finansial, juga keuntungan dari segi sosial. Pekerjaan sosial industri mencakup pelayanan sosial yang bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh industrialisasi. Peran pekerja sosial di perusahaan adalah pada sektor internal dan eksternal, pekerjaan sosial industri melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, pekerjaan sosial industri, berwujud dalam berbagai bentuk program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang berbentuk berbagai bantuan program pengembangan masyarakat, dan berbagai bantuan lainnya yang bersifat *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi

Mengingat pentingnya peran pekerja sosial di dunia kerja atau dunia perindustrian, maka akan lebih baik jika berbagai perusahaan dan perindustrian di Indonesia menempatkan pekerja sosial dalam divisi yang terkait.

Peran pekerja sosial sesuai dengan 4 sistem dasar pekerjaan sosial (Wibhawa B., Raharjo S., Budiarti M. : 53) yaitu sistem pelaksana perubahan dimana pekerja sosial industri menjadi agen perubahan. Sedangkan sistem kliennya adalah perusahaan, dimana secara sadar menginginkan suatu perubahan yang akan datang, yang dilakukan oleh agen perubahan. Untuk sistem sasarannya adalah pekerja dari suatu perusahaan, dimana diperlukan suatu perubahan agar bisa membuat perusahaan lebih baik karena kinerja dan kerja keras pegawainya. Sedangkan sistem kegiatannya adalah pemerintah, karena pemerintah sebagai pemangku kebijakan, demi terjadinya suatu perubahan dengan kebijakan yang dikeluarkan mengenai penerapan pekerjaan sosial industri pada suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Suharto, Edi (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat CSR*.

Bandung : Alfabeta

Tanjaya, Jimmy. 2004. *Tanggung Jawab Sosial Koporasi*. Surakarta : BWI

Suharto, Edi. (2005) . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung

: Humaria

Wibawa, Budhi dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran
Johnson, Wayne (1984), *The Social Services: An introduction*, New York: FE Peacock
Rudito. Bambang dkk. 2003. *Akses Peran Masyarakat “ Lebih Jauh Memahami Community Development”*. Jakarta : ICSD
Jim Ife. 2006 *Community Development* . Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel:

http://www.scribd.com/doc/249462459/K3-Industri#force_seo/ (13-12-2014 ; 22.20)

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_26.htm (14-12-2014 ; 14.30)

<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-community-development/> (15-12-2014 ; 16.00)

<http://kesos.unpad.ac.id/?p=578> (14-12-2014 : 23.33)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh:

Muhammad Indra Andityaputra, Budhi Wibhawa, &
Muhammad Fedryansyah

Email:

Andityohumble@gmail.com; budhiwibhawa@gmail.com;
fedry_cons@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan penerapan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, dimana penulis menemukan indikasi mengenai masih kurang optimalnya penerapan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan data mengenai belum tercapainya target kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan masih banyaknya jumlah pengangguran yang tidak dapat memiliki kesempatan kerja di Sumedang. Penulis menduga bahwa masih kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal yang berhubungan erat dengan kurang maksimalnya implementasi kebijakan mengenai ketenagakerjaan.

Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah “Jika diimplementasikan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja tentang ketenagakerjaan berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, maka penyerapan tenaga kerja lokal di Indonesia akan meningkat”. Landasan teori adalah model proses implementasi kebijakan Adam Jamrozik.

Kata kunci : penyerapan tenaga kerja lokal, penerapan kebijakan ketenagakerjaan

Abstract

The purpose of this study was to analyze the results of research on the implementation of employment policy in Sumedang. This study is based on observations and interviews conducted by the author beginning with the units associated with the implementation of the employment policy in Sumedang, where the authors found indications are lacking regarding optimal implementation of employment policy in Sumedang. It also reinforces the data on the achievement of targets not working Social Service Workers and still the number of unemployed who can not have job opportunities in Sumedang. The authors suspect that is still less than optimal local employment which are closely related to maximal implementation of employment policy.

The hypothesis proposed by the authors is "If the policy is implemented Social Service Workers on employment under the terms of the policy implementation, the

local employment in Sumedang will increase". The foundation of the theory used to test the hypothesis is a model Adam Jamrozik policy implementation process.

Keywords : local employment, employment policies

PENDAHULUAN

Masalah pengangguran masih menjadi masalah utama dalam pembangunan. Khususnya di Indonesia, masalah pengangguran merupakan masalah klasik yang sudah lama belum terselesaikan. Di tahun 2013, jumlah pengangguran nasional mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Persentasenya masih di atas rata-rata provinsi dan pusat. Kemudian persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi dan pusat rata-rata terbilang rendah. Misalnya dalam Kabupaten Sumedang. Dengan tingkat pengangguran yang besar, Kabupaten Sumedang menghasilkan jumlah angkatan kerja yang hanya sedikit tahunnya.

Untuk menangani masalah pengangguran di Kabupaten Sumedang tersebut, sejak tahun 2012, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan penanganan masalah pengangguran. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah. Kebijakan ini disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sesuai dengan Pasal 2 Perda Kabupaten Sumedang bahwa perlu ditetapkannya organisasi dan tata kerja terhadap Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati khususnya di bidang ketenagakerjaan. Pembentukan struktural pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dimaksud diarahkan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pembentukan dinas ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di level daerah khususnya di Kabupaten Sumedang. Adapun dinas ini memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan sosial yang bentuknya pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial dalam konteks secara umum. Sementara secara khusus dalam hal ketenagakerjaan, lembaga mengeluarkan kebijakan sosial berupa program Balai Latihan Kerja untuk menangani masalah terkait kemiskinan, keterlantaran, ketunasosialan, eksploitasi dan diskriminasi hak warga Negara dalam mendapatkan pekerjaan.

Perlindungan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang sebagai salah satu perangkat daerah mewadahi lembaga yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan sosial terkait ketenagakerjaan serta pihak yang berperan sebagai penunjang pelayanan masyarakat yang memiliki peranan yang strategis dalam

menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Sumedang. Selain itu, adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatur penciptaan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat lokal Sumedang dan menangani permasalahan dalam hal ketenagakerjaan. Dalam hal ini, masalah ketenagakerjaan bersifat kompleks dikarenakan semakin terbatasnya lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang semakin bertambah.

Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam hal ini sebagai unsur pembantu Bupati menciptakan suatu program dalam menangani masalah ketenagakerjaan yaitu Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan kerja (UPT BLK). BLK merupakan suatu bentuk kebijakan sosial berupa program yang dibawah oleh Bupati kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pembentukan tersebut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan dibekali keterampilan. Dalam hal ini, keterampilan yang dimiliki oleh para tenaga kerja merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing mereka untuk dapat masuk dalam bursa pencarian kerja potensial, sehingga memiliki peluang besar diterima sebagai tenaga kerja diperusahaan-perusahaan. Adapun gagasan ini muncul dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang memandang penting adanya standarisasi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan menciptakan para calon pencari kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri riil.

Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merancang program yang berpedoman pada tiga pilar utama yaitu **Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan**. Melalui tiga pilar tersebut, diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal sehingga dampak dari masalah ketenagakerjaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama para pencari kerja. Prinsip dasar pelatihan kerja yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) beserta Seksi Pelatihan dan Sertifikasi selama ini antara lain berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM serta berbasis pada kompetensi kerja. Adapun target sasaran pesertanya adalah masyarakat secara umum terutama pencari kerja dan kelompok usaha, namun khusus pelatihan dan pembinaan untuk lembaga pelatihan keterampilan swasta dalam hal ini merupakan kewenangan dari Seksi Pelatihan dan Sertifikasi.

Secara khusus di kawasan Jatinangor, situasi yang terjadi yaitu perubahan dalam struktur pekerjaan. Sektor pertanian kini sudah tidak lagi mendominasi mayoritas profesi pekerjaan. Kini secara revolusi, telah terjadi peralihan menjadi sektor non pertanian. Adapun profesi dari sektor pertanian disini yaitu buruh/karyawan, PNS/TNI serta wirausaha. Penduduk dengan mata pencaharian yang telah disebutkan merupakan profesi yang mayoritas dipilih oleh masyarakat. Sementara penduduk di Kecamatan Jatinangor yang meliputi desa-desa yang masih banyak penganggur atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas.

Secara geografis, jatinangor termasuk kawasan strategis yang menuju ke area perkotaan karena wilayahnya yang strategis dalam mendirikan atau memperluas lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lapangan

pekerjaan seperti foto kopi, toko, rental komputer, wartel, rumah makan, hotel, ojek, laundry dan lain-lain. Berdasarkan studi penelitian Theresia (1998) menunjukkan bahwa keberadaan empat perguruan tinggi di Jatinangor mempengaruhi banyaknya lapangan pekerjaan yang ada.

Mardianta (2001) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seperti kegiatan penyerapan tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh pendatang daripada penduduk lokal. Sementara penduduk di Kecamatan Jatinangor yang meliputi beberapa desa termasuk yang masih banyak penganggur atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas. Pendidikan para pekerja kebanyakan mereka lulusan SD. Hal ini dapat membuktikan bahwa kawasan Jatinangor menghadapi dua persoalan yaitu pengangguran dan kualitas tenaga kerja yang rendah.

BAGIAN ISI

Implementasi kebijakan program ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan *Goals* yang didapat. Menurut Stone (2002, hal. 35-108) menyatakan ada beberapa kategori yang harus ada dalam menentukan *Goals*, yaitu keadilan (*equity*), efisien (*efficiency*), keamanan (*security*), dan kebebasan (*liberty*). Keadilan/*Equity* adalah bagaimana cara melihat distribusi kebijakan program Balai Latihan Kerja (BLK) dilakukan secara merata. Efisiensi/*Efficiency* adalah bagaimana cara melihat penggunaan sumber daya yang tepat dan sesuai kebutuhan. Keamanan/*Security* adalah bagaimana cara melihat pemberian layanan jaminan sosial/jaring pengaman sosial khusus bagi para pencari kerja khusus pada warga lokal. Kebebasan/*Liberty* adalah cara melihat bagaimana memberikan kesempatan kerja terhadap warga lokal Kabupaten Sumedang. Kebijakan program ketenagakerjaan harus memperhatikan empat kategori tersebut, untuk melihat bagaimana *goals* sudah tercapai atau belum tercapai dari kebijakan program ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian tentang implementasi kebijakan tenaga kerja ditinjau melalui *setting goals* terkait permasalahan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi nyata dilapangan.

Implementasi mengacu pada kepada sistem pelaksanaan perangkat-perangkat berupa penetapan oleh penyusun kebijakan, perangkat tindakan yang paling tepat untuk mencapai *objectives*. *Objectives* dimaksud disini yaitu tindak lanjut penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Sumedang dan pemenuhan kebutuhan hak-hak ekonomi calon tenaga kerja lokal. Perangkat tindakan alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penyediaan lapangan tenaga kerja lokal Kabupaten Sumedang sesuai dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Sesuai dengan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 yang dirubah dengan Nomor 2 Tahun 2010 serta dalam Pasal tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja selaku perangkat daerah telah melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan sosial, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, serta bidang perlindungan tenaga kerja. Kemudian juga dapat

dilakukan pemilihan alternatif lain yang akan menuntut penyusun kebijakan untuk mempersiapkan perangkat tindakan alternatif yang dirancang untuk melaksanakan setiap keputusan. Hal ini tentu menuntut pihak yang memiliki kepentingan dalam merumuskan kebijakan sekaligus dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja.

Kebijakan dipandang sebagai landasan dalam praktik pekerjaan sosial (Thompson). Kebijakan merupakan penghubung antara perundang-undangan dengan praktik. Kebijakan sosial merujuk kepada kebijakan yang dirancang untuk merespon masalah sosial dan disiplin akademik yang mempelajari kebijakan-kebijakan tersebut, perancangan kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut.

Kebijakan sosial dikemukakan oleh Jamrozik sebagai sebuah mekanisme untuk mengalokasikan sumberdaya yang ada pada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai *outcome* tertentu sesuai harapan nilai-nilai dominan masyarakat serta tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditentukan.

“social policy is a mechanism for the allocation of a society’s resources for the purpose of achieving certain outcomes that bring to fruition the society’s dominant values and corresponding objectives and goals”.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Jamrozik bawa kebijakan sosial pada hakekatnya berurusan dengan pengaturan hubungan sosial yang bertujuan untuk menegaskan nilai-nilai dan kepentingan tertentu. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi pendekatan yang sesuai yang didesain untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Berbeda dengan Jamrozik, Midgley and Livermore membagi kebijakan sosial kedalam dua aspek. Pertama kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. Kedua, kebijakan sosial dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.

Pandangan Midgley tersebut diperkuat oleh pendapat Deacon yang menyatakan bahwa kebijakan sosial sebagai suatu kajian dan analisis seringkali dipandang tidak memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu politik. Namun, pandangan tersebut terbantahkan ketika melihat pada manfaat dari jaminan sosial atau administrasi dari sistem layanan kesehatan. Pendukung kajian kebijakan sosial justru melihat bahwa kajian tersebut memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosial lainnya ketika mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan menggunakan kerangka kerja analitisnya dan penekanan pada isu keadilan sosial dan kebutuhan manusia.

Bahasan dan kajian kebijakan sosial dapat dilihat dari beragam cara dan saling mengikat satu dengan lainnya. Pada satu sisi, ini merupakan kebijakan dan praktik dalam menyelenggarakan layanan kesehatan, jaminan sosial atau perlindungan sosial, pendidikan, dan perumahan. Sementara kajian kebijakan sosial ini dianggap sebagai bagian dari sektor kebijakan yang dikembangkan di negara-negara kesejahteraan, kajian ini mulai tumbuh dan diterapkan di negara-negara

yang sedang berkembang (Hall and Midgley & Mkandawire). Ketika diterapkan di negara-negara tersebut, perlu dilakukan modifikasi untuk mengubah kerangka berpikir dan merangkul masyarakat miskin sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan (Gough and Woods). Karena itu kajian kebijakan sosial merupakan bagian dari kajian negara kesejahteraan dan kajian pembangunan pada pengembangan negara kesejahteraan. Pemisahan kedua konsep tersebut akan mengaburkan tentang pemahaman kajian pembangunan di negara kesejahteraan serta kebijakan sosial dalam konteks pembangunan yang hanya fokus pada kemiskinan, akibatnya akan melupakan isu keadilan dan universalisme.

Pendekatan lainnya dalam kajian kebijakan sosial adalah dilihat dari isu yang menjadi perhatian dalam peningkatan kesejahteraan sosial di suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan sosial sebagai kajian adalah apa yang dilakukan oleh sarjana kebijakan sosial. Sebuah standar teks kebijakan sosial (Alcock) disusun berdasarkan konsep yang menjadi perhatian dari analisis kebijakan sosial yaitu 'kebutuhan sosial dan masalah sosial', 'persamaan hak dan keadilan sosial', 'efisiensi, keadilan, dan pilihan', 'altruisme, hubungan timbal balik, kewajiban', dan 'pembagian, perbedaan, dan eksklusi'.

Lebih lanjut, Chambers and Wedel menjelaskan keterkaitan antara pekerjaan sosial dengan analisis kebijakan sosial yang dilihat berdasarkan kriteria nilai (*value-based criteria*). Analisis kebijakan sosial dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu *value-analytic of policy analysis*, *value-committed of policy analysis*, dan *value-critical methods of policy analysis*. Chambers memberikan gambaran mengenai kasus pekerja di lahan pertanian yang menggunakan pestisida atau di industri nuklir. Dari kasus tersebut, yang menjadi pertimbangan adalah bukan seberapa besar kompensasi (gaji dan asuransi) yang harus diterima oleh para pekerja tersebut, melainkan bagaimana industri yang beresiko tinggi dapat diijinkan beroperasi jika aktifitas produksi mereka sangat beresiko yang membuat semua rancangan sistem kompensasi akhirnya tidak berguna. Kemudian, Chambers juga memaparkan bahwa pekerjaan sosial dan praktisi pelayanan sosial akan menggunakan *value-critical methods of policy analysis*, yakni ketika menetapkan kriteria tentang "kebaikan" dalam suatu kebijakan sosial dan program layanan sosial. *Value critical analysis* akan membantu memecahkan masalah kebijakan melalui penggunaan kriteria berdasarkan nilai (*value-based criteria*). Chambers juga menyatakan bahwa pekerjaan sosial dalam praktiknya menggunakan banyak perspektif mengenai kondisi manusia, maka pendekatan *value-critical* lebih tepat digunakan untuk pekerjaan sosial karena pendekatan tersebut juga menekankan pada multipel perspektif dalam melihat kondisi manusia.

Teori Kebijakan Sosial

Adam Jamrozik mendefinisikan kebijakan sosial sebagai "mekanisme untuk alokasi masyarakat sebagai sumber daya yang bertujuan mencapai hasil tertentu yang membawa hasil nilai-nilai dominan dalam masyarakat dan menyesuaikan sasaran dan tujuan. Dalam prakteknya, secara khusus tujuan dan sasaran, dan nilai-nilai yang mendasari peran pemerintah dari pihak-pihak yang

berkuasa. Setiap kebijakan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai mendalam dominan dari masyarakat yang melampaui perpecahan politik yang dicontohkan oleh partai politik. Mungkin kebijakan yang dirancang untuk mengubah nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat atau untuk menegaskan kembali dan memperkuat nilai-nilai tersebut. Selain itu, esensi dari kebijakan sosial yaitu :

“Social Policy is concerned with the regulation of social relationships for the purpose of affirming certain values and interests through the implementation of appropriate means designed to achieve corresponding ends.”

Sebagai suatu produk, kebijakan sosial mencakup perundang-undangan dan perintah eksekutif, penafsiran keputusan kehakiman, keputusan administratif, dan program yang sesungguhnya serta pelayanan. Kebijakan sosial dapat menghasilkan suatu hukum yang baru. Produk kebijakan sosial berupa program atau putusan pengadilan. Sebagai kebijakan administratif, kebijakan sosial dapat menjelaskan sistem klasifikasi tenaga kerja atau penetapan dalam menjadi staf professional dengan para agen. Produk kebijakan sosial memerlukan perencanaan yang khusus dalam implementasi. Setelah kebijakan sosial dalam penerapan di tempat dan pengumpulan dana agar implementasi program menjadi tersedia.

Pekerja sosial membuat keputusan tentang cara memberikan pelayanan. Pekerja sosial merancang program dalam melaksanakan tujuan kebijakan untuk mempengaruhi harapan perubahan. Pekerja sosial menghasilkan kebijakan administratif secara jelas yang menegaskan peran, tugas, dan menunjukkan pekerjaan personil agen. Pekerja sosial merumuskan kebijakan dan pedoman prosedur untuk menyampaikan harapan, tanggung jawab, dan ukuran hasil. Dengan menerapkan kebijakan sosial dalam satu sistem sosial yang mengharuskan adanya aturan dan penerapan hubungan keputusan kebijakan terhadap sistem lain yang baik pula.

Kabupaten Sumedang memiliki potensi perindustrian yang cukup besar. Sebagai kawasan yang terus berkembang dan memiliki interaksi sosial dan ekonomi yang sangat fungsional, Kabupaten Sumedang memang seharusnya memiliki agenda yang terintegrasi dalam mengantisipasi berbagai masalah yang ada. Dalam hal ini masalah yang dimaksud ialah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan telah menjadi masalah yang sangat kompleks. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lebih, semua masalah ketenagakerjaan berhulu pada kesempatan kerja.

Secara lebih spesifik, isu atau masalah ketenagakerjaan ini juga seringkali dihubungkan dengan besarnya selisih negatif antara tenaga kerja lokal yang tersedia dengan kemampuan penyerapan bursa pasar kerja yang ada. Hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pihak perusahaan tentunya menginginkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Namun, ketersediaan tenaga kerja di Sumedang dirasakan masih belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa kesempatan kerja (*demand for labour*) sebagai suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Pengangguran dapat memberikan efek yang sangat buruk. Dalam negara Kesejahteraan, pengangguran ini mengurangi jumlah pendapatan yang keluarga atau satu orang terima. Pengangguran jangka pendek, khususnya ketika satu orang menerima kompensasi pengangguran, mungkin hanya memiliki konsekuensi yang kecil. Sementara pengangguran jangka panjang menimbulkan masalah yang panjang. Pengangguran ini memimpin ke arah isolasi yang ekstrem. Pengangguran jangka panjang disini menyebabkan perubahan sifat yang berlangsung setelah tidak bekerja lagi. Misalnya seseorang yang telah dipecat diinterpretasikan sebagai pengangguran yang tidak memiliki kemampuan dan tidak bernilai. Akibatnya, harga diri menjadi turun, depresi dan merasa terasingkan dari masyarakat. Bahkan ketika mereka mendapatkan pekerjaan baru, mereka tidak bisa memulihkan harga dirinya secara penuh.

Asumsi tingginya angka pengangguran di dunia yang semakin banyak dan kompleks. Ketika masyarakat memiliki kesempatan kerja penuh, akan selalu ada beberapa orang yang mampu bekerja tetapi untuk sementara menganggur karena beberapa orang akan berganti profesi. Secara umum, kebanyakan negara mempertimbangkan pekerjaan penuh untuk tetap ada ketika angka pengangguran termasuk rendah dari kekuatan pekerja. Lebih banyak terdapat kekuatan pekerja daripada lowongan pekerjaan. Secara otomatis, banyak industri yang sudah mengurangi angka pekerja yang diperlukan dan membuat pekerjaan tertentu.

Tingginya angka pengangguran juga disebabkan oleh masalah pengangguran struktural. Angka pengangguran yang semakin besar terjadi, karena orang yang menganggur tidak terlatih untuk posisi yang terbuka. Baru-baru ini, banyak pekerjaan kasar yang sudah tidak kelihatan (dalam industri besi). Ketika pekerjaan dengan keahlian yang tinggi sudah dibuka di tempat lain (misalnya lapangan pekerjaan komputer). Orang-orang dilatih untuk menempati posisinya saat ini, sementara tenaga kerja membutuhkan peningkatan ekonomi yang signifikan. Selain itu, akan terus menerus terjadi ketidakharmonisan antara keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi yang kosong dan keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang pengangguran..

Penciptaan program BLK yaitu untuk menangani masalah ketenagakerjaan dan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan dibekali keterampilan. Adapun pelaksanaan BLK mengacu pada pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan

berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan, dan program pemagangan yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jenis pelatihan yang telah disebutkan merupakan jenis pelatihan yang paling banyak menyerap tenaga kerja lokal baik di sektor formal maupun informal. Dengan disertai prosedur yang telah dilakukan dalam menjaring peserta pelatihan diharapkan mereka betul-betul memiliki keterampilan dan keahlian yang optimal. Pada pelaksanaannya, pelatihan berbasis masyarakat lebih banyak melibatkan para pencari kerja yang membutuhkan pelatihan keterampilan baik dari perorangan maupun kelompok. Dalam hal ini, peran aktif Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diperlukan dalam mengarahkan mereka sehingga dapat memiliki keahliannya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dengan harapan mereka dapat memasuki pasar kerja.

Penelitian ini bermaksud untuk melihat hasil dari aplikasi kebijakan ketenagakerjaan di Kab. Sumedang. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana aplikasi program Balai Latihan Kerja berjalan, maka perlu adanya peninjauan dari tujuan sasaran/*goals* program tersebut. Dengan peninjauan *goals* pada program Balai Latihan Kerja dapat diketahui tingkat keberhasilan dari aplikasi kebijakan program tersebut, apakah dinyatakan berhasil atau gagal. Aplikasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan akan diketahui atau tidaknya apabila dilakukan peninjauan *goals*. Selain untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan, tinjauan terhadap *goals* juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan masalah yang ditemukan. Keadaan ini dapat membantu pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat digunakan untuk merancang program yang akan dijalankan selanjutnya.

Peninjauan *goals* yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus kepada penerapan kebijakan ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang, menurut Stone yang meliputi: Keadilan/*Equity*, Efisiensi/*Efficiency*, Keamanan/*Security*, Kebebasan/*Liberty*.

Keadilan/*Equity* adalah bagaimana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang menerapkan kebijakan ketenagakerjaan dan dilakukan secara optimal, dengan mempertimbangkan pula kebutuhan di dalamnya dan apa-apa saja yang diperoleh dari sasaran kebijakan yang dinilai telah mencukupi.

Efisiensi/*Efficiency*; berhubungan dengan bagaimana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang mengalokasikan sumber dayanya untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menerapkan kebijakan ketenagakerjaan. Pada dasarnya adanya hubungan dengan: apa yang mesti dilakukan, dan bagaimana metode yang tepat.

Keamanan/*Security*; berhubungan dengan pemerintah Kab. Sumedang khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang menciptakan keamanan dalam memberikan pelayanan sosial. Hal ini dilakukan untuk memberikan apa-apa saja jenis kebutuhan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pada isu jaminan sosial.

Kebebasan/*Liberty*; berhubungan dengan bagaimana pemerintah Kab. Sumedang khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang menjamin

kebebasan secara individual maupun kolektif. Kebebasan bertindak dari setiap individu di padu dengan sebuah konsep perlindungan diri, dan mencegah kerugian pada orang lain.

PENUTUP

Permasalahan kebijakan yang mengatur penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan kerja berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan, pelayanan penempatan kerja serta pengurangan tingkat pengangguran. Produk kebijakan untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan sudah ada tetapi masalahnya pelaksanaannya tidak dapat menjangkau semua sasaran. Hal ini berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati khususnya di bidang ketenagakerjaan. Diperkirakan upaya mencari solusi penyelesaian masalah kebijakan ketenagakerjaan Sumedang tahun 2014-2017 akan lebih efektif untuk mencapai target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan sistem pendanaan serta penurunan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.

Agar masalah kebijakan ketenagakerjaan dapat mencapai penyelesaian yang memenuhi harapan pihak pekerja dan pengusaha, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dan mediator yang adil untuk mengembalikan fungsi kebijakan ketenagakerjaan yang sebenarnya

DAFTAR RUJUKAN

- Bappeda Kab. Sumedang. 2009. Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan Sumedang.
- Depnakertrans. 1998-2005. Depnakertrans situasi tenaga kerja dan kesempatan kerja di Sumedang. Jakarta: Depnakertrans RI.
- Graziano A M, Raulin M L. 1989. Research methods: a process of inquiry. New York: Harper Collins Publishers.
- Jamrozik, Adam. 2009. Social Policy In The Post – Welfare state : Australian Society In The Changing World.
- Midgley, James. 1995. Social Development. California : British Library Cataloguing In Publicaton.
- Oentarto S M, Suwandi I M, Riyadmadji D. 2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Priyono E. 2002. Situasi ketenagakerjaan Sumedang dan tinjauan kritis. Jurnal Analisis Sosial. (7)1: 1-15.



ISBN: 978-602-0810-45-4

